BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), setiap entitas pelaporan maupun entitas akuntansi wajib menyelenggarakan proses akuntansi dan menyajikan laporan keuangan secara periodik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Penyelenggaraan akuntansi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas yang merupakan pencatatan, pengelompokan transaksi keuangan dan penyiapan laporan keuangan Pemerintah Daerah sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dikelolanya. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas
   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen
   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.
c. Transparansi
   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
d. Keseimbangan Antargenerasi
   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
e. Evaluasi Kinerja
   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memuat pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai informasi untuk membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi mengenai:

a. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
   LRA merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
   LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berupa Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
c. Neraca
   Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
d. Laporan Operasional (LO)
   LO merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Disamping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas.
e. Laporan Arus Kas (LAK)
   LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir.

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK merupakan komponen laporan keuangan yang meliputi penjelasan, daftar rincian dan/atau analisis atas laporan keuangan dan pos-pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, dan LPE. CaLK juga penyajian informasi yang diharuskan atau dianjurkan oleh SAP serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian kewajaran laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan/atau komitmen-komitmen lainnya.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 17 Properti Investasi

12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2. Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
4.3. Kebijakan Akuntansi Beban
4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja
4.5. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
4.6. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas
4.7. Kebijakan Akuntansi Piutang
4.8. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka
4.9. Kebijakan Akuntansi Investasi
4.10. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4.11. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah
4.12. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan
4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
4.14. Kebijakan Akuntansi Properti Investasi
4.15. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
4.16. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
4.17. Kebijakan Akuntansi Koreksi

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas
5.6. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN
BAB 7 PENUTUP

BAB 2
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

1.1. Ekonomi Makro

1.1.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tumbuh positif dan tangguh di tengah ketidakpastian global. Pada Tahun 2024 Perekonomian Jateng tumbuh sebesar 4,95 persen (*c-to-c*), walaupun angka tersebut melambat dibanding Tahun 2023 yang tumbuh 4,97 persen (*c-to-c*). Capaian ekonomi Jawa Tengah Tahun 2024 ini lebih baik dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi di Pulau Jawa yaitu sebesar 4,92 persen (*c-to-c*), meskipun lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 5,03 persen (*c-to-c*). Kontribusi ekonomi Jawa Tengah tertinggi dari sisi pengeluaran berasal dari konsumsi rumah tangga, ekspor dan investasi. Sementara dari sisi lapangan usaha, menjadi kontributor tertinggi yang berasal dari sektor industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan konstruksi.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada Tahun 2024 merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Kawasan Jawa setelah DIY (5,03%; *c-to-c*), Banten (4,79%; *c-to-c*) serta diatas dengan pertumbuhan Jawa Timur (4,93%; *c-to-c*) dan DKI Jakarta (4,90%; *c-to-c*). Jawa Tengah memiliki kontribusi sebesar 14,48 persen terhadap perekonomian Jawa atau sebesar 8,25 persen terhadap seluruh provinsi di Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga, Ekspor dan Investasi. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 3,05 persen (*c-to-c*), ekspor tumbuh 4,25 persen (*c-to-c*), investasi tumbuh 1,88 persen (*c-to-c*), ditopang oleh proses pengerjaan Proyek Strategis Nasional dan proyek swasta di Jawa Tengah yang masih berlangsung.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi didorong oleh kenaikan sektor industri pengolahan serta konstruksi. Sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 1,15 persen (*c-to-c*) sejalan dengan peningkatan impor bahan baku industri. Impor bahan baku meningkat sebesar 4,22 persen (*yoy*), terutama bersumber dari impor bahan baku alas kaki akibat kenaikan demand di AS dan Eropa. Sementara itu, peningkatan kinerja di sektor konstruksi yang tumbuh sebesar 0,83 persen (*c-to-c*).

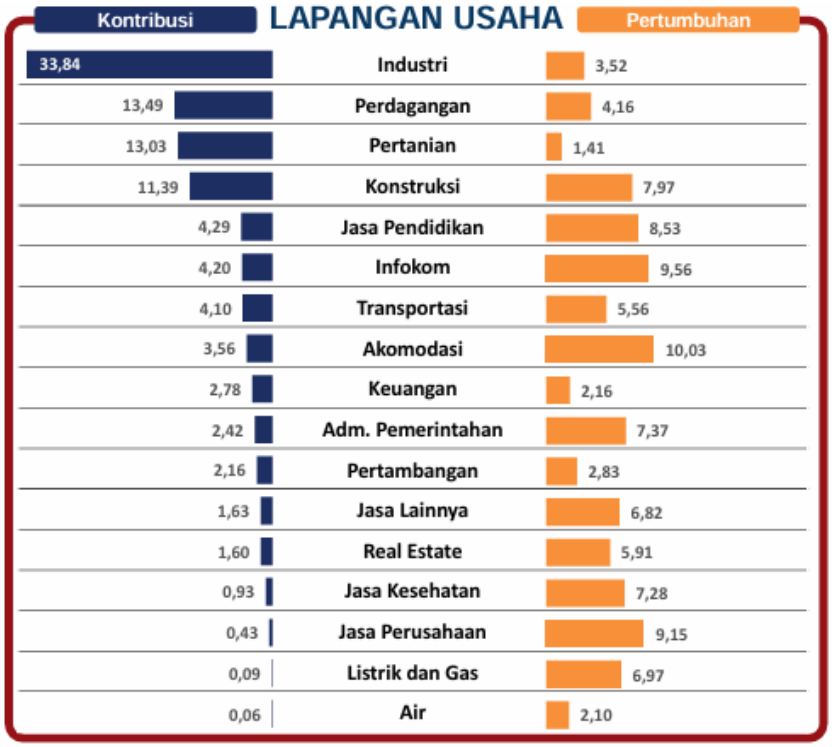


Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019 – 2024 (*c-to-c*)

Pertumbuhan ekonomi dapat digambarkan melalui sisi produksi (*supply side*) maupun sisi permintaan akhir (*demand side*). PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Struktur ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2024 didominasi oleh tiga (3) lapangan usaha yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang memiliki kontribusi sebesar 33,84 persen, Lapangan Usaha Perdagangan berkontribusi sebesar 13,49 persen, sementara Lapangan Usaha Pertanian berkontribusi sebesar 13,03 persen.



Sumber: BPS Jateng, 2025.

Gambar 1.2
Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (*c-to-c*, %)

Semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 adalah Akomodasi Makan dan Minum yang tumbuh sebesar 10,03 persen, kemudian disusul oleh Informasi dan Komunikasi tumbuh sebesar 9,56 persen, dan kemudian Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 9,15 persen. Sementara itu, lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Jawa Tengah seperti Industri Pengolahan hanya sebesar 3,52 persen, Perdagangan tumbuh sebesar 4,16 persen, sementara itu Pertanian tumbuh 1,41 persen.

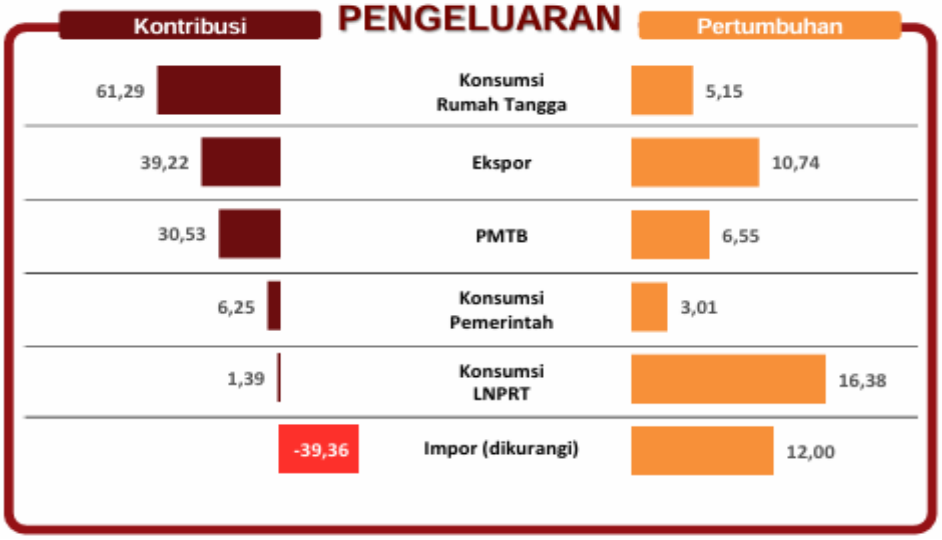
Lapangan usaha yang memiliki peran dominan dalam struktur perekonomian Jawa Tengah juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Konstruksi.

Tabel 1.1
PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 (Triliun Rupiah)

Sumber Pertumbuhan Ekonomi		Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	126.11	127.07	130.76	131.35	133,20
2	Pertambangan dan Penggalian	21.39	22.33	20.94	21.23	21,83
3	Industri Pengolahan	325.62	333.24	346.17	361.13	373,85
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.1	1.17	1.21	1.30	1,39
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.70	0.74	0.75	0.78	0,80
6	Konstruksi	99.38	106.70	108.66	115.25	124,44
7	Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	139.23	147.31	153.67	161.25	167,96
8	Transportasi dan Pergudangan	23.56	24.34	42.10	45.52	48,05
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	30.77	32.60	38.13	42.42	46,67
10	Informasi dan Komunikasi	58.74	62.29	63.85	70.66	77,42
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	27.11	27.55	27.69	28.29	28,90
12	Real Estate	18.73	19.13	20.11	21.49	22,76
13	Jasa Perusahaan	3.70	3.82	4.05	4.34	4,74
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	24.69	24.53	24.92	25.94	27,86
15	Jasa Pendidikan	38.95	38.97	39.59	41.95	45,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.45	9.47	9.71	10.278	11,02
17	Jasa lainnya	15.98	16.07	17.96	19.29	20,61
	PDRB	965.23	997.32	1.050,28	1.102,47	1.157,03

Sumber: BPS Jateng, 2025.

Sedangkan jika dilihat dari sisi pengeluaran semua komponen pengeluaran juga mengalami pertumbuhan yang positif. Tahun 2024 struktur ekonomi didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, selanjutnya Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah), sementara itu Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto.



Sumber: BPS Jateng, 2024.

Gambar 1.3
Laju dan Kontribusi Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Menurut Komponen Pengeluaran Tahun 2024

Pada Tahun 2024 pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 16,38 persen seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas partai politik pada pemilu 2024. Kemudian Komponen Pengeluaran Impor tumbuh sebesar 12 persen, disusul oleh Komponen Pengeluaran Ekspor yang tumbuh sebesar 10,74 persen. Sementara Konsumsi Rumah Tangga dengan kontribusi 61,29 persen tumbuh sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan positif konsumsi

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 (Triliun Rupiah)

No	Komponen Pengeluaran	Harga Konstan 2010 (Triliun Rupiah)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	573.98	584.45	616.68	651.72	685,31
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.20	10.33	10.84	11.64	13,55
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	61.00	61.28	61.29	62,97	63,87
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	278.02	297.03	302.95	315,76	336,45
5	Perubahan Inventori	13.80	9.48	11.99	12.53	8,70
6	Ekspor Barang dan Jasa	134.11	178.46	212.98	435.36	482,14
7	Impor Barang dan Jasa	105.88	143.70	166.45	387,51	433,99
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	965.23	997.32	1.050,28	1.102,47	1.157,03

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)

Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2024 berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 mencapai Rp1.157.025,94 miliar naik dari Tahun 2022 sebesar Rp1.102.470,09 miliar (naik sebesar 4,95 persen), sedangkan untuk Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) capaian Tahun 2024 sebesar Rp1.817.776,96 miliar. Empat komponen pengeluaran yang memiliki peran dominan dalam struktur perekonomian Jawa Tengah juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp685,31 triliun; Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp336.45 triliun; Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp482.14 triliun.

Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2024 menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku didominasi oleh Industri Pengolahan sebesar 33,84 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,49 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,03 persen; dan Konstruksi sebesar 11,39 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,75 persen. Data lengkap struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2020–2024 menurut lapangan usaha, dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2024

Kategori	Komponen (%)					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	14,30	13,86	13,57	13,23	13,03
B	Pertambangan dan Penggalian	2,46	2,58	2,42	2,25	2,16
C	Industri Pengolahan	34,44	34,30	33,94	33,99	33,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,10	0,09	0,09	0,09
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
F	Konstruksi	10,56	11,13	11,04	11,23	11,39
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,50	13,76	13,61	13,61	13,49
H	Transportasi dan Pergudangan	2,24	2,26	3,80	4,10	4,10
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,99	3,03	3,29	3,40	3,56
J	Informasi dan Komunikasi	4,26	4,29	4,02	4,09	4,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,99	3,02	3,01	2,89	2,78
L	Real Estate	1,71	1,67	1,63	1,62	1,60
M,N	Jasa Perusahaan	0,40	0,40	0,40	0,41	0,43
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,71	2,53	2,40	2,36	2,42
P	Jasa Pendidikan	4,74	4,55	4,23	4,16	4,29

Kategori	Komponen (%)					
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,01	0,97	0,92	0,92	0,93
R,S,T,U	Jasa lainnya	1,53	1,48	1,57	1,59	1,63
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Data BPS Jateng (diolah)
*Keterangan: * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara*

Sedangkan struktur PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang mencakup lebih dari separuh PDRB Jawa Tengah yaitu sebesar 61,29 persen (naik dari tahun 2023 sebesar 60,94 persen); diikuti oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa (termasuk Ekspor Antar Daerah) sebesar 39,22 persen (naik dari tahun 2023 sebesar 37,33 persen); komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 30,53 persen (naik dari tahun 2023 sebesar 29,99 persen); Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 6,25 persen (melambat dari tahun 2023 sebesar 6,38 persen); Komponen PK-LNPRT sebesar 1,39 persen (meningkat dari tahun 2023 sebesar 1,25 persen); dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,68 persen (melambat dari tahun 2023 sebesar 1,02 persen). Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa (termasuk Impor Antar Daerah) sebagai faktor pengurang dalam PDRB memiliki peran sebesar 39,36 persen (naik dari tahun 2023 sebesar 36,91 persen). Data lengkap seperti pada Tabel 1.4 berikut

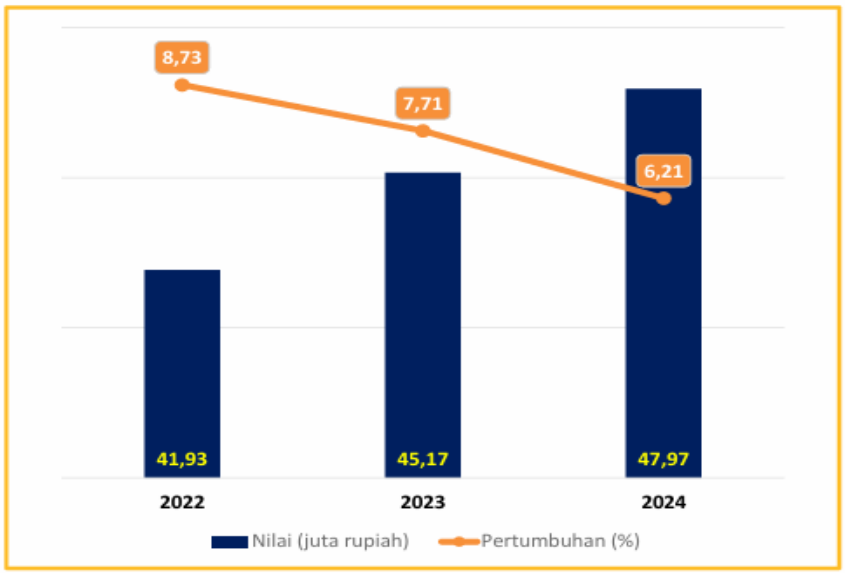
Tabel 1.4.
Struktur PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2020 – 2024

Komponen		Struktur (%)				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,02	60,19	60,35	60,94	61,29
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,19	1,18	1,22	1,25	1,39
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7,32	7,10	6,54	6,38	6,25
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	31,01	31,78	30,69	29,99	30,53
5	Perubahan Inventori	0,95	0,84	0,99	1,02	0,68
6	Ekspor Barang dan Jasa	36,30	40,01	40,33	37,33	39,22
7	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	37,39	41,10	40,12	36,91	39,36
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Jateng, 2024.
*Keterangan: * Angka Sementara*
*** Angka Sangat Sementara*

1.1.2. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2022-2024, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2024 PDRB Per Kapita Jawa Tengah sebesar 47,97 Juta Rupiah mengalami pertumbuhan sebesar 6,21 persen dibanding dengan tahun 2023 yang sebesar 45,17 Juta Rupiah. Jika dibandingkan dengan Nasional, PDRB Per kapita Jawa Tengah masih di bawahnya, namun selalu menunjukkan tren yang membaik atau naik.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2025.

Gambar 1.4
PDRB Per Kapita Jawa Tengah Dibandingkan Nasional Tahun 2022-2024

1.1.3. Inflasi

Pada tahun 2024 terjadi penurunan laju inflasi menjadi sebesar 1,67 persen, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi Nasional. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen makanan dan minuman. Penyebab utama inflasi bulan Desember 2024 adalah emas perhiasan, beras, minyak goreng, kopi bubuk, Sigaret Kretek Mesin (SKM), bahan bakar rumah tangga, nasi dengan lauk, mobil, bawang putih, dan lain sebagainya. Sedangkan penahan utama inflasi di Jawa Tengah adalah penurunan harga cabai merah, cabai rawit, bensin, telepon seluler, dan cabai hijau.



Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 1.5
Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2016 – 2024 (%)

1.1.4. Indeks Gini

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan pengeluaran antar penduduk. Dengan nilai berkisar 0-1, semakin tinggi nilai menunjukan ketimpangan yang semakin tinggi. Kondisi ketimpangan di Jawa Tengah yang digambarkan dari angka g*ini ratio* pada periode 2020-2024 terlihat berfluktuasi dan mencapai angka tertinggi pada Maret 2022 yaitu sebesar 0,374. Pada September 2024 Gini Ratio membaik dibandingkan September 2023, yaitu dari 0,369 menjadi 0,364, atau turun/membaik sebesar 0,005 poin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, rasio gini di perkotaan pada September 2024 sebesar 0,392 mengalami penurunan sebesar 0,007 point dibandingkan rasio gini pada Maret 2023 yang sebesar 0,399. Sementara itu di daerah perdesaan rasio gini pada September 2024 sebesar 0,317 mengalami penurunan sebesar 0,001 point dibandingkan rasio gini Maret 2023 yang sebesar 0,318. Dari data tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan lebih tinggi di perkotaan dibandingkan perdesaan.

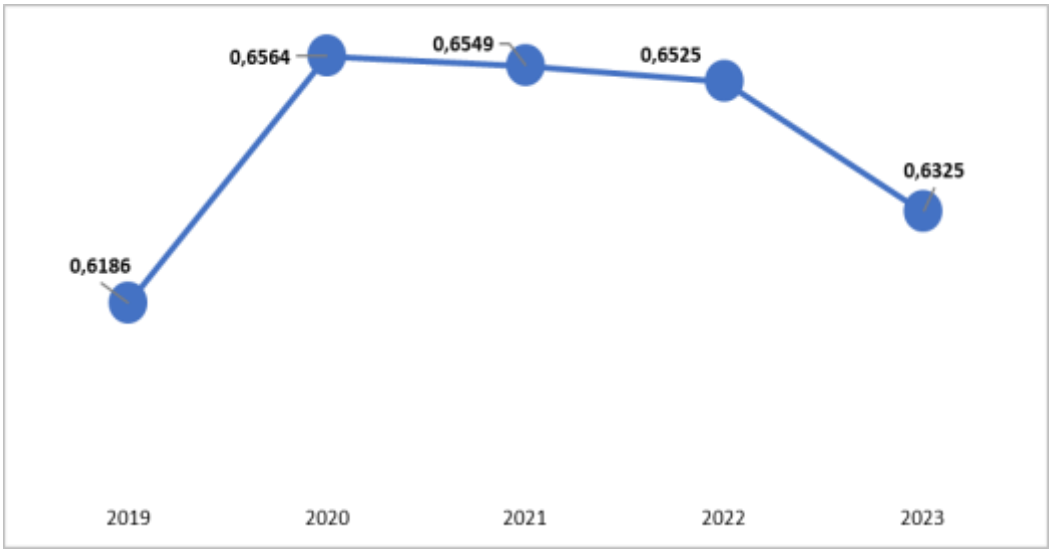


Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 1.6
Gini Rasio Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

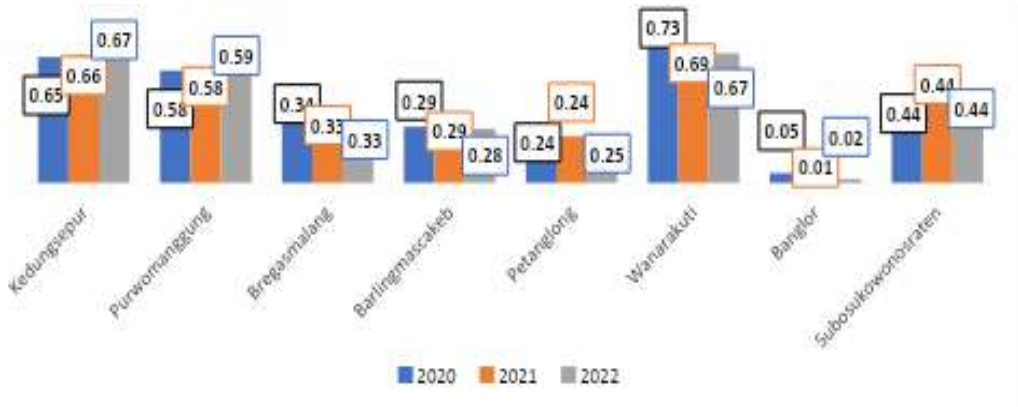
1.1.5. Indeks Williamson

Indeks Williamson merupakan suatu instrument dalam pengukuran pembangunan wilayah di suatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah lain yang lebih tinggi. Apabila nilai Indeks Williamson mendekati angka 0 maka pembangunan suatu wilayah diangkap sangat merata, sedangkan apabila nilai indeks semakin jauh dari 0, maka terdapat ketimpangan pembangunan di suatu wilayah. Pada tahun 2023 Indeks Williamson Jawa Tengah sebesar 0,6325 mengalami perbaikan dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 0,6562 namun angka tersebut masih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi di tahun 2019 yang sebesar 0,6186. BPS belum menyampaikan data Indeks Williamson Tahun 2024.



Sumber: BPS Jateng, September 2024

Gambar 1.7
Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024.

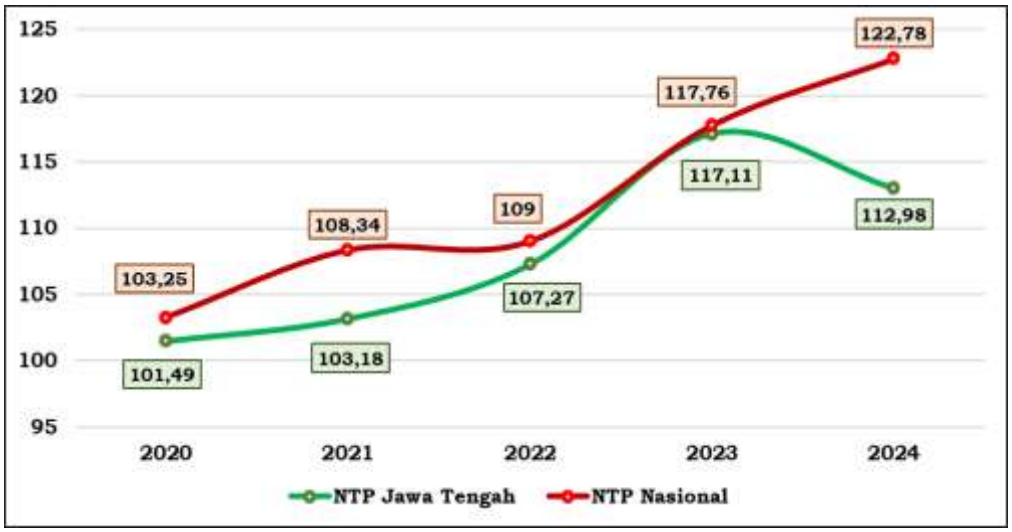
Gambar 1.8
Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Jika melihat Indeks Williamson berdasarkan wilayah pengembangan, pada tahun 2022 wilayah pengembangan Wanarakuti lebih tinggi dibandingkan wilayah pengembangan yang lainnya yaitu sebesar 0,667. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan pembangunan antarwilayah yang cukup besar. Wilayah pengembangan yang kategori ketimpangannya sedang adalah wilayah Purwomanggung. Sementara itu Banglor memiliki Indeks Williamson yang paling rendah yang menandakan bahwa wilayah tersebut pembangunannya merata, dimana karakteristik daerahnya hampir mirip yaitu pertanian dan pariwisata. BPS tidak mempublish data Indeks Williamson Per Wilayah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

1.1.6. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani dan untuk membandingkan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP juga menunjukan daya tukar dari harga pokok produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin tinggi tingkat kemampuan/daya beli petani.

Pada kurun waktu tahun 2020-2024 perhitungan dan rilis NTP dibandingkan dengan Tahun dasar 2019, NTP per Bulan Desember terendah pada Tahun 2020 yaitu sebesar 101,49, namun kembali meningkat dari Tahun 2021 hingga Tahun 2023 117,11. NTP pada tahun 2023 merupakan NTP tertinggi selama 5 tahun terakhir. Walaupun pada NTP Desember Tahun 2024 Jawa Tengah merupakan yang tertinggi di Pulau Jawa, namun mengalami penurunan sebesar 4,13 dibandingkan NTP Desember 2023.

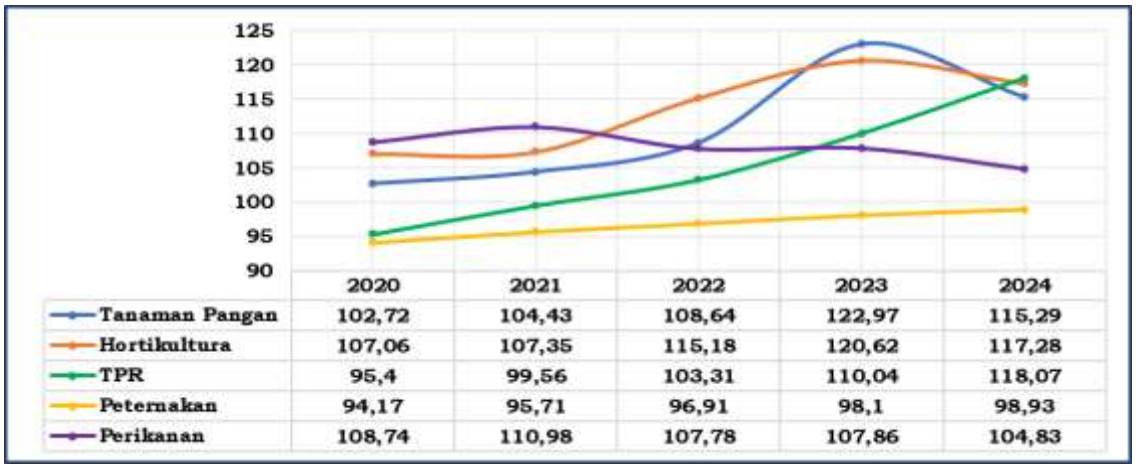


Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 1.9
Nilai Tukar Petani Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024

Dilihat berdasarkan sub sektor, pada kurun waktu tahun 2020-2024, masing-masing sub sektor cenderung fluktuatif. Pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat cenderung mengalami tren yang meningkat. Tren yang meningkat menunjukkan bahwa sektor pertanian di Jawa Tengah memiliki tingkat kemampuan dan daya beli yang relatif stabil.

Namun sebaliknya, sub sektor perikanan memiliki tren yang menurun walaupun pada tahun 2023 mengalami kenaikan dengan jumlah yang tidak signifikan. Selain itu, sub sektor peternakan masih berada pada angka di bawah 100 yang menunjukkan bahwa indeks harga yang diterima peternak lebih kecil dari pada indeks harga yang dibayar. Pada tahun 2024, penurunan NTP dibandingkan tahun 2023 dipicu oleh penurunan NTP sub sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perikanan.



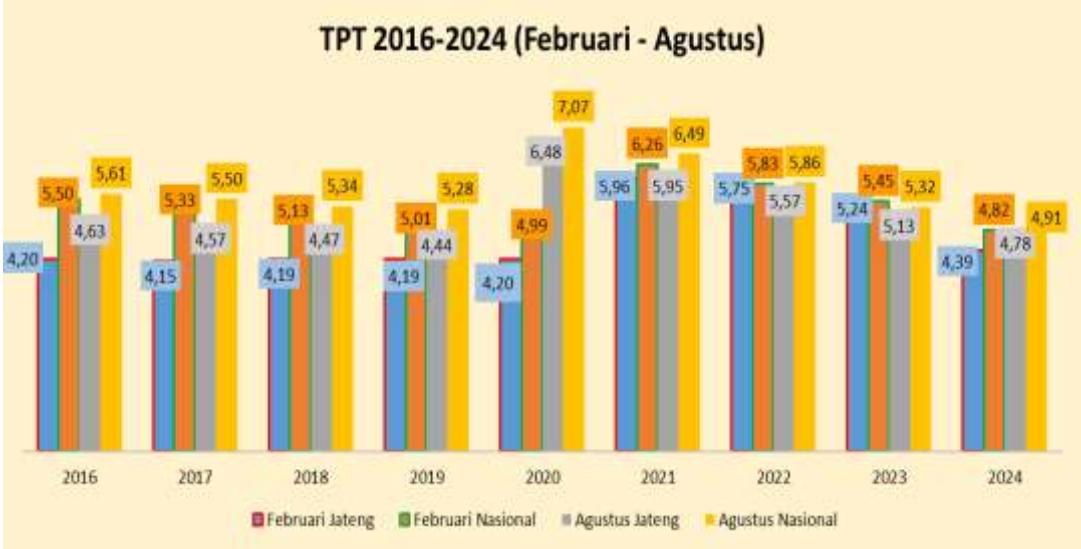
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan	102,72	104,43	108,64	122,97	115,29
Hortikultura	107,06	107,35	115,18	120,62	117,28
TPR	95,4	99,56	103,31	110,04	118,07
Peternakan	94,17	95,71	96,91	98,1	98,93
Perikanan	108,74	110,98	107,78	107,86	104,83

Sumber: BPS, 2024
Keterangan: Data NTP adalah angka NTP Bulan Desember tiap tahun

Gambar 1.10
Gambar 2.1. Nilai Tukar Petani (NTP) Sub Sektor di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

1.1.7. Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Agustus 2024 sebesar 4,78 persen turun sebesar 0,35 persen poin dari kondisi TPT pada Agustus 2023 yang sebesar 5,13 persen. Di tingkat nasional TPT Agustus 2024 lebih besar dari Jawa Tengah yaitu sebesar 4,91 persen turun sebesar 0,41 persen point dibandingkan dengan TPT Nasional bulan Agustus 2023.



Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 1.11
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2024 (Februari-Agustus) (%)

1.1.8. Kemiskinan

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah digambarkan dengan kondisi kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2020-2024 cenderung mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2024 sebesar 9,58 persen (3.396,34 ribu orang) menurun sebesar 0,89 persen dibanding periode Maret 2024 sebesar 10,47 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 menurun sebesar 1,19 persen (395,16 ribu orang) dari 10,77 persen (3.791,50 ribu orang).

Berdasarkan daerah tempat tinggal selama setahun terakhir yaitu tahun 2023–2024, persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 1,42 persen (257,25 ribu orang) dari 11,87 persen (1.969,84 ribu orang) menjadi 10,45 persen (1.712,59 ribu orang). Sementara di perkotaan persentase penduduk miskin di perdesaan turun sebesar 0,95 persen (137,91 ribu orang) dari 9,78 persen (1.821,66 ribu orang) menjadi 8,83 persen (1.683,75 ribu orang).

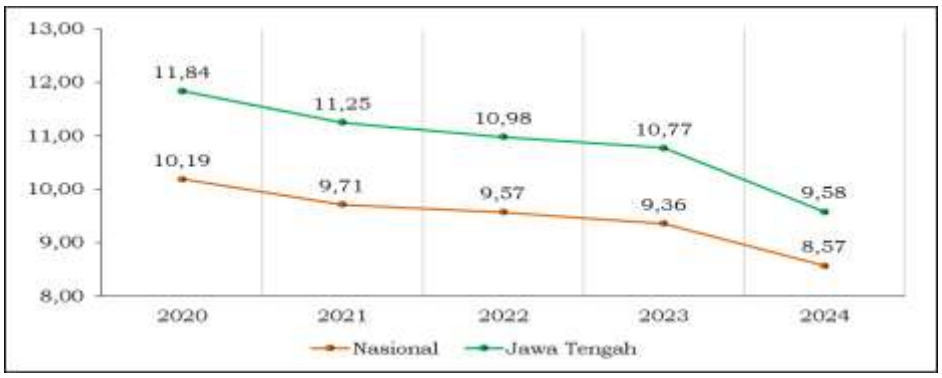
Tabel 1.5
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2020	1.890,49	2.229,44	4.119,93	10,57	13,20	11,84

Tahun	Penduduk Miskin					
	(ribu orang)			(%)		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
2021	1.847,09	2.086,92	3.934,01	10,16	12,44	11,25
2022	1.852,17	2.006,06	3.858,23	10,02	12,05	10,98
2023	1.821,66	1.969,84	3.791,50	9,78	11,87	10,77
2024	1.683,75	1.712,59	3.396,34	8,83	10,45	9,58

Sumber: BPS Jateng, 2024
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah masih berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan tingkat kemiskinan Jawa Tengah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejalan dengan tingkat kemiskinan Nasional, sebagaimana gambar di bawah. Dengan demikian pada periode tersebut, upaya penanggulangan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sudah mendukung upaya penurunan kemiskinan Nasional.



Sumber: BPS, Rilis Periode September 2024.
Catatan: Angka kemiskinan periode September 2023 tidak dirilis BPS, data tahun 2023 periode Maret

Gambar 1.12
Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah dan Nasional
Tahun 2020-2024

1.1.9. IPM (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang direpresentasikan dalam 3 dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kehidupan layak. Ketiga dimensi tersebut diukur menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai dimensi pendidikan,

Usia Harapan Hidup (UHH) sebagai dimensi kesehatan serta Pengeluaran per kapita yang disesuaikan sebagai dimensi kehidupan layak. Perhitungan IPM menggunakan metode rata-rata *geometric*, artinya capaian satu komponen IPM tidak dapat digantikan oleh capaian komponen lainnya, sehingga ketiga dimensi IPM yang terdiri dari 4 komponen tersebut memiliki kepentingan yang setara. Capaian IPM Jawa Tengah mengalami peningkatan selama kurun waktu 2020 hingga 2024, namun masih berada di bawah capaian nasional, demikian pula dengan laju pertumbuhannya.

Pada tahun 2024, IPM Jawa Tengah naik 0,65 poin menjadi 73,87 dari sebelumnya 73,39. Kenaikan ini sedikit melambat jika dibandingkan pada tahun 2023 yang naik 0,81 poin, demikian pula tahun 2022 yang naik 0,87 poin. Semakin meningkatnya nilai IPM ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia semakin lebih baik, sejalan dengan peningkatan kualitas pembangunan manusia secara nasional.



Sumber: BPS Jateng, 2024

Gambar 1.13
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024

1.2. Kebijakan Keuangan

Dalam rangka menggerakkan jalannya roda organisasi guna pencapaian tujuan, pemerintahan daerah memerlukan dukungan berbagai sumber daya. Keuangan daerah merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menciptakan *good governance* dan *clean government* melalui tata kelola pemerintahan dengan baik sehingga keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 disusun dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

1.2.1. Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Akan Dilaksanakan Di Daerah

Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2024 diarahkan pada peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas, dengan fokus pada:

a. Memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan Jawa Tengah, mendorong pertumbuhan penanaman modal, meningkatkan rasio kemandirian fiskal dengan memperbesar rasio pendapatan asli daerah, didukung dengan perbaikan pengelolaan keuangan daerah dan aset, serta menjaga kondusivitas wilayah.
b. Meningkatkan pemerataan ekonomi dengan penciptaan akses ekonomi produktif dan perluasan lapangan kerja, pemerataan akses pelayanan dasar bagi penduduk miskin, serta peningkatan konektivitas wilayah dan infrastruktur dasar.
c. Meningkatkan upaya pengendalian inflasi daerah melalui penguatan kapasitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan koordinasi lintas sektor, menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat, serta meningkatkan keterjangkauan akses pangan beragam dan berkualitas.
d. Meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja di perusahaan dan calon tenaga kerja, kompetensi tenaga kerja dengan pemagangan sesuai dunia usaha dan dunia industri (DUDI), pemberdayaan angkatan kerja, penempatan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan calon tenaga kerja dan instruktur, serta kompensasi yang memadai.
e. Meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha pertanian melalui penguatan database petani dan peningkatan kompetensi dan ketrampilan, peningkatan kapasitas usaha, perlindungan, dan akses pemasaran.
f. Mendorong upaya pembangunan ekonomi hijau (*green economy*) untuk menciptakan peluang kerja baru dan investasi baru khususnya pada *green jobs* dan *green investment* dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
g. Mendorong pengembangan ekonomi syariah melalui penguatan rantai nilai halal, penguatan sektor keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemanfaatan dan penguatan ekonomi digital.

1.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

Penetapan arah kebijakan pembangunan daerah dan prioritas daerah Jawa Tengah tahun 2024 berpedoman pada RPD Tahun 2024 - 2026, serta dengan mempertimbangkan hasil identifikasi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2024 berdasarkan pada RPD Tahun 2024-2026 diarahkan pada tema pembangunan daerah yaitu **Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Merata, Didukung Dengan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas**.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut dijabarkan dalam empat prioritas daerah (PD) dan fokusnya sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infrastruktur yang merata dan berkualitas;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.

1.2.3. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ditempuh melalui berbagai tahapan kebijakan, mulai dari: kebijakan perencanaan, target pendapatan dan upaya-upaya mencapai target.

1.2.3.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kinerja pendapatan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan realisasi penjualan industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya.

Kinerja pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah setelah pandemi Covid 19 berangsur membaik, secara agregat realisasi mengalami peningkatan. Beberapa pos yang belum mencapai target dikarenakan tingkat kepatuhan wajib pajak, penurunan penjualan kendaraan bermotor dan perubahan iklim yang menyebabkan potensi air permukaan menurun.

1.2.3.2. Target Pendapatan Daerah

Dalam RKPD Tahun 2024, pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 diproyeksikan sebesar 27,114 triliun rupiah. Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar 18,50 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,59 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah. Sementara itu dalam APBD Tahun 2024, pendapatan daerah ditetapkan sebesar 26,831 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 18,216 triliun rupiah, pendapatan transfer sebesar 8,591 triliun rupiah, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,75 miliar rupiah. Mempertimbangkan kondisi realisasi tersebut, dengan asumsi proyeksi pertumbuhan ekonomi tetap sebesar 4,70 – 5,50 persen, serta kebijakan pemerintah pusat terkait dana transfer ke daerah, proyeksi pendapatan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 sebesar 27,230 triliun rupiah, dengan PAD sebesar 18,594 triliun rupiah, pendapatan

transfer sebesar 8,611 triliun rupiah, dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi sebesar 25,593 miliar rupiah.

Sampai dengan akhir tahun 2024, pendapatan daerah telah terealisasi sebesar 96,87 persen. Realisasi terbesar adalah pada komponen Pendapatan Asli Daerah terealisasi 17,650 triliun rupiah atau 94,93 persen. Selanjutnya pada komponen Pendapatan Transfer terealisasi 8,701 triliun rupiah atau 101,05 persen, dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terealisasi 26,343 miliar rupiah atau 102,93 persen.

1.2.3.3. Upaya-upaya Pemerintah Daerah dalam mencapai target Pendapatan

Upaya peningkatan kinerja pendapatan daerah akan terus ditempuh untuk mencapai target pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan pendapatan pada semua sumber melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:

a) Pemenuhan sarana dan prasarana peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
b) enambahan titik layanan dengan bekerjasama dengan BUMDes, BPR BKK, Mall Pelayanan Publik, dan Badan Usaha lainnya;
c) Kerjasama dengan Kabupaten/Kota, desa, Kepolisian, dan dunia usaha lainnya;
d) Sosialisasi kesadaran pembayaran pajak bekerjasama dengan Babinkamtibmas, Ormas, Bumdes;
e) Menyelenggarakan Auto Show serta bekerja sama dengan Gaikindo dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024;
f) Pelayanan pajak kendaraan bermotor di perusahaan besar;
g) Meningkatkan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota, serta POLRI;
h) Pemutakhiran data objek retribusi;
i) Pengembangan sistem informasi retribusi;
j) Optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan;
k) Sosialisasi peraturan dan/atau penyuluhan terkait retribusi dan pendapatan lain;
l) Penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
m) Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha; dan
n) Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah agar dapat menarik minat investor dan dikerjasamakan sebagai sumber pendapatan daerah.

1.2.4. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah pada tahun anggaran 2024 terserap secara optimal dengan realisasi serapan sebesar 95,16 persen. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 580,004 miliar rupiah berada pada Kas Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar 130,694 miliar rupiah dan Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar 435,442 miliar rupiah. Kas pada RKUD digunakan sebagai manajemen kas untuk pembayaran Belanja Gaji bulan Januari Tahun

2025 dimana Pendapatan Asli Daerah maupun Pendapatan Transfer belum sepenuhnya terealisasi. Sehubungan dengan SILPA sesuai rencana manajemen kas Januari, maka penyerapan APBD Tahun 2024 sudah cukup optimal. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan APBD sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak selesai dilaksanakan.

Secara umum realisasi belanja pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Pegawai meningkat seiring penambahan pegawai ASN baik pelayanan dasar (Pendidikan dan Kesehatan) maupun pada dinas teknis melalui PPPK dan dibayarnya tambahan penghasilan PPPK yang telah memenuhi syarat, peningkatan belanja barang dan jasa dari realisasi belanja BOS, peningkatan belanja Hibah serta realisasi BTT yang meningkat untuk dana kebencanaan serta penyelenggaraan kegiatan Peparnas. Realisasi belanja yang belum optimal dapat berasal dari efisiensi negosiasi kontrak dan beberapa pekerjaan yang tidak selesai dan/atau putus kontrak.

Pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024 mengarahkan kebijakan belanja daerah diperuntukkan dalam rangka:

a. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, yaitu:
    i. Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas;
    ii. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
    iii. Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
    iv. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
b. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada:
    i. penurunan stunting menjadi 14 persen;
    ii. penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen;
    iii. pengendalian inflasi daerah;
    iv. implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
    v. implementasi Desa Anti Korupsi.
c. Dukungan 10 Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan dan 10 persen fungsi kesehatan; sedangkan mandatory untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;
e. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
f. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;

g. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
h. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2023 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
i. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024

1.2.5. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Selama kurun waktu tahun 2022-2024 penerimaan pembiayaan didapatkan dari SiLPA tahun sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun yang sama diperuntukkan bagi penyertaan modal dan pembentukan dana cadangan. Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 di prioritaskan pada penggunaan SILPA tahun 2023 serta pencairan Dana Cadangan untuk Pilkada, sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk Penyertaan Modal sebagai bentuk penyehatan BUMD.

BAB 3
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

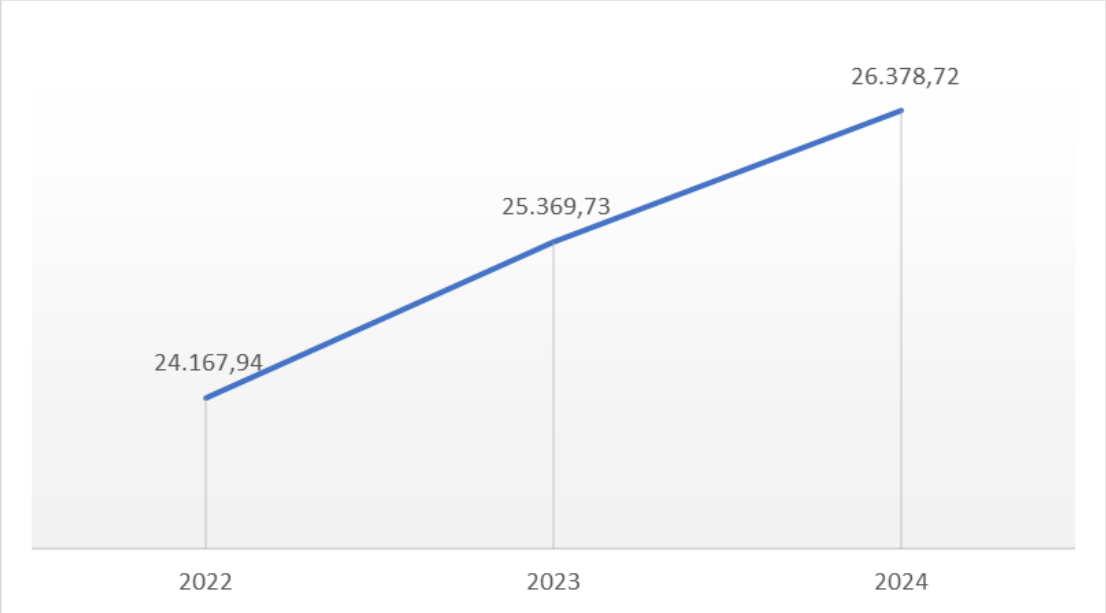
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 masih dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kebijakan pada harga bahan bakar minyak, perkiraan perkembangan pemasaran industri otomotif, dan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, kebijakan diarahkan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.

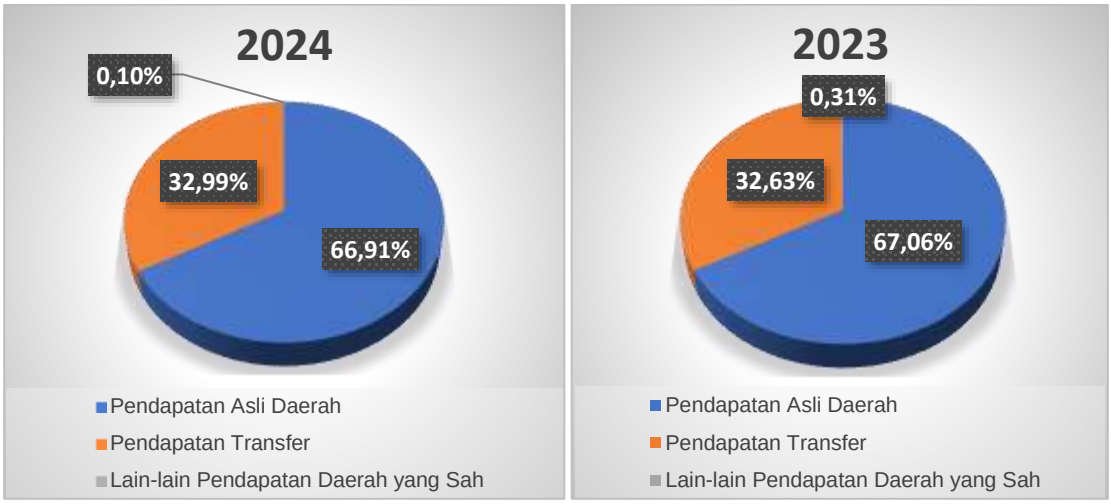
Pendapatan Daerah adalah segala sumber dana (*source of fund*) untuk melaksanakan program/kegiatan yang tercantum pada APBD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan dan tidak harus dibayar kembali. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek serta sub rincian objek. Capaian pendapatan Daerah berangsur membaik pasca Pandemi Covid-19. Selama tiga tahun terakhir, realisasi Pendapatan Daerah dapat tumbuh secara positif. Realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 sebesar Rp26.378.719.626.419,00. Perkembangan Capaian Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:

Gambar 3.1
Grafik Tren Capaian Total Pendapatan Daerah 2022 – 2024 (dalam Milyar)



Kontribusi terbesar pendapatan masih diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, diikuti Pendapatan Transfer kemudian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Kontribusi setiap sumber pendapatan terhadap total pendapatan daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 memberikan kontribusi sebesar 66.91%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 67,06%;
b. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024 memberikan kontribusi sebesar 32,99%, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 32,63%; dan
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun Anggaran 2024 memberikan kontribusi sebesar 0,10%, lebih rendah apabila dibandingkan dengan kontribusi pada Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,31%.



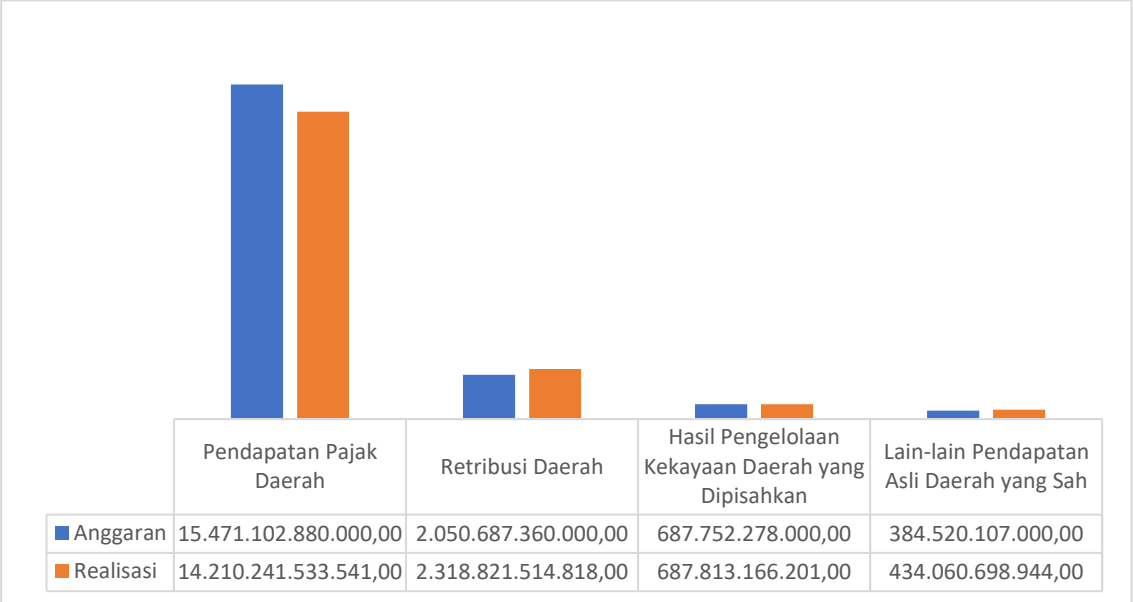
Gambar 3.2
Persandingan Kontribusi Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan 2023

Pendapatan daerah pada tahun 2024 ditargetkan sejumlah Rp27.230.787.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.378.719.626.419,00 atau 96,87%, mengalami peningkatan 3,98% atau sejumlah Rp1.008.986.069.744,00 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Capaian pendapatan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 mencapai 94,93% dengan target sebesar Rp18.594.062.625.000,00 terealisasi sejumlah Rp17.650.936.913.504,00, mengalami kenaikan sebesar Rp638.427.492.498,00 atau 3,75% jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
   - Pajak Daerah ditargetkan sejumlah Rp15.471.102.880.000,00 terealisasi Rp14.210.241.533.541,00 atau 91,85%, mengalami kenaikan sejumlah Rp233.598.817.190,00 atau 1,67% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023;
   - Retribusi Daerah ditargetkan sejumlah Rp2.050.687.360.000,00 terealisasi Rp2.318.821.514.818,00 atau 113,08%, mengalami kenaikan sejumlah Rp2.179.444.476.282,00 atau 1.563,70% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023;
   - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sejumlah Rp687.752.278.000,00 terealisasi Rp687.813.166.201,00 atau 100,01%, mengalami

kenaikan sejumlah Rp49.330.759.673,00 atau 7,73% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023;

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sejumlah Rp384.520.107.000,00 terealisasi Rp434.060.698.944,00 atau 112,88%, mengalami penurunan sejumlah Rp1.823.946.560.647,00 atau 80,78% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023.



	Pendapatan Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Anggaran	15.471.102.880.000,00	2.050.687.360.000,00	687.752.278.000,00	384.520.107.000,00
Realisasi	14.210.241.533.541,00	2.318.821.514.818,00	687.813.166.201,00	434.060.698.944,00

Gambar 3.3
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

Secara agregat realisasi Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan, walau masih ada beberapa yang belum mencapai target seperti: Pajak Kendaraan Bermotor (84,16%), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (93,27%), Pajak Air Permukaan (87,82%), dan Pajak Rokok (95,25%). Selain pada Pajak Daerah, komponen Retribusi Daerah yang belum mencapai target adalah Retribusi Jasa Usaha (91,53%).

Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta penurunan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana diungkapkan oleh GAIKINDO bahwa target penjualan dilakukan revisi dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit *year on year*. Penjualan *wholesales* (pabrik ke dealer) turun 14,7% dan penjulan retail (dealer ke konsumen) turun 11,2%. Pajak Air Permukaan dipengaruhi oleh kondisi iklim yang berakibat pada volume pengambilan air permukaan, sedangkan Pajak Rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh pemerintah pusat.

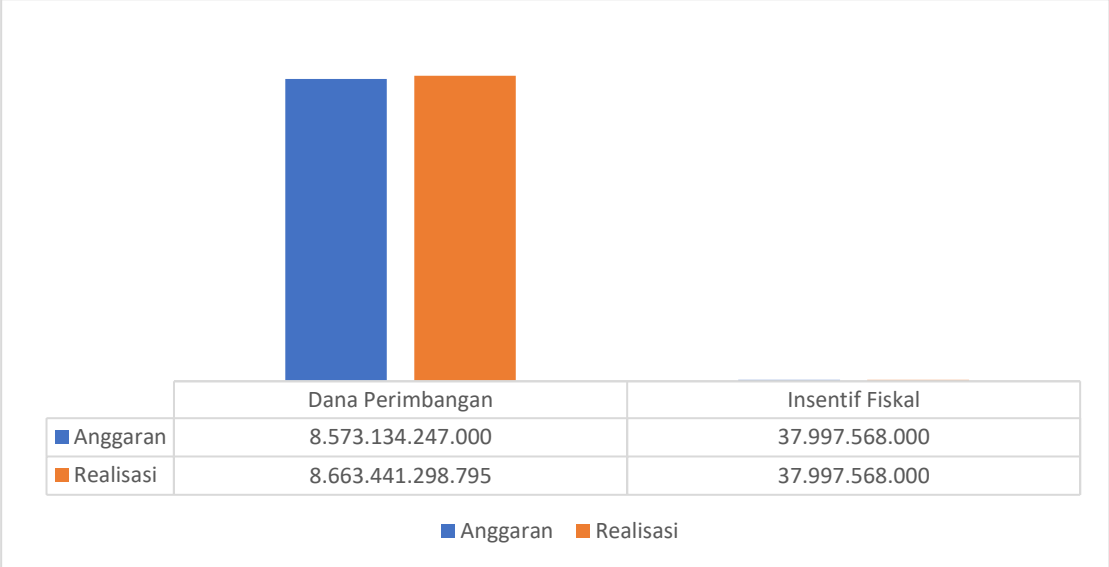
Pada tahun 2024 Retribusi Daerah meningkat secara signifikan dikarenakan implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang memindahkan akun pendapatan rumah sakit (BLUD) dari akun Lain - Lain PAD Yang Sah ke akun Retribusi Daerah.

b. Pendapatan Transfer ditargetkan Rp8.611.131.815.000,00 terealisasi Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05%, mengalami kenaikan sejumlah Rp422.510.780.371,00 atau 5,10% apabila dibandingkan realisasi tahun 2023 terdiri dari:

- Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp8.573.134.247.000,00 dengan realisasi mencapai Rp8.663.441.298.795,00 atau 101,05%. Apabila dibandingkan dengan tahun anggaran 2023 penerimaan pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan mengalami kenaikan Rp471.711.157.371,00 atau 5,76%. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan terdiri atas:
  1. Dana Bagi Hasil pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp770.426.526.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp896.232.568,00 atau 116,33%. Apabila dibandingkan tahun anggaran 2023 penerimaan dana bagi hasil mengalami penurunan sebesar Rp36.878.954.991,00.
  2. Dana Alokasi Umum pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp3.820.383.210.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp3.819.010.791.028,00 atau 99,96%. Apabila dibandingkan tahun anggaran 2023 penerimaan Dana Alokasi Umum mengalami kenaikan sebesar Rp260.582.035.528,00.
  3. Dana Alokasi Khusus (Fisik) pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp484.598.612.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp473.940.472.839,00 atau 97,80%. Apabila dibandingkan tahun anggaran 2023 penerimaan Dana Alokasi Khusus (Fisik) mengalami kenaikan sebesar Rp69.840.179.997,00.
  4. Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) pada APBD tahun anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp3.497.725.899.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp3.474.257.466.928 atau 99,33%. Apabila dibandingkan tahun anggaran 2023 penerimaan Dana Alokasi Khusus (Non Fisik) mengalami kenaikan sejumlah Rp178.167.896.837. Proporsi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan untuk Dana Alokasi Khusus non Fisik yaitu sebesar 40,10% dari total Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus non Fisik tersebut terdiri dari:
     a. Bantuan Operasional Sekolah sebesar Rp2.099.515.123.235,00 (60,43%);
     b. Dana Tambahan Penghasilan Guru sebesar Rp1.322.069.021.439,00 (38,05%);
     c. Bantuan Operasional Kesehatan dan KB sebesar Rp33.834.592.742,00 (0,97%);
     d. Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM sebesar Rp13.193.179.000,00 (0,38%);
     e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya Rp3.937.461.112,00 (0,11%);
     f. Bantuan Fasilitasi Penanaman Modal sebesar Rp1.367.855.300,00 (0,04%);
     g. Bantuan Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak sebesar Rp340.234.100,00 (0,01%).

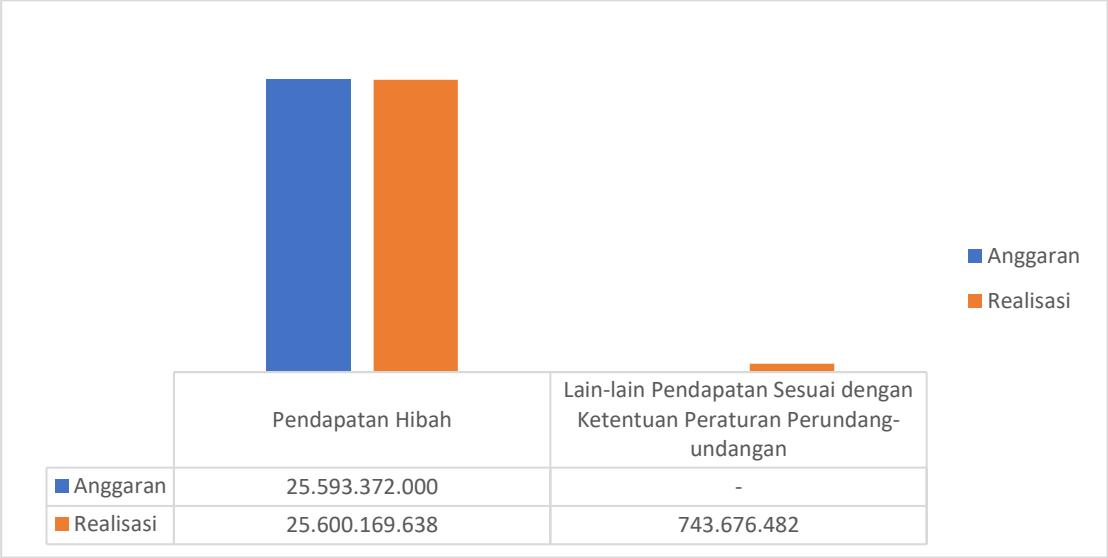
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Insentif Fiskal atau sebelumnya bernama Dana Insentif Daerah (DID). Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu dengan kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penyampaian Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan *e-Government* (e-Budgeting dan e-Planning). Tujuan yaitu sebagai reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum, pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Insentif Fiskal dalam APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sejumlah Rp37.997.568.000,00 dengan realisasi sejumlah Rp37.997568.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sejumlah Rp49.200.377.000,00



Gambar 3.4
Persandingan Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2024

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan Rp25.593.372.000,00 terealisasi Rp26.343.846.120,00 atau 100,03% dari target, mengalami penurunan sejumlah Rp51.952.203.125,00 atau 66,35% apabila dibandingkan realisasi tahun 2023, terdiri dari:
   - Pendapatan Hibah berasal dari Jasa Raharja ditargetkan sejumlah Rp25.593.372.000,00 terealisasi Rp25.600.169.638,00 atau 100,03% mengalami penurunan sejumlah Rp52.371.953.670,00 atau 67,17% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023;
   - Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak ditargetkan terealisasi sebesar Rp743.676.482,00.



	Pendapatan Hibah	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Anggaran	25.593.372.000	-
Realisasi	25.600.169.638	743.676.482

Gambar 3.5
Persandingan Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Tahun Anggaran 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan dalam pengelolaan pendapatan antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Keterbatasan sumber daya pengelola pendapatan daerah baik sumber daya manusia, keuangan maupun barang;
2. Tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak belum optimal dibuktikan dengan jumlah piutang pajak daerah yang semakin meningkat.
3. Pendayagunaan aset/barang milik daerah yang belum optimal utamanya yang berada di SKPD/Pengguna Barang serta kondisi yang relatif tidak kompetitif apabila dibandingkan dengan penyedia jasa sejenis dalam satu kawasan yang sama;
4. Beberapa BUMD masih perlu dioptimalkan kinerjanya, bahkan masih ada yang mengalami kerugian komulatif.

Untuk mengatasi permasalahan keterbatasan sumber daya pengelola pendapatan daerah, telah dilakukan beberapa upaya antara lain:

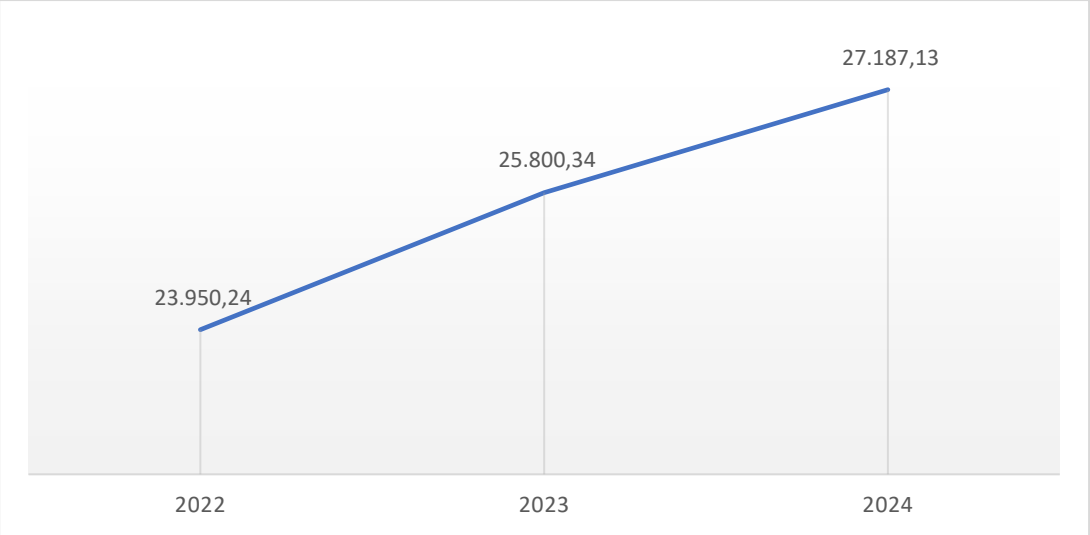
1. Membangun dan meningkatkan sinergi atau kerja sama dengan berbagai pihak termasuk pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, badan usaha dan pihak lainnya dalam melakukan sosialisasi, pendataan, pelayanan pemungutan serta penagihan pajak daerah seiring dengan diberlakukannya ketentuan Opsen Pajak pada tahun 2025;
2. Membangun dan mengembangkan sistem pelayanan pajak digital dan pelayanan pajak melalui pihak ketiga antara lain SAMSAT BUDIMAN bekerja sama dengan BUMDES dan SAMSAT CORPORATE berkerjasama dengan perusahaan dan/atau koperasi;
3. Melakukan sosialisasi kepatuhan membayar pajak bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota dan publikasi melalui berbagi platform media, baik media cetak, online maupun media sosial;
4. Mengupayakan pengelolaan aset/barang milik daerah secara lebih fokus dan profesional dengan melakukan penataan kelembagaan pengelola aset/barang milik daerah dan

melakukan pemeliharaan serta pengamanan aset /barang milik daerah untuk meningkatkan daya saing;

5. Melakukan perbaikan tata kelola dan retrukturisasi unit bisnis BUMD.

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan segala penggunaan sumber dana (*use of fund*) untuk pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diterima kembali. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikasikan belanja daerah menjadi empat kategori yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah digambarkan pada grafik dibawah ini:



Gambar 3.6
Grafik Tren Realisasi Total Belanja Daerah 2022 – 2024 (dalam Milyar)

Kebijakan umum belanja daerah pada perubahan APBD tahun anggaran 2024 diarahkan untuk:

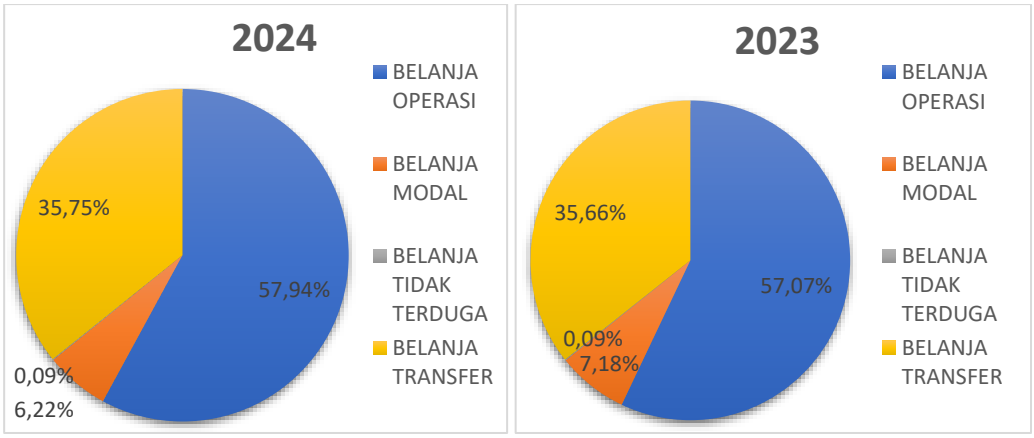
a. Prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 dalam bentuk: Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratruktur yang merata dan berkualitas; Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat; Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung; dan Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif.
b. Dukungan implementasi kebijakan nasional terutama pada: penurunan stunting menjadi 14 persen; penghapusan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen; pengendalian inflasi daerah; implementasi Satu Data Indonesia (SDI); dan implementasi Desa Anti Korupsi.
c. Dukungan 10 Program Prioritas Pembangunan Daerah;
d. Upaya pemenuhan alokasi persentase belanja sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk 20 persen fungsi pendidikan; sedangkan 40 persen *mandatory*

spending untuk belanja infrastruktur, pelatihan ASN dan anggaran pengawasan (APIP) akan disesuaikan dengan potensi anggaran;

e. Dukungan kebijakan, rencana program/kegiatan pembangunan dan pendanaan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
f. Kesiapsiagaan terhadap bencana baik alam maupun non alam;
g. Upaya mengakomodir masukan usulan pembangunan yang disampaikan melalui pokok-pokok pikiran/aspirasi DPRD, masukan masyarakat dari berbagai forum musyawarah dan koordinasi di bidang perencanaan dengan tetap memperhatikan kapasitas, kewenangan, prioritas pembangunan serta peraturan perundangan yang berlaku;
h. Meningkatkan sinergi pembangunan antar wilayah dan daerah dalam penyelesaian permasalahan dan pencapaian prioritas pembangunan tahun 2024 melalui bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa; serta
i. Dukungan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024

Porsi Anggaran masing-masing Belanja Daerah tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Belanja Operasi tahun anggaran 2024 sebesar 57,94% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan anggaran 2023 sebesar 57,07%;
2. Belanja Modal tahun anggaran 2024 sebesar 6,22% dari total belanja daerah, persentase ini lebih rendah apabila dibandingkan anggaran 2023 sebesar 7,18%;
3. Belanja Tidak Terduga tahun anggaran 2024 sebesar 0,09% dari total belanja daerah, persentase ini sama dengan anggaran 2023 sebesar 0,09%;
4. Belanja Transfer tahun anggaran 2024 sebesar 35,75% dari total belanja daerah, persentase ini lebih tinggi apabila dibandingkan anggaran 2023 sebesar 35,66%.

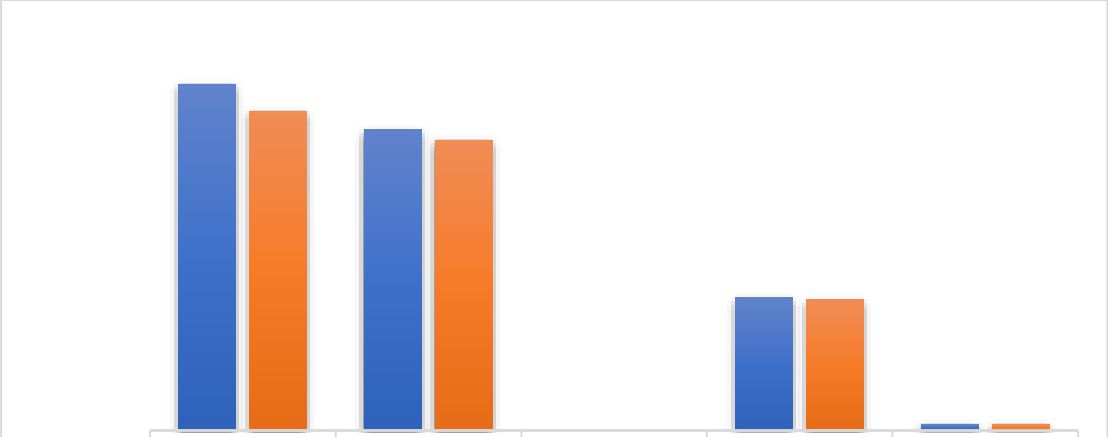


Gambar 3.7
Persandingan Persentase Anggaran Belanja Daerah Tahun 2024 dengan 2023

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sejumlah Rp28.566.843.632.000,00 terealisasi sejumlah Rp27.187.126.497.803,00 atau 95,17%, mengalami kenaikan sejumlah

Rp1.386.785.290.021,00 atau 5,38% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sejumlah Rp25.800.341.207.782,00. Komponen Belanja Daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sejumlah Rp16.552.143.061.000,00 terealisasi sejumlah Rp16.083.865.301.964,00 atau 97,17% mengalami peningkatan sejumlah Rp1.196.085.289.201,00 atau 8,03% apabila dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2023 sejumlah Rp14.887.780.012.763,00 terdiri dari:
   - Belanja Pegawai dianggarkan Rp7.215.542.302.000,00 terealisasi sejumlah Rp7.023.084.524.845,00 atau 97,33%, mengalami kenaikan sejumlah Rp660.757.669.771,00 atau 10,39% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023;
   - Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sejumlah Rp6.485.600.279.000,00. Terealisasi sejumlah Rp6.234.228.358.506,00 atau 96,12%, mengalami kenaikan sejumlah Rp443.115.597.531,00 atau 7,65% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023;
   - Belanja Subsidi dianggarkan sejumlah Rp1.400.000.000,00. Terealisasi sejumlah Rp1.399.999.100,00 atau 100,00%, mengalami penurunan sejumlah Rp3.950.753.969,00 atau 73,84% apabila dibandingkan realisasi pada Tahun Anggaran 2023;
   - Belanja Hibah dianggarkan sejumlah Rp2.804.157.236.000,00 terealisasi sejumlah Rp2.780.143.423.054,00 atau 99,14% mengalami kenaikan sejumlah Rp169.840.247.294,00 atau 6,51% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023;
   - Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sejumlah Rp45.443.244.000,00, terealisasi sejumlah Rp45.008.996.459,00 atau 99,04%, mengalami penurunan sejumlah Rp73.677.471.426,00 atau 62,08% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023.



	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bantuan Sosial
Anggaran	6.908.461.438.000,00	5.997.658.579.000,00	5.635.067.000,00	2.644.383.217.000,00	127.240.070.000,00
Realisasi	6.362.326.855.074,00	5.791.112.760.975,00	5.350.753.069,00	2.610.303.175.760,00	118.686.467.885,00

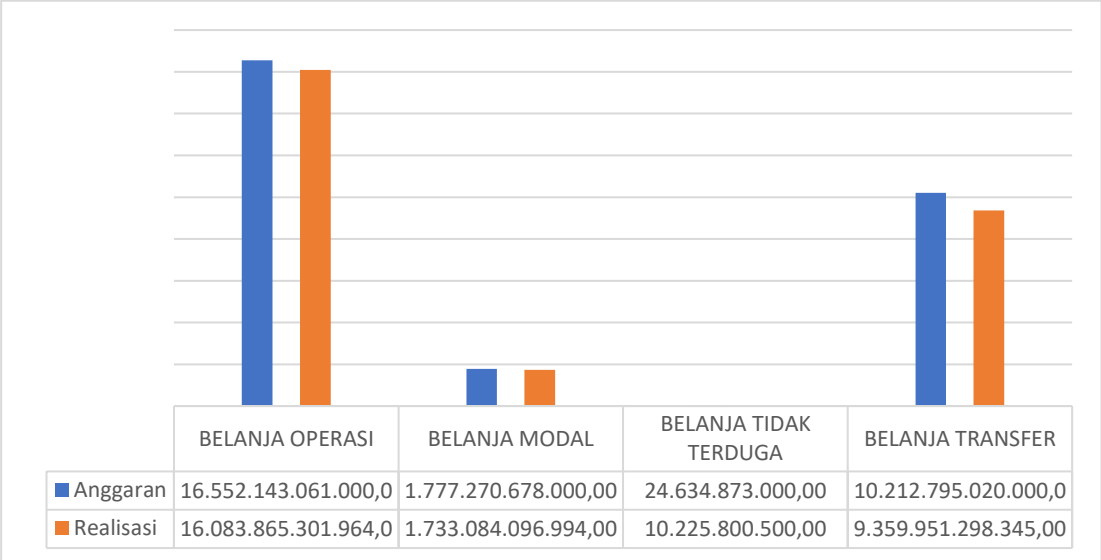
Gambar 3.8
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024

b. Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sejumlah Rp1.777.270.678.000,00 terealisasi sejumlah Rp1.733.084.096.994,00 atau 97,51% mengalami penurunan sejumlah Rp61.778.681.304,00 atau 3,44% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.7794.862.778.298,00. Perbandingan realisasi belanja modal tahun anggaran 2024 dan tahun anggaran 2023 yaitu:
   - Realisasi belanja modal tanah tahun anggaran 2024 sebesar Rp12.221.207.440,00 atau 96,63%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp67.791.905.622,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.570.698.182,00 atau 81,97%;
   - Realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 sebesar Rp855.982.713.753,00 atau 97,06%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp751.571.586.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.411.127.077,00 atau 13,89%;
   - Realisasi belanja modal gedung bangunan tahun anggaran 2024 sebesar Rp411.044.257.004,00 atau 97,61%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp526.682.150.860,00 mengalami penurunan sebesar Rp115.637.893.856,00 atau 21,96%;
   - Realisasi belanja modal jalan, irigasi, jaringan tahun anggaran 2024 sebesar Rp366.478.924.044,00 atau 97,91%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp351.052.937.280,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.425.986.764,00 atau 4,39%;
   - Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp97.389.078.450,00 atau 85,91%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp97.389.078.450,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.954.219.497,00 atau 11,25%;
   - Realisasi belanja modal aset lainnya tahun anggaran 2024 sebesar Rp375.119.410,00 atau 97,56%, bila dibandingkan realisasi tahun anggaran 2023 sebesar Rp375.119.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp547.016.390,00 atau 145,82%.

c. Belanja Tidak Terduga digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak. Pada Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sejumlah Rp24.634.873.000,00 terealisasi sejumlah Rp10.225.800.500,00 atau 41,61%, digunakan untuk penanganan bencana di Kabupaten Grobogan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Sragen, Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang dan Kabupaten Kendal serta dukungan Pelaksanaan PEPARNAS XVII.

d. Belanja Transfer dianggarkan sejumlah Rp10.212.795.020.000,00 terealisasi sejumlah Rp9.359.951.298.345,00 atau 91,65%, mengalami kenaikan sejumlah Rp242.992.881.624,00 atau 2,67% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023, terdiri dari:
   - Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dianggarkan sejumlah Rp7.131.173.811.000,00 terealisasi sejumlah Rp6.334.544.870.221,00 atau 88,83%, mengalami kenaikan sejumlah Rp70.498.643.553,00 atau 1,13% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023;

- Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sejumlah Rp3.081.621.209.000,00 terealisasi sejumlah Rp3.025.406.428.124,00 atau 98,18%, mengalami kenaikan sejumlah Rp172.494.238.071,00 atau 6,05% apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2023. Belanja ini terdiri dari:
  1. Belanja bantuan keuangan kabupaten/kota dianggarkan Rp1.093.321.527.000,00 terealisasi 95,64% atau Rp1.045.686.246.124,00;
  2. Belanja bantuan keuangan desa dianggarkan Rp1.988.299.682.000,00 terealisasi 99,57% atau Rp1.979.720.182.000,00.



	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL	BELANJA TIDAK TERDUGA	BELANJA TRANSFER
Anggaran	16.552.143.061.000,0	1.777.270.678.000,00	24.634.873.000,00	10.212.795.020.000,0
Realisasi	16.083.865.301.964,0	1.733.084.096.994,00	10.225.800.500,00	9.359.951.298.345,00

Gambar 3.9
Persandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Adapun permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahan masalah dalam pengelolaan belanja antara lain sebagai berikut:

Permasalahan:

1. Belum optimalnya penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) oleh pengelola keuangan SKPD/UPT/Balai karena keterbatasan pemahaman SDM pengelola keuangan; dan
2. Waktu pelaksanaan kegiatan oleh SKPD tidak mendasarkan pada Rencana Kerja Operasional (RKO) dan Anggaran Kas.

Upaya-upaya dan alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan antara lain :

1. Menyelenggarakan bimbingan teknis kepada para pengelola keuangan di tingkat SKPD/UPT/Balai dan mendorong Bank Jateng untuk meningkatkan pelayanan agar memudahkan akses penggunaan KKPD oleh pengelola keuangan SKPD; dan
2. Menyusun petunjuk teknis dalam penyusunan RKO dan anggaran kas SKPD serta melakukan modifikasi aplikasi pengelolaan keuangan sehingga pengelola keuangan SKPD dalam merealisasikan dana memperhatikan waktu pelaksanaan maupun ketersediaan kas

3.1.3. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan daerah dan belanja daerah, terdapat juga komponen pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2024 diarahkan pada pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya serta pencairan Danba Cadangan Pilkada, sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan untuk penyertaan modal dalam rangka penyehatan beberapa BUMD.

Pembiayaan daerah pada APBD tahun anggaran 2024 terdiri dari Penerimaan Pembiayaan yang dianggarakan sejumlah Rp1.406.055.820.000,00 dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp1.406.058.065.812,00 atau 100,00% mengalami kenaikan sebesar Rp75.263.994.741,00 atau 5,66% apabila dibandingkan tahun anggaran 2023 dan Pengeluaran Pembiayaan yang dianggarkan sejumlah Rp70.000.000.000,00 yang digunakan sebagai penyertaan modal terealisasi sebesar Rp20.700.000.000,00.

3.1.4. *Mandatory Spending*

Belanja daerah Provinsi Jawa Tengah di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain :

a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dianggarkan sebesar Rp9.286.778.489.000,00 terealisasi sebesar Rp9.160.386.183.069,00 atau 98,64%. Prosentase anggaran Pendidikan 32,51% dari total anggaran belanja dan prosentase realisasi 33,69% dari total realisasi belanja
b. Besaran anggaran infrastruktur pelayanan publik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 40% dari Total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) dianggarkan sebesar Rp2.334.648.592.000,00 terealisasi sebesar Rp2.283.385.762.452,00 atau 97,80%. Prosentase anggaran infrastruktur 31,80% dari total anggaran belanja dan prosentase realisasi 32,02% dari total realisasi belanja.
c. Dana Alokasi Umum selain untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 diarahkan penggunaannya untuk :
    1) Bidang Pendidikan, disalurkan sebesar Rp187.324.934.000,00 terealisasi sebesar Rp186.867.834.000 atau 99,76%
    2) Bidang Pekerjaaan Umum disalurkan sebesar Rp19.078.454.000,00 terealisasi sebesar

Rp19.078.454.000,00 atau 100%

3) Tambahan Dukungan Pendanaan atas PPPK sebesar Rp63.553.600.000,00 terealisasi sebesar Rp63.553.600.000,00 atau 100%

d. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk lnspektorat/APIP sebesar Rp29.226.421.000,00 dari total APBD sebesar Rp27.187.126.497.803,00 atau 0,11% dan terealisasi sebesar Rp28.820.896.533,00 atau 98,61%

3.2. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program pada SKPD

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan per Program Kegiatan pada masing-masing SKPD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp13.851.641.693.000,00 realisasi sebesar Rp13.510.269.570.774,00 atau 97,54% yang dilaksanakaan oleh 6 Urusan, yaitu :

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan yang dialokasikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp8.617.335.841.000,00 realisasi sebesar Rp8.498.602.730.825,00 atau 98,62% yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4.997.335.326.000,00	4.912.538.253.889,00	98,30	99,79
2	Program Pengelolaan Pendidikan	3.585.674.796.000,00	3.555.847.063.083,00	99,17	99,97
3	Program Pengembangan Kurikulum	731.080.000,00	650.240.078,00	88,94	100
4	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	341.362.000,00	309.812.000,00	90,76	100
5	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	746.290.000,00	647.024.456,00	86,70	100
6	Program Pengembangan Kebudayaan	6.108.042.000,00	5.977.629.885,00	97,86	100
7	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	22.960.940.000,00	19.267.130.100,00	83,91	100
8	Program Pembinaan Sejarah	468.800.000,00	454.301.700,00	96,91	100
9	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	704.085.000,00	669.987.194,00	95,16	100
10	Program Pengelolaan Permuseuman	2.265.120.000,00	2.241.288.440,00	98,95	100
	JUMLAH	**8.617.335.841.000.00**	**8.498.602.730.825.00**	**98.62**	**99,87**

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp3.902.947.056.000,00 realisasi sebesar Rp3.706.550.372.250,00 atau 94,97% yang dilaksanakaan oleh 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

1.02.01 DINAS KESEHATAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp584.428.865.000,00 realisasi sebesar Rp567.662.738.121,00 atau 97,13% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	133.078.215.000,00	125.794.031.590,00	94,53	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	449.061.492.000,00	439.852.464.108,00	97,95	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	802.959.000,00	781.918.279,00	97,38	100
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	467.060.000,00	218.101.144,00	46,70	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.019.139.000,00	1.016.223.000,00	99,71	100
	JUMLAH	**584.428.865.000.00**	**567.662.738.121.00**	**97.13**	**100**

1.02.02 RSUD Dr. MOEWARDI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Moewardi sebesar Rp1.422.594.778.000,00 realisasi sebesar Rp1.397.538.201.588,00 atau 98,24% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1.403.030.269.000,00	1.378.522.801.588,00	98,25	99,98
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	19.564.509.000,00	19.015.400.000,00	97,19	100
	JUMLAH	**1.422.594.778.000.00**	**1.397.538.201.588.00**	**98.24**	**99,98**

1.02.03 RSUD PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo sebesar Rp908.039.596.000,00 realisasi sebesar Rp850.003.532.971,00 atau 93,61% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	870.110.535.000,00	814.198.536.971,00	93,57	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.929.061.000,00	35.804.996.000,00	94,40	99,28
	JUMLAH	**908.039.596.000,00**	**850.003.532.971,00**	**93,61**	**99,97**

1.02.04 RSUD Dr. ADHYATMA, MPH SEMARANG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang sebesar Rp371.834.980.000,00 realisasi sebesar Rp317.774.354.655,00 atau 85,46% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	356.546.536.000,00	302.629.297.491,00	84,88	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	15.288.444.000,00	15.145.057.164,00	99,06	100
	JUMLAH	**371.834.980.000,00**	**317.774.354.655,00**	**85,46**	**100**

1.02.05 RSUD Dr. REHATTA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSUD Dr. Rehatta Jepara sebesar Rp161.386.663.000,00 realisasi sebesar Rp159.160.156.784,00 atau 98,62% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	106.010.663.000,00	104.597.787.556,00	98,67	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	54.960.000.000,00	54.169.950.529,00	98,56	97,65
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	105.000.000,00	81.727.500,00	77,84	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	311.000.000,00	310.691.199,00	99,90	100
	JUMLAH	**161.386.663.000,00**	**159.160.156.784,00**	**98,62**	**99,2**

1.02.06 RSJD Dr. AMINO GONDOHUTOMO

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Amino Gondohutomo sebesar Rp172.054.321.000,00 realisasi sebesar Rp149.721.100.225,00 atau 87,02% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	148.982.665.000,00	127.326.157.245,00	85,46	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	22.871.656.000,00	22.204.686.480,00	97,08	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	190.256.500,00	95,13	100
	JUMLAH	**172.054.321.000,00**	**149.721.100.225,00**	**87,02**	**100**

1.02.07 RSJD Dr. ARIF ZAINUDIN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Arif Zainudin sebesar Rp.161.177.732.000,00 realisasi sebesar Rp 146.594.598.297,00 atau 90,95% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	134.602.003.000,00	122.296.187.881,00	90,86	99,13
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	26.375.729.000,00	24.139.902.316,00	91,52	100
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.000.000,00	158.508.100,00	79,25	100
	JUMLAH	**161.177.732.000,00**	**146.594.598.297,00**	**90,95**	**99,27**

1.02.08 RSJD Dr. RM SOEDJARWADI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada RSJD Dr. Rm Soedjarwadi sebesar Rp121.430.121.000,00 realisasi sebesar Rp118.095.689.609,00 atau 97,25% yang terdiri dari 4 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	112.006.486.000,00	108.735.580.458,00	97,08	100
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	9.223.635.000,00	9.167.109.151,00	99,39	100
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	100
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	165.000.000,00	158.000.000,00	95,76	100
	JUMLAH	**121.430.121.000,00**	**118.095.689.609,00**	**97,25**	**100**

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp842.950.352.000,00 realisasi sebesar Rp824.767.088.943,00 atau 97,84% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya sebesar Rp629.735.374.000,00 realisasi sebesar Rp616.710.345.307,00 atau 97,93% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	109.435.055.000,00	104.448.654.877,00	95,44	100
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	89.670.823.000,00	88.197.124.101,00	98,36	100
3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	2.621.131.000,00	2.582.870.091,00	98,54	100
4	Program Penataan Bangunan Gedung	17.404.626.000,00	17.324.801.038,00	99,54	100
5	Program Penyelenggaraan Jalan	406.576.990.000,00	400.329.645.795,00	98,46	99,49
6	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	4.026.749.000,00	3.827.249.405,00	95,05	100
	JUMLAH	**629.735.374.000,00**	**616.710.345.307,00**	**97,93**	**99,67**

1.03.02 DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN TATA RUANG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang sebesar Rp213.214.978.000,00 realisasi sebesar Rp208.056.743.636,00 atau 97,58% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	91.860.738.000,00	89.200.702.119,00	97,10	100
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	116.020.799.000,00	113.805.390.293,00	98,09	100
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.333.441.000,00	5.050.651.224,00	94,70	100
	JUMLAH	**213.214.978.000,00**	**208.056.743.636,00**	**97,58**	**100**

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dialokasikan pada Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp63.375.080.000,00 realisasi sebesar Rp62.366.955.709,00 atau 98,41% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	21.882.584.000,00	20.900.571.316,00	95,51	100
2	Program Pengembangan Perumahan	34.601.321.000,00	34.585.018.844,00	99,95	100
3	Program Kawasan Permukiman	3.511.475.000,00	3.505.450.557,00	99,83	100
4	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	1.575.411.000,00	1.574.591.294,00	99,95	100
5	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	215.000.000,00	214.999.238,00	100,00	100
6	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	399.289.000,00	398.683.784,00	99,85	100
7	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	600.000.000,00	598.806.284,00	99,80	100
8	Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	590.000.000,00	588.834.392,00	99,80	100
	JUMLAH	**63.375.080.000,00**	**62.366.955.709,00**	**98,41**	**100**

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebesar Rp41.818.786.000,00 realisasi sebesar Rp40.483.382.442,00 atau 96,81% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

1.05.01 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp23.428.903.000,00 realisasi sebesar Rp22.828.067.462,00 atau 97,44% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.604.727.000,00	18.049.580.418,00	97,02	100
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.674.176.000,00	4.628.995.544,00	99,03	100
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	150.000.000,00	149.491.500,00	99,66	100
	JUMLAH	**23.428.903.000,00**	**22.828.067.462,00**	**97,44**	**100**

1.05.02 SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp18.389.883.000,00 realisasi sebesar Rp17.655.314.980,00 atau 96,01% yang yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.144.883.000,00	12.428.376.275,00	94,55	100
2	Program Penanggulangan Bencana	5.245.000.000,00	5.226.938.705,00	99,66	100
	JUMLAH	**18.389.883.000,00**	**17.655.314.980,00**	**96,01**	**100**

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 DINAS SOSIAL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Sosial yang dialokasikan pada Dinas Sosial sebesar Rp383.214.578.000,00 realisasi sebesar Rp377.499.040.605,00 atau 98,51% yang terdiri dari 7 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	133.832.238.000,00	130.393.172.583,00	97,43	100
2	Program Pemberdayaan Sosial	9.525.940.000,00	9.455.584.800,00	99,26	100
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100.000.000,00	90.665.000,00	90,67	100
4	Program Rehabilitasi Sosial	59.703.692.000,00	59.166.236.062,00	99,10	100
5	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	176.703.790.000,00	175.058.426.260,00	99,07	100
6	Program Penanganan Bencana	2.989.918.000,00	2.976.232.900,00	99,54	100
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	359.000.000,00	358.723.000,00	99,92	100
	JUMLAH	**383.214.578.000.00**	**377.499.040.605.00**	**98.51**	**100**

2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar sebesar Rp1.133.621.818.000,00 realisasi sebesar Rp1.106.324.878.529,00 atau 97,59% yang dilaksanakaan oleh 11 Urusan, yaitu :

2.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.01.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang dialokasikan pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi sebesar Rp121.142.670.000,00 realisasi sebesar Rp116.741.463.646,00 atau 96,37% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	85.354.476.000,00	82.324.589.644,00	96,45	100
2	Program Perencanaan Tenaga Kerja	276.915.000,00	260.739.306,00	94,16	100
3	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	28.064.992.000,00	27.164.874.215,00	96,79	100
4	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.780.000.000,00	1.761.684.782,00	98,97	100
5	Program Hubungan Industrial	1.668.287.000,00	1.547.690.859,00	92,77	100
6	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	3.750.000.000,00	3.435.884.919,00	91,62	100
7	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	248.000.000,00	245.999.921,00	99,19	100
	JUMLAH	**121.142.670.000,00**	**116.741.463.646,00**	**96,37**	**100**

2.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebesar Rp22.414.825.000,00 realisasi sebesar Rp21.882.164.193,00 atau 97,62%yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.046.135.000,00	16.577.844.530,00	97,25	100
2	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.501.000.000,00	1.499.884.678,00	99,93	100
3	Program Perlindungan Perempuan	1.140.702.000,00	1.100.330.726,00	96,46	100
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	221.552.000,00	221.387.760,00	99,93	100
5	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	229.800.000,00	228.381.783,00	99,38	100
6	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	318.448.000,00	317.907.300,00	99,83	100
7	Program Perlindungan Khusus Anak	532.188.000,00	512.886.474,00	96,37	100
8	Program Pengendalian Penduduk	297.000.000,00	296.627.282,00	99,87	100
9	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	688.000.000,00	687.684.614,00	99,95	100
10	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	440.000.000,00	439.229.046,00	99,82	100
	JUMLAH	**22.414.825.000,00**	**21.882.164.193,00**	**97,62**	**100**

2.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.03.01 DINAS KETAHANAN PANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pangan yang dialokasikan

pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp39.805.906.000,00 realisasi sebesar Rp38.747.206.024,00 atau 97,34% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.251.185.000,00	22.278.470.012,00	95,82	100
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	10.207.756.000,00	10.187.445.546,00	99,80	100
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	3.839.965.000,00	3.829.256.262,00	99,72	100
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	2.507.000.000,00	2.452.034.204,00	97,81	100
	JUMLAH	39.805.906.000,00	38.747.206.024,00	97,34	**100**

2.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.04.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang dialokasikan pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sebesar Rp195.914.546.000,00 realisasi sebesar Rp190.123.028.107,00 atau 97,04% yang terdiri dari 13 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	140.145.892.000,00	135.516.939.407,00	96,70	100
2	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	778.748.000,00	776.055.583,00	99,65	100
3	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	4.648.361.000,00	4.550.928.132,00	97,90	100
4	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	1.538.667.000,00	1.491.849.917,00	96,96	100
5	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	133.740.000,00	122.940.249,00	91,92	100
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	844.280.000,00	842.416.037,00	99,78	100
7	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	1.904.836.000,00	1.766.483.163,00	92,74	100
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	240.732.000,00	237.413.910,00	98,62	100
9	Program Pengelolaan Persampahan	1.233.800.000,00	1.185.470.551,00	96,08	100
10	Program Pengelolaan Hutan	34.752.256.000,00	34.289.865.785,00	98,67	100
11	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	2.983.793.000,00	2.667.188.266,00	89,39	100
12	Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	6.157.459.000,00	6.132.517.879,00	99,59	100
13	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	551.982.000,00	542.959.228,00	98,37	100
	JUMLAH	**195.914.546.000,00**	**190.123.028.107,00**	**97,04**	**100**

2.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.05.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dialokasikan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar sebesar Rp25.226.500.000,00 realisasi sebesar Rp24.527.851.465,00 atau 97,23% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.712.275.000,00	18.079.461.287,00	96,62	100
2	Program Pendaftaran Penduduk	240.000.000,00	239.118.071,00	99,63	100
3	Program Pencatatan Sipil	220.000.000,00	216.483.630,00	98,40	100
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	240.000.000,00	235.835.394,00	98,26	100
5	Program Peningkatan Kerjasama Desa	675.000.000,00	673.311.394,00	99,75	100
6	Program Administrasi Pemerintahan Desa	1.753.170.000,00	1.721.867.880,00	98,21	100
7	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	3.386.055.000,00	3.361.773.809,00	99,28	100
	JUMLAH	**25.226.500.000,00**	**24.527.851.465,00**	**97,23**	**100**

2.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.06.01 DINAS PERHUBUNGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan yang dialokasikan pada Dinas Perhubungan sebesar Rp193.075.157.000,00 realisasi sebesar Rp189.906.926.080,00 atau 98,36% yang terdiri dari 4 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	62.275.488.000,00	60.413.896.895,00	97,01	100
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	129.071.703.000,00	127.806.638.323,00	99,02	100
3	Program Pengelolaan Pelayaran	459.100.000,00	423.541.940,00	92,25	100
4	Program Pengelolaan Perkeretaapian	1.268.866.000,00	1.262.848.922,00	99,53	100
	JUMLAH	**193.075.157.000,00**	**189.906.926.080,00**	**98,36**	**100**

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.07.01 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi Dan Informatika sebesar Rp70.201.042.000,00 realisasi sebesar Rp68.510.596.902,00 atau 97,59% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	26.973.661.000,00	25.854.779.119,00	95,85	100
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	26.367.273.000,00	25.872.919.838,00	98,13	100
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	13.502.779.000,00	13.432.609.475,00	99,48	100
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.257.329.000,00	1.252.932.230,00	99,65	100
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.100.000.000,00	2.097.356.240,00	99,87	100
	JUMLAH	**70.201.042.000,00**	**68.510.596.902,00**	**97,59**	**100**

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.08.01 DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah yang dialokasikan pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp.62.459.935.000,00 realisasi sebesar Rp 61.107.667.640,00 atau 97,83% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**29.084.802.000,00**	**28.291.323.805,00**	**97,27**	100
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.491.600.000,00	2.458.388.139,00	98,67	100
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	6.698.293.000,00	6.490.931.886,00	96,90	100
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	8.704.291.000,00	8.482.011.766,00	97,45	100
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	9.072.340.000,00	8.988.781.298,00	99,08	100
6	Program Pengembangan UMKM	6.408.609.000,00	6.396.230.746,00	99,81	100
	JUMLAH	**62.459.935.000,00**	**61.107.667.640,00**	**97,83**	**100**

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.09.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal yang dialokasikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar

Rp23.773.922.000,00 realisasi sebesar Rp23.041.175.326,00 atau 96,92% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	**18.440.939.000,00**	**17.722.592.559,00**	**96,10**	100
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**705.000.000,00**	**696.837.810,00**	**98,84**	100
3	Program Promosi Penanaman Modal	**1.069.888.000,00**	**1.068.650.380,00**	**99,88**	100
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	**1.585.216.000,00**	**1.581.777.106,00**	**99,78**	100
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	**1.480.106.000,00**	**1.479.449.031,00**	**99,96**	100
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	**492.773.000,00**	**491.868.440,00**	**99,82**	100
	JUMLAH	**23.773.922.000,00**	**23.041.175.326,00**	**96,92**	**100**

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.10.01 DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga yang dialokasikan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata sebesar Rp328.974.312.000,00 realisasi sebesar Rp322.156.100.824,00 atau 97,93% yang terdiri dari 7 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	46.578.201.000,00	44.851.007.599,00	96,29	100
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	20.539.000.000,00	19.796.658.032,00	96,39	100
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	217.543.826.000,00	215.130.349.810,00	98,89	100
4	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.353.535.000,00	5.164.520.369,00	96,47	100
5	Program Pemasaran Pariwisata	34.619.750.000,00	33.215.681.068,00	95,94	100
6	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	885.576.000,00	883.773.650,00	99,80	100
7	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.454.424.000,00	3.114.110.296,00	90,15	100
	JUMLAH	**328.974.312.000,00**	**322.156.100.824,00**	**97,93**	**100**

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.11.01 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan yang dialokasikan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp50.633.003.000,00 realisasi sebesar Rp49.580.698.322,00 atau 97,92% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.782.796.000,00	31.806.111.225,00	97,02	100
2	Program Pembinaan Perpustakaan	16.743.127.000,00	16.671.957.391,00	99,57	100
3	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	225.589.000,00	224.875.175,00	99,68	100
4	Program Pengelolaan Arsip	780.793.000,00	778.116.139,00	99,66	100
5	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100.698.000,00	99.638.392,00	98,95	100
	JUMLAH	**50.633.003.000,00**	**49.580.698.322,00**	**97,92**	**100**

3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Pilihan sebesar Rp663.537.583.000,00 realisasi sebesar Rp640.106.819.053,00 atau 96,47% yang dilaksanakaan oleh 4 Urusan, yaitu :

3.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.01 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan yang dialokasikan pada Dinas Kelautan Dan Perikanan sebesar Rp.112.793.854.000,00 realisasi sebesar Rp110.689.157.514,00 atau 98,13% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.158.022.000,00	52.552.261.520,00	97,04	100
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	3.492.882.000,00	3.421.338.369,00	97,95	100
3	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	37.014.731.000,00	36.788.815.897,00	99,39	100
4	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	13.822.212.000,00	13.637.162.470,00	98,66	100
5	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	2.056.639.000,00	2.050.674.579,00	99,71	100
6	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2.249.368.000,00	2.238.904.679,00	99,53	100
	JUMLAH	**112.793.854.000,00**	**110.689.157.514,00**	**98,13**	**100**

3.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian sebesar Rp368.366.178.000,00 realisasi sebesar Rp350.256.904.392,00 atau 95,08% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

3.02.01 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp123.190.554.000,00 realisasi sebesar Rp117.379.848.820,00 atau 95,28% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	50.282.109.000,00	48.666.722.352,00	96,79	100
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	37.289.071.000,00	35.663.510.687,00	95,64	100
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	6.683.200.000,00	6.496.662.970,00	97,21	100
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	15.951.174.000,00	14.661.046.860,00	91,91	100
5	Program Penyuluhan Pertanian	12.985.000.000,00	11.891.905.951,00	91,58	100
	JUMLAH	**123.190.554.000,00**	**117.379.848.820,00**	**95,28**	**100**

3.02.02 DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk program dan kegiatan di Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian yang dialokasikan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan sebesar Rp245.175.624.000,00 realisasi sebesar Rp232.877.055.572,00 atau 94,98% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	136.282.674.000,00	129.327.842.076,00	94,90	99,65
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	88.097.603.000,00	83.400.672.088,00	94,67	99,74
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	7.926.342.000,00	7.408.766.555,00	93,47	100
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.184.695.000,00	4.126.692.410,00	98,61	100
5	Program Penyuluhan Pertanian	8.684.310.000,00	8.613.082.443,00	99,18	100
	JUMLAH	**245.175.624.000,00**	**232.877.055.572,00**	**94,98**	**99,71**

3.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

3.03.01 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dialokasikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp87.025.147.000,00 realisasi sebesar Rp85.854.378.107,00 atau 98,65% yang terdiri dari 5 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.038.996.000,00	53.097.331.355,00	98,26	100
2	Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	2.714.957.000,00	2.678.177.498,00	98,65	100
3	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	4.170.240.000,00	4.119.073.436,00	98,77	100
4	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	12.584.935.000,00	12.501.589.703,00	99,34	100
5	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	13.516.019.000,00	13.458.206.115,00	99,57	100
	JUMLAH	**87.025.147.000,00**	**85.854.378.107,00**	**98,65**	**100**

3.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

3.04.01 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Bidang Perindustrian yang dialokasikan pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan sebesar Rp95.352.404.000,00 realisasi sebesar Rp93.306.379.040,00 atau 97,85%yang terdiri dari 10 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	54.483.962.000,00	52.897.461.392,00	97,09	100
2	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	117.640.000,00	113.042.018,00	96,09	100
3	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	634.445.000,00	618.603.297,00	97,50	100
4	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	2.191.031.000,00	2.161.565.441,00	98,66	100
5	Program Pengembangan Ekspor	2.860.322.000,00	2.852.293.484,00	99,72	100
6	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	3.203.088.000,00	3.161.920.363,00	98,71	100
7	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	3.376.819.000,00	3.346.660.016,00	99,11	100
8	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	27.435.662.000,00	27.114.018.731,00	98,83	100
9	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	272.000.000,00	266.825.569,00	98,10	100
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	777.435.000,00	773.988.729,00	99,56	100
	JUMLAH	**95.352.404.000,00**	**93.306.379.040,00**	**97,85**	**100**

4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan sebesar Rp1.215.504.913.000,00 realisasi sebesar Rp1.130.615.850.017,00 atau 93,02% yang dilaksanakaan oleh 2 Urusan, yaitu :

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01 SEKRETARIAT DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp640.487.566.000,00 realisasi sebesar Rp615.983.500.637,00 atau 96,17% yang terdiri dari 8 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	209.866.515.000,00	193.436.394.481,00	92,17	100
2	Program Penataan Organisasi	1.710.656.000,00	1.695.609.635,00	99,12	100
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	4.383.050.000,00	3.860.225.226,00	88,07	100
4	Program Kesejahteraan Rakyat	412.187.075.000,00	404.737.088.355,00	98,19	100
5	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	2.772.628.000,00	2.751.443.490,00	99,24	100
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	5.112.642.000,00	5.063.530.244,00	99,04	100
7	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	2.605.000.000,00	2.591.735.201,00	99,49	100
8	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.850.000.000,00	1.847.474.005,00	99,86	100
	JUMLAH	**640.487.566.000,00**	**615.983.500.637,00**	**96,17**	**100**

4.02 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01 SEKRETARIAT DPRD

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Sekretariat DPRD sebesar Rp575.017.347.000,00 realisasi sebesar Rp514.632.349.380,00 atau 89,5% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	208.475.872.000,00	191.549.278.271,00	91,88	99,84
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	366.541.475.000,00	323.083.071.109,00	88,14	100
	JUMLAH	**575.017.347.000,00**	**514.632.349.380,00**	**89,50**	99,94

5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan sebesar Rp10.754.590.151.000,00 realisasi sebesar Rp9.855.716.273.900,00 atau 91,64% yang dilaksanakaan oleh 6 Urusan, yaitu :

5.01 PERENCANAAN

5.01.01 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Perencanaan yang dialokasikan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp48.159.164.000,00 realisasi sebesar Rp46.541.850.529,00 atau 96,64% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	35.381.964.000,00	33.880.144.261,00	95,76	100
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.009.200.000,00	5.922.899.945,00	98,56	100
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	6.768.000.000,00	6.738.806.323,00	99,57	100
	JUMLAH	**48.159.164.000,00**	**46.541.850.529,00**	**96,64**	**100**

5.02 KEUANGAN

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Keuangan sebesar Rp10.601.819.927.000,00 realisasi sebesar Rp9.707.522.059.571,00 atau 91,56% yang dilaksanakaan oleh 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu :

5.02.01 BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah sebesar Rp295.354.247.000,00 realisasi sebesar Rp271.181.542.638,00 atau 91,82% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	250.188.526.000,00	227.128.813.860,00	90,78	100
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	45.165.721.000,00	44.052.728.778,00	97,54	100
	JUMLAH	**295.354.247.000,00**	**271.181.542.638,00**	**91,82**	**100**

5.02.02 BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan yang dialokasikan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp10.306.465.680.000,00 realisasi sebesar Rp9.436.340.516.933,00 atau 91,56% yang terdiri dari 3 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	40.238.594.000,00	38.002.692.993,00	94,44	100
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	10.259.912.653.000,00	9.392.059.942.173,00	91,54	99,49
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6.314.433.000,00	6.277.881.767,00	99,42	100
	JUMLAH	**10.306.465.680.000,00**	**9.436.340.516.933,00**	**91,56**	**99,49**

5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Kepegawaian yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp44.638.997.000,00 realisasi sebesar Rp43.916.280.847,00 atau 98,38% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	31.238.623.000,00	30.800.954.205,00	98,60	100
2	Program Kepegawaian Daerah	13.400.374.000,00	13.115.326.642,00	97,87	100
	JUMLAH	**44.638.997.000,00**	**43.916.280.847,00**	**98,38**	**100**

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.01 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pendidikan Dan Pelatihan yang dialokasikan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah sebesar Rp65.413.487.000,00 realisasi sebesar Rp63.181.626.208,00 atau 96,59% yang terdiri dari 2 program. yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	44.367.732.000,00	42.604.804.871,00	96,03	100
2	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	21.045.755.000,00	20.576.821.337,00	97,77	100
	JUMLAH	**65.413.487.000,00**	**63.181.626.208,00**	**96,59**	**100**

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.01 BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Penelitian dan Pengembangan yang dialokasikan pada Badan Riset Dan Inovasi Daerah sebesar Rp19.971.483.000,00 realisasi sebesar Rp19.160.185.013,00 atau 95,94% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.921.483.000,00	14.150.794.410,00	94,84	100
2	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.050.000.000,00	5.009.390.603,00	99,20	100
	JUMLAH	**19.971.483.000,00**	**19.160.185.013,00**	**95,94**	**100**

5.06 PENGELOLAAN PENGHUBUNG

5.06.01 BADAN PENGHUBUNG

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pengelolaan Penghubung yang dialokasikan pada Badan Penghubung sebesar Rp22.746.257.000,00 realisasi sebesar Rp21.936.122.261,00 atau 96,44% yang terdiri dari 2 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	19.784.071.000,00	19.116.554.383,00	96,63	100
2	Program Pelayanan Penghubung	2.962.186.000,00	2.819.567.878,00	95,19	100
	JUMLAH	**22.746.257.000,00**	**21.936.122.261,00**	**96,44**	**100**

6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01 INSPEKTORAT

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan yang dialokasikan pada Inspektorat sebesar Rp39.563.390.000,00 realisasi sebesar Rp38.814.001.164,00 atau 98,11% yang terdiri dari 3 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	30.149.401.000,00	29.438.735.804,00	97,64	100
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	6.073.727.000,00	6.054.672.074,00	99,69	100

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	3.340.262.000,00	3.320.593.286,00	99,41	100
	JUMLAH	**39.563.390.000,00**	**38.814.001.164,00**	**98,11**	**100**

7. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

7.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.01 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Realisasi Pelaksanaan Program

Jumlah anggaran setelah perubahan untuk Urusan Pemerintahan Umum yang dialokasikan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar sebesar Rp860.224.920.000,00 realisasi sebesar Rp858.737.253.837,00 atau 99,83% yang terdiri dari 6 program, yaitu :

NO.	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	REALISASI	
				KEU (%)	FISIK (%)
1	2	3	4	5=4/3x100	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.566.574.000,00	18.000.282.778,00	96,95	100
2	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2.168.341.000,00	2.164.103.329,00	99,80	100
3	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	630.239.808.000,00	630.198.353.987,00	99,99	100
4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	93.050.012.000,00	92.179.997.805,00	99,07	100
5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	1.031.422.000,00	1.030.281.674,00	99,89	100
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	115.168.763.000,00	115.164.234.264,00	100,00	100
	JUMLAH	**860.224.920.000,00**	**858.737.253.837,00**	**99,83**	**100**

BAB 4
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sejak tahun 2016. Adapun kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat diuraikan sebagai berikut :

4.1 Kebijakan Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, dan informasi tambahan yang harus disajikan bersama-sama.
2. Komponen laporan keuangan pokok terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
4. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
5. Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontinjensi serta transaksi-transaksi lainnya.
6. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan

4.2.2 Pendapatan - LRA

a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.
b. Pendapatan-LRA dicatat pada saat kas dari pendapatan tersebut diterima di rekening kas umum daerah kecuali Pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD diakui oleh pemerintah pada saat pendapatan tersebut dilaporkan atau disahkan oleh Bendahara Umum Daerah.
c. Pendapatan Perpajakan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4.2.1 Pendapatan – LO

a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

b. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
c. Secara rinci Pengakuan Pendapatan-LO berdasarkan jenis pendapatan dijelaskan sebagai berikut :
   1) Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan menjadi :
      -PAD melalui penetapan
      -PAD tanpa ketetapan
      -PAD dari hasil eksekusi jaminan
   2) Pendapatan Transfer diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
   3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau terdapat aliran masuk sumber daya ekonomi, mana yang lebih dahulu.
   4) Pendapatan BLUD-LO diakui pada saat Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (SP2BP) diterbitkan oleh BUD.
   5) Pendapatan Usaha Mandiri-LO diakui pada saat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana usaha mandiri disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
   6) Pendapatan dapat dipungut menggunakan dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan diakui sebesar kas yang diterima.
d. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.3 Kebijakan Akuntansi Beban

4.3.1 Beban Operasi

a. Beban Pegawai

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS.

Pembayaran atas beban pegawai dapat dilakukan melalui mekanisme UP/GU/TU atau LS. Beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU, diakui ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran. Sedangkan beban pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS, diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah.

b. Beban Barang dan Jasa
   1) Beban Barang

      Beban barang dicatat pada saat pembelian barang, yaitu pada saat barang telah diterima. Pada akhir tahun, nilai sisa persediaan berdasarkan inventarisasi fisik sebagai pengurang beban barang.
   2) Beban Jasa
   3) Beban Pemeliharaan
   4) Beban Perjalanan Dinas
   5) Beban Barang untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
   6) Beban Barang dan Jasa BOS

c. Beban Bunga

Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah, seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda. Beban Bunga meliputi beban bunga pinjaman dan beban bunga obligasi. Beban bunga diakui pada saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.

d. Beban Subsidi

Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan/Lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Beban Subsidi diakui pada saat kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.

e. Beban Hibah

Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Perusahaan Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban hibah dalam bentuk uang dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam nota perjanjian hibah. Beban hibah dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai wajar barang/jasa tersebut saat terjadinya transaksi.

f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Beban bantuan sosial dicatat sebesar nilai nominal yang tertera dalam dokumen keputusan pemberian bantuan sosial berupa uang atau dokumen pengadaan barang/jasa oleh Pihak Ketiga.

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban penyisihan piutang dapat dilakukan dengan 2 metode yaitu:

a) Metode Penyisihan Piutang

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih di muka sebelum piutang tersebut dihapuskan.

b) Metode Penghapusan Langsung.

Metode ini dilakukan dengan cara mengakui Beban Piutang Tak Tertagih hanya pada saat piutang tersebut benar-benar tidak dapat ditagih lagi. Beban piutang tak tertagih diukur dengan:

(1) Metode Penyisihan Piutang

Beban Piutang Tak Tertagih diukur dengan cara mengestimasi besarnya piutang yang kemungkinan tak tertagih.

(2) Metode Penghapusan Langsung.

Beban Piutang Tak Tertagih diukur sebesar jumlah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih kembali

h. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya dan diakui pada akhir tahun berdasarkan metode penyusutan yang telah ditetapkan.

Beban Operasional didalamnya termasuk beban yang berasal dari pengeluaran BLUD sesuai dengan rincian pada lampiran SP3B dan pengeluaran Usaha mandiri sesuai dengan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana usaha mandiri.

4.3.2 Beban Transfer

Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan. Beban transfer diakui pada saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Daerah. Beban Transfer diukur sebesar nilai nominal yang tercantum dalam dokumen sumber penetapan nilai transfer. Beban transfer daerah antara lain dana bagi hasil dan bantuan keuangan.

4.3.3 Beban Lain-Lain

Beban Lain-Lain merupakan beban-beban yang bukan merupakan bagian dari Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi dan Beban Transfer.

4.3.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa merupakan beban atas kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan seperti Pengeluaran atas pos Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

4.4 Kebijakan Akuntansi Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja dikelompokkan kedalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.
3. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah.
4. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan Bendahara Umum Daerah.
5. Belanja BLUD diakui pada saat diterbitkannya Surat pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh BUD.
6. Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah dan diukur berdasarkan azas bruto.
7. Belanja disajikan pada LRA dan LAK dalam mata uang rupiah.

4.5 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang perlu dibayar kembali yang antara lain berasal dari SilPA tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana

cadangan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pinjaman, penjualan investasi permanen lainnya dan penerimaan pembiayaan daerah lainnya.

2. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah yang akan diterima kembali yang antara lain berupa pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu dan pemberian pinjaman kepada pihak ketiga.
3. Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terjadi pengesahan penerimaan pembiayaan oleh Bendahara Umum Daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
4. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.6 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

1. Kas dan Setara Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal perolehannya yang dikelola oleh SKPD.
2. Kas adalah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan. Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan hingga tanggal penyusunan neraca, dan uang kas yang masih berada di bendahara penerimaan sebagai bagian dari Surplus/Defisit-LO yang bersumber dari Pendapatan-LO.
3. Saldo Simpanan di Bank adalah seluruh saldo rekening pemerintah daerah yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
4. Setara Kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang sangat likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang, terhitung dari tanggal perolehannya. Setara kas meliputi deposito bulanan atau 3 bulanan yang dapat diperpanjang kembali.
5. Berdasarkan unit pengelolaannya kas pemerintah dibagi menjadi dua :
   a. Kas Pemerintah Daerah Yang Dikelola Bendahara Umum Daerah (BUD)
      1) Kas di Kas Daerah merupakan jumlah uang yang berada di rekening kas daerah pemerintah daerah yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
      2) Setara Kas merupakan deposito atau investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid.
   b. Kas Pemerintah Daerah yang Dikelola SKPD

      Kas pemerintah daerah yang penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawabannya dilakukan oleh SKPD terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (Kas di BLUD), Kas di Bendahara SKPD yang karena peraturan perundang-undangan menjadi bagian dari Kas Daerah dan Kas di Bendahara Sekolah yang merupakan sisa Dana BOS, BOP, Peran Serta Masyarakat, Bantuan Pemerintah dan Usaha Mandiri sampai dengan akhir tahun anggaran.

6. Kas dan setara kas diakui pada saat memenuhi definisi kas dan/atau setara kas; dan penguasaan dan/atau kepemilikan telah beralih kepada pemerintah daerah.
7. Kas dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal yang disajikan dalam nilai rupiah. Apabila terdapat saldo kas dalam valuta asing maka nilai yang disajikan dalam neraca menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
8. Penyajian Kas dan Setara Kas di Neraca dan Laporan Arus Kas dijelaskan, diperinci dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Antara lain mengungkapkan penjelasan dan sifat serta penggunaan dari rekening yang dimiliki pemerintah daerah.

4.7 Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
2. Piutang diklasifikasikan ke dalam piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan dan piutang lainnya.
3. Piutang pungutan pendapatan terdiri dari piutang pajak, piutang retribusi dan piutang PAD yang sah.
4. Piutang pajak adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan pajak yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang pajak terdiri dari Piutang Pajak Kendaraan Bermotor, Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Piutang Pajak Air Permukaan dan Piutang Pajak Rokok.
5. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan ada tagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, yang belum dilunasi oleh wajib retribusi. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Piutang Retribusi terdiri dari Piutang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.
6. Piutang PAD yang Sah meliputi Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Piutang Jasa Giro, Piutang Pendapatan Bunga, Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah, Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Piutang pendapatan dari pengembalian, Piutang Pendapatan BLUD.
7. Piutang perikatan perjanjian adalah hak yang timbul akibat perikatan antara instansi pemerintah dengan pihak lain yang menimbulkan piutang, terdiri dari piutang pemberian pinjaman, piutang penjualan kredit dan piutang kemitraan dengan pihak lain.

8. Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat yang diakui ketika terbit pernyataan dari Pemerintah Pusat dalam bentuk surat pemberitahuan atau Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan dan Piutang Transfer Antar Daerah yang berupa Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Daerah Lainnya yang diakui sesuai dengan hak yang masih harus diterima sampai dengan periode pelaporan keuangan.
9. Piutang lainnya diklasifikasikan berdasarkan peristiwa lainnya, seperti bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang, bagian lancar tagihan penjualan angsuran dan bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah.
10. Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah adalah Piutang yang terjadi karena adanya proses pengenaan ganti kerugian negara. Piutang TP dikenakan kepada bendahara pada satuan kerja, sedangkan Piutang TGR dikenakan kepada pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan negara. Piutang TP/TGR diakui sebesar nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
11. Kriteria pengakuan piutang pajak :
    a. telah diterbitkan surat ketetapan; dan/atau
    b. telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
    c. belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
12. Secara spesifik pengakuan jenis pendapatan terdiri dari piutang pungutan pendapatan, piutang perikatan perjanjian, piutang berdasarkan transfer pemerintah dan piutang lainnya.
13. Piutang dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam surat ketetapan, surat penagihan dan nilai yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
14. Piutang Pajak diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) atau yang dipersamakan, Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Terhadap Piutang Pajak Kendaraan Bermotor pengakuan hak dilakukan pada saat berakhirnya masa pajak atau jatuh tempo. Penerbitan SKPD dilakukan secara Sistem Informasi Manajemen dan informasi Piutang PKB disampaikan kepada Wajib Pajak melalui aplikasi PKB, oleh karenanya menjadi bagian yang dipersamakan dengan SKPD.
15. Piutang Retribusi diakui pada saat hak untuk menagih timbul yaitu diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau yang dipersamakan, namun pemerintah daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Mekanisme penarikan Retribusi dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu menggunakan surat ketetapan dan dokumen yang persamakan dengan surat ketetapan.
16. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat terdapat hak pemerintah daerah atas bagian laba atas penyertaan modal pada BUMD/BUMN/Badan Usaha Lainnya berdasarkan keputusan RUPS belum dibayarkan.
17. Piutang Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan pengelolaannya diakui berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli antara pemerintah daerah dengan pihak pembeli yang dilakukan dengan akad jual beli.

18. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan diakui berdasarkan selisih lebih tukar menukar BMD yang belum diterima pembayarannya.
19. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan diakui sesuai kriteria Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; Jumlah piutang dapat diukur dengan andal; Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.
20. Piutang Jasa Giro dan Piutang pendapatan Bunga diakui sebesar nilai bunga yang akan diterima sampai dengan akhir periode.
21. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah diakui sebesar nilai Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
22. Piutang pendapatan denda diakui pada saat timbulnya denda pendapatan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
23. Piutang Badan Layanan Umum Daerah diakui dengan kriteria telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dengan bukti surat pernyataan tanggung jawab untuk melunasi piutang dan diotorisasi oleh kedua belah pihak dengan membubuhkan tanda tangan pada surat kesepakatan tersebut; telah ditetapkan surat ketetapan dan/atau; telah diterbitkan surat penagihan. Untuk piutang pasien rumah sakit dengan jaminan, dicatat sebesar pengajuan klaim yang telah diverifikasi oleh pihak penjamin sampai dengan tutup tahun buku. Lembaga penjamin antara lain, BPJS, Perusahaan penjamin dan Lembaga lainnya yang memiliki tugas penjaminan atas pasien.
24. Penyisihan piutang tidak tertagih

    Nilai piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Metode untuk menghitung piutang yang tidak tertagih adalah metode pencadangan/penyisihan piutang tidak tertagih (*the allowance method*). Beban yang timbul atas pembentukan penyisihan piutang tidak tertagih tersebut pada akhir periode pelaporan dicatat sebagai beban penyisihan tidak tertagih dan disajikan pada LO. Piutang terhadap Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lainnya tidak dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih. Penyisihan Piutang tidak tertagih akan menyesuaikan jumlah piutang pada neraca menjadi sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Penyesuaian piutang tidak tertagih dibentuk berdasarkan kualitas/ umur piutang sebagai berikut :

Lama menunggak	**Kategori**	**% diragukan Tertagih**
- 0 tahun sampai dengan 1 tahun	Lancar	0,5%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun	Kurang Lancar	10%
- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 5 tahun	Diragukan	50%
- Lebih dari 5 tahun	Macet	100%

25. Penghentian pengakuan piutang

    Penghentian pengakuan piutang dilakukan ketika terjadi pelunasan atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas dan penghapusbukuan (*write off*). Mekanisme penghapusan

piutang diatur dalam peraturan gubernur yang mengatur tentang tata cara penghapusan piutang. Untuk piutang pajak dan retribusi dapat dilakukan penghapusan piutang langsung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

26. Penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapusbukukan

    Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan dan dihapusbukukan pada tahun berjalan diakui sebagai pengurang beban, sedangkan terhadap penerimaan kembali piutang yang dilakukan penyisihan pada tahun sebelumnya dan dihapusbukukan pada tahun berjalan, penerimaan kas diakui sebagai pendapatan lain-lain.

27. Piutang dan penyisihan piutang disajikan sebagai aset lancar dalam Neraca, dan diungkapkan dalam CaLK meliputi, antara lain rincian jenis piutang dan saldo umur dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.8 Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Beban dibayar dimuka/uang muka belanja adalah piutang yang timbul akibat pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima/dinikmati oleh pemerintah. Contoh beban dibayar dimuka antara lain pembayaran premi asuransi dan sewa.
2. Beban dibayar dimuka diakui pada akhir periode pelaporan berdasarkan hasil identifikasi yaitu ketika terdapat pembayaran atas uang muka yang belum habis terkonsumsi pada periode pelaporan.
3. Pencatatan beban dibayar dimuka dilakukan dengan pendekatan beban, dimana jumlah belanja atau pengeluaran kas yang nantinya akan menjadi beban dicatat seluruhnya terlebih dahulu sebagai beban.
4. Pada akhir periode pelaporan, nilai beban disesuaikan menjadi sebesar nilai yang seharusnya (atau sebesar barang/jasa yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah). Selisihnya direklasifikasi sebagai Beban Dibayar Dimuka.
5. Beban dibayar dimuka dicatat sebesar nilai nominal yang dibayarkan kepada pihak ketiga. Atas beban yang dibayar dimuka sesuai dengan nilai yang tertera dalam pengesahan SPJ atau SP2D-LS.
6. Beban dibayar dimuka disajikan sebagai bagian dari aset lancar di neraca dan diungkapkan jenis beban dibayar dimuka pada CaLK.

4.9 Kebijakan Akuntansi Investasi

1. Investasi Jangka Pendek :
   a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
   b. Harus memenuhi karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, yaitu pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah.
   c. Investasi jangka pendek terdiri dari Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*) dan Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) jangka pendek dan Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

d. Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari harga perolehan, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai surplus atau defisit pada LO.
e. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan.
f. Investasi dalam bentuk surat berharga yang diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar.
g. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
h. Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
i. Investasi jangka pendek disajikan pada pos asset lancer di neraca. Sedangkan hasil dari investasi, seperti bunga diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional.

2. Investasi Jangka Panjang :
   a. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan.
   b. Investasi jangka panjang diklasifikasikan ke dalam investasi permanen dan investasi non permanen
   c. Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam LRA.
   d. Pada saat pelepasan/penjualan investasi, apabila terjadi perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada surplus/defisit pelepasan investasi. surplus/defisit pelepasan investasi disajikan dalam LO

3. Metode penilaian investasi pemerintah :
   a. Metode Biaya yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
   b. Metode Ekuitas yaitu pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

      Metode ekuitas diterapkan untuk :
      1) Kepemilikan sampai 50%, dan memiliki pengaruh yang signifikan; dan
      2) Kepemilikan lebih dari 50%.
   c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk investasi non permanen berbentuk dana bergulir.

4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
2. Barang persediaan terdiri dari :
   a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah yang terdiri dari barang pakai habis seperti alat tulis kantor, suku cadang, obat-obatan/bahan laboratorium; barang tidak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
   b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemerintah daerah (pemda) lain;
   c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, seperti konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda;
   d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contoh:
      1. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; dan
      2. tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
   e. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti minyak dan beras.
3. Persediaan barang-barang operasional kegiatan, persediaan tidak dapat dilihat dari bentuk barangnya, melainkan niat awal (*intention*) pada saat penyusunan perencanaan kegiatan dan penyusunan RKA-nya, sehingga untuk barang-barang yang memang direncanakan habis pada satu kegiatan tidak menjadi persediaan.
4. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pencatatan persediaan untuk operasional kegiatan SKPD adalah materialitas; pencerminan dari tugas dan fungsi utama SKPD; dan pengendalian internal.
5. Jenis-jenis persediaan :
   a. Berdasarkan sifat pemakaiannya, barang persediaan terdiri atas:
      1. Barang habis pakai;
      2. Barang tak habis pakai; dan
      3. Barang bekas pakai.
   b. Berdasarkan bentuk dan jenisnya, barang persediaan terdiri atas:
      1. Barang konsumsi;
      2. Amunisi;
      3. Bahan untuk pemeliharaan;
      4. Suku cadang;
      5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
      6. Bahan baku;

7. Barang dalam proses/ setengah jadi;
8. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
9. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
10. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
11. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
12. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
13. Persediaan lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

6. Persediaan diakui pada saat :
   a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan di dalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diukur secara andal, jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral).
   b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kuitansi, atau Berita Acara Serah Terima (BAST).
      Pencatatan barang persediaan dilakukan berdasarkan satuan barang yang lazim dipergunakan untuk masing-masing jenis barang atau satuan barang lain yang dianggap paling memadai dalam pertimbangan materialitas dan pengendalian pencatatan.
      Pada akhir periode pelaporan jumlah persediaan diketahui dengan melakukan inventarisasi fisik (*stock opname*). *Stock opname* dilakukan atas barang yang belum dipakai, baik yang masih berada di gudang/tempat penyimpanan maupun persediaan yang berada di unit pengguna.
7. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.
8. Pemakaian persediaan diakui sebagai beban barang pada akhir periode pelaporan berdasarkan perhitungan dari transaksi penggunaan persediaan, penyerahan persediaan kepada masyarakat atau sebab lain yang mengakibatkan berkurang atau bertambahnya jumlah persediaan.
9. Pengukuran persediaan melalui :
   a. Biaya perolehan merupakan biaya yang dikeluarkan sampai dengan persediaan tersebut sampai di gudang. Biaya perolehan persediaan meliputi :
      1) harga pembelian;
      2) biaya pengangkutan;
      3) biaya penanganan; dan
      4) biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan.

      Hal yang mengurangi biaya perolehan persediaan:
      1) potongan harga; dan
      2) rabat, dan lainnya yang serupa.
   b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Harga pokok produksi dapat terdiri dari biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Dalam menghitung harga pokok produksi, dapat digunakan biaya standar dalam hal perhitungan biaya riil sulit dilakukan.

c. Nilai wajar apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya seperti proses pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, donasi, rampasan dan lainnya. Khusus persediaan pengembangbiakan hewan, biota perairan dan tanaman, nilai wajar adalah nilai tarif retribusi atau nilai jual.

10. Persediaan yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat, biaya perolehannya meliputi harga pembelian serta biaya langsung yang dapat dibebankan pada perolehan persediaan tersebut.
11. Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan :
    a. metode penilaian Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP). Nilai barang-barang yang pertama kali dibeli merupakan nilai barang yang dipakai/dijual/diserahkan pertama kali. Dengan demikian nilai persediaan akhir dihitung mulai dari harga pembelian terakhir;
    b. persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaannya dihitung berdasarkan inventarisasi fisik yaitu dengan cara saldo awal ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir dikalikan nilai perunit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.
12. Dalam rangka penyajian beban persediaan pada Laporan Operasional, Beban Persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Dikecualikan dari Beban Persediaan adalah pemakaian barang persediaan untuk pemeliharaan yang dicatat sebagai Beban Pemeliharaan dan Penyerahan Barang Persediaan untuk dijual diserahkan kepada Masyarakat/Pemerintah daerah lain yang dicatat sebagai Beban Barang untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat/Pemda lain.
13. Persediaan berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga yang masih dalam proses pembangunan sampai dengan tanggal pelaporan, maka atas pengeluaran-pengeluaran yang dapat diatribusikan untuk pembentukan aset tersebut tetap disajikan sebagai persediaan (bukan KDP).
14. Dalam hal SKPD karena tugas dan fungsinya menerima hibah seperti penerimaan Hadiah Tidak Tertebak atau Hadiah Yang Tidak Diambil Oleh Pemenang, persediaan tersebut dicatat sebesar harga wajar pada saat perolehan.
15. Koreksi atas barang persediaan yang rusak, susut, kadaluarsa dan barang yang tidak terlalu sering diperlukan dan penggunaannya tidak pasti (slow moving item) dilaksanakan oleh Kepala SKPD dan diinformasikan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah berdasarkan berita acara yang menjadi dasar koreksi dimaksud.
16. Persediaan sumber daya alam diklasifikasikan berdasarkan cadangan potensi, cadangan yang dapat dieksplorasi dan sumber daya alam hasil eksplorasi yang tersisa per periode laporan. Harga satuan persediaan dicatat berdasarkan harga pasar/harga standar tarif retribusi.
17. Persediaan disajikan di Neraca pada bagian aset lancar.
18. Catatan atas Laporan Keuangan untuk persediaan mengungkapkan:
    a. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
    b. Nilai Persediaan yang kadaluarsa dan rusak atau usang serta persediaan yang dimusnahkan pada periode pelaporan.

4.11 Kebijakan Akuntansi Aset Tetap Daerah

1. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.
3. Klasifikasi Aset Tetap adalah Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).
4. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Pengakuan aset tetap menggunakan azas *subtance over form* dan akan sangat andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Kriteria untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap :
   a. Berwujud
   b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
   c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
   d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
   e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6. Aset Tetap yang diperoleh melalui hibah/donasi diakui pada saat Aset Tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.
7. Pengakuan atas Aset Tetap berdasarkan jenis transaksinya, terdiri dari :
   a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap digunakan;
   b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai Aset Tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
   c. Pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai Aset Tetap dikarenakan berkurangnya volume nilai Aset Tetap tersebut; dan
   d. penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.
8. Pengakuan spesifik atas aset tetap dijelaskan sebagai berikut :
   a. Dalam hal terdapat Tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, diungkapkan dalam CaLK.
   b. Pengadaan aset tetap tanah pemerintah yang sejak semula dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain tidak disajikan sebagai aset tetap, melainkan disajikan sebagai persediaan. Penyerahan atas aset tetap tersebut didasarkan pada bukti kepemilikan dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK.
   c. Aset Tetap harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan.
   d. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan

hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

9. Aset Tetap pada prinsipnya dinilai dengan biaya perolehan. Apabila biaya perolehan suatu aset adalah tanpa nilai atau tidak dapat diidentifikasi, maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
10. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.
11. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
12. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).
13. Atas aset hasil dari bonus maka biaya perolehan aset adalah nilai wajar aset tersebut pada tanggal perolehannya.
14. Terkait dengan pengukuran Aset Tetap maka perlu memperhatikan biaya perolehan aset yang terdiri dari harga pembelian, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon dan rabat, dan seluruh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/didistribusikan dengan aset dan membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
15. Ketika pembelian suatu aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, maka biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera (harga perolehan kas).
16. Perbedaan/selisih antara harga kas dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
17. Biaya administrasi dan biaya overhead lainnya bukan merupakan komponen dari biaya perolehan suatu aset kecuali biaya tersebut dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya (siap pakai). Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan biaya lain sejenisnya bukan merupakan komponen dari biaya suatu aset kecuali biaya tersebut diperlukan untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.
18. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
19. Pengukuran Aset Tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap.
20. Aset tetap dibawah nilai satuan minimum kapitalisasi dikategorikan sebagai aset ekstrakomtable dan berlaku sejak ditetapkan. Aset ekstrakomtable tidak disajikan pada neraca, namun tetap diungkapkan dalam CaLK.
21. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu Aset Tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan *(carrying amount)*.
22. Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran *(expenses)* pada periode dimana beban pengeluaran tersebut terjadi.

23. Pengeluaran setelah perolehan Saldo awal suatu Aset tetap hanya dapat dikapitalisasi menambah nilai aset dengan persyaratan sebagai berikut :
    a. Pengeluaran tersebut menambah volume/kapasitas aset; atau
    b. Semua aset tersebut rusak berat dan tidak dapat dipergunakan menjadi siap digunakan.
    c. Khusus bagi pemeliharaan peralatan mesin dan pemeliharaan gedung, pengeluaran memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi Aset Tetap
24. Beban yang dikeluarkan untuk perbaikan atau pemeliharaan Aset Tetap yang ditujukan untuk memulihkan atau mempertahankan *economic benefit* atau potensi *service* atas aset dimaksud dari performa standar yang diharapkan diperlakukan sebagai beban pada saat dikeluarkan/terjadinya.
25. Suatu aset dapat diperoleh melalui pertukaran suatu aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama.
26. Biaya perolehan aset pertukaran diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/diserahkan.
27. Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.
28. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
29. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam LO. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset Tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
30. Aset tetap renovasi merupakan renovasi atas Aset Tetap bukan milik suatu satuan kerja atau satuan kerja pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan kapitalisasi Aset Tetap dan dikategorikan sebagai Aset Tetap Lainnya. Aset Tetap Lainnya berupa alat musik modern dan Aset Tetap Renovasi dilakukan penyusutan secara periodik.
31. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset tidak digunakan operasional pemerintah, disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
32. Aset Tetap yang dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang, direklasifikasi ke Aset Lainnya (Barang Rusak Berat). Apabila Keputusan Penghapusan mengenai Aset Tetap yang rusak berat dan/atau usang telah diterbitkan oleh Pengguna Barang, maka aset tersebut dihapus dari Aset Lainnya (Barang Rusak Berat).

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas Aset Tetap tersebut perlu untuk disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku suatu Aset Tetap pada akhir masa manfaatnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*). Metode garis lurus menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan perhitungan penyusutan adalah:

$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat disusutkan adalah seluruh nilai perolehan aset dengan tidak memiliki nilai sisa (residu).

b. Masa manfaat aset untuk melakukan perhitungan penyusutan adalah sebagaimana tercantum pada tabel masa manfaat aset tetap dibawah ini :

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02				Peralatan dan Mesin			
1	3	02	01			Alat Besar			
1	3	02	01	01		Alat Besar Darat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	02	01	02		Alat Besar Apung	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	01	03		Alat Bantu	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02			Alat Angkutan			
1	3	02	02	01		Alat Angkutan Darat Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	02	02		Alat Angkutan Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	03		Alat Angkut Apung Bermotor	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	02	04		Alat Angkut Apung Tak Bermotor	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	02	05		Alat Angkut Bermotor Udara	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	6
								≥75%	9
1	3	02	03			Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	03	01		Alat Bengkel Bermesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	03	02		Alat Bengkel Tak Bermesin	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	03	03		Alat Ukur	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	04			Alat Bengkel dan Ukur			
1	3	02	04	01		Alat Pengolahan	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05			Alat Kantor dan Rumah Tangga			
1	3	02	05	01		Alat Kantor	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	02		Alat Rumah Tangga	5	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	05	03		Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06			Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar			
1	3	02	06	01		Alat Studio	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	02		Alat Komunikasi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	06	03		Peralatan Pemancar	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	06	04		Peralatan Komunikasi Navigasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	02	07			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	07	01		Alat Kedokteran	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	07	02		Alat Kesehatan Umum	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	08			Alat Kedokteran dan Kesehatan			
1	3	02	08	01		Unit Alat Laboratorium	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	08	02		Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	03		Alat Praktek Sekolah	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	08	04		Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	8
1	3	02	08	05		Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	06		Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	08	07		Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	02	08	08		Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	7
1	3	02	08	09		Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	09			Alat Persenjataan			
1	3	02	09	01		Senjata Api	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	09	02		Persenjataan Non Senjata Api	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	09	03		Senjata Sinar	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	0
								≥75%	2
1	3	02	09	04		Alat Khusus Kepolisian	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	10			Komputer			
1	3	02	10	01		Komputer Unit	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	10	02		Peralatan Komputer	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11			Alat Eksplorasi			
1	3	02	11	01		Alat Eksplorasi Topografi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	11	02		Alat Eksplorasi Geofisika	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	12			Alat Pengeboran			
1	3	02	12	01		Alat Pengeboran Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	12	02		Alat Pengeboran Non Mesin	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13			Alat Produksi, Pengolahn dan Pemurnian			
1	3	02	13	01		Sumur	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	02		Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	13	03		Pengolahan dan Pemurnian	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	5

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								≥75%	6
1	3	02	14			Alat Bantu Eksplorasi			
1	3	02	14	01		Alat Bantu Eksplorasi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	14	02		Alat Bantu Produksi	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	5
1	3	02	15			Alat Keselamatan Kerja			
1	3	02	15	01		Alat Deteksi	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	02	15	02		Alat Pelindung	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	0
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	15	03		Alat SAR	2	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	1
1	3	02	15	04		Alat kerja Penerbangan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	4
1	3	02	16			Alat Peraga			
1	3	02	16	01		Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	3
1	3	02	17			Peralatan Proses/Produksi			
1	3	02	17	01		Unit Peralatan Proses/Produksi	8	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	3	02	18			Rambu-Rambu			
1	3	02	18	01		Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	8	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	02		Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2
1	3	02	18	03		Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	15	<25%	0
								25%≤ sd <50%	3
								50%≤ sd <75%	4
								≥75%	7
1	3	02	19			Peralatan Olahraga			
1	3	02	19	01		Peralatan Olahraga	4	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	2
1	3	03				Gedung dan Bangunan			
1	3	03	01			Bangunan Gedung			
1	3	03	01	01		Bangunan Gedung Tempat Kerja			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	03	01	02		Bangunan Gedung Tempat Tinggal			
						Permanen	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
						Semi Permanen	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	7
						Darurat	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	03	02			Monumen			
1	3	03	02	01		Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	03	03			Menara			
1	3	03	03	01		Bangunan Menara Perambuan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	03	04			Tugu Titik Kontrol/Pasti			
1	3	03	04	01		Tugu Titik Kontrol/Pasti	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04				Jalan, Irigasi, dan Jaringan			

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	01			Jalan dan Jembatan			
1	3	04	01	01		Jalan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	5
1	3	04	01	02		Jembatan	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02			Bangunan Air			
1	3	04	02	01		Bangunan Air Irigasi	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	02		Bangunan Pengairan Pasang Surut	50	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	03		Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	02	04		Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3
1	3	04	02	05		Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	2
								≥75%	3

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	02	06		Bangunan Air Bersih/Baku	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	02	07		Bangunan Air Kotor	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03			Instalasi			
1	3	04	03	01		Instalasi Air Bersih/Baku	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	02		Instalasi Air Kotor	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	03	03		Instalasi Pengolahan Sampah	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	04		Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	05		Instalasi Pembangkit Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	06		Instalasi Gardu Listrik	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
1	3	04	03	07		Instalasi Pertahanan	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	3
								≥75%	5
1	3	04	03	08		Instalasi Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	03	09		Instalasi Pengaman	20	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	03	10		Instalasi Lainnya	5	<25%	0
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	3
1	3	04	04			Jaringan			
1	3	04	04	01		Jaringan Air Minum	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	04	02		Jaringan Listrik dan Komputer	40	<25%	0
								25%≤ sd <50%	5
								50%≤ sd <75%	10
								≥75%	15
1	3	04	04	03		Jaringan Telepon	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	5
								≥75%	10
1	3	04	04	04		Jaringan Gas	30	<25%	0
								25%≤ sd <50%	2
								50%≤ sd <75%	7
								≥75%	10
1	3	04	05			Alat Bercorak kebudayaan dan Kesenian			
1	3	04	05	01		Alat Musik Modern/Band	5	<25%	0

Kode Akun						Uraian Akun	Masa Manfaat (tahun)	Prosentase Renovasi/ Overhoul	Penambahan Masa Manfaat (tahun)
								25%≤ sd <50%	1
								50%≤ sd <75%	1
								≥75%	2

33. Perhitungan penyusutan aset tetap dilakukan secara bulanan dan pengadaan/perolehan pada bulan tertentu mulai dihitung penyusutannya. Khusus perhitungan penyusutan secara bulanan akan mulai diterapkan Tahun Anggaran 2021. Perhitungan penyusutan dalam penyusunan Laporan Keuangan 2020 dilakukan secara tahunan.
34. Suatu Aset Tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset Tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam CaLK Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
35. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Pemerintahan menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau pertukaran.
36. Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi yang dilakukan agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan bentuk fisik aset tersebut (klasifikasinya). Reklasifikasi Aset Tetap ke aset lainnya dapat dilakukan sepanjang waktu, tidak tergantung periode laporan.
37. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, dan rekonstruksi atas aset bersejarah harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.
38. Penyajian aset bersejarah (heritage assets) tidak harus di neraca tetapi diungkapkan dalam CaLK. Beberapa Aset Tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah.
39. Penyajian Aset Tetap berdasarkan kepada biaya perolehan Aset Tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
40. Aset *ekstrakomtable* terdiri dari :
    a. Aset tetap peralatan dan mesin yang nilainya kurang dari/sama dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
    b. Aset tetap gedung dan bangunan yang kurang dari/sama dengan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
    c. Aset tetap lainnya berupa buku yang dipinjamkan, hewan, biota perairan dan tanaman.
41. Aset ekstrakomtable dalam kondisi rusak berat/usang/mati; hilang dan telah selesai proses penggantian/TPTGR; aset yang fisiknya sulit ditemukan dan masa manfaat sudah habis dapat dihapus bukukan.
42. Prosedur pemusnahan aset ekstrakomtable dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable yang akan dimusnahkan. Dalam hal ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemusnahan aset ektrakomtable belum/tidak diatur, SKPD teknis menyusun prosedur pemusnahan dimaksud.

4.12 Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
2. Dana cadangan diakui pada saat pemerintah daerah mengeluarkan kas dari kas umum daerah untuk membentuk dana cadangan yang dianggarkan dalam pembiayaan.
3. Perolehan yang diterima atas dana cadangan berupa jasa giro atau bunga diakui sebagai pendapatan jasa giro atau pendapatan bunga pada SKPKD.
4. Dana cadangan dinilai sebesar nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan ke dana cadangan. Sedangkan hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah dana cadangan.

4.13 Kebijakan Akuntansi Properti Investasi

1. Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
2. Properti investasi dikuasai untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk memperoleh kenaikan nilai, atau keduanya. Oleh karena itu, properti investasi menghasilkan arus kas yang sebagian besar tidak bergantung pada aset lain yang dikuasai oleh entitas. Hal ini membedakan properti investasi dari properti yang digunakan sendiri (aset tetap);
3. Properti Investasi yang disewakan kepada entitas pemerintah lainnya maka bagian properti investasi yang disewakan kepada pemerintah lainnya tersebut harus diungkapkan dalam laporan keuangan kedua entitas pelaporan;
4. Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi dan biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal;
5. Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut;
6. Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan;
7. Properti Investasi, kecuali tanah, disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan kebijakan yang mengatur Aset Tetap;
8. Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap, dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan, berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi, dan dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi;
9. Properti Investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya;

10. Pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual, ditukar, dihapuskan atau dihentikan pengakuannya; Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar dan disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.
11. Pengungkapan Properti Investasi meliputi:
    a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
    b. metode penyusutan yang digunakan;
    c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
    d. jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan (agregat dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
    e. rekonsiliasi jumlah tercatat properti investasi pada awal dan akhir periode, yang menunjukkan:
        1) penambahan, pengungkapan terpisah untuk penambahan yang dihasilkan dari penggabungan dan penambahan pengeluaran setelah perolehan yang diakui sebagai aset;
        2) penambahan yang dihasilkan melalui penggabungan;
        3) pelepasan;
        4) penyusutan;
        5) alih guna ke dan dari persediaan dan properti yang digunakan sendiri; dan
        6) perubahan lain.
12. Penerapan pertama kali Kebijakan Properti Investasi yang mengklasifikasikan aset ke dalam Properti Investasi dengan menggunakan nilai tercatat aset sebagai nilai perolehannya.

4.14 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset Lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud (ATB), dan aset lain-lain.
2. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat kontrak penjualan pemerintah daerah secara angsuran kepada pemerintah telah ditandatangani.
3. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan asset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah.
4. Tagihan penjualan angsuran disajikan dalam neraca disertai penjelasan dalam catatan atas laporan keuangan.
5. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Daerah merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh daerah sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
6. Pengakuan atas kejadian yang mengakibatkan terjadinya kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Non Bendahara terdiri dari :
    1. Pengakuan atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik daerah

Diakui pada saat terbukti berdasarkan fakta dengan melakukan reklasifikasi di neraca atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara tersebut dari jumlah semestinya menjadi Aset Lainnya.

2. Pengakuan atas Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau Tuntutan Ganti Rugi Daerah.
   Diakui di neraca menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan atau tuntutan piutang ganti rugi pada saat terbit Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan. Piutang ini sebagai *contrapost* atas kekurangan kas tunai, surat berharga dan barang milik Negara.
3. Pengakuan Beban
   Apabila kekurangan kas tersebut terbukti bukan kesalahan bendahara atau non bendahara maka akan diakui sebagai beban non operasional.

7. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi disajikan dalam neraca sebagai bagian dari "Aset Lainnya" dan informasi yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
8. Aset Kemitraan merupakan aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
9. Bangun, Kelola, Serah – BKS (Build, Operate, Transfer – BOT), adalah pola kerjasama aset pemerintah oleh mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor), dengan cara pihak mitra tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya aset pemerintah beserta bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsensi).
10. Jenis-jenis aset kemitraan dengan pihak tiga antara lain :
    a. Tanah
    b. Gedung dan bangunan dan/atau sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan
    c. BMD selain tanah dan bangunan
    d. Aset tak berwujud
11. Aset Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kemitraan.
12. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kemitraan harus dicatat sebagai aset kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam kemitraan dicatat sebagai penyertaan kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
13. Aset kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
14. Aset Tak Berwujud didefinisikan sebagai aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB merupakan bagian dari Aset Non lancar yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum yang memiliki kriteria: dapat diidentifikasi,

dikuasai/dimiliki, dikendalikan oleh entitas pemerintah, mempunyai potensi manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh pemerintah, dan biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal.

15. Jenis-jenis aset tak berwujud dapat dibedakan jenis sumber daya, cara perolehan serta masa manfaatnya. Menurut jenis sumber dayanya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Perangkat lunak *Software* computer
    b. Hak paten, Hak cipta
    c. Lisensi dan Waralaba *(Franchise)*
    d. Hasil Kajian/Penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
    e. Goodwill
    f. Royalti
    g. Aset tak berwujud lainnya
    h. Aset tak berwujud dalam pengerjaan
16. Menurut cara perolehannya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. Pembelian
    b. Pengembangan internal
    c. Pertukaran
    d. Kerjasama
    e. Donasi/hibah; dan
    f. Warisan budaya/sejarah
17. Berdasarkan masa manfaatnya, ATB dapat dibedakan menjadi :
    a. ATB dengan masa manfaat terbatas; dan
    b. ATB dengan masa manfaat tak terbatas
18. Pengukuran ATB dapat dilakukan pada saat perolehan awal serta pada saat setelah perolehan awal. Pada saat perolehan, ATB dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian ATB dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka nilai ATB berdasar pada nilai wajar pada saat perolehan. Pada kondisi terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai suatu ATB.
19. Amortisasi adalah alokasi harga perolehan ATB secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi ATB sama prinsipnya seperti penyusutan dalam aset tetap masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak. Amortisasi dibagi menjadi Amortisasi atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas dan Amortisasi untuk aset tak berwujud dengan manfaat tak terbatas (seperti goodwill, merek dagang) tidak dilakukan amortisasi.
20. Metode amortisasi yang digunakan adalah metode metode garis lurus (straight line method). Metode garis lurus menetapkan tarif amortisasi untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama. Rumusan tersebut adalah :

$$\text{amortisasi per periode} = \frac{\text{Nilai yang dapat diamortisasikan}}{\text{Masa manfaat}}$$

a. Nilai yang dapat diamortisasikan adalah seluruh nilai perolehan aset dan tidak memiliki nilai sisa (residu).
b. Masa manfaat aset tak berwujud terbatas.

21. Suatu aset tak berwujud harus dihentikan dari penggunaannya dengan keadaan dan alasan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat Aset Tak Berwujud sehingga perlu digantikan dengan yang baru. Penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Pelepasan Aset Tak Berwujud dilingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan.
22. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang bersangkutan habis diamortisasikan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai kerugian atau keuntungan non operasional pada Laporan Operasional. Penerimaan kas dari penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran. Sedangkan kas dari penjualan ATB dimaksud sebesar nilai bukunya dikelompokkan sebagai kas dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.
23. Software komputer sebagai ATB yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat diakui sebagai berikut :
    a. *Software* yang dikembangkan sendiri oleh instansi pemerintah (swakelola) tidak diakui sebagai ATB
    b. *Software* komputer yang dibangun/dikembangkan melalui kontrak dengan pihak ketiga diakui sebagai ATB sebesar nilai kontraknya.
    c. *Software* yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum;
    d. *Software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan;
    e. Apabila *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian *integral* dari suatu *hardware*, maka *software* tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai bagian dari *hardware* yang bersangkutan.
24. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca sebagai bagian dari “Aset Lainnya”.
25. Aset tak berwujud diungkapkan dalam Laporan Keuangan antara lain sebagai berikut :
    a. masa manfaat dan metode amortisasi;
    b. nilai tercatat bruto, akumulasi amortisasi dan nilai sisa Aset Tak Berwujud; dan
    c. penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk penghentian dan pelepasan Aset Tak Berwujud.
26. Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga dan aset tak berwujud.
27. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain, meliputi :

a. aset tetap yang rusak berat/usang;
b. aset tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah;
c. aset lain-lain lainnya antara lain:
   - kas/setara kas yang diblokir, disita atau kepemilikannya belum dapat teridentifikasi;
   - aset tetap yang sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal, tukar menukar);
   - aset hilang karena akibat bencana atau kelalaian;
   - aset yang masih dalam proses kepastian status hukum.

28. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya. Aset lain-lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
29. Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.15 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
2. Kewajiban diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.
3. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
5. Kewajiban jangka pendek terdiri dari utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan fihak ketiga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang beban, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
6. Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah. Termasuk pendapatan diterima dimuka adalah deposit/uang titipan pihak ketiga dalam transaksi *financial technology.*
7. Kewajiban jangka panjang terdiri dari utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.
8. Kewajiban pemerintah harus diungkapkan dalam neraca pada periode pelaporan dengan nilai yang handal. Untuk mendukung agar informasinya lebih lengkap dan bermanfaat bagi setiap pengguna laporan keuangan, selain disajikan dalam neraca maka harus diungkapkan dalam CaLK.

4.16 Kebijakan Akuntansi Ekuitas

1. Dalam Basis Akrual, pemerintah hanya menyajikan satu jenis pos ekuitas.
2. Komponen ekuitas terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :
   a. Ekuitas digunakan untuk mencatat akun saldo kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Perubahan Ekuitas.
   b. Ekuitas untuk dikonsolidasikan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup akun RK-PPKD. Ekuitas untuk dikonsolidasikan berada di SKPD.
3. Ekuitas diakui pada akhir periode berdasarkan jurnal penyesuaian untuk memindahkan surplus/defisit LO dalam neraca

4. Ekuitas untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi trasnsaksi resiprokal antara SKPKD dan SKPD.
5. Pada akhir periode pelaporan, ekuitas dikonsolidasikan akan dieliminasi dalam rangka menghasilkan laporan keuangan konsolidasian.
6. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.17 Kebijakan Akuntansi Koreksi

1. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya
2. Ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi, kesalahan perhitungan, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian dan faktor lainnya.
3. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadian dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

a. Kesalahan tidak berulang

1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan ini yang mempengaruhi posisi kas atau tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO maupun beban.

2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

a) Koreksi saat laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

b) Koreksi saat laporan keuangan telah terbit (Perda Pertanggungjawaban)

(1) Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

(a) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas;

(2) Belanja dan Beban

(a) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain–LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih;

(b) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset

selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO/ekuitas. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun beban lain-lain-LO/ekuitas.

(3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

(4) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

(5) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan,

(6) Koreksi kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, pembetulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait pada periode kesalahan ditemukan.

b. Kesalahan berulang dan sistematis

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

BAB 5
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah TA 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD TA 2024. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan	27.230.787.812.000,00	26.378.719.626.419,00	96,87	25.369.733.556.675,00	1.008.986.069.744,00
2	Belanja dan transfer	28.566.843.632.000,00	27.187.126.497.803,00	95,17	25.800.341.207.782,00	1.386.785.290.021,00
	Surplus/(Defisit)	**(1.336.055.820.000,00)**	**(808.406.871.384,00)**	**60,51**	**(430.607.651.107,00)**	**(377.799.220.277,00)**
3	Penerimaan Pembiayaan	1.406.055.820.000,00	1.406.120.547.664,00	100,00	1.330.794.071.071,00	75.326.476.593,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	-	20.700.000.000,00
	Pembiayaan netto	**1.336.055.820.000,00**	**1.385.420.547.664,00**	**103,69**	**1.330.794.071.071,00**	**54.626.476.593,00**
5	**SiLPA**	**-**	**577.013.676.280,00**	**-**	**900.186.419.964,00**	**(323.172.743.684,00)**

Penjelasan terinci realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

5.1.1 PENDAPATAN DAERAH Rp26.378.719.626.419,00

Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp27.230.787.812.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.378.719.626.419,00 atau 96,87% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.369.733.556.675,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.008.986.069.744,00 atau 3,97% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	18.594.062.625.000,00	17.650.936.913.504,00	94,93	17.012.509.421.006,00	638.427.492.498,00
2	Pendapatan Transfer	8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05	8.278.928.086.424,00	422.510.780.371,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	25.593.372.000,00	26.343.846.120,00	102,93	78.296.049.245,00	(51.952.203.125,00)
	Jumlah	**27.230.787.812.000,00**	**26.378.719.626.419,00**	**96,87**	**25.369.733.556.675,00**	**1.008.986.069.744,00**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp17.650.936.913.504,00

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp18.594.062.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp17.650.936.913.504,00 atau 94,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp17.012.509.421.006,00 mengalami kenaikan sebesar Rp638.427.492.498,00 atau 3,74% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	15.471.102.880.000,00	14.210.241.533.541,00	91,85	13.976.642.716.351,00	233.598.817.190,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.050.687.360.000,00	2.318.821.514.818,00	113,08	139.377.038.536,00	2.179.444.476.282,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	687.752.278.000,00	687.813.166.201,00	100,01	638.482.406.528,00	49.330.759.673,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	384.520.107.000,00	434.060.698.944,00	112,88	2.258.007.259.591,00	(1.823.946.560.647,00)
	Jumlah	**18.594.062.625.000,00**	**17.650.936.913.504,00**	**94,93**	**17.012.509.421.006,00**	**638.427.492.498,00**

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Rp14.210.241.533.541,00

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp15.471.102.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp14.210.241.533.541,00 atau 91,85%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp13.976.642.716.351,00 mengalami kenaikan sebesar Rp233.598.817.190,00 atau 1,67%. Pelaksanaan pengenaan Pajak Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.505.647.791.000,00	5.474.932.909.600,00	84,16	5.509.907.492.075,00	(34.974.582.475,00)
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	3.289.576.527.000,00	3.068.323.586.500,00	93,27	2.963.924.066.000,00	104.399.520.500,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2.552.921.672.000,00	2.693.880.376.743,00	105,52	2.667.596.623.023,00	26.283.753.720,00
4	Pajak Air Permukaan	21.628.000.000,00	18.993.373.282,00	87,82	17.054.441.424,00	1.938.931.858,00
5	Pajak Rokok	3.101.297.956.000,00	2.954.059.323.916,00	95,25	2.818.160.093.829,00	135.899.230.087,00
6	Pajak Alat Berat (PAB)	30.934.000,00	51.963.500,00	167,98	-	51.963.500,00
	Jumlah	**15.471.102.880.000,00**	**14.210.241.533.541,00**	**91,85**	**13.976.642.716.351,00**	**233.598.817.190,00**

Pendapatan Pajak Daerah **tidak mencapai target** dikarenakan:

- Jenis PKB dan BBNKB dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak serta penurunan penjualan kendaraan bermotor sebagaimana diungkapkan oleh GAIKINDO bahwa target penjualan dilakukan revisi dari 1,1 juta unit menjadi 850 ribu unit year on year. Penjualan wholesales (pabrik ke dealer) turun 14,7% dan penjulan retail (dealer ke konsumen) turun 11,2%. Adanya fenomena baru kendaraan listrik berbasis baterai yang diberikan insentif fiskal berupa pembebasan PKB dan BBNKB serta kecenderungan pilihan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang secara kualitas memiliki dasar pengenaan pajak yang lebih rendan apabila dibandingkan dengan kendaraan non LCGC.
- Jenis Pajak Air Permukaan dipengaruhi oleh kondisi iklim yang berakibat pada volume pengambilan air permukaan. Salah satu wajib Pajak potensial yaitu PT. Indonesia Power melaporkan penurunan volume pengambilan air permukaan dengan alasan tingkat elevasi air yang tidak memenuhi batas bawah. Disisi lain terdapat wajib pajak yang terkena bencana alam yaitu PT. Cahaya Semesta Energi di Kecamatan Pageruyung Kabupaten Kendal sehingga mengurangi aktivitas pengambilan air permukaan.
- Jenis Pajak Rokok dipengaruhi oleh capaian kinerja penerimaan cukai rokok oleh pemerintah pusat. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-58/PK/2023 Tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Proporsi Dan Estimasi Penerimaan Pajak Rokok Untuk Masing-Masing Provinsi Tahun Anggaran 2024, target Pajak Rokok Provinsi Jawa Tengah ditetapkan Rp3.101.297.955.000 dan berdasarkan realisasi

transfer dari kementerian keuangan sampai dengan triwulan ke IV sebesar Rp2.954.059.323.916. Ketidaktercapaian pajak rokok berbanding lurus dengan ketidaktercapaian realisasi penerimaan cukai rokok.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah Rp2.318.821.514.818,00

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp2.050.687.360.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.318.821.514.818,00 atau 113,08%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp139.377.038.536,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.179.444.476.282,00 atau 1.563,70%. Pelaksanaan pengenaan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	1.947.326.203.000,00	2.219.653.775.575,00	113,98	28.215.492.380,00	2.191.438.283.195,00
2	Retribusi Jasa Usaha	101.345.157.000,00	92.761.371.908,00	91,53	107.049.975.656,00	(14.288.603.748,00)
3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.016.000.000,00	6.406.367.335,00	317,78	4.111.570.500,00	2.294.796.835,00
	Jumlah	**2.050.687.360.000,00**	**2.318.821.514.818,00**	**113,08**	**139.377.038.536,00**	**2.179.444.476.282,00**

5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum Rp2.219.653.775.575,00

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp1.947.326.203.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.219.653.775.575,00 atau 113,98%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp28.215.492.380,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.191.438.283.195,00 atau 7.766,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.945.654.213.000,00	2.217.602.631.575,00	113,98	27.421.308.380,00	2.190.181.323.195,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	1.671.990.000,00	2.051.144.000,00	122,68	-	2.051.144.000,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	-	-	334.284.000,00	(334.284.000,00)
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	-	-	459.900.000,00	(459.900.000,00)
	Jumlah	**1.947.326.203.000,00**	**2.219.653.775.575,00**	**113,98**	**28.215.492.380,00**	**2.191.438.283.195,00**

5.1.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp2.217.602.631.575,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan ditargetkan sebesar Rp1.945.654.213.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.217.602.631.575,00 atau 113,98%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp27.421.308.380,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.190.181.323.195,00 atau 7.987,15% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	26.534.613.000,00	27.231.223.894,00	102,63	27.421.308.380,00	(190.084.486,00)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	990.550.000.000,00	1.051.958.578.478,00	106,20	-	1.051.958.578.478,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	557.763.800.000,00	769.086.700.599,00	137,89	-	769.086.700.599,00
4	RSUD dr. Adhyatma MPH	170.280.500.000,00	162.221.548.649,00	95,27	-	162.221.548.649,00
5	RSUD dr. Rehatta	60.077.300.000,00	61.118.196.043,00	101,73	-	61.118.196.043,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	51.800.000.000,00	52.463.679.746,00	101,28	-	52.463.679.746,00
7	RSJD Dr. Arif Zainudin	41.548.000.000,00	41.513.253.313,00	99,92	-	41.513.253.313,00
8	RSJD Dr. RM Sedjarwadi Klaten	47.100.000.000,00	52.009.450.853,00	110,42	-	52.009.450.853,00

	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Jumlah	**1.945.654.213.000,00**	**2.217.602.631.575,00**	**113,98**	**27.421.308.380,00**	**2.190.181.323.195,00**

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan adanya perubahan klasifikasi atas Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit yang tahun lali dicatat sebagai Pendapatan BLUD-Jasa Pelayanan. Hal ini sesuai amanat Pasal 88 jenis pelayanan retribusi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

5.1.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Rp2.051.144.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp1.671.990.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.051.144.000,00 atau 122,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.051.144.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	1.500.330.000,00	1.990.420.000,00	132,67	-	1.990.420.000,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	12.000.000,00	15.725.000,00	131,04	-	15.725.000,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	159.660.000,00	44.999.000,00	28,18	-	44.999.000,00
	Jumlah	**1.671.990.000,00**	**2.051.144.000,00**	**122,68**	**-**	**2.051.144.000,00**

5.1.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Rp0,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp334.284.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp334.284.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan	-	-	-	9.200.000,00	(9.200.000,00)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	325.084.000,00	(325.084.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**334.284.000,00**	**(334.284.000,00)**

5.1.1.1.2.1.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp459.900.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp459.900.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	459.900.000,00	(459.900.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**459.900.000,00**	**(459.900.000,00)**

5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Rp92.761.371.908,00

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp101.345.157.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.761.371.908,00 atau 91,53%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp107.049.975.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.288.603.748,00 atau 13,34% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	51.701.138.900,00	50.284.681.535,00	97,26	64.823.782.552,00	(14.539.101.017,00)
2	Retribusi Tempat Pelelangan	524.500.000,00	92.042.000,00	17,55	224.497.700,00	(132.455.700,00)
3	Retribusi Terminal	349.880.000,00	315.420.000,00	90,15	4.213.857.700,00	(3.898.437.700,00)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.506.390.000,00	5.160.417.195,00	205,89	-	5.160.417.195,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila"	9.193.200.000,00	7.927.263.000,00	86,23	6.710.588.000,00	1.216.675.000,00
6	Retribusi Kepelabuhan	7.210.000.000,00	11.368.920.000,00	157,68	10.434.792.000,00	934.128.000,00
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	4.855.175.000,00	2.266.141.000,00	46,67	820.729.500,00	1.445.411.500,00
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	25.004.873.100,00	15.346.487.178,00	61,37	19.821.728.204,00	(4.475.241.026,00)
	Jumlah	**101.345.157.000,00**	**92.761.371.908,00**	**91,53**	**107.049.975.656,00**	**(14.288.603.748,00)**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum telah mencapai target, namun terdapat SKPD yang **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan :

- Objek Retribusi Tempat Pelelangan dipengaruhi oleh adanya kebijakan dari manajemen PT. Perhutani (Persero) yang pada tahun 2024 melakukan perubahan proses lelang yang semula dilakukan dengan mekanisme tatap muka menjadi pelalangan daring atau online serta berkurangnya pasokan kayu dan menurunnya minat pembeli terhadap kayu yang dilelangkan;
- Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata, Biro Umum, Sekretariat DPRD dan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tidak mencapai target okupansi karena kondisi dan lokasi yang tidak lagi kompetitif dibanding dengan penyedia jasa sejenis dalam satu kawasan lokasi yang sama;
- Objek Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga tidak mencapai target karena Stadion Jatidiri yang merupakan objek potensial sedang dalam renovasi penggantian kursi dan penggantian rumput mulai tanggal 23 Desember 2023 sampai tanggal 9 Desember 2024 yang berakibat pada pembatalan sewa stadion untuk pertandingan Liga 1 sebanyak 17 kali pertandingan dengan biaya sewa per pemakaian/pertandingan sebesar Rp127.650.000 (siang) dan Rp140.150.000 (malam); dan
- Objek Retribusi Penjualkan Produksi Usaha tidak mencapai target antara lain karena produksi semen beku pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan belum dapat dipasarkan sebagai dampak dari produk yang belum bersertifikat SNI.

5.1.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp50.284.681.535,00

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp51.701.138.900,00 dengan realisasi sebesar Rp50.284.681.535,00 atau 97,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64.823.782.552,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.539.101.017,00 atau 22,43% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.948.950.000,00	5.519.168.000,00	79,42	5.921.702.600,00	(402.534.600,00)
2	Dinas Kesehatan	2.431.550.000,00	2.863.625.000,00	117,77	3.721.061.000,00	(857.436.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.400.000.000,00	12.879.094.115,00	137,01	10.664.137.732,00	2.214.956.383,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.343.614.000,00	4.710.789.537,00	88,16	4.414.590.643,00	296.198.894,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	393.000.000,00	410.578.640,00	104,47	518.103.260,00	(107.524.620,00)
6	Dinas Sosial	228.110.000,00	229.047.200,00	100,41	171.067.300,00	57.979.900,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.528.845.000,00	510.497.750,00	20,19	2.221.629.000,00	(1.711.131.250,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	26.210.000,00	70.690.000,00	269,71	-	70.690.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.825.500.000,00	1.695.195.500,00	60,00	5.029.360.300,00	(3.334.164.800,00)
10	Dinas Perhubungan	481.916.000,00	419.035.000,00	86,95	104.400.000,00	314.635.000,00
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	103.345.000,00	96.000.000,00	92,89	573.706.615,00	(477.706.615,00)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.000.000,00	33.000.000,00	100,00	33.000.000,00	-
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	163.575.000,00	253.549.000,00	155,00	5.830.161.300,00	(5.576.612.300,00)
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	90.000.000,00	38.738.500,00	43,04	70.773.500,00	(32.035.000,00)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.404.539.900,00	4.129.098.010,00	93,75	4.656.033.824,00	(526.935.814,00)
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.160.000.000,00	2.170.406.450,00	100,48	2.088.339.759,00	82.066.691,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	893.104.000,00	1.212.125.500,00	135,72	1.624.110.113,00	(411.984.613,00)
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.646.000.000,00	1.627.146.749,00	98,85	794.200.000,00	832.946.749,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.024.516.000,00	2.040.526.525,00	100,79	3.932.227.014,00	(1.891.700.489,00)
20	Sekretariat Daerah	833.240.000,00	769.740.000,00	92,38	722.240.000,00	47.500.000,00
21	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	552.600.000,00	100,00	552.600.000,00	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.240.000,00	30.240.000,00	100,00	30.240.000,00	-
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.809.084.000,00	2.742.883.434,00	97,64	5.052.542.465,00	(2.309.659.031,00)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.972.500.000,00	2.626.637.625,00	88,36	2.856.759.727,00	(230.122.102,00)
25	Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00	-
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.365.700.000,00	2.612.469.000,00	110,43	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)
27	Badan Penghubung	-	29.800.000,00	-	54.800.000,00	(25.000.000,00)
	Jumlah	**51.701.138.900,00**	**50.284.681.535,00**	**97,26**	**64.823.782.552,00**	**(14.539.101.017,00)**

5.1.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan Rp92.042.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan ditargetkan sebesar Rp524.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp92.042.000,00 atau 17,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp224.497.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp132.455.700,00 atau 59,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	524.500.000,00	92.042.000,00	17,55	224.497.700,00	(132.455.700,00)
	Jumlah	**524.500.000,00**	**92.042.000,00**	**17,55**	**224.497.700,00**	**(132.455.700,00)**

5.1.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal Rp315.420.000,00

Pendapatan Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp349.880.000,00 dengan realisasi sebesar Rp315.420.000,00 atau 90,15%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.213.857.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.898.437.700,00 atau 92,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	4.213.857.700,00	(4.213.857.700,00)
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	349.880.000,00	315.420.000,00	90,15	-	315.420.000,00
	Jumlah	**349.880.000,00**	**315.420.000,00**	**90,15**	**4.213.857.700,00**	**(3.898.437.700,00)**

5.1.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp5.160.417.195,00

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp2.506.390.000,00 dengan realisasi sebesar Rp5.160.417.195,00 atau 205,89%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.160.417.195,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	34.570.000,00	42.413.000,00	122,69	-	42.413.000,00
2	Dinas Perhubungan	179.904.000,00	2.030.965.000,00	1.128,92	-	2.030.965.000,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.291.916.000,00	3.087.039.195,00	134,69	-	3.087.039.195,00
	Jumlah	**2.506.390.000,00**	**5.160.417.195,00**	**205,89**	**-**	**5.160.417.195,00**

5.1.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Rp7.927.263.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa ditargetkan sebesar Rp9.193.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.927.263.000,00 atau 86,23%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.710.588.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.216.675.000,00 atau 18,13% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	531.050.000,00	707.623.000,00	133,25	-	707.623.000,00
2	Dinas Sosial	-	-	-	23.025.000,00	(23.025.000,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	206.800.000,00	189.000.000,00	91,39	201.100.000,00	(12.100.000,00)
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.199.250.000,00	413.180.000,00	34,45	451.575.000,00	(38.395.000,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	131.900.000,00	78.100.000,00	59,21	83.700.000,00	(5.600.000,00)
6	Sekretariat Daerah	176.800.000,00	126.400.000,00	71,49	104.600.000,00	21.800.000,00
7	Sekretariat DPRD	1.197.400.000,00	325.450.000,00	27,18	372.300.000,00	(46.850.000,00)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.150.000.000,00	5.354.650.000,00	103,97	4.870.798.000,00	483.852.000,00
9	Badan Penghubung	600.000.000,00	732.860.000,00	122,14	603.490.000,00	129.370.000,00
	Jumlah	**9.193.200.000,00**	**7.927.263.000,00**	**86,23**	**6.710.588.000,00**	**1.216.675.000,00**

5.1.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp11.368.920.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp7.210.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.368.920.000,00 atau 157,68%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp10.434.792.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp934.128.000,00 atau 8,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.210.000.000,00	11.368.920.000,00	157,68	10.434.792.000,00	934.128.000,00
	Jumlah	**7.210.000.000,00**	**11.368.920.000,00**	**157,68**	**10.434.792.000,00**	**934.128.000,00**

5.1.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp2.266.141.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga ditargetkan sebesar Rp4.855.175.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.266.141.000,00 atau 46,67%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp820.729.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.445.411.500,00 atau 176,11% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	725.000.000,00	856.566.000,00	118,15	789.839.500,00	66.726.500,00
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	4.130.175.000,00	1.409.575.000,00	34,13	30.890.000,00	1.378.685.000,00
	Jumlah	**4.855.175.000,00**	**2.266.141.000,00**	**46,67**	**820.729.500,00**	**1.445.411.500,00**

5.1.1.1.2.2.8 Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp15.346.487.178,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp25.004.873.100,00 dengan realisasi sebesar Rp15.346.487.178,00 atau 61,37% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.821.728.204,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.475.241.026,00 atau 22,58% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.075.000,00	7.740.000,00	54,99	-	7.740.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.225.000.100,00	2.238.831.600,00	100,62	2.059.210.200,00	179.621.400,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.590.000.000,00	4.944.791.687,00	65,15	6.839.531.599,00	(1.894.739.912,00)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.174.858.000,00	8.154.569.891,00	53,74	10.922.986.405,00	(2.768.416.514,00)
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	940.000,00	554.000,00	58,94	-	554.000,00
	Jumlah	**25.004.873.100,00**	**15.346.487.178,00**	**61,37**	**19.821.728.204,00**	**(4.475.241.026,00)**

5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Rp6.406.367.335,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp2.016.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.406.367.335,00 atau 317,78% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.111.570.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.294.796.835,00 atau 55,81% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	-	-	355.525.000,00	(355.525.000,00)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	-	-	-	3.756.045.500,00	(3.756.045.500,00)
3	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.016.000.000,00	6.406.367.335,00	317,78	-	6.406.367.335,00
	Jumlah	**2.016.000.000,00**	**6.406.367.335,00**	**317,78**	**4.111.570.500,00**	**2.294.796.835,00**

5.1.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum Rp0,00

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp355.525.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp355.525.000,00 atau 100,00% dengan

rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	355.525.000,00	(355.525.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**355.525.000,00**	**(355.525.000,00)**

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Pelayanan Angkutan mulai Tahun Anggaran 2024 tidak diberlakukan, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa ijin trayek termasuk jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan Rp0,00

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.756.045.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.756.045.500,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	3.756.045.500,00	(3.756.045.500,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**3.756.045.500,00**	**(3.756.045.500,00)**

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan mulai Tahun Anggaran 2024 tidak diberlakukan, hal ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa ijin usaha perikanan termasuk jenis retribusi yang tidak boleh dipungut oleh Pemerintah Daerah.

5.1.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp6.406.367.335,00

Pendapatan Retribusi Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) ditargetkan sebesar Rp2.016.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.406.367.335,00 atau 317,78%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.406.367.335,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.016.000.000,00	6.406.367.335,00	317,78	-	6.406.367.335,00
	Jumlah	**2.016.000.000,00**	**6.406.367.335,00**	**317,78**	**-**	**6.406.367.335,00**

Kenaikan Pendapatan Retribusi Perpanjangan IMTA terealisasi sangat signifikan dikarenakan Tahun 2024 Pertumbuhan Ekonomi dan iklim investasi di Jawa Tengah yang Kondusif sehingga investasi yang dilakukan perusahaan asing mengalami kenaikan mengakibatkan bertambahnya tenaga asing yang bekerja di Jawa Tengah.

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp687.813.166.201,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp687.752.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp687.813.166.201,00 atau 100,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp638.482.406.528,00 mengalami kenaikan sebesar Rp49.330.759.673,00 atau 7,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	1.778.915.000,00	1.839.800.755,00	103,42	4.257.880.271,00	(2.418.079.516,00)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	685.973.363.000,00	685.973.365.446,00	100,00	634.224.526.257,00	51.748.839.189,00
	Jumlah	**687.752.278.000,00**	**687.813.166.201,00**	**100,01**	**638.482.406.528,00**	**49.330.759.673,00**

5.1.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN — Rp1.839.800.755,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN ditargetkan sebesar Rp1.778.915.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.839.800.755,00 atau 103,42%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.257.880.271,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.418.079.516,00 atau 56,79% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Deviden PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	1.778.915.000,00	1.839.800.755,00	103,42	743.957.001,00	1.095.843.754,00
2	Deviden PT Asuransi Bangun Askrida	-	-	-	3.513.923.270,00	(3.513.923.270,00)
	Jumlah	**1.778.915.000,00**	**1.839.800.755,00**	**103,42**	**4.257.880.271,00**	**(2.418.079.516,00)**

PT Asuransi Bangun Askrida Tahun Anggaran tidak menyetorkan deviden dikarenakan kinerja PT Asuransi Bangun Askrida yang cenderung tidak sehat maka dari OJK melarang PT Asuransi Bangun Askrida untuk melakukan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis sesuai surat OJK Nomor S-362/PD.11/2024 tanggal 18 April 2024 hal larangan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis yang mencukupi dan Surat OJK Nomor S-37/PD.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Reminder terkait larangan pembagian deviden.

5.1.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD — Rp685.973.365.446,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp685.973.363.000,00 dengan realisasi sebesar Rp685.973.365.446,00 atau 100,00% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp634.224.526.257,00 mengalami kenaikan sebesar Rp51.748.839.189,00 atau 8,16% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	1.668.816.000,00	1.668.816.220,00	100,00	5.760.346.077,00	(4.091.529.857,00)
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	550.244.937.000,00	550.244.937.092,00	100,00	503.559.988.019,00	46.684.949.073,00
3	Bagian Laba BPR-BKK Se-Jateng (Perseroda)	70.945.400.000,00	70.945.400.423,00	100,00	75.310.384.182,00	(4.364.983.759,00)
4	Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	7.444.261.000,00	7.444.261.200,00	100,00	-	7.444.261.200,00
5	Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	10.715.302.000,00	10.715.302.586,00	100,00	8.814.162.508,00	1.901.140.078,00
6	Deviden PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	-	-	-	-	-
7	Deviden PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	3.878.979.000,00	3.878.979.438,00	100,00	2.386.529.141,00	1.492.450.297,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8	Deviden PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	34.097.271.000,00	34.097.271.465,00	100,00	32.824.884.917,00	1.272.386.548,00
9	Deviden PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	6.978.397.000,00	6.978.397.022,00	100,00	5.568.231.413,00	1.410.165.609,00
	Jumlah	**685.973.363.000,00**	**685.973.365.446,00**	**100,00**	**634.224.526.257,00**	**51.748.839.189,00**

PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah Tahun Anggaran tidak menyetorkan deviden dikarenakan mengalami kerugian kumulatif

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp434.060.698.944,00

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp384.520.107.000,00 dengan realisasi sebesar Rp434.060.698.944,00 atau 112,88%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.258.007.259.591,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.823.946.560.647,00 atau 80,78% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	565.500.000,00	2.077.258.017,00	367,33	2.336.062.458,00	(258.804.441,00)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	411.000,00	-	14.497.280,00	(14.086.280,00)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.655.429.000,00	2.531.327.437,00	152,91	2.064.905.450,00	466.421.987,00
4	Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro	30.000.000.000,00	18.876.876.300,00	62,92	16.845.617.920,00	2.031.258.380,00
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	726.650,00	(726.650,00)
7	Pendapatan Bunga	90.000.000.000,00	32.911.785.082,00	36,57	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	1.800.000,00	-	3.666.000,00	(1.866.000,00)
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	49.840.278.000,00	67.056.903.649,00	134,54	61.400.812.404,00	5.656.091.245,00
10	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	2.642.694.739,00	-	2.029.659.646,00	613.035.093,00
11	Pendapatan Denda Pajak Daerah	160.000.000.000,00	241.621.801.355,00	151,01	131.192.364.953,00	110.429.436.402,00
12	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	62.417.887,00	-	185.395.280,00	(122.977.393,00)
13	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	474.991.000,00	-	60.900.000,00	414.091.000,00
14	Pendapatan dari Pengembalian	-	2.979.350.614,00	-	1.173.105.480,00	1.806.245.134,00
15	Pendapatan BLUD	52.380.400.000,00	62.793.535.998,00	119,88	1.965.028.154.568,00	(1.902.234.618.570,00)
16	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	2.545.866,00	-	-	2.545.866,00
17	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak	78.500.000,00	27.000.000,00	34,39	-	27.000.000,00
	Jumlah	**384.520.107.000,00**	**434.060.698.944,00**	**112,88**	**2.258.007.259.591,00**	**(1.823.946.560.647,00)**

5.1.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp2.077.258.017,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp565.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.077.258.017,00 atau 367,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.336.062.458,00 mengalami penurunan sebesar Rp258.804.441,00 atau 11,08% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	86.343.000,00	-	518.560.200,00	(432.217.200,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	13.550.000,00	(13.550.000,00)
4	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-
5	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	600.000,00	(600.000,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	565.500.000,00	1.988.915.017,00	351,71	1.803.352.258,00	185.562.759,00
	Jumlah	**565.500.000,00**	**2.077.258.017,00**	**367,33**	**2.336.062.458,00**	**(258.804.441,00)**

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan Hasil Penjualan Aset Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jembatan, Bangunan Air dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya

5.1.1.1.4.2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan — Rp411.000,00

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp411.000,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.497.280,00 mengalami penurunan sebesar Rp14.086.280,00 atau 97,16% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	411.000,00	-	14.497.280,00	(14.086.280,00)
	Jumlah	**-**	**411.000,00**	**-**	**14.497.280,00**	**(14.086.280,00)**

5.1.1.1.4.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan — Rp2.531.327.437,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp1.655.429.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.531.327.437,00 atau 152,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.064.905.450,00 mengalami kenaikan sebesar Rp466.421.987,00 atau 22,59% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UMKM	-	275.535.261,00	-	-	275.535.261,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.655.429.000,00	1.740.001.176,00	105,11	2.017.578.000,00	(277.576.824,00)
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	184.000.000,00	-	-	184.000.000,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	310.791.000,00	-	47.327.450,00	263.463.550,00
	Jumlah	**1.655.429.000,00**	**2.531.327.437,00**	**152,91**	**2.064.905.450,00**	**466.421.987,00**

5.1.1.1.4.4 Jasa Giro — Rp18.876.876.300,00

Jasa Giro ditargetkan sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp18.876.876.300,00 atau 62,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp16.845.617.920,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.031.258.380,00 atau 12,06% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.000.000.000,00	18.876.876.300,00	62,92	16.845.617.920,00	2.031.258.380,00
	Jumlah	**30.000.000.000,00**	**18.876.876.300,00**	**62,92**	**16.845.617.920,00**	**2.031.258.380,00**

Jasa Giro terdiri dari Jasa Giro atas Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara SKPD

5.1.1.1.4.5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp0,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp726.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp726.650,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	726.650,00	(726.650,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**726.650,00**	**(726.650,00)**

5.1.1.1.4.6 Pendapatan Bunga Rp32.911.785.082,00

Pendapatan Bunga ditargetkan sebesar Rp90.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp32.911.785.082,00 atau 36,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp75.671.391.502,00 mengalami penurunan sebesar Rp42.759.606.420,00 atau 56,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	90.000.000.000,00	32.911.785.082,00	36,57	75.671.391.502,00	(42.759.606.420,00)
	Jumlah	**90.000.000.000,00**	**32.911.785.082,00**	**36,57**	**75.671.391.502,00**	**(42.759.606.420,00)**

Pendapatan Bunga merupakan bunga atas penempatan deposito pada Bank Jateng.

5.1.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Rp1.800.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp1.800.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.666.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.866.000,00 atau 50,90% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	1.800.000,00	-	3.666.000,00	(1.866.000,00)
	Jumlah	**-**	**1.800.000,00**	**-**	**3.666.000,00**	**(1.866.000,00)**

5.1.1.1.4.8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain Rp67.056.903.649,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain yang berisi pendapatan yang tidak ada dalam klasifikasi pendapatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah ditargetkan sebesar Rp49.840.278.000,00 dengan realisasi sebesar Rp67.056.903.649,00 atau 134,54%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp61.400.812.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.656.091.245,00 atau 9,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	32.314.125,00	-	-	32.314.125,00
2	Dinas Kesehatan	-	12.920.000,00	-	-	12.920.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	2.154.650.700,00	-	-	2.154.650.700,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	9.000,00	(9.000,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	57.712.962,00	-	-	57.712.962,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	125.000.000,00	17.970.750,00	14,38		17.970.750,00
7	Dinas Perhubungan	24.837.850.000,00	32.476.216.700,00	130,75	27.460.516.091,00	5.015.700.609,00
8	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	148.000.000,00	-	-		-
9	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	-	172.034.500,00	-	335.302.750,00	(163.268.250,00)
10	Dinas Arsip dan Perpustakaan		2.650.000,00	-	2.750.000,00	(100.000,00)
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.800.000,00	104.588.560,00	405,38	1.280.000,00	103.308.560,00
12	Dinas Pertanian dan Perkebunan	350.138.000,00	670.916.715,00	191,61		670.916.715,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.848.190.000,00	2.700.909.505,00	70,19	1.648.803.100,00	1.052.106.405,00
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	74.161.355,00	-	163.739,00	73.997.616,00
15	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	7.693.130.898,00	-	9.855.315.384,00	(2.162.184.486,00)
16	Badan Kepegawaian Daerah	791.000.000,00	888.950.000,00	112,38	942.200.000,00	(53.250.000,00)
17	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.714.300.000,00	19.997.776.879,00	101,44	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)
	Jumlah	**49.840.278.000,00**	**67.056.903.649,00**	**134,54**	**61.400.812.404,00**	**5.656.091.245,00**

5.1.1.1.4.9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Rp2.642.694.739,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp2.642.694.739,00 apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.029.659.646,00 mengalami kenaikan sebesar Rp613.035.093,00 atau 30,20% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	2.642.694.739,00	-	2.029.659.646,00	613.035.093,00
	Jumlah	**-**	**2.642.694.739,00**	**-**	**2.029.659.646,00**	**613.035.093,00**

5.1.1.1.4.10 Pendapatan Denda Pajak Daerah Rp241.621.801.355,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp160.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp241.621.801.355,00 atau 151,01%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp131.192.364.953,00 mengalami kenaikan sebesar Rp110.429.436.402,00 atau 84,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	160.000.000.000,00	241.621.801.355,00	151,01	131.192.364.953,00	110.429.436.402,00
	Jumlah	**160.000.000.000,00**	**241.621.801.355,00**	**151,01**	**131.192.364.953,00**	**110.429.436.402,00**

5.1.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp62.417.887,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp62.417.887,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp185.395.280,00 mengalami penurunan sebesar Rp122.977.393,00 atau 66,33% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	2.155.325,00	-	-	2.155.325,00
2	Dinas Kesehatan	-	25.000,00	-	-	25.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	452.837,00	-	-	452.837,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	200.000,00	-	-	200.000,00
5	Dinas Perhubungan	-	12.291.580,00	-	76.072.850,00	(63.781.270,00)
6	Dinas Kelautan dan perikanan	-	45.373.245,00	-	108.800.030,00	(63.426.785,00)
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	6.000,00	-	-	6.000,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	900.000,00	-	-	900.000,00
9	Sekretariat DPRD	-	10.000,00	-	-	10.000,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	18.900,00	-	-	18.900,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	985.000,00	-	522.400,00	462.600,00
	Jumlah	**-**	**62.417.887,00**	**-**	**185.395.280,00**	**(122.977.393,00)**

5.1.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan Rp474.991.000,00

Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp474.991.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp60.900.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp414.091.000,00 atau 679,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	474.991.000,00	-	60.900.000,00	414.091.000,00
	Jumlah	**-**	**474.991.000,00**	**-**	**60.900.000,00**	**414.091.000,00**

Pendapatan hasil Eksekusi atas Jaminan merupakan klaim pencairan jaminan pelaksanaan pekerjaan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana irigasi yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Fisik.

5.1.1.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian Rp2.979.350.614,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp2.979.350.614,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.173.105.480,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.806.245.134,00 atau 153,97% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	2.979.350.614,00	-	1.173.105.480,00	1.806.245.134,00
	Jumlah	**-**	**2.979.350.614,00**	**-**	**1.173.105.480,00**	**1.806.245.134,00**

Pendapatan dari pengembalian merupakan pengembalian gaji dan tunjangan; perjalanan dinas dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

5.1.1.1.4.14 Pendapatan BLUD **Rp62.793.535.998,00**

Pendapatan BLUD ditargetkan sebesar Rp52.380.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp62.793.535.998,00 atau 119,88%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.965.028.154.568,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.902.234.618.570,00 atau 96,80% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	19.450.000.000,00	25.111.658.406,00	129,11	1.040.694.734.693,00	(1.015.583.076.287,00)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	17.236.200.000,00	18.384.128.455,00	106,66	574.840.672.372,00	(556.456.543.917,00)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	4.719.500.000,00	5.922.622.780,00	125,49	168.960.782.280,00	(163.038.159.500,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.922.700.000,00	1.996.469.454,00	103,84	46.296.157.360,00	(44.299.687.906,00)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	2.200.000.000,00	2.463.797.273,00	111,99	50.961.111.377,00	(48.497.314.104,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	3.952.000.000,00	4.756.827.856,00	120,37	40.405.229.712,00	(35.648.401.856,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.900.000.000,00	4.158.031.774,00	143,38	42.869.466.774,00	(38.711.435.000,00)
	Jumlah	**52.380.400.000,00**	**62.793.535.998,00**	**119,88**	**1.965.028.154.568,00**	**(1.902.234.618.570,00)**

Pendapatan BLUD-Jasa Pelayanan pada Rumah Sakit Tahun 2024 di reklasifikasi pada Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai jenis pelayanan retribusi pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

5.1.1.1.4.15 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan **Rp2.545.866,00**

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.545.866,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.545.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	2.545.866,00	-	-	2.545.866,00
	Jumlah	**-**	**2.545.866,00**	**-**	**-**	**2.545.866,00**

5.1.1.1.4.16 Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak **Rp27.000.000,00**

Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak ditargetkan sebesar Rp78.500.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.000.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp27.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.500.000,00	27.000.000,00	34,39	-	27.000.000,00
	Jumlah	**78.500.000,00**	**27.000.000,00**	**34,39**	**-**	**27.000.000,00**

5.1.1.2 Pendapatan Transfer **Rp8.701.438.866.795,00**

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya. Alokasi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Surat Kementerian Keuangan Nomor S-128/PK/2023 tentang Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA 2024 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor

353 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota ditargetkan sebesar Rp8.611.131.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.278.928.086.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp422.510.780.371,00 atau 5,10% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	8.611.131.815.000,00	8.701.438.866.795,00	101,05	8.278.928.086.424,00	422.510.780.371,00
	Jumlah	**8.611.131.815.000,00**	**8.701.438.866.795,00**	**101,05**	**8.278.928.086.424,00**	**422.510.780.371,00**

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp8.701.438.866.795,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp8.611.131.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.701.438.866.795,00 atau 101,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.278.928.086.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp422.510.780.371,00 atau 5,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Perimbangan	8.573.134.247.000,00	8.663.441.298.795,00	101,05	8.191.730.141.424,00	471.711.157.371,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	87.197.945.000,00	(87.197.945.000,00)
3	Insentif Fiskal	37.997.568.000,00	37.997.568.000,00	100,00	-	37.997.568.000,00
	Jumlah	**8.611.131.815.000,00**	**8.701.438.866.795,00**	**101,05**	**8.278.928.086.424,00**	**422.510.780.371,00**

5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan Rp8.663.441.298.795,00

Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp8.573.134.247.000,00 dengan realisasi sebesar Rp8.663.441.298.795,00 atau 101,05%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp8.191.730.141.424,00 mengalami kenaikan sebesar Rp471.711.157.371,00 atau 5,76% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	770.426.526.000,00	896.232.568.000,00	116,33	933.111.522.991,00	(36.878.954.991,00)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	3.820.383.210.000,00	3.819.010.791.028,00	99,96	3.558.428.755.500,00	260.582.035.528,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	484.598.612.000,00	473.940.472.839,00	97,80	404.100.292.842,00	69.840.179.997,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	3.497.725.899.000,00	3.474.257.466.928,00	99,33	3.296.089.570.091,00	178.167.896.837,00
	Jumlah	**8.573.134.247.000,00**	**8.663.441.298.795,00**	**101,05**	**8.191.730.141.424,00**	**471.711.157.371,00**

5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Rp896.232.568.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) ditargetkan sebesar Rp770.426.526.000,00 dengan realisasi sebesar Rp896.232.568.000,00 atau 116,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp933.111.522.991,00 mengalami penurunan sebesar Rp36.878.954.991,00 atau 3,95% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	36.009.487.000,00	42.401.279.000,00	117,75	36.474.750.000,00	5.926.529.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi	437.228.286.000,00	528.584.330.000,00	120,89	565.211.540.991,00	(36.627.210.991,00)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	290.674.121.000,00	318.034.449.000,00	109,41	321.949.955.000,00	(3.915.506.000,00)
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.875.740.000,00	3.875.740.000,00	100,00	5.930.332.000,00	(2.054.592.000,00)
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	416.265.000,00	1.000.329.000,00	240,31	516.127.000,00	484.202.000,00
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi	1.744.962.000,00	1.744.962.000,00	100,00	2.730.093.000,00	(985.131.000,00)
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	366.565.000,00	459.912.000,00	125,47	237.414.000,00	222.498.000,00
8	Bagi Hasil Dari Minerba	111.100.000,00	131.567.000,00	118,42	61.311.000,00	70.256.000,00
	Jumlah	**770.426.526.000,00**	**896.232.568.000,00**	**116,33**	**933.111.522.991,00**	**(36.878.954.991,00)**

5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) Rp3.819.010.791.028,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp3.820.383.210.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.819.010.791.028,00 atau 99,96%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.558.428.755.500,00 mengalami kenaikan sebesar Rp260.582.035.528,00 atau 7,32% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAU	3.550.426.222.000,00	3.550.426.222.000,00	100,00	3.280.103.939.100,00	270.322.282.900,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	63.553.600.000,00	62.181.181.028,00	97,84	278.324.816.400,00	(216.143.635.372,00)
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	187.324.934.000,00	187.324.934.000,00	100,00	-	187.324.934.000,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.078.454.000,00	19.078.454.000,00	100,00	-	19.078.454.000,00
	Jumlah	**3.820.383.210.000,00**	**3.819.010.791.028,00**	**99,96**	**3.558.428.755.500,00**	**260.582.035.528,00**

5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp473.940.472.839,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp484.598.612.000,00 dengan realisasi sebesar Rp473.940.472.839,00 atau 97,80%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp404.100.292.842,00 mengalami kenaikan sebesar Rp69.840.179.997,00 atau 17,28% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	DAK Bidang Pendidikan	266.671.066.000,00	264.965.344.449,00	99,36	227.044.630.857,00	37.920.713.592,00
2	DAK Bidang Kesehatan	43.205.666.000,00	40.866.296.330,00	94,59	36.979.900.000,00	3.886.396.330,00
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	29.455.572.000,00	12.845.424.770,00	43,61	32.307.528.810,00	(19.462.104.040,00)
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	8.742.604.000,00	4.203.097.231,00	48,08	9.840.881.400,00	(5.637.784.169,00)
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	25.806.260.000,00	34.887.433.699,00	135,19	19.345.076.100,00	15.542.357.599,00
6	DAK Bidang Pertanian	37.783.864.000,00	38.482.249.589,00	101,85	25.493.991.675,00	12.988.257.914,00
7	DAK Bidang Air Minum	60.000.005.000,00	59.040.205.500,00	98,40	53.088.284.000,00	5.951.921.500,00
8	DAK Bidang Pariwisata	1.933.575.000,00	3.710.771.899,00	191,91	-	3.710.771.899,00
9	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	11.000.000.000,00	14.939.649.372,00	135,81	-	14.939.649.372,00
	Jumlah	**484.598.612.000,00**	**473.940.472.839,00**	**97,80**	**404.100.292.842,00**	**69.840.179.997,00**

5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp3.474.257.466.928,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp3.497.725.899.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.474.257.466.928,00 atau 99,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.296.089.570.091,00 mengalami kenaikan sebesar Rp178.167.896.837,00 atau 5,41% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD	1.333.189.511.000,00	1.322.069.021.439,00	99,17	1.195.612.125.258,00	126.456.896.181,00
2	Bantuan Operasional Sekolah	2.107.726.080.000,00	2.099.515.123.235,00	99,61	2.046.849.723.061,00	52.665.400.174,00
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	37.823.808.000,00	33.834.592.742,00	89,45	41.660.176.240,00	(7.825.583.498,00)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	10.346.418.000,00	10.343.179.000,00	99,97	7.049.646.404,00	3.293.532.596,00
5	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.850.000.000,00	2.850.000.000,00	-	-	2.850.000.000,00
6	Bantuan Biaya Pengolahan Layanan Sampah	-	1.367.855.300,00	-	-	1.367.855.300,00
7	Fasilitasi Penanaman Modal	1.384.082.000,00	-	-	721.513.040,00	(721.513.040,00)
8	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	406.000.000,00	340.234.100,00	83,80	246.480.192,00	93.753.908,00
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	4.000.000.000,00	3.937.461.112,00	98,44	3.949.905.896,00	(12.444.784,00)
	Jumlah	**3.497.725.899.000,00**	**3.474.257.466.928,00**	**99,33**	**3.296.089.570.091,00**	**178.167.896.837,00**

5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID) Rp0,00

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp87.197.945.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp87.197.945.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dana Insentif Daerah (DID)	-	-	-	87.197.945.000,00	(87.197.945.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**87.197.945.000,00**	**(87.197.945.000,00)**

Dana Insentif Daerah (DID) mengalami perubahan nomenklatur menjadi Insentif Fiskal sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .

5.1.1.2.1.3 Insentif Fiskal Rp37.997.568.000,00

Insentif Fiskal diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan yaitu sebagai reward bagi daerah yang mempunyai kinerja terbaik dalam tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik, pelayanan umum, pemerintahan yang dialokasikan berdasarkan indikator kesejahteraan masyarakat, kriteria umum dan kategori kinerja serta memacu daerah untuk semakin meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, kesehatan fiskal APBD serta pelayanan dasar publik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan umum pemerintahan. Dasar pemberian Insentif Fiskal :

a. kriteria utama antara lain penyajian laporan keuangan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), penetapan Perda APBD tepat waktu, melaksanakan *e-Government* (*e-Budgeting dan e-Planning*)
b. nilai kategori kinerja meliputi :
   1) Kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah melalui tingkat kemandirian daerah, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
   2) Kinerja Pelayanan Dasar melalui imunisasi lengkap, indeks SPM pendidikan, cakupan sanitasi, pengelolaan air minum, penurunan pengangguran, peningkatan IPM;
   3) Kinerja Dukungan Fokus Kebijakan Nasional melalui penurunan stunting, kemiskinan dan pengendalian inflasi; dan
   4) Kinerja Sinergi Kebijakan Pemerintah melalui Pelayanan (30%) melalui PTSP dan PBB, penghargaan pelayanan daerah, percepatan dan perluasan digitalisasi daerah; Inovasi (30%) melalui inovasi daerah, pelayanan daerah dan penghargaan lingkungan hidup; Korupsi (40%) melalui tingkat persepsi korupsi.

Insentif Fiskal Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk Bidang Pengendalian Infasi melalui Penyediaan Operasional Kendaraan BRT ditargetkan sebesar Rp37.997.568.000,00 dengan realisasi sebesar Rp37.997.568.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp37.997.568.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Insentif Fiskal	37.997.568.000,00	37.997.568.000,00	100,00	-	37.997.568.000,00
	Jumlah	**37.997.568.000,00**	**37.997.568.000,00**	**100,00**	**-**	**37.997.568.000,00**

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp26.343.846.120,00

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah ditargetkan sebesar Rp25.593.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.343.846.120,00 atau 102,93%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp78.296.049.245,00 mengalami penurunan sebesar Rp51.952.203.125,00 atau 66,35% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah	25.593.372.000,00	25.600.169.638,00	100,03	77.972.123.308,00	(52.371.953.670,00)
2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	743.676.482,00	-	323.925.937,00	419.750.545,00
	Jumlah	**25.593.372.000,00**	**26.343.846.120,00**	**102,93**	**78.296.049.245,00**	**(51.952.203.125,00)**

5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah Rp25.600.169.638,00

Pendapatan Hibah ditargetkan sebesar Rp25.593.372.000,00 dengan realisasi sebesar Rp25.600.169.638,00 atau 100,03%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp77.972.123.308,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.371.953.670,00 atau 67,17% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	-	-	-	54.495.623.308,00	(54.495.623.308,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	25.593.372.000,00	25.593.372.000,00	100,00	23.476.500.000,00	2.116.872.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	-	6.797.638,00	-	-	6.797.638,00
	Jumlah	**25.593.372.000,00**	**25.600.169.638,00**	**100,03**	**77.972.123.308,00**	**(52.371.953.670,00)**

5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan — Rp743.676.482,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp743.676.482,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp323.925.937,00 mengalami kenaikan sebesar Rp419.750.545,00 atau 129,58% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Lain-lain Pendapatan	-	743.676.482,00	-	323.925.937,00	419.750.545,00
	Jumlah	**-**	**743.676.482,00**	**-**	**323.925.937,00**	**419.750.545,00**

5.1.2 PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp28.566.843.632.000,00 dengan realisasi sebesar Rp27.187.126.497.803,00 atau 95,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp25.800.341.207.782,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.386.785.290.021,00 atau 5,38% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Operasional	16.552.143.061.000,00	16.083.865.301.964,00	97,17	14.887.780.012.763,00	1.196.085.289.201,00
2	Belanja Modal	1.777.270.678.000,00	1.733.084.096.994,00	97,51	1.794.862.778.298,00	(61.778.681.304,00)
3	Belanja Tidak Terduga	24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51	740.000.000,00	9.485.800.500,00
4	Belanja Transfer	10.212.795.020.000,00	9.359.951.298.345,00	91,65	9.116.958.416.721,00	242.992.881.624,00
	Jumlah	**28.566.843.632.000,00**	**27.187.126.497.803,00**	**95,17**	**25.800.341.207.782,00**	**1.386.785.290.021,00**

Belanja daerah di dalamnya telah termasuk *mandatory spending* atau belanja wajib merupakan pengeluaran negara yang wajib dialokasikan pada proporsi tertentu sebagai amanat undang-undang. Adapun belanja yang wajib dialokasikan dengan proporsi tertentu antara lain :

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) dalam APBD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
1	A Urusan Bidang Pendidikan	**8,585,248,854,000.00**	**8,470,410,333,206.00**
	1) Belanja Operasi	**7,790,723,966,000.00**	**7,677,334,475,347.00**
	a. Belanja Pegawai	4,836,837,109,000.00	4,760,876,514,027.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	1,631,391,027,000.00	1,601,772,399,676.00
	c. Belanja Hibah	1,307,719,830,000.00	1,300,255,561,644.00
	d. Belanja Bantuan Sosial	14,776,000,000.00	14,430,000,000.00
	2) Belanja Modal	**794,524,888,000.00**	**793,075,857,859.00**
	B Urusasn Bidang Kebudayaan	**32,086,987,000.00**	**28,192,397,619.00**

No	Komponen Perhitungan	Anggaran	Realisasi
	1) Belanja Operasi	**32,086,987,000.00**	**28,192,397,619.00**
	a. Belanja Pegawai		
	b. Belanja Barang dan Jasa	9,298,987,000.00	9,094,397,619.00
	c. Belanja Hibah	22,788,000,000.00	19,098,000,000.00
	d. Belanja Bantuan Sosial		
	2) Belanja Modal		
	C Urusan Bidang Perpustakaan	**49,626,621,000.00**	**48,577,707,008.00**
	1) Belanja Operasi	**42,304,172,000.00**	**41,282,313,239.00**
	a. Belanja Pegawai	27,403,581,000.00	26,474,456,108.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	14,900,591,000.00	14,807,857,131.00
	c. Belanja Hibah	-	-
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	7,322,449,000.00	7,295,393,769.00
	D Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	**289,041,027,000.00**	**283,775,899,387.00**
	1) Belanja Operasi	**285,538,227,000.00**	**280,323,878,187.00**
	a. Belanja Pegawai	25,408,058,000.00	24,550,053,167.00
	b. Belanja Barang dan Jasa	120,770,194,000.00	117,140,570,020.00
	c. Belanja Hibah	139,359,975,000.00	138,633,255,000.00
	d. Belanja Bantuan Sosial	-	-
	2) Belanja Modal	3,502,800,000.00	3,452,021,200.00
	E Belanja di Luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang Kebutuhan Masyarakat di Bidang Pendidikan		
	Belanja Transfer Bantuan Keuangan Pendidikan	330,775,000,000.00	329,429,845,849.00
2	**Total Anggaran Fungsi Pendidikan (A+B+C+D+E)**	9,286,778,489,000.00	9,160,386,183,069.00
3	**Total Belanja Daerah**	28,566,843,632,000.00	27,187,126,497,803.00
4	**Rasio Anggaran Pendidikan (2:3) x 100 %**	32.51	33.69

2. Besaran anggaran infrastruktur pelayanan publik pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 40% dari Total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa (UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) dengan rincian sebegai berikut :

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	**Belanja Modal**	**1,777,270,678,000.00**	**1,733,084,096,994.00**	97.51
	1) Tanah	12,647,482,000.00	12,221,207,440.00	96.63
	2) Peralatan dan Mesin	881,937,468,000.00	855,982,713,753.00	97.06
	3) Bangunan dan Gedung	421,122,075,000.00	411,044,257,004.00	97.61
	4) Jalan, jaringan dan irigasi	374,283,044,000.00	366,478,924,044.00	97.91
	5) Aset tetap lainnya	86,295,810,000.00	86,434,858,953.00	100.16

No	Komponen Perhitungan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
	6) Aset lainnya	984,799,000.00	922,135,800.00	93.64
	b) Belanja pemeliharaan	322,935,881,000.00	317,243,346,886.00	98.24
2	a) Belanja Hibah	203,774,789,000.00	202,479,322,113.00	99.36
	b) Belanja Bantuan Sosial	30,667,244,000.00	30,578,996,459.00	99.71
	c) Belanja Bantuan Keuangan			
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	2,334,648,592,000.00	2,283,385,762,452.00	97.80
	Prosentase Belanja Infrastruktur terhadap belanja diluar Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	**12.72%**	**12.81%**	

3. Dana Alokasi Umum selain untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2024 diarahkan penggunaannya untuk
   - Bidang Pendidikan, disalurkan sebesar Rp187.324.934.000,00 terealisasi sebesar Rp186.867.834.000 atau 99,76%
   - Bidang Pekerjaaan Umum disalurkan sebesar Rp19.078.454.000,00 terealisasi sebesar Rp19.078.454.000,00 atau 100%
   - Tambahan Dukungan Pendanaan atas PPPK sebesar Rp63.553.600.000,00 terealisasi sebesar Rp63.553.600.000,00 atau 100%
4. Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah mengalokasikan persentase dan/atau nominal tertentu dari APBD untuk lnspektorat/APIP sebesar Rp29.226.421.000,00 dari total APBD sebesar Rp27.187.126.497.803,00 atau 0,11% dan terealisasi sebesar Rp28.820.896.533,00 atau 98,61%

5.1.2.1 Belanja Operasional **Rp16.083.865.301.964,00**

Belanja Operasional dianggarkan sebesar Rp16.552.143.061.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.083.865.301.964,00 atau 97,17%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp14.887.780.012.763,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.196.085.289.201,00 atau 8,03% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.215.542.302.000,00	7.023.084.524.845,00	97,33	6.362.326.855.074,00	660.757.669.771,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.485.600.279.000,00	6.234.228.358.506,00	96,12	5.791.112.760.975,00	443.115.597.531,00
3	Belanja Subsidi	1.400.000.000,00	1.399.999.100,00	100,00	5.350.753.069,00	(3.950.753.969,00)
4	Belanja Hibah	2.804.157.236.000,00	2.780.143.423.054,00	99,14	2.610.303.175.760,00	169.840.247.294,00
5	Belanja Bantuan Sosial	45.443.244.000,00	45.008.996.459,00	99,04	118.686.467.885,00	(73.677.471.426,00)
	Jumlah	**16.552.143.061.000,00**	**16.083.865.301.964,00**	**97,17**	**14.887.780.012.763,00**	**1.196.085.289.201,00**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai Rp7.023.084.524.845,00

Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp7.215.542.302.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.023.084.524.845,00 atau 97,33%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.362.326.855.074,00 mengalami kenaikan sebesar Rp660.757.669.771,00 atau 10,39% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.549.699.118.000,00	3.466.656.991.194,00	97,66	3.129.380.027.896,00	337.276.963.298,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.915.885.053.000,00	1.868.016.557.613,00	97,50	1.725.111.126.557,00	142.905.431.056,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.417.132.857.000,00	1.393.631.458.256,00	98,34	1.220.246.551.518,00	173.384.906.738,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	146.670.075.000,00	132.534.438.978,00	90,36	126.922.658.694,00	5.611.780.284,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.203.094.000,00	983.377.690,00	44,64	204.972.404,00	778.405.286,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	28.002.096.000,00	19.738.507.200,00	70,49	24.138.287.500,00	(4.399.780.300,00)
7	Belanja Pegawai BLUD	155.950.009.000,00	141.523.193.914,00	90,75	136.323.230.505,00	5.199.963.409,00
	Jumlah	**7.215.542.302.000,00**	**7.023.084.524.845,00**	**97,33**	**6.362.326.855.074,00**	**660.757.669.771,00**

Belanja Pegawai **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan sisa gaji yang memang dicadangkan untuk mengantisipasi kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan adanya mutasi pegawai serta yang meninggal dunia.

5.1.2.1.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.466.656.991.194,00

Belanja Gaji dan Tunjangan ASN dianggarkan sebesar Rp3.549.699.118.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.466.656.991.194,00 atau 97,66%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.129.380.027.896,00 mengalami kenaikan sebesar Rp337.276.963.298,00 atau 10,78% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.599.884.337.000,00	2.556.547.871.794,00	98,33	2.266.445.483.973,00	290.102.387.821,00
2	Dinas Kesehatan	43.742.706.000,00	42.753.215.313,00	97,74	40.083.837.542,00	2.669.377.771,00
3	RSUD Dr. Moewardi	110.841.736.000,00	105.892.903.693,00	95,54	97.641.121.144,00	8.251.782.549,00
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	67.347.628.000,00	64.565.719.804,00	95,87	60.682.711.082,00	3.883.008.722,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	58.800.643.000,00	57.972.907.156,00	98,59	50.518.194.173,00	7.454.712.983,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	18.114.378.000,00	17.720.327.552,00	97,82	16.144.732.667,00	1.575.594.885,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	35.591.864.000,00	33.309.642.970,00	93,59	29.950.007.624,00	3.359.635.346,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	33.757.630.000,00	31.810.498.104,00	94,23	29.614.165.126,00	2.196.332.978,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	24.728.214.000,00	23.517.341.285,00	95,10	20.881.439.455,00	2.635.901.830,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	33.176.431.000,00	32.218.723.533,00	97,11	33.092.720.969,00	(873.997.436,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	34.478.896.000,00	33.627.082.557,00	97,53	32.351.216.467,00	1.275.866.090,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.793.293.000,00	5.648.705.720,00	97,50	5.428.588.793,00	220.116.927,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.335.421.000,00	5.043.207.021,00	94,52	4.798.560.070,00	244.646.951,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.163.591.000,00	2.835.717.481,00	89,64	2.702.638.212,00	133.079.269,00
15	Dinas Sosial	43.865.596.000,00	42.211.457.067,00	96,23	40.874.750.284,00	1.336.706.783,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.022.151.000,00	29.836.918.379,00	93,18	29.627.051.429,00	209.866.950,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.674.759.000,00	4.494.694.088,00	96,15	3.945.219.582,00	549.474.506,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.626.177.000,00	6.399.361.974,00	96,58	6.281.114.944,00	118.247.030,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	56.799.572.000,00	55.084.105.533,00	96,98	52.959.717.523,00	2.124.388.010,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.770.493.000,00	5.570.176.777,00	96,53	5.449.712.200,00	120.464.577,00
21	Dinas Perhubungan	21.008.764.000,00	19.712.377.249,00	93,83	19.004.726.240,00	707.651.009,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.795.725.000,00	8.449.747.822,00	96,07	7.558.992.700,00	890.755.122,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	7.058.354.000,00	6.611.823.824,00	93,67	6.459.396.826,00	152.426.998,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.032.242.000,00	5.651.007.112,00	93,68	5.509.634.523,00	141.372.589,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	11.443.317.000,00	10.843.716.091,00	94,76	11.026.199.212,00	(182.483.121,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.927.078.000,00	12.260.435.558,00	94,84	12.289.742.954,00	(29.307.396,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.424.173.000,00	18.088.919.723,00	98,18	16.616.547.883,00	1.472.371.840,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.248.570.000,00	14.706.395.034,00	96,44	13.649.247.955,00	1.057.147.079,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	41.751.515.000,00	39.264.799.113,00	94,04	39.169.299.302,00	95.499.811,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.838.617.000,00	13.400.742.991,00	96,84	12.556.919.036,00	843.823.955,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.635.296.000,00	13.643.541.018,00	93,22	12.874.315.565,00	769.225.453,00
32	Sekretariat Daerah	39.323.494.000,00	37.173.574.950,00	94,53	35.724.187.717,00	1.449.387.233,00
33	Sekretariat DPRD	8.591.910.000,00	8.326.827.834,00	96,91	7.989.269.588,00	337.558.246,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.753.587.000,00	9.205.694.694,00	94,38	12.265.778.757,00	(3.060.084.063,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	41.513.640.000,00	39.898.301.334,00	96,11	39.359.002.053,00	539.299.281,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.879.965.000,00	8.638.749.520,00	87,44	8.681.099.146,00	(42.349.626,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	10.500.492.000,00	10.442.176.249,00	99,44	9.997.562.983,00	444.613.266,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.101.142.000,00	11.939.500.263,00	98,66	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.346.893.000,00	3.997.667.153,00	91,97	-	3.997.667.153,00
40	Badan Penghubung	3.614.131.000,00	3.437.762.040,00	95,12	3.360.300.809,00	77.461.231,00
41	Inspektorat	10.336.969.000,00	9.993.104.631,00	96,67	9.543.293.457,00	449.811.174,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.057.728.000,00	3.909.549.190,00	96,35	3.710.493.236,00	199.055.954,00
	Jumlah	**3.549.699.118.000,00**	**3.466.656.991.194,00**	**97,66**	**3.129.380.027.896,00**	**337.276.963.298,00**

Penurunan Gaji dan Tunjangan ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Tahun 2024 pemisahan tugas dan fungsi ASN bidang penelitian dan pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah

5.1.2.1.1.2 Belanja Tambahan Penghasilan ASN **Rp1.868.016.557.613,00**

Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan sebesar Rp1.915.885.053.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.868.016.557.613,00 atau 97,50%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.725.111.126.557,00 mengalami kenaikan sebesar Rp142.905.431.056,00 atau 8,28% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	874.984.353.000,00	855.798.983.033,00	97,81	732.328.589.962,00	123.470.393.071,00
2	Dinas Kesehatan	49.690.079.000,00	47.674.726.347,00	95,94	46.459.496.613,00	1.215.229.734,00
3	RSUD Dr. Moewardi	95.189.497.000,00	91.310.778.888,00	95,93	96.862.312.156,00	(5.551.533.268,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	57.491.940.000,00	56.317.776.389,00	97,96	60.521.871.798,00	(4.204.095.409,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	50.957.425.000,00	49.119.564.510,00	96,39	50.950.881.837,00	(1.831.317.327,00)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	22.719.307.000,00	22.047.866.409,00	97,04	20.229.319.529,00	1.818.546.880,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	38.719.225.000,00	38.370.406.727,00	99,10	35.624.444.787,00	2.745.961.940,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	37.264.366.000,00	37.006.833.210,00	99,31	34.202.712.089,00	2.804.121.121,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.497.589.000,00	27.810.686.356,00	97,59	24.756.921.022,00	3.053.765.334,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	38.564.442.000,00	37.109.272.445,00	96,23	37.745.757.471,00	(636.485.026,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	38.307.000.000,00	37.134.348.276,00	96,94	35.198.815.087,00	1.935.533.189,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	8.044.788.000,00	7.516.943.484,00	93,44	7.425.705.571,00	91.237.913,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	6.437.747.000,00	6.237.572.876,00	96,89	5.865.949.301,00	371.623.575,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.074.500.000,00	4.023.343.972,00	98,74	3.744.321.511,00	279.022.461,00
15	Dinas Sosial	53.143.344.000,00	51.759.484.219,00	97,40	52.264.489.529,00	(505.005.310,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.591.048.000,00	34.563.694.761,00	99,92	33.126.050.592,00	1.437.644.169,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.759.000.000,00	6.616.198.875,00	97,89	5.668.436.119,00	947.762.756,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.512.298.000,00	8.091.807.162,00	95,06	8.001.598.331,00	90.208.831,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	63.856.555.000,00	61.698.358.278,00	96,62	59.604.089.851,00	2.094.268.427,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	8.041.734.000,00	7.853.142.363,00	97,65	7.326.356.899,00	526.785.464,00
21	Dinas Perhubungan	23.357.000.000,00	23.337.876.407,00	99,92	22.164.609.920,00	1.173.266.487,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.577.556.000,00	10.109.657.706,00	95,58	9.433.517.876,00	676.139.830,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.535.674.000,00	8.391.858.169,00	98,32	8.202.510.413,00	189.347.756,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.362.709.000,00	8.070.861.688,00	96,51	7.805.794.758,00	265.066.930,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.231.801.000,00	12.976.657.076,00	98,07	12.954.691.275,00	21.965.801,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.250.073.000,00	13.991.340.550,00	98,18	13.818.115.749,00	173.224.801,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	24.303.007.000,00	23.267.714.155,00	95,74	22.197.451.292,00	1.070.262.863,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.213.087.000,00	15.496.840.036,00	95,58	15.374.780.287,00	122.059.749,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.662.790.000,00	40.440.483.124,00	99,45	41.074.365.590,00	(633.882.466,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	19.239.755.000,00	18.882.858.312,00	98,15	17.773.146.484,00	1.109.711.828,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.860.145.000,00	16.697.354.239,00	99,03	16.144.412.339,00	552.941.900,00
32	Sekretariat Daerah	51.869.339.000,00	50.704.517.703,00	97,75	48.295.141.298,00	2.409.376.405,00
33	Sekretariat DPRD	10.257.872.000,00	9.649.423.521,00	94,07	9.290.263.164,00	359.160.357,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.129.235.000,00	11.606.981.882,00	95,69	14.834.811.675,00	(3.227.829.793,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	51.000.000.000,00	50.020.518.362,00	98,08	48.787.598.556,00	1.232.919.806,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.790.358.000,00	11.369.730.278,00	96,43	11.168.985.897,00	200.744.381,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.882.144.000,00	13.578.541.145,00	97,81	12.743.715.229,00	834.825.916,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	14.618.491.000,00	13.566.705.258,00	92,81	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.059.728.000,00	4.758.644.240,00	94,05	-	4.758.644.240,00
40	Badan Penghubung	5.448.800.000,00	5.245.500.342,00	96,27	4.866.071.430,00	379.428.912,00
41	Inspektorat	12.926.655.000,00	12.639.977.924,00	97,78	11.483.767.750,00	1.156.210.174,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.462.597.000,00	5.150.726.916,00	94,29	4.892.747.791,00	257.979.125,00
	Jumlah	**1.915.885.053.000,00**	**1.868.016.557.613,00**	**97,50**	**1.725.111.126.557,00**	**142.905.431.056,00**

Penurunan Tambahan Penghasilan ASN pada :

a. RSUD dikarenakan pemberian TPP untuk tenaga kesehatan diberikan 100% pada bulan Januari-Juni 2023 dengan status pasca pendemi *covid-19* sedangkan Juli-Desember 2023 status pandemi *covid-19* dicabut dan diberikan 80%. Tahun 2024 diberikan 80% sesuai amanat Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pemberian TPP RS bahwa khusus RS diberikan TPP setinggi-tingginya 80% kecuali dalam rangka kedaruratan diberikan 100%.
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan Tahun 2024 pemisahan tugas dan fungsi ASN bidang penelitian dan pengembangan menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah.

5.1.2.1.1.1 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN — Rp1.393.631.458.256,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN dianggarkan sebesar Rp1.417.132.857.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.393.631.458.256,00 atau 98,34%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.220.246.551.518,00 mengalami kenaikan sebesar Rp173.384.906.738,00 atau 14,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.361.968.419.000,00	1.348.529.659.200,00	99,01	1.172.767.058.319,00	175.762.600.881,00
2	Dinas Kesehatan	11.870.000.000,00	9.393.249.569,00	79,13	11.786.941.170,00	(2.393.691.601,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.995.240.000,00	1.801.902.000,00	90,31	1.824.250.000,00	(22.348.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	874.300.000,00	841.910.000,00	96,30	831.510.000,00	10.400.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	441.580.000,00	437.760.000,00	99,13	442.160.000,00	(4.400.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	303.000.000,00	295.200.000,00	97,43	243.160.000,00	52.040.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.600.000,00	216.000.000,00	99,72	210.600.000,00	5.400.000,00
8	Dinas Sosial	1.012.320.000,00	986.980.000,00	97,50	1.044.690.000,00	(57.710.000,00)
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.135.000,00	78.135.000,00	100,00	72.450.000,00	5.685.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	296.880.000,00	290.280.000,00	97,78	254.630.000,00	35.650.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	340.010.000,00	325.410.000,00	95,71	322.860.000,00	2.550.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	756.592.000,00	656.200.000,00	86,73	672.482.000,00	(16.282.000,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	364.160.000,00	344.360.000,00	94,56	361.250.000,00	(16.890.000,00)
14	Dinas Perhubungan	717.400.000,00	676.550.000,00	94,31	660.100.000,00	16.450.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	371.520.000,00	362.600.000,00	97,60	516.390.000,00	(153.790.000,00)
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	447.720.000,00	438.080.000,00	97,85	424.560.000,00	13.520.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	732.940.000,00	729.680.000,00	99,56	720.200.000,00	9.480.000,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	226.430.000,00	222.680.000,00	98,34	206.550.000,00	16.130.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	917.580.000,00	917.280.000,00	99,97	919.000.000,00	(1.720.000,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	299.400.000,00	295.800.000,00	98,80	302.000.000,00	(6.200.000,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	742.800.000,00	708.800.000,00	95,42	395.600.000,00	313.200.000,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.215.415.000,00	1.203.915.000,00	99,05	1.078.220.000,00	125.695.000,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.043.216.000,00	980.870.000,00	94,02	1.059.430.000,00	(78.560.000,00)
24	Sekretariat Daerah	2.816.740.000,00	2.033.783.716,00	72,20	1.481.055.950,00	552.727.766,00
25	Sekretariat DPRD	807.840.000,00	744.490.000,00	92,16	804.420.000,00	(59.930.000,00)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	328.420.000,00	307.920.000,00	93,76	347.080.000,00	(39.160.000,00)
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	23.142.620.000,00	17.053.083.771,00	73,69	18.019.621.579,00	(966.537.808,00)
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.081.680.000,00	1.079.280.000,00	99,78	1.006.360.000,00	72.920.000,00
29	Badan Kepegawaian Daerah	543.440.000,00	537.520.000,00	98,91	547.440.000,00	(9.920.000,00)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	456.800.000,00	430.480.000,00	94,24	444.922.500,00	(14.442.500,00)
31	Badan Riset dan Inovasi Daerah	223.560.000,00	218.860.000,00	97,90	-	218.860.000,00
32	Badan Penghubung	36.600.000,00	36.600.000,00	100,00	35.400.000,00	1.200.000,00
33	Inspektorat	244.780.000,00	238.780.000,00	97,55	236.760.000,00	2.020.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	218.720.000,00	217.360.000,00	99,38	207.400.000,00	9.960.000,00
	Jumlah	**1.417.132.857.000,00**	**1.393.631.458.256,00**	**98,34**	**1.220.246.551.518,00**	**173.384.906.738,00**

5.1.2.1.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD **Rp132.534.438.978,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dianggarkan sebesar Rp146.670.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp132.534.438.978,00 atau 90,36% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp126.922.658.694,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.611.780.284,00 atau 4,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat DPRD	146.670.075.000,00	132.534.438.978,00	90,36	126.922.658.694,00	5.611.780.284,00
	Jumlah	**146.670.075.000,00**	**132.534.438.978,00**	**90,36**	**126.922.658.694,00**	**5.611.780.284,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD mengalami kenaikan tunjangan perumahan untuk pimpinan maupun anggota DPRD

5.1.2.1.1.3 Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp983.377.690,00

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp2.203.094.000,00 dengan realisasi sebesar Rp983.377.690,00 atau 44,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp204.972.404,00 mengalami kenaikan sebesar Rp778.405.286,00 atau 379,76% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	2.203.094.000,00	983.377.690,00	44,64	204.972.404,00	778.405.286,00
	Jumlah	**2.203.094.000,00**	**983.377.690,00**	**44,64**	**204.972.404,00**	**778.405.286,00**

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH mengalami kenaikan dikarenakan Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH untuk tahun 2023 masih di anggarkan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah

5.1.2.1.1.4 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Rp19.738.507.200,00

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH dianggarkan sebesar Rp28.002.096.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.738.507.200,00 atau 70,49%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp24.138.287.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp4.399.780.300,00 atau 18,23% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sekretariat Daerah	27.325.296.000,00	19.127.707.200,00	70,00	23.497.487.500,00	(4.369.780.300,00)
2	Sekretariat DPRD	676.800.000,00	610.800.000,00	90,25	640.800.000,00	(30.000.000,00)
	Jumlah	**28.002.096.000,00**	**19.738.507.200,00**	**70,49**	**24.138.287.500,00**	**(4.399.780.300,00)**

5.1.2.1.1.5 Belanja Pegawai BLUD Rp141.523.193.914,00

Belanja Pegawai BLUD dianggarkan sebesar Rp155.950.009.000,00 dengan realisasi sebesar Rp141.523.193.914,00 atau 90,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp136.323.230.505,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.199.963.409,00 atau 3,81% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	34.948.000.000,00	34.354.871.596,00	98,30	33.913.962.492,00	440.909.104,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	60.705.346.000,00	53.915.471.957,00	88,82	45.735.848.808,00	8.179.623.149,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	21.890.000.000,00	21.398.150.000,00	97,75	24.096.532.828,00	(2.698.382.828,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	12.594.248.000,00	12.406.098.955,00	98,51	11.310.907.237,00	1.095.191.718,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	6.730.089.000,00	5.240.408.000,00	77,87	8.024.889.400,00	(2.784.481.400,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.128.106.000,00	6.534.150.000,00	58,72	7.289.839.740,00	(755.689.740,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	7.954.220.000,00	7.674.043.406,00	96,48	5.951.250.000,00	1.722.793.406,00
	Jumlah	**155.950.009.000,00**	**141.523.193.914,00**	**90,75**	**136.323.230.505,00**	**5.199.963.409,00**

Adapun rincian Belanja Pegawai BLUD adalah sebagai berikut :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan — Rp131.592.285.508,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	33.198.000.000,00	32.692.621.596,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	58.793.173.000,00	52.644.921.957,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.500.000.000,00	19.031.635.000,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	12.594.248.000,00	12.406.098.955,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	5.539.089.000,00	4.189.858.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.618.856.000,00	5.868.450.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.778.000.000,00	4.758.700.000,00
	Jumlah	**143.021.366.000,00**	**131.592.285.508,00**

b. Belanja Tambahan Penghasilan — Rp1.672.183.406,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta		
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	90.073.000,00	-
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-
4	RSUD dr. Rehatta Jepara		
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	900.000.000,00	765.100.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta		
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	908.620.000,00	907.083.406,00
	Jumlah	**1.898.693.000,00**	**1.672.183.406,00**

c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya — Rp8.258.725.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.750.000.000,00	1.662.250.000,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.822.100.000,00	1.270.550.000,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	2.390.000.000,00	2.366.515.000,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	291.000.000,00	285.450.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.509.250.000,00	665.700.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.267.600.000,00	2.008.260.000,00
	Jumlah	**11.029.950.000,00**	**8.258.725.000,00**

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa — Rp6.234.228.358.506,00

Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp6.485.600.279.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.234.228.358.506,00 atau 96,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.791.112.760.975,00 mengalami kenaikan sebesar Rp443.115.597.531,00 atau 7,65% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Barang	734.442.853.000,00	708.560.237.105,00	96,48	611.678.497.090,00	96.881.740.015,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Belanja Jasa	1.810.154.898.000,00	1.768.827.289.459,00	97,72	1.824.977.181.131,00	(56.149.891.672,00)
3	Belanja Pemeliharaan	322.935.881.000,00	317.243.346.886,00	98,24	381.960.462.907,00	(64.717.116.021,00)
4	Belanja Perjalanan Dinas	524.293.233.000,00	470.946.243.471,00	89,82	519.156.784.174,00	(48.210.540.703,00)
5	Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	192.977.661.000,00	187.527.908.292,00	97,18	149.198.726.962,00	38.329.181.330,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	833.744.652.000,00	824.613.027.478,00	98,90	795.203.493.041,00	29.409.534.437,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.067.051.101.000,00	1.956.510.305.815,00	94,65	1.508.937.615.670,00	447.572.690.145,00
	Jumlah	**6.485.600.279.000,00**	**6.234.228.358.506,00**	**96,12**	**5.791.112.760.975,00**	**443.115.597.531,00**

Belanja Barang dan Jasa **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan realisasi sesuai dengan kebutuhan dan efisiensi serta terjadi sisa lelang/pengadaan.

5.1.2.1.2.1 Belanja Barang **Rp708.560.237.105,00**

Belanja Barang dianggarkan sebesar Rp734.442.853.000,00 dengan realisasi sebesar Rp708.560.237.105,00 atau 96,48%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp611.678.497.090,00 mengalami kenaikan sebesar Rp96.881.740.015,00 atau 15,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	129.958.089.000,00	124.813.799.122,00	96,04	117.348.454.496,00	7.465.344.626,00
2	Dinas Kesehatan	63.814.284.000,00	55.906.538.450,00	87,61	68.896.477.359,00	(12.989.938.909,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	824.760.000,00	127.848.500,00	15,50	250.466.080,00	(122.617.580,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	519.680.000,00	393.059.500,00	75,63	249.265.300,00	143.794.200,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	439.640.000,00	353.093.700,00	80,31	647.217.220,00	(294.123.520,00)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	498.670.000,00	469.823.499,00	94,22	272.484.402,00	197.339.097,00
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	319.215.000,00	311.018.000,00	97,43	166.488.850,00	144.529.150,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	314.710.000,00	286.251.600,00	90,96	9.385.074.028,00	(9.098.822.428,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.641.905.000,00	3.584.162.930,00	98,41	135.734.000,00	3.448.428.930,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	72.111.832.000,00	71.351.945.770,00	98,95	16.244.043.556,00	55.107.902.214,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	18.414.762.000,00	18.058.322.901,00	98,06	15.318.363.732,00	2.739.959.169,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.359.939.000,00	4.341.255.193,00	99,57	4.615.164.595,00	(273.909.402,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.553.483.000,00	1.544.292.800,00	99,41	1.245.414.610,00	298.878.190,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.244.438.000,00	3.156.352.639,00	97,29	2.422.301.405,00	734.051.234,00
15	Dinas Sosial	60.227.988.000,00	59.765.426.484,00	99,23	50.919.346.050,00	8.846.080.434,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.904.467.000,00	10.704.232.251,00	98,16	7.292.693.671,00	3.411.538.580,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.925.958.000,00	1.902.827.929,00	98,80	2.108.538.100,00	(205.710.171,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.942.654.000,00	8.890.171.057,00	99,41	17.516.104.241,00	(8.625.933.184,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.403.667.000,00	23.032.682.351,00	98,41	21.869.929.120,00	1.162.753.231,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.044.399.000,00	2.042.079.250,00	99,89	1.497.877.519,00	544.201.731,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Dinas Perhubungan	4.598.885.000,00	4.487.993.244,00	97,59	3.798.782.509,00	689.210.735,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.497.896.000,00	3.453.054.435,00	98,72	4.011.093.345,00	(558.038.910,00)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.893.397.000,00	5.823.643.148,00	98,82	5.039.571.309,00	784.071.839,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	999.380.000,00	997.719.341,00	99,83	815.071.673,00	182.647.668,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.730.184.000,00	25.029.283.170,00	97,28	16.186.694.227,00	8.842.588.943,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.854.329.000,00	9.828.914.829,00	99,74	1.203.514.909,00	8.625.399.920,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.744.685.000,00	5.730.175.427,00	99,75	6.617.434.450,00	(887.259.023,00)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.997.966.000,00	16.353.536.190,00	96,21	23.644.321.811,00	(7.290.785.621,00)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	76.126.185.000,00	71.599.249.106,00	94,05	14.346.963.905,00	57.252.285.201,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.478.323.000,00	13.374.786.635,00	99,23	8.185.201.323,00	5.189.585.312,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.616.937.000,00	7.575.625.160,00	99,46	40.059.527.673,00	(32.483.902.513,00)
32	Sekretariat Daerah	18.362.779.000,00	18.201.666.936,00	99,12	18.312.719.116,00	(111.052.180,00)
33	Sekretariat DPRD	79.557.387.000,00	77.575.744.314,00	97,51	60.599.219.923,00	16.976.524.391,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.464.828.000,00	4.399.862.722,00	98,54	5.989.738.785,00	(1.589.876.063,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	27.235.333.000,00	26.731.197.309,00	98,15	33.891.775.124,00	(7.160.577.815,00)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.463.513.000,00	9.151.563.466,00	96,70	8.521.100.290,00	630.463.176,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	3.264.064.000,00	3.251.750.489,00	99,62	3.817.246.127,00	(565.495.638,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.285.644.000,00	6.231.722.510,00	99,14	8.926.777.952,00	(2.695.055.442,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.650.145.000,00	1.623.104.400,00	98,36	-	1.623.104.400,00
40	Badan Penghubung	2.240.964.000,00	2.213.707.073,00	98,78	2.426.967.015,00	(213.259.942,00)
41	Inspektorat	1.224.214.000,00	1.207.985.675,00	98,67	952.381.745,00	255.603.930,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.691.275.000,00	2.682.767.600,00	99,68	5.930.955.545,00	(3.248.187.945,00)
	Jumlah	**734.442.853.000,00**	**708.560.237.105,00**	**96,48**	**611.678.497.090,00**	**96.881.740.015,00**

5.1.2.1.2.2 Belanja Jasa **Rp1.768.827.289.459,00**

Belanja Jasa dianggarkan sebesar Rp1.810.154.898.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.768.827.289.459,00 atau 97,72%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.824.977.181.131,00 mengalami penurunan sebesar Rp56.149.891.672,00 atau 3,08% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	497.062.138.000,00	491.268.312.955,00	98,83	539.532.289.486,00	(48.263.976.531,00)
2	Dinas Kesehatan	384.020.680.000,00	382.577.431.266,00	99,62	409.757.570.339,00	(27.180.139.073,00)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	363.444.000,00	363.418.464,00	99,99	416.282.452,00	(52.863.988,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.254.200.000,00	1.227.481.744,00	97,87	889.250.360,00	338.231.384,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	378.406.000,00	221.783.040,00	58,61	387.292.100,00	(165.509.060,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	470.000.000,00	344.363.751,00	73,27	812.328.467,00	(467.964.716,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	174.620.000,00	170.358.320,00	97,56	498.251.160,00	(327.892.840,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	29.412.510.000,00	27.162.877.229,00	92,35	26.913.460.632,00	249.416.597,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	47.643.083.000,00	46.407.166.433,00	97,41	47.294.987.802,00	(887.821.369,00)
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.702.464.000,00	6.425.238.501,00	95,86	9.102.703.079,00	(2.677.464.578,00)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	3.246.974.000,00	3.179.222.580,00	97,91	3.408.473.953,00	(229.251.373,00)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.886.544.000,00	3.845.658.058,00	98,95	4.320.928.960,00	(475.270.902,00)
13	Dinas Sosial	35.646.169.000,00	35.176.468.856,00	98,68	28.951.184.687,00	6.225.284.169,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.138.251.000,00	16.556.836.323,00	96,61	16.757.060.792,00	(200.224.469,00)
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.894.313.000,00	3.735.718.039,00	95,93	3.857.169.709,00	(121.451.670,00)
16	Dinas Ketahanan Pangan	6.670.582.000,00	6.563.019.607,00	98,39	7.021.687.986,00	(458.668.379,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.698.903.000,00	14.026.497.639,00	95,43	18.241.007.423,00	(4.214.509.784,00)
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.774.998.000,00	3.531.940.104,00	93,56	4.062.669.992,00	(530.729.888,00)
19	Dinas Perhubungan	126.702.505.000,00	125.267.349.359,00	98,87	117.552.035.966,00	7.715.313.393,00
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	31.534.137.000,00	30.890.919.200,00	97,96	54.054.646.397,00	(23.163.727.197,00)
21	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	22.176.090.000,00	21.801.671.247,00	98,31	24.363.879.452,00	(2.562.208.205,00)
22	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.724.140.000,00	4.679.827.928,00	99,06	4.758.651.720,00	(78.823.792,00)
23	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	107.552.592.000,00	104.573.513.603,00	97,23	34.393.304.059,00	70.180.209.544,00
24	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.650.303.000,00	3.619.541.120,00	99,16	3.626.534.265,00	(6.993.145,00)
25	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.187.271.000,00	17.940.428.811,00	98,64	20.914.178.655,00	(2.973.749.844,00)
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.581.954.000,00	12.176.248.154,00	96,78	13.902.282.892,00	(1.726.034.738,00)
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.376.675.000,00	20.016.922.544,00	98,23	24.353.055.925,00	(4.336.133.381,00)
28	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.358.263.000,00	12.226.768.596,00	98,94	13.543.109.814,00	(1.316.341.218,00)
29	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.681.414.000,00	25.160.314.506,00	97,97	22.998.691.017,00	2.161.623.489,00
30	Sekretariat Daerah	43.002.925.000,00	41.548.352.528,00	96,62	47.865.333.249,00	(6.316.980.721,00)
31	Sekretariat DPRD	129.442.807.000,00	126.690.148.366,00	97,87	131.023.468.464,00	(4.333.320.098,00)
32	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	10.242.844.000,00	9.849.367.399,00	96,16	11.943.637.793,00	(2.094.270.394,00)
33	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	114.174.134.000,00	100.606.527.808,00	88,12	102.271.811.780,00	(1.665.283.972,00)
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	20.588.209.000,00	19.820.568.790,00	96,27	19.350.903.725,00	469.665.065,00
35	Badan Kepegawaian Daerah	8.928.170.000,00	8.604.043.861,00	96,37	8.067.041.544,00	537.002.317,00
36	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	17.493.426.000,00	16.793.471.444,00	96,00	21.526.714.585,00	(4.733.243.141,00)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.145.423.000,00	4.028.277.025,00	97,17	-	4.028.277.025,00
38	Badan Penghubung	8.025.617.000,00	7.758.656.644,00	96,67	8.413.680.447,00	(655.023.803,00)
39	Inspektorat	3.319.661.000,00	3.256.463.220,00	98,10	3.214.248.478,00	42.214.742,00
40	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.828.059.000,00	8.734.114.397,00	98,94	14.615.371.525,00	(5.881.257.128,00)
	Jumlah	**1.810.154.898.000,00**	**1.768.827.289.459,00**	**97,72**	**1.824.977.181.131,00**	**(56.149.891.672,00)**

5.1.2.1.2.3 Belanja Pemeliharaan Rp317.243.346.886,00

Belanja Pemeliharaan dianggarkan sebesar Rp322.935.881.000,00 dengan realisasi sebesar Rp317.243.346.886,00 atau 98,24%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp381.960.462.907,00 mengalami penurunan sebesar Rp64.717.116.021,00 atau 16,94% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	123.948.149.000,00	122.285.285.950,00	98,66	98.993.418.119,00	23.291.867.831,00
2	Dinas Kesehatan	3.338.110.000,00	3.304.911.398,00	99,01	9.540.283.391,00	(6.235.371.993,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	87.177.870.000,00	85.926.602.414,00	98,56	152.921.109.271,00	(66.994.506.857,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	26.066.428.000,00	25.819.812.716,00	99,05	19.959.508.468,00	5.860.304.248,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	698.650.000,00	686.716.971,00	98,29	664.250.000,00	22.466.971,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	460.607.000,00	460.360.971,00	99,95	1.803.072.843,00	(1.342.711.872,00)
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	768.400.000,00	745.202.077,00	96,98	768.512.581,00	(23.310.504,00)
8	Dinas Sosial	6.850.490.000,00	6.783.155.054,00	99,02	4.013.695.714,00	2.769.459.340,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.506.207.000,00	2.436.001.814,00	97,20	2.678.674.985,00	(242.673.171,00)
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	420.503.000,00	419.801.062,00	99,83	538.820.881,00	(119.019.819,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	690.120.000,00	679.763.280,00	98,50	968.567.110,00	(288.803.830,00)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.309.132.000,00	3.271.311.635,00	98,86	6.830.818.331,00	(3.559.506.696,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	521.040.000,00	519.369.128,00	99,68	461.449.719,00	57.919.409,00
14	Dinas Perhubungan	3.822.030.000,00	3.696.760.340,00	96,72	5.237.158.303,00	(1.540.397.963,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.157.050.000,00	2.142.275.413,00	99,32	3.189.429.946,00	(1.047.154.533,00)
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.479.644.000,00	1.462.108.518,00	98,81	2.954.434.190,00	(1.492.325.672,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	534.750.000,00	528.509.281,00	98,83	272.339.595,00	256.169.686,00
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.916.606.000,00	1.802.985.746,00	94,07	2.151.487.687,00	(348.501.941,00)
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	709.825.000,00	692.599.339,00	97,57	607.710.150,00	84.889.189,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.220.217.000,00	2.210.803.279,00	99,58	1.911.313.264,00	299.490.015,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.859.390.000,00	2.824.797.390,00	98,79	4.765.625.145,00	(1.940.827.755,00)
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.614.651.000,00	3.355.130.582,00	92,82	5.664.913.495,00	(2.309.782.913,00)
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.958.000.000,00	1.954.882.624,00	99,84	2.900.507.320,00	(945.624.696,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.893.062.000,00	3.880.592.052,00	99,68	5.223.802.601,00	(1.343.210.549,00)
25	Sekretariat Daerah	8.798.595.000,00	8.592.928.731,00	97,66	10.355.794.179,00	(1.762.865.448,00)
26	Sekretariat DPRD	6.039.096.000,00	5.888.340.366,00	97,50	7.241.744.717,00	(1.353.404.351,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.776.050.000,00	2.742.666.455,00	98,80	2.819.376.769,00	(76.710.314,00)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	11.498.468.000,00	10.444.143.894,00	90,83	14.723.530.292,00	(4.279.386.398,00)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.262.638.000,00	4.221.718.101,00	99,04	4.009.969.416,00	211.748.685,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	770.000.000,00	760.860.393,00	98,81	1.239.383.498,00	(478.523.105,00)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.270.420.000,00	2.254.965.644,00	99,32	3.814.125.683,00	(1.559.160.039,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.025.751.000,00	1.020.164.301,00	99,46	-	1.020.164.301,00
33	Badan Penghubung	1.405.970.000,00	1.284.011.306,00	91,33	1.325.195.504,00	(41.184.198,00)
34	Inspektorat	1.374.712.000,00	1.368.859.356,00	99,57	802.181.329,00	566.678.027,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	793.250.000,00	774.949.305,00	97,69	608.258.411,00	166.690.894,00
	Jumlah	**322.935.881.000,00**	**317.243.346.886,00**	**98,24**	**381.960.462.907,00**	**(64.717.116.021,00)**

5.1.2.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Rp470.946.243.471,00

Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan sebesar Rp524.293.233.000,00 dengan realisasi sebesar Rp470.946.243.471,00 atau 89,82%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp519.156.784.174,00 mengalami penurunan sebesar Rp48.210.540.703,00 atau 9,29% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.271.162.000,00	40.946.101.790,00	90,45	51.867.762.674,00	(10.921.660.884,00)
2	Dinas Kesehatan	9.826.181.000,00	8.326.322.524,00	84,74	20.334.925.983,00	(12.008.603.459,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	13.590.000,00	3.997.500,00	29,42	-	3.997.500,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	135.035.000,00	128.121.500,00	94,88	210.220.500,00	(82.099.000,00)
5	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	138.750.000,00	118.859.000,00	85,66	198.348.200,00	(79.489.200,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	-	2.250.000,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.219.719.000,00	9.526.321.743,00	93,22	10.685.241.861,00	(1.158.920.118,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	13.485.772.000,00	12.965.438.861,00	96,14	15.357.674.758,00	(2.392.235.897,00)
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.743.539.000,00	5.721.158.906,00	99,61	7.701.697.941,00	(1.980.539.035,00)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	4.990.463.000,00	4.980.189.887,00	99,79	4.855.506.573,00	124.683.314,00
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.795.810.000,00	2.599.740.753,00	92,99	2.975.017.621,00	(375.276.868,00)
12	Dinas Sosial	8.640.799.000,00	8.460.112.106,00	97,91	7.002.593.360,00	1.457.518.746,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.256.924.000,00	11.654.204.935,00	95,08	11.169.903.792,00	484.301.143,00
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.236.288.000,00	3.216.481.450,00	99,39	4.762.082.686,00	(1.545.601.236,00)
15	Dinas Ketahanan Pangan	3.607.990.000,00	3.580.940.344,00	99,25	3.671.296.133,00	(90.355.789,00)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.377.091.000,00	12.912.015.338,00	96,52	17.577.185.982,00	(4.665.170.644,00)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.100.576.000,00	4.064.293.843,00	99,12	4.864.845.170,00	(800.551.327,00)
18	Dinas Perhubungan	4.860.800.000,00	4.817.944.951,00	99,12	6.910.626.070,00	(2.092.681.119,00)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.062.033.000,00	7.909.721.726,00	98,11	11.705.469.533,00	(3.795.747.807,00)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	16.157.556.000,00	15.900.181.734,00	98,41	19.790.395.881,00	(3.890.214.147,00)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.992.901.000,00	2.987.809.976,00	99,83	2.001.368.755,00	986.441.221,00
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	16.531.742.000,00	15.310.683.289,00	92,61	16.719.055.574,00	(1.408.372.285,00)
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.628.016.000,00	1.605.303.982,00	98,60	1.155.019.770,00	450.284.212,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.815.768.000,00	5.761.806.971,00	99,07	6.455.186.371,00	(693.379.400,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.618.537.000,00	4.557.003.550,00	98,67	7.170.676.535,00	(2.613.672.985,00)
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.355.330.000,00	12.044.533.214,00	97,48	19.948.787.535,00	(7.904.254.321,00)
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.818.564.000,00	10.783.901.958,00	99,68	12.626.370.516,00	(1.842.468.558,00)
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.515.094.000,00	11.341.115.119,00	98,49	11.769.245.440,00	(428.130.321,00)
29	Sekretariat Daerah	29.033.354.000,00	27.362.320.081,00	94,24	29.325.433.762,00	(1.963.113.681,00)
30	Sekretariat DPRD	190.349.625.000,00	150.159.698.001,00	78,89	126.720.989.001,00	23.438.709.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.325.200.000,00	7.301.998.866,00	99,68	10.257.215.500,00	(2.955.216.634,00)
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.487.652.000,00	15.341.235.204,00	99,05	22.281.419.105,00	(6.940.183.901,00)
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.702.649.000,00	10.623.116.533,00	99,26	10.342.631.542,00	280.484.991,00
34	Badan Kepegawaian Daerah	6.453.028.000,00	6.443.730.260,00	99,86	8.639.736.511,00	(2.196.006.251,00)
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.005.464.000,00	10.819.367.289,00	98,31	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.031.363.000,00	3.024.917.894,00	99,79	-	3.024.917.894,00
37	Badan Penghubung	1.099.075.000,00	1.093.819.856,00	99,52	1.405.088.573,00	(311.268.717,00)
38	Inspektorat	9.038.878.000,00	9.012.629.108,00	99,71	9.328.357.774,00	(315.728.666,00)
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.568.665.000,00	7.536.853.429,00	99,58	13.012.620.409,00	(5.475.766.980,00)
	Jumlah	**524.293.233.000,00**	**470.946.243.471,00**	**89,82**	**519.156.784.174,00**	**(48.210.540.703,00)**

5.1.2.1.2.5 Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/ Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat — Rp187.527.908.292,00

Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dianggarkan sebesar Rp192.977.661.000,00 dengan realisasi sebesar Rp187.527.908.292,00 atau 97,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp149.198.726.962,00 mengalami kenaikan sebesar Rp38.329.181.330,00 atau 25,69% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.705.824.000,00	6.940.270.000,00	64,83	6.011.770.200,00	928.499.800,00
2	Dinas Kesehatan	379.225.000,00	275.700.000,00	72,70	381.230.000,00	(105.530.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	-
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	226.300.000,00	208.300.000,00	92,05	233.700.000,00	(25.400.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	227.500.000,00	(209.500.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	28.250.000,00	28.000.000,00	99,12	36.480.000,00	(8.480.000,00)
7	Dinas Sosial	171.677.597.000,00	170.219.570.000,00	99,15	120.534.200.650,00	49.685.369.350,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.280.000,00	93.280.000,00	100,00	178.500.000,00	(85.220.000,00)
9	Dinas Ketahanan Pangan	130.125.000,00	130.125.000,00	100,00	1.462.275.000,00	(1.332.150.000,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	768.060.000,00	756.174.292,00	98,45	558.252.360,00	197.921.932,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	280.300.000,00	280.300.000,00	100,00	196.850.000,00	83.450.000,00
12	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	18.000.000,00	-
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.000.000,00	212.000.000,00	100,00	589.000.000,00	(377.000.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.800.000,00	55.440.000,00	99,35	-	55.440.000,00
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.571.800.000,00	6.508.550.000,00	99,04	16.628.695.000,00	(10.120.145.000,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.850.000,00	59.850.000,00	100,00	60.000.000,00	(150.000,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.500.000,00	13.500.000,00	100,00	3.750.000,00	9.750.000,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	539.400.000,00	531.400.000,00	98,52	262.150.000,00	269.250.000,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	715.000.000,00	714.999.000,00	100,00	630.063.760,00	84.935.240,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	10.000.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	225.200.000,00	215.200.000,00	95,56	500.259.992,00	(285.059.992,00)
23	Sekretariat Daerah	60.950.000,00	50.050.000,00	82,12	29.825.000,00	20.225.000,00
24	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	515.225.000,00	(515.225.000,00)
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	-	4.500.000,00
28	Badan Riset dan Inovasi Daerah	136.700.000,00	136.700.000,00	100,00	-	136.700.000,00
27	Badan Penghubung	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00	-
29	Inspektorat	-	-	-	22.500.000,00	(22.500.000,00)
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	70.500.000,00	(70.500.000,00)
	Jumlah	**192.977.661.000,00**	**187.527.908.292,00**	**97,18**	**149.198.726.962,00**	**38.329.181.330,00**

Belanja Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan antara lain adanya bantuan Satu Orang Satu Hari (SOSH) pada Panti Dinas Sosial

5.1.2.1.2.6 Belanja Barang dan Jasa BOS **Rp824.613.027.478,00**

Belanja Barang dan Jasa BOS dianggarkan sebesar Rp833.744.652.000,00 dengan realisasi sebesar Rp824.613.027.478,00 atau 98,90% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp795.203.493.041,00 mengalami kenaikan sebesar Rp29.409.534.437,00 atau 3,70% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	833.744.652.000,00	824.613.027.478,00	98,90	795.203.493.041,00	29.409.534.437,00
	Jumlah	**833.744.652.000,00**	**824.613.027.478,00**	**98,90**	**795.203.493.041,00**	**29.409.534.437,00**

5.1.2.1.2.7 Belanja Barang dan Jasa BLUD **Rp1.956.510.305.815,00**

Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan sebesar Rp2.067.051.101.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.956.510.305.815,00 atau 94,65%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.508.937.615.670,00 mengalami kenaikan sebesar Rp447.572.690.145,00 atau 29,66% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.040.726.276.000,00	1.029.810.939.533,00	98,95	798.860.621.075,00	230.950.318.458,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	624.045.941.000,00	584.642.293.470,00	93,69	415.202.348.580,00	169.439.944.890,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	200.878.828.000,00	160.348.121.971,00	79,82	149.686.473.769,00	10.661.648.202,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	50.936.270.000,00	50.932.104.215,00	99,99	40.578.256.954,00	10.353.847.261,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	65.680.487.000,00	48.585.113.818,00	73,97	44.430.370.614,00	4.154.743.204,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	43.198.441.000,00	40.955.681.141,00	94,81	29.419.868.563,00	11.535.812.578,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	41.584.858.000,00	41.236.051.667,00	99,16	30.759.676.115,00	10.476.375.552,00
	Jumlah	**2.067.051.101.000,00**	**1.956.510.305.815,00**	**94,65**	**1.508.937.615.670,00**	**447.572.690.145,00**

Adapun rincian Belanja Barang dan Jasa BLUD, adalah sebagai berikut :

a. Belanja Barang — Rp990.503.055.886,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	546.658.176.000,00	545.905.655.398,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	321.192.156.000,00	310.317.672.740,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	96.801.725.000,00	74.850.080.880,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	19.763.205.000,00	19.760.442.036,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	18.255.550.000,00	16.675.703.405,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	12.935.000.000,00	12.372.058.743,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	10.834.434.000,00	10.621.442.684,00
	Jumlah	**1.026.440.246.000,00**	**990.503.055.886,00**

b. Belanja Jasa — Rp880.484.823.019,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	452.112.470.000,00	449.845.114.583,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	257.290.016.000,00	243.931.231.655,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	83.277.103.000,00	77.123.627.412,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	28.410.366.000,00	28.409.241.144,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	42.223.066.000,00	27.939.227.796,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	26.699.441.000,00	25.320.576.394,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	28.022.174.000,00	27.915.804.035,00
	Jumlah	**918.034.636.000,00**	**880.484.823.019,00**

c. Belanja Pemeliharaan — Rp78.660.066.021,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	40.757.230.000,00	32.959.002.717,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	43.313.769.000,00	29.112.147.244,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	19.955.000.000,00	7.672.437.827,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	2.271.699.000,00	2.271.488.870,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	4.127.871.000,00	3.197.579.840,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.055.000.000,00	1.802.738.044,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.649.400.000,00	1.644.671.479,00
	Jumlah	**114.129.969.000,00**	**78.660.066.021,00**

d. Belanja Perjalanan Dinas Rp6.773.435.489,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.148.400.000,00	1.063.166.835,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	2.250.000.000,00	1.281.241.831,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	835.000.000,00	701.975.852,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	491.000.000,00	490.932.165,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.071.000.000,00	769.602.777,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.500.000.000,00	1.452.292.560,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.033.500.000,00	1.014.223.469,00
	Jumlah	**8.328.900.000,00**	**6.773.435.489,00**

e. Belanja Barang, Uang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Rp88.925.400,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	50.000.000,00	38.000.000,00
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	-
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	10.000.000,00	-
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	3.000.000,00	3.000.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	9.000.000,00	8.015.400,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	45.350.000,00	39.910.000,00
	Jumlah	**117.350.000,00**	**88.925.400,00**

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi Rp1.399.999.100,00

Belanja Subsidi dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.399.999.100,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp5.350.753.069,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.950.753.969,00 atau 73,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	1.472.800.000,00	(1.472.800.000,00)
2	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.400.000.000,00	1.399.999.100,00	100,00	3.661.986.750,00	(2.261.987.650,00)
3	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-	-
4	Belanja Subsidi kepada Koperasi	-	-	-	215.966.319,00	(215.966.319,00)
	Jumlah	**1.400.000.000,00**	**1.399.999.100,00**	**100,00**	**5.350.753.069,00**	**(3.950.753.969,00)**

5.1.2.1.3.1 Belanja Subsidi kepada BUMN Rp0,00

Belanja Subsidi kepada BUMN terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.472.800.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.472.800.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	1.472.800.000,00	(1.472.800.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**1.472.800.000,00**	**(1.472.800.000,00)**

5.1.2.1.3.2 Belanja Subsidi kepada BUMD **Rp1.399.999.100,00**

Belanja Subsidi kepada BUMD dianggarkan sebesar Rp1.400.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.399.999.100,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.661.986.750,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.261.987.650,00 atau 61,77% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Ketahanan Pangan	1.400.000.000,00	1.399.999.100,00	100,00	3.661.986.750,00	(2.261.987.650,00)
	Jumlah	**1.400.000.000,00**	**1.399.999.100,00**	**100,00**	**3.661.986.750,00**	**(2.261.987.650,00)**

Subsidi kepada BUMD berupa subsidi bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng dan telur ayam di 9 Kabupaten/Kota pantauan inflasi tertinggi (Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kudus, Jepara, Rembang, Wonogiri, Wonosobo, Kota Salatiga, Semarang dan Surakarta).

5.1.2.1.3.3 Belanja Subsidi kepada Koperasi **Rp0,00**

Belanja Subsidi kepada Koperasi terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp215.966.319,00 mengalami penurunan sebesar Rp215.966.319,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	215.966.319,00	(215.966.319,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**215.966.319,00**	**(215.966.319,00)**

5.1.2.1.4 Belanja Hibah **Rp2.780.143.423.054,00**

Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp2.804.157.236.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.780.143.423.054,00 atau 99,14%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.610.303.175.760,00 mengalami kenaikan sebesar Rp169.840.247.294,00 atau 6,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.017.439.472.000,00	1.017.439.472.000,00	100,00	724.859.150.000,00	292.580.322.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	711.243.635.000,00	690.622.077.108,00	97,10	841.422.489.846,00	(150.800.412.738,00)
3	Belanja Hibah Dana BOS	1.040.145.530.000,00	1.036.753.274.946,00	99,67	1.010.071.727.914,00	26.681.547.032,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	35.328.599.000,00	35.328.599.000,00	100,00	33.949.808.000,00	1.378.791.000,00
	Jumlah	**2.804.157.236.000,00**	**2.780.143.423.054,00**	**99,14**	**2.610.303.175.760,00**	**169.840.247.294,00**

5.1.2.1.4.1 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat **Rp1.017.439.472.000,00**

Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar Rp1.017.439.472.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.017.439.472.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp724.859.150.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp292.580.322.000,00 atau 40,36% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00	250.000.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Sekretariat Daerah	304.450.000.000,00	304.450.000.000,00	100,00	304.470.150.000,00	(20.150.000,00)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	708.739.472.000,00	708.739.472.000,00	100,00	416.389.000.000,00	292.350.472.000,00
	Jumlah	**1.017.439.472.000,00**	**1.017.439.472.000,00**	**100,00**	**724.859.150.000,00**	**292.580.322.000,00**

Adapun rincian belanja hibah dari pemerintah pusat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Komando Daerah Militer (KODAM) IV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	4.063.250.000,00	4.063.250.000,00	100,00	10.413.250.000,00	(6.350.000.000,00)
2	Kepolisian Daerah (Polda) Jateng Pengamanan Pemilu (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	62.696.843.000,00	62.696.843.000,00	100,00	10.578.150.000,00	52.118.693.000,00
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah	474.965.178.000,00	474.965.178.000,00	100,00	316.643.452.000,00	158.321.726.000,00
4	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Adi Soemarmo (Jl. Adi Soemarmo Malangwijan Colonadu Pulosari, Kab. Karanganyar, Jawa Tengah, KAB. KARANGANYAR)	205.000.000,00	205.000.000,00	100,00	583.000.000,00	(378.000.000,00)
5	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Semarang (Jl. Re. Martadinata No.12, Tawangsari, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	121.000.000,00	129.000.000,00
6	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Cilacap (Jl. Niaga No. 2 Klega, Tambakreja, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah, KAB. CILACAP)	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	121.000.000,00	4.000.000,00
7	Pangkalan Utama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) V Pangkalan TNI AL Tegal (Jl. Proklamasi, Tegalsari, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah, KOTA TEGAL)	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	121.000.000,00	29.000.000,00
8	Komando Pendidikan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) Pangkalan TNI AU Jend. Soedirman	-	-	-	121.000.000,00	(121.000.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Madukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00	200.000.000,00	50.000.000,00
10	Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Jawa Tengah	116.230.722.000,00	116.230.722.000,00	100,00	77.487.148.000,00	38.743.574.000,00
11	Komando Operasi Udara II pangkalan TNI AU Jenderal Besar Soedirman (Area Sawah, Wirasaba, Kec. Bukateja, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, KAB. PURBALINGGA)	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	-	125.000.000,00
12	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	7.545.329.000,00	7.545.329.000,00	100,00	-	7.545.329.000,00
13	Komite Intelijen Daerah (KOMINDA) Provinsi Jawa Tengah (Jl. Untung Suropati Kota Semarang, KOTA SEMARANG)	650.000.000,00	650.000.000,00	100,00	-	650.000.000,00
14	Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah (Jl. Mardukoro Blok BB, Tawangmas, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	500.000.000,00	500.000.000,00	100,00	-	500.000.000,00
15	Komando Daerah Militer IV/Diponegoro Pengamanan Pemilu (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00	-	3.000.000.000,00
16	Komando Daerah MiliterIV/Diponegoro (Jl. Perintis Kemerdekaan, Watugong, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	2.655.000.000,00	2.655.000.000,00	100,00	-	2.655.000.000,00
17	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	-	900.000.000,00
18	Komando Resor Militer 071/Wijayakusuma	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	-	2.000.000.000,00
19	Komando Resor Militer 073/Makutarama	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	100,00	-	4.000.000.000,00
20	Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Jl. Pahlawan No. 1 Semarang, Jawa Tengah, KOTA SEMARANG)	28.428.150.000,00	28.428.150.000,00	100,00	-	28.428.150.000,00
21	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Tengah	4.250.000.000,00	4.250.000.000,00	100,00	4.000.000.000,00	250.000.000,00
22	KANWIL KEMENAG PROV. JATENG	304.450.000.000,00	304.450.000.000,00	100,00	304.470.150.000,00	(20.150.000,00)
	Jumlah	**1.017.439.472.000,00**	**1.017.439.472.000,00**	**100,00**	**724.859.150.000,00**	**292.580.322.000,00**

- Hibah yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dianggarkan 2 (dua) tahap di Tahun 2023 sebesar Rp316.643.452.000 dan Tahun 2024 sebesar Rp474.965.178.000,00 terealisasi sebesar Rp700.725.990.119,00 atau 88,52% sisa sebesar Rp90.882.639.881,00 dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 5 Mei 2025.
- Hibah yang diberikan kepada Badan Pengawas Pemilu untuk Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2024 dianggarkan 2 (dua) tahap di Tahun 2023 sebesar Rp77.487.148.000,00 dan Tahun 2024 sebesar Rp116.230.722.000,00 terealisasi sebesar Rp116.230.722.000,00 atau 75,84% sisa sebesar Rp46.797.740.411,00 dan telah disetor ke kas daerah pada tanggal 2 Mei 2025.

5.1.2.1.4.2 Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia — Rp690.622.077.108,00

Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dianggarkan sebesar Rp711.243.635.000,00 dengan realisasi sebesar Rp690.622.077.108,00 atau 97,10%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp841.422.489.846,00 mengalami penurunan sebesar Rp150.800.412.738,00 atau 17,92%. dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	290.362.300.000,00	282.600.286.698,00	97,33	354.701.088.661,00	(72.100.801.963,00)
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00	(1.100.000.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	9.536.248.000,00	(9.536.248.000,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.450.335.000,00	1.449.833.634,00	99,97	1.065.802.140,00	384.031.494,00
5	Dinas Sosial	850.000.000,00	840.000.000,00	98,82	1.178.750.000,00	(338.750.000,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	12.540.234.600,00	(12.540.234.600,00)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.967.930.000,00	14.862.655.950,00	99,30	17.450.037.071,00	(2.587.381.121,00)
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	139.359.975.000,00	138.633.255.000,00	99,48	110.325.000.000,00	28.308.255.000,00
9	Dinas kelautan dan Perikanan	4.000.000.000,00	3.919.125.922,00	97,98	5.823.274.936,00	(1.904.149.014,00)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.866.475.000,00	48.268.167.500,00	406,76	47.609.303.607,00	658.863.893,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	51.564.276.000,00	11.356.542.906,00	22,02	33.362.956.000,00	(22.006.413.094,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.676.289.000,00	8.606.154.498,00	99,19	8.411.300.081,00	194.854.417,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	865.000.000,00	865.000.000,00	100,00	4.161.229.750,00	(3.296.229.750,00)
14	Sekretariat Daerah	101.295.500.000,00	94.103.500.000,00	92,90	117.757.265.000,00	(23.653.765.000,00)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	85.685.555.000,00	84.817.555.000,00	98,99	116.100.000.000,00	(31.282.445.000,00)
	Jumlah	**711.243.635.000,00**	**690.622.077.108,00**	**97,10**	**841.422.489.846,00**	**(150.800.412.738,00)**

Adapun rincian belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Hibah Bidang Pendidikan	290.362.300.000,00	282.600.286.698,00	97,33	338.818.088.661,00	(56.217.801.963,00)
2	Hibah Bidang Kesehatan	300.000.000,00	300.000.000,00	100,00	1.400.000.000,00	(1.100.000.000,00)
3	Hibah Bidang Konstruksi	1.450.335.000,00	1.449.833.634,00	99,97	10.602.050.140,00	(9.152.216.506,00)
4	Hibah Bidang Sosial	850.000.000,00	840.000.000,00	98,82	1.178.750.000,00	(338.750.000,00)
5	Hibah Bidang Pangan	-	-	-	12.540.234.600,00	(12.540.234.600,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
6	Hibah Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan Non Profesional	139.359.975.000,00	138.633.255.000,00	99,48	110.325.000.000,00	28.308.255.000,00
7	Hibah Bidang Kesenian dan Kebudayaan	-	-	-	15.883.000.000,00	(15.883.000.000,00)
8	Hibah Bidang Keagamaan	101.295.500.000,00	94.103.500.000,00	92,90	-	94.103.500.000,00
9	Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	117.757.265.000,00	(117.757.265.000,00)
10	Hibah Bidang Kesatuan Bangsa & Politik	85.685.555.000,00	84.817.555.000,00	98,99	116.100.000.000,00	(31.282.445.000,00)
11	Hibah Bidang Lingkungan Hidup	14.967.930.000,00	14.862.655.950,00	99,30	17.450.037.071,00	(2.587.381.121,00)
12	Hibah Bidang Energi	8.676.289.000,00	8.606.154.498,00	99,19	8.411.300.081,00	194.854.417,00
13	Hibah Bidang Pertanian	11.866.475.000,00	11.356.542.906,00	95,70	47.609.303.607,00	(36.252.760.701,00)
14	Hibah Bidang Perindustrian & Perdagangan	865.000.000,00	865.000.000,00	100,00	4.161.229.750,00	(3.296.229.750,00)
15	Hibah Bidang Peternakan	51.564.276.000,00	48.268.167.500,00	93,61	33.362.956.000,00	14.905.211.500,00
16	Hibah Bidang Kelautan & Perikanan	4.000.000.000,00	3.919.125.922,00	97,98	5.823.274.936,00	(1.904.149.014,00)
	Jumlah	**711.243.635.000,00**	**690.622.077.108,00**	**97,10**	**841.422.489.846,00**	**(150.800.412.738,00)**

5.1.2.1.4.3 Belanja Hibah Dana BOS Rp1.036.753.274.946,00

Belanja Hibah Dana BOS dianggarkan sebesar Rp1.040.145.530.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.036.753.274.946,00 atau 99,67%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.010.071.727.914,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.681.547.032,00 atau 2,64% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.040.145.530.000,00	1.036.753.274.946,00	99,67	1.010.071.727.914,00	26.681.547.032,00
	Jumlah	**1.040.145.530.000,00**	**1.036.753.274.946,00**	**99,67**	**1.010.071.727.914,00**	**26.681.547.032,00**

5.1.2.1.4.4 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp35.328.599.000,00

Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp35.328.599.000,00 dengan realisasi sebesar Rp35.328.599.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.949.808.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.378.791.000,00 atau 4,06% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.328.599.000,00	35.328.599.000,00	100,00	33.949.808.000,00	1.378.791.000,00
	Jumlah	**35.328.599.000,00**	**35.328.599.000,00**	**100,00**	**33.949.808.000,00**	**1.378.791.000,00**

Adapun rincian belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	11.436.936.000,00	11.436.936.000,00	100,00	11.885.144.000,00	(448.208.000,00)
2	Partai Kebangkitan Bangsa	5.629.037.000,00	5.629.037.000,00	100,00	5.407.092.000,00	221.945.000,00
3	Partai Gerakan Indonesia Raya	3.892.255.000,00	3.892.255.000,00	100,00	3.245.496.000,00	646.759.000,00
4	Partai Keadilan Sejahtera	2.729.993.000,00	2.729.993.000,00	100,00	2.473.920.000,00	256.073.000,00
5	Partai Golongan Karya	3.775.870.000,00	3.775.870.000,00	100,00	3.410.108.000,00	365.762.000,00
6	Partai Demokrat	2.045.608.000,00	2.045.608.000,00	100,00	1.908.502.000,00	137.106.000,00
7	Partai Amanat Nasional	1.713.433.000,00	1.713.433.000,00	100,00	1.729.332.000,00	(15.899.000,00)
8	Partai Persatuan Pembangunan	2.153.618.000,00	2.153.618.000,00	100,00	2.216.392.000,00	(62.774.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
9	Partai Solidaritas Indonesia	318.709.000,00	318.709.000,00	100,00	-	318.709.000,00
10	Partai Nasional Demokrat	1.633.140.000,00	1.633.140.000,00	100,00	1.673.822.000,00	(40.682.000,00)
	Jumlah	**35.328.599.000,00**	**35.328.599.000,00**	**100,00**	**33.949.808.000,00**	**1.378.791.000,00**

5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial Rp45.008.996.459,00

Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp45.443.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp45.008.996.459,00 atau 99,04%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp118.686.467.885,00 mengalami penurunan sebesar Rp73.677.471.426,00 atau 62,08% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	44.866.000.000,00	44.433.400.750,00	99,04	116.686.467.885,00	(72.253.067.135,00)
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	577.244.000,00	575.595.709,00	99,71	2.000.000.000,00	(1.424.404.291,00)
	Jumlah	**45.443.244.000,00**	**45.008.996.459,00**	**99,04**	**118.686.467.885,00**	**(73.677.471.426,00)**

Belanja Bantuan Sosial **tidak terealisasi** dikarenakan penerima bantuan sosial yang telah diusulkan setelah diverifikasi lapangan batal menerima bantuan dikarenakan meninggal, pindah domisili dan telah menerima bantuan yang sejenis.

5.1.2.1.5.1 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu Rp44.433.400.750,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dianggarkan sebesar Rp44.866.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp44.433.400.750,00 atau 99,04% apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp116.686.467.885,00 mengalami penurunan sebesar Rp72.253.067.135,00 atau 61,92% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.776.000.000,00	14.430.000.000,00	97,66	14.950.000.000,00	(520.000.000,00)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.750.000.000,00	28.750.000.000,00	100,00	42.606.000.000,00	(13.856.000.000,00)
3	Dinas Sosial	-	-	-	45.423.420.000,00	(45.423.420.000,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.340.000.000,00	1.253.400.750,00	93,54	2.644.445.500,00	(1.391.044.750,00)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	11.062.602.385,00	(11.062.602.385,00)
	Jumlah	**44.866.000.000,00**	**44.433.400.750,00**	**99,04**	**116.686.467.885,00**	**(72.253.067.135,00)**

5.1.2.1.5.2 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp575.595.709,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat dianggarkan sebesar Rp577.244.000,00 dengan realisasi sebesar Rp575.595.709,00 atau 99,71%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp1.424.404.291,00 atau 71,22% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Sosial	-	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)
2	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	577.244.000,00	575.595.709,00	99,71	-	575.595.709,00
	Jumlah	**577.244.000,00**	**575.595.709,00**	**99,71**	**2.000.000.000,00**	**(1.424.404.291,00)**

5.1.2.2 BELANJA MODAL Rp1.733.084.096.994,00

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp1.777.270.678.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.733.084.096.994,00 atau 97,51%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.794.862.778.298,00 mengalami penurunan sebesar Rp61.778.681.304,00 atau 3,44% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	12.647.482.000,00	12.221.207.440,00	96,63	67.791.905.622,00	(55.570.698.182,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	881.937.468.000,00	855.982.713.753,00	97,06	751.571.586.676,00	104.411.127.077,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	421.122.075.000,00	411.044.257.004,00	97,61	526.682.150.860,00	(115.637.893.856,00)
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	374.283.044.000,00	366.478.924.044,00	97,91	351.052.937.280,00	15.425.986.764,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	86.295.810.000,00	86.434.858.953,00	100,16	97.389.078.450,00	(10.954.219.497,00)
6	Belanja Modal Aset lainnya	984.799.000,00	922.135.800,00	93,64	375.119.410,00	547.016.390,00
	Jumlah	**1.777.270.678.000,00**	**1.733.084.096.994,00**	**97,51**	**1.794.862.778.298,00**	**(61.778.681.304,00)**

Belanja Modal **tidak mencapai target** antara lain dikarenakan waktu pengadaan paket pekerjaan tidak mencukupi, efisiensi dan sisa lelang pengadaan pekerjaan.

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah Rp12.221.207.440,00

Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp12.647.482.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.221.207.440,00 atau 96,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp67.791.905.622,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.570.698.182,00 atau 81,97% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	11.732.482.000,00	11.352.237.652,00	96,76	41.587.932.560,00	(30.235.694.908,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	915.000.000,00	868.969.788,00	94,97	26.203.973.062,00	(25.335.003.274,00)
	Jumlah	**12.647.482.000,00**	**12.221.207.440,00**	**96,63**	**67.791.905.622,00**	**(55.570.698.182,00)**

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp855.982.713.753,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp881.937.468.000,00 dengan realisasi sebesar Rp855.982.713.753,00 atau 97,06%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp751.571.586.676,00 mengalami kenaikan sebesar Rp104.411.127.077,00 atau 13,89% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar	4.979.683.000,00	4.967.732.000,00	99,76	12.550.530.707,00	(7.582.798.707,00)
2	Belanja Modal Alat Angkutan	12.555.357.000,00	12.383.533.084,00	98,63	42.517.342.581,00	(30.133.809.497,00)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.497.625.000,00	3.442.982.230,00	98,44	1.981.793.295,00	1.461.188.935,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	14.127.185.000,00	13.457.024.775,00	95,26	7.217.782.414,00	6.239.242.361,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	237.601.995.000,00	236.597.198.336,00	99,58	36.885.742.109,00	199.711.456.227,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.354.944.000,00	6.187.189.000,00	97,36	9.735.614.252,00	(3.548.425.252,00)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	85.105.245.000,00	81.391.770.385,00	95,64	137.180.688.838,00	(55.788.918.453,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	169.951.997.000,00	168.516.471.727,00	99,16	34.802.391.359,00	133.714.080.368,00
9	Belanja Modal Alat Persenjataan	-	-	-	-	-
10	Belanja Modal Komputer	17.298.411.000,00	16.972.995.167,00	98,12	40.891.053.796,00	(23.918.058.629,00)
11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	314.575.000,00	294.910.500,00	93,75	177.510.000,00	117.400.500,00
12	Belanja Modal Alat Pengeboran	-	-	-	490.000,00	(490.000,00)
13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	84.300.000,00	83.614.000,00	99,19	283.702.258,00	(200.088.258,00)
14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	-	-	-	63.400.000,00	(63.400.000,00)
15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	101.375.000,00	101.325.000,00	99,95	44.400.000,00	56.925.000,00
16	Belanja Modal Alat Peraga	70.213.985.000,00	70.161.057.989,00	99,92	4.481.405.000,00	65.679.652.989,00
17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	10.000.000,00
18	Belanja Modal Rambu-rambu	925.222.000,00	916.794.400,00	99,09	6.285.930.570,00	(5.369.136.170,00)
19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	-	-	-	121.950.000,00	(121.950.000,00)
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	154.659.369.000,00	155.553.654.501,00	100,58	148.240.497.358,00	7.313.157.143,00
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	104.156.200.000,00	84.944.460.659,00	81,55	268.109.362.139,00	(183.164.901.480,00)
	Jumlah	**881.937.468.000,00**	**855.982.713.753,00**	**97,06**	**751.571.586.676,00**	**104.411.127.077,00**

5.1.2.2.2.1 Belanja Modal Alat Besar **Rp4.967.732.000,00**

Belanja Modal Alat Besar dianggarkan sebesar Rp4.979.683.000,00 dengan realisasi sebesar Rp4.967.732.000,00 atau 99,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp12.550.530.707,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.582.798.707,00 atau 60,42% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	215.700.000,00	215.640.000,00	99,97	108.866.000,00	106.774.000,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	7.471.407,00	(7.471.407,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	350.000.000,00	350.000.000,00	100,00	5.132.961.600,00	(4.782.961.600,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	155.100.000,00	155.100.000,00	100,00	5.994.670.000,00	(5.839.570.000,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	374.000.000,00	(374.000.000,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.500.000,00	15.030.000,00	96,97	-	15.030.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	200.000.000,00	200.000.000,00	100,00	-	200.000.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	5.100.000,00	(5.100.000,00)
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	468.454.000,00	465.054.000,00	99,27	11.926.700,00	453.127.300,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	188.400.000,00	(188.400.000,00)
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	560.150.000,00	(560.150.000,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.643.000,00	7.643.000,00	100,00	102.485.000,00	(94.842.000,00)
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.469.286.000,00	3.464.500.000,00	99,86	34.500.000,00	3.430.000.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	60.000.000,00	57.765.000,00	96,28	-	57.765.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	38.000.000,00	37.000.000,00	97,37	30.000.000,00	7.000.000,00
	Jumlah	**4.979.683.000,00**	**4.967.732.000,00**	**99,76**	**12.550.530.707,00**	**(7.582.798.707,00)**

5.1.2.2.2.2 Belanja Modal Alat Angkutan Rp12.383.533.084,00

Belanja Modal Alat Angkutan dianggarkan sebesar Rp12.555.357.000,00 dengan realisasi sebesar Rp12.383.533.084,00 atau 98,63%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp42.517.342.581,00 mengalami penurunan sebesar Rp30.133.809.497,00 atau 70,87% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	4.115.000,00	(4.115.000,00)
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	6.784.074.000,00	(6.784.074.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	555.121.000,00	555.121.000,00	100,00	1.137.500.000,00	(582.379.000,00)
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	461.500.000,00	(461.500.000,00)
5	Dinas Sosial	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-	3.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.691.000,00	305.361.000,00	99,89	-	305.361.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	535.000.000,00	(535.000.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	929.124.000,00	862.189.084,00	92,80	31.949.500,00	830.239.584,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	564.830.000,00	(564.830.000,00)
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	1.129.000.000,00	(1.129.000.000,00)
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	461.500.000,00	(461.500.000,00)
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	35.000.000,00	(35.000.000,00)
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	270.000.000,00	247.500.000,00	91,67	535.000.000,00	(287.500.000,00)
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	692.800.000,00	691.541.000,00	99,82	99.900.000,00	591.641.000,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	300.000.000,00	(300.000.000,00)
16	Sekretariat Daerah	5.310.000.000,00	5.255.800.000,00	98,98	10.469.893.000,00	(5.214.093.000,00)
17	Sekretariat DPRD	-	-	-	3.067.500.000,00	(3.067.500.000,00)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	2.859.500.000,00	(2.859.500.000,00)
19	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.040.000.000,00	3.040.000.000,00	100,00	4.049.300.000,00	(1.009.300.000,00)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	2.249.500.000,00	(2.249.500.000,00)
21	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	500.000.000,00	(500.000.000,00)
22	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	580.000.000,00	553.400.000,00	95,41	633.000.000,00	(79.600.000,00)
23	Badan Penghubung	-	-	-	6.609.281.081,00	(6.609.281.081,00)
24	Inspektorat	869.121.000,00	869.121.000,00	100,00	-	869.121.000,00
	Jumlah	**12.555.357.000,00**	**12.383.533.084,00**	**98,63**	**42.517.342.581,00**	**(30.133.809.497,00)**

5.1.2.2.2.3 Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur Rp3.442.982.230,00

Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur dianggarkan sebesar Rp3.497.625.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.442.982.230,00 atau 98,44%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.981.793.295,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.461.188.935,00 atau 73,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.000.000,00	-	-	757.744.000,00	(757.744.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	85.406.000,00	(85.406.000,00)
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	190.000.000,00	(190.000.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	-	-	262.680.000,00	(262.680.000,00)
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	29.845.275,00	(29.845.275,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.403.340.000,00	3.388.963.000,00	99,58	316.383.620,00	3.072.579.380,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.600.000,00	16.600.000,00	100,00	79.344.000,00	(62.744.000,00)
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	105.850.400,00	(105.850.400,00)
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	6.100.000,00	(6.100.000,00)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	27.685.000,00	27.419.230,00	99,04	43.330.000,00	(15.910.770,00)
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	97.710.000,00	(97.710.000,00)
13	Sekretariat Daerah	-	-	-	3.400.000,00	(3.400.000,00)
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	4.000.000,00	(4.000.000,00)
	Jumlah	**3.497.625.000,00**	**3.442.982.230,00**	**98,44**	**1.981.793.295,00**	**1.461.188.935,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Bengkel dan Ukur mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya digunakan untuk pembelian alat-alat yang mendukung peningkatan pendidikan vokasi

5.1.2.2.2.4 Belanja Modal Alat Pertanian Rp13.457.024.775,00

Belanja Modal Alat Pertanian dianggarkan sebesar Rp14.127.185.000,00 dengan realisasi sebesar Rp13.457.024.775,00 atau 95,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.217.782.414,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.239.242.361,00 atau 86,44% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	243.063.000,00	196.828.500,00	80,98	35.888.000,00	160.940.500,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	42.000.000,00	(42.000.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	110.300.000,00	110.249.183,00	99,95	43.600.000,00	66.649.183,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	100.058.000,00	94.658.000,00	94,60	2.413.050.414,00	(2.318.392.414,00)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.673.764.000,00	13.055.289.092,00	95,48	4.683.244.000,00	8.372.045.092,00
	Jumlah	**14.127.185.000,00**	**13.457.024.775,00**	**95,26**	**7.217.782.414,00**	**6.239.242.361,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Pertanian mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya digunakan untuk pembelian alat-alat pertanian yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

5.1.2.2.2.5 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp236.597.198.336,00

Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga dianggarkan sebesar Rp237.601.995.000,00 dengan realisasi sebesar Rp236.597.198.336,00 atau 99,58%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp36.885.742.109,00 mengalami kenaikan sebesar Rp199.711.456.227,00 atau 541,43% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	209.422.698.000,00	209.081.495.500,00	99,84	13.245.366.660,00	195.836.128.840,00
2	Dinas Kesehatan	135.800.000,00	131.380.000,00	96,75	2.304.701.074,00	(2.173.321.074,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.258.010.000,00	2.098.570.000,00	92,94	4.820.227.900,00	(2.721.657.900,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	848.371.000,00	832.190.000,00	98,09	284.180.000,00	548.010.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	359.936.000,00	359.240.800,00	99,81	108.839.000,00	250.401.800,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	42.000.000,00	42.000.000,00	100,00	64.000.000,00	(22.000.000,00)
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	100,00	-	40.000.000,00
8	Dinas Sosial	280.050.000,00	280.050.000,00	100,00	116.810.000,00	163.240.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.616.473.000,00	1.559.653.384,00	96,48	311.881.745,00	1.247.771.639,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	519.170.000,00	519.170.000,00	100,00	92.365.000,00	426.805.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	495.150.000,00	486.103.000,00	98,17	94.400.000,00	391.703.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	334.569.000,00	327.174.000,00	97,79	903.690.500,00	(576.516.500,00)
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	59.480.000,00	59.480.000,00	100,00	-	59.480.000,00
14	Dinas Perhubungan	610.000.000,00	571.175.000,00	93,64	407.150.000,00	164.025.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	19.680.000,00	16.800.000,00	85,37	214.100.000,00	(197.300.000,00)
16	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	235.500.000,00	224.965.000,00	95,53	1.223.790.793,00	(998.825.793,00)
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	56.000.000,00	54.400.000,00	97,14	71.190.400,00	(16.790.400,00)
18	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	2.000.000.000,00	1.999.582.000,00	99,98	-	1.999.582.000,00
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	424.100.000,00	420.820.000,00	99,23	179.562.000,00	241.258.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	886.452.000,00	884.479.850,00	99,78	255.568.900,00	628.910.950,00
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	196.331.000,00	195.922.000,00	99,79	468.826.335,00	(272.904.335,00)
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	184.090.000,00	183.694.000,00	99,78	-	183.694.000,00
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	641.448.000,00	637.398.500,00	99,37	628.630.520,00	8.767.980,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.118.974.000,00	1.110.591.000,00	99,25	772.699.450,00	337.891.550,00
25	Sekretariat Daerah	3.947.503.000,00	3.813.679.802,00	96,61	2.953.234.432,00	860.445.370,00
26	Sekretariat DPRD	1.901.935.000,00	1.749.502.000,00	91,99	2.016.480.000,00	(266.978.000,00)
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	209.000.000,00	207.700.000,00	99,38	381.692.400,00	(173.992.400,00)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.357.400.000,00	7.318.032.500,00	99,46	4.005.910.000,00	3.312.122.500,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	445.800.000,00	443.720.000,00	99,53	380.790.000,00	62.930.000,00
30	Badan Kepegawaian Daerah	79.925.000,00	79.925.000,00	100,00	269.800.000,00	(189.875.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	106.600.000,00	105.400.000,00	98,87	204.050.000,00	(98.650.000,00)
32	Badan Riset dan Inovasi Daerah	50.000.000,00	49.970.000,00	99,94	-	49.970.000,00
33	Badan Penghubung	515.300.000,00	512.770.000,00	99,51	34.900.000,00	477.870.000,00
34	Inspektorat	131.500.000,00	130.205.000,00	99,02	31.000.000,00	99.205.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.750.000,00	69.960.000,00	96,16	39.905.000,00	30.055.000,00
	Jumlah	**237.601.995.000,00**	**236.597.198.336,00**	**99,58**	**36.885.742.109,00**	**199.711.456.227,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain untuk pengadaan mebeulair pada OPD dan *boarding school* Satuan Pendidikan Negeri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

5.1.2.2.2.6 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Rp6.187.189.000,00

Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar dianggarkan sebesar Rp6.354.944.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.187.189.000,00 atau 97,36%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.735.614.252,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.548.425.252,00 atau 36,45% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	180.250.000,00	176.858.000,00	98,12	911.469.282,00	(734.611.282,00)
2	Dinas Kesehatan	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	233.621.000,00	(232.321.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.817.260.000,00	1.766.467.500,00	97,20	162.280.000,00	1.604.187.500,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	205.280.000,00	193.180.000,00	94,11	-	193.180.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	493.800.000,00	493.800.000,00	100,00	11.850.000,00	481.950.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	66.000.000,00	(66.000.000,00)
7	Dinas Sosial	128.170.000,00	128.170.000,00	100,00	-	128.170.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.000.000,00	62.500.000,00	99,21	-	62.500.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	42.313.000,00	42.300.000,00	99,97	-	42.300.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	74.500.000,00	74.350.000,00	99,80	25.800.000,00	48.550.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	71.000.000,00	71.000.000,00	100,00	355.242.935,00	(284.242.935,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	69.320.000,00	62.710.000,00	90,46	-	62.710.000,00
13	Dinas Perhubungan	-	-	-	104.795.000,00	(104.795.000,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.000.000,00	198.000.000,00	99,00	1.879.524.000,00	(1.681.524.000,00)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	129.000.000,00	115.580.000,00	89,60	399.415.000,00	(283.835.000,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16.000.000,00	15.600.000,00	97,50	46.287.700,00	(30.687.700,00)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	35.000.000,00	34.398.000,00	98,28	4.660.000,00	29.738.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	81.753.300,00	(67.753.300,00)
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	-	245.000.000,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.645.000,00	98.385.000,00	98,74	102.455.875,00	(4.070.875,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	161.227.000,00	157.190.000,00	97,50	44.760.000,00	112.430.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.442.579.000,00	1.387.840.500,00	96,21	3.485.072.010,00	(2.097.231.510,00)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.000.000,00	146.000.000,00	97,33	-	146.000.000,00
24	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	54.273.000,00	(54.273.000,00)
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	1.320.950.000,00	(1.320.950.000,00)
26	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	438.000.000,00	430.215.000,00	98,22	341.155.150,00	89.059.850,00
27	Badan Penghubung	278.300.000,00	272.345.000,00	97,86	27.250.000,00	245.095.000,00
28	Inspektorat	-	-	-	35.000.000,00	(35.000.000,00)
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	42.000.000,00	(42.000.000,00)
	Jumlah	**6.354.944.000,00**	**6.187.189.000,00**	**97,36**	**9.735.614.252,00**	**(3.548.425.252,00)**

5.1.2.2.2.7 Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp81.391.770.385,00

Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan dianggarkan sebesar Rp85.105.245.000,00 dengan realisasi sebesar Rp81.391.770.385,00 atau 95,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp137.180.688.838,00 mengalami penurunan sebesar Rp55.788.918.453,00 atau 40,67% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	9.020.000,00	(9.020.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	40.918.483.538,00	(40.918.483.538,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	19.564.509.000,00	19.015.400.000,00	97,19	59.648.173.799,00	(40.632.773.799,00)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	37.929.061.000,00	35.804.996.000,00	94,40	-	35.804.996.000,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	14.925.000.000,00	14.781.638.700,00	99,04	19.613.313.500,00	(4.831.674.800,00)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.886.215.000,00	1.809.500.000,00	95,93	6.691.723.230,00	(4.882.223.230,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.300.460.000,00	2.150.126.330,00	93,47	8.613.332.121,00	(6.463.205.791,00)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	7.000.000.000,00	6.381.999.355,00	91,17	1.190.428.250,00	5.191.571.105,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.500.000.000,00	1.448.110.000,00	96,54	482.258.400,00	965.851.600,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	9.960.000,00	(9.960.000,00)
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	3.996.000,00	(3.996.000,00)
	Jumlah	**85.105.245.000,00**	**81.391.770.385,00**	**95,64**	**137.180.688.838,00**	**(55.788.918.453,00)**

5.1.2.2.2.8 Belanja Modal Alat Laboratorium Rp168.516.471.727,00

Belanja Modal Alat Laboratorium dianggarkan sebesar Rp169.951.997.000,00 dengan realisasi sebesar Rp168.516.471.727,00 atau 99,16%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.802.391.359,00 mengalami kenaikan sebesar Rp133.714.080.368,00 atau 384,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	160.500.665.000,00	159.557.667.911,00	99,41	21.236.770.194,00	138.320.897.717,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	7.334.909.745,00	(7.334.909.745,00)
3	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	99.540.000,00	53.000.000,00	53,24	19.980.000,00	33.020.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.058.000.000,00	4.007.358.996,00	98,75	2.258.258.000,00	1.749.100.996,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.113.800.000,00	1.100.503.000,00	98,81	429.479.500,00	671.023.500,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.552.720.000,00	1.281.480.000,00	82,53	-	1.281.480.000,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	215.000.000,00	120.000.000,00	55,81	1.024.255.400,00	(904.255.400,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	162.525.000,00	158.500.000,00	97,52	219.026.500,00	(60.526.500,00)
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.975.000,00	27.975.000,00	100,00	251.829.520,00	(223.854.520,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	57.210.000,00	56.500.000,00	98,76	713.350.000,00	(656.850.000,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.357.015.000,00	1.350.975.570,00	99,55	1.200.377.500,00	150.598.070,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	807.547.000,00	802.511.250,00	99,38	114.155.000,00	688.356.250,00
	Jumlah	**169.951.997.000,00**	**168.516.471.727,00**	**99,16**	**34.802.391.359,00**	**133.714.080.368,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Laboraorium mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain untuk pengadaan Alat Laboratorium pada OPD dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

5.1.2.2.2.9 Belanja Modal Komputer Rp16.972.995.167,00

Belanja Modal Komputer dianggarkan sebesar Rp17.298.411.000,00 dengan realisasi sebesar Rp16.972.995.167,00 atau 98,12%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp40.891.053.796,00 mengalami penurunan sebesar Rp23.918.058.629,00 atau 58,49% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.211.532.000,00	3.135.567.000,00	97,63	8.421.092.865,00	(5.285.525.865,00)
2	Dinas Kesehatan	180.500.000,00	177.869.769,00	98,54	2.495.431.800,00	(2.317.562.031,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	931.650.000,00	914.250.000,00	98,13	900.478.000,00	13.772.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.440.450.000,00	1.425.050.000,00	98,93	908.150.000,00	516.900.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	348.300.000,00	348.300.000,00	100,00	101.800.000,00	246.500.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	197.535.000,00	(182.535.000,00)
7	Dinas Sosial	676.780.000,00	674.380.000,00	99,65	12.500.000,00	661.880.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.411.200.000,00	1.387.250.000,00	98,30	559.120.000,00	828.130.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	188.550.000,00	187.838.000,00	99,62	82.250.000,00	105.588.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan	415.300.000,00	401.520.000,00	96,68	196.790.900,00	204.729.100,00
11	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	732.823.000,00	705.615.000,00	96,29	1.070.971.900,00	(365.356.900,00)
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	73.320.000,00	(73.320.000,00)
13	Dinas Perhubungan	81.000.000,00	80.740.000,00	99,68	300.000.000,00	(219.260.000,00)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	523.445.000,00	515.820.600,00	98,54	15.764.428.725,00	(15.248.608.125,00)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	322.000.000,00	313.325.000,00	97,31	632.775.000,00	(319.450.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	452.250.000,00	(452.250.000,00)
17	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	553.555.000,00	551.450.000,00	99,62	-	551.450.000,00
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	263.075.000,00	258.040.000,00	98,09	150.411.000,00	107.629.000,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	554.513.000,00	517.272.998,00	93,28	207.430.000,00	309.842.998,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.500.000,00	22.775.000,00	96,91	503.232.800,00	(480.457.800,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	229.890.000,00	229.890.000,00	100,00	184.800.000,00	45.090.000,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	675.460.000,00	672.209.000,00	99,52	690.817.450,00	(18.608.450,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	890.800.000,00	871.435.000,00	97,83	239.535.000,00	631.900.000,00
24	Sekretariat Daerah	1.245.418.000,00	1.194.400.800,00	95,90	1.922.337.000,00	(727.936.200,00)
25	Sekretariat DPRD	662.000.000,00	658.400.000,00	99,46	20.400.000,00	638.000.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	349.700.000,00	99,91	2.661.170.000,00	(2.311.470.000,00)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	216.000.000,00	212.680.000,00	98,46	642.594.356,00	(429.914.356,00)
28	Badan Kepegawaian Daerah	74.000.000,00	74.000.000,00	100,00	312.772.000,00	(238.772.000,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	-	-	830.200.000,00	(830.200.000,00)
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	251.920.000,00	251.920.000,00	100,00	-	251.920.000,00
31	Badan Penghubung	51.500.000,00	50.950.000,00	98,93	90.100.000,00	(39.150.000,00)
32	Inspektorat	-	-	-	161.900.000,00	(161.900.000,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	778.250.000,00	775.347.000,00	99,63	104.460.000,00	670.887.000,00
	Jumlah	**17.298.411.000,00**	**16.972.995.167,00**	**98,12**	**40.891.053.796,00**	**(23.918.058.629,00)**

5.1.2.2.2.10 Belanja Modal Alat Eksplorasi — Rp294.910.500,00

Belanja Modal Alat Eksplorasi dianggarkan sebesar Rp314.575.000,00 dengan realisasi sebesar Rp294.910.500,00 atau 93,75%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp177.510.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp117.400.500,00 atau 66,14% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	208.200.000,00	188.665.000,00	90,62	7.000.000,00	181.665.000,00
2	Dinas Sosial	21.775.000,00	21.775.000,00	100,00	-	21.775.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	11.200.000,00	(11.200.000,00)
4	Dinas Perhubungan	-	-	-	12.000.000,00	(12.000.000,00)
5	Dinas Kelautan dan Perikanan	48.000.000,00	48.000.000,00	100,00	-	48.000.000,00
6	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	30.200.000,00	(30.200.000,00)
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	11.000.000,00	(11.000.000,00)
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	36.600.000,00	36.470.500,00	99,65	51.550.000,00	(15.079.500,00)
9	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	54.560.000,00	(54.560.000,00)
	Jumlah	**314.575.000,00**	**294.910.500,00**	**93,75**	**177.510.000,00**	**117.400.500,00**

5.1.2.2.2.11 Belanja Modal Alat Pengeboran **Rp0,00**

Belanja Modal Alat Pengeboran terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp490.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp490.000,00 atau 100,0% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	490.000,00	(490.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**490.000,00**	**(490.000,00)**

5.1.2.2.2.12 Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian **Rp83.614.000,00**

Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian dianggarkan sebesar Rp84.300.000,00 dengan realisasi sebesar Rp83.614.000,00 atau 99,19%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp283.702.258,00 mengalami penurunan sebesar Rp200.088.258,00 atau 70,53% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	84.300.000,00	83.614.000,00	99,19	93.000.000,00	(9.386.000,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	1.500.000,00	(1.500.000,00)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	174.202.258,00	(174.202.258,00)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	-	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	Jumlah	**84.300.000,00**	**83.614.000,00**	**99,19**	**283.702.258,00**	**(200.088.258,00)**

5.1.2.2.2.13 Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi **Rp0,00**

Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp63.400.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp63.400.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	63.400.000,00	(63.400.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**63.400.000,00**	**(63.400.000,00)**

5.1.2.2.2.14 Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja **Rp101.325.000,00**

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja dianggarkan sebesar Rp101.375.000,00 dengan realisasi sebesar Rp101.325.000,00 atau 99,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp44.400.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp56.925.000,00 atau 128,21% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.250.000,00	2.250.000,00	100,00	37.000.000,00	(34.750.000,00)
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	2.400.000,00	(2.400.000,00)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	5.000.000,00	(5.000.000,00)
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	99.125.000,00	99.075.000,00	99,95	-	99.075.000,00
	Jumlah	**101.375.000,00**	**101.325.000,00**	**99,95**	**44.400.000,00**	**56.925.000,00**

5.1.2.2.2.15 Belanja Modal Alat Peraga Rp70.161.057.989,00

Belanja Modal Alat Peraga dianggarkan sebesar Rp70.213.985.000,00 dengan realisasi sebesar Rp70.161.057.989,00 atau 99,92%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.481.405.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp65.679.652.989,00 atau 1.465,60% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	68.563.985.000,00	68.539.185.000,00	99,96	4.477.915.000,00	64.061.270.000,00
2	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.650.000.000,00	1.621.872.989,00	98,30	-	1.621.872.989,00
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	3.490.000,00	(3.490.000,00)
	Jumlah	**70.213.985.000,00**	**70.161.057.989,00**	**99,92**	**4.481.405.000,00**	**65.679.652.989,00**

Realisasi Belanja Modal Alat Peraga mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya dikarenakan antara lain untuk pengadaan alat-alat pendukung praktek siswa SMA/SMK pada Satuan Pendidikan Negeri yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus

5.1.2.2.2.16 Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Rp10.000.000,00

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi dianggarkan sebesar Rp10.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	-	10.000.000,00
	Jumlah	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**100,00**	**-**	**10.000.000,00**

5.1.2.2.2.17 Belanja Modal Rambu-Rambu Rp916.794.400,00

Belanja Modal Rambu-Rambu dianggarkan sebesar Rp925.222.000,00 dengan realisasi sebesar Rp916.794.400,00 atau 99,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.285.930.570,00 mengalami penurunan sebesar Rp5.369.136.170,00 atau 85,42% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Perhubungan	925.222.000,00	916.794.400,00	99,09	6.285.930.570,00	(5.369.136.170,00)
	Jumlah	**925.222.000,00**	**916.794.400,00**	**99,09**	**6.285.930.570,00**	**(5.369.136.170,00)**

5.1.2.2.2.18 Belanja Modal Peralatan Olahraga Rp0,00

Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp121.950.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp121.950.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	99.000.000,00	(99.000.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	7.950.000,00	(7.950.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**121.950.000,00**	**(121.950.000,00)**

5.1.2.2.2.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Rp155.553.654.501,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS dianggarkan sebesar Rp154.659.369.000,00 dengan realisasi sebesar Rp155.553.654.501,00 atau 100,58%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp148.240.497.358,00 mengalami kenaikan sebesar Rp7.313.157.143,00 atau 4,93% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	154.659.369.000,00	155.553.654.501,00	100,58	148.240.497.358,00	7.313.157.143,00
	Jumlah	**154.659.369.000,00**	**155.553.654.501,00**	**100,58**	**148.240.497.358,00**	**7.313.157.143,00**

5.1.2.2.2.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD Rp84.944.460.659,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD dianggarkan sebesar Rp104.156.200.000,00 dengan realisasi sebesar Rp84.944.460.659,00 atau 81,55%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp268.109.362.139,00 mengalami penurunan sebesar Rp183.164.901.480,00 atau 68,32% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	14.173.200.000,00	13.122.681.203,00	92,59	134.576.577.566,00	(121.453.896.363,00)
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	60.000.000.000,00	54.364.215.851,00	90,61	108.317.702.905,00	(53.953.487.054,00)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	21.560.000.000,00	11.776.180.504,00	54,62	14.765.725.757,00	(2.989.545.253,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.070.000.000,00	1.017.563.125,00	95,10	935.417.914,00	82.145.211,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.745.000.000,00	1.317.545.730,00	75,50	4.018.431.715,00	(2.700.885.985,00)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	3.625.000.000,00	1.777.197.489,00	49,03	1.335.383.297,00	441.814.192,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.983.000.000,00	1.569.076.757,00	79,13	4.160.122.985,00	(2.591.046.228,00)
	Jumlah	**104.156.200.000,00**	**84.944.460.659,00**	**81,55**	**268.109.362.139,00**	**(183.164.901.480,00)**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp411.044.257.004,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan dianggarkan sebesar Rp421.122.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp411.044.257.004,00 atau 97,61%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp526.682.150.860,00 mengalami penurunan sebesar Rp115.637.893.856,00 atau 21,96% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	304.297.160.000,00	297.916.636.832,00	97,90	316.329.885.401,00	(18.413.248.569,00)
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	793.450.000,00	775.701.990,00	97,76	438.927.300,00	336.774.690,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	116.031.465.000,00	112.351.918.182,00	96,83	209.913.338.159,00	(97.561.419.977,00)
	Jumlah	**421.122.075.000,00**	**411.044.257.004,00**	**97,61**	**526.682.150.860,00**	**(115.637.893.856,00)**

5.1.2.2.3.1 Belanja Modal Bangunan Gedung Rp297.916.636.832,00

Belanja Modal Bangunan Gedung dianggarkan sebesar Rp304.297.160.000,00 dengan realisasi sebesar Rp297.916.636.832,00 atau 97,90%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp316.329.885.401,00 mengalami penurunan sebesar Rp18.413.248.569,00 atau 5,82% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.117.251.000,00	111.066.591.195,00	99,06	57.673.423.115,00	53.393.168.080,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Kesehatan	17.005.000.000,00	16.715.123.485,00	98,30	34.302.007.933,00	(17.586.884.448,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	51.889.785.000,00	51.190.393.785,00	98,65	-	51.190.393.785,00
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	20.330.000.000,00	20.012.844.110,00	98,44	-	20.012.844.110,00
5	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	18.905.729.000,00	17.413.539.210,00	92,11	13.319.657.780,00	4.093.881.430,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	890.900.000,00	890.431.401,00	99,95	-	890.431.401,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	12.288.806.000,00	12.218.133.265,00	99,42	110.702.347.876,00	(98.484.214.611,00)
8	Satuan Polisi Pamong Praja	1.015.958.000,00	1.003.021.327,00	98,73	-	1.003.021.327,00
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	200.000.000,00	193.300.000,00	96,65	-	193.300.000,00
10	Dinas Sosial	170.000.000,00	168.511.819,00	99,12	-	168.511.819,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.400.000.000,00	1.107.531.310,00	79,11	149.285.598,00	958.245.712,00
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	361.811.000,00	361.590.750,00	99,94	24.691.950,00	336.898.800,00
13	Dinas Ketahanan Pangan	1.686.000.000,00	1.604.635.500,00	95,17	-	1.604.635.500,00
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	633.903.000,00	632.668.219,00	99,81	1.996.468.745,00	(1.363.800.526,00)
15	Dinas Perhubungan	6.322.493.000,00	6.272.377.280,00	99,21	14.011.977.015,00	(7.739.599.735,00)
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	98.500.000,00	(98.500.000,00)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	669.976.710,00	(669.976.710,00)
18	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.349.800.000,00	3.196.744.849,00	95,43	29.629.472.865,00	(26.432.728.016,00)
19	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.668.971.000,00	5.667.437.999,00	99,97	-	5.667.437.999,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	27.261.623.000,00	27.013.060.318,00	99,09	32.642.932.268,00	(5.629.871.950,00)
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	469.875.000,00	465.516.216,00	99,07	3.300.733.304,00	(2.835.217.088,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	14.116.163.000,00	12.720.593.827,00	90,11	13.310.975.118,00	(590.381.291,00)
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	388.886.000,00	387.301.304,00	99,59	476.699.803,00	(89.398.499,00)
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.569.206.000,00	6.540.539.696,00	99,56	1.002.886.431,00	5.537.653.265,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	350.000.000,00	346.247.511,00	98,93	-	346.247.511,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	905.000.000,00	728.502.456,00	80,50	1.135.418.376,00	(406.915.920,00)
27	Inspektorat	-	-	-	1.882.430.514,00	(1.882.430.514,00)
	Jumlah	**304.297.160.000,00**	**297.916.636.832,00**	**97,90**	**316.329.885.401,00**	**(18.413.248.569,00)**

5.1.2.2.3.2 Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti **Rp775.701.990,00**

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dianggarkan sebesar Rp793.450.000,00 dengan realisasi sebesar Rp775.701.990,00 atau 97,76%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp438.927.300,00 mengalami kenaikan sebesar Rp336.774.690,00 atau 76,73% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.000.000,00	14.985.000,00	99,90	-	14.985.000,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	253.475.000,00	252.499.590,00	99,62	-	252.499.590,00
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.000.000,00	49.890.000,00	99,78	-	49.890.000,00
4	Sekretariat DPRD	60.000.000,00	44.536.000,00	74,23	-	44.536.000,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	414.975.000,00	413.791.400,00	99,71	438.927.300,00	(25.135.900,00)
	Jumlah	**793.450.000,00**	**775.701.990,00**	**97,76**	**438.927.300,00**	**336.774.690,00**

5.1.2.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD Rp112.351.918.182,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD dianggarkan sebesar Rp116.031.465.000,00 dengan realisasi sebesar Rp112.351.918.182,00 atau 96,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp209.913.338.159,00 mengalami penurunan sebesar Rp97.561.419.977,00 atau 46,48% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	102.500.000.000,00	100.749.919.695,00	98,29	127.494.546.695,00	(26.744.627.000,00)
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	63.961.403.337,00	(63.961.403.337,00)
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.915.000.000,00	1.589.199.400,00	82,99	1.930.343.000,00	(341.143.600,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-	-	-	-
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	-	-	-	-
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.000.000.000,00	3.604.969.950,00	72,10	4.599.215.315,00	(994.245.365,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	6.616.465.000,00	6.407.829.137,00	96,85	11.927.829.812,00	(5.520.000.675,00)
	Jumlah	**116.031.465.000,00**	**112.351.918.182,00**	**96,83**	**209.913.338.159,00**	**(97.561.419.977,00)**

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp366.478.924.044,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp374.283.044.000,00 dengan realisasi sebesar Rp366.478.924.044,00 atau 97,91%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp351.052.937.280,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.425.986.764,00 atau 4,39% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	266.506.499.000,00	261.861.477.144,00	98,26	218.478.719.208,00	43.382.757.936,00
2	Bangunan Air	32.688.808.000,00	31.664.291.043,00	96,87	52.113.249.179,00	(20.448.958.136,00)
3	Instalasi	8.207.513.000,00	7.804.224.246,00	95,09	2.488.235.348,00	5.315.988.898,00
4	Jaringan	62.279.424.000,00	61.344.606.781,00	98,50	71.405.259.045,00	(10.060.652.264,00)
5	Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLUD	4.600.800.000,00	3.804.324.830,00	82,69	6.567.474.500,00	(2.763.149.670,00)
	Jumlah	**374.283.044.000,00**	**366.478.924.044,00**	**97,91**	**351.052.937.280,00**	**15.425.986.764,00**

5.1.2.2.4.1 Belanja Modal Jalan dan Jembatan Rp261.861.477.144,00

Belanja Modal Jalan dan Jembatan dianggarkan sebesar Rp266.506.499.000,00 dengan realisasi sebesar Rp261.861.477.144,00 atau 98,26%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp218.478.719.208,00 mengalami kenaikan sebesar Rp43.382.757.936,00 atau 19,86% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	259.764.525.000,00	255.964.041.090,00	98,54	217.910.560.253,00	38.053.480.837,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	135.000.000,00	134.504.000,00	99,63	193.517.000,00	(59.013.000,00)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.447.361.000,00	3.411.312.287,00	98,95	374.641.955,00	3.036.670.332,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.159.613.000,00	2.351.619.767,00	74,43	-	2.351.619.767,00
	Jumlah	**266.506.499.000,00**	**261.861.477.144,00**	**98,26**	**218.478.719.208,00**	**43.382.757.936,00**

5.1.2.2.4.2 Belanja Modal Bangunan Air **Rp31.664.291.043,00**

Belanja Modal Bangunan Air dianggarkan sebesar Rp32.688.808.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.664.291.043,00 atau 96,87%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp52.113.249.179,00 mengalami penurunan sebesar Rp20.448.958.136,00 atau 39,24% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	29.326.015.000,00	28.664.604.720,00	97,74	50.330.038.229,00	(21.665.433.509,00)
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	124.564.100,00	(74.564.100,00)
3	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.312.793.000,00	2.949.686.323,00	89,04	706.489.850,00	2.243.196.473,00
4	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	952.157.000,00	(952.157.000,00)
	Jumlah	**32.688.808.000,00**	**31.664.291.043,00**	**96,87**	**52.113.249.179,00**	**(20.448.958.136,00)**

5.1.2.2.4.3 Belanja Modal Instalasi **Rp7.804.224.246,00**

Belanja Modal Instalasi dianggarkan sebesar Rp8.207.513.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.804.224.246,00 atau 95,09%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.488.235.348,00 mengalami kenaikan sebesar Rp5.315.988.898,00 atau 213,64% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	45.000.000,00	44.721.750,00	99,38	-	44.721.750,00
2	Dinas Kesehatan	-	-	#DIV/0!	83.327.700,00	(83.327.700,00)
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	350.000.000,00	335.522.000,00	95,86	-	335.522.000,00
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.407.100.000,00	3.407.100.000,00	100,00	-	3.407.100.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.660.853.000,00	1.660.791.670,00	100,00	-	1.660.791.670,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	74.300.000,00	68.613.172,00	92,35	19.749.000,00	48.864.172,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.000.000,00	13.800.000,00	98,57	-	13.800.000,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	30.000.000,00	29.999.000,00	100,00	-	29.999.000,00
10	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.772.890.000,00	1.392.322.974,00	78,53	-	1.392.322.974,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	828.370.000,00	826.353.680,00	99,76	2.335.158.648,00	(1.508.804.968,00)
	Jumlah	**8.207.513.000,00**	**7.804.224.246,00**	**95,09**	**2.488.235.348,00**	**5.315.988.898,00**

5.1.2.2.4.4 Belanja Modal Jaringan **Rp61.344.606.781,00**

Belanja Modal Jaringan dianggarkan sebesar Rp62.279.424.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.344.606.781,00 atau 98,50%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp71.405.259.045,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.060.652.264,00 atau 14,09% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	106.680.000,00	106.574.781,00	99,90	-	106.574.781,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	62.172.744.000,00	61.238.032.000,00	98,50	71.256.583.045,00	(10.018.551.045,00)
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	29.900.000,00	(29.900.000,00)
4	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	118.776.000,00	(118.776.000,00)
	Jumlah	**62.279.424.000,00**	**61.344.606.781,00**	**98,50**	**71.405.259.045,00**	**(10.060.652.264,00)**

5.1.2.2.4.5 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD Rp3.804.324.830,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD dianggarkan sebesar Rp4.600.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.804.324.830,00 atau 82,69%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.567.474.500,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.763.149.670,00 atau 42,07% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	3.826.800.000,00	3.152.858.480,00	82,39	6.087.474.500,00	(2.934.616.020,00)
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	-	-	-	-
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	100.000.000,00	67.128.000,00	67,13	480.000.000,00	(412.872.000,00)
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	200.000.000,00	185.000.000,00	92,50	-	185.000.000,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	25.000.000,00	21.090.000,00	84,36	-	21.090.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-	-	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	449.000.000,00	378.248.350,00	84,24	-	378.248.350,00
	Jumlah	**4.600.800.000,00**	**3.804.324.830,00**	**82,69**	**6.567.474.500,00**	**(2.763.149.670,00)**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp86.434.858.953,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp86.295.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp86.434.858.953,00 atau 100,16%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp97.389.078.450,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.954.219.497,00 atau 11,25% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.001.902.000,00	984.924.745,00	98,31	591.522.443,00	393.402.302,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	86.800.000,00	66.500.000,00	76,61	137.868.350,00	(71.368.350,00)
3	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	-	-	-	71.500.000,00	(71.500.000,00)
4	Belanja Aset Tetap Tak Berwujud	96.900.000,00	96.875.250,00	99,97	1.032.049.450,00	(935.174.200,00)
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	85.080.208.000,00	85.256.873.221,00	100,21	95.522.616.557,00	(10.265.743.336,00)
6	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00	29.685.737,00	98,95	33.521.650,00	(3.835.913,00)
	Jumlah	**86.295.810.000,00**	**86.434.858.953,00**	**100,16**	**97.389.078.450,00**	**(10.954.219.497,00)**

5.1.2.2.5.1 Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp984.924.745,00

Belanja Modal Bahan Perpustakaan dianggarkan sebesar Rp1.001.902.000,00 dengan realisasi sebesar Rp984.924.745,00 atau 98,31%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp591.522.443,00 mengalami kenaikan sebesar Rp393.402.302,00 atau 66,51% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-	-	9.000.000,00	(9.000.000,00)
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	14.979.319,00	(14.979.319,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	25.000.000,00	24.818.000,00	99,27	14.910.800,00	9.907.200,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.449.000,00	1.449.000,00	100,00	1.450.000,00	(1.000,00)
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.000.000,00	1.984.000,00	99,20	3.996.400,00	(2.012.400,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.000.000,00	1.992.000,00	99,60	4.681.419,00	(2.689.419,00)
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-	-	26.400.000,00	(26.400.000,00)
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	935.953.000,00	919.336.945,00	98,22	426.593.173,00	492.743.772,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	500.000,00	500.000,00	100,00	-	500.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	54.525.000,00	(54.525.000,00)
11	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	19.946.000,00	99,73	20.000.000,00	(54.000,00)
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.000.000,00	14.898.800,00	99,33	14.986.332,00	(87.532,00)
	Jumlah	**1.001.902.000,00**	**984.924.745,00**	**98,31**	**591.522.443,00**	**393.402.302,00**

5.1.2.2.5.2 Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga — Rp66.500.000,00

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga dianggarkan sebesar Rp86.800.000,00 dengan realisasi sebesar Rp66.500.000,00 atau 76,61%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp137.868.350,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.368.350,00 atau 51,77% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86.800.000,00	66.500.000,00	76,61	122.868.350,00	(56.368.350,00)
2	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	15.000.000,00	(15.000.000,00)
	Jumlah	**86.800.000,00**	**66.500.000,00**	**76,61**	**137.868.350,00**	**(71.368.350,00)**

5.1.2.2.5.3 Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya — Rp0,00

Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp71.500.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp71.500.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	71.500.000,00	(71.500.000,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**71.500.000,00**	**(71.500.000,00)**

5.1.2.2.5.4 Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud Rp96.875.250,00

Belanja Modal Aset Tetap Tak Berwujud dianggarkan sebesar Rp96.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp96.875.250,00 atau 99,97%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.032.049.450,00 mengalami penurunan sebesar Rp935.174.200,00 atau 90,61% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	361.801.000,00	(361.801.000,00)
2	Dinas Sosial	-	-	-	30.000.000,00	(30.000.000,00)
3	Dinas Perhubungan	-	-	-	198.717.750,00	(198.717.750,00)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-	-	49.750.200,00	(49.750.200,00)
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-	-	24.500.000,00	(24.500.000,00)
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	99.900.000,00	(99.900.000,00)
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	-
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-	-	19.750.000,00	(19.750.000,00)
9	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	45.000.000,00	(45.000.000,00)
10	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	187.923.000,00	(187.923.000,00)
11	Inspektorat	96.900.000,00	96.875.250,00	99,97	14.707.500,00	82.167.750,00
	Jumlah	**96.900.000,00**	**96.875.250,00**	**99,97**	**1.032.049.450,00**	**(935.174.200,00)**

5.1.2.2.5.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp85.256.873.221,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS dianggarkan sebesar Rp85.080.208.000,00 dengan realisasi sebesar Rp85.256.873.221,00 atau 100,21%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp95.522.616.557,00 mengalami penurunan sebesar Rp10.265.743.336,00 atau 10,75% dengan rincian sebagai berikut:

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	85.080.208.000,00	85.256.873.221,00	100,21	95.522.616.557,00	(10.265.743.336,00)
	Jumlah	**85.080.208.000,00**	**85.256.873.221,00**	**100,21**	**95.522.616.557,00**	**(10.265.743.336,00)**

5.1.2.2.5.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD Rp29.685.737,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp29.685.737,00 atau 98,95%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp33.521.650,00 mengalami penurunan sebesar Rp3.835.913,00 atau 11,44% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	-	-	-	9.987.090,00	(9.987.090,00)
2	RSUD Dr. Adhyatma MPH	5.000.000,00	4.952.250,00	99,05	-	4.952.250,00
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	25.000.000,00	24.733.487,00	98,93	23.534.560,00	1.198.927,00
	Jumlah	**30.000.000,00**	**29.685.737,00**	**98,95**	**33.521.650,00**	**(3.835.913,00)**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya Rp922.135.800,00

Belanja Modal Aset Lainnya dianggarkan sebesar Rp984.799.000,00 dengan realisasi Rp922.135.800,00 atau 93,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp375.119.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp547.016.390,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	774.799.000,00	772.135.800,00	99,66	375.119.410,00	397.016.390,00
2	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	210.000.000,00	150.000.000,00	71,43	-	150.000.000,00
	Jumlah	**984.799.000,00**	**922.135.800,00**	**93,64**	**375.119.410,00**	**547.016.390,00**

5.1.2.2.6.1 Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud Rp772.135.800,00

Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud dianggarkan sebesar Rp774.799.000,00 dengan realisasi Rp772.135.800,00 atau 99,66%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp375.119.410,00 mengalami kenaikan sebesar Rp397.016.390,00 atau 105,84% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	125.000.000,00	124.970.000,00	99,98	349.609.000,00	(224.639.000,00)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	169.007.000,00	168.553.500,00	99,73	-	168.553.500,00
3	Dinas Sosial	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	-	20.000.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	24.010.410,00	(24.010.410,00)
5	Dinas Perhubungan	51.058.000,00	50.987.850,00	99,86	-	50.987.850,00
6	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.000.000,00	24.431.000,00	97,72	-	24.431.000,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	1.500.000,00	(500.000,00)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	190.000.000,00	188.500.000,00	99,21	-	188.500.000,00
9	Badan Kepegawaian Daerah	143.734.000,00	143.733.450,00	100,00	-	143.733.450,00
10	Badan Riset dan Inovasi Daerah	50.000.000,00	49.960.000,00	99,92	-	49.960.000,00
	Jumlah	**774.799.000,00**	**772.135.800,00**	**99,66**	**375.119.410,00**	**397.016.390,00**

5.1.2.2.6.2 Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp150.000.000,00

Belanja Modal Aset Lainnya BLUD dianggarkan sebesar Rp210.000.000,00 dengan realisasi Rp150.000.000,00 atau 71,43%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	RSUD dr. Rehatta Jepara	210.000.000,00	150.000.000,00	71,43	-	150.000.000,00
	Jumlah	**210.000.000,00**	**150.000.000,00**	**71,43**	**-**	**150.000.000,00**

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga Rp10.225.800.500,00

Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp24.634.873.000,00 dengan realisasi sebesar Rp10.225.800.500,00 atau 41,51%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp740.000.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp9.485.800.500,00 atau 1.281,86% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	24.634.873.000,00	10.225.800.500,00	41,51	740.000.000,00	9.485.800.500,00
	Jumlah	**24.634.873.000,00**	**10.225.800.500,00**	**41,51**	**740.000.000,00**	**9.485.800.500,00**

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 digunakan untuk Korban Bencana Banjir di Kabupaten Grobogan dan Cilacap; tanah longsor dan gerak di Kabupaten Banjarnegara, Rembang, Cilacap, Brebes dan Wonosobo; penanganan jembatan putus akibat bencana di Kabupaten Sragen; Gempa Bumi di Kabupaten Batang; Dukungan PEPARNAS XVII dan korban kebakaran rumah di Kabupaten Grobogan dan Kendal.

5.1.2.4 Belanja Transfer Rp9.359.951.298.345,00

Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp10.212.795.020.000,00 dengan realisasi sebesar Rp9.359.951.298.345,00 atau 91,65%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.116.958.416.721,00 mengalami kenaikan sebesar Rp242.992.881.624,00 atau 2,67% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil	7.131.173.811.000,00	6.334.544.870.221,00	88,83	6.264.046.226.668,00	70.498.643.553,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	3.081.621.209.000,00	3.025.406.428.124,00	98,18	2.852.912.190.053,00	172.494.238.071,00
	Jumlah	**10.212.795.020.000,00**	**9.359.951.298.345,00**	**91,65**	**9.116.958.416.721,00**	**242.992.881.624,00**

Belanja transfer **tidak terealisasi** antara lain dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan dan kabupaten telah menerima bantuan dari pemerintah pusat. .

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Rp6.334.544.870.221,00

Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp7.131.173.811.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.334.544.870.221,00 atau 88,83%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.264.046.226.668,00 mengalami kenaikan sebesar Rp70.498.643.553,00 atau 1,13% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.131.173.811.000,00	6.334.544.870.221,00	88,83	6.264.046.226.668,00	70.498.643.553,00
	Jumlah	**7.131.173.811.000,00**	**6.334.544.870.221,00**	**88,83**	**6.264.046.226.668,00**	**70.498.643.553,00**

Adapun rincian belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota dan desa adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	230.871.066.000,00	205.824.764.480,00	89,15	205.824.311.530,00	452.950,00
2	Kabupaten Kendal	207.961.913.000,00	182.743.499.170,00	87,87	181.009.815.888,00	1.733.683.282,00
3	Kabupaten Demak	230.896.112.000,00	204.204.249.782,00	88,44	198.037.617.770,00	6.166.632.012,00
4	Kabupaten Grobogan	235.505.854.000,00	209.011.181.807,00	88,75	204.093.189.748,00	4.917.992.059,00
5	Kabupaten Pati	263.825.737.000,00	233.915.365.918,00	88,66	228.121.487.277,00	5.793.878.641,00
6	Kabupaten Kudus	197.732.456.000,00	177.332.887.514,00	89,68	175.714.575.710,00	1.618.311.804,00
7	Kabupaten Jepara	225.814.408.000,00	200.149.530.398,00	88,63	193.349.818.150,00	6.799.712.248,00
8	Kabupaten Rembang	141.413.263.000,00	126.552.960.032,00	89,49	121.152.548.393,00	5.400.411.639,00
9	Kabupaten Blora	152.030.236.000,00	136.360.848.209,00	89,69	134.957.155.581,00	1.403.692.628,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
10	Kabupaten Pekalongan	157.682.153.000,00	145.056.178.359,00	91,99	142.280.181.862,00	2.775.996.497,00
11	Kabupaten Batang	158.460.632.000,00	139.810.287.894,00	87,52	139.035.697.158,00	774.590.736,00
12	Kabupaten Pemalang	219.076.794.000,00	191.738.404.378,00	89,08	185.308.688.272,00	6.429.716.106,00
13	Kabupaten Tegal	254.051.152.000,00	226.314.945.686,00	89,08	221.534.261.871,00	4.780.683.815,00
14	Kabupaten Brebes	283.490.362.000,00	247.112.559.819,00	87,17	241.972.327.482,00	5.140.232.337,00
15	Kabupaten Banyumas	303.278.565.000,00	268.279.615.582,00	88,46	259.758.223.214,00	8.521.392.368,00
16	Kabupaten Cilacap	310.398.853.000,00	274.488.276.998,00	88,43	269.418.264.408,00	5.070.012.590,00
17	Kabupaten Purbalingga	156.269.735.000,00	137.555.419.492,00	88,02	133.573.510.869,00	3.981.908.623,00
18	Kabupaten Banjarnegara	159.289.870.000,00	143.349.394.057,00	89,99	140.493.747.715,00	2.855.646.342,00
19	Kabupaten Magelang	223.521.708.000,00	198.413.893.632,00	88,77	197.843.915.918,00	569.977.714,00
20	Kabupaten Temanggung	142.936.869.000,00	125.426.694.912,00	87,75	123.749.375.637,00	1.677.319.275,00
21	Kabupaten Wonosobo	137.647.893.000,00	124.196.881.222,00	90,23	123.940.726.171,00	256.155.051,00
22	Kabupaten Purworejo	139.388.473.000,00	123.330.794.714,00	88,48	124.577.393.119,00	(1.246.598.405,00)
23	Kabupaten Kebumen	204.986.094.000,00	181.816.080.313,00	88,70	174.243.934.191,00	7.572.146.122,00
24	Kabupaten Klaten	253.311.174.000,00	222.910.299.938,00	88,00	222.908.195.166,00	2.104.772,00
25	Kabupaten Boyolali	193.742.024.000,00	177.670.667.066,00	91,70	176.074.643.824,00	1.596.023.242,00
26	Kabupaten Sragen	208.698.879.000,00	191.330.567.896,00	91,68	189.747.812.244,00	1.582.755.652,00
27	Kabupaten Sukoharjo	216.030.377.000,00	194.613.756.219,00	90,09	194.140.900.071,00	472.856.148,00
28	Kabupaten Karanganyar	206.845.781.000,00	186.729.872.109,00	90,27	184.436.831.731,00	2.293.040.378,00
29	Kabupaten Wonogiri	173.945.652.000,00	154.333.901.275,00	88,73	155.121.867.104,00	(787.965.829,00)
30	Kota Semarang	653.628.667.000,00	570.096.274.220,00	87,22	577.657.021.099,00	(7.560.746.879,00)
31	Kota Pekalongan	84.955.913.000,00	74.727.559.186,00	87,96	72.883.759.926,00	1.843.799.260,00
32	Kota Surakarta	193.574.171.000,00	168.446.634.112,00	87,02	171.423.732.811,00	(2.977.098.699,00)
33	Kota Salatiga	76.523.188.000,00	68.637.111.128,00	89,69	69.602.560.141,00	(965.449.013,00)
34	Kota Tegal	78.651.111.000,00	71.660.821.321,00	91,11	71.295.282.617,00	365.538.704,00
35	Kota Magelang	54.736.676.000,00	50.402.691.383,00	92,08	58.762.852.000,00	(8.360.160.617,00)
	Jumlah	**7.131.173.811.000,00**	**6.334.544.870.221,00**	**88,83**	**6.264.046.226.668,00**	**70.498.643.553,00**

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan Rp3.025.406.428.124,00

Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp3.081.621.209.000,00 dengan realisasi sebesar Rp3.025.406.428.124,00 atau 98,18%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.852.912.190.053,00 mengalami kenaikan sebesar Rp172.494.238.071,00 atau 6,05% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.093.321.527.000,00	1.045.686.246.124,00	95,64	653.134.590.053,00	392.551.656.071,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.988.299.682.000,00	1.979.720.182.000,00	99,57	2.199.777.600.000,00	(220.057.418.000,00)
	Jumlah	**3.081.621.209.000,00**	**3.025.406.428.124,00**	**98,18**	**2.852.912.190.053,00**	**172.494.238.071,00**

5.1.2.4.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.045.686.246.124,00

Belanja Bantuan Keuangan Provinsi ke Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp1.093.321.527.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.045.686.246.124,00 atau 95,64%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp653.134.590.053,00 mengalami kenaikan sebesar Rp392.551.656.071,00 atau 60,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	39.642.536.000,00	38.569.432.136,00	97,29	31.956.785.860,00	6.612.646.276,00
2	Kabupaten Kendal	20.903.228.000,00	20.498.405.846,00	98,06	10.940.858.551,00	9.557.547.295,00

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Kabupaten Demak	46.486.752.000,00	46.206.818.600,00	99,40	53.390.621.000,00	(7.183.802.400,00)
4	Kabupaten Grobogan	24.976.832.000,00	24.234.190.000,00	97,03	42.487.767.192,00	(18.253.577.192,00)
5	Kabupaten Pati	30.590.617.000,00	28.670.690.373,00	93,72	11.236.450.229,00	17.434.240.144,00
6	Kabupaten Kudus	15.864.282.000,00	15.539.244.500,00	97,95	12.173.821.000,00	3.365.423.500,00
7	Kabupaten Jepara	45.930.961.000,00	45.392.524.634,00	98,83	9.582.952.000,00	35.809.572.634,00
8	Kabupaten Rembang	44.424.372.000,00	44.248.149.500,00	99,60	10.676.632.000,00	33.571.517.500,00
9	Kabupaten Blora	59.366.146.000,00	57.697.584.762,00	97,19	29.624.480.000,00	28.073.104.762,00
10	Kabupaten Pekalongan	39.100.097.000,00	38.476.758.851,00	98,41	21.751.909.002,00	16.724.849.849,00
11	Kabupaten Batang	6.132.433.000,00	6.096.409.000,00	99,41	11.067.414.500,00	(4.971.005.500,00)
12	Kabupaten Pemalang	19.258.760.000,00	19.042.046.340,00	98,87	9.158.319.783,00	9.883.726.557,00
13	Kabupaten Tegal	25.091.654.000,00	23.182.098.500,00	92,39	10.421.353.100,00	12.760.745.400,00
14	Kabupaten Brebes	56.390.550.000,00	55.449.287.170,00	98,33	16.348.003.046,00	39.101.284.124,00
15	Kabupaten Banyumas	21.975.630.000,00	21.590.289.925,00	98,25	29.442.448.395,00	(7.852.158.470,00)
16	Kabupaten Cilacap	22.341.207.000,00	17.658.621.000,00	79,04	10.692.257.939,00	6.966.363.061,00
17	Kabupaten Purbalingga	7.284.396.000,00	7.112.788.000,00	97,64	13.301.826.000,00	(6.189.038.000,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	53.309.317.000,00	53.085.735.000,00	99,58	10.599.236.349,00	42.486.498.651,00
19	Kabupaten Magelang	38.517.463.000,00	37.894.514.652,00	98,38	13.629.261.000,00	24.265.253.652,00
20	Kabupaten Temanggung	59.967.299.000,00	59.521.364.000,00	99,26	12.674.107.503,00	46.847.256.497,00
21	Kabupaten Wonosobo	68.327.553.000,00	57.545.230.500,00	84,22	22.101.445.223,00	35.443.785.277,00
22	Kabupaten Purworejo	23.294.622.000,00	22.978.010.200,00	98,64	19.898.471.000,00	3.079.539.200,00
23	Kabupaten Kebumen	87.514.800.000,00	86.528.970.500,00	98,87	10.639.281.000,00	75.889.689.500,00
24	Kabupaten Klaten	33.027.332.000,00	31.710.767.500,00	96,01	10.927.428.243,00	20.783.339.257,00
25	Kabupaten Boyolali	6.471.926.000,00	6.370.723.500,00	98,44	21.412.280.930,00	(15.041.557.430,00)
26	Kabupaten Sragen	18.575.866.000,00	18.197.132.500,00	97,96	14.622.189.000,00	3.574.943.500,00
27	Kabupaten Sukoharjo	20.853.620.000,00	17.983.398.000,00	86,24	8.210.140.200,00	9.773.257.800,00
28	Kabupaten Karanganyar	67.393.075.000,00	64.728.188.000,00	96,05	11.561.720.000,00	53.166.468.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	27.686.981.000,00	26.695.463.000,00	96,42	57.810.503.000,00	(31.115.040.000,00)
30	Kota Semarang	17.768.637.000,00	8.966.172.320,00	50,46	31.188.960.908,00	(22.222.788.588,00)
31	Kota Pekalongan	20.938.246.000,00	20.387.693.500,00	97,37	22.461.424.600,00	(2.073.731.100,00)
32	Kota Surakarta	3.497.013.000,00	3.432.607.500,00	98,16	31.461.311.000,00	(28.028.703.500,00)
33	Kota Salatiga	9.946.770.000,00	9.659.516.350,00	97,11	6.494.279.000,00	3.165.237.350,00
34	Kota Tegal	6.820.043.000,00	6.730.666.465,00	98,69	6.595.608.700,00	135.057.765,00
35	Kota Magelang	3.650.511.000,00	3.604.753.500,00	98,75	6.593.042.800,00	(2.988.289.300,00)
	Jumlah	**1.093.321.527.000,00**	**1.045.686.246.124,00**	**95,64**	**653.134.590.053,00**	**392.551.656.071,00**

5.1.2.4.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa — Rp1.979.720.182.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa dianggarkan sebesar Rp1.988.299.682.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.979.720.182.000,00 atau 99,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.199.777.600.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp220.057.418.000,00 atau 10,00% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Kabupaten Semarang	38.100.000.000,00	37.180.000.000,00	97,59	111.785.000.000,00	(74.605.000.000,00)
2	Kabupaten Kendal	73.985.000.000,00	73.720.000.000,00	99,64	81.970.000.000,00	(8.250.000.000,00)
3	Kabupaten Demak	55.158.750.000,00	55.058.750.000,00	99,82	45.028.000.000,00	10.030.750.000,00
4	Kabupaten Grobogan	140.331.378.000,00	140.331.378.000,00	100,00	149.675.000.000,00	(9.343.622.000,00)
5	Kabupaten Pati	180.489.330.000,00	180.349.330.000,00	99,92	189.900.000.000,00	(9.550.670.000,00)
6	Kabupaten Kudus	15.980.000.000,00	15.980.000.000,00	100,00	28.540.000.000,00	(12.560.000.000,00)
7	Kabupaten Jepara	62.825.000.000,00	62.825.000.000,00	100,00	127.905.000.000,00	(65.080.000.000,00)
8	Kabupaten Rembang	27.327.500.000,00	27.327.500.000,00	100,00	37.580.000.000,00	(10.252.500.000,00)
9	Kabupaten Blora	82.083.000.000,00	82.083.000.000,00	100,00	84.169.000.000,00	(2.086.000.000,00)
10	Kabupaten Pekalongan	41.181.800.000,00	40.882.300.000,00	99,27	39.837.000.000,00	1.045.300.000,00
11	Kabupaten Batang	46.685.000.000,00	46.335.000.000,00	99,25	61.448.000.000,00	(15.113.000.000,00)
12	Kabupaten Pemalang	83.867.250.000,00	83.867.250.000,00	100,00	66.418.000.000,00	17.449.250.000,00
13	Kabupaten Tegal	51.105.000.000,00	51.105.000.000,00	100,00	57.000.000.000,00	(5.895.000.000,00)
14	Kabupaten Brebes	106.357.500.000,00	106.057.500.000,00	99,72	111.415.000.000,00	(5.357.500.000,00)
15	Kabupaten Banyumas	74.332.500.000,00	74.082.500.000,00	99,66	87.505.000.000,00	(13.422.500.000,00)

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
16	Kabupaten Cilacap	49.042.500.000,00	48.992.500.000,00	99,90	51.590.000.000,00	(2.597.500.000,00)
17	Kabupaten Purbalingga	52.868.750.000,00	52.868.750.000,00	100,00	53.485.000.000,00	(616.250.000,00)
18	Kabupaten Banjarnegara	55.457.000.000,00	55.307.000.000,00	99,73	61.185.000.000,00	(5.878.000.000,00)
19	Kabupaten Magelang	95.985.345.000,00	95.985.345.000,00	100,00	83.904.100.000,00	12.081.245.000,00
20	Kabupaten Temanggung	52.680.000.000,00	52.180.000.000,00	99,05	70.827.500.000,00	(18.647.500.000,00)
21	Kabupaten Wonosobo	94.916.250.000,00	94.566.250.000,00	99,63	83.800.000.000,00	10.766.250.000,00
22	Kabupaten Purworejo	36.035.751.000,00	35.935.751.000,00	99,72	49.931.000.000,00	(13.995.249.000,00)
23	Kabupaten Kebumen	47.402.500.000,00	47.327.500.000,00	99,84	48.330.000.000,00	(1.002.500.000,00)
24	Kabupaten Klaten	105.990.000.000,00	104.925.000.000,00	99,00	79.145.000.000,00	25.780.000.000,00
25	Kabupaten Boyolali	20.855.000.000,00	20.855.000.000,00	100,00	63.840.000.000,00	(42.985.000.000,00)
26	Kabupaten Sragen	51.738.750.000,00	51.103.750.000,00	98,77	64.330.000.000,00	(13.226.250.000,00)
27	Kabupaten Sukoharjo	69.970.000.000,00	69.680.000.000,00	99,59	54.695.000.000,00	14.985.000.000,00
28	Kabupaten Karanganyar	129.665.578.000,00	127.715.578.000,00	98,50	105.090.000.000,00	22.625.578.000,00
29	Kabupaten Wonogiri	45.883.250.000,00	45.093.250.000,00	98,28	49.450.000.000,00	(4.356.750.000,00)
	Jumlah	**1.988.299.682.000,00**	**1.979.720.182.000,00**	**99,57**	**2.199.777.600.000,00**	**(220.057.418.000,00)**

5.1.3 PEMBIAYAAN DAERAH Rp1.385.420.547.664,00

Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp1.336.055.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.385.420.547.664,00 atau 103,69%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.330.794.071.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp54.626.476.593,00 atau 4,10% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	1.406.055.820.000,00	1.406.120.547.664,00	100,00	1.330.794.071.071,00	75.326.476.593,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	-	20.700.000.000,00
	Jumlah	**1.336.055.820.000,00**	**1.385.420.547.664,00**	**103,69**	**1.330.794.071.071,00**	**54.626.476.593,00**

5.1.3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN Rp1.406.120.547.664,00

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp1.406.055.820.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.406.120.547.664,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.330.794.071.071,00 mengalami kenaikan sebesar Rp75.326.476.593,00 atau 5,66% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	900.186.420.000,00	900.186.419.964,00	100,00	1.236.470.622.932,00	(336.284.202.968,00)
2	Pencairan Dana Cadangan	505.869.400.000,00	505.869.400.000,00	100,00	94.130.600.000,00	411.738.800.000,00
3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	64.727.700,00	-	192.848.139,00	(128.120.439,00)
	Jumlah	**1.406.055.820.000,00**	**1.406.120.547.664,00**	**100,00**	**1.330.794.071.071,00**	**75.326.476.593,00**

5.1.3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Rp900.186.419.964,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya ditargetkan sebesar Rp900.186.420.000,00 dengan realisasi sebesar Rp900.186.419.964,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.236.470.622.932,00 mengalami penurunan sebesar Rp336.284.202.968,00 atau 27,20% dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	-	-	-	119.259.154.000,00	(119.259.154.000,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	59.042.755.000,00	59.042.755.000,00	100,00	46.900.876.000,00	12.141.879.000,00
3	Penghematan Belanja	230.977.518.000,00	230.977.517.964,00	100,00	267.601.076.932,00	(36.623.558.968,00)
4	Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	610.166.147.000,00	610.166.147.000,00	100,00	802.709.516.000,00	(192.543.369.000,00)
	Jumlah	**900.186.420.000,00**	**900.186.419.964,00**	**100,00**	**1.236.470.622.932,00**	**(336.284.202.968,00)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp900.123.938.112,00 dibandingkan dengan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp900.186.419.964,00 terdapat selisih sebesar Rp62.481.852,00. Selisih ini merupakan koreksi Sisa Dana BOS dan BOP Tahun sebelumnya.

5.1.3.1.2 Pencairan Dana Cadangan Rp505.869.400.000,00

Pencairan Dana Cadangan ditargetkan sebesar Rp505.869.400.000,00 dengan realisasi sebesar Rp505.869.400.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp94.130.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp411.738.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	505.869.400.000,00	505.869.400.000,00	100,00	94.130.600.000,00	411.738.800.000,00
	Jumlah	**505.869.400.000,00**	**505.869.400.000,00**	**100,00**	**94.130.600.000,00**	**411.738.800.000,00**

Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah Jawa Tengah Tahun 2024

5.1.3.1.3 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Rp64.727.700,00

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah terealisasi sebesar Rp64.727.700,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp192.848.139,00 mengalami penurunan sebesar Rp128.120.439,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD	-	-	-	-	-
2	Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat	-	64.727.700,00	-	192.848.139,00	(128.120.439,00)
	Jumlah	**-**	**64.727.700,00**	**-**	**192.848.139,00**	**(128.120.439,00)**

Adapun rincian penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	-	6.950.000,00	-	23.366.667,00	(16.416.667,00)
2	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir UKM dan IKM (Biro Perkenomian)	-	-	-	-	-

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
3	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir untuk Peralatan/Bahan Baku bagi IKM (Disperindag)	-	57.277.700,00	-	135.352.472,00	(78.074.772,00)
4	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan & Keswan)	-	500.000,00	-	34.129.000,00	(33.629.000,00)
5	Penerimaan Kembali Piutang Dana Bergulir Gerakan Pembangunan Mandiri Pangan (Dinas Ketahanan Pangan)	-	-	-	-	-
	Jumlah	**-**	**64.727.700,00**	**-**	**192.848.139,00**	**(128.120.439,00)**

5.1.3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN **Rp20.700.000.000,00**

Pengeluaran Pembiayaan ditargetkan sebesar Rp70.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.700.000.000,00 atau 29,57%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	-	20.700.000.000,00
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**70.000.000.000,00**	**20.700.000.000,00**	**29,57**	**-**	**20.700.000.000,00**

5.1.3.2.1 Penyertaan Modal Daerah **Rp20.700.000.000,00**

Penyertaan Modal Daerah ditargetkan sebesar Rp70.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.700.000.000,00, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2024 (Rp)	%	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	-	-	-	-	-
2	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	70.000.000.000,00	20.700.000.000,00	29,57	-	20.700.000.000,00
	Jumlah	**70.000.000.000,00**	**20.700.000.000,00**	**29,57**	**-**	**20.700.000.000,00**

5.1.4 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Realisasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp577.013.676.280,00, SiLPA tersebut dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pelampauan Penerimaan PAD	(943.125.711.496,00)	(910.443.770.994,00)
2	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	90.952.110.795,00	59.042.755.424,00
3	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	750.474.120,00	(1.010.732.755,00)
4	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	2.245.812,00	194.468.071,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	Penghematan Belanja	1.379.134.557.049,00	1.682.403.700.218,00
6	Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan	-	-
7	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	49.300.000.000,00	70.000.000.000,00
8	Sisa Belanja Lainnya	-	-
	Jumlah	**577.013.676.280,00**	**900.186.419.964,00**

Penjelasan SiLPA Tahun Anggaran 2024 dimaksud termasuk di dalamnya :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD	-	3.172.782,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	141.221.000,00	348.056.200,00
4	Kas di Bendahara BLUD	435.442.781.537,00	610.166.143.275,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	10.735.547.335,00	13.868.081.504,00
6	Setara Kas (Deposito RKUD)	-	-
	Jumlah	**577.013.676.280,00**	**900.186.419.964,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.172.782,00
	Jumlah	**-**	**3.172.782,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SKPD

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan kebudayaan	4.093.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	3.846.000,00
3	Dinas Perhubungan	106.366.000,00	307.695.800,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.983.000,00	18.159.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	12.135.900,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.778.500,00	6.219.500,00
	Jumlah	**141.221.000,00**	**348.056.200,00**

Kas di Bendahara BLUD

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi	84.505.649.118,00	252.593.728.567,00
2	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	265.055.669.054,00	210.720.092.366,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	44.778.372.589,00	86.676.251.077,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.457.564.612,00	3.803.981.394,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	20.517.112.138,00	24.680.486.482,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.154.728.701,00	20.698.440.520,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	7.973.685.325,00	10.993.162.869,00
	Jumlah	**435.442.781.537,00**	**610.166.143.275,00**

Kas di Bendahara Sekolah

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bantuan Operasional Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.241.878.486,00	5.903.585.397,00
2	Bantuan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.493.668.849,00	7.964.496.107,00
	Jumlah	**10.735.547.335,00**	**13.868.081.504,00**

- SiLPA Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp577.013.676.280,00 terdapat SiLPA Terikat dari :

a. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

	Jenis DAK Non Fisik	Saldo Akhir 2023	Saldo Akhir 2024
1	Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM	3.239.000,00	336.004.882,00
2	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
3	Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	65.765.900,00	48.217.350,00
4	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM		176.200.252,00
5	Dana Fasilitasi Penanaman Modal	16.226.700,00	7.251.749,00
6	Bantuan Operasional Sekolah	5.903.585.397,00	3.218.476.872,00
7	Bantuan Operasional Kesehatan	3.989.215.258,00	7.645.489.733,00
8	Bantuan Operasional Kesehatan Tambahan	-	-
9	Tunjangan Profesi Guru	26.120.174.861,00	1.072.217.400,00
10	Tambahan Penghasilan Guru	544.544.999,00	566.370.999,00
11	Tunjangan Khusus Guru	610.588.000,00	610.588.000,00
12	Bantuan Operasional Penyelengaraan Museum & Taman Budaya	62.538.888,00	55.280.956,00
13	Dana Pelayanan Pariwisata	-	-
	Total DAK Non Fisik	**37.315.879.003,00**	**13.736.098.193,00**

b. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

1	Sisa DBH CT s.d TA 2023	73.141.188.575,00
2	Transfer DBH CT TA 2024 (Reguler)	290.674.121.000,00
3	Kurang Bayar tahun sebelumnya yang dibayarkan di Tahun 2024	4.074.157.000,00
4	Ketersediaan DBH CT di Kasda TA 2024 (4=1+2+3)	367.889.466.575,00
5	Realisasi penggunaan DBH CT TA 2024	353.145.682.156,00
6	**Sisa DBH CT s.d TA 2024 (6=4-5)**	**14.743.784.419,00**

c. Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, disalurkan sebesar Rp187.324.934.000,00 terealisasi sebesar Rp186.867.834.000 atau 99,76% sisa sebesar Rp457.100.000,00

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal **Rp900.186.419.964,00**

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2024 sebesar Rp900.186.419.964,00 merupakan saldo Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023. Saldo Anggaran Lebih Awal terdiri dari:

No	Uraian	2024	2023
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah	275.800.966.203,00	412.202.942.305,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.172.782,00	-
3	Kas di Bendahara Penerimaan	348.056.200,00	177.410.000,00
4	Kas di BLUD	610.166.143.275,00	802.709.511.890,00
5	Kas di Bendahara Sekolah	13.868.081.504,00	21.379.138.340,00
	Jumlah	**900.186.419.964,00**	**1.236.469.002.535,00**

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan **Rp900.186.419.964,00**

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan sebesar Rp900.186.419.964,00 merupakan penggunaan atas bagian dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023.

5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan **Rp577.013.676.280,00**

Penerimaan Saldo Anggaran Lebih Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp577.013.676.280,00 terdiri dari:

No	Uraian	2024	2023
1	Pendapatan Asli daerah	17.650.936.913.504,00	17.012.509.421.006,00
2	Pendapatan Transfer	8.701.438.866.795,00	8.278.928.086.424,00
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	26.343.846.120,00	78.296.049.245,00
	Jumlah	**26.378.719.626.419,00**	**25.369.733.556.675,00**
1	Belanja Operasi	16.083.865.301.964,00	14.887.780.012.763,00
2	Belanja Modal	1.733.084.096.994,00	1.794.862.778.298,00
3	Belanja Tidak Terduga	10.225.800.500,00	740.000.000,00
4	Belanja Transfer	9.359.951.298.345,00	9.116.958.416.721,00
	Jumlah	**27.187.126.497.803,00**	**25.800.341.207.782,00**
1	Penerimaan Pembiayaan	1.406.120.547.664,00	1.330.794.071.071,00

No	Uraian	2024	2023
2	Pengeluaran Pembiayaan	20.700.000.000,00	-
	Jumlah	**1.385.420.547.664,00**	**1.330.794.071.071,00**
	SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	**577.013.676.280,00**	**900.186.419.964,00**

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (Rp62.481.852,00)

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar (Rp62.481.852,00) merupakan koreksi atas Sisa Dana BOP tahun sebelumnya sebesar (Rp39.080.238,00) yang terdiri dari SMKN 1 Karangawen sebesar Rp500,00, SMKN 1 Brebes sebesar (Rp22,00), SMKN 3 Purwokerto sebesar (Rp20.846.750,00), SMK Negeri Tembarak (Rp18.232.500,00), SMAN 3 Magelang (Rp400,00), SMAN 5 Magelang (Rp866,00), SMKN 1 Magelang (Rp200,00); dan Sisa Dana BOS tahun sebelumnya sebesar (Rp23.401.614,00) yang terdiri dari SMAN 1 Kaliwungu sebesar Rp36.200,00, SMAN 2 Mranggen sebesar Rp49.336,00, SMK Negeri 1 Wonosobo sebesar Rp16.512.850,00, SMKN 4 Purworejo sebesar (Rp40.000.000,00).

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp576.951.194.428,00

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2024 sebesar Rp576.951.194.428,00 berasal dari:

No	Uraian	2024	2023
1	Realisasi Pendapatan	26.378.719.626.419,00	25.369.733.556.675,00
2	Realisasi Belanja dan Transfer	27.187.126.497.803,00	25.800.341.207.782,00
3	Penerimaan Pembiayaan	1.406.058.065.812,00	1.330.794.071.071,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	20.700.000.000,00	-
	SiLPA	**576.951.194.428,00**	**900.186.419.964,00**

Saldo ini terdiri dari:

No	Uraian	2024	2023
1	Kas di Rekening Kas Umum Daerah		
	- Giro di bank Jateng	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
	Setara Kas BUD		
	- Bank Jateng	-	-
2	Kas di Bendahara Penerimaan (Pendapatan yg Blm disetor ke RKUD)		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.093.500,00	-
	- Dinas Kesehatan	-	3.846.000,00
	- Dinas Perhubungan	106.366.000,00	307.695.800,00
	- Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	-	-
	- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta karya	-	-
	- Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	-	-
	- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.983.000,00	18.159.000,00
	- Dinas Perikanan dan kelautan	-	-
	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	12.135.900,00
	- Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.778.500,00	6.219.500,00

No	Uraian	2024	2023
3	Kas di Bendahara Pengeluaran		
	- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.172.782,00
4	Kas di BLUD		
	Rekening Giro Kas Bendahara BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	84.413.911.050,00	18.294.023.131,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	25.022.145.973,00	95.648.299.831,00
	- RSUD Adhyatma Semarang	44.775.042.139,00	86.676.251.077,00
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo	1.439.571.287,00	776.580.694,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang	20.007.805.816,00	24.164.517.649,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta	11.091.349.565,00	5.673.218.720,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	5.971.752.581,00	6.979.722.192,00
	Setara Kas BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BRI)	-	56.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BTN Syariah)	-	16.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Bank Jateng)	-	120.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (Muamalat)	-	26.000.000.000,00
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta (BSI)	-	16.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BNI)	45.000.000.000,00	15.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Bank Jateng)	100.000.000.000,00	65.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (BRI)	45.000.000.000,00	25.000.000.000,00
	- RSUD Dr Margono Sukardjo (Mandiri)	50.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo (BTN)	500.000.000,00	500.000.000,00
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo (Bank Jateng)	-	3.000.000.000,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta (Bank Jateng)	-	10.000.000.000,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta (BRI)	-	5.000.000.000,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (Bank Jateng)	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten (BSI)	-	-
	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD		
	- RSUD Dr Moewardi Surakarta	91.738.068,00	299.705.436,00
	- RSUD Dr Margono Sukarjo Purwokerto	33.523.081,00	71.792.535,00
	- RSUD Adhyatma Semarang	3.330.450,00	-
	- RSUD Rehatta kelet/Donorojo	17.993.325,00	27.400.700,00
	- RSJD Dr Amino Gondohutomo Semarang	9.306.322,00	15.968.833,00
	- RSJD Arif Zainudin Surakarta	63.379.136,00	25.221.800,00
	- RSJD RM Soedjarwadi Klaten	1.932.744,00	13.440.677,00
5	Kas di Bendahara Sekolah		
	- Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	3.218.476.872,00	5.903.585.397,00
	- Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)	7.454.588.611,00	7.964.496.107,00
	Jumlah	**576.951.194.428,00**	**900.186.419.964,00**

Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp576.951.194.428,00, sedangkan SiLPA pada LRA sebesar Rp577.013.676.280,00 selisih sebesar Rp62.481.852,00 merupakan koreksi atas Kas Sekolah (reff 5.2.4).

5.3 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2024 dan 2023 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.3.1 ASET **Rp40.261.948.714.318,57**

Total Aset sebesar Rp40.261.948.714.318,57 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.934.354.196.277,82 mengalami **penurunan** sebesar (Rp672.405.481.959,30) atau (1,64%). Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Aset Lancar	3.427.967.953.973,52	3.418.108.280.043,60
2	Investasi Jangka Panjang	7.929.016.426.114,62	7.761.580.723.318,41
3	Aset Tetap	26.620.736.197.275,90	26.589.416.803.406,50
4	Dana Cadangan	-	505.869.400.000,00
5	Aset Lainnya	2.146.938.213.796,85	2.659.378.989.509,31
6	Properti Investasi	137.289.923.157,68	-
	Jumlah	**40.261.948.714.318,57**	**40.934.354.196.277,82**

5.3.1.1 ASET LANCAR **Rp3.427.967.953.973,52**

Aset Lancar sebesar Rp3.427.967.953.973,52 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.418.108.280.043,60 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.859.673.929,92 atau 0,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas dan Setara Kas	587.530.474.411,09	907.267.200.000,00
2	Investasi Jangka Pendek	-	-
3	Piutang Pajak Daerah	2.897.664.180.980,00	2.625.886.012.008,00
4	Piutang Retribusi Daerah	111.893.619.660,73	86.035.958,00
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	1.832.728.064,88	31.181.471.848,70
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	53.079.604.000,00	4.254,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
9	Piutang Lainnya	15.157.041.204,00	15.406.623.856,00
10	Penyisihan Piutang	(560.159.696.288,11)	(517.709.600.797,61)
11	Belanja Dibayar Dimuka	5.086.493.552,91	5.799.321.938,48
12	Persediaan	315.883.508.388,02	350.191.210.978,03
	Jumlah	**3.427.967.953.973,52**	**3.418.108.280.043,60**

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas **Rp587.530.474.411,09**

Kas dan Setara Kas sebesar Rp587.530.474.411,09 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp907.267.200.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp319.736.725.588,91) atau (35,24%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di Kas Daerah	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	141.221.000,00	348.056.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	585.782.732,00	3.172.782,00
4	Kas di BLUD	438.815.860.716,09	611.273.442.523,00
5	Kas Dana BOS	3.218.476.872,00	6.078.084.193,00
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	-	-
7	Kas Lainnya	14.075.006.683,00	13.763.478.099,00
8	Setara Kas	-	-
	Jumlah	**587.530.474.411,09**	**907.267.200.000,00**

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah **Rp130.694.126.408,00**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp130.694.126.408,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp275.800.966.203,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp145.106.839.795,00) atau (52,61%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas di BUD No rek 1.034.01504.7	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
	Jumlah	**130.694.126.408,00**	**275.800.966.203,00**

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan **Rp141.221.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp141.221.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp348.056.200,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp206.835.200,00) atau (59,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Bendahara Penerimaan SiLPA	141.221.000,00	348.056.200,00
2	Kas Bendahara Penerimaan Non SiLPA	-	-
	Jumlah	**141.221.000,00**	**348.056.200,00**

5.3.1.1.1.2.1 Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA **Rp141.221.000,00**

Kas di Bendahara Penerimaan SiLPA sebesar Rp141.221.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp348.056.200,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp206.835.200,00) atau (59,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.093.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	3.846.000,00
3	Dinas Perhubungan	106.366.000,00	307.695.800,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.983.000,00	18.159.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	12.135.900,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.778.500,00	6.219.500,00
	Jumlah	**141.221.000,00**	**348.056.200,00**

Saldo Kas Tahun 2024 telah disetor ke rekening kas daerah pada Tahun 2025 dengan rincian :

No.	Uraian	No. STS / Slip Setor	Tgl Penyetoran	Nilai
1	**Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir**			
a.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah I			
	Retribusi Parkir Terminal Bintoro Tanggal 31 Desember 2024, 2000/03, 3000/00, 4000/16	3310941000122800	02 Januari 2025	70.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Penggaron Tanggal 31 Desember 2024, 2.000/12, 3.000/10, 4.000/10, 20.000/1	3310941000122700	02 Januari 2025	114.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Purwodadi Tanggal 31 Desember 2024, 2000/6, 3000/2 4000/109, 20000/1	3310941000122600	02 Januari 2025	474.000,00
b.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah II			
	Retribusi Parkir Terminal Gagak Rimang tanggal 31 Desember 2024, 2000/6, 3000/0, 4000/8, 20000/7	3310942000045800	02 Januari 2025	184.000,00
c.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah III			
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL SUKOHARJO TANGGAL 31 DESEMBER 2024 RD 2 2.000 (7) RD 4 3.000 (8) RD 4 4.000 (60)	3310943000475900	02 Januari 2025	278.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL TEGALGEDE TANGGAL 31 DESEMBER 2024 2000/48, 3000/27, 4000/11	3310943000475700	02 Januari 2025	221.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL TAWANGMANGU TANGGAL 31 DESEMBER 2024 2000/63 3000/40 4000/41 20000/1	3310943000475600	02 Januari 2025	430.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL PRACIMANTORO TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2000/10, 3000/10, 4000/20	3310943000475500	02 Januari 2025	130.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL PILANGSARI TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2000/40, 3000/31, 4000/63, 20000/1	3310943000475400	02 Januari 2025	445.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL BATURETNO TANGGAL 31 DESEMBER 2024 , 2.000(6), 3.000(11), 4.000(20)	3310943000475300	02 Januari 2025	125.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL PURWANTORO TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2000/4, 3000/4, 4000/35	3310943000475200	02 Januari 2025	160.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL JATISRONO TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2000/19, 3000/8, 4000/39	3310943000475100	02 Januari 2025	218.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL KARTASURA TANGGAL 31 DESEMBER 2024, 2000/19, 3000/20, 4000/58,20.000/2	3310943000475000	02 Januari 2025	370.000,00
	RETRIBUSI PARKIR TERMINAL PENGGUNG TANGGAL 31 DESEMBER 2024. 2.000/25, 3.000/28, 4000/34	3310943000475800	02 Januari 2025	270.000,00
d.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah IV			
	Disetor Retribusi Parkir Terminal Drs. Prajitno tgl. 31 Desember 2024, 2.000/13 3.000/61 4.000/35	3310944000109400	02 Januari 2025	349.000,00
	Disetor Retribusi Parkir Terminal Madureso Temanggung tgl. 31 Desember 2024, 2..000/4 3.000/5 4.000/41	3310944000109300	02 Januari 2025	187.000,00
e.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah V			
	Retribusi Parkir Terminal Purbalingga Tanggal 31 Desember 2024, 2000/19, 3000, /91 ,4000/48 Disetorkan Rekening RKUD tanggal 2 Januari 2025	3310945000105100	02 Januari 2025	503.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Banjarnegara Tanggal 31 Desember 2024, 2000/36, 3000, /47 ,4000/30,20.000/1 Disetorkan Rekening RKUD tanggal 2 Januari 2025	3310945000105300	02 Januari 2025	353.000,00
f.	Dinas Perhubungan - BPSPP Wilayah VI			
	Retribusi Parkir Terminal Kajen tanggal 31 Desember 2024, 3000/7, 4000/15, 20000/3	3310946000188400	02 Januari 2025	141.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Bumiayu tanggal 31 Desember 2024, 2000/42, 3000/4, 4000/10, 20000/5	3310946000188300	02 Januari 2025	236.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Banyuputih tanggal 31 Desember 2024, 2000/7, 3000/16, 4000/12, 20000/3	3310946000188200	02 Januari 2025	170.000,00
	Retribusi Parkir Terminal Tanjung tanggal 31 Desember 2024, 2000/6, 3000/6, 4000/12, 20000/3	3310946000188100	02 Januari 2025	138.000,00
2	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**			
a.	Dinas Perhubungan - Balai Transportasi Jawa Tengah			

	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Rute Magelang - Purworejo U.12.740.000 P.340.000 B.2.000 V.0	3310947000264200	02 Januari 2025	13.082.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Semarang (Mangkang) - Kendal U.13.736.000 P.602.000 B.448.000 V.2.000	3310947000264100	02 Januari 2025	14.788.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Rute Solo-Wonogiri U.15.428.000 P.340.000 B.346.000 V.2.000	3310947000263800	02 Januari 2025	16.116.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Barlingmascakeb U.12.864.000 P.330.000 B.948.000 V.0	3310947000263700	02 Januari 2025	14.142.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Semarang - Gubug U.11.908.000 P.172.000 B.1.360.000 V.0	3310947000263600	02 Januari 2025	13.440.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Semarang - Bawen U.20.036.000 P.372.000 B.878.000 V.0	3310947000263500	02 Januari 2025	21.286.000,00
	Penyetoran Pendapatan BRT Trans Jateng Periode Tanggal 31 Desember 2024 Solo - Sragen U.7.512.000 P.106.000 B.328.000 V.0	3310947000263900	02 Januari 2025	7.946.000,00
b.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Cabang Dinas Pendidikan XII			
	Penyetoran kantin sekolah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII	30/CN/BO/025/I/2025	02 Januari 2025	2.493.500,00
c.	Badan Pengelola Pendapatan Daerah - UPPD Kota Semarang II			
	Pengembalian karena temuan pemeriksa	PS-BO/034/I/2025	31 Januari 2025	15.778.500,00
3	**Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga**			
a.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A			
	Penyetoran tiket masuk museum anak	3310275000000100	02 Januari 2025	292.000,00
	Penyetoran tiket masuk museum dewasa	3310275000000200	02 Januari 2025	1.308.000,00
b.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kebun Raya Baturraden			
	Setoran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga BKR Baturraden tanggal 30-31 Desember 2024 berupa Pemakaian Pondok Tamu/ Glamping	3310961000036500	02 Januari 2025	500.000,00
	Setoran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga BKR Baturraden tanggal 30-31 Desember 2024 berupa Tiket Masuk Dewasa Kawasan Wisata	3310961000036700	02 Januari 2025	7.735.000,00
	Setoran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga BKR Baturraden tanggal 30-31 Desember 2024 Tiket Masuk Kendaraan	3310961000036600	02 Januari 2025	487.000,00
c.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Tahura KGPAA Mangkunagoro I Karanganyar			
	Setoran Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga Tahura KGPAA Mangkunagoro I Karanganyar tanggal 23-31 Desember 2024	3310960000005300	02 Januari 2025	6.261.000,00
Jumlah				**141.221.000,00**

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran **Rp 585.782.732,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp585.782.732,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.172.782,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp582.609.950,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Bendahara Pengeluaran SiLPA	-	3.172.782,00
2	Kas Bendahara Pengeluaran Non SiLPA	585.782.732,00	-
	Jumlah	**585.782.732,00**	**3.172.782,00**

5.3.1.1.1.3.1 Kas di Bendahara Pengeluaran SiLPA **Rp0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran SiLPA sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.172.782,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.172.782,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.172.782,00
	Jumlah	**-**	**3.172.782,00**

5.3.1.1.1.3.2 Kas di Bendahara Pengeluaran Non SiLPA **Rp585.782.732,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran Non SiLPA sebesar Rp585.782.732,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp585.782.732,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	583.937.668,00	-
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	18.000,00	
3	Sekretariat Daerah-Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	22.824,00	
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	834.240,00	
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	280.000,00	
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	690.000,00	
		585.782.732,00	**-**

5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD **Rp438.815.860.716,09**

Kas di BLUD sebesar Rp438.815.860.716,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp611.273.442.523,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp172.457.581.806,91) atau (28,21 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Di Rekening BLUD	192.721.578.411,00	238.166.069.217,00
2	Kas Tunai BLUD-SiLPA	366.879,00	39.951.139,00
3	Kas Mesin EDC-SiLPA	57.632.414,00	28.354.470,00
4	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD-SiLPA	163.203.833,00	431.768.449,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Uang Titipan Pasien)-Non SiLPA	3.373.079.179,09	1.107.299.248,00
6	Kas di Bendahara Penerimaan BLUD (Bunga Jamkesmas)-Non SiLPA	-	-
7	Deposito BLUD	242.500.000.000,00	371.500.000.000,00
	Jumlah	**438.815.860.716,09**	**611.273.442.523,00**

Saldo ini merupakan kas di BLUD yang berada di bank dan tunai, merupakan bagian dari SiLPA dengan rincian sebagai berikut :

No.	BLUD	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	101.157,00	91.636.911	87.513.656.038,00	87.605.394.106,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	33.523.081	265.213.070.209,09	265.246.593.290,09
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.000.000,00	2.330.450	44.857.452.094,00	44.860.782.544,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	17.993.325	1.439.571.287,00	1.457.564.612,00
5	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.700.400,00	7.605.922	20.507.805.816,00	20.517.112.138,00

No.	BLUD	EDC	Tunai	Bank	Jumlah
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	54.830.857,00	8.548.279	11.091.349.565,00	11.154.728.701,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	1.932.744	7.971.752.581,00	7.973.685.325,00
Jumlah					**438.815.860.716,09**

5.3.1.1.1.4.1 Kas di Rekening BLUD **Rp192.721.578.411,00**

Kas di Rekening BLUD sebesar Rp192.721.578.411,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp238.166.069.217,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp45.444.490.806,00) atau (19,08%) dengan rincian sebagai berikut :

Berikut bagian dari SiLPA yang akan digunakan untuk operasional RSUD/RSJD dan tidak disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	84.413.911.050,00	18.288.189.996,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	25.022.145.973,00	95.636.417.259,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	20.007.805.816,00	24.159.128.396,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	44.775.042.139,00	86.652.971.827,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.439.571.287,00	776.580.694,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.091.349.565,00	5.673.058.853,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.971.752.581,00	6.979.722.192,00
	Jumlah	**192.721.578.411,00**	**238.166.069.217,00**

5.3.1.1.1.4.2 Kas Tunai BLUD - SiLPA **Rp366.879,00**

Kas Tunai BLUD - SiLPA sebesar Rp366.879,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.951.139,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp39.584.260,00) atau (99,08%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	5.794.900,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	11.882.572,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	22.113.800,00
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	366.879,00	159.867,00
	Jumlah	**366.879,00**	**39.951.139,00**

5.3.1.1.1.4.3 Kas Mesin EDC – SiLPA **Rp57.632.414,00**

Kas Mesin EDC - SiLPA sebesar Rp57.632.414,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.354.470,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp29.277.944,00 atau 103,26 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	101.157,00	38.235,00
2	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.700.400,00	5.389.253,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.000.000,00	1.165.450,00
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	54.830.857,00	21.761.532,00
	Jumlah	**57.632.414,00**	**28.354.470,00**

5.3.1.1.1.4.4 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD – SiLPA **Rp163.203.833,00**

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD - SiLPA sebesar Rp163.203.833,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp431.768.449,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp268.564.616,00) atau (62,20%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	91.636.911,00	299.705.436,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	33.523.081,00	71.792.535,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	7.605.922,00	15.968.833,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	2.330.450,00	-
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	17.993.325,00	27.400.700,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	8.181.400,00	3.460.268,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.932.744,00	13.440.677,00
	Jumlah	**163.203.833,00**	**431.768.449,00**

5.3.1.1.1.4.5 Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA Rp3.373.079.179,09

Kas di Bendahara Penerimaan BLUD Non SiLPA yang merupakan Uang Titipan Pasien sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.373.079.179,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.107.299.248,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.265.779.931,09 atau 204,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	3.099.744.988,00	776.966.280,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	190.924.236,09	236.860.568,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	82.409.955,00	93.472.400,00
	Jumlah	**3.373.079.179,09**	**1.107.299.248,00**

5.3.1.1.1.4.6 Deposito BLUD Rp242.500.000.000,00

Deposito BLUD sebesar Rp242.500.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp371.500.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp129.000.000.000,00) atau (34,72%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	234.000.000.000,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	240.000.000.000,00	115.000.000.000,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	500.000.000,00	500.000.000,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	3.000.000.000,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	15.000.000.000,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Jumlah	**242.500.000.000,00**	**371.500.000.000,00**

No.	SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
1	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	BNI	116181	09 Desember 2024	27.795.699,16	10.000.000.000,00
		BNI	116183	09 Desember 2024	13.897.849,23	5.000.000.000,00
		BNI	116819	18 Desember 2024	17.123.655,77	10.000.000.000,00
		BNI	116820	18 Desember 2024	17.123.655,77	10.000.000.000,00
		BNI	116821	18 Desember 2024	17.123.655,77	10.000.000.000,00
		Bank Jateng	A371619	08 Juli 2024	315.068.493,15	100.000.000.000,00
		BRI	007701008914402	22 November 2023	32.363.013,70	25.000.000.000,00
		BRI	007701008914402	13 Juni 2024	51.780.821,92	20.000.000.000,00
		BSI	AB00516400	26 Juni 2024	13.698.630,14	20.000.000.000,00
		BSI	AB00516469	06 Desember 2024	42.465.753,42	10.000.000.000,00

No.	SKPD	BANK	Nomor Bilyet	Tgl Pembukaan Deposito	Bunga Deposito	Nilai
		BSI	AB00516471	10 Desember 2024	57.534.246,58	20.000.000.000,00
2	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	Bank BTN	0032501400003248	10 April 2015	2.013.698,63	500.000.000,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	Bank Jateng	A384112	12 Agustus 2024	5.479.452,05	2.000.000.000,00
Jumlah					**613.468.625,30**	**242.500.000.000,00**

5.3.1.1.1.5 Kas Dana BOS **Rp3.218.476.872,00**

Kas Dana BOS sebesar Rp3.218.476.872,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.078.084.193,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.859.607.321,00) atau (47,05%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Dana BOS-SiLPA	3.218.476.872,00	5.903.585.397,00
2	Kas Dana BOS (Bunga Bank)-SiLPA	-	-
3	Kas Dana BOS (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	174.498.796,00
4	Kas Dana BOSDA/BOP-SILPA	-	-
5	Kas Dana BOSDA (Bunga Bank)-SiLPA	-	-
6	Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	-
7	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	-	-
8	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	-
	Jumlah	**3.218.476.872,00**	**6.078.084.193,00**

5.3.1.1.1.5.1 Kas Dana BOS-SiLPA **Rp3.218.476.872,00**

Kas Dana BOS-SiLPA sebesar Rp3.218.476.872,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.903.585.397,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.685.108.525,00) atau (45,48 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SMA Negeri	2.116.100.446,00	2.566.129.518,00
2	SMK Negeri	907.098.069,00	3.289.018.302,00
3	SLB Negeri	195.278.357,00	48.437.577,00
	Jumlah	**3.218.476.872,00**	**5.903.585.397,00**

5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya **Rp14.075.006.683,00**

Kas Lainnya sebesar Rp14.075.006.683,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.763.478.099,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp311.528.584,00 datau 2,26% engan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.075.006.683,00	13.763.478.099,00
		14.075.006.683,00	**13.763.478.099,00**

Kas Lainnya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Dana BOSDA/BOP-SiLPA	7.450.545.588,00	7.964.168.880,00
2	Kas Dana BOSDA/BOP (Bunga Bank) – SiLPA	4.043.023,00	327.227,00
3	Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak)-Non SiLPA	-	3.481.467,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
4	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat-Non SiLPA	26.390.000,00	61.420.862,00
5	Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat (Utang Pajak)-Non SiLPA	6.594.028.072,00	5.734.079.663,00
	Jumlah	**14.075.006.683,00**	**13.763.478.099,00**

5.3.1.1.1.6.1 Kas Dana BOSDA/BOP – SiLPA **Rp7.450.545.588,00**

Kas Dana BOSDA/BOP – SiLPA sebesar Rp7.450.545.588,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.964.168.880,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp513.623.292,00) atau (6,45%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SMA Negeri	4.875.587.925,00	3.565.570.925,00
2	SMK Negeri	2.322.968.509,00	4.121.711.553,00
3	SLB Negeri	251.989.154,00	276.886.402,00
	Jumlah	**7.450.545.588,00**	**7.964.168.880,00**

5.3.1.1.1.6.1 Kas Dana BOSDA (Bunga Bank) – SiLPA **Rp4.043.023,00**

Kas Dana BOSDA (Bunga Bank) – SiLPA sebesar Rp4.043.023,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp327.227,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.715.796,00 atau 1.135,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SMA Negeri	3.170.350,00	327.227,00
2	SMK Negeri	872.630,00	-
3	SLB Negeri	43,00	-
	Jumlah	**4.043.023,00**	**327.227,00**

Adapun rincian Kas Dana BOSDA (Bunga Bank) – SiLPA tahun 2024 adalah:

NO	KABUPATEN/KOTA	NAMA SEKOLAH	BUNGA	PAJAK	BIAYA ADM	PEMBUKAAN REK/LAIN-LAIN	KONFIRMASI SETORAN
1	KABUPATEN DEMAK	SMKN 1 DEMAK				430	belum
2	KABUPATEN JEPARA	SMA NEGERI 1 WELAHAN	-	-	-	994	belum
3	KABUPATEN BLORA	SMKN 2 BLORA				900	belum
4	KOTA MAGELANG	SMAN 3 MAGELANG				970.000	belum
5	KOTA MAGELANG	SLBN KOTA MAGELANG				43	belum
6	KABUPATEN MAGELANG	SMAN 2 GRABAG				600	belum
7	KABUPATEN BREBES	SMAN 1 SALEM				53.540	belum
8	KABUPATEN BREBES	SMAN 1 KERSANA				800	belum
9	KABUPATEN BREBES	SMAN 1 JATIBARANG				1.482.182	belum
10	KABUPATEN BREBES	SMKN 1 TONJONG				250	belum
11	KABUPATEN BANYUMAS	SMAN 1 AJIBARANG				200	SUDAH
12	KABUPATEN KEBUMEN	SMAN 1 KARANGANYAR				125	belum
13	KABUPATEN PEKALONGAN	SMA NEGERI 1 KEDUNGWUNI	660.961				SUDAH
14	KABUPATEN PEKALONGAN	SMK NEGERI 1 KEDUNGWUNI	870.750				SUDAH

15	KABUPATEN PEKALONGAN	SMA NEGERI 1 PANINGGARAN				200	belum
16	KABUPATEN TEGAL	SMKN 1 WARUREJA				300	SUDAH
17	KABUPATEN TEGAL	SMAN 1 BOJONG				600	SUDAH
18	KABUPATEN TEGAL	SMAN PAGERBARANG 1				148	SUDAH
	Total		1.531.711	-	-	2.511.312	4.043.023

5.3.1.1.1.6.2 Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak) – Non SiLPA Rp0,00

Kas Dana BOSDA/BOP (Utang Pajak) – Non SiLPA sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.481.467,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.481.467,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	SMA Negeri	-	624.800,00
2	SMK Negeri	-	2.856.667,00
3	SLB Negeri	-	-
	Jumlah	**-**	**3.481.467,00**

5.3.1.1.1.6.3 Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat – Non SiLPA Rp26.390.000,00

Kas Dana Bantuan Pemerintah Pusat – Non SiLPA sebesar Rp26.390.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61.420.862,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp35.030.862,00) atau (57,03%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.390.000,00	61.420.862,00
	Jumlah	**26.390.000,00**	**61.420.862,00**

5.3.1.1.1.6.4 Kas Dana Usaha Mandiri – Non SiLPA Rp6.594.028.072,00

Kas Dana Usaha Mandiri – Non SiLPA sebesar Rp6.594.028.072,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.734.079.663,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp859.948.409,00 atau 15,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.594.028.072,00	5.734.079.663,00
		6.594.028.072,00	**5.734.079.663,00**

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah Rp2.897.664.180.980,00

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp2.897.664.180.980,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.625.886.012.008,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp271.778.168.972,00 atau 10,35% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.897.325.081.950,00	2.625.551.335.300,00
2	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Piutang Pajak Air Permukaan (PAP)	339.099.030,00	334.676.708,00
5	Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**2.897.664.180.980,00**	**2.625.886.012.008,00**

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2024				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	**2.625.886.012.008,00**	**6.340.254.131.805,00**		**6.068.475.962.833,00**		**2.897.664.180.980,00**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	2.625.551.335.300,00	6.339.915.032.775,00		6.068.141.286.125,00		2.897.325.081.950,00
2	Pajak Air Permukaan	334.676.708,00	339.099.030,00		334.676.708,00		339.099.030,00

PENJELASAN MUTASI PIUTANG PKB DIATAS SEBAGAI BERIKUT :

	SALDO AWAL PIUTANG PER 1 JANUARI 2024			**2.625.551.335.300,00**
1	**PENAMBAHAN :**			**6.339.915.032.775,00**
	A. MUTASI TAMBAH (PENETAPAN)		**5.616.144.270.250,00**	
	PENETAPAN OBJEK AKTIF (POTENSI OBJEK TAHUN 2024)		**4.921.859.664.025,00**	
	PENETAPAN ATAS OBJEK JATUH TEMPO 2024	4.285.570.767.025,00		
	PENETAPAN OBJEK PIUTANG BARU TAHUN 2024	636.288.897.000,00		
	ATAS PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**182.324.567.025,00**	
	ATAS MUTASI DARI LUAR PROVINSI		**109.154.651.100,00**	
	ATAS PKB KENDARAAN BARU		**372.129.758.200,00**	
	ATAS OBJEK JATUH TEMPO 2024 DIBAYAR DI 2024		**30.675.629.900,00**	
	B. KOREKSI TAMBAH		**723.770.762.525,00**	
	PENCATATAN KEMBALI PIUTANG YANG SUDAH DIHAPUSBUKU		700.242.047.650,00	
	TAMBAHAN KETETAPAN ATAS SISA PIUTANG		14.921.609.300,00	
	ATAS PENETAPAN TAHUN LALU		4.640.015.500,00	
	REKLASIFIKASI JENIS PKB		3.967.090.075,00	
2	**PENGURANGAN :**			**6.068.141.286.125,00**
	A. MUTASI (PEMBAYARAN)		**5.572.237.945.600,00**	
	PEMBAYARAN PIUTANG TAHUN LALU		**495.077.536.350,00**	
	2019	3.540.646.500		
	2020	13.090.109.000		
	2021	27.478.125.000		
	2022	65.208.148.500		
	2023	385.760.507.350		
	PEMBAYARAN OBJEK JATUH TEMPO 2024		**4.285.570.767.025,00**	
	PEMBAYARAN OBJEK JATUH TEMPO 2025 DIBAYAR DI 2024		**30.675.629.900,00**	
	PEMBAYARAN OBJEK PIUTANG YANG TELAH DIHAPUSBUKUKAN		**182.324.567.025,00**	
	PEMBAYARAN MUTASI DARI LUAR PROVINSI		**109.154.651.100,00**	
	PEMBAYARAN KENDARAAN BARU		**372.129.758.200,00**	
	MUTASI PENGHAPUSAN SK GUB NO. 973.1/40 TAHUN 2024)			
	PIUTANG KEDALUWARSA		**97.305.036.000,00**	
	B. KOREKSI KURANG		**495.903.340.525,00**	
	OBJEK PIUTANG TAK TERTAGIH (SK GUB NO. 973.1/40 TAHUN 2024)		361.636.863.500,00	
	ATAS PENETAPAN TAHUN LALU		77.382.429.950,00	
	ATAS OBJEK GANDA		21.747.883.000,00	
	ATAS CABUT REGISTRASI		13.794.928.500,00	

ATAS HASIL VALIDASI	17.374.145.500,00
REKLASIFIKASI JENIS PKB	3.967.090.075,00
SALDO AKHIR PIUTANG PER 31 DESEMBER 2024	**2.897.325.081.950,00**

Keterangan :

- Penambahan
  - A. Mutasi Tambah
    a. Penetapan Atas Objek Jatuh Tempo Tahun 2024 merupakan penetapan atas objek jatuh tempo tahun 2024
    b. Penetapan Objek Piutang Baru 2024 merupakan penetapan atas objek jatuh tempo Tahun 2024 yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tidak melakukan pembayaran.
    c. Penetapan atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan merupakan Penetapan atas objek diluar pencatatan Piutang awal 2024 (2,625 T).
    d. Penetapan Mutasi Dari Luar Provinsi merupakan Penetapan atas objek mutasi masuk dari luar provinsi.
    e. Penetapan PKB Kendaraan Baru merupakan Penetapan atas objek kendaraan baru.
    f. Penetapan Objek Jatuh Tempo 2025 dibayarkan di Tahun 2024 merupakan Penetapan atas obyek jatuh tempo 2025 yang dibayar di tahun 2024 (30 hari sebelum Jatuh Tempo).
  - B. Koreksi Tambah
    a. Tambahan Ketetapan Atas Sisa Piutang merupakan ketetapan tahun 2024 atas sisa piutang tahun lalu yang sampai dengan 31 Desember 2024 tidak melakukan pembayaran.
    b. Atas Penetapan Tahun Lalu merupakan angka koreksi Piutang PKB yang nilai pembayarannya berbeda dengan saldo tercatat sehingga perlu dilakukan koreksi yang diantaranya disebabkan oleh:
       - Pembayaran piutang PKB terhadap jenis transaksi tertentu seperti transaksi ubah bentuk sehingga terdapat perubahan pada dasar pengenaan PKB berupa Nilai Jual Ubah Bentuk (NJUB) yang mengakibatkan penambahan pada nilai PKB yang dibayar.
       - Pembayaran piutang PKB terhadap jenis transaksi tertentu seperti transaksi ubah fungsi sehingga terdapat perubahan tarif PKB dan pengenaannya, yang mengakibatkan penambahan pada nilai PKB yang dibayar.
    c. Atas Usulan Penghapusan merupakan koreksi penyesuaian usulan penghapusan dengan pembayaran.
    d. Reklasifikasi merupakan reklasifikasi untuk menyesuaikan jenis PKB.
- Pengurangan
  - A. Mutasi (Pembayaran)
    a. Pembayaran atas Piutang Tahun Lalu merupakan pembayaran atas piutang tahun lalu (2,625 T).
    b. Pembayaran Atas Objek Jatuh Tempo Tahun 2024 merupakan pembayaran atas objek jatuh tempo tahun 2024.
    c. Pembayaran Objek Jatuh Tempo 2025 dibayarkan di Tahun 2024 merupakan Pembayaran atas obyek jatuh tempo 2025 yang dibayar di tahun 2024 (30 hari sebelum Jatuh Tempo).
    d. Pembayaran atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan merupakan Pembayaran atas objek diluar pencatatan Piutang awal 2024 (2,625 T).

e. Pembayaran Mutasi Dari Luar Provinsi merupakan Pembayaran atas objek mutasi masuk dari luar provinsi.
f. Pembayaran PKB Kendaraan Baru merupakan Pembayaran atas obyek kendaraan baru.

B. Mutasi penghapusan kedaluarsa merupakan penghapusan atas piutang yang lebih dari lima tahun (kedaluarsa).
C. Koreksi
   a. Penghapusan Tidak Tertagih merupakan penghapusbukuan terhadap objek piutang yang tidak tertagih.
   b. Atas Penetapan Tahun Lalu merupakan angka koreksi Piutang PKB yang nilai pembayarannya berbeda dengan saldo tercatat sehingga perlu dilakukan koreksi yang diantaranya disebabkan oleh:
      - Pemberlakuan program diskon piutang pada tahun 2024 berdasarkan Peraturan Gubernur No 10 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua, Pembebasan Progresif Pajak Kendaraan Bermotor, Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tahun Jalan dan **Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor Tunggakan Tahun Pertama sampai dengan Tahun Kelima** yang menyebabkan pembayaran piutang PKB lebih kecil dari nilai piutang tercatatnya.
   c. Atas Objek Ganda merupakan koreksi kurang atas pencatatan piutang tahun lalu dengan objek ganda.
   d. Atas Cabut Registrasi merupakan koreksi kurang atas penetapan piutang lalu yang sudah dilakukan pencabutan registrasi (mutasi keluar).
   e. Atas Validasi Jatuh Tempo merupakan koreksi kurang atas pencatatan piutang tahun lalu yang belum update jatuh tempo.
   f. Reklasifikasi merupakan reklasifikasi untuk menyesuaikan jenis PKB.

- Saldo Piutang PKB sebesar Rp2.897.325.081.950,00 menurut umur piutang sebagai berikut :

UMUR PIUTANG	PIUTANG (Rp)
2019 (5 s.d 6 Tahun)	-
2020 (4 s.d 5 Tahun)	197.784.379.500
2021 (3 s.d 4 Tahun)	295.320.197.000
2022 (2 s.d 3 Tahun)	410.034.824.150
2023 (1 s.d 2 Tahun)	694.519.049.650
2024 (0 s.d 1 Tahun)	1.299.666.631.650
JUMLAH PIUTANG	**2.897.325.081.950**

- Penyelesaian Piutang PKB Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak diserahkan ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Atas piutang pajak daerah tersebut dilakukan langkah-langkah penagihan secara door to door kepada wajib pajak, bekerja sama dengan BUMDES dan perangkat pemerintah di daerah maupun di organisasi kemasyarakatan untuk memudahkan Pajak Daerah, penambahan titik layanan dan pengembangan aplikasi SAMSAT Digital Mandiri.
- Terhadap piutang yang tidak tertagih dilakukan penghapusbukuan oleh Tim Penghapusan Piutang Pajak Daerah, penghapusbukuan piutang yang tak tertagih yang dilakukan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
  1. Piutang PKB kadaluarsa sebesar Rp97.305.036.000,00
  2. Piutang PKB tidak tertagih sebesar Rp361.636.863.500,00 terdiri atas:

a. Penanggung utang atau subjek pajak sudah tidak menguasai kendaraan bermotor dikarenakan telah pindah tangan termasuk dijual kepada pihak lain yang sulit ditemukan fisik dan alamat pemilik yang baru, berdasarkan hasil validasi sebesar Rp46.937.983.000,00
b. Objek pajak dalam kondisi rusak berat atau musnah dan tidak dapat dipergunakan lagi sebesar Rp22.696.500,00
c. Objek pajak hilang yang dibuktikan dengan surat keterangan oleh instansi berwenang sebesar Rp21.583.000,00
d. Tempat kedudukan Penanggung Utang atau subjek pajak sudah pindah alamat dan sulit ditemukan lagi melalui pernyataan pejabat kelurahan/desa, serta telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar Rp2.809.734.000,00
e. Usia objek pajak lebih dari 15 (lima belas) tahun dan telah menunggak pajak 5 (lima) tahun berturut-turut sebesar Rp311.844.867.000,00

3. Koreksi atas pencatatan piutang sebesar Rp52.916.957.000 terdiri atas:
   a. Objek ganda sebesar Rp21.747.883.000,00
   b. Dicabut registrasi sebesar Rp13.794.928.500,00
   c. Validasi jatuh tempo sebesar Rp17.374.145.500,00

- Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, jumlah piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp2.897.325.081.950,00. Sebagai bagian dari kebijakan akuntansi berbasis prinsip kehati-hatian dalam penyajian piutang, telah dilakukan penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp527.519.938.448,00. Dengan demikian, nilai piutang yang disajikan dalam laporan keuangan adalah *Net Realizable Value* (NRV) sebesar Rp2.369.805.143.502,00.
- Penyajian piutang PKB dalam NRV ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, khususnya dalam Kebijakan Akuntansi Piutang yang tertuang dalam Lampiran III, yang mengatur bahwa piutang daerah harus disajikan dalam nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) setelah memperhitungkan penyisihan piutang tak tertagih.
- Penyisihan piutang tak tertagih dilakukan berdasarkan kualitas atau umur piutang, dengan kategori sebagai berikut:
  a. Lancar (0 – 1 tahun): Penyisihan sebesar 0,5%
  b. Kurang Lancar (1 – 2 tahun): Penyisihan sebesar 10%
  c. Diragukan (2 – 5 tahun): Penyisihan sebesar 50%
  d. Macet (lebih dari 5 tahun): Penyisihan sebesar 100%

5.3.1.1.3 Piutang Retribusi Daerah **Rp111.893.619.660,73**

Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp111.893.619.660,73, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp86.035.958,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.807.583.702,73 atau 129.954,48% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	111.639.377.130,73	51.987.608,00
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	254.242.530,00	34.048.350,00
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-
	Jumlah	**111.893.619.660,73**	**86.035.958,00**

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2024				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Piutang	Koreksi	Pembayaran	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	**28.627.286.416,23**	**1.897.786.792.658,75**	**128.389.704.675,00**	**1.941.371.225.747,25**	**1.538.938.342,00**	**111.893.619.660,73**
1	Dinas Kesehatan	51.987.608,00	69.321.200,00	-	51.987.608,00	-	69.321.200,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	2.006.750,00	29.140.930,00	-	2.006.750,00	-	29.140.930,00
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	193.060.000,00	-	-	-	193.060.000,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	-	-	-	-	32.041.600,00
5	RSUD Dr Moewardi Surakarta	8.333.720.503,00	939.634.405.284,00	128.376.128.805,00	999.197.873.766,00	1.241.461.709,00	75.904.919.117,00
6	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	10.045.184.220,91	750.537.743.342,75	13.575.862,00	743.565.374.074,25	291.241.824,00	16.739.887.527,41
7	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	6.881.460.136,60	164.069.955.546,00	8,00	154.161.114.979,00	6.127.909,00	16.784.172.802,60
8	RSUD dr. Rehatta Jepara	335.543.275,72	16.958.399,00	-	254.654.276,00	-	97.847.398,72
9	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.607.031.612,00	42.965.384.632,00	-	43.036.623.201,00	-	1.535.793.043,00
10	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	980.096.998,00	11.857.847,00	-	645.602.255,00	-	346.352.590,00
11	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	358.213.712,00	258.965.478,00	-	455.988.838,00	106.900,00	161.083.452,00

5.3.1.1.3.1 Piutang Retribusi Jasa Umum **Rp111.639.377.130,73**

Piutang Retribusi Jasa Umum sebesar Rp111.639.377.130,73, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.987.608,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.587.389.522,73 atau 214.642,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	111.639.377.130,73	51.987.608,00
	Jumlah	**111.639.377.130,73**	**51.987.608,00**

Piutang Dinas Kesehatan dengan jaminan pada Balai Tahun 2024 merupakan piutang yang telah diverifikasi oleh penjamin per 31 Desember 2024. Tahun 2025 telah diajukan klaim atas tagihan Tahun 2024 maupun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Nama UPT	Jenis Piutang	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
Balkesmas Wilayah Semarang	Utama Desember 2024	69.912.700,00	09 Januari 2025	26 Januari 2025	31 Januari 2025
	Obat Desember 2024	19.774.449,00	10 Januari 2025	21 Januari 2025	31 Januari 2025
	Susulan Bulan Agustus 2024	8.060.800,00	24 Januari 2025	10 Februari 2025	14 Februari 2025
Balkesmas Wilayah Ambarawa	Obat Desember 2024	65.845.789,00	16 Januari 2025	23 Januari 2025	03 Februari 2025
	Utama Desember 2024	250.204.900,00	16 Januari 2025	24 Januari 2025	03 Februari 2025
	Susulan Bulan November 2024	30.999.900,00	16 Januari 2025	24 Januari 2025	03 Februari 2025
	Susulan Bulan Oktober 2024	3.199.840,00	16 Januari 2025	24 Januari 2025	03 Februari 2025
	Obat Susulan September 2024	3.579.020,00	01 Februari 2025	10 Februari 2025	17 Februari 2025
	Susulan Desember 2	32.082.100,00	07 Februari 2025	20 Januari 2025	26 Februari 2025
	Susulan November 2	6.796.100,00	07 Februari 2025	20 Januari 2025	26 Februari 2025
Balkesmas Wilayah Magelang	Utama Desember 2024	52.987.100,00	08 Januari 2025	13 Januari 2025	22 Januari 2025
	Susulan Bulan November 2024	4.523.200,00	08 Januari 2025	13 Januari 2025	22 Januari 2025
	Obat Desember 2024	17.248.763,00	08 Januari 2025	13 Januari 2025	22 Januari 2025
Balkesmas Wilayah Klaten	Obat Desember 2024	17.762.773,00	08 Januari 2025	10 Januari 2025	22 Januari 2025
	Pending Bulan November 2024	2.177.600,00	08 Januari 2025	23 Januari 2025	30 Januari 2025

Nama UPT	Jenis Piutang	Nominal	Tgl Pengajuan Klaim	Tgl Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	Utama Desember 2024	21.207.700,00	08 Januari 2025	23 Januari 2025	30 Januari 2025
Balkesmas Wilayah Pati	Susulan Bulan September 2024	17.474.200,00	22 November 2024	06 Januari 2025	13 Januari 2025
	Obat Bulan Desember 2024	39.717.612,00	17 Januari 2025	22 Januari 2025	31 Januari 2025
	Utama Desember 2024	100.858.000,00	10 Januari 2025	23 Januari 2025	31 Januari 2025
	Susulan Bulan Oktober 2024	6.228.700,00	24 Januari 2025	07 Februari 2025	14 Februari 2025
BKIM Prov. Jateng	Utama Desember 2024	390.544.500,00	07 Januari 2025	24 Januari 2025	31 Januari 2025
	Pending Bulan Agustus, September, Oktober, November 2024	491.882.700,00	20 Januari 2025	07 Februari 2025	13 Februari 2025
Balabkes dan PAK	Utama Bulan Desember 2024	510.000,00	16 Desember 2024	24 Januari 2025	07 Februari 2025
	Utama Bulan Desember 2024	408.000,00	31 Desember 2024	23 Januari 2025	07 Februari 2025
	Total	**1.653.986.446,00**			

5.3.1.1.3.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp111.639.377.130,73

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp111.639.377.130,73, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.987.608,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.587.389.522,73 atau 214.642,28% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	69.321.200,00	51.987.608,00
2	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	111.570.055.930,73	-
	Jumlah	**111.639.377.130,73**	**51.987.608,00**

5.3.1.1.3.1.1.1 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan Rp69.321.200,00

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan sebesar Rp69.321.200,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.987.608,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.333.592,00 atau 33,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	69.321.200,00	51.987.608,00
		69.321.200,00	**51.987.608,00**

5.3.1.1.3.1.1.2 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Rp111.570.055.930,73

Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp111.570.055.930,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp00,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp111.570.055.930,73 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	75.904.919.117,00	-
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	16.739.887.527,41	-
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.535.793.043,00	-
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	16.784.172.802,60	-
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	97.847.398,72	-
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	346.352.590,00	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	161.083.452,00	-
	Jumlah	**111.570.055.930,73**	**-**

5.3.1.1.3.2 Piutang Retribusi Jasa Usaha Rp254.242.530,00

Piutang Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp254.242.530,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.048.350,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 220.194.180,00 atau 646,71% dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	254.242.530,00	34.048.350,00
Jumlah	**254.242.530,00**	**34.048.350,00**

5.3.1.1.3.2.1 Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp254.242.530,00

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp254.242.530,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp34.048.350,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 220.194.180,00 atau 646,71% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	29.140.930,00	2.006.750,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	193.060.000,00	-
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	32.041.600,00
	Jumlah	**254.242.530,00**	**34.048.350,00**

5.3.1.1.4 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Rp1.832.728.064,88

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp1.832.728.064,88, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp31.181.471.848,70 mengalami **penurunan** sebesar (Rp29.348.743.783,82) atau (94,12 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	370.051.669,00	370.051.669,00
2	Piutang Jasa Giro	-	-
3	Piutang Pendapatan Bunga	-	-
4	Piutang Pendapatan BLUD	1.462.676.395,88	30.811.420.179,70
	Jumlah	**1.832.728.064,88**	**31.181.471.848,70**

5.3.1.1.4.1 Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp370.051.669,00

Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp370.051.669,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	370.051.669,00	370.051.669,00
	Jumlah	**370.051.669,00**	**370.051.669,00**

5.3.1.1.4.2 Piutang Pendapatan BLUD Rp1.462.676.395,88

Piutang Pendapatan BLUD sebesar Rp1.462.676.395,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.811.420.179,70 mengalami **penurunan** sebesar (Rp29.348.743.783,82) atau (95,25%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	44.083.333,34	8.739.900.639,99

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	599.857.666,39	10.284.088.330,50
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.013.699,00	1.609.045.311,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	361.188.790,00	7.242.669.926,60
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	185.542.500,00	413.397.915,72
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	264.510.955,00	2.154.515.302,79
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.479.452,15	367.802.753,10
	Jumlah	**1.462.676.395,88**	**30.811.420.179,70**

Piutang Pasien BLUD

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	6.023.107.189,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	6.818.861.754,91
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	1.113.396.514,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	3.209.229.496,60
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	80.888.999,72
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	467.193.279,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	135.918.512,00
	Jumlah	**-**	**17.848.595.745,23**

Piutang Jaminan Pelayanan

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	2.310.613.314,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	3.226.322.466,00
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	493.635.098,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	3.672.230.640,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	254.654.276,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	512.903.719,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	222.295.200,00
	Jumlah	**-**	**10.692.654.713,00**

Piutang Lain-Lain BLUD

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	44.083.333,34	406.180.136,99
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	599.857.666,39	238.904.109,59
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.013.699,00	2.013.699,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	361.188.790,00	361.209.790,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	185.542.500,00	77.854.640,00
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	264.510.955,00	1.174.418.304,79
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.479.452,15	9.589.041,10
	Jumlah	**1.462.676.395,88**	**2.270.169.721,47**

Piutang rumah sakit dengan jaminan Tahun 2024 merupakan piutang yang telah diverifikasi oleh penjamin per 31 Desember 2024. Tahun 2025 telah diajukan klaim atas tagihan Tahun 2024 maupun tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut :

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
RSUD Dr. Moewardi Surakarta	Obat BPJS Kesehatan	1.609.695.099,00	29 Desember 2024	7 Januari 2024	10 Januari 2025
	Jasa Raharja	167.019.077,00	7 Januari 2024	15 Januari 2025	BELUM CAIR
	TB MDR	1.984.314,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	10 April 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	TB MDR (TCM)	5.325.000,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	10 April 2025
	Yankes Telkom	15.818.736,00	2 Januari 2025	20 Januari 2025	20 Januari 2025
	Inhealth	10.226.830,00	30 Desember 2024	6 Januari 2025	10 Januari 2025
	Inhealth	2.544.433,00	30 Desember 2024	6 Januari 2025	10 Januari 2025
	Inhealth	7.628.506,00	30 Desember 2024	7 Januari 2025	10 Januari 2025
	Inhealth	5.243.629,00	30 Desember 2024	7 Januari 2025	10 Januari 2025
	Inhealth	300.000,00	30 Desember 2024	6 Januari 2025	8 Januari 2025
	Panti Waluyo	4.831.500,00	2 Januari 2025	20 Januari 2025	20 Januari 2025
	Jamkesda Sragen	36.802.801,00	2 Januari 2025	13 Februari 2025	13 Februari 2025
	BPJS Ketenagakerjaan	360.503.951,00	2 Januari 2025	31 Januari 2025	31 Januari 2025
	BPJS Ketenagakerjaan	142.087.662,00	2 Januari 2025	30 Januari 2025	30 Januari 2025
	PT KAI	11.535.414,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	7 Maret 2025
	PT KAI	1.987.121,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	7 Maret 2025
	RS Kustati	7.673.500,00	2 Januari 2025	4 Februari 2025	4 Februari 2025
	Medika Plaza	3.078.140,00	2 Januari 2025	4 Februari 2025	4 Februari 2025
	RSJD Surakjarta	4.757.780,00	2 Januari 2025	13 Januari 2025	13 Januari 2025
	RS dr Oen	185.000,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR
	RS dr Oen	1.902.500,00	2 Januari 2025	10 Januari 2025	10 Januari 2025
	PT Taspen	25.501.773,00	2 Januari 2025	31 Januari 2025	31 Januari 2025
	LPSK	1.618.347,00	2 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	10 Maret 2025
	PKU Muhammadiyah Surakarta	1.137.500,00	2 Januari 2025	24 Januari 2025	24 Januari 2025
	PKU Muhammadiyah Karanganyar	969.500,00	2 Januari 2025	13 Januari 2025	13 Januari 2025
	Total	**2.430.358.113,00**			
RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	RS HERMINA PANDANARAN (Klaim RI RJ Bulan Desember 2024)	13.682.597,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	20 Januari 2025
	RSJD AMINO GONDHOHUTOMO (Klaim RJ Bulan Desember 2024)	2.818.039,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	30 Januari 2025
	TASPEN (Klaim RI RJ Bulan Desember 2024)	155.126,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	21 April 2025
	TCM GLOBAL FUND (Klaim RI RJ Bulan Desember 2024)	1.950.000,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	20 Maret 2025
	VCT GLOBAL FUND (Klaim RI RJ Bulan November 2024)	1.080.000,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	25 Februari 2025
	RS HERMINA PANDANARAN (Klaim Susulan Bulan Desember 2024)	5.631.225,00	10 Januari 2025	10 Januari 2025	20 Januari 2025
	INHEALTH (Klaim Bulan November 2024)	141.392,00	10 Januari 2025	10 Januari 2025	18 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim revisi dan	10.477.953,00	13 Januari 2025	13 Januari 2025	20 Januari 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	susulan Obat Sitos RI Oktober 2024)				
	BPJS KESEHATAN (Klaim revisi Obat Sitos Rj Oktober 2024)	6.803.051,00	13 Januari 2025	13 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim Pending dan susulan II RITL Agustus 2024)	883.372.200,00	14 Januari 2025	14 Januari 2025	17 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim Pending dan susulan II RJTL Agustus 2024)	64.531.100,00	14 Januari 2025	14 Januari 2025	17 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim Revisi RITL Okt 2024)	1.500.967.300,00	14 Januari 2025	14 Januari 2025	17 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim Revisi dan susulan RJTL okt 2024)	111.922.995,00	14 Januari 2025	14 Januari 2025	17 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim BPJS Obat Sitos RITL Desember 2024)	135.118.924,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim BPJS Obat Sitos RjTL Desember 2024)	978.915.353,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim RITL Bulan Pelayanan Desember 2024)	7.256.716.693,00	28 Januari 2025	28 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (Klaim RJTL Bulan Pelayanan Desember 2024)	2.407.153.600,00	28 Januari 2025	28 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN (AMBULANCE DES 2024)	800.000,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (OBAT ALTEPLASE DESEMBER 2024)	4.500.545,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (CAPD DESEMBER 2024)	16.000.000,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (IMUNOHISTOKIMIA NOVEMBER 2024)	25.740.000,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	BPJS KESEHATAN (ALKES DES 2024)	3.454.200,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (SUSULAN ALKES NOV 2024)	620.840,00	30 Januari 2025	30 Januari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (Obat Sitos dan kronis RITL November 2024)	16.461.692,00	6 Februari 2025	6 Februari 2025	17 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (REVISI RITL NOVEMBER 2024)	1.749.736.300,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (REVISI DAN SUSULAN RJTL NOVEMBER 2024)	123.514.400,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING II RITL SEPT 2024)	35.288.000,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING DAN SUSULAN II RJTL SEPT 2024)	17.788.700,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING III RITL AGST 2024	150.999.000,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING III RJTL AGST 2024	19.482.600,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING III RITL JULI 2024	31.380.600,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (PENDING III RJTL JULI 2024	12.302.000,00	11 Februari 2025	11 Februari 2025	14 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN (AMBULANCEDE SEMBER 2024)	1.300.000,00	24 Februari 2025	24 Februari 2025	10 Maret 2025
	BPJS KESEHATAN(IMU NOHISTOKIMIA DES 2024	23.400.000,00	24 Februari 2025	24 Februari 2025	10 Maret 2025
	BPJS KESEHATAN(ALK ES DESEMBER 2024)	350.000,00	24 Februari 2025	24 Februari 2025	10 Maret 2025
	JASA RAHARJA (Klaim Bulan November 2024)	86.216.036,00	02 Januari 2025	02 Januari 2025	08 Januari 2025
	JASA RAHARJA (Klaim Bulan Desember 2024)	97.156.687,00	14 Januari 2025	14 Januari 2025	17 Januari 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	JASA RAHARJA (Klaim Susulan Bulan Desember 2024)	80.779.678,00	4 Februari 2025	4 Februari 2025	4 Februari 2025
	JASA RAHARJA (Klaim Susulan Bulan Desember 2024)	1.794.118,00	17 Februari 2025	17 Februari 2025	21 Februari 2025
	JASA RAHARJA (Klaim Susulan November 2024)	11.747.495,00	24 Februari 2025	24 Februari 2025	27 Februari 2025,3 Maret 2025 dan 21 Maret 2025
	BPJS KETENAGAKERJAAN (Klaim Bulan Desember 2024)	240.391.380,00	10 Januari 2025	10 Januari 2025	15 Januari 2025 dan 17 Januari 2025
	KPRI ADHYATMA, MPH (LISTRIK KPRI DES 2024)	2.112.000,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	13 Januari 2025
	PT.CENTREPARK CITRA CORPORA (LISTRIK CENTRE DES 2024)	615.000,00	09 Januari 2025	09 Januari 2025	17 Januari 2025
	Total	**16.135.368.819,00**			
RSUD dr Rehatta Jepara	BPJS (OKTOBER ORJTL 2024 - obat luar paket)	181.901.298,00	03 Januari 2025	08 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS (NOVEMBER ORJTL 2024 - obat luar paket)	157.887.873,00	04 Februari 2025	06 Februari 2025	17 Februari 2025
	BPJS (DESEMBER INDUK 2024 - ri-rj)	3.686.057.170,00	08 Januari 2025	21 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS (DESEMBER AMBULAN RI 2024 - ambulan ri)	745.000,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	03 Februari 2025
	BPJS (DESEMBER AMBULAN RJ 2024 - ambulan rj)	950.000,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	03 Februari 2025
	BPJS (DESEMBER KANTONG DARAH 2024 - kantong darah)	5.400.000,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	03 Februari 2025
	BPJS (DESEMBER KORSET 2024 - corset)	2.660.310,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	03 Februari 2025
	BPJS (DESEMBER PROTESA 2024 - protesa)	2.750.000,00	22 Januari 2025	22 Januari 2025	03 Februari 2025
	PENDING BPJS (OKTOBER 2024)	324.495.900,00	22 Januari 2025	24 Januari 2025	05 Februari 2025
	PENDING BPJS (NOVEMBER 2024)	457.155.100,00	04 Februari 2025	05 Februari 2025	17 Februari 2025
	Total	**4.820.002.651,00**			
RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	-	-	-	-	-
	Total	-			
RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang	PENDING JULI RITL	14.357.600,00	20 Desember 2024	09 Januari 2025	12 Januari 2025
	PENDING AGUSTUS RITL	6.437.700,00	20 Desember 2024	09 Januari 2025	12 Januari 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	PENDING SEPTEMBER RITL	74.950.100,00	20 Desember 2024	09 Januari 2025	12 Januari 2025
	PENDING OKTOBER RITL	339.812.800,00	20 Desember 2024	09 Januari 2025	12 Januari 2025
	PENDING OKTOBER RJTL	7.076.000,00	20 Desember 2024	09 Januari 2025	12 Januari 2025
	Total	**442.634.200,00**			
RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta	JKD Kab. Pacitan bulan Desember 2024	1.134.200,00	03 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	13 Februari 2025
	PMKS Kab Sukoharjo bulan Desember 2024	3.397.634,00	03 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	23 Januari 2025
	JKD Kab. Sragen bulan Desember 2024	6.083.925,00	03 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	25 Maret 2025
	BPJS Pely. bulan Agustus 2024 Thp.4	22.883.500,00	20 Desember 2024	07 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS Pely.bulan September 2024 Thp.3	112.698.600,00	20 Desember 2024	07 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS Pely. bulan Oktober 2024 Thp.2	117.241.600,00	20 Desember 2024	07 Januari 2025	20 Januari 2025
	Total	**263.439.459,00**			
RSUD. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	TELKOM (16 - 31 Desember 2024)	8.599.149,50	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	30 Januari 2025
	BPJS KETENAGAKERJAAN (1 - 31 Desember 2024)	98.966.398,00	04 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR
	YAKES PERTAMINA PENSIUN (1 - 31 Desember 2024)	85.172.780,25	03 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	RITL cair 28 Maret 2025, RJTL BELUM CAIR
	RS HERMINA PURWOKERTO (1 - 31 Desember 2024)	13.975.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	25 Februari 2025
	RUMAH SAKIT JIH PURWOKERTO (1 - 31 Desember 2024)	15.275.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	8 Februari 2025 dan 12 April 2025
	RSU SIAGA MEDIKA BANYUMAS (1 - 31 Desember 2024)	7.680.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	20 Januari 2025
	RS TK III (DKT) WIJAYA KUSUMA PURWOKERTO (1 - 31 Desember 2024)	865.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR
	KLINIK UTAMA MATA JEC ANWARI (1 - 31 Desember 2024)	2.230.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	15 Januari 2025
	RSU SINAR KASIH PURWOKERTO (1 - 31 Desember 2024)	215.000,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	18 Januari 2025
	INHEALTH (NASIONAL GOLD) (1 - 31 Desember 2024)	25.777.694,75	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	INHEALTH (NASIONAL SILVER) (1 - 31 Desember 2024)	12.191.626,75	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR
	INHEALTH (PLATINUM) (1 - 31 Desember 2024)	3.995.152,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	BELUM CAIR
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (11-15 Desember 2024)	92.626.798,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	16 Januari 2025, 20 Januari 2025, 5 Februari 2025, 11 Februari 2025, 20 Februari 2025, 11 Maret 2025, 19 Maret 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (1-5 Desember 2024)	77.571.128,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	16 Januari 2025, 17 Januari 2025, 11 Maret 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (16-20 Desember 2024)	112.338.756,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	16 Januari 2025, 17 Januari 2025, 5 Februari 2025, 11 Februari 2025, 6 Maret 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (21-25 Desember 2024)	67.242.766,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	21 Januari 2025, 4 Februari 2025, 5 Februari 2025, 24 Februari 2025, 6 Maret 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (25-26 Desember 2024)	174.957.302,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 Januari 2025, 11,20,24 Februari 2025, 6 Maret 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (6-10 Desember 2024)	57.271.332,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	16 Januari 2025, 20 Januari 2025, 21 Januari 2025, 11 Maret 2025
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (RANAP 1-30 NOV 2025)	216.623.337,00	22 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	24 Januari 2025, 4 Februari 2025, 5 Februari 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (RAWAT JALAN NOV-DES 2024)	40.376.188,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	20 Januari 2025, 11,24 Februari 2025, 6,19,28 Maret 2025, 9,24,26 April 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	PT JASA RAHARJA PURWOKERTO (SUSULAN RANAP NOV 2024)	100.800.722,00	02 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	13 Januari 2025, 16 Januari 2025, 4 Februari 2025, 5 Februari 2025 (Ada yang belum cair karena pembayaran per pasien)
	P2M DINKES TBMDR (1 - 31 DESEMBER 2024)	15.173.596,00	04 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES TBMDR (1 - 31 DESEMBER 2024)	4.890.612,00	04 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES TCM (1 - 31 DESEMBER 2024)	11.175.000,00	07 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES VIRALOAD (1 - 30 NOVEMBER 2024)	6.660.000,00	07 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	12 Maret 2025
	P2M DINKES VIRALOAD (1 - 31 DESEMBER 2024)	5.220.000,00	07 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	12 Maret 2025
	P2M DINKES PENGEPAKAN SAMPEL KULTUR (1 - 31 DESEMBER 2024)	50.000,00	09 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES PENGIRIMAN SAMPEL KULTUR (1 - 31 DESEMBER 2024)	16.000,00	09 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES PENGEPAKAN SAMPEL XDR (1 - 31 DESEMBER 2024)	1.300.000,00	09 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	P2M DINKES PENGIRIMAN SAMPEL XDR (1 - 31 DESEMBER 2024)	216.000,00	09 Januari 2025	TIDAK ADA TAHAP VERIF	17 April 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN OBAT KEMO RJTL RITL (JULI 2024)	64.333.092,00	20 Desember 2024	03 Januari 2025	13 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN KE 3 RITL RJTL (JULI 2024)	1.075.803.922,00	30 Desember 2024	03 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN CAPD (OKTOBER 2024)	136.000.000,00	22 November 2024	13 Januari 2025	20 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN ALKES (OKTOBER 2024)	21.475.000,00	22 November 2024	13 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN	9.130.000,00	12 Januari 2025	13 Januari 2025	30 Januari 2025

Nama SKPD	Jenis Piutang	Nominal	Tanggal Pengajuan Klaim	Tanggal Verifikasi Klaim	Tgl Transfer
	AMBULANCE (OKTOBER 2024)				
	BPJS KESEHATAN KLAIM NON INA CBG (AGUSTUS 2024)	263.163.815,00	12 Januari 2025	13 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN KLAIM RJTL RITL (DESEMBER 2024)	46.378.235.725,00	07 Januari 2025	23 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN OBAT KRONIS KEMO RJTL (AGUSTUS 2024)	5.217.347.164,00	06 Januari 2025	23 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN OBAT KEMO RITL (AGUSTUS 2024)	993.592.035,00	06 Januari 2025	23 Januari 2025	30 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN KE4 RJTL (JULI 2024)	3.018.000,00	17 Januari 2025	20 Januari 2025	31 Januari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN KE2 RJTL RITL (AGUSTUS 2024)	6.470.534.392,00	17 Januari 2025	01 Februari 2025	07 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN RJTL RITL (SEPTEMBER)	8.701.076.988,00	23 Januari 2025	06 Februari 2025	12 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN OBAT KEMO RJTL RITL (AGUSTUS 2024)	33.631.734,00	24 Januari 2025	06 Februari 2025	17 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN KE3 RJTL RITL (AGUSTUS 2024)	532.769.700,00	09 Februari 2025	10 Februari 2025	21 Februari 2025
	BPJS KESEHATAN SUSULAN KE4 RJTL (AGUSTUS 2024)	1.921.700,00	13 Februari 2025	14 Februari 2025	26 February 2025
	Total	**71.161.485.605,25**			
Jumlah Total		**96.907.275.293,25**			

5.3.1.1.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat **Rp53.079.604.000,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp53.079.604.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.254,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp53.079.599.746,00 atau 1.247.757.398,82% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Dana Perimbangan	53.079.604.000,00	4.254,00
2	Piutang Dana Insentif Daerah (DID)	-	-
	Jumlah	**53.079.604.000,00**	**4.254,00**

5.3.1.1.5.1 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp53.079.604.000,00

Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebesar Rp53.079.604.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.254,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp53.079.599.746,00 atau 1.247.757.398,82% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-DBH	53.079.604.000,00	4.254,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi umum (DAU)	-	-
3	Piutang Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-	-
4	Piutang Dana Transfer Khusus Non Fisik-DAK Non Fisik	-	-
	Jumlah	**53.079.604.000,00**	**4.254,00**

Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2024 sebesar Rp53.079.604.000,00 sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2024.

5.3.1.1.5.1.1 Piutang Transfer Umum-DBH Rp53.079.604.000,00

Piutang Transfer Umum-DBH sebesar Rp53.079.604.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.254,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp53.079.599.746,00 atau 1.247.757.398,82% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Dana Transfer Umum-PBB	2.914.465.000,00	1.050,00
1	Piutang Dana Transfer Umum-PPh 21	26.809.534.000,00	794,00
3	Piutang Dana Transfer Umum-DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	243.536.000,00	248,00
2	Piutang Dana Transfer Umum-Cukai dan Tembakau	22.802.449.000,00	289,00
5	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Minyak Bumi	-	912,00
6	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Gas Bumi	-	-
7	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	218.630.000,00	-
8	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	90.962.000,00	-
9	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty	28.000,00	-
10	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-PSDH	-	884,00
11	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-IIUPH	-	-
12	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Kehutanan-DR	-	77,00
13	Piutang Dana Transfer Umum-DBH SDA Perikanan	-	-
	Jumlah	**53.079.604.000,00**	**4.254,00**

5.3.1.1.6 Piutang Lainnya Rp15.157.041.204,00

Piutang Lainnya sebesar Rp15.157.041.204,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.406.623.856,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp249.582.652,00) atau (1,62%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	10.690.193.030,00	10.936.593.864,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	4.466.848.174,00	4.470.029.992,00
	Jumlah	**15.157.041.204,00**	**15.406.623.856,00**

5.3.1.1.6.1 Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang Rp10.690.193.030,00

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp10.690.193.030,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.936.593.864,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp246.400.834,00) atau (2,25 %) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	10.690.193.030,00	10.936.593.864,00
		10.690.193.030,00	**10.936.593.864,00**

Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Biro Perekonomian-UMKM	1.710.392.264,00	1.710.392.264,00
2	Dinas Koperasi dan UKM	1.747.711.038,00	1.754.661.038,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.403.855.800,00	1.403.855.800,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	33.800.000,00	33.800.000,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.030.004.401,00	2.030.504.401,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.882.500.000,00	2.882.500.000,00
7	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	881.929.527,00	1.120.880.361,00
	Jumlah	**10.690.193.030,00**	**10.936.593.864,00**

5.3.1.1.6.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Rp4.466.848.174,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar Rp4.466.848.174,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.470.029.992,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.181.818,00) atau (0,07%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah ...	361.545.456,00	364.727.274,00
2	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
		4.466.848.174,00	**4.470.029.992,00**

5.3.1.1.6.2.1 Piutang Pendapatan dari Pengembalian (Dana Talangan Kab Cilacap) Rp361.545.456,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Pemerintah Daerah sebesar Rp361.545.456,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp364.727.274,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp 3.181.818,00) atau (0,87%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	361.545.456,00	364.727.274,00
	Jumlah	**361.545.456,00**	**364.727.274,00**

5.3.1.1.6.2.2 Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Piutang Tempat Pelelangan Ikan) Rp4.105.302.718,00

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar Rp4.105.302.718,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dinas Kelautan dan Perikanan	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00
	4.105.302.718,00	**4.105.302.718,00**

5.3.1.1.7 Penyisihan Piutang (Rp560.159.696.288,11)

Penyisihan Piutang sebesar (Rp560.159.696.288,11) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp517.709.600.797,61) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp42.450.095.490,49) atau 8,20% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pendapatan	(545.002.655.084,11)	(502.302.976.941,61)
2	Penyisihan Piutang Lainnya	(15.157.041.204,00)	(15.406.623.856,00)
	Jumlah	**(560.159.696.288,11)**	**(517.709.600.797,61)**

5.3.1.1.7.1 Penyisihan Piutang Pendapatan (Rp545.002.655.084,11)

Penyisihan Piutang Pendapatan sebesar (Rp545.002.655.084,11) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp502.302.976.941,61) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp42.699.678.142,50) atau 8,50% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(527.521.633.943,40)	(485.211.844.626,79)
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(16.623.089.457,71)	(32.311.571,79)
3	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(857.931.683,00)	(17.058.820.743,03)
5	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-
6	Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-
	Jumlah	**(545.002.655.084,11)**	**(502.302.976.941,61)**

5.3.1.1.7.1.1 Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah (Rp527.521.633.943,40)

Penyisihan Piutang Pendapatan Pajak Daerah sebesar (Rp527.521.633.943,40) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp485.211.844.626,79) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp42.309.789.316,61) atau 8,72% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	(527.519.938.448,25)	(485.210.171.243,25)
2	Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	-	-
3	Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-
4	Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	(1.695.495,15)	(1.673.383,54)
5	Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-
	Jumlah	**(527.521.633.943,40)**	**(485.211.844.626,79)**

Rincian penyisihan piutang pajak Tahun 2024 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2024				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Pajak Daerah	**485.211.844.626,79**	**140.864.125.932,65**		**98.554.336.616,04**	**-**	**527.521.633.943,40**
1	Pajak Kendaraan Bermotor	485.210.171.243,25	140.862.430.437,50		98.552.663.232,50	-	527.519.938.448,25
2	Pajak Air Permukaan	1.673.383,54	1.695.495,15		1.673.383,54	-	1.695.495,15

5.3.1.1.7.1.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi (Rp16.623.089.457,71)

Penyisihan Piutang Pendapatan Retribusi sebesar (Rp16.623.089.457,71), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp32.311.571,79) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.590.777.885,91) atau 51.346,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan	(16.589.936.853,06)	(259.938,04)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah	(33.152.604,65)	(32.051.633,75)
	Jumlah	**(16.623.089.457,71)**	**(32.311.571,79)**

Perhitungan penyisihan piutang retribusi daerah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2024				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Retribusi Daerah	**15.393.278.582,42**	**1.768.319.350,01**	**647.483.766,28**	**1.172.871.795,83**	**13.120.445,17**	**16.623.089.457,71**
1	Dinas Kesehatan	259.938,04	86.667,96	-	-	-	346.606,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	10.033,75	145.704,65	-	10.033,75	-	145.704,65
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		965.300,00	-	-	-	965.300,00
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.041.600,00	-	-	-	-	32.041.600,00
5	RSUD Dr Moewardi Surakarta	4.765.459.890,47	657.384.699,07	641.880.644,03	644.398.756,44	6.201.546,55	5.414.124.930,58
6	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	6.199.580.648,26	330.310.765,39	5.603.122,25	92.365.033,99	6.918.364,12	6.436.211.137,78
7	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	2.487.914.787,17	371.408.634,81	-	122.688,15	-	2.859.200.733,84
8	RSUD dr. Rehatta Jepara	82.162.271,10	84.792,00	-	1.273.271,38	-	80.973.791,72
9	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.266.292.169,00	97.852.015,00	-	534.446,00	-	1.363.609.738,00
10	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	430.661.187,43	303.935.468,44	-	430.661.187,43	-	303.935.468,44
11	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	128.896.057,20	6.145.302,69	-	3.506.378,69	534,50	131.534.446,70

5.3.1.1.7.1.2.1 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Rp16.589.936.853,06)

Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar (Rp16.589.936.853,06), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp259.938,04) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.589.676.915,01) atau 6.382.165,89% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	(346.606,00)	(259.938,04)
2	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	(16.589.590.247,06)	-
	Jumlah	**(16.589.936.853,06)**	**(259.938,04)**

5.3.1.1.7.1.2.1.1 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan (Rp346.606,00)

Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp346.606,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp259.938,04) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp86.667,96) atau 33,34% dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dinas Kesehatan	(346.606,00)	(259.938,04)
Jumlah	**(346.606,00)**	**(259.938,04)**

5.3.1.1.7.1.2.1.2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (Rp16.589.590.247,07)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sebesar (Rp16.589.590.247,07), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.589.590.247,07) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(5.414.124.930,58)	-
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(6.436.211.137,79)	-
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.363.609.738,00)	-
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(2.859.200.733,84)	-
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(80.973.791,72)	-
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(303.935.468,44)	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(131.534.446,70)	-
		(16.589.590.247,07)	**-**

5.3.1.1.7.1.2.2 Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah (Rp33.152.604,65)

Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar (Rp33.152.604,65) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp32.051.633,75) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.100.970,90) atau 3,43% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Pengelolaan Sumber Daya Air	(145.704,65)	(10.033,75)
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(965.300,00)	-
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(32.041.600,00)	(32.041.600,00)
	Jumlah	**(33.152.604,65)**	**(32.051.633,75)**

5.3.1.1.7.1.3 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Rp857.931.683,00)

Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah sebesar (Rp857.931.683,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp17.058.820.743,03) mengalami **penurunan** sebesar Rp16.200.889.060,03 atau (94,97%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
2	Penyisihan Piutang Bunga	-	-
3	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(487.880.014,00)	(16.688.769.074,03)
	Jumlah	**(857.931.683,00)**	**(17.058.820.743,03)**

Perhitungan penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah berdasarkan umur piutang per SKPD sebagai berikut:

(*Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Saldo Awal	MUTASI 2024				Saldo Akhir
			Tambah		Kurang		
			Beban	Koreksi	Penyesuaian	Koreksi	
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	**1.697.853.732,40**	**56.029.130,32**	**-**	**814.976.339,72**	**80.974.840,00**	**857.931.683,00**
1	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	370.051.669,00	-	-	-	-	370.051.669,00
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.030.900,68	-	-	1.810.484,01	-	220.416,67
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.194.520,55	2.999.288,33	-	1.194.520,55	-	2.999.288,33
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	180.293.787,50	38.051.000,00	-	105,00	-	218.344.682,50
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	5.688.778,70	14.857.946,98	-	2.176.999,18	-	18.369.726,50
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	10.068,00	10.068,00	-	10.068,00	-	10.068,00
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.138.536.062,77	83.429,75	-	809.736.217,77	80.974.840,00	247.908.434,75
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	47.945,20	27.397,26	-	47.945,21	-	27.397,25

5.3.1.1.7.1.3.1 Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD (Rp370.051.669,00)

Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar (Rp370.051.669,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	(370.051.669,00)	(370.051.669,00)
	Jumlah	**(370.051.669,00)**	**(370.051.669,00)**

5.3.1.1.7.1.3.2 Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD (Rp487.880.014,00)

Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD sebesar (Rp487.880.014,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp16.688.769.074,03) mengalami **penurunan** sebesar Rp16.200.889.060,03 atau (97,08%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(220.416,67)	(4.767.490.791,15)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(2.999.288,33)	(6.200.775.168,81)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(10.068,00)	(1.266.302.237,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(218.344.682,50)	(2.668.208.574,67)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(18.369.726,50)	(87.851.049,80)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(247.908.434,75)	(1.569.197.250,20)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(27.397,25)	(128.944.002,40)
	Jumlah	**(487.880.014,00)**	**(16.688.769.074,03)**

Penyisihan Piutang Pasien

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	(4.753.289.865,80)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	(5.407.262.650,91)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	(879.011.820,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	(2.221.109.622,53)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	(80.888.999,72)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	(428.096.668,84)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(127.784.581,20)
	Jumlah	**-**	**(13.897.444.209,00)**

Penyisihan Piutang Jaminan Pelayanan

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	(12.170.024,67)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	(792.317.997,35)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	(387.280.349,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	(266.805.164,64)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	(1.273.271,38)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	(2.564.518,60)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(1.111.476,00)
	Jumlah	**-**	**(1.463.522.801,64)**

Penyisihan Piutang BLUD Lainnya

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(220.416,67)	(2.030.900,68)
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(2.999.288,33)	(1.194.520,55)
3	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(10.068,00)	(10.068,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(218.344.682,50)	(180.293.787,50)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(18.369.726,50)	(5.688.778,70)
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(247.908.434,75)	(1.138.536.062,77)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(27.397,25)	(47.945,20)
	Jumlah	**(487.880.014,00)**	**(1.327.802.063,40)**

5.3.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Lainnya (Rp15.157.041.204,00)

Penyisihan Piutang Lainnya sebesar (Rp15.157.041.204,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp15.406.623.856,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp249.582.652,00 atau (1,62%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	(10.690.193.030,00)	(10.936.593.864,00)
2	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
3	Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain	(361.545.456,00)	(364.727.274,00)
		(15.157.041.204,00)	**(15.406.623.856,00)**

Rincian penyisihan piutang lainnya 2024 berdasarkan umur piutang pada tabel berikut:

(*Dalam Rupiah)*

NO	Keterangan	Penyisihan Piutang Unaudited	Kategori Penyisihan Piutang				Saldo Akhir
			0,50%	10%	50%	100%	
	Piutang Lainnya	**15.157.041.204,00**	**-**	**-**	**-**	**15.157.041.204,00**	**15.157.041.204,00**
1	SKPKD	11.051.738.486,00	-	-	-	11.051.738.486,00	11.051.738.486,00
2	Dinas Kelautan & Perikanan	4.105.302.718,00	-	-	-	4.105.302.718,00	4.105.302.718,00

5.3.1.1.7.2.1 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang (Dana Bergulir) (Rp10.690.193.030,00)

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang (Dana Bergulir) sebesar (Rp10.690.193.030,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.936.593.864,00) mengalami **penurunan** sebesar Rp246.400.834,00 atau (2,25%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	(10.690.193.030,00)	(10.936.593.864,00)
	Jumlah	**(10.690.193.030,00)**	**(10.936.593.864,00)**

5.3.1.1.7.2.2 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang (Rp4.105.302.718,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang sebesar (Rp4.105.302.718,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Piutang Pelelangan Ikan)	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
		(4.105.302.718,00)	**(4.105.302.718,00)**

5.3.1.1.7.2.2.1 Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Rp4.105.302.718,00)

Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat sebesar (Rp4.105.302.718,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Masyarakat (Piutang Pelelangan Ikan)	(4.105.302.718,00)	(4.105.302.718,00)
		(4.105.302.718,00)	**(4.105.302.718,00)**

5.3.1.1.7.2.3 Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain (Rp361.545.456,00)

Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain sebesar (Rp361.545.456,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp364.727.274,00) tidak mengalami **penurunan** sebesar Rp3.181.818,00 atau (0,87%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyisihan Piutang Dana Talangan Kab Cilacap	(361.545.456,00)	(364.727.274,00)
	Jumlah	**(361.545.456,00)**	**(364.727.274,00)**

5.3.1.1.7.2.3.1 Penyisihan Piutang Dana Talangan Kab Cilacap (Rp361.545.456,00)

Penyisihan Piutang Dana Talangan Kab Cilacap sebesar (Rp361.545.456,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp(364.727.274,00) tidak tidak mengalami **penurunan** sebesar Rp3.181.818,00 atau (0,87%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	(361.545.456,00)	(364.727.274,00)
		(361.545.456,00)	**(364.727.274,00)**

5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka Rp5.086.493.552,91

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp5.086.493.552,92 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.799.321.938,48 mengalami **penurunan** sebesar (Rp712.828.385,56) atau (12,29%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Beban Dibayar Dimuka	518.636.939,82	5.540.532.074,72
2	Beban Dibayar Dimuka-Sewa	248.431.033,96	258.789.863,76
3	Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah	4.319.425.579,13	-
	Jumlah	**5.086.493.552,91**	**5.799.321.938,48**

5.3.1.1.8.1 Beban Dibayar Dimuka Rp518.636.939,82

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp518.636.939,82 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.540.532.074,72 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.021.895.134,90) atau (90,64%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	219.408.282,85
2	Dinas Kesehatan	-	215.065.547,15
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	341.377.202,19	695.557.167,12
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	153.785.765,03	415.586.896,87
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	23.473.972,60	97.860.780,51
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	13.608.306,85
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	60.536.725,10
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	2.895.944,10
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	208.204.392,43
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	96.144.031,73
11	Satuan Polisi Pamong Praja	-	81.077.376,26
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	86.457.473,91
13	Dinas Sosial	-	35.702.765,55
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	54.687.709,90
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	28.483.133,59
16	Dinas Ketahanan Pangan	-	80.777.576,76
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	219.366.815,23
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	-	71.764.232,10
19	Dinas Perhubungan	-	213.868.231,60
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	91.280.843,94
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	308.122.203,43
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	10.693.501,62
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	93.346.525,68
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	37.079.561,45
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	60.458.965,68
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	114.764.626,18
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	134.769.255,22
28	Sekretariat Daerah	-	252.512.653,34
29	Sekretariat DPRD	-	448.041.775,98
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	662.538.034,53
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	143.992.524,40
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	10.860.009,02

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
33	Badan Penghubung	-	135.438.360,88
34	Inspektorat	-	121.155.032,04
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	18.424.811,72
	Jumlah	**518.636.939,82**	**5.540.532.074,72**

5.3.1.1.8.2 Beban Dibayar Dimuka-Sewa Rp248.431.033,96

Beban Dibayar Dimuka-Sewa sebesar Rp248.431.033,96 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp258.789.863,76 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.358.829,80) atau (4,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	228.496.593,44	228.526.920,98
2	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	19.934.440,52	29.598.092,64
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	664.850,14
	Jumlah	**248.431.033,96**	**258.789.863,76**

Adapun rincian Beban dibayar dimuka-sewa tahun 2024 adalah sebagai berikut:

OPD	Nilai	Instansi / Badan / Perusahaan Tempat Menyewa	Jangka Waktu Sewa	
			Tanggal Mulai Sewa	Tanggal Akhir Sewa
RSUD Dr. Moewardi Surakarta	228.496.593,44	PT Orix Indonesia Finance	15 Desember 2024	15 Desember 2025
RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	10.565.588,07	Anik Hariwiningrum (Sewa Rumah Dinas Direktur)	01 Oktober 2024	31 Mei 2025
RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	9.368.852,45	Andy Herawan (Sewa Rumah Dinas Wakil Direktur Umum dan Keuangan)	11 September 2024	11 September 2025

5.3.1.1.8.3 Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah Rp4.319.425.579,13

Beban Dibayar Dimuka-Asuransi Barang Milik Daerah sebesar Rp4.319.425.579,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar 100% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	241.095.527,91	-
2	Dinas Kesehatan	86.437.923,90	-
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	268.308.119,85	-
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	286.340.137,01	-
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	188.294.397,28	-
6	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	14.221.028,47	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	14.533.516,76	-
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	44.329.246,58	-
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	228.873.610,63	-
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.783.319,46	-
11	Satuan Polisi Pamong Praja	73.099.350,42	-
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	83.010.937,38	-
13	Dinas Sosial	44.204.270,44	-
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.052.394,75	-
15	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	32.861.059,29	-
16	Dinas Ketahanan Pangan	6.572.344,89	-
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	194.431.540,32	-
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	74.542.265,11	-
19	Dinas Perhubungan	213.150.426,23	-
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	178.310.277,56	-
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.326.924,03	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	94.289.411,00	-
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	17.361.978,08	-

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	115.665.989,52	-
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	128.147.590,10	-
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	132.061.600,13	-
27	Sekretariat Daerah	253.666.709,76	-
28	Sekretariat DPRD	440.432.084,41	-
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	296.195.344,74	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	180.792.204,10	-
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.589.671,70	-
32	Badan Penghubung	109.363.038,20	-
33	Inspektorat	132.044.997,54	-
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	18.036.341,58	-
	Jumlah	**4.319.425.579,13**	**-**

5.3.1.1.9 Persediaan Rp315.883.508.388,02

Persediaan sebesar Rp315.883.508.388,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp350.191.210.978,03 mengalami **penurunan** sebesar (Rp34.307.702.590,00) atau (9,80%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Barang Pakai Habis	315.846.660.398,02	350.138.628.861,03
2	Barang Tak Habis Pakai	36.663.990,00	51.725.617,00
3	Barang Bekas Pakai	184.000,00	856.500,00
	Jumlah	**315.883.508.388,02**	**350.191.210.978,03**

5.3.1.1.9.1 Barang Pakai Habis Rp315.883.508.388,02

Barang Pakai Habis adalah barang yang sifatnya dipakai habis untuk keperluan dinas atau jangka waktu pemakaiannya kurang dari satu tahun yaitu sebesar Rp315.883.508.388,02 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp350.138.628.861,03 mengalami **penurunan** sebesar (Rp34.291.968.463,00) atau (9,79%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bahan	24.998.064.293,69	27.829.819.853,14
2	Suku Cadang	11.719.784.532,71	60.526.337.235,25
3	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	121.204.057.287,08	108.561.803.251,50
4	Obat-obatan	135.280.930.289,50	129.304.929.386,57
5	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	7.422.222.755,72	12.127.279.740,16
6	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	8.854.369.300,00	-
7	Natura dan Pakan	5.226.531.855,58	10.456.008.087,74
8	Persediaan Penelitian	1.140.700.083,74	1.316.682.469,66
9	Persediaan dalam Proses	-	15.768.837,00
	Jumlah	**315.846.660.398,02**	**350.138.628.861,02**

5.3.1.1.9.1.1 Bahan Rp24.998.064.293,69

Bahan sebesar Rp24.998.064.293,69 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.829.819.853,14 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.831.755.559,45) atau (10,18 %). Komponen bahan antara lain bahan bangunan dan konstruksi, bahan kimia, bahan bakar dan pelumas, bahan/bibit tanaman, bahan/bibit ternak dan ikan, serta bahan lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.507.896.264,80	2.586.340.353,29
2	Dinas Kesehatan	4.442.264.051,90	7.708.948.356,11
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	196.763.943,93	2.522.474.233,57

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	1.992.328.844,70	1.521.162.004,48
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	134.551.174,42	144.912.785,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	25.909.838,86	71.754.195,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	493.497.198,80	295.676.240,20
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.374.375,00	3.319.171,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	17.302.510,00	19.338.910,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.276.688.448,60	2.218.268.764,50
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.007.714.645,00	558.664.700,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	10.850.000,00	10.850.000,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	165.460.450,00	193.287.450,00
14	Dinas Sosial	40.184.000,00	49.230.000,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	122.916.900,00	59.987.000,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	540.803.987,17	1.992.877.476,10
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	250.000,00	2.750.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	3.751.966,00	5.116.678,00
19	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	13.000.000,00	-
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	288.747.355,74	395.145.108,39
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.295.392.471,00	6.419.098.395,00
22	Dinas Pertanian dan Perkebunan	661.384.382,77	667.129.982,50
23	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	70.000,00	847.500,00
24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	170.126.700,00	295.058.600,00
25	Sekretariat Daerah	-	1.321.750,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	263.858.185,00	6.835.200,00
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	320.775.000,00	79.425.000,00
28	Badan Penghubung	201.600,00	-
	Jumlah	**24.998.064.293,69**	**27.829.819.853,14**

5.3.1.1.9.1.2 Suku Cadang **Rp11.719.784.532,71**

Suku Cadang sebesar Rp11.719.784.532,71 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.526.337.235,25 mengalami **penurunan** sebesar (Rp48.806.552.702,54) atau (80,64%). Komponen Suku cadang antara lain suku cadang kedokteran, suku cadang alat laboratorium dan suku cadang alat bengkel dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.156.089.433,00	1.730.205.651,00
2	Dinas Kesehatan	8.060.515.728,71	43.821.810.877,38
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	571.144.724,00	13.914.808.405,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	407.840.276,78	85.108.011,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	342.000,00	111.000,00
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	5.077.342,00	4.881.351,00
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	21.110.603,62	40.198.994,67
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	52.296.574,60	227.271.890,20
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	16.078.755,00
10	Dinas Sosial	38.000,00	12.425.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	56.000,00	-
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.845.000,00	31.002.000,00
13	Dinas Perhubungan	55.737.000,00	31.879.000,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.312.500,00	-
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.344.000,00	2.429.300,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	365.670.350,00	443.988.000,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	10.460.000,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.365.000,00	153.679.000,00
	Jumlah	**11.719.784.532,71**	**60.526.337.235,25**

5.3.1.1.9.1.3 Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor **Rp121.204.057.287,08**

Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp121.204.057.287,08 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp108.561.803.251,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.642.254.035,58 atau 11,65%. Komponen alat/bahan untuk kegiatan kantor antara lain alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan cetak, bahan komputer, perabot kantor, alat listrik dan perlengkapan dinas, perlengkapan pendukung olahraga, souvenir dan alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.164.750.462,93	30.097.399.425,96
2	Dinas Kesehatan	23.290.592.786,11	41.797.075.264,26
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	37.670.313.157,56	2.907.535.704,59
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	5.893.052.496,57	4.103.262.944,95
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	7.361.969.796,00	6.794.058.350,61
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.899.789.777,83	2.305.314.084,39
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.354.051.733,26	2.425.870.435,07
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	411.134.755,00	989.071.377,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	976.476.306,53	821.168.101,22
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	15.551.000,00	61.245.250,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	300.970.200,00	64.690.740,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.384.400,00	798.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	45.639.000,00	153.858.500,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.035.963.128,40	2.672.154.054,40
15	Dinas Sosial	109.109.400,00	210.579.650,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.849.100,00	24.198.262,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.521.000,00	8.402.220,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	26.033.992,00	-
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	37.191.500,00	126.327.700,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	12.784.000,00	27.654.690,80
21	Dinas Perhubungan	373.313.264,00	637.516.936,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	605.000,00	31.176.200,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	60.041.051,00	24.541.500,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	64.063.500,00	31.277.625,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	126.020.690,00	732.969.500,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.459.375,00	45.919.500,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	56.617.949,39	140.171.778,85
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.257.073.146,00	3.633.741.943,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	105.738.785,00	376.075.657,90
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.052.200,00	4.941.050,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	206.630.071,00	187.515.192,00
32	Sekretariat Daerah	6.238.400,00	7.294.000,00
33	Sekretariat DPRD	14.144.000,00	-
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.005.000,00	24.624.500,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.107.005.192,50	6.897.066.808,50
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	30.615.000,00	58.012.400,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	30.460.947,00	39.911.625,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	71.465.874,00	82.689.780,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.607.000,00	-
40	Badan Penghubung	3.891.000,00	6.007.000,00
41	Inspektorat	12.914.850,00	1.000.000,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.967.000,00	8.685.500,00
	Jumlah	**121.204.057.287,08**	**108.561.803.251,50**

Di dalam Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp121.204.057.287,08 juga termasuk SKKP pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

SKPD / UPPD	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	241.000,00	687,50	165.687.500,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	80.000,00	687,50	55.000.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Blangko Pajak AP.01 (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).17 [SET]	11.000,00	1.060,00	11.660.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	1.000,00	2.200,00	2.200.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Blangko Pajak AP.03 (Tanda Bukti Pembayaran AP).17 [SET]	11.000,00	1.100,00	12.100.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Blangko Pajak AP.04 (Surat Tagihan Pajak Daerah).17 [SET]	11.250,00	840,00	9.450.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	STS.Surat Tanda Setoran.17 [BUKU]	460,00	138.600,00	63.756.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Blangko DP.3 [RIM]	18,00	250.000,00	4.500.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	STS.Surat Tanda Setoran.18 [BUKU]	3.000,00	66.050,00	198.150.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Surat Ketetapan Retribusi Daerah (RD 04 2017) [SET]	67.750,00	360,00	24.390.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD 04 .A (2017) [SET]	71.000,00	448,00	31.808.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Buku Tanda Bukti Setor Retribusi RD.07 (2017) [SET]	73.000,00	360,00	26.280.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Buku Tanda Bukti Setor Retribusi RD.07.A (2017) [SET]	69.000,00	448,00	30.912.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah RD.01 (2017) [SET]	70.500,00	316,00	22.278.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD.02 (2017) [SET]	55.400,00	360,00	19.944.000,00
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH (INDUK)	Tanda Bukti Pembayaran RD 03 (2017) [SET]	50.750,00	360,00	18.270.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.620,00	687,50	1.113.750,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KOTA SEMARANG I	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KOTA SEMARANG II	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	1.000,00	1.800,00	1.800.000,00
UPPD KAB SEMARANG	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	100,00	360,00	36.000,00
UPPD KAB SEMARANG	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD.02 (2017) [SET]	200,00	360,00	72.000,00
UPPD KAB SEMARANG	Tanda Bukti Pembayaran RD 03 (2017) [SET]	250,00	360,00	90.000,00
UPPD KOTA SALATIGA	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	1.000,00	1.320,00	1.320.000,00
UPPD KOTA SALATIGA	BLANGKO PAJAK AP 01 [BUKU]	250,00	350,00	87.500,00
UPPD KOTA SALATIGA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH(SKRD) [SET]	600,00	200,00	120.000,00
UPPD KOTA SALATIGA	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [SET]	12,00	97.500,00	1.170.000,00
UPPD KOTA SALATIGA	BLANGKO PAJAK AP 02 [LEMBAR]	1.250,00	200,00	250.000,00
UPPD KAB DEMAK	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	370,00	663,00	245.310,00
UPPD KAB GROBOGAN	BLANGKO PAJAK AP 01 [BUKU]	100,00	915,00	91.500,00
UPPD KAB GROBOGAN	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [BUKU]	150,00	3.164,00	474.600,00
UPPD KAB GROBOGAN	BLANGKO PAJAK AP 04 [BUKU]	100,00	1.100,00	110.000,00

SKPD / UPPD	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
UPPD KAB GROBOGAN	BLANGKO PAJAK AP 04 [BUKU]	250,00	1.100,00	275.000,00
UPPD KAB GROBOGAN	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	607,00	915,00	555.405,00
UPPD KAB GROBOGAN	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	500,00	1.322,00	661.000,00
UPPD KAB GROBOGAN	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN RD.06 [SET]	150,00	705,00	105.750,00
UPPD KAB GROBOGAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RD.04 [SET]	300,00	1.200,00	360.000,00
UPPD KOTA SURAKARTA	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [BUKU]	17,00	97.200,00	1.652.400,00
UPPD KAB KLATEN	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	550,00	550,00	302.500,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	53.184,00	687,50	36.564.000,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	2.978,00	687,50	2.047.375,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	60.000,00	687,50	41.250.000,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	10.000,00	687,50	6.875.000,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAERAH (SPTRD)/PERMOHONAN [SET]	300,00	300,00	90.000,00
UPPD KAB KLATEN	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	700,00	360,00	252.000,00
UPPD KAB KLATEN	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	300,00	300,00	90.000,00
UPPD KAB KLATEN	BLANGKO PAJAK AP.01 [SET]	650,00	650,00	422.500,00
UPPD KAB KLATEN	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [SET]	1.800,00	1.875,00	3.375.000,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	300,00	300,00	90.000,00
UPPD KAB KLATEN	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	175,00	175,00	30.625,00
UPPD KAB KLATEN	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN RD.06 [SET]	400,00	400,00	160.000,00
UPPD KAB KLATEN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RD.04 [SET]	300,00	300,00	90.000,00
UPPD KAB KLATEN	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	1.090,00	1.090,00	1.188.100,00
UPPD KAB KLATEN	Blangko Pajak AP.04 (Surat Tagihan Pajak Daerah).17 [SET]	300,00	300,00	90.000,00
UPPD KAB KLATEN	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD 04 .A (2017) [SET]	250,00	250,00	62.500,00
UPPD KAB KLATEN	Buku Tanda Bukti Setor Retribusi RD.07 (2017) [SET]	50,00	50,00	2.500,00
UPPD KAB KLATEN	Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah RD.01 (2017) [SET]	800,00	316,00	252.800,00
UPPD KAB KLATEN	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD.02 (2017) [SET]	850,00	360,00	306.000,00
UPPD KAB SRAGEN	SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH [SET]	455,00	662,00	301.210,00
UPPD KAB SRAGEN	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	300,00	710,00	213.000,00
UPPD KAB SRAGEN	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	50,00	800,00	40.000,00
UPPD KAB SRAGEN	Blangko Pajak AP.01 (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).17 [SET]	150,00	600,00	90.000,00
UPPD KAB SRAGEN	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	450,00	600,00	270.000,00
UPPD KAB SRAGEN	Pengantar Penyetoran Penerimaan (C.III.2).18 [SET]	550,00	980,00	539.000,00
UPPD KAB SUKOHARJO	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [LEMBAR]	293,00	663,00	194.259,00
UPPD KAB SUKOHARJO	BLANGKO STS/SURAT TANDA SETOR [LEMBAR]	600,00	1.975,00	1.185.000,00
UPPD KAB SUKOHARJO	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (RD.04) [LEMBAR]	137,00	860,00	117.820,00
UPPD KAB SUKOHARJO	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [LEMBAR]	393,00	360,00	141.480,00
UPPD KAB SUKOHARJO	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	274,00	1.400,00	383.600,00
UPPD KAB SUKOHARJO	Blangko Pajak AP.03 (Tanda Bukti Pembayaran AP).17 [SET]	459,00	980,00	449.820,00
UPPD KAB SUKOHARJO	Pengantar Penyetoran Penerimaan (C.III.2).18 [SET]	24,00	1.250,00	30.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	BLANGKO PAJAK AP 01 (SKPD AP) [LEMBAR]	250,00	630,00	157.500,00
UPPD KAB WONOGIRI	BLANGKO PAJAK AP 03 [LEMBAR]	1.000,00	1.100,00	1.100.000,00

SKPD / UPPD	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
UPPD KAB WONOGIRI	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [LEMBAR]	900,00	670,00	603.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	BLANGKO STS/SURAT TANDA SETOR [LEMBAR]	700,00	1.320,00	924.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RD 01 [LEMBAR]	200,00	800,00	160.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RD 02 [LEMBAR]	50,00	360,00	18.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP) RD 03 [LEMBAR]	50,00	360,00	18.000,00
UPPD KAB WONOGIRI	BLANGKO PAJAK AP 02 [LEMBAR]	800,00	1.300,00	1.040.000,00
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	15.721,00	687,50	10.808.187,50
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB BOYOLALI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	40.000,00	687,50	27.500.000,00
UPPD KAB PATI	SURAT SETORAN PAJAK [BUKU]	14,00	75.500,00	1.057.000,00
UPPD KAB PATI	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [BUKU]	18,00	1.250,00	22.500,00
UPPD KAB PATI	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.736,00	687,50	1.193.500,00
UPPD KAB PATI	BLANGKO PAJAK ABT 03 [SET]	1.500,00	870,00	1.305.000,00
UPPD KAB PATI	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	3.850,00	800,00	3.080.000,00
UPPD KAB PATI	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	1.050,00	1.800,00	1.890.000,00
UPPD KAB PATI	BLANGKO SPTRD (RD.01) [SET]	350,00	600,00	210.000,00
UPPD KAB PATI	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	2.450,00	800,00	1.960.000,00
UPPD KAB PATI	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [LEMBAR]	500,00	663,00	331.500,00
UPPD KAB PATI	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN RD.06 [SET]	850,00	800,00	680.000,00
UPPD KAB PATI	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RD.04 [SET]	700,00	1.200,00	840.000,00
UPPD KAB BLORA	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	274,00	663,30	181.744,20
UPPD KAB BLORA	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	1,00	655,80	655,80
UPPD KAB BLORA	Blangko Pajak AP.01 (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).17 [SET]	200,00	915,00	183.000,00
UPPD KAB BLORA	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	500,00	1.400,00	700.000,00
UPPD KAB BLORA	Blangko Pajak AP.03 (Tanda Bukti Pembayaran AP).17 [SET]	250,00	980,00	245.000,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	1.000,00	1.320,00	1.320.000,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO SURAT SETORAN PAJAK [BUKU]	8,00	75.500,00	604.000,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO PAJAK AP 01 [BUKU]	200,00	915,00	183.000,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	500,00	663,00	331.500,00
UPPD KAB REMBANG	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	2.973,00	687,50	2.043.937,50
UPPD KAB REMBANG	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	150,00	360,00	54.000,00
UPPD KAB REMBANG	SKKP 2022 [LEMBAR]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB REMBANG	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [SET]	1.050,00	1.582,00	1.661.100,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO SPTRD (RD.01) [SET]	200,00	600,00	120.000,00
UPPD KAB REMBANG	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RD 01 [LEMBAR]	250,00	316,00	79.000,00
UPPD KAB REMBANG	BLANGKO PAJAK AP 02 [LEMBAR]	500,00	2.200,00	1.100.000,00
UPPD KAB JEPARA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH / SKRD [BUKU]	349,00	1.227,00	428.223,00
UPPD KAB JEPARA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH / SKRD [BUKU]	1,00	777,00	777,00

SKPD / UPPD	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
UPPD KAB JEPARA	RETRIBUSI RD 06 [BUKU]	200,00	676,72	135.344,00
UPPD KAB JEPARA	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [LEMBAR]	468,00	675,00	315.900,00
UPPD KOTA PEKALONGAN	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	100,00	360,00	36.000,00
UPPD KOTA PEKALONGAN	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	100,00	360,00	36.000,00
UPPD KOTA PEKALONGAN	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	498,00	663,00	330.174,00
UPPD KOTA PEKALONGAN	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	16,00	1.975,00	31.600,00
UPPD KAB PEMALANG	SURAT TANDA SETOR/BLANGKO STS [LEMBAR]	500,00	1.975,00	987.500,00
UPPD KAB PEMALANG	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	1.000,00	800,00	800.000,00
UPPD KAB PEMALANG	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	950,00	800,00	760.000,00
UPPD KAB PEMALANG	BLANGKO RD 03 [SET]	100,00	800,00	80.000,00
UPPD KOTA TEGAL	SURAT SETORAN PAJAK [BUKU]	13,00	75.500,00	981.500,00
UPPD KOTA TEGAL	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	48,00	675,00	32.400,00
UPPD KOTA TEGAL	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RD 02 [LEMBAR]	500,00	360,00	180.000,00
UPPD KOTA TEGAL	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP) RD 03 [LEMBAR]	50,00	800,00	40.000,00
UPPD KOTA TEGAL	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (TBP) RD 03 [LEMBAR]	500,00	360,00	180.000,00
UPPD KOTA TEGAL	PENGANTAR PENYETOR PENERIMAAN (C.III.2) [LEMBAR]	1.150,00	1.250,00	1.437.500,00
UPPD KAB TEGAL	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	50,00	360,00	18.000,00
UPPD KAB TEGAL	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	750,00	1.410,00	1.057.500,00
UPPD KAB TEGAL	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	4,00	65.800,00	263.200,00
UPPD KAB TEGAL	BLANGKO AP.02 [SET]	100,00	1.485,00	148.500,00
UPPD KAB TEGAL	BLANGKO SPTRD (RD.01) [SET]	100,00	800,00	80.000,00
UPPD KAB TEGAL	BLANGKO SKRD RD.02 [SET]	50,00	360,00	18.000,00
UPPD KAB BREBES	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) B.9.3 [BUKU]	69,00	90.000,00	6.210.000,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH / SKRD [BUKU]	7,00	800,00	5.600,00
UPPD KAB BREBES	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	1.000,00	663,00	663.000,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	20.474,00	687,50	14.075.875,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	20.000,00	687,50	13.750.000,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB BREBES	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	30.000,00	687,50	20.625.000,00
UPPD KAB BREBES	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	8,00	800,00	6.400,00
UPPD KAB BREBES	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	939,00	1.400,00	1.314.600,00
UPPD KAB BREBES	Blangko Pajak AP.03 (Tanda Bukti Pembayaran AP).17 [SET]	789,00	980,00	773.220,00
UPPD KAB CILACAP	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.319,00	687,50	906.812,50
UPPD KAB PURBALINGGA	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.000,00	687,50	687.500,00
UPPD KAB PURBALINGGA	BLANGKO PAJAK AP.01 [LEMBAR]	200,00	915,00	183.000,00
UPPD KAB PURBALINGGA	BLANGKO PAJAK AP. 03 [LEMBAR]	200,00	980,00	196.000,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	400,00	1.315,25	526.100,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	450,00	663,00	298.350,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	650,00	980,00	637.000,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN RD.06 [SET]	250,00	800,00	200.000,00

SKPD / UPPD	Rincian	Jumlah	Harga Satuan	Harga Total
UPPD KAB BANJARNEGARA	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (RD.04) [LEMBAR]	250,00	1.200,00	300.000,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	Blangko Pajak AP.01 (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).17 [SET]	200,00	915,00	183.000,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	Blangko Pajak AP.02 (SKPD AP).17 [SET]	300,00	1.400,00	420.000,00
UPPD KAB BANJARNEGARA	Blangko Pajak AP.04 (Surat Tagihan Pajak Daerah).17 [SET]	200,00	840,00	168.000,00
UPPD KAB KEBUMEN	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	400,00	663,00	265.200,00
UPPD KAB KEBUMEN	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.000,00	687,50	687.500,00
UPPD KAB KEBUMEN	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	100,00	800,00	80.000,00
UPPD KAB KEBUMEN	BLANGKO PAJAK AP 03 [LEMBAR]	600,00	980,00	588.000,00
UPPD KAB KEBUMEN	BUKU TANDA SETOR RETRIBUSI RD.07 [SET]	150,00	1.200,00	180.000,00
UPPD KAB KEBUMEN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RD.04 [SET]	50,00	1.200,00	60.000,00
UPPD KAB KEBUMEN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH RD.04 [SET]	100,00	1.200,00	120.000,00
UPPD KAB PURWOREJO	TANDA BUKTI PEMBAYARAN (RD.03) [SET]	50,00	220,00	11.000,00
UPPD KAB PURWOREJO	SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	25,00	112.500,00	2.812.500,00
UPPD KAB PURWOREJO	Surat Ketetapan Retribusi Daerah RD.02 (2017) [SET]	150,00	220,00	33.000,00
UPPD KAB WONOSOBO	BLANGKO SURAT TANDA SETORAN (STS) [SET]	28,00	66.000,00	1.848.000,00
UPPD KAB WONOSOBO	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [SET]	515,00	675,00	347.625,00
UPPD KAB WONOSOBO	SURAT KETETAPAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN (SKKP) [SET]	1.000,00	687,50	687.500,00
UPPD KAB WONOSOBO	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH(SKRD) [SET]	6,00	360,00	2.160,00
UPPD KAB WONOSOBO	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	1.100,00	980,00	1.078.000,00
UPPD KAB WONOSOBO	BLANGKO SPTRD (RD.01) [SET]	5,00	30.000,00	150.000,00
UPPD KAB WONOSOBO	Blangko Pajak AP.01 (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah).17 [SET]	5,00	45.750,00	228.750,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO SURAT SETORAN PAJAK [BUKU]	7,00	75.500,00	528.500,00
UPPD KAB KARANGANYAR	PENGANTAR PENYETORAN PENERIMAAN (C.III.2) [BUKU]	20,00	97.200,00	1.944.000,00
UPPD KAB KARANGANYAR	SURAT PEMBERITAHUAN RETRIBUSI DAEARH [SET]	800,00	720,50	576.400,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO PAJAK AP 03 [SET]	50,00	925,00	46.250,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO AP.02 [SET]	50,00	3.997,20	199.860,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO SPTRD RD01 [SET]	50,00	810,00	40.500,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO PAJAK AP 03 [LEMBAR]	1.000,00	933,00	933.000,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO SKPD ALAT BERAT [LEMBAR]	540,00	663,00	358.020,00
UPPD KAB KARANGANYAR	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RD 02 [LEMBAR]	250,00	3.987,00	996.750,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BLANGKO PAJAK AP 02 [LEMBAR]	650,00	1.600,42	1.040.273,00
UPPD KAB KARANGANYAR	BUKU TANDA BUKTI PEMBAYARAN RD.06 [SET]	700,00	705,00	493.500,00
Jumlah		**1.610.514,00**		**1.278.145.792,50**

5.3.1.1.9.1.4 Obat-Obatan **Rp135.280.930.289,50**

Obat-Obatan sebesar Rp135.280.930.289,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp129.304.929.386,57 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 5.976.000.902,93 atau 4,62% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	599.097.965,11	572.132.409,00
2	Dinas Kesehatan	44.275.689.465,72	59.238.410.932,02
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	31.174.325.210,96	27.882.224.794,87
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	47.611.959.893,53	29.488.946.692,19
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	5.368.897.618,45	5.190.350.014,30

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	941.948.885,10	1.082.246.165,25
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	540.760.159,28	448.373.797,68
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	766.389.171,81	1.081.701.114,85
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.703.757.680,54	1.188.451.813,21
10	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.549.920,00
11	Dinas Sosial	15.125.766,00	13.122.100,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	4.050.000,00
13	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	120.281.500,00	23.366.500,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.341.500,00	10.878.000,00
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.118.656.642,00	2.982.140.224,20
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	30.341.989,00	90.404.069,00
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	129.542,00	-
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	610.000,00
19	Sekretariat Daerah	1.701.000,00	-
20	Sekretariat DPRD	1.769.800,00	2.208.100,00
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.756.500,00	3.762.740,00
	Jumlah	**135.280.930.289,50**	**129.304.929.386,57**

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi terdapat persediaan yang kadaluarsa diungkap dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan kadaluarsa per 31 Desember 2024 pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa obat-obatan dan alat kesehatan sebesar Rp5.663.912.748,79 terdiri dari:

Persediaan Kadaluarsa/Rusak
Obat, Bahan Medis dan Alat Kesehatan Habis Pakai
di Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Tengah
per 31 Desember 2024

No	OPD	Obat/Reagen	Alkes dan Bahan Habis Pakai
1	Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah		
	2024	492.593.322,09	4.044.321.870,76
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta		
	2024	562.529.610,80	354.565.485,59
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
	2024	133.089.359,89	13.745.308,00
4	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang		
	2024	18.323.948,00	17.210.173,00
5	RSUD Dr. Rehatta Jepara		
	2024	14.390.421,00	-
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang		
	2024	174.559,00	-
7	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta		
	2024	8.206.498,88	-
8	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi		
	2024	4.762.191,78	-
Total		**1.234.069.911,44**	**4.429.842.837,35**

5.3.1.1.9.1.5 Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Rp7.422.222.755,72

Persediaan untuk Dijual/Diserahkan sebesar Rp7.422.222.755,72 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.127.279.740,11 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.705.056.984,39) atau (38,79%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.405.267.072,72	1.961.051.987
2	Dinas Kesehatan	133.996.558,00	240.779.253,00
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	840.374.600,00	343.710.000,00
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.300.000,00	-
6	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.327.791.525,00	8.777.178.500,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	708.493.000,00	804.560.000,11
	Jumlah	**7.422.222.755,72**	**12.127.279.740,11**

5.3.1.1.9.1.6 Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Rp8.854.369.300,00

Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga sebesar Rp8.854.369.300,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.854.369.300,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.854.369.300,00	-
	Jumlah	**8.854.369.300,00**	**-**

5.3.1.1.9.1.7 Natura dan Pakan Rp5.226.531.855,58

Natura dan Pakan sebesar Rp5.226.531.855,58 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.456.008.087,74 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.229.476.232,16) atau (-50,01%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	218.355.514,00	215.685.778,00
2	Dinas Kesehatan	281.593,60	76.392.295,20
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	275.672.985,00	53.962.919,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	337.954.709,93	251.254.566,40
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	137.111.266,57	160.152.519,63
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	22.145.561,00	26.369.474,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	190.420.405,00	43.555.894,75
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	31.023.250,00	448.814.866,50
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	26.060.910,00	65.757.211,00
10	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.000,00	220.191.000,00
11	Dinas Sosial	20.205.260,00	9.813.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	2.430.242.800,00	5.488.954.625,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.800.000,00	53.423.457,00
14	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.000.000,00	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.175.000,00	-
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	117.476.940,48	276.341.614,60
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.368.392.160,00	3.052.900.266,66
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	193.500,00	12.438.600,00
	Jumlah	**5.226.531.855,58**	**10.456.008.087,74**

5.3.1.1.9.1.8 Persediaan Penelitian **Rp1.140.700.083,74**

Persediaan Penelitian sebesar Rp1.140.700.083,74 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.316.682.469,66 mengalami **penurunan** sebesar (Rp175.982.385,92) atau (13,37%). Komponen persediaan penelitian yaitu untuk penelitian biologi dan teknologi dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.875.980,00	28.990.980,00
2	Dinas Kesehatan	-	4.812.800,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	125.641.000,00	208.570.720,00
4	Dinas Kelautan dan Perikanan	640.314.734,74	666.529.600,66
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	43.750.000,00	57.850.000,00
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	311.118.369,00	349.928.369,00
	Jumlah	**1.140.700.083,74**	**1.316.682.469,66**

5.3.1.1.9.1.9 Persediaan dalam Proses **Rp0,00**

Persediaan dalam Proses sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.768.837,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.768.837,00) atau (100,0%) dengan rincian sebagai berikut:

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Dinas Pertanian dan Perkebunan	-	15.768.837,00
Jumlah	**-**	**15.768.837,00**

5.3.1.1.9.2 Barang Tak Habis Pakai **Rp36.663.990,00**

Persediaan Barang Tak Habis Pakai merupakan barang untuk keperluan dinas yang jangka waktu pemakaiannya lebih dari satu tahun yaitu sebesar Rp36.663.990,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp51.725.617,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp15.061.627,00) atau (29,12 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Komponen	195.000,00	789.000,00
2	Pipa	36.468.990,00	50.936.617,00
	Jumlah	**36.663.990,00**	**51.725.617,00**

5.3.1.1.9.2.1 Komponen **Rp195.000,00**

Persediaan Komponen sebesar Rp195.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp789.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp594.000,00) atau (75,29 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	195.000,00	789.000,00
	Jumlah	**195.000,00**	**789.000,00**

5.3.1.1.9.2.2 Pipa **Rp36.468.990,00**

Persediaan Pipa sebesar Rp36.468.990,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp50.936.617,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.467.627,00) atau (28,40%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.132.490,00	40.844.717,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
4	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	894.000,00	-

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
5	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	7.442.500,00	9.641.900,00
6	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	450.000,00
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
	Jumlah	**36.468.990,00**	**50.936.617,00**

5.3.1.1.9.3 Barang Bekas Pakai Rp184.000,00

Persediaan Barang Bekas Pakai merupakan barang bekas yang merupakan sisa dari suatu kegiatan yang masih dapat digunakan kembali yaitu sebesar Rp184.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp856.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp672.500,00) atau (78,52 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Komponen Bekas dan Pipa Bekas	184.000,00	856.500,00
	Jumlah	**184.000,00**	**856.500,00**

5.3.1.1.9.3.1 Komponen Bekas dan Pipa Bekas Rp184.000,00

Persediaan Komponen Bekas dan Pipa Bekas sebesar Rp184.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp856.500,00 mengalami penurunan sebesar (Rp672.500,00) atau (78,52 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	184.000,00	156.500,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	700.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-
		184.000,00	**856.500,00**

5.3.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Rp7.929.016.426.114,62

Investasi Jangka Panjang sebesar Rp7.929.016.426.114,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.761.580.723.318,41 mengalami **kenaikan** sebesar Rp167.435.702.796,21 atau 2,16% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	7.929.016.426.114,62	7.761.580.723.318,41
	Jumlah	**7.929.016.426.114,62**	**7.761.580.723.318,41**

5.3.1.2.1 Investasi Jangka Panjang Permanen Rp7.929.016.426.114,62

Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp7.929.016.426.114,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.761.580.723.318,41 mengalami **kenaikan** sebesar Rp167.435.702.796,21 atau 2,16% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal	7.929.016.426.114,62	7.761.580.723.318,41
2	Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
	Jumlah	**7.929.016.426.114,62**	**7.761.580.723.318,41**

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal **Rp7.929.016.426.114,62**

Penyertaan Modal sebesar Rp7.929.016.426.114,62 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 7.761.580.723.318,41 mengalami kenaikan sebesar Rp167.435.702.796,21 atau 2,16% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	5.477.307.326.730,39	5.348.551.021.932,75
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BPR & BKK	804.026.122.816,69	813.777.628.300,60
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Jateng	233.623.139.314,25	225.696.656.276,25
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Klaten	-	-
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD BKK Pringsurat	-	-
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT PRPP	46.144.593.329,52	47.891.158.471,38
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PDAB Tirta Utama	168.108.759.266,18	160.491.526.008,00
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Agro Berdikari	177.308.842.712,41	173.344.053.223,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	557.030.063.296,26	550.771.666.888,15
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jawa Tengah Petrolium Energy	259.635.702.789,00	239.358.074.967,00
12	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida	175.425.875.859,92	171.292.937.251,28
13	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.446.000.000,00	10.446.000.000,00
	Jumlah	**7.929.016.426.114,62**	**7.761.580.723.318,41**

Metode penilaian investasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggunakan metode sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP 6 Paragraf 36 dan 37. Seluruh Investasi Permanen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT Asuransi Bangun Askrida dan PT Kawasan Industri Wijayakusuma yang menggunakan metode biaya. Berikut di bawah ini perhitungan nilai dengan menggunakan metode ekuitas:

Investasi Permanen - Penyertaan Modal Audited TA 2023	**7.761.580.723.318,41**
Tambah:	
Penyertaan Modal TA 2024	20.700.000.000,00
Penyesuaian Investasi Permanen BUMD	146.735.702.796,21
Pengakuan atas Laba BUMD/BUMN	895.834.519.652,31
Jumlah Tambah	1.063.270.222.448,52
Kurang:	
Divestasi PT SPTJ	-
Penyesuaian Investasi Permanen BUMN	-
Pengakuan Rugi BUMD	(17.424.384.007,13)

Penerimaan Dividen	(687.813.166.201,00)
Penyesuaian Pengakuan Laba/Rugi	(190.596.969.444,18)
Jumlah Kurang	(895.834.519.652,31)
Investasi Permanen - Penyertaan Modal TA 2024	**7.929.016.426.114,62**

Total Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada BUMD maupun non BUMD sampai dengan Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

Cost Method :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bank Jateng	2.205.289.000.000,00	2.205.289.000.000,00
2	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK (Perseroda) Se-Jateng	428.170.000.000,00	428.170.000.000,00
3	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	186.290.000.000,00	186.290.000.000,00
4	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BKK Klaten (Perseroda)	6.910.000.000,00	6.910.000.000,00
5	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BKK Pringsurat (Perseroda)	3.350.000.000,00	3.350.000.000,00
6	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Asuransi Bangun Askrida	19.960.000.000,00	19.960.000.000,00
7	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	64.252.200.000,00	64.252.200.000,00
8	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	109.197.500.000,00	109.197.500.000,00
9	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	165.309.044.134,78	100.000.000.000,00
10	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	375.392.000.000,00	375.392.000.000,00
11	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	54.887.500.000,00	54.887.500.000,00
12	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jamkrida Jateng	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00
13	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	10.446.000.000,00	10.446.000.000,00
	Jumlah	**3.769.453.244.134,78**	**3.704.144.200.000,00**

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di BUMD baik berupa pengurangan maupun penambahan modal adalah sebagai berikut :

1. PT Bank Jateng

   Setoran modal Pemda yang belum disetujui RUPS dicatat sebagai Dana Setoran Modal dan tidak diperhitungkan dividen (tidak diberikan imbal Jasa) sesuai dengan POJK Nomor 11/POJK.03/2016 pasal 14 Ayat (1) huruf a, angka 7 yang antara lain menyatakan :

   - Dana Setoran Modal adalah dana yang telah disetor penuh untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti pelaksanaan rapat umum pemegang saham maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang

- ditempatkan pada rekening khusus (*escrow account*) yang tidak diberikan imbal hasil;

UU PT pasal 71 ayat (2) bahwa Dividen diberikan kepada Pemegang Saham (pemilik Modal Disetor). Dana Setoran Modal belum menjadi Modal Disetor, sehingga belum dapat dijadikan dasar pembagian dividen.

Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Jateng tanggal 17 April 2025 memutuskan :

- Menyetujui setoran tambahan modal Pemkab/Pemkot sebesar Rp.155.739.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) setelah adanya tambahan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar) yang berasal dari konversi deviden sehingga kepemilikan modal disetor Bank Jateng menjadi:
  a. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.2.455.289.000.000,- (dua trilyun empat ratus lima puluh lima milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) atau 51,01%.
  b. Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Jawa Tengah sebesar Rp.2.357.805.000.000,- (dua trilyun tiga ratus lima puluh tujuh milyar delapan ratus lima juta rupiah) atau 89,99%.
- Rencana penambahan modal disetor harus terlebih dahulu mendapat keputusan dalam RUPS dengan memperhatikan komposisi kepemilikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai ketentuan paling rendah 51%.
- Memberikan wewenang dan kuasa sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk pelaksanaan keputusan penambahan modal tersebut

2. PT BPR BKK (Perseroda) Se Jawa Tengah

Berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/48 Tahun 2024 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Se-Jawa Tengah, telah dilakukan penyertaan modal pada 5 (lima) PT BPR BKK (Perseroda) dengan rincian sebagai berikut :

No.	PT BPR BKK (Perseroda)	Kabupaten/Kota	Nominal (Rp,00)
1.	Batang	Batang	Rp 1.000.000.000,00
2.	Kabupaten Pekalongan	Kabupaten Pekalongan	Rp 2.000.000.000,00
3.	Mandiraja	Banjarnegara	Rp 15.000.000.000,00
4.	Temanggung	Temanggung	Rp 1.900.000.000,00
5.	Tulung	Klaten	Rp 800.000.000,00
	Total		Rp 20.700.000.000,00

Penyertaan modal pada 5 (lima) PT BPR BKK (Perseroda) dilakukan untuk kebutuhan Pemenuhan ketentuan rasio kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio)* akibat dari perubahan kebijakan akuntansi SAK-ETAP menjadi SAK-EP yang menyebabkan timbulnya biaya Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dari sebelumnya Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP). Hal ini menyebabkan perlunya penguatan rasio CAR pada kelima PT BPR BKK (Perseroda) tersebut.

3. PT BPR BKK JATENG (Perseroda)

Pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dalam Pasal 2 disebutkan bahwa PT BPR BKK JATENG (Perseroda) yang merupakan penggabungan 29 (dua

puluh sembilan) PD BKK di Jawa Tengah diantaranya adalah PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dan pada RUPS-LB tanggal 2 Juli 2019, salah satu amanatnya menyebutkan bahwa RUPS menyetujui Penggabungan 27 PD BKK (tanpa PD BKK PRINGSURAT dan PD BKK KLATEN) menjadi PT BKK JAWA TENGAH.

Terhitung sejak tidak diikutkannya konsolidasi, maka PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dalam proses untuk likuidasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PD BKK PRINGSURAT
   - ✓ Berhenti Operasional dikarenakan tidak mempunyai likuiditas
   - ✓ Performa keuangan berhenti per 29 Juni 2019 (audited)
   - ✓ Nilai ekuitas PD BKK Pringsurat berdasarkan laporan keuangan per 29 Juni 2019 sebesar (Rp119.703.975.952)

b. PD BKK KLATEN
   - ✓ Beroperasional secara terbatas dan Perseroan untuk proses likuidasi serta menjaga kepercayaan nasabah;
   - ✓ Secara bertahap mengurangi jumlah pegawai dan beroreintasi pada efisiensi biaya dan menjaga posisi likuiditas.
   - ✓ Performa keuangan masih tercatat Perseroan dan tiap tahun dilakukan audit.
   - ✓ Nilai ekuitas PD BKK Klaten berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024 sebesar (Rp36.696.400.148)

Sampai dengan tanggal pemeriksaan, pada tanggal 16 Maret 2023 telah diundangkan Perda No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah, namun belum diundangkan Pergub untuk petunjuk pelaksanaannya. Klausul pembubaran dan likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dituangkan dalam pasal 76A.

Sebagai tindak lanjut telah dibuat draft Pergub tentang Pembubaran Dan Likuidasi PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten serta draft Tim Pembubaran dan Likuidasi serta penyusunan SOP.

Berdasarkan Hasil rapat paparan dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022 terkait penyelesaian permasalahan PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten Bahwa penyelesaian PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten diputuskan menggunakan opsi penyehatan yang memiliki tujuan untuk:

a. Penyelamatan simpanan/tabungan masyarakat/nasabah yang ada di PD BKK Pringsurat dan Klaten;
b. Terdapat potensi pergerakan ekonomi atau perputaran ekonomi sebesar penyertaan modal dan simpanan masyarakat;
c. Dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemprov. Jateng dan BUMD lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari hasil rapat dengan Bapak Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2022, Biro Perekonomian telah mengadakan rapat dan koordinasi dengan Biro Hukum Setda Prov. Jateng dan OJK Regional 3 Jateng dan DIY dengan pembahasan terkait:

a. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 06 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah BPR BKK Jawa Tengah, dengan ketentuan:

1) Memberlakukan Perseroan (merubah) Pasal 79 Perda 4/2017 tentang Pembentukan BPR BKK Jawa Tengah sebagai dasar hukum pendirian PD BKK Pringsurat dan Klaten dengan:
   a) Menghapuskan klausul pembubaran atas 2 PD BKK (pasal 76A);
   b) Menambahkan klausul penyehatan atas 2 PD BKK;
   c) Menambahkan klausul penyertaan modal/suntikan modal dalam rangka penyehatan;
2) Menambahkan klausul tentang status PD BKK setelah disehatkan menjadi BPR melalui merger dengan PT BPR BKK Jateng atau menjadi BPR yang mandiri.

b. Perubahan Perda 10/2019 Tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jawa Tengah nomor 14 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMN, dan Pihak Ketiga dengan menambahkan penyertaan modal kepada PD BKK Pringsurat dan Klaten.

Telah mengajukan perubahan Peraturan Daerah kepada Bampeperda DPRD melalui Surat Sekretaris Daerah:

a. Surat Nomor 180/0012294 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2022.
b. Surat Nomor 180/0003545 tanggal 27 Februari 2023 tentang Penyampaian Usulan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Tahun 2023

Untuk mengajukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMD, dan Pihak Ketiga.

Dengan terbitnya Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan di tanggal 12 Januari 2023, maka pada tanggal 21 Maret 2023 kami melakukan audensi dengan DPIP OJK KR 3 DIY & Yogyakarta untuk berdiskusi tentang peluang penggabungan dari PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten dengan BPR BKK setempat guna percepatan penyelesaian dengan berpedoman pada UU No.4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 28A pada ayat (1) yang menyebutkan bahwa BPR dapat melakukan Penggabungan dengan Perseroan keuangan mikro. Dalam hal ini, OJK akan melakukan koordinasi internal untuk mengakomodir usulan penggabungan dari Pemprov Jateng.

Proses pengajuan Usulan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah dan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada BUMD, BUMD, dan Pihak Ketiga masih dalam penundaan, karena berdasarkan :

a. Surat Kakanwil Kemenkumham Jateng nomor W.13-PP.04.02-485 tanggal 8 September 2023 perihal penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsep raperda menegaskan bahwa
   1) mengingat bahwa usulan pasal 79 raperda Perubahan kedua atas Perda 4 tahun 2017 tertulis bahwa "Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK di Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku **dengan pengecualian sepanjang mengatur PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten**"

2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2002 tentang PD BKK Usulan Peraturan Dasar sebagai payung hukum BUMD berupa PD BKK yang **telah dicabut** pada rencana merger PT BPR BKK Jateng melalui Perda 4 tahun 2017.
3) Rancangan perubahan perda perlu dipertimbangkan kembali karena menambah kalimat bercetak tebal pada poin 1. Berdasarkan surat Kakanwil Kemenkumham Jateng, Perda yang telah dicabut tidak bisa dihidupkan kembali. Sehingga bahasa "**dengan pengecualian sepanjang mengatur PD BKK Pringsurat dan PD BKK Klaten**" tidak bisa ditambahkan karena pasal 79 telah mencabut Perda 19 tahun 2022 tentang PD BKK dan pencabutan Perda tidak bisa dibatalkan.

b. Berdasarkan Dirjen Bina keuangan Daerah pada *Focus Group Discussion* dengan Bapemperda Prov. Jateng :
1) Dalam konteks Perda penyertaan modal untuk memfasilitasi penyehatan kedua PD BKK untuk menjadi LKM perlu dipertimbangkan kembali, karena sebagaimana pada PP 54 tahun 2017 bahwa penyertaan modal harus ditujukan untuk pengembangan bisnis perusahaan dan **bukan untuk pengembalian dana masyarakat**.
2) Terkait munculnya wacana perubahan perda untuk mengubah kedua PD BKK menjadi LKM harus melalui mekanisme perda baru sehingga membutuhkan waktu yang lama. Perubahan perda untuk mengubah kedua PD BKK menjadi LKM tidak bisa dilakukan karena **ketidaksesuaian substansi peraturan daerah**. Ketidaksesuaian ini terjadi karena Perda 6 tahun 2021 berjudul tentang pembentukan PT BPR BKK Jateng yang berarti perda tersebut merupakan dasar hukum pembentukan BPR bukan LKM.

Berdasarkan hasil penyajian kembali Laporan Keuangan PT BPR-BKK Mandiraja Kabupaten Banjarnegara dilakukan *restatement* atas pencatatan Tahun 2023. *Restatement* dikarenakan adanya koreksi laba dari OJK yaitu perbedaan kolektibilitas kredit dan nilai agunan kredit. Perbedaan ini berdampak terjadinya koreksi atas pengakuan Pendapatan Yang Akan Diterima (PYAD) kredit dan kekurangan pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) Kredit pada Laporan Posisi Keuangan, sedangkan pada Laporan Laba Rugi berdampak pada pengakuan Bunga Kontraktual Kredit, Beban PPAP Kredit, Beban Penyisihan PPAP Kredit, taksiran Pajak dan Laba semula sebesar Rp5.170.640.797,00 menjadi sebesar Rp1.374.935.005,00. Deviden yang telah disetorkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp923.114.501,00

4. PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda) / PT JTAB (Perseroda)

Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah / PD CMJT diubah bentuk hukumnya menjadi PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Jateng Agro Berdikari, dengan modal dasar sebesar Rp 200.000.000.000,-. Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, modal disetor paling sedikit sebesar 25% dari modal dasar atau Rp 50.000.000.000,-, sedangkan posisi modal disetor PD. CMJT saat itu sebesar Rp 31.861.846.791,-. Maka dalam Rapat Tahunan PD. CMJT tanggal 20 Juni 2022 (Akta Notaris Dewi Wikaningsih Nomor 136 Tanggal 20 Juni 2022) telah diputuskan pengalihan laba ditahan menjadi modal disetor Pemprov. Jateng sebesar Rp 68.138.153.209,- sehingga total modal disetor menjadi Rp 100.000.000.000,- dan memenuhi syarat untuk menjadi Perseroda (kemudian disahkan pendiriannya dengan Akta Pendirian PT. Jateng Agro Berdikari (Perseroda) Nomor 77 Tanggal 24 Januari 2023).

Di samping itu pada RUPS Tahunan tanggal 26 Juli 2023 (Akta Notaris Dewi Wikaningsih Nomor 111 tanggal 26 Juli 2023) ditetapkan pengalihan modal yang belum ditetapkan penggunaannya sebesar Rp 65.309.044.136,- menjadi modal disetor Pemprov. Jateng,

Pada tahun anggaran 2024 tidak dilakukan penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, sehingga posisi modal disetor s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp165.309.044.136,-.

5. PT Jateng Petro Energi (Perseroda) / PT JPEN (Perseroda)

PT JPEN (Perseroda) didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT JPEN (Perseroda) Nomor 29 tanggal 8 Oktober 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn) dengan modal dasar Rp100.000.000.000,00 yang terbagi atas 100.000 lembar saham. Dari modal dasar dimaksud telah disetorkan atau ditempatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 25% atau sejumlah 25.000 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp25.000.000.000,00 (memenuhi ketentuan minimal modal disetor Perseroan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sumber modal disetor Pemerintah Provinsi Jateng sebesar Rp25.000.000.000,00 berasal dari pengalihan saham Pemerintah Provinsi Jateng pada PT SPHC sebesar Rp10.223.766.000,00 atau setara sebanyak 10.200 lembar saham dan sebesar Rp14.776.234.000,00 atas pengalihan ekuitas dari PT SPHC yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai amanat RUPS LB PT SPHC Nomor 68 dan RUPS LB PT JPEN (Perseroda) Nomor 69 tanggal 12 November 2020 (Notaris Dewi Wikaningsih, SH, M.Kn).

Cadangan PT SPHC posisi sebelum 12 November 2020 atau sebelum menjadi anak Perseroan PT JPEN (Perseroda) adalah hak pemegang saham pada saat itu, yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Yakekar (proporsional sesuai proporsi saham). Cadangan PT SPHC posisi tanggal 11 November 2020 adalah sebesar US$4.925.902,44, yang merupakan hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar US$4.704.729,42 dan hak Yakekar sebesar US$221.173,02. Cadangan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah dialihkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT JPEN sebesar US$ 1.029.272,36 atau Rp14.776.234.000,00 (kurs Rp.14.356/ US$ 1 sesuai kurs yang berlaku pada saat realisasi), sehingga sisa Perseroan yang menjadi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar Rp US$3.675.457,06 atau Rp57.307.726.479,52 (kurs Rp.15.592,00/ US$ 1 sesuai hasil Laporan Keuangan Audited PT SPHC per 31 Desember 2022). Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 539/0002283 tanggal 3 Februari 2022 telah dilakukan reklasifikasi pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 yang semula dicatat pada akun kewajiban lain-lain ke akun ekuitas dengan pertimbangan guna memenuhi ketentuan Perseroan minimal 20% sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dengan tidak mengurangi hak Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Ekuitas PT SPHC terkonsolidasi dengan PT JPEN (Perseroda) dalam laporan keuangan konsolidasi dan saham PT JPEN dimiliki 100% oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. JPEN (Perseroda) sebesar Rp 14.887.500.000,- yang digunakan untuk pengembangan usaha yaitu pengembangan PLTS, niaga CNG serta kegiatan usaha migas dan penunjang lainnya (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 30 Desember 2022).

Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 tidak dilakukan penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, sehingga posisi modal disetor s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp54.887.500.000,-.

6. PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) / PT PRPP Jawa Tengah (Perseroda)

   Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. PRPP Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 25.000.000.000,- yang digunakan untuk pengurusan sertifikat dan peningkatan status tanah PT. PRPP (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 20 April 2022);

   Tidak ada penambahan penyertaan modal di tahun anggaran 2023 dan tahun 2024, sehingga posisi modal disetor Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp64.252.000.000,-.

7. PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda) / PT SPJT (Perseroda)

   Rapat Umum Pemegang Saham PT. Sarana Pembangunan Jawa Tengah (PT. SPJT) tanggal 31 Desember 2021 telah menyetujui dan mengesahkan pengurangan modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT sebesar Rp 474.000.000.000,- dan telah disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Tengah, sehingga modal disetor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PT. SPJT menjadi sebesar Rp 375.392.000.000,-. Hal ini didasarkan atas pertimbangan untuk mendorong manajemen PT. SPJT agar lebih mandiri, kreatif dan Perseroan terhadap bisnis yang potensial sehingga menghasilkan pendapatan usaha yang optimal dan tercipta efisiensi dalam pengelolaan Perseroan. Dana dapat dialihkan untuk pengembangan bisnis BUMD lain yang lebih potensial. Pengurangan modal disetor ini telah memperhitungkan bahwa Perseroan PT. SPJT masih memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu minimal 20% dari modal disetor.

   Bentuk hukum PT SPJT dirubah menjadi perseroda dengan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda).

   Tidak ada perubahan komposisi modal dalam peralihan PT SPJT menjadi PT SPJT (Perseroda) di tahun anggaran 2023 dan pada tahun anggaran 2024 tidak dilakukan penyertaan modal, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp375.392.000.000,-.

8. PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)

   Pada Tahun Anggaran 2022 telah diberikan tambahan penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) sebesar Rp 22.112.500.000,- yang digunakan untuk pembebasan lahan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yaitu SPAM Regional Wosusokas (disetujui dan disahkan dalam RUPS tanggal 31 Desember 2021).

   Pada tahun anggaran 2023 dan 2024 tidak ada penyertaan modal oleh Pemprov. Jateng, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp109.197.500.000,-.

9. PT Kawasan Industri Wijayakusuma

   Pada tanggal 12 Maret 2020, PT KIW mengajukan surat nomor: 44/S/KIW/3/2020 perihal Pengajuan Permohonan Penyertaan Modal Negara kepada Wakil Menteri II BUMN untuk melakukan pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah. Pada tanggal 06 Juli 2020, Menteri BUMN memberikan surat nomor: S-47/MBU/07/2020 kepada Menteri Keuangan yang berisi tentang Usulan Penambahan PMN Tunai pada BUMN dari APBN TA 2021 kepada PT KIW (Persero) sebesar Rp 1,5 T untuk Mendukung Proyek Strategis Nasional Pengembangan Kawasan Industri Batang Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 26 Oktober 2020, terbit Undang-Undang No. 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2021, 131erser dalam UU tersebut, PT KIW menjadi salah satu penerima dana tambahan PMN sebesar Rp977 Milyar.

Pada tanggal 28 Mei 2021, Ditandatanganinya Kajian Perseroan penambahan penyertaan modal negara pada Perseroan PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) Tahun Anggaran 2021 oleh Asdep Bidang Jasa Telekomunikasi dan Media dan Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Pada tanggal 30 Agustus 2021, Terbit Peraturan Presiden Nomor 88 tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT KIW.

Pada tanggal 30 September 2021, dilakukan valuasi saham dengan hasil laporan nomor 01001/2.0041-03/BS/03/0566/1/IX/2021 yang dilaksanakan oleh KJPP Dasa'at Yudhistira & Rekan. Nilai saham per lembar Rp15.355.450,-. Sehingga menyebabkan perubahan kepemilikan saham, yang mulanya Republik Indonesia 51,09%, Provinsi Jawa Tengah 40,39% dan Kabupaten Cilacap 8,52% menjadi Republik Indonesia 85,87%, Provinsi Jawa Tengah 11,67% dan Kabupaten Cilacap 2,46%.

Pada tanggal 17 Desember 2021, Dilaksanakan RUPS LB PT KIW secara sirkuler untuk memutuskan harga per lembar saham dan Perubahan AD ART. No. S-933/MBU/12/2021, 539/0017754, 538.3/08882/06 tanggal 17 Desember 2021.

Hingga 31 Desember 2024, Pemprov. Jateng belum melakukan penambahan setoran modal, maka posisi modal disetor oleh Pemprov. Jateng s.d. 31 Desember 2024 sebesar Rp10.446.000.000,00.

5.3.1.3 Aset Tetap **Rp26.620.736.197.275,90**

Aset Tetap sebesar Rp26.620.736.197.275,90 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.589.416.803.406,50 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.319.393.869,39 atau 0,12% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tanah	12.332.651.846.000,00	13.069.880.522.252,00
2	Peralatan dan Mesin	9.528.039.167.257,00	9.123.265.698.126,00
3	Gedung dan Bangunan	9.849.541.705.895,00	9.491.863.080.604,00
4	Jalan,Irigasi, dan Jaringan	12.507.048.034.410,00	11.586.304.551.545,00
5	Aset Tetap Lainnya	1.056.350.270.097,00	1.053.571.666.936,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	287.616.819.183,00	245.302.753.445,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(18.940.511.645.566,10)	(17.980.771.469.501,50)
	Jumlah	**26.620.736.197.275,90**	**26.589.416.803.406,50**

Nilai Aset tetap setelah dilakukan penyusutan sebesar (Rp18.940.511.645.566,10) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.175.487.568.983,53)	(6.993.741.824.982,95)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.651.567.872.774,62)	(2.460.821.947.012,16)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.110.161.814.096,63)	(8.523.100.854.470,81)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.294.389.711,32)	(3.106.843.035,58)
	Jumlah	**(18.940.511.645.566,10)**	**(17.980.771.469.501,50)**

Rincian mutasi aset tetap terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal **44.570.188.272.908,00**

Penambahan

Belanja Modal 1.731.895.192.444,00

Belanja Hutang	48.931.020,00
Belanja Barang/Jasa	71.152.149.779,00
Hibah	680.161.785.366,00
Hasil Usaha Mandiri	692.402.707,00
Mutasi Masuk	35.320.484.617,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	186.875.977.335,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	156.877.170.666,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	5.964.150,00
Koreksi	965.992.221.167,00
Jumlah	**3.829.022.279.251,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	35.320.484.617,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	186.875.977.335,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	1.466.799.408.195,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	157.996.113.135,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	16.658.068.192,00
Koreksi Belanja Modal	1.800.000.000,00
Koreksi Belanja Hutang	16.549.950,00
Koreksi Tahun Lalu	972.496.107.893,00
Jumlah	**2.837.962.709.317,00**
Saldo Akhir	**45.561.247.842.842,00**

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal adalah realisasi hasil pengadaan melalui belanja modal selama Tahun 2024.
b. Belanja Hutang adalah aset tetap yang diterima dari pengadaan aset tahun 2024 akan tetapi pelunasan pembayannya dilaksanakan tahun depan.
c. Belanja Barang/Jasa adalah kapitalisasi realisasi belanja barang/jasa yang dapat menambah nilai Aset Tetap selama Tahun 2024 sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
d. Hibah adalah aset tetap yang diterima dari Instansi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
e. Hasil Usaha Mandiri adalah aset yang dibeli dari Dana Usaha Mandiri Satuan Pendidikan Khusus Negeri
f. Reklasifikasi Masuk Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
g. Reklasifikasi Masuk Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset lainnya ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
h. Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi perpindahan dari Properti Investasi ke aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
i. Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel adalah aset ekstrakomtabel yang dicatatkan dalam Kartu Inventaris Barang atau aset tetap dikarenakan pemeliharaan sehingga meningkatkan nilai aset.
j. Koreksi/penilaian adalah salah catat atau penambahan nilai atas aset tetap.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

a. Reklasifikasi Keluar Aset Tetap adalah perpindahan sesama akun aset tetap karena penyesuaian jenis rekening aset tetap yang seharusnya.
b. Reklasifikasi Kurang Aset Lainnya adalah perpindahan dari aset tetap ke aset lainnya karena dikategorikan sebagai barang rusak berat, aset dikerjasamakan dan Aset Tak Berwujud.
c. Reklasifikasi Kurang Properti Investasi adalah perpindahan dari aset tetap ke Properti Investasi
d. Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel adalah aset tetap yang dikeluarkan dari Kartu Inventaris Barang atau kategori aset tetap dikarenakan nilai satuan aset tersebut dibawah nilai kapitalisasi aset tetap sesuai Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemda.
e. Koreksi Belanja Modal pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari jenis belanja lainnya.
f. Koreksi Belanja Hutang pengurangan nilai aset tetap dikarenakan perolehannya berasal dari tahun sebelumnya dan baru dibayarkan pada tahun selanjutnya.
g. Koreksi Tahun Lalu adalah salah catat atau pengurangan nilai atas aset tetap.

Nilai aset tetap sebesar Rp45.561.247.842.842,00 didalamnya belum termasuk aset pada sekolah-sekolah yang berasal dari hibah CSR yang belum ada Berita Acara Serah Terima (BAST) sebesar Rp9.631.807.980,00, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama Sekolah	Asal/Pemberi Hibah	Nilai Hibah
1	SMAN 1 Mijen Demak	Bank Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Tengah	117.900.000,00
2	SMAN 1 Mijen Demak	CV. Anindo Furniture	86.417.100,00
3	SMKN 1 Karimunjawa	PT. SPHC (Sarana Patra Hulu Cepeu)	128.161.050,00
4	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	41.235.612,00
5	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	368.942.910,00
6	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	7.770.000,00
7	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	21.737.050,00
8	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	11.776.100,00
9	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	50.547.664,00
10	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	25.765.320,00
11	SMKN 3 Kudus	PT DJARUM	41.235.612,00
12	SMKN 1 Jati	UPZ Disdikbud	30.000.000,00
13	SMAN 1 Tangen	UPZ Disdikbud	30.000.000,00
14	SMKN 5 Sukoharjo	PT. SGMW MOTOR INDONESIA	64.304.108,00
15	SMKN 1 Temanggung	PT. PRIMA TOP BOGA KUDUS	15.000.000,00
16	SMKN 1 Ngablak	PT. Aneka Sakti Bakti ASABA	700.000.000,00
17	SMKN 1 Karanganyar Purbalingga	PT. Penerbit Erlangga Purwokerto	6.000.000,00
18	SMKN 1 Karanganyar Purbalingga	CV Abata Purwokerto	9.000.000,00
19	SMKN 1 Karanganyar Purbalingga	PT Telkom Purwokerto	2.950.000,00
20	SMAN 2 Purbalingga	Yayasan Bahrain	1.523.871.000,00
21	SMAN 2 Purbalingga	Donatur warga	1.015.914.000,00
22	SMAN 2 Purbalingga	UPZ Provinsi Jawa Tengah	25.000.000,00
23	SMKN 1 Punggelan	Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI	2.535.076.900,00
24	SMKN 1 Punggelan	PT SGMW Motor Indonesia	31.152.054,00
25	SMKN 1 Warung Asem	Konsorsium (Perusahaan peduli vokasi)	2.742.051.500,00
Total			**9.631.807.980,00**

5.3.1.3.1 Tanah **Rp12.332.651.846.000,00**

Tanah sebesar Rp12.332.651.846.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.069.880.522.252,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp737.228.676.252,00) atau (5,64%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Tanah Persil	6.267.024.067.860,00	6.346.504.376.476,00
2	Tanah Non Persil	1.476.068.419.053,00	1.541.296.235.418,00
3	Lapangan	4.589.559.359.087,00	5.182.079.910.358,00
	Jumlah	**12.332.651.846.000,00**	**13.069.880.522.252,00**

Rincian mutasi tanah terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**13.069.880.522.252,00**
Penambahan	
Belanja Modal	11.219.612.440,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	-
Hibah	22.037.236.409,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	18.170.582.058,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	121.603.187.410,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	120.232.402.459,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	205.738.778.524,00
Jumlah	**499.001.799.300,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	18.170.582.058,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	121.611.597.910,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	757.373.999.583,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	122.427.169.604,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	216.647.126.397,00
Jumlah	**1.236.230.475.552,00**
Saldo Akhir	**12.332.651.846.000,00**

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan tertib fisik serta mempermudah pengelolaan barang milik daerah (BMD), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan inventarisasi BMD Tahun 2024. Nilai aset Tanah sebesar Rp12.332.651.846.000,00 di dalamnya termasuk hasil inventarisir aset kondisi rusak berat oleh pengurus barang OPD sebesar Rp0,00. Aset rusak berat tersebut akan direklasifikasi ke Aset Lainnya setelah dilakukan verifikasi kondisi oleh pengelola barang pada Tahun 2024.

5.3.1.3.1.1 Tanah Persil **Rp6.267.024.067.860,00**

Tanah Persil sebesar Rp6.267.024.067.860,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.346.504.376.476,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp79.480.308.616,00) atau (1,25%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.906.466.132.064,00	1.893.967.123.487,00
2	Dinas Kesehatan	60.100.940.000,00	60.100.940.000,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	111.661.068.000,00	110.237.763.000,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	104.730.000.000,00	104.730.000.000,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	41.950.458.143,00	41.950.458.143,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	653.830.890.470,00	653.830.890.470,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	90.572.000.000,00	90.572.000.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	50.269.000.000,00	50.269.000.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	14.192.500.000,00	14.192.500.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	144.121.032.704,00	144.215.552.704,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.366.572.425.850,00	1.421.810.190.956,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.513.941.740,00	1.513.941.740,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.076.000.000,00	3.076.000.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
15	Dinas Sosial	144.843.035.440,00	130.756.035.440,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	75.011.123.000,00	89.253.973.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	834.078.750,00	834.078.750,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	599.040.000,00	599.040.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	13.275.730.000,00	57.785.550.000,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	7.849.500.000,00	7.849.500.000,00
21	Dinas Perhubungan	88.196.559.505,00	87.867.951.625,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.764.500.000,00	6.764.500.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	8.300.000.000,00	8.300.000.000,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	57.524.367.000,00	57.532.777.500,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.546.500.000,00	4.546.500.000,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	115.567.637.203,00	113.254.096.160,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	325.576.613.417,00	325.576.613.417,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	178.780.147.130,00	178.780.147.130,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.773.358.000,00	3.493.720.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	22.444.664.587,00	22.444.664.587,00
32	Sekretariat Daerah	159.033.877.490,00	157.890.240.000,00
33	Sekretariat DPRD	12.678.250.000,00	12.678.250.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	116.085.000.000,00	116.085.000.000,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	108.205.162.582,00	108.866.662.582,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	103.373.741.785,00	101.173.922.785,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	6.427.650.000,00	6.427.650.000,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	124.074.000.000,00	124.074.000.000,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.100.000.000,00	4.100.000.000,00
40	Badan Penghubung	7.015.000.000,00	7.015.000.000,00
41	Inspektorat	-	-
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.011.143.000,00	12.011.143.000,00
	Jumlah	**6.267.024.067.860,00**	**6.346.504.376.476,00**

5.3.1.3.1.2 Tanah Non Persil **Rp1.476.068.419.053,00**

Tanah Non Persil sebesar Rp1.476.068.419.053,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.541.296.235.418,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp65.227.816.365,00) atau (4,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.125.224.197,00	36.952.104.059,00
2	Dinas Kesehatan	998.800.000,00	998.800.000,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	509.250.000,00	509.250.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	56.226.820.600,00	56.867.647.350,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	650.528.926.168,00	672.474.023.758,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	15.900.000.000,00	15.900.000.000,00
7	Dinas Sosial	453.000.000,00	1.393.475.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.016.700.000,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.000.000,00	6.000.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11.980.222.167,00	11.045.100.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.848.750.000,00	1.848.750.000,00
12	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	4.050.622.500,00	4.050.622.500,00
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.155.080.297,00	53.824.295.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	22.376.100.000,00	22.376.100.000,00
15	Dinas Pertanian dan Perkebunan	599.187.674.124,00	648.158.918.751,00
16	Sekretariat Daerah	4.301.820.000,00	4.301.820.000,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.420.129.000,00	9.572.629.000,00
	Jumlah	**1.476.068.419.053,00**	**1.541.296.235.418,00**

5.3.1.3.1.3 Lapangan **Rp4.589.559.359.087,00**

Tanah Lapangan sebesar Rp4.589.559.359.087,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.182.079.910.358,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp592.520.551.271,00) atau (11,43%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	29.672.652.100,00	29.672.652.100,00
2	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	3.998.392.532,00	3.998.392.532,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.781.455.928.416,00	2.374.612.204.378,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.628.562.723.727,00	2.627.848.346.657,00
5	Dinas Sosial	1.066.019.500,00	1.066.019.500,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	29.180.066.304,00	29.093.718.683,00
7	Dinas Perhubungan	104.102.924.008,00	104.102.924.008,00
8	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	11.299.344.000,00	11.464.344.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.500.000,00	7.500.000,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	213.808.500,00	213.808.500,00
	Jumlah	**4.589.559.359.087,00**	**5.182.079.910.358,00**

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin **Rp9.528.039.167.257,00**

Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.528.039.167.257,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.123.265.698.126,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 404.773.469.131,00 atau 4,44% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Alat Besar	348.940.995.677,00	370.639.039.150,00
2	Alat Angkutan	713.838.056.417,00	706.611.393.320,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	411.910.130.760,00	435.194.569.267,00
4	Alat Pertanian	76.049.332.741,00	74.819.795.492,00
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.204.347.125.605,00	1.921.635.113.443,00
6	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	316.516.398.408,00	326.513.691.245,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.636.823.706.032,00	2.563.758.056.327,00
8	Alat Laboratorium	787.044.524.650,00	797.380.641.009,00
9	Alat Persenjataan	6.821.949.562,00	6.592.075.755,00
10	Komputer	1.728.176.960.196,00	1.682.969.310.505,00
11	Alat Eksplorasi	465.328.022,00	467.498.022,00
12	Alat Pengeboran	163.699.298,00	157.699.298,00
13	Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	991.096.250,00	719.621.050,00
14	Alat Bantu Eksplorasi	21.180.000,00	21.180.000,00
15	Alat Keselamatan Kerja	7.788.907.858,00	7.022.069.530,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
16	Alat Peraga	190.513.544.558,00	134.020.731.860,00
17	Peralatan Proses/Produksi	5.674.378.534,00	4.305.984.634,00
18	Rambu-rambu	31.105.185.581,00	29.754.457.101,00
19	Peralatan Olahraga	60.846.667.108,00	60.682.771.118,00
	Jumlah	**9.528.039.167.257,00**	**9.123.265.698.126,00**

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**9.123.265.698.126,00**
Penambahan	
Belanja Modal	875.684.163.717,00
Belanja Hutang	48.931.020,00
Belanja Barang/Jasa	3.056.109.828,00
Hibah	59.767.914.028,00
Hasil Usaha Mandiri	692.402.707,00
Mutasi Masuk	8.788.959.625,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	5.530.372.430,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	1.606.539.676,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	57.803.954.404,00
Jumlah	**1.012.979.347.435,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	8.788.959.625,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	5.510.372.430,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	585.044.066.638,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	6.499.912.051,00
Koreksi Belanja Modal	1.800.000.000,00
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	562.567.560,00
Jumlah	**608.205.878.304,00**
Saldo Akhir	**9.528.039.167.257,00**

5.3.1.3.2.1 Alat Besar — Rp348.940.995.677,00

Alat Besar sebesar Rp348.940.995.677,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp370.639.039.150,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp21.698.043.473,00) atau (5,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.031.267.856,00	24.703.203.489,00
2	Dinas Kesehatan	5.019.577.825,00	6.299.440.825,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	18.999.051.070,00	19.153.274.070,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	21.208.346.104,00	21.208.346.104,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	15.999.450.466,00	16.187.972.966,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	3.358.243.889,00	3.358.243.889,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	6.682.524.900,00	6.682.524.900,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.355.770.861,00	5.355.770.861,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.641.566.715,00	1.641.566.715,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	120.989.176.718,00	138.778.842.538,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	31.582.971.615,00	31.532.971.615,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	575.080.900,00	575.080.900,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.575.199.050,00	7.575.199.050,00
14	Dinas Sosial	1.601.687.298,00	1.581.537.298,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	305.786.400,00	270.290.000,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	622.400.000,00	622.400.000,00
17	Dinas Ketahanan Pangan	488.497.500,00	821.142.500,00
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	486.420.768,00	573.197.768,00
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	1.458.167.018,00	1.258.167.018,00
20	Dinas Perhubungan	1.967.974.500,00	1.980.734.500,00
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.611.911.900,00	3.611.911.900,00
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.355.770.000,00	1.371.192.000,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	621.842.250,00	621.842.250,00
24	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	2.905.318.819,00	2.905.318.819,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.793.220.260,00	4.065.823.260,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.543.991.000,00	3.856.804.990,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	661.974.100,00	766.249.100,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.066.033.734,00	7.427.341.026,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.909.716.500,00	3.577.581.500,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.511.813.135,00	6.504.788.135,00
31	Sekretariat Daerah	12.866.827.816,00	12.866.827.816,00
32	Sekretariat DPRD	4.561.572.720,00	4.561.572.720,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.922.428.500,00	2.864.663.500,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.751.428.018,00	16.215.563.656,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.899.016.860,00	3.233.645.360,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	1.505.960.000,00	1.505.960.000,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.682.706.986,00	2.645.706.986,00
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	497.780.000,00	497.780.000,00
39	Badan Penghubung	430.760.400,00	486.797.900,00
40	Inspektorat	201.852.000,00	201.852.000,00
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	689.909.226,00	689.909.226,00
	Jumlah	**348.940.995.677,00**	**370.639.039.150,00**

5.3.1.3.2.2 Alat Angkutan **Rp713.838.056.417,00**

Alat Angkutan sebesar Rp713.838.056.417,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp706.611.393.320,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.226.663.097,00 atau 1,02% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	157.868.020.144,00	155.274.438.740,00
2	Dinas Kesehatan	32.434.889.918,00	33.404.114.918,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	11.536.743.191,00	11.389.938.016,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	12.868.590.363,00	10.115.517.363,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	6.973.990.990,00	6.330.490.990,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	7.557.057.344,00	7.579.840.544,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	6.012.757.660,00	5.419.639.660,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	7.450.890.470,00	8.085.185.777,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.602.981.742,00	5.591.726.742,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	29.390.729.161,00	29.361.213.497,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	22.607.374.440,00	22.357.958.440,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.042.985.783,00	4.452.818.720,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.917.056.752,00	5.361.706.752,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.085.106.395,00	23.085.106.395,00
15	Dinas Sosial	18.702.644.199,00	17.620.847.574,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.522.333.469,00	10.907.432.292,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.437.237.245,00	2.437.237.245,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.682.307.514,00	3.732.207.514,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	19.109.152.323,00	20.219.540.122,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	3.366.748.909,00	3.486.858.223,00
21	Dinas Perhubungan	28.507.853.326,00	28.764.134.421,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.429.296.173,00	10.208.652.173,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.198.439.126,00	3.198.439.126,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	3.052.121.061,00	3.466.821.061,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	5.122.638.082,00	5.122.638.082,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.723.636.345,00	5.890.636.345,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	20.159.038.318,00	20.922.172.283,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.655.014.643,00	6.823.985.643,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	17.529.390.951,00	17.307.142.598,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.799.045.778,00	9.107.504.778,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.932.069.245,00	6.957.834.245,00
32	Sekretariat Daerah	75.617.941.218,00	71.720.654.218,00
33	Sekretariat DPRD	27.366.296.513,00	29.395.776.513,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.672.561.737,00	6.146.403.537,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	48.199.841.942,00	41.229.493.698,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.136.174.957,00	22.946.107.085,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	3.935.704.721,00	3.935.704.721,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.936.829.838,00	3.428.029.838,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.647.105.256,00	2.647.105.256,00
40	Badan Penghubung	13.310.787.484,00	13.310.787.484,00
41	Inspektorat	5.652.013.291,00	4.782.892.291,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.084.658.400,00	3.084.658.400,00
	Jumlah	**713.838.056.417,00**	**706.611.393.320,00**

5.3.1.3.2.3 Alat Bengkel dan Ukur **Rp411.910.130.760,00**

Alat Bengkel dan Ukur sebesar Rp411.910.130.760,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp435.194.569.267,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp23.284.438.507,00) atau (5,35%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	357.122.522.939,00	375.139.705.650,00
2	Dinas Kesehatan	3.021.535.934,00	3.034.635.934,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.715.005.638,00	1.459.253.638,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	4.081.951.191,00	4.085.725.191,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	680.226.269,00	652.511.269,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	613.544.725,00	605.247.475,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	50.130.592,00	50.243.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	832.583.990,00	1.255.119.890,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	832.929.275,00	1.516.429.275,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.134.397.677,00	635.027.282,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.484.667.002,00	2.503.756.002,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.187.735.275,00	1.187.735.275,00
13	Dinas Sosial	203.406.450,00	203.406.450,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.087.266.304,00	2.901.144.854,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	229.288.000,00	256.491.750,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.548.651.234,00	4.307.757.377,00
17	Dinas Perhubungan	1.588.566.200,00	5.169.070.700,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.044.700,00	53.381.700,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	83.582.005,00	83.582.005,00
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	80.800.000,00	80.800.000,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.053.754.956,00	2.056.129.956,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	872.904.195,00	1.226.917.295,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	895.004.956,00	941.159.656,00
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.180.937.900,00	3.163.657.900,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.607.500.590,00	7.989.523.360,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.954.136.663,00	13.926.100.283,00
27	Sekretariat Daerah	134.876.000,00	134.876.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.951.600,00	3.951.600,00
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	474.850.000,00	474.850.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.328.500,00	15.328.500,00
31	Badan Penghubung	9.650.000,00	9.650.000,00
32	Inspektorat	71.400.000,00	71.400.000,00
	Jumlah	**411.910.130.760,00**	**435.194.569.267,00**

5.3.1.3.2.4 Alat Pertanian **Rp76.049.332.741,00**

Alat Pertanian sebesar Rp76.049.332.741,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp74.819.795.492,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.229.537.249,00 atau 1,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.549.580.858,00	19.738.526.350,00
2	Dinas Kesehatan	11.600.000,00	11.600.000,00
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	43.982.500,00	43.982.500,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	384.992.795,00	384.992.795,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	126.640.630,00	126.640.630,00
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	14.996.100,00	14.996.100,00
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	11.317.500,00	11.317.500,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	7.330.060,00	7.330.060,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	12.000.000,00	38.000.000,00
10	Dinas Sosial	27.935.000,00	27.935.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.235.689.925,00	2.148.469.925,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.592.744.070,00	1.472.744.070,00
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	566.817.500,00	607.989.500,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	999.000,00	-
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	26.295.000,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	856.502.460,00	1.351.516.500,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.986.635.943,00	9.862.359.468,00
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	42.564.018.400,00	38.889.550.094,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	39.750.000,00	39.750.000,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	15.800.000,00	15.800.000,00
	Jumlah	**76.049.332.741,00**	**74.819.795.492,00**

5.3.1.3.2.5 Alat Kantor dan Rumah Tangga **Rp2.204.347.125.605,00**

Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp2.204.347.125.605,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.921.635.113.443,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 282.712.012.162,00 atau 14,71% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.301.287.896.469,00	1.068.596.478.901,00
2	Dinas Kesehatan	43.959.546.060,00	48.447.073.780,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	66.872.460.843,00	68.461.820.848,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	84.000.738.869,00	82.762.933.187,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	48.793.879.702,00	47.466.793.683,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	20.506.846.124,00	18.097.062.661,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	18.189.938.743,00	18.662.046.130,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	36.703.617.995,00	33.623.470.539,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	15.620.488.623,00	15.578.599.568,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	13.609.853.462,00	12.588.330.325,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	10.636.006.473,00	9.804.155.361,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	3.261.328.520,00	3.501.104.652,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	2.583.484.774,00	2.585.034.774,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8.887.403.239,00	8.769.326.339,00
15	Dinas Sosial	23.833.154.517,00	22.481.574.482,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.494.344.807,00	12.498.910.451,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.687.925.675,00	2.160.655.675,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.902.203.355,00	6.707.581.998,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.145.756.394,00	16.663.137.380,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	5.256.073.857,00	5.697.490.387,00
21	Dinas Perhubungan	8.295.833.944,00	9.155.059.402,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.605.530.329,00	11.857.391.024,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.636.223.257,00	12.099.040.710,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	2.666.307.409,00	3.185.968.900,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	85.754.657.110,00	35.703.582.015,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.836.690.408,00	13.734.463.498,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	9.230.605.146,00	10.781.364.019,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.162.473.362,00	10.078.168.923,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	17.715.341.216,00	18.290.662.425,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	15.120.365.045,00	15.087.072.350,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.305.261.066,00	20.908.603.790,00
32	Sekretariat Daerah	48.496.676.716,00	45.113.689.414,00
33	Sekretariat DPRD	59.142.087.968,00	58.516.230.533,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.112.951.958,00	7.604.446.409,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	67.177.129.557,00	67.652.691.400,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	29.719.280.850,00	29.936.816.855,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	7.571.528.271,00	7.491.603.271,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.891.010.665,00	21.060.291.570,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	2.378.872.000,00	2.674.005.500,00
40	Badan Penghubung	5.976.831.564,00	5.994.237.884,00
41	Inspektorat	6.536.132.764,00	6.448.649.764,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.782.386.499,00	3.107.492.666,00
	Jumlah	**2.204.347.125.605,00**	**1.921.635.113.443,00**

5.3.1.3.2.6 Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar **Rp316.516.398.408,00**

Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp316.516.398.408,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp326.513.691.245,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.997.292.837,00) atau (3,06%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	173.759.438.859,00	185.976.375.283,00
2	Dinas Kesehatan	6.422.368.613,00	6.615.003.609,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	4.957.930.523,00	4.959.357.523,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	8.196.290.736,00	7.341.456.736,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	4.563.138.686,00	4.455.047.686,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	1.632.652.239,00	1.705.363.238,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	817.445.446,00	892.690.546,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	1.597.984.909,00	1.701.022.636,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	754.694.353,00	832.853.603,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.208.532.410,00	5.733.775.910,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.970.073.793,00	1.888.696.650,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.060.974.537,00	679.414.496,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	663.265.000,00	705.265.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.325.544.999,00	2.325.544.999,00
15	Dinas Sosial	582.376.000,00	390.742.000,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.195.598.111,00	1.639.623.111,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	232.494.850,00	182.294.850,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	547.419.038,00	773.878.538,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.634.443.530,00	3.999.266.966,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	1.759.146.883,00	1.772.574.383,00
21	Dinas Perhubungan	1.671.830.873,00	2.494.427.176,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	13.098.151.934,00	13.300.106.075,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.596.584.028,00	2.105.430.947,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	675.393.383,00	827.648.820,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	5.990.732.766,00	5.711.582.530,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.524.881.090,00	4.691.826.256,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.525.448.964,00	1.829.557.664,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	973.178.100,00	1.025.369.700,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	4.215.655.900,00	4.214.475.900,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.348.069.302,00	4.454.239.702,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.647.181.928,00	1.669.665.658,00
32	Sekretariat Daerah	27.877.818.774,00	26.416.878.274,00
33	Sekretariat DPRD	5.074.345.402,00	4.839.700.402,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.060.434.856,00	888.614.856,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.783.961.387,00	6.149.093.339,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.167.593.374,00	3.250.681.374,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	353.357.219,00	353.357.219,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.209.355.291,00	4.028.549.198,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	446.543.500,00	512.293.500,00
40	Badan Penghubung	1.675.327.657,00	1.428.708.727,00
41	Inspektorat	1.019.738.165,00	985.758.165,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	699.001.000,00	765.478.000,00
	Jumlah	**316.516.398.408,00**	**326.513.691.245,00**

5.3.1.3.2.7 Alat Kedokteran dan Kesehatan **Rp 2.636.823.706.032,00**

Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp2.636.823.706.032,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.563.758.056.327,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp73.065.649.705,00 atau 2,85% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.156.887.513,00	12.672.176.092,00
2	Dinas Kesehatan	104.803.041.213,00	109.836.747.676,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.024.799.808.175,00	1.025.828.009.896,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	734.286.032.530,00	657.096.334.963,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	379.792.173.918,00	374.348.712.840,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	149.710.909.042,00	153.261.203.771,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	86.088.314.366,00	84.317.659.539,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	62.345.943.426,00	61.364.035.037,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	79.195.572.706,00	81.370.056.400,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.351.032,00	4.351.032,00
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	190.779.600,00	190.779.600,00
12	Dinas Sosial	621.124.275,00	541.321.246,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	263.868.685,00	263.868.685,00
14	Dinas Perhubungan	8.150.000,00	8.150.000,00
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	9.960.000,00	9.960.000,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	3.875.000,00	5.875.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
17	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	20.100.000,00	20.100.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	8.277.500,00	8.277.500,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.339.509.800,00	1.347.509.800,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.100.000,00	7.100.000,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	2.500.000,00	2.500.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	109.729.636,00	116.729.635,00
23	Sekretariat Daerah	204.665.000,00	204.665.000,00
24	Sekretariat DPRD	243.215.000,00	312.215.000,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.275.000,00	3.275.000,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	138.165.000,00	150.065.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	216.001.615,00	216.001.615,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	249.576.000,00	249.576.000,00
29	Badan Riset dan Inovasi Daerah	800.000,00	800.000,00
	Jumlah	**2.636.823.706.032,00**	**2.563.758.056.327,00**

5.3.1.3.2.8 Alat Laboratorium **Rp787.044.524.650,00**

Alat Laboratorium sebesar Rp787.044.524.650,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp797.380.641.009,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.336.116.359,00) atau (1,30%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	445.861.763.603,00	449.717.308.298,00
2	Dinas Kesehatan	52.251.848.183,00	55.457.032.416,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	70.515.573.709,00	67.245.417.971,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	66.731.271.858,00	64.020.970.858,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	22.519.720.430,00	23.761.802.380,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	2.631.440.578,00	2.735.842.467,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.910.072.827,00	3.574.688.075,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.203.079.252,00	3.808.169.702,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	3.385.395.251,00	4.993.373.241,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.571.469.114,00	13.968.273.509,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.699.598.289,00	3.126.894.955,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.090.700,00	115.090.700,00
13	Dinas Sosial	46.630.100,00	45.825.000,00
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.449.896.710,00	5.439.193.575,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	6.728.918.672,00	7.078.409.672,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.561.449.951,00	15.573.101.695,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	44.715.000,00	44.715.000,00
18	Dinas Perhubungan	-	163.343.000,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.996.000,00	-
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.857.050,00	39.882.050,00
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	203.850.000,00	203.850.000,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	78.430.000,00	90.230.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.521.976.455,00	9.106.595.354,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	19.544.082.860,00	19.743.976.193,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.262.773.145,00	9.618.724.915,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.124.037.122,00	8.285.756.052,00
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28.289.785.741,00	28.749.104.331,00
28	Sekretariat DPRD	9.950.000,00	-
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.125.000,00	23.750.000,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	606.705.050,00	527.297.600,00
31	Inspektorat	122.022.000,00	122.022.000,00
	Jumlah	**787.044.524.650,00**	**797.380.641.009,00**

5.3.1.3.2.9 Alat Persenjataan Rp6.821.949.562,00

Alat Persenjataan sebesar Rp6.821.949.562,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.592.075.755,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp229.873.807,00 atau 3,49% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.710.201.349,00	3.981.437.300,00
2	Dinas Kesehatan	-	9.205.000,00
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	187.829.055,00	187.829.055,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	6.175.000,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.953.500,00	5.953.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	179.710.000,00	179.710.000,00
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.659.729.175,00	1.659.729.175,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.812.400,00	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	138.450.000,00	144.900.000,00
10	Dinas Perhubungan	3.254.725,00	31.204.725,00
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	187.600.000,00	187.600.000,00
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	42.000.000,00	52.000.000,00
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.882.000,00	19.882.000,00
14	Sekretariat Daerah	94.300.000,00	94.300.000,00
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	23.650.000,00	23.650.000,00
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	551.077.358,00	-
17	Inspektorat	8.500.000,00	8.500.000,00
	Jumlah	**6.821.949.562,00**	**6.592.075.755,00**

5.3.1.3.2.10 Komputer Rp1.728.176.960.196,00

Komputer sebesar Rp1.728.176.960.196,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.682.969.310.505,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp45.207.649.691,00 atau 2,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.253.413.097.888,00	1.217.583.518.158,00
2	Dinas Kesehatan	15.951.405.142,00	19.082.981.209,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	37.164.338.062,00	32.783.916.311,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	49.758.705.046,00	44.817.899.721,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	18.498.987.714,00	11.411.167.414,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	3.538.305.577,00	4.229.781.913,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	4.263.230.543,00	4.132.630.949,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	5.998.155.141,00	6.048.223.934,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.625.370.541,00	4.514.423.041,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.910.292.388,00	7.687.634.415,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	7.684.361.219,00	6.354.206.173,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	2.032.717.580,00	2.150.112.799,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.940.436.470,00	1.925.436.470,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.373.869.784,00	2.359.369.784,00
15	Dinas Sosial	6.442.444.225,00	5.691.688.225,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.379.307.160,00	6.266.957.160,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.185.734.533,00	997.896.533,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	2.569.344.915,00	3.125.689.965,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.568.411.326,00	10.505.727.869,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	3.149.999.077,00	3.292.780.587,00
21	Dinas Perhubungan	4.595.028.222,00	6.147.384.879,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	106.521.800.399,00	107.582.064.459,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.806.464.386,00	2.639.504.963,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	3.623.097.823,00	4.105.658.451,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	4.786.398.990,00	4.485.548.990,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.664.099.519,00	5.778.716.446,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.517.087.461,00	4.420.378.599,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.614.129.143,00	3.840.284.735,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.969.895.246,00	6.399.905.026,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.960.928.742,00	7.766.644.698,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.088.324.752,00	8.348.122.146,00
32	Sekretariat Daerah	20.126.512.108,00	18.936.911.308,00
33	Sekretariat DPRD	13.709.102.999,00	13.311.492.999,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.389.920.681,00	6.275.520.619,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	59.041.929.876,00	58.763.323.969,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.523.823.517,00	8.143.165.512,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	7.258.753.125,00	7.184.753.125,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.341.358.082,00	6.008.181.600,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.676.752.600,00	2.013.315.076,00
40	Badan Penghubung	1.212.065.652,00	1.541.231.067,00
41	Inspektorat	2.439.842.418,00	2.482.623.418,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.861.130.124,00	1.832.535.790,00
	Jumlah	**1.728.176.960.196,00**	**1.682.969.310.505,00**

5.3.1.3.2.11 Alat Eksplorasi **Rp465.328.022,00**

Alat Eksplorasi sebesar Rp465.328.022,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp467.498.022,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.170.000,00) atau (0,46%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	443.158.022,00	445.328.022,00
2	Dinas Kesehatan	1.800.000,00	1.800.000,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	20.370.000,00	20.370.000,00
	Jumlah	**465.328.022,00**	**467.498.022,00**

5.3.1.3.2.12 Alat Pengeboran **Rp163.699.298,00**

Alat Pengeboran sebesar Rp163.699.298,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp157.699.298,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.000.000,00 atau 3,80% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	163.699.298,00	157.699.298,00
	Jumlah	**163.699.298,00**	**157.699.298,00**

5.3.1.3.2.13 Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian **Rp991.096.250,00**

Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar Rp991.096.250,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp719.621.050,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp271.475.200,00 atau 37,72% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	912.723.050,00	641.247.850,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	78.373.200,00	78.373.200,00
	Jumlah	**991.096.250,00**	**719.621.050,00**

5.3.1.3.2.14 Alat Bantu Eksplorasi Rp21.180.000,00

Alat Bantu Eksplorasi sebesar Rp21.180.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	21.180.000,00	21.180.000,00
	Jumlah	**21.180.000,00**	**21.180.000,00**

5.3.1.3.2.15 Alat Keselamatan Kerja Rp7.788.907.858,00

Alat Keselamatan Kerja sebesar Rp7.788.907.858,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.022.069.530,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp766.838.328,00 atau 10,92% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.179.378.167,00	5.497.064.939,00
2	Dinas Kesehatan	153.375.000,00	153.375.000,00
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	51.326.000,00	51.326.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	73.800.000,00	73.800.000,00
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	526.500.000,00	526.500.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	63.033.200,00	42.033.200,00
7	Dinas Ketahanan Pangan	15.740.000,00	14.740.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	28.890.000,00	23.940.000,00
9	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	390.665.891,00	390.665.891,00
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	34.875.000,00	34.875.000,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	197.324.600,00	139.749.500,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	54.000.000,00	54.000.000,00
	Jumlah	**7.788.907.858,00**	**7.022.069.530,00**

5.3.1.3.2.16 Alat Peraga Rp190.513.544.558,00

Alat Peraga sebesar Rp190.513.544.558,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp134.020.731.860,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp56.492.812.698,00 atau 42,15% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	187.917.956.244,00	131.842.168.546,00
2	Dinas Kesehatan	59.534.300,00	80.534.300,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.335.877.692,00	1.335.877.692,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	390.625.882,00	325.105.882,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	12.150.000,00	-
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	26.664.000,00	26.664.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	41.200.000,00	41.200.000,00
9	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.825.000,00	99.825.000,00
10	Dinas Sosial	112.890.000,00	88.595.000,00
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	516.821.440,00	180.761.440,00
	Jumlah	**190.513.544.558,00**	**134.020.731.860,00**

5.3.1.3.2.17 Peralatan Proses/Produksi Rp5.674.378.534,00

Peralatan Proses/Produksi sebesar Rp5.674.378.534,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.305.984.634,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.368.393.900,00 atau 31,78% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.823.567.534,00	3.494.199.634,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	22.500.000,00	22.500.000,00
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	95.000.000,00	95.000.000,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	67.314.000,00	67.314.000,00
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	93.000.000,00	422.670.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.327.696.000,00	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.803.000,00	23.803.000,00
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	50.948.000,00	44.948.000,00
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	135.550.000,00	135.550.000,00
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	35.000.000,00	-
	Jumlah	**5.674.378.534,00**	**4.305.984.634,00**

5.3.1.3.2.18 Rambu-Rambu Rp 31.105.185.581,00

Rambu-Rambu sebesar Rp 31.105.185.581,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29.754.457.101,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.350.728.480,00 atau 4,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	264.910.790,00	267.715.790,00
2	RSUD dr. Rehatta Jepara	20.682.300,00	20.682.300,00
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	9.500.000,00	-
4	Dinas Perhubungan	30.502.773.356,00	29.347.504.011,00
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	65.537.000,00	65.537.000,00
6	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	179.314.135,00	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.000.000,00	11.000.000,00
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	6.708.000,00	6.708.000,00
9	Sekretariat DPRD	9.450.000,00	-
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	35.310.000,00	35.310.000,00
	Jumlah	**31.105.185.581,00**	**29.754.457.101,00**

5.3.1.3.2.19 Alat Olahraga Rp60.846.667.108,00

Alat Olahraga sebesar Rp60.846.667.108,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.682.771.118,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp163.895.990,00 atau 0,27% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.622.991.806,00	17.550.072.976,00
2	Dinas Kesehatan	90.239.200,00	96.729.600,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	25.800.000,00	25.800.000,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	20.079.600,00	20.079.600,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	21.475.000,00	21.475.000,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	232.223.649,00	232.223.649,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	86.900.000,00	86.900.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	47.575.000,00	47.575.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	29.975.000,00	28.600.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.000.000,00	2.000.000,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.100.000,00	10.100.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	27.550.000,00	27.550.000,00
13	Dinas Sosial	61.695.000,00	61.695.000,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	3.006.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.000.000,00	14.300.000,00
16	Dinas Perhubungan	-	8.601.440,00
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	126.625.000,00	126.625.000,00
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	40.390.181.783,00	40.341.431.783,00
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.484.000,00	200.484.000,00
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	23.750.000,00	23.750.000,00
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	25.263.350,00	25.263.350,00
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.160.000,00	80.160.000,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.906.250,00	203.656.250,00
24	Sekretariat Daerah	328.553.000,00	237.553.000,00
25	Sekretariat DPRD	11.000.000,00	31.000.000,00
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	694.752.000,00	694.752.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.985.000,00	13.985.000,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	170.542.750,00	170.542.750,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	273.959.720,00	273.959.720,00
30	Badan Penghubung	22.900.000,00	22.900.000,00
	Jumlah	**60.846.667.108,00**	**60.682.771.118,00**

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan Rp9.849.541.705.895,00

Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.849.541.705.895,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.491.863.080.604,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp357.678.625.291,00 atau 3,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bangunan Gedung	9.665.496.855.408,00	9.312.207.746.724,00
2	Monumen	29.550.739.782,00	29.043.739.782,00
3	Bangunan Menara	3.036.143.895,00	5.127.847.117,00
4	Tugu Titik Kontrol/Pasti	151.457.966.810,00	145.483.746.981,00
	Jumlah	**9.849.541.705.895,00**	**9.491.863.080.604,00**

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**9.491.863.080.604,00**
Penambahan	
Belanja Modal	211.152.729.522,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	67.364.875.078,00
Hibah	79.637.677.114,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	6.025.784.286,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	24.947.240.776,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	34.857.151.231,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	5.964.150,00
Koreksi	553.041.427.061,00
Jumlah	**977.032.849.218,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	6.025.784.286,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	1.002.751.132,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	24.753.998.465,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	35.490.766.231,00
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	3.200.299.008,00
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	16.549.950,00
Koreksi Tahun Lalu	548.864.074.855,00
Jumlah	**619.354.223.927,00**
Saldo Akhir	**9.849.541.705.895,00**

5.3.1.3.3.1 Bangunan Gedung Rp9.665.496.855.408,00

Bangunan Gedung sebesar Rp9.665.496.855.408,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.312.207.746.724,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp353.289.108.684,00 atau 3,79% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.069.767.168.151,00	4.860.594.421.024,00
2	Dinas Kesehatan	152.323.184.847,00	136.661.933.022,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	572.769.544.782,00	572.992.526.904,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	369.681.090.967,00	370.701.303.309,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	168.294.042.604,00	165.898.015.204,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	87.286.472.035,00	91.494.092.550,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	102.123.863.788,00	82.089.929.678,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	110.059.159.684,00	93.991.415.026,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	71.442.953.650,00	52.541.944.450,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	184.837.059.107,00	172.724.391.802,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	23.986.808.972,00	20.717.869.500,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10.620.119.060,00	10.620.119.060,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	19.455.336.327,00	18.452.315.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.085.312.742,00	8.745.269.968,00
15	Dinas Sosial	183.378.360.857,00	176.620.280.931,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	57.470.832.811,00	58.076.672.170,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.235.424.715,00	19.873.833.965,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	17.146.497.586,00	13.160.384.893,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	81.162.088.398,00	78.144.810.754,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	10.683.134.037,00	10.683.134.037,00
21	Dinas Perhubungan	136.037.247.668,00	133.280.888.456,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	18.460.190.806,00	18.460.190.806,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	27.159.422.183,00	27.159.422.183,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	7.491.574.985,00	7.491.574.985,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	760.610.780.110,00	765.083.525.959,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	28.340.680.998,00	22.719.853.147,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	121.774.468.302,00	99.971.027.561,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	85.936.095.615,00	85.803.591.548,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	165.610.429.532,00	153.305.860.329,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	40.994.740.756,00	39.506.009.264,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	91.140.474.756,00	85.705.971.877,00
32	Sekretariat Daerah	97.554.519.179,00	97.554.519.179,00
33	Sekretariat DPRD	135.643.359.413,00	135.643.359.413,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.488.632.124,00	14.340.397.702,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	241.325.445.029,00	240.809.942.573,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	263.113.986.073,00	263.747.601.073,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	8.844.922.902,00	8.844.922.902,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	57.531.473.483,00	57.531.473.483,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.824.639.800,00	6.555.426.500,00
40	Badan Penghubung	14.860.161.039,00	14.193.978.779,00
41	Inspektorat	13.125.575.450,00	13.125.575.450,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.819.580.085,00	6.587.970.308,00
	Jumlah	**9.665.496.855.408,00**	**9.312.207.746.724,00**

5.3.1.3.3.2 Monumen Rp29.550.739.782,00

Monumen sebesar Rp29.550.739.782,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 29.043.739.782,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp507.000.000,00 atau 1,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.282.501.706,00	11.775.501.706,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
2	Dinas Kesehatan	144.162.000,00	144.162.000,00
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	223.611.000,00	223.611.000,00
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	814.052.600,00	814.052.600,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.500.000,00	1.500.000,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	286.009.000,00	286.009.000,00
7	Dinas Sosial	32.619.000,00	32.619.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	106.992.570,00	106.992.570,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	322.003.450,00	322.003.450,00
10	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	3.653.127.820,00	3.653.127.820,00
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	7.800.000,00	7.800.000,00
12	Sekretariat DPRD	8.773.667.996,00	8.773.667.996,00
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	846.935.000,00	846.935.000,00
14	Badan Penghubung	2.055.757.640,00	2.055.757.640,00
	Jumlah	**29.550.739.782,00**	**29.043.739.782,00**

5.3.1.3.3.3 Bangunan Menara Rp3.036.143.895,00

Bangunan Menara sebesar Rp3.036.143.895,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.127.847.117,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.091.703.222,00) atau (40,79%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	917.962.130,00	917.962.130,00
2	Dinas Perhubungan	386.581.815,00	386.581.815,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	210.185.093,00	301.130.315,00
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.485.744.857,00	3.486.502.857,00
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	34.500.000,00	34.500.000,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.170.000,00	1.170.000,00
	Jumlah	**3.036.143.895,00**	**5.127.847.117,00**

5.3.1.3.3.4 Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp 151.457.966.810,00

Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar Rp151.457.966.810,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp145.483.746.981,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.974.219.829,00 atau 4,11% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.667.986.143,00	70.331.500.468,00
2	Dinas Kesehatan	4.933.166.740,00	4.933.166.740,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	442.159.000,00	442.159.000,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	508.200.000,00	508.200.000,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.300.955.769,00	1.300.955.769,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	4.467.220.000,00	4.467.220.000,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	175.858.000,00	175.858.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	491.070.000,00	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.941.352.081,00	1.814.210.081,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.265.781.506,00	665.019.500,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	139.508.000,00	139.508.000,00
12	Dinas Sosial	3.649.069.108,00	3.027.920.500,00
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	917.686.100,00	693.305.100,00
14	Dinas Ketahanan Pangan	464.660.000,00	464.660.000,00
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.006.826.000,00	2.006.826.000,00
16	Dinas Perhubungan	974.927.508,00	974.927.508,00
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	793.494.572,00	793.494.572,00
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	139.732.800,00	139.732.800,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	110.020.000,00	110.020.000,00
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	9.382.256.227,00	9.366.441.227,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	342.880.670,00	342.880.670,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.044.191.677,00	5.727.277.087,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.523.612.468,00	4.473.722.468,00
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	13.635.569.912,00	12.654.062.112,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	488.620.500,00	488.620.500,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	56.522.500,00	56.522.500,00
27	Sekretariat Daerah	-	-
28	Sekretariat DPRD	418.598.000,00	374.062.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.220.000,00	94.220.000,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.792.711.410,00	1.792.711.410,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.431.679.969,00	15.267.112.819,00
32	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.711.470.150,00	1.711.470.150,00
33	Inspektorat	14.310.000,00	14.310.000,00
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	131.650.000,00	131.650.000,00
	Jumlah	**151.457.966.810,00**	**145.483.746.981,00**

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp12.507.048.034.410,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp12.507.048.034.410,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.586.304.551.545,00 mengalami kenaikan sebesar Rp920.743.482.865,00 atau 7,95% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	10.529.107.433.563,00	9.777.453.657.226,00
2	Bangunan Air	1.541.673.798.149,00	1.437.515.560.960,00
3	Instalasi	122.948.090.550,00	119.786.596.267,00
4	Jaringan	313.318.712.148,00	251.548.737.092,00
	Jumlah	**12.507.048.034.410,00**	**11.586.304.551.545,00**

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**11.586.304.551.545,00**
Penambahan	
Belanja Modal	371.897.258.252,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	212.376.003,00
Hibah	518.380.220.345,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	2.335.158.648,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	34.786.576.719,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	149.034.006.643,00
Jumlah	**1.076.645.596.610,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	2.335.158.648,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	172.073.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	22.606.906.217,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-

Koreksi Tahun Lalu	130.787.975.880,00
Jumlah	**155.902.113.745,00**
Saldo Akhir	**12.507.048.034.410,00**

5.3.1.3.4.1 Jalan dan Jembatan — Rp10.529.107.433.563,00

Jalan dan Jembatan sebesar Rp10.529.107.433.563,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.777.453.657.226,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp751.653.776.337,00 atau 7,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.587.514.650,00	19.787.514.650,00
2	Dinas Kesehatan	57.825.000,00	57.825.000,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	952.451.000,00	952.451.000,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	49.950.000,00	49.950.000,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	4.212.346.875,00	4.212.346.875,00
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.895.101.000,00	2.895.101.000,00
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	3.416.771.073,00	3.157.151.073,00
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	119.263.000,00	119.263.000,00
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	10.342.692.925.219,00	9.591.637.244.663,00
10	Dinas Sosial	52.859.000,00	52.859.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	164.387.000,00	164.387.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.051.490.425,00	17.816.719.625,00
13	Dinas Perhubungan	32.672.423.373,00	41.000.843.913,00
14	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	15.537.621.527,00	14.436.293.695,00
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	47.080.703.430,00	42.309.334.512,00
16	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.087.958.250,00	4.087.958.250,00
17	Dinas Pertanian dan Perkebunan	7.884.915.271,00	5.125.486.500,00
18	Sekretariat DPRD	387.415.000,00	387.415.000,00
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	26.900.626.970,00	26.900.626.970,00
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.302.885.500,00	2.302.885.500,00
	Jumlah	**10.529.107.433.563,00**	**9.777.453.657.226,00**

5.3.1.3.4.2 Bangunan Air — Rp1.541.673.798.149,00

Bangunan Air sebesar Rp1.541.673.798.149,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.437.515.560.960,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp104.158.237.189,00 atau 7,25% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.605.494.646,00	19.125.661.346,00
2	Dinas Kesehatan	835.756.500,00	835.756.500,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	2.821.073.315,00	2.821.073.315,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	175.000.000,00	175.000.000,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.013.070.158,00	1.206.327.783,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	3.626.015.250,00	3.626.015.250,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	98.529.000,00	98.529.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	100.621.000,00	100.621.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.158.273.500,00	1.158.273.500,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	154.045.441.560,00	153.699.758.560,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	1.077.752.394.878,00	1.053.016.731.258,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	159.200.000,00	159.200.000,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	89.000.000,00	89.000.000,00
14	Dinas Sosial	3.527.870.556,00	3.277.301.569,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	54.487.600,00	54.487.600,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	25.900.000,00	25.900.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.525.975.654,00	3.960.164.654,00
18	Dinas Perhubungan	4.702.597.675,00	6.177.909.931,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	233.520.000,00	233.520.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	85.794.000,00	85.794.000,00
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	4.540.916.652,00	4.939.942.078,00
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	190.275.000,00	190.275.000,00
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	210.253.880.241,00	130.997.494.090,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.413.945.001,00	4.413.945.001,00
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	22.677.084.953,00	19.161.910.630,00
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.651.073.221,00	25.855.233.130,00
27	Sekretariat Daerah	82.858.935,00	-
28	Sekretariat DPRD	1.173.201.000,00	1.173.201.000,00
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.169.389,00	75.156.300,00
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	184.250.000,00	184.250.000,00
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	597.128.465,00	597.128.465,00
	Jumlah	**1.541.673.798.149,00**	**1.437.515.560.960,00**

5.3.1.3.4.3 Instalasi **Rp122.948.090.550,00**

Instalasi sebesar Rp122.948.090.550,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp119.786.596.267,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.161.494.283,00 atau 2,64% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	17.862.823.561,00	15.139.801.193,00
2	Dinas Kesehatan	3.558.144.564,00	3.745.644.564,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	9.101.978.739,00	9.347.297.439,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	376.921.875,00	376.921.875,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	18.651.259.120,00	18.651.259.120,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	4.000.724.214,00	3.791.775.964,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	2.819.860.000,00	2.819.860.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	6.718.206.791,00	6.382.684.791,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.413.141.599,00	4.968.527.249,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.174.560.400,00	1.312.114.520,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	664.938.567,00	664.938.567,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	39.142.400,00	-
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	91.433.000,00	91.433.000,00
14	Dinas Sosial	15.000.000,00	15.000.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	798.195.492,00	798.195.492,00
16	Dinas Ketahanan Pangan	14.500.000,00	14.500.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.434.465.013,00	1.434.465.013,00
18	Dinas Perhubungan	10.287.642.897,00	12.853.963.991,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.815.817.500,00	1.815.817.500,00
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	33.665.810,00	33.665.810,00
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	36.582.000,00	225.454.455,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.498.531.577,00	2.344.967.577,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.335.832.475,00	2.315.832.475,00
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.744.116.410,00	540.725.436,00
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	25.917.859.565,00	27.559.003.255,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	50.751.450,00	50.751.450,00
27	Sekretariat DPRD	975.049.350,00	975.049.350,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	233.186.880,00	233.186.880,00
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	382.553.273,00	382.553.273,00
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	855.544.550,00	855.544.550,00
31	Badan Penghubung	45.661.478,00	45.661.478,00
	Jumlah	**122.948.090.550,00**	**119.786.596.267,00**

5.3.1.3.4.4 Jaringan **Rp313.318.712.148,00**

Jaringan sebesar Rp313.318.712.148,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp251.548.737.092,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp61.769.975.056,00 atau 0,26% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	21.751.617.229,00	21.914.772.741,00
2	Dinas Kesehatan	808.726.228,00	904.771.228,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	447.980.000,00	447.980.000,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	4.120.527.975,00	4.120.527.975,00
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	3.109.059.219,00	2.436.214.219,00
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.567.161.390,00	1.567.161.390,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	256.173.000,00	-
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	222.914.964.285,00	161.694.706.949,00
9	Dinas Sosial	500.000,00	500.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.236.800,00	23.236.800,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	71.708.800,00	71.708.800,00
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.547.760.100,00	1.547.760.100,00
13	Dinas Perhubungan	20.703.045.136,00	20.703.045.136,00
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	113.983.400,00	113.983.400,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	5.744.873,00	5.744.873,00
16	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	24.980.000,00	27.425.768,00
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.700.000,00	16.700.000,00
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	743.504.987,00	866.157.987,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	857.173.400,00	852.174.400,00
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.238.625.000,00	1.238.625.000,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	30.481.926.400,00	30.481.926.400,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	261.556.700,00	261.556.700,00
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.421.797.750,00	1.421.797.750,00
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	634.327.476,00	634.327.476,00
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	195.932.000,00	195.932.000,00
	Jumlah	**313.318.712.148,00**	**251.548.737.092,00**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya **Rp 1.056.350.270.097,00**

Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.056.350.270.097,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.053.571.666.936,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.778.603.161,00 atau 0,26% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bahan Perpustakaan	1.013.896.621.087,00	1.008.643.315.039,00
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	36.598.633.127,00	38.622.588.664,00
3	Hewan	4.272.583.560,00	4.597.500.260,00
4	Biota Perairan	2.878.600,00	2.672.800,00
5	Tanaman	1.161.841.323,00	1.286.701.773,00
6	Barang Koleksi Non Budaya	64.034.500,00	65.210.500,00
7	Aset Tetap Dalam Renovasi	353.677.900,00	353.677.900,00
	Jumlah	**1.056.350.270.097,00**	**1.053.571.666.936,00**

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**1.053.571.666.936,00**
Penambahan	
Belanja Modal	86.867.983.703,00
Belanja Hutang	-

Belanja Barang/Jasa	400.504.070,00
Hibah	338.737.470,00
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	8.600.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	102.900.000,00
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	374.054.535,00
Jumlah	**88.092.779.778,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	117.100.000,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	77.020.437.292,00
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	6.957.857.133,00
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	1.218.782.192,00
Jumlah	**85.314.176.617,00**
Saldo Akhir	**1.056.350.270.097,00**

5.3.1.3.5.1 Bahan Perpustakaan — Rp1.013.896.621.087,00

Bahan Perpustakaan sebesar Rp1.013.896.621.087,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.008.643.315.039 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.253.306.048,00 atau 0,52% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	991.066.674.455,00	986.302.314.382,00
2	Dinas Kesehatan	232.446.464,00	232.446.464,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	493.363.865,00	493.363.865,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	195.908.140,00	195.908.140,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	342.927.581,00	337.975.331,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	337.390.600,00	337.390.600,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	38.858.950,00	38.858.950,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	79.570.793,00	54.948.879,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	74.995.830,00	74.619.830,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	392.984.391,00	368.360.391,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	84.542.066,00	86.412.066,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	151.002.400,00	149.553.400,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	25.500.000,00	25.500.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	55.083.955,00	55.083.955,00
15	Dinas Sosial	307.644.882,00	307.644.882,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	190.250.092,00	190.250.092,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	64.410.400,00	62.426.400,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	108.482.200,00	108.482.200,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	896.738.709,00	894.746.709,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	17.147.000,00	108.800.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
21	Dinas Perhubungan	-	26.090.000,00
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	253.501.715,00	292.612.525,00
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	135.443.600,00	135.443.600,00
24	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	222.467.500,00	212.487.500,00
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	14.984.688.782,00	14.065.351.837,00
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	148.213.324,00	512.347.698,00
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	138.522.750,00	139.174.250,00
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	220.560.731,00	217.562.081,00
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	317.964.400,00	330.956.000,00
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	215.438.036,00	215.438.036,00
31	Sekretariat Daerah	601.089.961,00	601.089.961,00
32	Sekretariat DPRD	348.689.983,00	348.689.983,00
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	437.323.650,00	419.089.950,00
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	53.884.000,00	53.884.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.078.000,00	9.078.000,00
36	Badan Kepegawaian Daerah	35.073.100,00	35.073.100,00
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	516.726.482,00	501.827.682,00
38	Inspektorat	21.412.900,00	21.412.900,00
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	80.619.400,00	80.619.400,00
	Jumlah	**1.013.896.621.087,00**	**1.008.643.315.039,00**

5.3.1.3.5.2 Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp36.598.633.127,00

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp36.598.633.127,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.622.588.664,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.023.955.537,00) atau (5,24%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	28.267.854.984,00	30.120.474.770,00
2	Dinas Kesehatan	105.951.000,00	105.951.000,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	33.525.000,00	33.525.000,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	68.612.500,00	68.612.500,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	55.000.000,00	55.000.000,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	501.733.666,00	501.733.666,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	418.240.750,00	423.235.750,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	41.085.000,00	70.560.000,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	378.588.000,00	378.588.000,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	128.635,00	150.635,00
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	170.000,00	170.000,00
12	Satuan Polisi Pamong Praja	500.219.500,00	500.219.500,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	750.000,00	750.000,00
14	Dinas Sosial	350.774.000,00	350.774.000,00
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	77.908.500,00	77.908.500,00
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22.215.000,00	22.215.000,00
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	455.754.000,00	497.841.500,00
18	Dinas Perhubungan	378.775.000,00	387.710.000,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95.637.290,00	95.637.290,00
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	368.113.753,00	368.113.753,00
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	10.038.571,00	10.038.571,00
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.860.000,00	44.860.000,00
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	58.667.000,00	58.667.000,00
24	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	80.581.000,00	80.581.000,00
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	102.258.236,00	102.258.236,00
26	Sekretariat Daerah	211.606.342,00	211.606.342,00
27	Sekretariat DPRD	498.273.000,00	498.273.000,00
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.600.000,00	24.600.000,00
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	414.975.000,00	418.390.000,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	100.000,00	100.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	164.956.250,00	164.956.250,00
32	Badan Penghubung	2.864.681.150,00	2.947.087.401,00
33	Inspektorat	2.000.000,00	2.000.000,00
	Jumlah	**36.598.633.127,00**	**38.622.588.664,00**

5.3.1.3.5.3 Hewan Rp4.272.583.560,00

Hewan sebesar Rp4.272.583.560,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.597.500.260,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp324.916.700,00) atau (7,07%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	230.669.000,00	231.193.560,00
2	Dinas Kesehatan	7.000.000,00	7.300.000,00
3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	236.072.000,00	236.072.000,00
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.798.842.560,00	4.122.934.700,00
	Jumlah	**4.272.583.560,00**	**4.597.500.260,00**

5.3.1.3.5.4 Biota Perairan Rp2.878.600,00

Biota Perairan sebesar Rp2.878.600,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.672.800,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp205.800,00 atau 7,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.878.600,00	2.672.800,00
	Jumlah	**2.878.600,00**	**2.672.800,00**

5.3.1.3.5.5 Tanaman Rp1.161.841.323,00

Tanaman sebesar Rp1.161.841.323,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.286.701.773,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp124.860.450,00) atau (9,70%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.321.490,00	875.181.940,00
2	Dinas Kesehatan	34.650.000,00	34.650.000,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	295.101.633,00	295.101.633,00
4	Dinas Perhubungan	39.465.000,00	39.465.000,00
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	42.303.200,00	42.303.200,00
	Jumlah	**1.161.841.323,00**	**1.286.701.773,00**

5.3.1.3.5.6 Barang Koleksi Non Budaya Rp64.034.500,00

Barang Koleksi Non Budaya sebesar Rp64.034.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp65.210.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.176.000,00) atau (1,80%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.034.500,00	35.210.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	30.000.000,00	30.000.000,00
	Jumlah	**64.034.500,00**	**65.210.500,00**

5.3.1.3.5.7 Aset Tetap Dalam Renovasi — Rp353.677.900,00

Aset Tetap Dalam Renovasi sebesar Rp353.677.900,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	353.677.900,00	353.677.900,00
	Jumlah	**353.677.900,00**	**353.677.900,00**

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan — Rp287.616.819.183,00

Konstruksi dalam Pengerjaan sebesar Rp287.616.819.183,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp245.302.753.445,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp42.314.065.738,00 atau 17,25% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan – Tanah	917.226.000,00	-
2	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan	263.493.902.508,00	135.222.261.614,00
3	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi	23.156.630.675,00	68.261.461.711,00
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya	49.060.000,00	41.819.030.120,00
	Jumlah	**287.616.819.183,00**	**245.302.753.445,00**

Rincian mutasi kontruksi dalam pengerjaan terdiri dari : **(pengisian menggunakan kertas kerja aset tetap terlampir)**

Saldo Awal	**245.302.753.445,00**
Penambahan	
Belanja Modal	175.073.444.810,00
Belanja Hutang	-
Belanja Barang/Jasa	118.284.800,00
Hibah	-
Hasil Usaha Mandiri	-
Mutasi Masuk	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Tetap	-
Reklasifikasi Masuk dari Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Masuk dari Properti Investasi	-
Reklasifikasi Dari Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi	-
Jumlah	**175.191.729.610,00**
Berkurang	
Mutasi Keluar	-
Reklasifikasi Keluar ke Aset Tetap	58.462.082.863,00
Reklasifikasi Keluar ke Aset Lainnya	-
Reklasifikasi Keluar ke Properti Investasi	-
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel	-
Koreksi Belanja Modal	-
Koreksi Belanja Hutang	-
Koreksi Tahun Lalu	74.415.581.009,00
Jumlah	**132.877.663.872,00**
Saldo Akhir	**287.616.819.183,00**

5.3.1.3.6.1 Konstruksi Dalam Pengerjaan – Tanah Rp917.226.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan – Tanah sebesar Rp917.226.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp917.226.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	917.226.000,00	-
	Jumlah	**917.226.000,00**	**-**

5.3.1.3.6.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan Rp263.493.902.508,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Gedung dan Bangunan sebesar Rp263.493.902.508,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp135.222.261.614,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp128.271.640.894,00 atau 94,86% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.030.338.000,00	13.996.669.495,00
2	Dinas Kesehatan	619.204.000,00	1.143.700.220,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	198.473.357.041,00	97.723.437.346,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	-
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	-
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	47.882.390.643,00	-
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	-	-
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	12.014.671.662,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.573.507.000,00	2.208.301.000,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.579.936.373,00	2.579.936.373,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	710.423.000,00	710.423.000,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
15	Dinas Ketahanan Pangan	-	49.594.800,00
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	67.534.000,00	67.534.000,00
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	-	-
18	Dinas Perhubungan	2.450.347.221,00	2.893.094.288,00
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	-	-
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	89.551.000,00	89.551.000,00
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	-	-
22	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	1.069.202.800,00	852.665.000,00
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	133.276.000,00	133.276.000,00
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	328.093.000,00	272.665.000,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	329.850.550,00	329.850.550,00
26	Dinas Pertanian dan Perkebunan	15.245.600,00	15.245.600,00
27	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	45.341.280,00	45.341.280,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
29	Badan Kepegawaian Daerah	96.305.000,00	96.305.000,00
30	Inspektorat	-	-
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
	Jumlah	**263.493.902.508,00**	**135.222.261.614,00**

5.3.1.3.6.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi Rp23.156.630.675,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Jalan, Jaringan, Irigasi sebesar Rp23.156.630.675,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp68.261.461.711,00 mengalami **kenaikan** sebesar (Rp45.104.831.036,00) atau (66,08%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	6.582.567.515,00	4.822.866.845,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	16.197.973.815,00	12.269.032.715,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	-	39.142.400,00
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	48.621.100,00	48.621.100,00
6	Dinas Perhubungan	176.905.700,00	45.680.000,00
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	72.915.700,00	72.915.700,00
8	Dinas Kelautan dan Perikanan	68.608.200,00	50.954.164.306,00
9	Dinas Pertanian dan Perkebunan	9.038.645,00	9.038.645,00
	Jumlah	**23.156.630.675,00**	**68.261.461.711,00**

5.3.1.3.6.4 Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya Rp49.060.000,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan - Aset Tetap Lainnya sebesar Rp49.060.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp41.819.030.120,00 mengalami kenaikan sebesar (Rp41.769.970.120,00) atau (99,88%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	41.769.970.120,00
2	Dinas Pertanian dan Perkebunan	49.060.000,00	49.060.000,00
	Jumlah	**49.060.000,00**	**41.819.030.120,00**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan (Rp18.940.511.645.566,10)

Akumulasi Penyusutan sebesar (Rp18.940.511.645.566,10) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp17.980.771.469.501,50) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp959.740.176.064,61) atau 5,34% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(7.175.487.568.983,53)	(6.993.741.824.982,95)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.651.567.872.774,62)	(2.460.821.947.012,16)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(9.110.161.814.096,63)	(8.523.100.854.470,81)
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(3.294.389.711,32)	(3.106.843.035,58)
	Jumlah	**(18.940.511.645.566,10)**	**(17.980.771.469.501,50)**

5.3.1.3.7.1 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin (Rp7.175.487.568.983,53)

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar (Rp7.175.487.568.983,53) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.993.741.824.982,95) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp181.745.744.000,58) atau 2,60% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(291.733.962.373,83)	(296.867.803.441,30)
2	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(564.866.078.679,05)	(547.474.384.535,45)
3	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(320.226.114.289,29)	(329.294.149.673,65)
4	Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(61.998.352.504,62)	(65.472.633.595,36)
5	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(1.628.899.922.676,85)	(1.551.181.633.671,37)
6	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(247.546.781.827,13)	(256.607.104.330,37)
7	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	(2.059.280.462.821,85)	(1.940.081.621.673,77)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
8	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(479.352.987.771,17)	(487.616.695.462,70)
9	Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan	(5.899.324.985,81)	(6.059.255.787,94)
10	Akumulasi Penyusutan Komputer	(1.361.784.543.489,28)	(1.386.988.794.392,60)
11	Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi	(307.946.679,80)	(273.127.910,94)
12	Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran	(77.625.635,18)	(61.355.705,38)
13	Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	(251.591.913,92)	(218.632.705,30)
14	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	(12.708.000,00)	(10.590.000,00)
15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	(5.350.516.385,50)	(4.525.433.988,39)
16	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga	(77.235.213.445,86)	(61.761.631.989,48)
17	Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	(2.139.616.182,92)	(1.827.251.689,06)
18	Akumulasi Penyusutan Rambu-rambu	(22.923.607.162,99)	(21.516.268.253,79)
19	Akumulasi Penyusutan Peralatan Olahraga	(45.600.212.158,48)	(35.903.456.176,10)
	Jumlah	**(7.175.487.568.983,53)**	**(6.993.741.824.982,95)**

5.3.1.3.7.1.1 Akumulasi Penyusutan Alat Besar (Rp291.733.962.373,83)

Akumulasi Penyusutan Alat Besar sebesar (Rp291.733.962.373,83) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp296.867.803.441,30) mengalami **penurunan** sebesar Rp5.133.841.067,47 atau (1,73%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(16.427.017.067,51)	(16.286.855.209,24)
2	Dinas Kesehatan	(4.574.159.798,09)	(5.812.140.706,61)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(17.816.754.924,17)	(17.154.966.867,50)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(19.768.662.504,00)	(18.862.052.997,76)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(14.329.348.938,93)	(14.042.008.726,43)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.358.243.889,00)	(3.358.243.889,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(5.739.235.309,38)	(5.284.803.571,88)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(3.011.275.809,20)	(2.478.093.201,57)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.491.776.828,21)	(1.341.986.941,42)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(98.080.776.400,34)	(107.813.242.818,87)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(24.172.162.011,82)	(22.168.047.892,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(411.485.675,00)	(339.600.562,50)
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(7.062.976.936,65)	(6.469.292.508,73)
14	Dinas Sosial	(1.542.151.952,68)	(1.503.478.290,43)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(258.420.918,34)	(251.498.333,34)
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(622.400.000,00)	(622.400.000,00)
17	Dinas Ketahanan Pangan	(152.166.588,55)	(434.946.651,05)
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(456.231.242,67)	(525.914.521,67)
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.279.000.351,33)	(1.258.167.018,00)
20	Dinas Perhubungan	(1.784.058.300,00)	(1.745.287.250,00)
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	(2.173.199.250,00)	(1.835.897.887,50)
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.260.386.250,00)	(1.180.424.500,00)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(466.381.687,50)	(388.651.406,25)
24	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(2.698.630.726,53)	(2.635.886.605,86)
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.793.220.260,00)	(4.065.823.260,00)
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.695.404.557,30)	(3.106.639.965,00)
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(431.292.987,50)	(482.030.866,67)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.863.365.463,15)	(6.119.217.134,33)
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.686.821.005,21)	(3.206.668.567,71)
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.210.493.895,41)	(6.154.276.650,83)
31	Sekretariat Daerah	(11.877.237.816,71)	(10.921.025.175,71)
32	Sekretariat DPRD	(2.627.365.678,75)	(2.183.180.601,25)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(2.699.788.537,50)	(2.671.720.750,00)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(15.541.646.686,75)	(15.680.707.743,13)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.787.278.922,50)	(3.010.169.485,00)
36	Badan Kepegawaian Daerah	(1.505.960.000,00)	(1.505.960.000,00)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.454.025.477,15)	(2.329.457.145,56)
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(497.780.000,00)	(497.780.000,00)
39	Badan Penghubung	(256.927.125,00)	(275.714.637,50)
40	Inspektorat	(178.541.375,00)	(173.633.875,00)
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(689.909.226,00)	(689.909.226,00)
	Jumlah	**(291.733.962.373,83)**	**(296.867.803.441,30)**

5.3.1.3.7.1.2 Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan (Rp564.866.078.679,05)

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan sebesar (Rp564.866.078.679,05) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp547.474.384.535,45) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp17.391.694.143,60) atau 3,18% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(130.002.403.006,01)	(123.544.908.387,54)
2	Dinas Kesehatan	(20.753.630.506,79)	(18.827.230.967,33)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(7.240.435.406,70)	(6.542.088.002,72)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(8.271.038.995,29)	(7.634.142.795,29)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(4.848.180.373,34)	(4.513.203.523,34)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(5.984.682.641,75)	(5.637.149.011,46)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(4.304.982.004,80)	(3.981.200.214,80)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(6.133.258.082,27)	(6.320.124.678,52)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(4.367.057.054,50)	(4.017.977.054,50)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(17.669.363.348,59)	(15.787.509.476,26)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(12.501.510.034,20)	(10.711.395.534,83)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.696.860.783,00)	(4.049.006.220,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(4.745.167.939,50)	(5.008.451.627,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(21.873.945.275,18)	(20.817.955.050,28)
15	Dinas Sosial	(17.583.591.817,75)	(16.480.311.499,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(8.856.813.441,91)	(8.491.894.621,16)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.437.237.245,00)	(2.432.506.995,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(3.012.392.722,34)	(2.958.162.722,34)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(17.869.450.426,57)	(19.607.652.095,96)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(2.878.406.304,84)	(2.927.911.868,84)
21	Dinas Perhubungan	(28.179.858.965,58)	(28.200.904.366,83)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(6.319.740.214,65)	(7.670.683.589,65)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.844.290.146,83)	(2.785.118.021,83)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(2.842.687.717,25)	(3.144.884.123,50)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(4.596.794.332,00)	(4.421.513.082,00)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.258.031.407,50)	(5.289.457.720,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(18.268.420.398,22)	(18.436.283.737,17)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(5.333.702.951,88)	(5.064.418.919,08)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(15.960.597.727,12)	(15.520.422.031,23)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.593.861.815,50)	(6.993.947.636,33)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(6.543.444.245,00)	(6.476.802.995,00)
32	Sekretariat Daerah	(57.871.940.777,53)	(55.497.426.733,56)
33	Sekretariat DPRD	(20.130.610.158,85)	(20.252.762.190,10)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.270.326.903,66)	(4.335.392.203,66)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(35.496.465.593,04)	(32.686.089.088,61)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(15.789.133.623,67)	(19.562.686.126,67)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(3.555.496.387,66)	(3.492.996.387,66)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.742.334.004,67)	(2.665.447.963,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.244.067.505,99)	(990.561.005,99)
40	Badan Penghubung	(7.620.617.774,04)	(6.672.510.451,41)
41	Inspektorat	(4.360.718.655,58)	(4.082.892.291,00)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(3.012.529.962,50)	(2.940.401.525,00)
	Jumlah	**(564.866.078.679,05)**	**(547.474.384.535,45)**

5.3.1.3.7.1.3 Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur (Rp320.226.114.289,29)

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur sebesar (Rp320.226.114.289,29) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp329.294.149.673,65) mengalami **penurunan** sebesar Rp9.068.035.384,36 atau (2,75%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(273.903.656.197,14)	(276.940.936.096,56)
2	Dinas Kesehatan	(2.260.280.883,99)	(1.712.186.583,99)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(1.314.602.604,67)	(1.248.879.446,34)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(1.946.692.902,70)	(1.787.831.782,26)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(590.744.927,37)	(568.555.716,87)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(587.104.481,25)	(578.889.848,75)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(45.015.219,07)	(41.832.666,67)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(559.261.150,00)	(1.227.942.640,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(810.635.604,16)	(1.355.163.896,66)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(395.043.715,70)	(277.676.025,31)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.425.936.434,73)	(2.428.198.001,00)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(988.210.101,31)	(923.598.386,31)
13	Dinas Sosial	(191.247.283,34)	(187.637.283,34)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.912.914.648,05)	(2.814.315.868,98)
15	Dinas Ketahanan Pangan	(200.102.583,34)	(216.350.833,34)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(2.466.946.484,01)	(4.227.224.410,33)
17	Dinas Perhubungan	(1.507.311.616,60)	(5.032.778.616,60)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	(32.795.683,34)	(26.407.043,34)
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(23.812.364,09)	(13.006.657,59)
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(50.195.833,34)	(34.265.833,34)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(1.757.607.688,90)	(1.625.251.933,20)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(748.918.645,01)	(1.055.500.475,01)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(750.046.532,64)	(752.287.669,31)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.056.365.060,00)	(3.017.135.466,67)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(7.163.203.770,99)	(7.378.471.134,82)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(12.964.347.990,22)	(13.326.801.383,73)
27	Sekretariat Daerah	(121.745.666,66)	(116.643.466,66)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(987.900,00)	(592.740,00)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(358.606.666,67)	(288.341.666,67)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(11.023.650,00)	(9.191.100,00)
31	Badan Penghubung	(9.350.000,00)	(8.855.000,00)
32	Inspektorat	(71.400.000,00)	(71.400.000,00)
	Jumlah	**(320.226.114.289,29)**	**(329.294.149.673,65)**

5.3.1.3.7.1.4 Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian (Rp61.998.352.504,62)

Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian sebesar (Rp61.998.352.504,62) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp65.472.633.595,36) mengalami **penurunan** sebesar Rp3.474.281.090,74 atau (5,31%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(15.734.259.188,01)	(16.209.878.443,41)
2	Dinas Kesehatan	(10.150.000,00)	(7.250.000,00)
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(43.140.312,50)	(41.696.562,50)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(336.815.711,67)	(313.690.711,67)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(126.640.630,00)	(126.640.630,00)
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(10.309.818,75)	(6.560.793,75)
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(6.108.281,25)	(3.278.906,25)
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(7.330.060,00)	(7.330.060,00)
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(12.000.000,00)	(38.000.000,00)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
10	Dinas Sosial	(20.931.875,00)	(17.819.375,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(2.148.416.383,32)	(2.127.060.550,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	(1.310.066.986,67)	(1.218.941.986,67)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(531.394.583,34)	(555.716.583,34)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(124.875,00)	-
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	(26.295.000,00)
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	(770.075.648,34)	(1.268.856.875,00)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(8.360.611.241,76)	(9.018.457.413,26)
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(32.514.426.909,01)	(34.429.609.704,51)
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(39.750.000,00)	(39.750.000,00)
20	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(15.800.000,00)	(15.800.000,00)
	Jumlah	**(61.998.352.504,62)**	**(65.472.633.595,36)**

5.3.1.3.7.1.5 Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rp1.628.899.922.676,85)

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar (Rp1.628.899.922.676,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.551.181.633.671,37) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp77.718.289.005,48) atau 5,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(871.352.528.105,31)	(848.976.472.122,48)
2	Dinas Kesehatan	(34.212.246.043,43)	(36.823.966.629,01)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(49.714.425.050,64)	(48.368.196.954,82)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(64.030.977.920,88)	(56.125.044.490,73)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(40.454.804.912,60)	(37.710.649.669,13)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(16.450.384.661,83)	(16.230.131.837,15)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(16.651.822.441,20)	(16.989.825.073,20)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(28.256.241.369,93)	(27.598.913.488,32)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(13.985.068.908,37)	(14.176.054.080,93)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(6.422.647.454,07)	(5.572.448.246,29)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(8.822.480.977,07)	(8.874.359.901,85)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(2.699.310.269,33)	(3.159.641.626,65)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.527.638.107,36)	(2.498.909.440,69)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(8.430.944.639,67)	(7.973.692.172,99)
15	Dinas Sosial	(21.463.300.884,48)	(20.565.611.954,94)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(12.242.612.380,61)	(11.341.788.426,45)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(2.085.536.891,86)	(1.976.425.746,20)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(3.002.177.978,73)	(4.172.628.519,70)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(10.689.896.453,16)	(15.230.892.059,33)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(5.077.991.365,01)	(5.511.799.686,34)
21	Dinas Perhubungan	(6.939.516.533,70)	(7.857.161.584,41)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(7.776.791.887,22)	(6.716.892.886,83)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(8.609.969.729,49)	(9.490.276.498,20)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(2.525.029.412,37)	(3.038.188.156,68)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(74.420.200.330,62)	(23.025.685.955,85)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(13.142.711.803,95)	(13.325.157.869,69)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(8.090.048.340,54)	(9.902.182.096,24)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(7.728.974.202,31)	(8.182.270.891,72)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(17.276.689.246,88)	(17.641.409.221,15)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(13.338.396.018,83)	(13.116.621.098,77)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(18.065.082.243,39)	(19.678.447.781,07)
32	Sekretariat Daerah	(42.848.562.912,20)	(42.038.558.630,16)
33	Sekretariat DPRD	(49.939.196.487,86)	(46.235.819.435,21)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.302.548.369,54)	(6.763.795.638,37)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(62.045.134.969,79)	(63.920.947.143,23)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(28.878.922.753,06)	(29.373.472.145,02)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(6.946.343.931,52)	(6.685.994.757,75)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(20.384.270.481,74)	(19.048.243.807,64)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.763.828.033,18)	(2.065.376.299,86)
40	Badan Penghubung	(5.432.670.397,30)	(5.875.347.084,07)
41	Inspektorat	(4.942.570.338,26)	(4.454.594.082,15)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.929.427.437,56)	(2.867.738.480,10)
	Jumlah	**(1.628.899.922.676,85)**	**(1.551.181.633.671,37)**

5.3.1.3.7.1.6 Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar (Rp247.546.781.827,13)

Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar (Rp247.546.781.827,13) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp256.607.104.330,37) mengalami **penurunan** sebesar Rp9.060.322.503,24 atau (3,53%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(134.521.148.723,86)	(143.919.968.222,43)
2	Dinas Kesehatan	(4.725.170.898,88)	(5.548.564.884,94)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.538.716.264,68)	(4.370.732.464,65)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(7.152.837.750,03)	(6.563.047.396,18)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(4.032.997.741,01)	(3.790.336.132,18)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.601.437.655,70)	(1.656.937.774,70)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(703.136.921,05)	(766.637.287,72)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.113.328.298,71)	(1.211.032.078,56)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(529.641.802,85)	(528.205.605,58)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(1.662.178.702,09)	(953.795.570,09)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.811.627.326,35)	(1.791.381.850,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(590.517.520,33)	(618.897.279,33)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(593.106.666,64)	(624.818.333,31)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.308.123.484,81)	(2.293.712.174,81)
15	Dinas Sosial	(391.735.999,99)	(334.227.833,32)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(1.892.581.842,59)	(1.511.351.033,38)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(172.818.405,01)	(163.171.101,67)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(427.542.454,86)	(707.432.647,27)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(2.035.789.038,43)	(3.304.593.764,43)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(1.685.566.389,68)	(1.673.028.783,00)
21	Dinas Perhubungan	(1.544.923.723,00)	(2.302.324.316,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(10.261.815.467,00)	(8.867.555.425,14)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(1.079.764.861,34)	(1.503.967.596,99)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(614.764.149,66)	(766.772.486,66)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(3.721.051.518,90)	(3.004.502.587,64)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(4.489.747.290,01)	(4.687.865.256,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.337.359.396,94)	(1.712.826.000,80)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(672.607.041,69)	(647.979.741,69)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.937.044.197,83)	(4.118.601.826,50)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.097.479.722,91)	(4.211.438.221,44)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(645.138.953,44)	(1.489.602.450,32)
32	Sekretariat Daerah	(21.923.023.323,86)	(20.481.048.596,44)
33	Sekretariat DPRD	(4.402.707.551,95)	(4.147.270.051,95)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(888.772.193,49)	(871.758.150,16)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(5.685.329.087,00)	(5.996.264.119,00)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.133.015.874,00)	(1.941.839.374,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(326.705.695,65)	(306.334.715,65)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(3.875.289.913,42)	(3.730.034.571,33)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(406.462.499,98)	(485.004.499,98)
40	Badan Penghubung	(1.421.702.120,84)	(1.393.519.735,13)
41	Inspektorat	(937.003.456,66)	(915.984.623,33)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(655.069.900,01)	(692.737.766,67)
	Jumlah	**(247.546.781.827,13)**	**(256.607.104.330,37)**

5.3.1.3.7.1.7 Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran & Kesehatan (Rp2.059.280.462.821,85)

Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar (Rp2.059.280.462.821,85) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.940.081.621.673,77) mengalami kenaikan sebesar (Rp119.198.841.148,08) atau 6,14% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(9.805.704.325,83)	(9.878.356.122,11)
2	Dinas Kesehatan	(65.293.291.826,70)	(57.224.375.339,91)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(741.656.566.019,17)	(669.926.202.806,89)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(579.252.900.261,42)	(546.180.217.114,03)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(323.537.275.427,43)	(315.441.488.994,06)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(138.753.202.179,28)	(140.139.308.271,07)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(73.465.137.678,77)	(68.304.890.618,04)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(52.290.320.556,85)	(56.596.735.538,14)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(72.158.194.635,94)	(73.614.689.615,27)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(1.812.930,00)	(942.723,60)
11	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(190.779.600,00)	(190.779.600,00)
12	Dinas Sosial	(550.787.941,69)	(456.150.146,08)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(263.868.685,00)	(263.868.685,00)
14	Dinas Perhubungan	(3.739.166,67)	(2.109.166,67)
15	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(3.486.000,00)	(1.494.000,00)
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(3.875.000,00)	(5.075.000,00)
17	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(20.100.000,00)	(18.000.000,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(5.932.208,34)	(4.276.708,34)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(915.489.420,02)	(705.370.060,02)
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(7.100.000,00)	(7.100.000,00)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(2.500.000,00)	(2.000.000,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(106.824.593,73)	(105.625.999,53)
23	Sekretariat Daerah	(168.166.666,67)	(144.191.666,67)
24	Sekretariat DPRD	(233.015.000,00)	(298.415.000,00)
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(764.166,67)	(109.166,67)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(138.165.000,00)	(130.576.000,00)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(216.001.615,00)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(216.001.615,00)	(223.085.050,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(235.115.250,00)	-
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(346.666,67)	(186.666,67)
	Jumlah	**(2.059.280.462.821,85)**	**(1.940.081.621.673,77)**

5.3.1.3.7.1.8 Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium (Rp479.352.987.771,17)

Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium sebesar (Rp479.352.987.771,17) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp487.616.695.462,70) mengalami **penurunan** sebesar Rp8.263.707.691,53 atau (1,69%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(292.814.003.693,88)	(304.578.562.468,12)
2	Dinas Kesehatan	(32.306.028.727,77)	(30.834.547.787,45)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(24.331.190.140,10)	(18.113.765.022,52)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(12.986.149.655,88)	(6.811.351.120,20)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(18.697.713.566,75)	(19.050.650.884,19)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(2.082.312.390,29)	(2.086.131.925,66)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(2.604.357.199,86)	(3.206.791.883,50)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.751.957.957,25)	(3.112.796.040,58)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(2.564.420.376,76)	(3.919.225.753,93)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(3.878.137.867,32)	(8.637.591.593,53)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(2.578.430.261,63)	(2.394.738.543,80)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(86.023.825,00)	(73.000.960,42)
13	Dinas Sosial	(45.959.183,33)	(44.425.000,00)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.027.395.761,17)	(4.587.979.720,84)
15	Dinas Ketahanan Pangan	(5.674.213.664,34)	(5.821.339.418,42)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(11.493.551.890,77)	(14.170.761.425,96)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(10.433.500,00)	(7.452.500,00)
18	Dinas Perhubungan	-	(163.343.000,00)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	(249.750,00)	-
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(11.341.550,11)	(6.625.865,56)
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(125.315.972,22)	(99.928.055,56)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(77.243.333,33)	(90.230.000,00)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	(5.823.383.507,55)	(8.276.577.851,14)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(15.104.558.566,15)	(13.702.686.287,33)
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(9.293.882.606,48)	(9.046.947.047,35)
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.421.231.763,94)	(5.191.452.021,82)
27	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(23.897.760.616,45)	(22.940.550.518,12)
28	Sekretariat DPRD	(386.944,44)	-
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(2.850.000,00)	(7.916.666,70)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(540.481.498,40)	(517.304.100,00)
31	Inspektorat	(122.022.000,00)	(122.022.000,00)
	Jumlah	**(479.352.987.771,17)**	**(487.616.695.462,70)**

5.3.1.3.7.1.9 Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan (Rp(5.899.324.985,81)

Akumulasi Penyusutan Alat Persenjataan sebesar (Rp(5.899.324.985,81) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp6.059.255.787,94) mengalami **penurunan** sebesar Rp159.930.802,13 atau (2,64%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.091.386.273,43)	(3.511.537.332,94)
2	Dinas Kesehatan	-	(9.205.000,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	(187.829.055,00)	(187.829.055,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	(6.175.000,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.953.500,00)	(5.953.500,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja	(171.450.000,00)	(163.190.000,00)
7	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(1.641.279.175,00)	(1.622.829.175,00)
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(3.270.800,00)	-
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(138.450.000,00)	(144.900.000,00)
10	Dinas Perhubungan	(3.254.725,00)	(31.204.725,00)
11	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(181.100.000,00)	(178.100.000,00)
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(42.000.000,00)	(52.000.000,00)
13	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(19.882.000,00)	(19.882.000,00)
14	Sekretariat Daerah	(94.300.000,00)	(94.300.000,00)
15	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(23.650.000,00)	(23.650.000,00)
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(287.019.457,38)	-
17	Inspektorat	(8.500.000,00)	(8.500.000,00)
	Jumlah	**(5.899.324.985,81)**	**(6.059.255.787,94)**

5.3.1.3.7.1.10 Akumulasi Penyusutan Komputer (Rp1.361.784.543.489,28)

Akumulasi Penyusutan Komputer sebesar (Rp1.361.784.543.489,28) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.386.988.794.392,60) mengalami **penurunan** sebesar Rp25.204.250.903,32 atau (1,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(989.018.269.356,91)	(1.026.396.184.142,32)
2	Dinas Kesehatan	(12.831.066.120,36)	(14.930.944.114,05)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(24.575.566.900,16)	(21.338.761.015,72)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(36.237.452.022,38)	(30.056.492.029,39)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(8.696.638.105,50)	(6.875.321.948,96)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(2.818.944.107,78)	(3.594.185.297,13)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(3.305.961.549,95)	(3.216.528.132,13)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(4.953.774.513,34)	(4.998.584.590,89)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(3.535.877.126,13)	(3.226.945.840,15)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(5.430.364.218,21)	(5.061.893.109,82)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.951.975.385,77)	(5.685.269.131,39)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.482.663.186,53)	(1.747.582.078,03)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(1.827.032.824,17)	(1.774.711.574,17)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.317.121.979,91)	(2.276.645.321,56)
15	Dinas Sosial	(5.234.979.405,97)	(4.890.213.912,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(5.901.052.305,75)	(5.251.116.805,67)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(912.671.849,67)	(819.899.458,05)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(1.939.065.110,61)	(2.717.525.627,67)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.312.590.575,69)	(9.404.084.715,93)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(3.107.549.202,02)	(3.229.017.212,02)
21	Dinas Perhubungan	(4.356.035.513,70)	(5.906.159.254,04)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(83.216.664.945,50)	(72.442.280.124,99)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.123.219.135,95)	(1.957.889.962,95)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(3.332.689.243,80)	(3.660.724.011,80)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(4.424.572.785,00)	(4.291.814.266,84)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(5.288.388.543,22)	(5.512.678.377,74)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(3.008.447.995,84)	(3.886.611.028,81)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(2.735.577.392,34)	(2.517.233.482,67)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.659.869.860,59)	(6.192.737.744,76)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.869.568.179,28)	(6.848.639.395,43)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(4.964.302.685,74)	(7.599.642.414,13)
32	Sekretariat Daerah	(17.053.653.393,92)	(15.970.651.948,45)
33	Sekretariat DPRD	(11.673.356.081,87)	(10.795.864.123,55)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(4.585.841.829,01)	(4.126.621.840,18)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(51.166.467.292,63)	(52.450.899.177,45)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(7.689.323.323,26)	(7.617.133.059,94)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(6.610.098.760,51)	(6.195.005.760,51)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(5.489.310.451,02)	(4.955.772.370,85)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.096.272.099,93)	(1.297.985.325,93)
40	Badan Penghubung	(1.118.345.860,33)	(1.462.438.358,66)
41	Inspektorat	(2.304.335.126,30)	(2.262.897.376,30)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.627.587.142,73)	(1.545.208.929,57)
	Jumlah	**(1.361.784.543.489,28)**	**(1.386.988.794.392,60)**

5.3.1.3.7.1.11 Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi (Rp307.946.679,80)

Akumulasi Penyusutan Alat Eksplorasi sebesar (Rp307.946.679,80) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp273.127.910,94) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp34.818.768,86) atau 12,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(287.006.679,80)	(253.291.910,94)
2	Dinas Kesehatan	(570.000,00)	(390.000,00)
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(20.370.000,00)	(19.446.000,00)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
	Jumlah	**(307.946.679,80)**	**(273.127.910,94)**

5.3.1.3.7.1.12 Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran (Rp77.625.635,18)

Akumulasi Penyusutan Alat Pengeboran sebesar (Rp77.625.635) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp61.355.705,38) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp16.269.929,80) atau 26,52% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(77.625.635,18)	(61.355.705,38)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
	Jumlah	**(77.625.635,18)**	**(61.355.705,38)**

5.3.1.3.7.1.13 Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (Rp251.591.913,92)

Akumulasi Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebesar (Rp251.591.913,92) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp218.632.705,30) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp32.959.208,62) atau 15,08% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(212.405.313,92)	(187.283.425,30)
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(39.186.600,00)	(31.349.280,00)
	Jumlah	**(251.591.913,92)**	**(218.632.705,30)**

5.3.1.3.7.1.14 Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi (Rp12.708.000,00)

Akumulasi Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi sebesar (Rp12.708.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp10.590.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.118.000,00) atau 20,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan	(12.708.000,00)	(10.590.000,00)
	Jumlah	**(12.708.000,00)**	**(10.590.000,00)**

5.3.1.3.7.1.15 Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja (Rp5.350.516.385,50)

Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja sebesar (Rp5.350.516.385,50) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp4.525.433.988,39) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp825.082.397,11) atau 18,23% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(4.381.562.201,57)	(3.701.697.666,89)
2	Dinas Kesehatan	(50.833.333,33)	(37.947.916,66)
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(50.753.083,33)	(49.378.083,33)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(11.070.000,00)	(3.690.000,00)
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(526.500.000,00)	(526.500.000,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(30.350.600,00)	(26.336.200,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan	(14.773.333,33)	(14.740.000,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(5.599.500,00)	(2.793.000,00)
9	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(81.388.727,29)	(42.322.138,19)
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(8.381.249,99)	(4.893.749,99)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(115.304.356,66)	(41.135.233,33)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(20.000.000,00)	(20.000.000,00)
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(54.000.000,00)	(54.000.000,00)
	Jumlah	**(5.350.516.385,50)**	**(4.525.433.988,39)**

5.3.1.3.7.1.16 Akumulasi Penyusutan Alat Peraga (Rp77.235.213.445,86)

Akumulasi Penyusutan Alat Peraga sebesar (Rp77.235.213.445,86) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp61.761.631.989,48) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp15.473.581.456,38) atau 25,05% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(76.348.482.109,75)	(61.079.229.330,77)
2	Dinas Kesehatan	(12.106.180,83)	(27.152.750,83)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(443.687.288,36)	(310.099.519,16)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(87.100.313,62)	(53.543.725,42)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(101.250,00)	-
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(15.558.400,00)	(12.892.000,00)
7	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(4.463.333,33)	(343.333,33)
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(31.611.249,96)	(21.628.749,96)
9	Dinas Sosial	(106.043.333,33)	(80.288.333,33)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(186.059.986,68)	(176.454.246,68)
	Jumlah	**(77.235.213.445,86)**	**(61.761.631.989,48)**

5.3.1.3.7.1.17 Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi (Rp2.139.616.182,92)

Akumulasi Penyusutan Peralatan Proses/Produksi sebesar (Rp2.139.616.182,92) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.827.251.689,06) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp312.364.493,86) atau 17,09 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.651.153.047,48)	(1.274.368.459,87)
2	Dinas Kesehatan	(9.609.375,00)	(6.796.875,00)
3	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(71.250.000,00)	(59.375.000,00)
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(44.538.291,67)	(36.311.541,67)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(58.125.000,00)	(376.170.000,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(170.048.031,25)	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.648.875,02)	(3.673.500,02)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(39.454.500,00)	(33.711.000,00)
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(53.789.062,50)	(36.845.312,50)
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(35.000.000,00)	-
	Jumlah	**(2.139.616.182,92)**	**(1.827.251.689,06)**

5.3.1.3.7.1.18 Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu (Rp22.923.607.162,99)

Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu sebesar (Rp22.923.607.162,99) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp21.516.268.253,79) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.407.338.909,20) atau 6,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(157.720.058,93)	(125.756.626,84)
2	RSUD dr. Rehatta Jepara	(4.955.134,35)	(2.369.846,85)
3	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(296.875,00)	-
4	Dinas Perhubungan	(22.651.462.689,04)	(21.307.651.238,43)
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	(58.437.000,00)	(50.244.875,00)
6	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(13.074.989,00)	-
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.197.916,67)	(4.822.916,67)
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(4.192.500,00)	(3.354.000,00)
9	Sekretariat DPRD	(787.500,00)	-
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(26.482.500,00)	(22.068.750,00)
	Jumlah	**(22.923.607.162,99)**	**(21.516.268.253,79)**

5.3.1.3.7.1.19 Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga (Rp45.600.212.158,48)

Akumulasi Penyusutan Alat Olahraga sebesar (Rp45.600.212.158,48) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp35.903.456.176,10) mengalami kenaikan sebesar (Rp9.696.755.982,38 atau 27,01% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(15.259.490.295,97)	(15.228.571.131,01)
2	Dinas Kesehatan	(79.468.366,66)	(82.208.766,66)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(25.800.000,00)	(25.800.000,00)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(20.079.600,00)	(20.079.600,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(13.789.583,33)	(11.077.083,33)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(229.713.061,92)	(228.554.329,42)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(86.900.000,00)	(86.900.000,00)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(28.283.645,84)	(21.609.895,84)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(24.263.020,83)	(19.112.500,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(10.100.000,00)	(10.100.000,00)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	(27.550.000,00)	(27.550.000,00)
13	Dinas Sosial	(57.713.750,00)	(55.845.000,00)
14	Dinas Ketahanan Pangan	-	(3.006.000,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(4.895.833,33)	(12.945.833,33)
16	Dinas Perhubungan	-	(8.601.440,00)
17	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(106.455.208,33)	(95.042.708,33)
18	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(27.687.598.513,93)	(18.018.123.943,18)
19	Dinas Kelautan dan Perikanan	(200.484.000,00)	(200.484.000,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(23.750.000,00)	(23.750.000,00)
21	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.263.350,00)	(25.263.350,00)
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(74.528.750,00)	(72.541.250,00)
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(200.906.250,00)	(203.656.250,00)
24	Sekretariat Daerah	(229.081.125,01)	(221.285.291,67)
25	Sekretariat DPRD	(5.958.333,33)	(23.208.333,33)
26	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(694.752.000,00)	(694.752.000,00)
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(13.985.000,00)	(13.985.000,00)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(170.542.750,00)	(170.542.750,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(273.959.720,00)	(273.959.720,00)
30	Badan Penghubung	(22.900.000,00)	(22.900.000,00)
	Jumlah	**(45.600.212.158,48)**	**(35.903.456.176,10)**

5.3.1.3.7.2 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan (Rp2.651.567.872.774,62)

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar (Rp2.651.567.872.774,62) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.460.821.947.012,16) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp190.745.925.762,46) atau 7,75% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(2.614.011.397.421,00)	(2.426.540.693.750,25)
2	Akumulasi Penyusutan Monumen	(6.325.079.285,82)	(5.542.055.212,06)
3	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara	(700.304.282,00)	(1.172.280.348,52)
4	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	(30.531.091.785,80)	(27.566.917.701,33)
	Jumlah	**(2.651.567.872.774,62)**	**(2.460.821.947.012,16)**

5.3.1.3.7.2.1 Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung (Rp2.614.011.397.421,00)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung sebesar (Rp2.614.011.397.421,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp2.426.540.693.750,25) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp187.470.703.670,75) atau 7,73% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.434.630.660.759,23)	(1.344.790.471.074,82)
2	Dinas Kesehatan	(29.322.462.735,11)	(26.773.820.788,80)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(92.147.013.049,82)	(80.517.694.969,98)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(82.627.518.484,73)	(75.321.330.451,54)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(41.423.622.343,16)	(38.055.827.767,88)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(21.317.490.363,37)	(20.769.294.333,03)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(18.586.687.670,76)	(16.669.094.627,67)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(18.086.001.578,35)	(15.539.979.930,86)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(17.477.818.642,63)	(16.119.669.322,49)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(17.631.663.037,96)	(14.082.640.446,07)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(11.142.735.325,11)	(10.545.690.652,33)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(3.750.405.283,32)	(3.538.575.366,94)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(5.436.303.064,42)	(5.057.100.136,21)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.206.260.735,10)	(2.028.335.839,53)
15	Dinas Sosial	(89.457.802.094,67)	(83.634.544.955,73)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(22.655.909.478,73)	(22.519.121.266,81)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(10.214.993.347,44)	(9.813.526.776,88)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(4.140.783.580,01)	(3.567.012.885,07)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(18.994.923.178,60)	(16.917.847.572,99)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(4.078.801.931,08)	(3.864.655.743,45)
21	Dinas Perhubungan	(41.853.339.787,77)	(40.135.817.248,94)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(3.925.283.934,63)	(3.547.019.711,54)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(12.396.602.485,77)	(12.145.504.585,84)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(4.042.833.355,56)	(3.833.630.261,71)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(62.335.013.865,19)	(43.933.798.527,14)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(12.639.897.270,48)	(12.119.751.742,82)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(36.178.905.152,16)	(30.080.478.153,40)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(25.473.549.387,38)	(23.840.154.205,16)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(57.976.058.894,09)	(54.810.532.914,17)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(10.482.039.794,52)	(9.539.630.794,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(31.046.265.345,02)	(29.353.415.386,08)
32	Sekretariat Daerah	(55.555.983.791,78)	(53.411.988.279,93)
33	Sekretariat DPRD	(25.826.891.990,92)	(23.049.230.606,22)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(9.610.463.096,25)	(9.144.912.343,57)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(82.528.150.816,93)	(77.715.707.224,38)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(134.034.228.315,54)	(129.339.235.725,59)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(4.729.686.100,59)	(4.542.463.796,27)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(34.635.015.028,70)	(33.543.039.369,20)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(5.112.035.538,06)	(4.909.662.531,54)
40	Badan Penghubung	(8.302.209.020,61)	(7.902.981.491,02)
41	Inspektorat	(7.161.106.065,72)	(6.813.325.866,64)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.835.981.699,73)	(2.702.178.076,01)
	Jumlah	**(2.614.011.397.421,00)**	**(2.426.540.693.750,25)**

5.3.1.3.7.2.2 Akumulasi Penyusutan Monumen (Rp6.325.079.285,82)

Akumulasi Penyusutan Monumen sebesar (Rp6.325.079.285,82) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp5.542.055.212,06) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp783.024.073,76) atau 14,13% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.897.204.402,79)	(2.640.468.814,39)
2	Dinas Kesehatan	(28.832.400,00)	(25.949.160,00)
3	RSUD dr. Rehatta Jepara	(44.479.980,00)	(39.161.760,00)
4	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(179.091.572,00)	(162.810.520,00)
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(660.000,00)	(630.000,00)
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(81.912.740,00)	(76.192.560,00)
7	Dinas Sosial	(16.309.500,00)	(15.657.120,00)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(69.192.570,00)	(66.392.570,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(66.906.801,55)	(60.442.477,23)
10	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(587.948.351,20)	(510.965.834,80)
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(3.276.000,00)	(3.120.000,00)
12	Sekretariat DPRD	(1.439.805.217,88)	(1.088.858.498,04)
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(169.387.000,00)	(152.448.300,00)
14	Badan Penghubung	(740.072.750,40)	(698.957.597,60)
	Jumlah	**(6.325.079.285,82)**	**(5.542.055.212,06)**

5.3.1.3.7.2.3 Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara (Rp700.304.282,00)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara sebesar (Rp700.304.282,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.172.280.348,52) mengalami **penurunan** sebesar Rp471.976.066,52 atau (40,26%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(216.212.392,00)	(197.917.367,00)
2	Dinas Perhubungan	(46.389.817,80)	(38.658.181,50)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	(46.378.068,97)	(94.634.732,30)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(386.014.003,23)	(836.473.467,72)
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(4.140.000,00)	(3.450.000,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.170.000,00)	(1.146.600,00)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-
	Jumlah	**(700.304.282,00)**	**(1.172.280.348,52)**

5.3.1.3.7.2.4 Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti (Rp30.531.091.785,80)

Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti sebesar (Rp30.531.091.785,80) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp27.566.917.701,33) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp2.964.174.084,47) atau 10,75% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(14.730.802.168,66)	(13.269.569.556,35)
2	Dinas Kesehatan	(1.082.643.474,63)	(983.980.139,83)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(176.863.600,00)	(168.020.420,00)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(193.116.000,00)	(182.952.000,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(123.289.888,37)	(98.145.201,53)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.089.699.840,00)	(1.001.477.922,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(42.205.920,00)	(38.688.760,00)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(2.455.350,00)	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(537.739.425,66)	(505.695.588,70)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(50.983.225,84)	(36.357.552,50)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(30.691.760,00)	(27.901.600,00)
12	Dinas Sosial	(436.461.152,69)	(372.418.033,48)
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(168.956.568,33)	(152.754.893,00)
14	Dinas Ketahanan Pangan	(113.360.000,00)	(104.066.800,00)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(344.950.615,00)	(304.814.095,00)
16	Dinas Perhubungan	(108.340.071,43)	(80.699.618,92)
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	(33.062.273,83)	(17.192.382,39)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(10.575.282,00)	(7.780.626,00)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(22.004.000,00)	(19.803.600,00)
20	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(813.836.440,12)	(628.189.673,62)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(106.428.774,82)	(99.297.039,16)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(1.306.485.119,23)	(1.210.473.802,25)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(991.737.404,93)	(902.242.213,93)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(3.436.102.756,44)	(3.178.672.629,12)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(55.712.385,00)	(45.939.975,00)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.318.858,33)	(188.408,33)
27	Sekretariat DPRD	(92.638.085,33)	(85.033.936,00)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(30.150.400,00)	(28.266.000,00)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(308.714.410,16)	(272.899.759,52)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(3.357.945.252,00)	(3.051.231.602,70)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(682.407.683,00)	(645.669.472,00)
32	Inspektorat	(3.720.600,00)	(3.434.400,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(45.693.000,00)	(43.060.000,00)
	Jumlah	**(30.531.091.785,80)**	**(27.566.917.701,33)**

5.3.1.3.7.3 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan (Rp9.110.161.814.096,63)

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar (Rp9.110.161.814.096,64) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp8.523.100.854.470,81) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp587.060.959.625,83) atau 6,89 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Jalan dan Jembatan	(8.504.768.071.702,56)	(7.985.324.504.039,37)
2	Bangunan Air	(531.373.868.859,72)	(474.897.466.172,44)
3	Instalasi	(39.137.469.578,15)	(35.688.104.615,62)
4	Jaringan	(34.882.403.956,20)	(27.190.779.643,38)
	Jumlah	**(9.110.161.814.096,63)**	**(8.523.100.854.470,81)**

5.3.1.3.7.3.1 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan (Rp8.504.768.071.702,56)

Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan sebesar (Rp8.504.768.071.702,56) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp7.985.324.504.039,37) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp519.443.567.663,19) atau 6,50 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(15.698.215.787,67)	(14.860.669.581,24)
2	Dinas Kesehatan	(57.825.000,00)	(57.825.000,00)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(114.294.120,00)	(95.245.100,00)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	-	-
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(49.950.000,00)	(49.950.000,00)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(3.813.982.875,00)	(3.568.845.800,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(2.643.926.500,00)	(2.637.138.000,00)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(766.086.038,13)	(148.811.640,93)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(119.263.000,00)	(117.036.400,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(8.389.274.039.044,54)	(7.870.514.180.398,64)
11	Dinas Sosial	(52.859.000,00)	(52.859.000,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	(164.387.000,00)	(164.387.000,00)
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(10.540.134.183,34)	(8.854.338.658,17)
14	Dinas Perhubungan	(14.465.656.524,50)	(21.644.688.588,34)
15	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(4.102.311.114,58)	(2.331.273.163,72)
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	(25.371.936.834,31)	(23.493.851.326,10)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(3.252.876.902,37)	(2.895.269.712,23)
18	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(4.689.400.308,12)	(4.247.207.200,00)
19	Sekretariat DPRD	(387.415.000,00)	(387.415.000,00)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(26.900.626.970,00)	(26.900.626.970,00)
21	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(2.302.885.500,00)	(2.302.885.500,00)
	Jumlah	**(8.504.768.071.702,56)**	**(7.985.324.504.039,37)**

5.3.1.3.7.3.2 Akumulasi Penyusutan Bangunan Air (Rp531.373.868.859,72)

Akumulasi Penyusutan Bangunan Air sebesar (Rp531.373.868.859,72) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp474.897.466.172,44) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp56.476.402.687,28) atau 11,89% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.427.973.503,36)	(5.631.436.172,06)
2	Dinas Kesehatan	(292.330.066,67)	(268.707.433,33)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(571.871.946,73)	(510.029.681,79)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(175.000.000,00)	(175.000.000,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(280.652.317,57)	(289.450.634,62)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.333.463.333,33)	(1.240.170.585,01)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(45.980.200,00)	(42.695.900,00)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(51.530.475,00)	(48.339.950,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(381.670.270,83)	(346.219.250,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(52.262.682.433,83)	(49.162.488.530,59)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(400.800.305.617,67)	(362.586.794.669,96)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
12	Satuan Polisi Pamong Praja	(31.840.000,00)	(26.533.333,33)
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(44.500.000,00)	(42.275.000,00)
14	Dinas Sosial	(1.532.958.487,69)	(1.455.586.960,97)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(31.911.100,00)	(30.656.850,00)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(9.065.000,00)	(8.417.500,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(1.641.564.551,16)	(1.691.667.134,68)
18	Dinas Perhubungan	(1.530.157.600,22)	(2.012.104.562,77)
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(74.010.450,00)	(68.613.445,00)
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(31.457.800,00)	(28.598.000,00)
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(1.049.105.368,67)	(691.172.384,81)
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(101.983.064,52)	(96.151.612,90)
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	(50.195.288.348,43)	(36.282.055.770,54)
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(886.996.470,79)	(774.941.234,02)
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(4.977.774.615,93)	(4.517.737.173,88)
26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.579.379.452,53)	(5.909.108.600,11)
27	Sekretariat Daerah	(22.786.207,13)	-
28	Sekretariat DPRD	(771.743.683,34)	(748.581.924,99)
29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(36.826.166,44)	(31.941.427,50)
30	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(36.850.000,00)	(30.708.333,33)
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(164.210.327,88)	(149.282.116,25)
	Jumlah	**(531.373.868.859,72)**	**(474.897.466.172,44)**

5.3.1.3.7.3.3 Akumulasi Penyusutan Instalasi (Rp39.137.469.578,15)

Akumulasi Penyusutan Instalasi sebesar (Rp39.137.469.578,15) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp35.688.104.615,62) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.449.364.962,53) atau 9,67 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(5.215.522.381,74)	(4.944.251.508,68)
2	Dinas Kesehatan	(1.300.649.726,30)	(1.241.472.378,27)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(6.010.614.852,19)	(4.630.950.930,67)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(110.952.952,50)	(98.753.338,75)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(6.362.567.569,41)	(5.824.346.566,52)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(1.271.836.806,05)	(1.143.435.616,98)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.998.563.877,79)	(1.966.425.944,44)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(1.778.630.137,73)	(1.567.094.907,37)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.638.740.686,22)	(1.461.028.134,28)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(62.600.272,50)	(69.398.645,50)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(207.601.150,46)	(191.431.904,63)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(81.546,67)	-
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(32.001.550,00)	(29.715.725,00)
14	Dinas Sosial	(15.000.000,00)	(15.000.000,00)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(254.919.172,31)	(231.325.760,67)
16	Dinas Ketahanan Pangan	(5.075.000,00)	(4.712.500,00)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(763.605.929,14)	(713.873.238,82)
18	Dinas Perhubungan	(2.729.635.784,47)	(3.048.215.375,21)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	(188.740.765,63)	(142.793.661,47)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(11.783.033,50)	(10.941.388,25)
21	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(12.194.000,00)	(61.340.588,00)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	(871.537.613,00)	(810.247.385,61)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(625.940.099,79)	(541.815.324,58)
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(146.550.868,83)	(112.715.077,41)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(6.719.548.773,59)	(6.089.948.219,29)
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(20.522.527,50)	(18.674.835,00)
27	Sekretariat DPRD	(146.257.402,50)	(121.881.168,75)
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(99.702.446,13)	(93.304.106,27)
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(180.869.507,53)	(169.953.095,95)
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(309.561.666,67)	(287.395.811,25)
31	Badan Penghubung	(45.661.478,00)	(45.661.478,00)
	Jumlah	**(39.137.469.578,15)**	**(35.688.104.615,62)**

5.3.1.3.7.3.4 Akumulasi Penyusutan Jaringan (Rp34.882.403.956,20)

Akumulasi Penyusutan Jaringan sebesar (Rp34.882.403.956,21) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp27.190.779.643,38)) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp7.691.624.312,83) atau 28,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(6.459.321.887,08)	(6.008.253.027,32)
2	Dinas Kesehatan	(199.666.988,84)	(211.103.643,32)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(68.297.746,33)	(54.975.665,31)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(1.237.628.605,00)	(1.100.277.672,50)
5	RSUD dr. Rehatta Jepara	(511.060.758,00)	(448.940.901,68)
6	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(486.758.979,50)	(441.721.704,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(533.693,75)	-
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(11.730.680.104,55)	(6.179.622.462,97)
9	Dinas Sosial	(366.666,67)	(350.000,00)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(4.066.440,00)	(3.485.520,00)
11	Dinas Ketahanan Pangan	(44.951.993,34)	(42.561.699,99)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(463.562.232,50)	(416.907.071,66)
13	Dinas Perhubungan	(3.246.075.462,94)	(2.727.889.369,22)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	(26.521.680,00)	(23.672.095,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(3.159.680,15)	(3.016.058,33)
16	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(4.371.500,00)	(4.399.204,80)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(12.525.000,00)	(12.107.500,00)
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	(230.841.159,47)	(242.528.059,90)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(261.465.621,34)	(236.655.635,83)
20	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(294.274.374,98)	(263.106.666,68)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(8.997.833.064,80)	(8.235.325.291,05)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(118.355.556,67)	(111.454.139,17)
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(385.340.056,25)	(348.560.412,50)
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(53.725.979,05)	(37.867.792,15)
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(41.018.725,00)	(35.998.050,00)
	Jumlah	**(34.882.403.956,20)**	**(27.190.779.643,38)**

5.3.1.3.7.4 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya (Rp3.294.389.711,32)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp3.294.389.711,32) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.106.843.035,58) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp187.546.675,74) atau 6,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	(3.294.389.711,32)	(3.106.843.035,58)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-
	Jumlah	**(3.294.389.711,32)**	**(3.106.843.035,58)**

5.3.1.3.7.4.1 Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga (Rp3.294.389.711,32)

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar (Rp3.294.389.711,32) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp3.106.843.035,58) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp187.546.675,74) atau 6,04% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(2.615.271.211,32)	(2.453.657.335,58)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(18.000.000,00)	(14.400.000,00)
3	Satuan Polisi Pamong Praja	(500.219.500,00)	(500.219.500,00)
4	Dinas Sosial	(58.235.000,00)	(56.435.000,00)
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(77.164.000,00)	(61.731.200,00)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(25.500.000,00)	(20.400.000,00)
	Jumlah	**(3.294.389.711,32)**	**(3.106.843.035,58)**

5.3.1.4 Dana Cadangan Rp0,00

Dana Cadangan sebesar Rp0,00 yang digunakan untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp505.869.400.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp505.869.400.000,00) atau (100,0%) dikarenakan telah digunakan untuk Pilkada Serentak Tahun 2024. dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah		505.869.400.000,00
	Jumlah	**-**	**505.869.400.000,00**

5.3.1.5 Aset Lainnya Rp2.146.938.213.796,85

Aset Lainnya sebesar Rp2.146.938.213.796,85 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.659.378.989.509,31 mengalami **penurunan** sebesar (Rp512.440.775.712,46) atau (19,27%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	96.000.000,00	100.429.933.960,00
2	Aset Tak Berwujud	45.259.342.410,00	39.808.975.570,00
3	Aset Lain-lain	3.160.983.940.233,00	2.955.683.663.365,00
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(36.070.409.125,26)	(30.065.845.060,07)
5	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(1.023.416.071.844,89)	(504.977.410.422,62)
6	Kas yang Dibatasi Penggunannya	85.412.124,00	53.958.097,00
7	Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* (TDF)	-	98.445.714.000,00
	Jumlah	**2.146.938.213.796,85**	**2.659.378.989.509,31**

5.3.1.5.1 Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp96.000.000,00

Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp96.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp100.429.933.960,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp100.333.933.960,00) atau (99,90 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Sewa	96.000.000,00	95.625.938.304,00
2	Kerja Sama Pemanfaatan	-	4.786.698.000,00
3	Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	17.297.656,00
4	Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur	-	-
5	Pinjam Pakai	-	-
	Jumlah	**96.000.000,00**	**100.429.933.960,00**

5.3.1.5.1.1 Sewa Rp96.000.000,00

Sewa sebesar Rp96.000.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp95.625.938.304,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp95.529.938.304,00) atau (99,90 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.000.000,00	96.000.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	328.500.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	Dinas Sosial	-	2.553.490.000,00
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	46.316.925.063,00
5	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	1.395.000.000,00
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	214.421.868,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	44.721.601.373,00
	Jumlah	**96.000.000,00**	**95.625.938.304,00**

5.3.1.5.1.2 Kerjasama Pemanfaatan Rp0,00

Kerjasama Pemanfatan sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.786.698.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.786.698.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	-	2.944.850.000,00
2	Dinas Energi Sumber Daya Mineral	-	1.841.848.000,00
	Jumlah	**-**	**4.786.698.000,00**

5.3.1.5.1.3 Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Rp0,00

Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.297.656,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp17.297.656,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	17.297.656,00
Jumlah	**-**	**17.297.656,00**

5.3.1.5.2 Aset Tak Berwujud Rp45.259.342.410,00

Aset Tak Berwujud sebesar Rp45.259.342.410,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp39.808.975.570,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.450.366.840,00 atau 13,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Goodwill	-	-
2	Lisensi dan Franchise	327.130.000,00	327.130.000,00
3	Hak Cipta	-	-
4	Hak Paten	-	-
5	Software	41.520.038.143,00	36.624.010.303,00
6	Kajian	3.224.419.360,00	2.670.080.360,00
7	Aset Tidak Berwujud Yang Mempunyai Nilai Sejarah/Budaya	-	-
8	Aset Tidak Berwujud Dalam Pengerjaan	-	-
9	Aset Tidak Berwujud Lainnya	187.754.907,00	187.754.907,00
	Jumlah	**45.259.342.410,00**	**39.808.975.570,00**

5.3.1.5.2.1 Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise Rp327.130.000,00

Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebesar Rp327.130.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	2.450.000,00	2.450.000,00
2	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	319.680.000,00	319.680.000,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	5.000.000,00	5.000.000,00
	Jumlah	**327.130.000,00**	**327.130.000,00**

5.3.1.5.2.2 Aset Tidak Berwujud-Software Rp41.520.038.143,00

Aset Tidak Berwujud-Software sebesar Rp41.520.038.143,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp36.624.010.303,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp4.896.027.840,00 atau 13,37% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.274.210.305,00	3.153.682.305,00
2	Dinas Kesehatan	3.172.786.350,00	3.047.816.350,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	4.776.375.378,00	4.776.375.378,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	749.632.740,00	749.632.740,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	1.340.090.000,00	1.340.090.000,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	3.524.151.000,00	3.374.151.000,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	1.589.029.500,00	1.551.900.000,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	2.168.846.409,00	2.168.846.409,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	1.423.192.169,00	1.423.192.169,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	598.461.600,00	465.417.600,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	416.748.500,00	109.629.000,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.189.065.520,00	956.753.620,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	189.500.000,00	189.500.000,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.000.000,00	35.000.000,00
15	Dinas Sosial	162.650.500,00	142.650.500,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.046.970.940,00	977.219.240,00
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	404.194.000,00	367.694.000,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	414.385.000,00	414.385.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	515.253.950,00	485.955.500,00
21	Dinas Perhubungan	164.987.850,00	114.000.000,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.834.786.200,00	1.834.786.200,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	262.064.000,00	237.633.000,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	765.815.130,00	616.930.830,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	1.455.385.400,00	1.355.635.400,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	193.550.000,00	193.550.000,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	616.990.900,00	616.990.900,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	134.500.000,00	119.500.000,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	508.013.000,00	508.013.000,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	415.779.040,00	94.194.815,00
32	Sekretariat Daerah	1.743.850.535,00	-
33	Sekretariat DPRD	386.301.000,00	386.301.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	45.000.000,00	69.560.000,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	648.552.730,00	287.200.000,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.558.018.000,00	1.369.518.000,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	2.081.133.280,00	1.744.979.410,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	640.561.687,00	614.504.437,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	124.450.000,00	-
40	Badan Penghubung	145.550.000,00	93.450.000,00
41	Inspektorat	422.747.750,00	325.872.500,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	371.457.780,00	311.500.000,00
	Jumlah	**41.520.038.143,00**	**36.624.010.303,00**

5.3.1.5.2.3 Aset Tidak Berwujud-Kajian Rp3.224.419.360,00

Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar Rp3.224.419.360,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.670.080.360,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp554.339.000,00 atau 20,76% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	3.035.053.360,00	2.480.714.360,00
2	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	189.366.000,00	189.366.000,00
	Jumlah	**3.224.419.360,00**	**2.670.080.360,00**

5.3.1.5.2.4 Aset Tidak Berwujud-Lainnya Rp187.754.907,00

Aset Tidak Berwujud-Lainnya sebesar Rp187.754.907,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya tidak mengalami **kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	54.193.157,00	54.193.157,00
2	Dinas Perhubungan	133.561.750,00	133.561.750,00
	Jumlah	**187.754.907,00**	**187.754.907,00**

5.3.1.5.3 Aset Lain-Lain Rp3.160.983.940.233,00

Aset Lain-Lain sebesar Rp3.160.983.940.233,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.955.683.663.365,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp205.300.276.868,00 atau 6,95% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Aset Rusak Berat/Usang	1.712.103.673.159,00	1.066.955.643.186,00
2	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	1.448.880.267.074,00	1.888.728.020.179,00
	Jumlah	**3.160.983.940.233,00**	**2.955.683.663.365,00**

5.3.1.5.3.1 Aset Rusak Berat/Usang Rp1.712.103.673.159,00

Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp1.712.103.673.159,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.066.955.643.186,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp645.148.029.973,00 atau 60,47% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.143.873.216.543,00	723.994.441.042,00
2	Dinas Kesehatan	26.439.405.727,00	8.712.436.522,00
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	36.263.702.496,00	2.020.915.625,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	108.920.367.799,00	102.884.780.869,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	16.163.770.864,00	8.281.055.881,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	13.085.514.972,00	6.466.896.237,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	8.279.734.662,00	5.259.181.977,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	13.945.122.469,00	3.654.380.421,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	8.211.483.136,00	4.273.800.739,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	51.494.622.307,00	23.514.915.636,00
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	19.426.355.702,00	8.731.990.348,00
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.192.992.110,00	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	705.823.794,00	619.423.794,00
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
15	Dinas Sosial	21.818.265.762,00	23.065.470.069,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.053.502.413,00	18.533.433.485,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	433.804.467,00	433.804.467,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	5.329.562.250,00	196.030.000,00
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	22.966.380.809,00	3.864.704.574,00
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	984.193.854,00	50.941.000,00
21	Dinas Perhubungan	35.452.077.249,00	11.056.459.109,00
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.061.061.940,00	3.306.254.790,00
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	3.030.321.159,00	703.183.049,00
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	2.049.467.556,00	432.290.000,00
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	18.413.344.646,00	17.823.000.997,00
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.867.757.155,00	1.498.028.824,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	26.757.435.053,00	9.424.720.523,00
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	37.713.006.449,00	35.302.027.489,00
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.333.448.700,00	2.966.440.127,00
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.080.459.783,00	6.898.961.288,00
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.378.116.084,00	5.184.907.241,00
32	Sekretariat Daerah	2.613.787.678,00	2.613.787.678,00
33	Sekretariat DPRD	1.231.439.565,00	14.500.000,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.513.753.689,00	455.197.000,00
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	18.079.274.650,00	11.363.508.838,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.583.393.762,00	5.192.032.982,00
37	Badan Kepegawaian Daerah	324.981.400,00	1.104.506.931,00
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	709.390.000,00	4.447.572.305,00
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.051.789.976,00	-
40	Badan Penghubung	1.367.400.197,00	629.628.930,00
41	Inspektorat	162.842.915,00	393.799.915,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.741.301.417,00	1.586.232.484,00
	Jumlah	**1.712.103.673.159,00**	**1.066.955.643.186,00**

5.3.1.5.3.2 Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah — Rp1.448.880.267.074,00

Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp1.448.880.267.074,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.888.728.020.179,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp439.847.753.105,00) atau (23,29%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	10.329.940.029,00	7.657.788.330,00
2	Dinas Kesehatan	9.981.655.344,00	8.150.468.670,00
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	113.485.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	589.582.987.448,00	1.062.253.315.799,00
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	448.119.286.573,00	448.502.741.573,00
6	Dinas Sosial	859.535.000,00	-
7	Dinas Ketahanan Pangan	3.653.783.251,00	3.653.783.251,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	48.317.200.000,00	-
9	Dinas Perhubungan	497.097.867,00	11.000.000,00
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	115.500.000,00	115.500.000,00
11	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	196.782.700,00	697.813.260,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	6.982.800,00	-
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	429.920.000,00	746.945.000,00
14	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.347.179.176,00	15.056.938.580,00
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	461.343.000,00	479.043.000,00
16	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	304.271.654,00	304.271.654,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	315.598.364.732,00	340.906.488.562,00
18	Badan Penghubung	78.437.500,00	78.437.500,00
	Jumlah	**1.448.880.267.074,00**	**1.888.728.020.179,00**

5.3.1.5.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud (Rp36.070.409.125,26)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp36.070.409.125,26) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp30.065.845.060,07) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp6.004.564.065,19) atau 19,97% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Frenchise	(172.618.000,00)	(108.682.000,00)
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-
3	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(34.485.418.630,76)	(29.210.499.612,57)
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	(1.255.412.816,67)	(638.245.894,67)
6	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	(156.959.677,83)	(108.417.552,83)
	Jumlah	**(36.070.409.125,26)**	**(30.065.845.060,07)**

5.3.1.5.4.1 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise (Rp172.618.000,00)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise sebesar (Rp172.618.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp108.682.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp63.936.000,00) atau 58,83% rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	(2.450.000,00)	(2.450.000,00)
2	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(165.168.000,00)	(101.232.000,00)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(5.000.000,00)	(5.000.000,00)
	Jumlah	**(172.618.000,00)**	**(108.682.000,00)**

5.3.1.5.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software (Rp34.485.418.630,76)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software sebesar (Rp34.485.418.630,76) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp29.210.499.612,57) mengalami **kenaikan s**ebesar (Rp5.274.919.018,19) atau 18,06% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.003.536.361,84)	(2.704.453.400,97)
2	Dinas Kesehatan	(2.144.990.238,32)	(1.711.133.617,83)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(4.205.584.503,93)	(3.907.795.815,04)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(733.412.055,00)	(720.435.507,00)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(1.335.756.666,67)	(1.331.756.666,67)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(2.723.277.533,33)	(2.392.733.773,33)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(1.568.567.958,33)	(1.522.990.833,33)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(2.168.846.409,00)	(2.168.846.409,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(1.423.192.169,00)	(1.423.192.169,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(383.186.430,00)	(237.209.460,00)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(85.325.125,00)	(21.301.150,00)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(715.052.201,64)	(523.227.127,45)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(189.500.000,00)	(189.500.000,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(15.814.102,56)	(6.929.487,18)
15	Dinas Sosial	(154.317.166,67)	(142.650.500,00)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(630.940.404,43)	(453.553.697,89)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(368.414.036,78)	(329.134.406,89)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(414.385.000,00)	(337.946.000,00)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(336.682.362,50)	(246.321.175,00)
21	Dinas Perhubungan	(99.794.926,53)	(87.600.000,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(1.777.502.043,34)	(1.735.135.003,34)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(219.100.676,28)	(192.125.046,15)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(603.607.630,92)	(571.559.404,66)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(1.053.045.909,89)	(811.823.102,15)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(193.550.000,00)	(193.550.000,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(615.940.900,00)	(576.233.757,14)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(96.583.333,33)	(77.833.333,33)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(508.013.000,00)	(508.013.000,00)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(277.037.141,94)	(43.469.771,66)
32	Sekretariat Daerah	(1.313.167.226,89)	-
33	Sekretariat DPRD	(342.031.126,14)	(299.193.000,65)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(17.250.000,00)	(32.810.000,00)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(347.206.494,58)	(287.200.000,00)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.558.018.000,00)	(1.359.558.000,00)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(1.577.806.504,08)	(975.318.290,67)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(621.018.749,50)	(614.504.437,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(31.218.833,33)	-
40	Badan Penghubung	(96.157.627,12)	(62.116.666,67)
41	Inspektorat	(318.316.175,00)	(252.871.500,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(218.271.606,89)	(158.474.102,57)
	Jumlah	**(34.485.418.630,76)**	**(29.210.499.612,57)**

5.3.1.5.4.3 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian (Rp1.255.412.816,67)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp1.255.412.816,67) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp638.245.894,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp617.166.922,00) atau 96,70% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(1.116.781.833,34)	(537.488.111,34)
2	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(138.630.983,33)	(100.757.783,33)
	Jumlah	**(1.255.412.816,67)**	**(638.245.894,67)**

5.3.1.5.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya (Rp156.959.677,83)

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian sebesar (Rp156.959.677,83) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp108.417.552,83mengalami **kenaikan** sebesar (Rp48.542.125,00) atau 44,77% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(45.923.990,33)	(42.433.990,33)
2	Dinas Perhubungan	(111.035.687,50)	(65.983.562,50)
	Jumlah	**(156.959.677,83)**	**(108.417.552,83)**

5.3.1.5.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp1.023.416.071.844,89)

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya sebesar (Rp1.023.416.071.844,89) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp504.977.410.422,62) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp518.438.661.422,27) atau 102,67% dengan rincian sebagai berikut :

2024 (Rp)	2023 (Rp)

1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(28.320.000,00)	(18.994.874.719,13)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(1.023.387.751.844,89)	(485.982.535.703,49)
	Jumlah	**(1.023.416.071.844,89)**	**(504.977.410.422,62)**

5.3.1.5.5.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga (Rp28.320.000,00)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar (Rp28.320.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp18.994.874.719,13) mengalami **penurunan** sebesar Rp18.966.554.719,13 atau (99,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	(28.320.000,00)	(18.994.874.719,13)
2	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-
3	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-
4	Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-
	Jumlah	**(28.320.000,00)**	**(18.994.874.719,13)**

5.3.1.5.5.1.1 Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa (Rp28.320.000,00)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar (Rp28.320.000,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp18.994.874.719,13) mengalami **penurunan** sebesar Rp18.966.554.719,13 atau (99,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(28.320.000,00)	(26.400.000,00)
2	Dinas Sosial	-	(7.776.000,00)
3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	(14.708.927.334,33)
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(38.595.936,24)
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(4.213.175.448,56)
	Jumlah	**(28.320.000,00)**	**(18.994.874.719,13)**

5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain (Rp1.023.387.751.844,89)

Akumulasi Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa sebesar (Rp1.023.387.751.844,89) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp485.982.535.703,49) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp537.405.216.141,40) atau 110,58% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	(928.718.796.695,39)	(394.439.296.003,31)
2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	(94.668.955.149,50)	(91.543.239.700,18)
	Jumlah	**(1.023.387.751.844,89)**	**(485.982.535.703,49)**

5.3.1.5.5.2.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang (Rp928.718.796.695,39)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang sebesar (Rp928.718.796.695,39) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp394.439.296.003,31) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp534.279.500.692,08) atau 135,45% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(445.636.035.140,01)	(109.719.297.133,09)
2	Dinas Kesehatan	(23.645.925.914,27)	(6.021.549.637,86)
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	(35.614.283.906,00)	(1.401.174.475,00)
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	(107.477.783.720,09)	(102.377.391.436,92)
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	(16.009.808.956,08)	(8.012.336.888,33)
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	(10.130.548.198,47)	(6.431.603.653,67)
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	(7.624.602.065,84)	(4.614.872.714,13)
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	(12.552.435.517,84)	(2.291.280.042,84)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(8.211.483.136,00)	(4.269.492.582,21)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(35.215.473.524,17)	(8.047.193.062,88)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(5.407.567.144,28)	(5.137.800.880,50)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	(1.192.992.110,00)	-
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(690.769.794,00)	(604.369.794,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-
15	Dinas Sosial	(17.087.771.769,37)	(18.334.913.576,37)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(17.902.323.632,41)	(18.382.254.704,41)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(433.729.467,00)	(433.729.467,00)
18	Dinas Ketahanan Pangan	(3.770.705.860,14)	(195.580.000,00)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(22.423.275.454,53)	(3.835.443.957,34)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	(868.940.786,67)	(50.941.000,00)
21	Dinas Perhubungan	(29.997.373.092,79)	(8.995.466.376,03)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	(4.059.240.037,84)	(3.304.777.890,00)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(2.967.317.849,00)	(679.290.549,00)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	(2.048.304.056,00)	(432.290.000,00)
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(13.911.726.140,08)	(13.797.243.369,31)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(2.867.757.155,00)	(1.498.028.824,00)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	(19.785.816.492,56)	(7.691.270.042,47)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(21.551.623.175,76)	(18.474.392.001,95)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(10.637.277.851,71)	(2.474.209.835,33)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(5.943.331.292,68)	(5.008.808.583,21)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.598.089.067,76)	(4.978.323.737,72)
32	Sekretariat Daerah	(2.579.564.303,00)	(2.579.564.303,00)
33	Sekretariat DPRD	(1.225.397.898,33)	(8.458.333,33)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(1.509.751.653,58)	(453.073.931,25)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(18.049.723.919,89)	(11.353.904.607,92)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(6.298.582.225,24)	(4.900.531.265,24)
37	Badan Kepegawaian Daerah	(324.981.400,00)	(1.104.506.931,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	(424.785.200,00)	(4.162.967.505,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(1.051.789.976,00)	-
40	Badan Penghubung	(1.117.933.529,00)	(433.100.562,00)
41	Inspektorat	(134.208.865,00)	(365.165.865,00)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(1.737.765.417,00)	(1.582.696.484,00)
	Jumlah	**(928.718.796.695,39)**	**(394.439.296.003,31)**

5.3.1.5.5.2.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah (Rp94.668.955.149,50)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar (Rp94.668.955.149,50) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp91.543.239.700,18) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp3.125.715.449,32) atau 3,41% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(1.682.874.478,79)	(1.043.567.370,47)
2	Dinas Kesehatan	(5.982.189.923,34)	(4.164.234.634,50)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	(113.485.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	(74.193.306.066,95)	(70.980.686.148,65)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(262.671.200,00)	(250.671.640,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan	(3.632.538.625,50)	(3.631.688.840,48)
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(700.000,00)	-
8	Dinas Perhubungan	(338.855.046,00)	(11.000.000,00)
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(115.500.000,00)	(115.500.000,00)
10	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	(91.593.575,56)	(137.650.896,00)
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	(6.982.800,00)	-
12	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(101.744.009,60)	(93.172.342,00)
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(5.200.613.580,00)	(5.200.613.580,00)
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(129.991.424,32)	(138.994.019,20)
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(302.171.654,00)	(302.171.654,00)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.595.847.765,44)	(5.329.997.324,88)
17	Badan Penghubung	(31.375.000,00)	(29.806.250,00)
	Jumlah	**(94.668.955.149,50)**	**(91.543.239.700,18)**

5.3.1.5.6 Kas Yang Dibatasi Penggunaannya **Rp85.412.124,00**

Kas Yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp85.412.124,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp53.958.097,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.454.027,00 atau 58,29% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	24.843.666,00	5.762.188,00
2	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	-	18.342.855,00
3	Sekretariat Daerah	60.568.458,00	29.853.054,00
	Jumlah	**85.412.124,00**	**53.958.097,00**

Kas yang dibatasi penggunaannya Provinsi Jawa Tengah tersebut, belum termasuk di dalamnya Kas yang dibatasi penggunaannya atas jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang. Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa pemegang ijin Usaha Pertambangan (IUP) dan/atau Surat Ijin Penambangan Batuan (SIPB) wajib menyediakan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan pada bank pemerintah. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi dan Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh perusahaan untuk melaksanakan pascatambang. Rincian sebagai berikut :

1. Jaminan Kesungguhan Eksplorasi Kegiatan Pertambangan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp2.912.884.470,00
2. Jaminan Reklamasi terdiri dari :
   a. IUP berlaku Bank Garansi : Rp63.892.976.510,00
   b. IUP berlaku Deposito : Rp29.251.745.705,00
   c. IUP habis masa berlaku Bank Garansi : Rp1.586.362.105,00
   d. IUP habis masa berlaku Deposito : Rp370.336.200,00
3. Jaminan Pascatambang terdiri dari:
   a. IUP berlaku Bank Garansi : Rp16.287.677.598,00
   b. IUP berlaku Deposito : Rp6.912.651.306,00

c. IUP habis masa berlaku Bank Garansi : Rp1.452.342.803,00
d. IUP habis masa berlaku Deposito : Rp119.478.200,00

5.3.1.6 Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* (TDF) Rp0,00

Dana Transfer Treasury Deposit Facility adalah fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran dana transfer ke daerah secara nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 44/KM.7/2024 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2024 dan Surat Direktur Jenederal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor S-35/PK/PK.2/2025 tanggal 17 April 2025 perihal Penyaluran Dana Treasury Deposit Facility ke RKUD dalam rangka mendukung Kebutuhan Belanja Daerah TA 2025 dijelaskan bahwa besaran TDF Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp98.445.714.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp98.445.714.000,00) atau (100%) dengan rincian sebagai berikut:.

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	0,00	98.445.714.000,00
	Jumlah	**0,00**	**98.445.714.000,00**

5.3.1.7 Properti Investasi Rp137.289.923.157,68

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Properti Investasi sebesar Rp138.235.915.127,68 dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Properti Investasi Tanah	122.427.169.604,00	-
2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	35.568.943.531,00	-
3	Properti Investasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-
4	Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-
5	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(20.706.189.977,32)	-
	Jumlah	**137.289.923.157,68**	**-**

5.3.1.6.1 Properti Investasi Tanah Rp122.427.169.604,00

Properti Investasi Tanah sebesar Rp122.427.169.604,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	328.500.000,00	-
2	Dinas Sosial	2.537.290.000,00	-
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.172.550.000,00	-
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.287.000.000,00	-
5	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	4.504.850.000,00	-
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.493.071.000,00	-
7	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.841.848.000,00	-
8	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	661.500.000,00	-
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	56.600.560.604,00	-
	Jumlah	**122.427.169.604,00**	**-**

5.3.1.6.2 Properti Investasi Gedung dan Bangunan Rp35.568.943.531,00

Properti Investasi Tanah sebesar Rp35.568.943.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Sosial	16.200.000,00	-
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	25.029.925.063,00	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	214.421.868,00	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	213.000.000,00	-
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.095.396.600,00	-
	Jumlah	**35.568.943.531,00**	**-**

5.3.1.6.4 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (Rp20.706.189.977,32)

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi (Rp20.706.189.977,32) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Sosial	(8.100.000,00)	-
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	(14.965.194.673,16)	-
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(42.884.373,60)	-
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(132.060.000,00)	-
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(5.557.950.930,56)	-
	Jumlah	**(20.706.189.977,32)**	**-**

5.3.2 KEWAJIBAN Rp557.433.147.246,98

Kewajiban sebesar Rp557.433.147.246,98 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp431.330.988.794,15 mengalami **kenaikan** sebesar Rp126.112.158.452,83 atau 29,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kewajiban Jangka Pendek	557.443.147.246,98	431.330.988.794,15
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-
	Jumlah	**557.443.147.246,98**	**431.330.988.794,15**

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek Rp557.433.147.246,98

Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp557.433.147.246,98 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp431.330.988.794,15 mengalami **kenaikan** sebesar Rp126.112.158.452,83 atau 29,24% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	28.310.064,00	204.401.125,00
2	Utang Bunga	-	-
3	Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
4	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
5	Pendapatan Diterima Dimuka	34.750.163.758,98	44.550.351.196,15
6	Utang Belanja	507.205.974.758,00	380.841.449.777,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	15.458.698.666,00	5.734.786.696,00
	Jumlah	**557.443.147.246,98**	**431.330.988.794,15**

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga **Rp28.310.064,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp28.310.064,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp204.401.125,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp176.091.061,00) atau (86,15 %) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Taspen	-	-
2	Utang Iuran Jaminan Kesehatan	-	-
3	Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	-	-
4	Utang Iuran Jaminan Kematian	-	-
5	Utang PPh Pusat	1.920.064,00	49.375.936,00
6	Utang PPN Pusat	-	128.604.327,00
7	Utang Taperum	-	-
8	Utang Iuran Wajib Pegawai	-	-
9	Utang Pihak Ketiga Lainnya	26.390.000,00	26.420.862,00
	Jumlah	**28.310.064,00**	**204.401.125,00**

5.3.2.1.1.1 Utang PPh Pusat **Rp1.920.064,00**

Utang PPh Pusat sebesar Rp1.920.064,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.375.936,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp47.455.872,00) atau (96,11%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	75.000,00	49.375.936,00
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	18.000,00	-
3	Sekretariat Daerah	22.824,00	-
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	834.240,00	-
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	280.000,00	-
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	690.000,00	-
	Jumlah	**1.920.064,00**	**49.375.936,00**

5.3.2.1.1.2 Utang PPN Pusat **Rp0,00**

Utang PPN Pusat sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp128.604.327,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.604.327,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	128.604.327,00
	Jumlah	**-**	**128.604.327,00**

5.3.2.1.1.3 Utang Pihak Ketiga Lainnya **Rp26.390.000,00**

Utang Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp26.390.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.420.862,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp30.862,00) atau (0,12%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.390.000,00	26.420.862,00
	Jumlah	**26.390.000,00**	**26.420.862,00**

Adapun rincian utang pihak ketiga lainnya terdiri dari:

REKAP SISA SALDO KAS BANTUAN PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2024

NO.	NAMA SEKOLAH	SALDO	TANGGAL PENYETORAN
1	SMKN 3 KENDAL	20.000,00	6 Januari 2025
2	SMKN 8 PURWOREJO	5.700.000,00	13 Januari 2025
3	SMKN 2 SALATIGA	20.670.000,00	6 Januari 2025
	TOTAL	**26.390.000,00**	

5.3.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka Rp34.750.163.758,98

Pendapatan Diterima Dimuka sebesar Rp34.750.163.758,98 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp44.550.351.196,15 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.800.187.437,17) atau (22,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III	34.048.709.079,09	43.736.240.748,00
2	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	-	-
3	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah	-	-
4	Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa	701.454.679,89	814.110.448,15
	Jumlah	**34.750.163.758,98**	**44.550.351.196,15**

5.3.2.1.2.1 Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III Rp34.048.709.079,09

Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III merupakan pendapatan yang diterima atas pelayanan rumah sakit maupun pajak kendaraan bermotor namun belum menjadi hak pemerintah daerah karena masih terdapat kewajiban untuk memberikan barang/jasa dikemudian hari sebagai konsekuensi penerimaan pendapatan tersebut. Adapun jumlahnya adalah sebesar Rp34.048.709.079,09 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp43.736.240.748,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.687.531.668,91) atau (22,15%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	3.099.744.988,00	776.966.280,00
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	190.924.236,09	236.860.568,00
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	82.409.955,00	93.472.400,00
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	-	-
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	30.675.629.900,00	42.628.941.500,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-
	Jumlah	**34.048.709.079,09**	**43.736.240.748,00**

Setoran kelebihan pembayaran dari Pihak III 2024 terdiri atas:

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2024

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	**Jasa Raharja**	2024	1.616.242.269,00
2	**Diklat**	2024	21.600.000,00
3	**Transfer Pasien**	2024	796.287.719,00
4	**Titipan Rawat Inap Pasien**	2024	665.615.000,00
TOTAL			**3.099.744.988,00**

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2024

NO.	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	Titipan Pasien	2024	190.924.236,09
	TOTAL		**190.924.236,09**

REKAP UANG TITIPAN PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH.PROVINSI JAWA TENGAH

BULAN DESEMBER 2024

NO	NAMA	TAHUN	JUMLAH
1	PT.CENTRE PARK	2021	35.000.000,00
2	UNIVERSITAS DIPONEGORO	2024	2.875.000,00
3	Uang Titipan Pasien	2024	44.534.955,00
	TOTAL		**82.409.955,00**

REKAPITULASI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	PEMBAYARAN JATUH TEMPO 2025 DIBAYAR DI 2024
	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	**30.675.629.900**
1	**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Sedan**	**561.127.000**
2	**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Jeep**	**1.603.545.750**
3	**Piutang PKB-Mobil Penumpang-Minibus**	**16.020.676.250**
4	**Piutang PKB-Mobil Bus-Microbus**	**91.404.500**
5	**Piutang PKB-Mobil Bus-Bus**	**9.543.500**
6	**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up**	**1.072.383.500**
7	**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck**	**1.070.238.500**
8	**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Truck**	**366.961.500**
9	**Piutang PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van**	**106.053.000**
10	**Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua**	**9.756.185.400**
11	**Piutang PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga**	**17.511.000**
	JUMLAH	**30.675.629.900**

5.3.2.1.2.2 Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa **Rp701.454.679,89**

Pendapatan Diterima Dimuka-Belanja Sewa sebesar Rp701.454.679,89 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp814.110.448,15 mengalami **penurunan** sebesar (Rp112.655.768,26) atau (13,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	82.573.506,41	174.968.739,34
2	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	216.403.269,78	237.054.599,46
3	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	27.496.580,03
4	RSUD dr. Rehatta Jepara	95.687.719,59	53.351.691,96
5	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	-	-
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	306.790.184,11	321.238.837,36
	Jumlah	**701.454.679,89**	**814.110.448,15**

5.3.2.1.3 Utang Belanja **Rp507.205.974.758,00**

Utang Belanja sebesar Rp507.205.974.758,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp380.841.449.777,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp126.364.524.981,00 atau 33,18% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Belanja Pegawai	-	-
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	91.831.715.232,00	156.986.127.030,00
3	Utang Belanja Bunga	-	-
4	Utang Belanja Subsidi	-	-
5	Utang Belanja Hibah	-	-
6	Utang Belanja Modal Tanah	-	-
7	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.931.020,00	-
8	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	16.549.950,00
9	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	-
10	Utang Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-
11	Utang Belanja Tidak Terduga	-	-
12	Utang Belanja Bagi Hasil	415.325.328.506,00	223.838.772.797,00
13	Utang Belanja Bantuan Keuangan	-	-
	Jumlah	**507.205.974.758,00**	**380.841.449.777,00**

Utang belanja sebesar Rp91.880.646.252,00 belum termasuk utang Jasa Pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD/RSJD sebesar Rp56.359.959.817,66 dengan rincian sebagai berikut :

NO	SKPD	NOMINAL
1	Dinas Kesehatan	
	Balkesmas Wilayah Semarang	59.911.200,00
	Balkesmas Wilayah Ambarawa	185.409.208,00
	Balkesmas Wilayah Magelang	53.273.380,00
	Balkesmas Wilayah Klaten	38.451.380,00
	Balkesmas Wilayah Pati	53.790.344,00
	BKIM Provinsi Jawa Tengah	281.455.840,00
	Balai Labkes dan PAK Provinsi Jawa Tengah	700.785.705,00
	Total	**1.373.077.057,00**
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	25.243.760.547,00
3	RSUD. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	18.333.016.172,00
4	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	4.888.674.344,00
5	RSUD dr Rehatta Jepara	1.945.173.037,15
6	RSJD. Dr. Amino Gondohutomo Semarang	1.544.134.753,00
7	RSJD dr. Arif Zainuddin Surakarta	1.312.984.575,40
8	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi Klaten	1.719.139.332,11
JUMLAH		**56.359.959.817,66**

5.3.2.1.3.1 Utang Belanja Barang dan Jasa **Rp91.831.715.232,00**

Utang Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp91.831.715.232,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp156.986.127.030,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp65.154.411.798,00) atau (41,50%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	-
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	82.314.194.859,00	128.821.972.718,00
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	9.194.932.933,00	27.830.595.087,00
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	-	51.036.330,00
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	30.400.715,00	74.351.632,00
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	202.290.923,00	166.908.423,00
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	42.484.143,00	41.262.840,00
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	47.411.659,00	-
	Jumlah	**91.831.715.232,00**	**156.986.127.030,00**

Adapun rincian atas utang belanja barang dan jasa tersebut antara lain:

RSUD Dr Moewardi Surakarta		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	22.348.750,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	1.546.978.678,00
3	Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.268.000,00
4	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	99.000,00
5	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	46.084.155.859,00
6	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	33.049.476.202,00
7	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	1.080.000,00
8	Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.300.000,00
9	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	145.162.550,00
10	Belanja Jasa Kantor-Jasa Kalibrasi	50.420.000,00
11	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	128.725.680,00
12	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	7.545.220,00
13	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	86.695.900,00
14	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	994.495.992,00
15	Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.633.500,00
16	Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	14.219.000,00
17	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi-Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	166.590.528,00
Total		**82.314.194.859,00**
RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Kimia	1.714.197.908,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.000.000,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	161.910.206,00
4	Belanja Bahan Pakai Habis Barang Pakai Habis Kebersihan	159.747.000,00
5	Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.700.000,00
6	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	113.055.000,00
7	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.000.000,00
8	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	723.869.098,00
9	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	6.274.000,00
10	Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	76.066.500,00
11	Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	523.700.000,00
12	Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	326.655.000,00
13	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Kesehatan	3.647.200,00
14	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	10.285.500,00

RSUD Dr Moewardi Surakarta		
15	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	88.343.010,00
16	Belanja Jasa Kantor-Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	17.333.052,00
17	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	3.797.087,00
18	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	48.998.650,00
19	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	744.282.959,00
20	Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	650.000,00
21	Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	59.194.091,00
22	Belanja Jasa Kantor-Paket/Pengiriman	11.909.800,00
23	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya	494.928.645,00
24	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Mebel	13.000.000,00
25	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran Umum	1.077.547.409,00
26	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Bangunan Kesehatan	2.128.710.952,00
27	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung-Taman	106.697.335,00
28	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Instalasi-Instalasi Lain	556.432.531,00
Total		**9.194.932.933,00**
RSUD dr. Rehatta Jepara		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**
1	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	23.775.715,00
2	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis Serta Pendidikan Dan Perlatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	4.000.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.625.000,00
Total		**30.400.715,00**
RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Isi Tabung Gas	5.219.400,00
2	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	21.070.000,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	612.531,00
4	Belanja Barang Pakai Habis-Obat-Obatan-Obat-Obatan	10.190.059,00
5	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	19.613.510,00
6	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon	1.462.276,00
7	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	909.500,00
8	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	141.173.647,00
9	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	2.040.000,00
Total		**202.290.923,00**
RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	2.880.000,00
2	Belanja Barang Pakai Habis- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	620.000,00
3	Belanja Barang Pakai Habis-Pakaian Dinas Harian (PDH)	650.000,00
4	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	3.054.513,00
5	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	15.982.100,00
6	Belanja Jasa Kantor-Medical Check Up	8.347.530,00
7	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Perlatihan-Sosialisasi	1.050.000,00
8	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri – Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9.900.000,00
Total		**42.484.143,00**
RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten		
No.	**Uraian**	**Nilai (Rp)**

RSUD Dr Moewardi Surakarta		
1	Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Lainnya	25.030.000,00
2	Belanja Jasa Kantor-Jasa Tenaga Laboratorium	1.328.800,00
3	Belanja Jasa Kantor-Jasa Pengolahan Sampah	6.840.209,00
4	Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air	14.212.650,00
Total		**47.411.659,00**

5.3.2.1.3.2 Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp48.931.020,00

Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.931.020,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp48.931.020,00 dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	48.931.020,00	-
	Jumlah	**48.931.020,00**	**-**

Adapun rincian atas utang belanja barang dan jasa tersebut antara lain:

RINCIAN UTANG

RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO

POSISI PER 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA AKUN LEVEL 6 (SUB RINCIAN OBYEK)	URAIAN	KREDITUR	SALDO AKHIR 31 DESEMBER 2024	NOMINAL PELUNASAN SETELAH 31 DESEMBER	TANGGAL PEMBAYARAN
1	Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	- Belanja Modal Dapur	CV. RAHAYU JAYA SANTOSA	48.931.020,00	48.931.020,00	12/03/2025
		TOTAL		243.863.953,00	9.243.863.953,00	

5.3.2.1.3.3 Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp0,00

Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.549.950,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp16.549.950,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	-	16.549.950,00
	Jumlah	**-**	**16.549.950,00**

5.3.2.1.3.4 Utang Belanja Bagi Hasil Rp415.325.328.506,00

Utang Belanja Bagi Hasil sebesar Rp415.325.328.506,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp223.838.772.797,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp191.486.555.709 atau 85,55% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kabupaten Semarang	13.284.383.848,00	8.345.175.411,00
2	Kabupaten Kendal	13.118.005.707,00	6.566.611.452,00
3	Kabupaten Demak	13.356.404.423,00	7.675.519.958,00
4	Kabupaten Grobogan	12.880.399.943,00	6.590.735.859,00
5	Kabupaten Pati	16.451.751.196,00	8.463.774.144,00
6	Kabupaten Kudus	12.667.990.191,00	6.074.247.024,00
7	Kabupaten Jepara	14.163.777.208,00	6.708.877.571,00
8	Kabupaten Rembang	8.613.841.673,00	4.964.880.044,00
9	Kabupaten Blora	8.394.489.424,00	4.662.891.138,00
10	Kabupaten Pekalongan	8.433.061.835,00	4.617.283.136,00
11	Kabupaten Batang	9.277.853.350,00	5.200.725.429,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
12	Kabupaten Pemalang	11.807.936.241,00	5.533.815.075,00
13	Kabupaten Tegal	14.798.408.069,00	7.649.257.280,00
14	Kabupaten Brebes	16.125.644.657,00	7.312.338.169,00
15	Kabupaten Banyumas	16.886.079.712,00	10.131.207.243,00
16	Kabupaten Cilacap	17.909.368.547,00	9.668.602.444,00
17	Kabupaten Purbalingga	7.751.364.405,00	4.111.697.072,00
18	Kabupaten Banjarnegara	8.396.532.072,00	4.796.533.331,00
19	Kabupaten Magelang	11.453.643.762,00	6.829.784.343,00
20	Kabupaten Temanggung	6.862.854.722,00	4.055.574.029,00
21	Kabupaten Wonosobo	6.167.940.036,00	3.026.342.507,00
22	Kabupaten Purworejo	7.767.172.625,00	3.531.403.303,00
23	Kabupaten Kebumen	10.733.320.624,00	6.047.212.575,00
24	Kabupaten Klaten	13.969.379.755,00	8.602.274.223,00
25	Kabupaten Boyolali	11.008.705.337,00	5.974.118.272,00
26	Kabupaten Sragen	9.805.958.239,00	6.842.955.429,00
27	Kabupaten Sukoharjo	14.000.104.048,00	7.492.013.459,00
28	Kabupaten Karanganyar	12.265.068.549,00	7.261.739.588,00
29	Kabupaten Wonogiri	7.867.799.025,00	5.442.385.543,00
30	Kota Semarang	51.353.262.468,00	25.057.759.540,00
31	Kota Pekalongan	4.402.647.632,00	2.575.573.920,00
32	Kota Surakarta	12.504.500.963,00	6.772.925.022,00
33	Kota Salatiga	4.416.374.330,00	2.269.455.175,00
34	Kota Tegal	4.348.816.029,00	2.411.047.166,00
35	Kota Magelang	2.080.487.861,00	572.036.923,00
	Jumlah	**415.325.328.506,00**	**223.838.772.797,00**

Utang Belanja Bagi Hasil senilai Rp415.325.328.506,00 merupakan kurang salur Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Nomor SP2D 33600029 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2024					KURANG SALUR TA 2024
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
1	SEMARANG	5.188.265.238,00	2.919.059.198,00	5.115.828.350,00	61.231.062,00	-	13.284.383.848,00
2	KENDAL	4.595.049.581,00	3.197.331.893,00	5.310.470.456,00	15.153.777,00	-	13.118.005.707,00
3	DEMAK	4.629.276.781,00	3.390.023.807,00	5.324.449.200,00	12.654.635,00	-	13.356.404.423,00
4	GROBOGAN	5.051.144.928,00	3.047.593.435,00	4.720.017.582,00	61.643.998,00	-	12.880.399.943,00
5	P A T I	6.540.659.177,00	3.426.033.823,00	6.480.652.457,00	4.405.739,00	-	16.451.751.196,00
6	K U D U S	5.074.213.386,00	2.970.076.424,00	4.621.570.930,00	2.129.451,00	-	12.667.990.191,00
7	J E P A R A	5.153.012.984,00	3.126.792.628,00	5.881.547.438,00	2.424.158,00	-	14.163.777.208,00
8	REMBANG	2.741.258.507,00	1.575.244.388,00	4.290.920.919,00	6.417.859,00	-	8.613.841.673,00

NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2024					KURANG SALUR TA 2024
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
9	B L O R A	3.512.180.274,00	2.034.065.273,00	2.842.792.150,00	5.451.727,00	-	8.394.489.424,00
10	PEKALONGAN	3.357.022.408,00	2.054.909.179,00	2.993.412.023,00	27.718.225,00	-	8.433.061.835,00
11	BATANG	3.065.826.454,00	2.070.512.160,00	4.117.655.124,00	23.859.612,00	-	9.277.853.350,00
12	PEMALANG	4.512.001.611,00	2.856.672.666,00	4.416.226.197,00	23.035.767,00	-	11.807.936.241,00
13	TEGAL	4.952.252.053,00	3.614.367.740,00	6.208.549.419,00	23.238.857,00	-	14.798.408.069,00
14	BREBES	5.444.057.551,00	4.528.402.183,00	6.133.472.632,00	19.712.291,00	-	16.125.644.657,00
15	BANYUMAS	7.247.470.426,00	3.808.275.410,00	5.795.363.666,00	34.970.210,00	-	16.886.079.712,00
16	CILACAP	7.159.243.821,00	4.132.189.229,00	6.460.751.577,00	157.183.920,00	-	17.909.368.547,00
17	PURBALINGGA	3.393.412.938,00	1.519.074.123,00	2.814.162.012,00	24.715.332,00	-	7.751.364.405,00
18	BANJARNEGARA	3.487.386.890,00	1.844.906.103,00	2.963.126.707,00	101.112.372,00	-	8.396.532.072,00
19	MAGELANG	3.946.227.780,00	1.983.640.339,00	5.475.999.637,00	47.776.006,00	-	11.453.643.762,00
20	TEMANGGUNG	3.346.955.471,00	1.479.395.844,00	2.012.560.555,00	23.942.852,00	-	6.862.854.722,00
21	WONOSOBO	3.117.344.666,00	1.573.414.464,00	1.434.715.246,00	42.465.660,00	-	6.167.940.036,00
22	PURWOREDJO	3.170.523.434,00	1.476.305.799,00	3.114.704.168,00	5.639.224,00	-	7.767.172.625,00
23	KEBUMEN	4.441.360.238,00	2.118.417.377,00	4.148.714.139,00	24.828.870,00	-	10.733.320.624,00
24	KLATEN	6.439.292.405,00	2.995.422.933,00	4.512.802.394,00	21.862.023,00	-	13.969.379.755,00
25	BOYOLALI	4.789.730.682,00	2.348.436.719,00	3.860.769.404,00	9.768.532,00	-	11.008.705.337,00
26	SRAGEN	5.300.670.509,00	2.056.953.440,00	2.440.909.040,00	7.425.250,00	-	9.805.958.239,00
27	SUKOHARDJO	5.384.876.722,00	2.837.077.287,00	5.770.293.647,00	7.856.392,00	-	14.000.104.048,00
28	KARANGANYAR	5.074.427.977,00	2.004.124.695,00	5.168.309.291,00	18.206.586,00	-	12.265.068.549,00
29	WONOGIRI	4.129.027.564,00	1.784.737.985,00	1.947.351.500,00	6.681.976,00	-	7.867.799.025,00
30	SEMARANG	21.016.006.521,00	15.640.780.080,00	14.643.837.153,00	52.638.714,00	-	51.353.262.468,00

NO	URAIAN	KURANG SALUR THN 2024					KURANG SALUR TA 2024
		PKB	BBNKB	PBBKB	PAP	ROKOK	
31	PEKALONGAN	1.609.098.275,00	887.570.786,00	1.905.665.208,00	313.363,00	-	4.402.647.632,00
32	SURAKARTA	5.714.342.566,00	3.262.306.377,00	3.524.914.528,00	2.937.492,00	-	12.504.500.963,00
33	SALATIGA	1.778.009.119,00	952.260.551,00	1.684.058.474,00	2.046.186,00	-	4.416.374.330,00
34	T E G A L	1.609.885.526,00	1.180.225.868,00	1.558.411.589,00	293.046,00	-	4.348.816.029,00
35	MAGELANG	1.114.306.067,00	516.566.044,00	445.862.147,00	3.753.603,00	-	2.080.487.861,00
	JUMLAH	**167.085.820.530,00**	**97.213.166.250,00**	**150.140.846.959,00**	**885.494.767,00**	**-**	**415.325.328.506,00**

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya **Rp15.458.698.666,00**

Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp15.458.698.666,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.734.786.696,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp9.723.911.970,00 atau 169,56% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Utang Kelebihan Pembayaran PAD	-	-
2	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer	15.433.855.000,00	5.729.024.508,00
3	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.843.666,00	5.762.188,00
	Jumlah	**15.458.698.666,00**	**5.734.786.696,00**

5.3.2.1.4.1 Utang Kelebihan Pembayaran Transfer **Rp15.433.855.000,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer terdiri atas lebih salur atas dana transfer dari pemerintah pusat pada tahun 2024 berdasarkan PMK 90 Tahun 2024 sebesar Rp15.433.855.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.729.024.508,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.704.830.492,00 atau 169,40% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD)	15.433.855.000,00	5.729.024.508,00
	Jumlah	**15.433.855.000,00**	**5.729.024.508,00**

5.3.2.1.4.2 Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp24.843.666,00**

Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan sisa titipan uang muka pasien pada RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang sampai akhir periode 31 Desember 2024 belum diambil oleh pasien yaitu sebesar Rp24.843.666,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.762.188,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 19.081.478,00 atau 331,15% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	RSUD Dr Moewardi Surakarta	24.843.666,00	5.762.188,00
	Jumlah	**24.843.666,00**	**5.762.188,00**

Adapun rincian utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari:

	TAHUN	JUMLAH	
		PASIEN	NOMINAL
RSUD Dr Moewardi Surakarta	2023	96	5.762.188,00
	2024	80	19.081.478,00
TOTAL		**176**	**24.843.666,00**

5.3.2.1 Kewajiban Kontijensi

Kewajiban Kontijensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah. Kewajiban kontinjensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdiri atas:

a. Barang Milik Daerah berupa bangunan SMA Negeri 1 Tegal dan tanah seluas 6.890 m^2 senilai Rp 2.219.562.000,- di Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal yang terdaftar sebagai Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok atas nama Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Pemerintah Provinsi Jawa Tengah) digugat oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero). Gugatan didaftarkan di PTUN Semarang dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 23/G/2017/PTUN.Smg tanggal 18 Oktober 2017 yang intinya mengabulkan gugatan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyatakan batal Sertifikat Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok dan memerintahkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mencoret dari Daftar Barang Milik Daerah ProvinsiJawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya Banding dan telah diputus berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya Nomor: 24/B/2018/PT.TUN.Sby tanggal 12 Pebruari 2018 yang intinya menguatkan Putusan PTUN Semarang. Berdasarkan Putusan PT TUN Surabaya tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dan telah diputus berdasarkan Putusan Nomor: 414 K/TUN/2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang intinya menolak permohonan Kasasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sehingga perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap Putusan dimaksud Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Mei 2019 dan telah diputus berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 yang intinya menolakpermohonan Peninjauan Kembali Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

   Dasar Pertimbangan Mahkamah Agung untuk membatalkan sertifikat adalah:

   - Tanah tersebut merupakan bagian dari Tanah milik PT.KAI (persero) berdasarkan bukti kepemilikan masa lampau berupa *groundkaart*.
   - Pemecahan sebagian tanah tersebut menjadi SMAN 1 Tegal tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan dari Menteri Keuangan sebagai Pejabat yang berwenang.

   Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, melalui Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor 04/Pbt/BPN-33/IV/2020 membatalkan sertifikat HP.01/Desa Slerok.

Mempertimbangkan SMAN 1 Tegal saat ini digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh unsur termasuk BUMN dalam hal ini PT. KAI (Persero) agar dapat melepaskan tanah dimaksud untuk pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Mendasarkan hasil rapat dengan MCP KPK pada tanggal 27 Maret 2024, Tim MCP KPK bersama dengan Kanwil BPN Jawa Tengah dan ASDATUN Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menyampaikan agar segera menindaklanjuti rapat dengan jajaran direksi PT. KAI serta Pimpinan Tinggi Kementerian BUMN dengan pertimbangan kondisi fisik saat ini digunakan untuk pelayanan pendidikan.

Pemprov Jateng mengirim surat nomor 475.287/643 Tanggal 14 Juni 2024 ke Kantor Pertanahan Kota Tegal untuk menanyakan terkait informasi dan dokumen status tanah Hak Pakai Nomor 1/Desa Slerok yang akan digunakan sebagai dokumen pelengkap dalam permasalahan sengketa aset dengan PT. KAI.

Kantor pertanahan Kota Tegal membalas dengan surat nomor MP.01.02/197-33.76/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang intinya tanah tersebut merupakan tanah eygendom Verp. No. 2577 dan mendasarkan SK Gubernur Nomor SK.DA.II/HP/36/74 tanggal 15 juli 1974, eygendom tersebut diterbitkan Hak Pakai Nomor 1/Slerok a.n Perwakilan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah untuk SMAN 1 Tegal.

Pada Kartu Eygendom terdapat catatan menggunakan tinta merah yang intinya bahwa mendasarkan SK Menteri Pertanian tanah menjadi tanah negara dengan memberi ganti rugi kepada Pemiliknya.

Mendasarkan Keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria, tanah negara bekas partikelir dan surat keputusan mengenai kesediaan pemberian ganti rugi oleh pemerintah, pengelolaan arsip dan dokumen adalah kewenangan kementerian Agraria Dan Tata Ruang.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengirimkan Surat Nomor 030/0005695 Tanggal 23 Agustus 2024 hal Permohonan Informasi dan Dokumen terkait Status Tanah Hak Pakai Nomor 1/Slerok kepada Kementerian ATR/BPN RI.

Tanggal 25 November 2024, Kementerian ATR/BPN menanggapi dengan surat Sekretaris Dirjen Penataan Ruang Nomor 268/500.22.LR.03.01/XI/2024 yang intinya pemenuhan Fotocopy SK Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 454/Ka/60 Tanggal 19 Maret 1960 dan Surat keputusan Menteri Pertanian Dan Agraria Nomor 11/Ka/64 tanggal 2 Maret 1964.

b. Tanah bersertifikat HP Nomor 4 tanggal 31 Juli 1997 luas 7.125 m^2 terletak di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal merupakan Tanah Bekas Waduk Lapangan BE 2.

Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat HP Nomor 4, pada tanggal 13 Mei 2003, Bachrudin Ratib melalui kuasa hukumnya yaitu Untoro Sulaiman, SH dan Ajjar, SH, keduanya beralamat di Jalan DR. Ciptomangunkusumo No. 9 Dukuhsalam Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2003 telah mengajukan gugatan yang deregister di Kepaniteraan PN Slawi No. 10/Pdt/G/2003/PN.Slw tanggal 13 Mei 2003, merasa dirugikan haknya karena seharusnya atas tanah obyek sengketa menjadi haknya dan perbuatan penerbitan sertipikat dianggap perbuatan melawan hukum karena tindakan tersebut dilakukan tanpa persetujuan atau melibatkan penggugat.

Pada tanggal 4 November 2004, Putusan Perkara Nomor 10/Pdt.G/ 2003/PN.Slw memenangkan Tergugat : Pemerintah RI cq. DPU Pengairan Kab. Tegal dan Turut Tergugat I : Pemerintah RI cq. BPN Kab. Tegal.

Berdasarkan Putusan PN Slawi tersebut, penggugat pada tanggal 8 November 2004 mengajukan permohonan banding, pada tanggal 14 Juli 2005, Putusan Perkara Nomor 62/Pdt/2005/PT.Smg jo.

10/Pdt.G/2003/PN.Slw memutuskan menguatkan putusan PN Slawi.

Atas Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, penggugat mengajukan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2005, dan mendasarkan Putusan Kasasi No. 10/Pdt.G/2003/PN.Slw. Jo No.2061 K/Pdt/ 2006 Tentang Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2061 K/Pdt/2006. Jo No. 10/Pdt.G/2003/ PN.Slw tanggal 21 Pebruari 2008 yang bunyi putusannya mengabulkan permohonan kasasi dari Bachrudin Ratib.

Pada 23 Juli 2012, Keputusan Kepala Kantor BPN Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/ Pbt/ BPN.33/ 2012 tentang Pembatalan Sertifikat HP Nomor 4 Desa Tegalandong Luas ± 7.125 M2 atas nama Pemprov. Dati I Jateng Semarang terletak di Desa Tegalandong, Kec. Lebaksiu, Kab.Tegal sebagai pelaksanaan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada tanggal 27 Maret 2014, diselenggarakan rapat di Dinas PSDA Prov. Jateng dengan hasil:

a) Peserta rapat sepakat untuk mempertahankan aset sertifikat HP No. 4 di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal tetap menjadi milik Pemerintah Prov. Jateng dengan upaya mengajukan Gugatan Baru kepada Bachrudin Ratib.
b) Dinas PSDA Prov. Jateng menjawab surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal untuk tidak mencoret aset sertifikat HP No. 4 dari daftar inventarisasi BMD sampai dengan dilakukannya upaya hukum.
c) Dinas PSDA Prov. Jateng membuat surat kepada Gubernur berkaitan dengan surat Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal.

Pada tanggal 27 Maret 2014, Kepala Dinas PSDA Prov. Jateng mengirimkan Surat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Tegal Nomor 594.3/1128 perihal Pencoretan Daftar inventarisasi Barang Milik Daerah atas Tanah, yang intinya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan melakukan gugatan baru kepada Bachrudin Ratib.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 konsultasi dengan Kabag. Bantuan Hukum Kemendagri yang hasilnya yaitu :

a) Pemerintah Kabupaten Tegal dimohon mengajukan PK berkaitan dengan adanya novum (bukti baru) antara lain bahwa Pemerintah Kab. Tegal bukan sebagai tergugat.
b) Pemprov.Jateng akan melakukan upaya hukum apabila dilakukan eksekusi.

Mendasarkan surat Kepala Dinas PUSDATARU Nomor 028/3063 tanggal 30 Mei 2018 Perihal : Pelepasan Hak/Penghapusan dari Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah atas Tanah Hak Pakai No. 4 Di Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal kepada Ketua Yayasan Darul Hasanah di Slawi yang intinya yaitu :

a) Berdasarkan Pasal 329 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, bahwa barang milik daerah yang dapat dipindah tangankan adalah barang yang tidak diperlukan lagi dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah;
b) Tanah HP No. 4 di Desa Tegalandong Kecamatan Lebaksiu Kab.Tegal merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 1997, yang mana tanah tersebut akan dikembalikan sebagai fungsi semula menjadi embung dalam rangka mendukung program ketahanan pangan;
c) Sehubungan dengan hal tersebut permohonan pelepasan hak/penghapusan tidak dapat dikabulkan.

Pada tanggal 15 Juli 2019 Surat Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat, Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Setneg RI Nomor B-2404/ Kemensetneg/ DM.05/07/2019 Perihal Pengaduan Masyarakat ditujukan Kepada Inspektur Provinsi Jawa Tengah yang ditidaklanjuti Rapat Koordinasi Pada 17 September 2019 hasilnya :

a) Aset tanah di Desa Tegalandong Kec. Lebaksiu Kab. Tegal diupayakan untuk dipertahankan.
b) Ditempuh upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Kabupaten Tegal
c) Kabupaten Tegal bersama Balai PSDA Pemali Comal akan berupaya mencari dokumen perijinan asli sebagai bukti baru.

Pada tanggal 25 Maret 2021 Yayasan Darul Hasanah melalui Kantor Advokat Dedy Riyanto, SH beralamat di Jl. Pala Barat 1 Blok F Mejasem, Kab.Tegal mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di kepaniteraan PN. Slawi nomor : 12/Pdt.G/2021/ PN.Slw.

Telah dilaksanakan Sidang Perkara Nomor 12/Pdt.G/2021.PN.Slw. tanggal 3 Juni 2021 dengan hasil :

- Tergugat I Pemprov. Jateng dan Tergugat II Dinas PUSDATARU diwakili oleh Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
- Tergugat III Pemerintah Kabupaten Tegal diwakili oleh JPN;
- Turut Tergugat Kantor Pertanahan Kab. Tegal diwakili Sdr.Makmur;
- Sidang selanjutnya dilakukan secara E-Court (secara elektronik).

Tanggal 24 Juni 2021 agenda sidang penyerahan bukti atas eksepsi kompetensi absolute.

Tanggal 29 Juli 2021 agenda Putusan Sela memutuskan:

a) Mengabulkan Eksepsi Tergugat I II dan III tentang kewenangan mengadili;
b) Menyatakan PN. Slawi tidak berwenang mengadili perkara ini;
c) Menghukum penggugat membayar biaya perkara Rp. 1.297.000,00.

setelah tanggal putusan tidak ada upaya hukum oleh Penggugat.

Untuk penyelesaian melalui Peninjauan Kembali (PK), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sedang mencari bukti baru/*novum.*

5.3.3 EKUITAS Rp39.704.505.567.071,59

Ekuitas sebesar Rp39.704.505.567.071,59, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp40.503.023.207.483,67 mengalami **penurunan** sebesar (Rp798.517.640.412,08) atau (1,97%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.640.677.235.717,17	8.116.593.372.397,70
2	Dinas Kesehatan	367.739.690.324,63	452.184.726.785,90
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	1.309.471.788.987,96	1.332.529.691.782,52
4	RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto	971.963.381.341,43	844.874.301.449,65
5	RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang	342.797.214.043,72	376.215.826.730,58
6	RSUD dr. Rehatta Jepara	806.199.970.891,01	763.527.772.215,71
7	RSJD Dr. Amino Gondhohutomo Semarang	219.865.211.491,29	209.594.486.770,44
8	RSJD dr. Arif Zainudin Surakarta	189.455.944.652,88	180.351.980.804,77
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	100.812.091.013,79	96.232.170.800,31
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.018.751.000.573,52	5.798.774.709.282,03
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.843.867.701.635,55	5.917.373.783.752,05
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	27.919.956.443,68	27.447.242.807,87
13	Satuan Polisi Pamong Praja	17.812.093.071,33	17.577.293.427,55
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	23.807.880.324,59	17.809.296.736,50
15	Dinas Sosial	259.526.923.100,12	243.023.880.407,56
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	128.141.267.272,87	133.716.134.959,62
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.995.300.451,53	11.487.228.286,90
18	Dinas Ketahanan Pangan	22.307.437.706,13	22.244.674.211,56
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	187.745.237.708,70	184.333.819.091,16
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kependudukan dan Catatan Sipil	15.896.654.756,98	16.082.006.480,45

		2024 (Rp)	2023 (Rp)
21	Dinas Perhubungan	355.598.934.022,99	356.959.772.910,19
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	57.601.287.045,02	73.627.310.522,81
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	57.592.389.727,15	59.015.569.203,92
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanar Terpadu Satu Pintu	13.197.909.502,79	13.607.628.838,41
25	Dinas Kepemudaan. Olah Raga dan Pariwisata	837.403.679.701,11	915.818.176.349,29
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	37.595.754.461,30	31.465.541.676,11
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	465.365.772.496,45	418.327.066.521,41
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	467.268.976.455,84	481.892.675.547,73
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	989.913.668.890,57	976.817.793.089,05
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	109.860.538.927,16	111.364.795.468,51
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	97.480.509.481,21	90.143.754.122,33
32	Sekretariat Daerah	240.554.542.108,40	237.713.715.555,09
33	Sekretariat DPRD	153.852.046.651,92	162.945.834.581,61
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	127.402.752.156,01	128.162.790.050,90
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.639.716.041.916,27	2.399.496.502.333,03
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.318.378.432.533,88	9.053.768.304.600,50
37	Badan Kepegawaian Daerah	12.888.751.184,99	13.956.146.664,49
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	155.611.042.881,05	155.524.413.375,19
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.547.538.978,86	8.754.169.502,03
40	Badan Penghubung	24.968.504.716,56	25.110.850.838,82
41	Inspektorat	9.402.906.843,02	9.582.101.555,62
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.549.604.880,16	16.993.894.995,80
	Jumlah	**39.704.505.567.071,59**	**40.503.023.207.483,67**

5.4 PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO Tahun 2023 dan 2024 mendasari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, ringkasan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan	26.378.719.626.419,00	4.860.069.994.144,00	3.047.800.436.395,12	28.190.989.184.167,89	26.641.067.165.994,36	1.549.922.018.173,53	5,82
2	Beban	25.443.816.600.309,00	24.883.470.723.876,30	21.301.062.205.613,21	29.026.225.118.572,09	26.420.502.250.936,04	2.605.722.867.636,05	9,86
	Surplus/(Defisit) Operasional	**934.903.026.110,00**	**(20.023.400.729.732,30)**	**(18.253.261.769.218,10)**	**(835.235.934.404,20)**	**220.564.915.058,32**	**(1.055.800.849.462,52)**	**(478,68)**
3	Kegiatan Non Operasional	-	(64.047.771.553,77)	-	(64.047.771.553,77)	(77.731.498.723,65)	13.683.727.169,88	(17,60)
	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	**934.903.026.110,00**	**(20.087.448.501.286,07)**	**(18.253.261.769.218,10)**	**(899.283.705.957,97)**	**142.833.416.334,67**	**(1.042.117.122.292,64)**	**(729,60)**
4	Pos Luar Biasa	(10.225.800.500,00)	-	-	(10.225.800.500,00)	(740.000.000,00)	(9.485.800.500,00)	1.281,86
	Jumlah	**924.677.225.610,00**	**(20.087.448.501.286,07)**	**(18.253.261.769.218,10)**	**(909.509.506.457,97)**	**142.093.416.334,67**	**(1.051.602.922.792,64)**	**(740,08)**

5.4.1 PENDAPATAN DAERAH-LO **Rp28.190.989.184.167,89**

Pendapatan Daerah adalah pendapatan yang menjadi hak Provinsi Jawa Tengah dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan Daerah-LO terealisasi sebesar Rp28.190.989.184.167,89 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.641.067.165.994,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.549.922.018.173,53 atau 5,82% dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	17.650.936.913.504,00	3.390.691.883.073,30	2.845.479.902.382,82	18.196.148.894.194,48	17.546.226.160.129,77	649.922.734.064,71	3,70
2	Pendapatan Transfer - LO	8.701.438.866.795,00	80.735.929.820,00	183.255.800.820,00	8.598.918.995.795,00	8.274.765.989.284,00	324.153.006.511,00	3,92
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	26.343.846.120,00	1.388.642.181.250,70	19.064.733.192,29	1.395.921.294.178,41	820.075.016.580,59	575.846.277.597,82	70,22
	Jumlah	**26.378.719.626.419,00**	**4.860.069.994.144,00**	**3.047.800.436.395,11**	**28.190.989.184.167,89**	**26.641.067.165.994,36**	**1.549.922.018.173,53**	**5,82**

Realisasi Pendapatan Daerah sebesar Rp28.190.989.184.167,89 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA	**Referensi**	**26.378.719.626.419,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	CALK Neraca 5.3.1.1.2 5.3.1.1.3 5.3.1.1.4 5.3.1.1.7	3.064.470.132.705,61
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	CALK Neraca 5.3.2.1.6.5[1]	43.443.051.948,15

Hibah Berupa Aset	KK Aset[2]	680.147.835.366,00	
Hibah Berupa Bahan Habis Pakai	KK Persediaann	605.015.426.869,70	
Bantuan Pemerintah berupa uang yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa	KK Bantah	74.742.533.091,00	
Saldo Awal Lebih Salur	CALK Neraca 5.3.2.1.6.7.1	5.729.024.508,00	
Aset Hasil Usaha Mandiri	KK Aset dan KK Usman Baru	28.736.385.924,00	
Koreksi atas Lebih Salur Tahun sebelumnya	KK Kurang Lebih Salur	21.927.301.312,00	
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	KK Penyertaan Modal	208.021.353.451,31	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	CALK Neraca 5.3.1.1.2	97.305.036.000,00	
Pengembalian Belanja Pegawai yang belum teridentifikasi di Tahun 2024	Nota Piutang Pajak KK Pengembalian	370.749.328,00	
Reklasifikasi Antar Akun	KK Piutang[3]	28.541.250.458,23	
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Piutang	1.619.913.182,00	
Total Penambahan			**4.860.069.994.144,00**
Mutasi Kurang			
Saldo Awal Piutang	CALK Neraca 5.3.1.1.2 5.3.1.1.3 5.3.1.1.4 5.3.1.1.7	2.657.153.524.068,70	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	CALK Neraca 5.3.2.1.6.5[1]	31.377.084.579,89	
Saldo Akhir Lebih Salur	CALK Neraca 5.3.2.1.6.7.1	15.433.855.000,00	
Koreksi Kurang Lebih Salur	KK Kurang Lebih Salur	2.820,00	
Penyesuaian Kas yang dibatasi penggunaannya dari Bunga Deposito Dana Cadangan tahun sebelumnya	CALK Neraca 5.3.1.5.7	18.342.855,00	
Penyusutan atas Hibah Berupa Aset	KK Penyusutan	19.064.733.192,29	
Reklasifikasi Antar Akun	KK Piutang[3]	28.541.250.458,23	
Penyesuaian Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun sebelumnya	CALK Neraca 5.3.1.5.8	98.445.714.000,00	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Piutang	197.765.929.421,00	
Total Pengurangan			**3.047.800.436.395,11**
Pendapatan-LO			**28.190.989.184.167,89**

Keterangan:

1. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka diluar Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III di RSUD Dr Moewardi Surakarta, RSUD Dr. Margono Sukarjo Purwokerto dan RSUD dr. Adhyatma, MPH Semarang berupa Titipan Uang Muka Pasien.

2. KK Aset Tetap dan KK Aset Tidak Berwujud pada kolom Penambahan dari Hibah diluar Hibah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp35.000.000 sudah diakui Pendapatan ditahun sebelumnya dan realisasi barang di Tahun 2024.
3. Reklas Penyesuaian Kode Rekening dari Piutang Pendapatan BLUD menjadi Piutang Retribusi sesuai Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

5.4.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO Rp18.196.148.894.194,48

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp18.196.148.894.194,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.546.226.160.129,77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp649.922.734.064,71 atau 3,70% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	14.210.241.533.541,00	3.037.598.158.480,00	2.656.561.641.908,00	**14.591.278.050.113,00**	14.173.278.881.219,00	417.999.168.894,00	2,95
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	2.318.821.514.818,00	113.753.796.840,09	157.323.781.275,34	2.275.251.530.382,75	138.944.123.193,64	2.136.307.407.189,11	1.537,53
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan – LO	687.813.166.201,00	208.021.353.451,31	-	**895.834.519.652,31**	1.115.560.459.737,02	(219.725.940.084,71)	(19,70)
4	Lain-Lain PAD yang Sah - LO	434.060.698.944,00	31.318.574.301,90	31.594.479.199,48	433.784.794.046,42	2.118.442.695.980,11	(1.684.657.901.933,69)	(79,52)
	Jumlah	**17.650.936.913.504,00**	**3.390.691.883.073,30**	**2.845.479.902.382,82**	**18.196.148.894.194,48**	**17.546.226.160.129,77**	**649.922.734.064,71**	**3,70**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp18.196.148.894.194,48 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**17.650.936.913.504,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	3.011.390.528.705,61	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	43.443.051.948,15	
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	208.021.353.451,31	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	97.305.036.000,00	
Pengembalian Belanja Pegawai yang belum teridentifikasi di Tahun 2024	370.749.328,00	
Reklasifikasi Antar Akun	28.541.250.458,23	
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.619.913.182,00	
Total Penambahan		**3.390.691.883.073,30**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	2.657.153.519.814,70	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	31.377.084.579,89	
Penyesuaian Kas yang dibatasi penggunaannya dari Bunga Deposito Dana Cadangan tahun sebelumnya	18.342.855,00	
Reklasifikasi Antar Akun	28.541.250.458,23	

Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	128.389.704.675,00	
Total Pengurangan		**2.845.479.902.382,82**
Pendapatan-LO		**18.196.148.894.194,48**

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO Rp14.591.278.050.113,00

Pendapatan Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp14.591.278.050.113,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.173.278.881.219,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp417.999.168.894,00 atau 2,95%, dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	5.474.932.909.600,00	3.037.259.059.450,00	2.656.226.965.200,00	5.855.965.003.850,00	5.706.256.396.225,00	149.708.607.625,00	2,62
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	3.068.323.586.500,00	-	-	3.068.323.586.500,00	2.963.924.066.000,00	104.399.520.500,00	3,52
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) - LO	2.693.880.376.743,00	-	-	2.693.880.376.743,00	2.667.596.623.023,00	26.283.753.720,00	0,99
4	Pajak Air Permukaan - LO	18.993.373.282,00	339.099.030,00	334.676.708,00	18.997.795.604,00	17.341.702.142,00	1.656.093.462,00	9,55
5	Pajak Rokok - LO	2.954.059.323.916,00	-	-	2.954.059.323.916,00	2.818.160.093.829,00	135.899.230.087,00	4,82
6	Pajak Alat Berat (PAB)	51.963.500,00	-	-	51.963.500,00	-	51.963.500,00	100,00
	Jumlah	**14.210.241.533.541,00**	**3.037.598.158.480,00**	**2.656.561.641.908,00**	**14.591.278.050.113,00**	**14.173.278.881.219,00**	**417.999.168.894,00**	**2,95**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp14.591.278.050.113,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**14.210.241.533.541,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	2.897.664.180.980,00	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	42.628.941.500,00	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	97.305.036.000,00	
Total Penambahan		**3.037.598.158.480,00**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	2.625.886.012.008,00	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	30.675.629.900,00	
Total Pengurangan		**2.656.561.641.908,00**
Pendapatan-LO		**14.591.278.050.113,00**

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO Rp2.275.251.530.382,75

Pendapatan Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp2.275.251.530.382,75, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp138.944.123.193,64 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.136.307.407.189,11 atau 1.537,53%, dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Jasa Umum – LO	2.219.653.775.575,00	113.178.315.472,73	156.982.942.741,23	2.175.849.148.306,50	28.083.633.944,00	2.147.765.514.362,50	7.647,75
2	Retribusi Jasa	92.761.371.908,00	575.481.367,36	340.838.534,11	92.996.014.741,25	106.748.918.749,64	(13.752.904.008,39)	(12,88)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
3	Usaha - LO Retribusi Perizinan Tertentu - LO	6.406.367.335,00	-	-	6.406.367.335,00	4.111.570.500,00	2.294.796.835,00	55,81
	Jumlah	**2.318.821.514.818,00**	**113.753.796.840,09**	**157.323.781.275,34**	**2.275.251.530.382,75**	**138.944.123.193,64**	**2.136.307.407.189,11**	**1.537,53**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp2.275.251.530.382,75, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**2.318.821.514.818,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	111.893.619.660,73	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	321.238.837,36	
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.538.938.342,00	
Total Penambahan		**113.753.796.840,09**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	86.035.958,00	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	306.790.184,11	
Reklasifikasi Antar Akun	28.541.250.458,23	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	128.389.704.675,00	
Total Pengurangan		**157.323.781.275,34**
Total Pendapatan-LO		**2.275.251.530.382,75**

5.4.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO Rp2.175.849.148.306,50

Pendapatan Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp2.175.849.148.306,50 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp28.083.633.944,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.147.765.514.362,50 atau 7.647,75% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	2.217.602.631.575,00	113.178.315.472,73	156.982.942.741,23	2.173.798.004.306,50	27.289.449.944,00	2.146.508.554.362,50	7.865,71
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	2.051.144.000,00	-	-	2.051.144.000,00	-	2.051.144.000,00	100,00
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	-	-	-	-	334.284.000,00	(334.284.000,00)	(100,00)
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO	-	-	-	-	459.900.000,00	(459.900.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**2.219.653.775.575,00**	**113.178.315.472,73**	**156.982.942.741,23**	**2.175.849.148.306,50**	**28.083.633.944,00**	**2.147.765.514.362,50**	**7.647,75**

Realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar Rp2.175.849.148.306,50 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**2.219.653.775.575,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	111.639.377.130,73	
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	1.538.938.342,00	
Total Penambahan		**113.178.315.472,73**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	51.987.608,00	
Reklasifikasi Antar Akun	28.541.250.458,23	

Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	128.389.704.675,00
Total Pengurangan	**156.982.942.741,23**
Total Pendapatan-LO	**2.175.849.148.306,50**

5.4.1.1.2.1.1 Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO Rp2.173.798.004.306,50

Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan terealisasi sebesar Rp2.173.798.004.306,50, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp27.289.449.944,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.146.508.554.362,50 atau 7.865,71% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	27.231.223.894,00	69.321.200,00	51.987.608,00	27.248.557.486,00	27.289.449.944,00	(40.892.458,00)	(0,15)
2	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.051.958.578.478,00	77.146.380.826,00	136.709.849.308,00	992.395.109.996,00	-	992.395.109.996,00	100,00
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	769.086.700.599,00	17.031.129.351,41	10.058.760.082,91	776.059.069.867,50	-	776.059.069.867,50	100,00
4	RSUD dr. Adhyatma MPH	162.221.548.649,00	16.790.300.711,60	6.881.460.144,60	172.130.389.216,00	-	172.130.389.216,00	100,00
5	RSUD dr. Rehatta	61.118.196.043,00	97.847.398,72	335.543.275,72	60.880.500.166,00	-	60.880.500.166,00	100,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	52.463.679.746,00	1.535.793.043,00	1.607.031.612,00	52.392.441.177,00	-	52.392.441.177,00	100,00
7	RSJD Dr. Arif Zainudin	41.513.253.313,00	346.352.590,00	980.096.998,00	40.879.508.905,00	-	40.879.508.905,00	100,00
8	RSJD Dr. RM Sedjarwadi Klaten	52.009.450.853,00	161.190.352,00	358.213.712,00	51.812.427.493,00	-	51.812.427.493,00	100,00
	Jumlah	**2.217.602.631.575,00**	**113.178.315.472,73**	**156.982.942.741,23**	**2.173.798.004.306,50**	**27.289.449.944,00**	**2.146.508.554.362,50**	**7.865,71**

5.4.1.1.2.1.2 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar-LO Rp2.051.144.000,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar terealisasi sebesar Rp2.051.144.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.051.144.000,00 atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	1.990.420.000,00	-	-	1.990.420.000,00	-	1.990.420.000,00	100,00
2	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15.725.000,00	-	-	15.725.000,00	-	15.725.000,00	100,00
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	44.999.000,00	-	-	44.999.000,00	-	44.999.000,00	100,00
	Jumlah	**2.051.144.000,00**	**-**	**-**	**2.051.144.000,00**	**-**	**2.051.144.000,00**	**100,00**

5.4.1.1.2.1.3 Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp334.284.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp334.284.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	-	-	-	9.200.000,00	(9.200.000,00)	(100,00)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	325.084.000,00	(325.084.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**334.284.000,00**	**(334.284.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.2.1.4 Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Pelayanan Pendidikan terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp459.900.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp459.900.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	459.900.000,00	(459.900.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**459.900.000,00**	**(459.900.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO Rp92.996.014.741,25

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp92.996.014.741,25 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp106.748.918.749,64 mengalami **penurunan** sebesar (Rp13.752.904.008,39) atau (12,88%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	50.284.681.535,00	575.481.367,36	340.838.534,11	50.519.324.368,25	64.522.725.645,64	(14.003.401.277,39)	(21,70)
2	Retribusi Tempat Pelelangan-LO	92.042.000,00	-	-	92.042.000,00	224.497.700,00	(132.455.700,00)	(59,00)
3	Retribusi Terminal-LO	315.420.000,00	-	-	315.420.000,00	4.213.857.700,00	(3.898.437.700,00)	(92,51)
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir -LO	5.160.417.195,00	-	-	5.160.417.195,00	-	5.160.417.195,00	100,00
5	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Vila-LO	7.927.263.000,00	-	-	7.927.263.000,00	6.710.588.000,00	1.216.675.000,00	18,13
6	Retribusi Kepelabuhan-LO	11.368.920.000,00	-	-	11.368.920.000,00	10.434.792.000,00	934.128.000,00	8,95
7	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga -LO	2.266.141.000,00	-	-	2.266.141.000,00	820.729.500,00	1.445.411.500,00	176,11
8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO	15.346.487.178,00	-	-	15.346.487.178,00	19.821.728.204,00	(4.475.241.026,00)	(22,58)
	Jumlah	**92.761.371.908,00**	**575.481.367,36**	**340.838.534,11**	**92.996.014.741,25**	**106.748.918.749,64**	**(13.752.904.008,39)**	**(12,88)**

Realisasi Retribusi Jasa Usaha-LO sebesar Rp92.996.014.741,25 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**92.761.371.908,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	254.242.530,00	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	321.238.837,36	
Total Penambahan		**575.481.367,36**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	34.048.350,00	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	306.790.184,11	
Total Pengurangan		**340.838.534,11**
Total Pendapatan-LO		**92.996.014.741,25**

5.4.1.1.2.2.1 Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah -LO Rp50.519.324.368,25

Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah terealisasi sebesar Rp50.519.324.368,25, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp64.522.725.645,64 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.003.401.277,39) atau (21,70%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.519.168.000,00	-	-	5.519.168.000,00	5.921.702.600,00	(402.534.600,00)	(6,80)
2	Dinas Kesehatan	2.863.625.000,00	-	-	2.863.625.000,00	3.721.061.000,00	(857.436.000,00)	(23,04)
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	12.879.094.115,00	-	-	12.879.094.115,00	10.664.137.732,00	2.214.956.383,00	20,77
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	4.710.789.537,00	29.140.930,00	2.006.750,00	4.737.923.717,00	4.366.972.574,00	370.951.143,00	8,49
5	Satuan Polisi Pamong Praja	410.578.640,00	-	-	410.578.640,00	518.103.260,00	(107.524.620,00)	(20,75)
6	Dinas Sosial	229.047.200,00	-	-	229.047.200,00	171.067.300,00	57.979.900,00	33,89
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	510.497.750,00	-	-	510.497.750,00	2.221.629.000,00	(1.711.131.250,00)	(77,02)
8	Dinas Ketahanan Pangan	70.690.000,00	-	-	70.690.000,00	-	70.690.000,00	100,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.695.195.500,00	-	-	1.695.195.500,00	5.029.360.300,00	(3.334.164.800,00)	(66,29)
10	Dinas Perhubungan	419.035.000,00	-	-	419.035.000,00	104.400.000,00	314.635.000,00	301,37
11	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	96.000.000,00	-	-	96.000.000,00	641.506.615,00	(545.506.615,00)	(85,04)
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	33.000.000,00	-	-	33.000.000,00	33.000.000,00	-	-
13	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	253.549.000,00	-	-	253.549.000,00	5.830.161.300,00	(5.576.612.300,00)	(95,65)
14	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	38.738.500,00	-	-	38.738.500,00	70.773.500,00	(32.035.000,00)	(45,26)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.129.098.010,00	-	-	4.129.098.010,00	4.656.033.824,00	(526.935.814,00)	(11,32)
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	1.212.125.500,00	-	-	1.212.125.500,00	1.624.110.113,00	(411.984.613,00)	(25,37)
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.170.406.450,00	-	-	2.170.406.450,00	2.088.339.759,00	82.066.691,00	3,93
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.627.146.749,00	-	-	1.627.146.749,00	794.200.000,00	832.946.749,00	104,88
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.040.526.525,00	193.060.000,00	-	2.233.586.525,00	3.932.227.014,00	(1.698.640.489,00)	(43,20)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	30.240.000,00	-	-	30.240.000,00	30.240.000,00	-	-
21	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.742.883.434,00	-	-	2.742.883.434,00	5.052.542.465,00	(2.309.659.031,00)	(45,71)
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.626.637.625,00	353.280.437,36	338.831.784,11	2.641.086.278,25	2.535.520.889,64	105.565.388,61	4,16
23	Badan Kepegawaian Daerah	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-	-
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.612.469.000,00	-	-	2.612.469.000,00	3.173.996.400,00	(561.527.400,00)	(17,69)
25	Sekretariat Daerah	769.740.000,00	-	-	769.740.000,00	722.240.000,00	47.500.000,00	6,58
26	Sekretariat DPRD	552.600.000,00	-	-	552.600.000,00	552.600.000,00	-	-
27	Badan Penghubung	29.800.000,00	-	-	29.800.000,00	54.800.000,00	(25.000.000,00)	(45,62)
	Jumlah	**50.284.681.535,00**	**575.481.367,36**	**340.838.534,11**	**50.519.324.368,25**	**64.522.725.645,64**	**(14.003.401.277,39)**	**(21,70)**

5.4.1.1.2.2.2 Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan-LO Rp92.042.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Pelelangan terealisasi sebesar Rp92.042.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp224.497.700,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp132.455.700,00) atau (59,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	92.042.000,00	-	-	92.042.000,00	224.497.700,00	(132.455.700,00)	(59,00)
	Jumlah	**92.042.000,00**	**-**	**-**	**92.042.000,00**	**224.497.700,00**	**(132.455.700,00)**	**(59,00)**

5.4.1.1.2.2.3 Pendapatan Retribusi Terminal-LO Rp315.420.000,00

Pendapatan Retribusi Terminal terealisasi sebesar Rp315.420.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.213.857.700,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.898.437.700,00) atau (92,51%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	-	-		-	4.213.857.700,00	(4.213.857.700,00)	(100,00)
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	315.420.000,00	-	-	315.420.000,00	-	315.420.000,00	100,00
	Jumlah	**315.420.000,00**	**-**	**-**	**315.420.000,00**	**4.213.857.700,00**	**(3.898.437.700,00)**	**(92,51)**

5.4.1.1.2.2.4 Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir Rp5.160.417.195,00

Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp5.160.417.195,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.160.417.195,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	42.413.000,00	-	-	42.413.000,00	-	42.413.000,00	100,00
2	Dinas Perhubungan	2.030.965.000,00	-	-	2.030.965.000,00	-	2.030.965.000,00	100,00
3	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.087.039.195,00	-	-	3.087.039.195,00	-	3.087.039.195,00	100,00
	Jumlah	**5.160.417.195,00**	**-**	**-**	**5.160.417.195,00**	**-**	**5.160.417.195,00**	**100,00**

5.4.1.1.2.2.5 Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa-LO Rp7.927.263.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa terealisasi sebesar Rp7.927.263.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.710.588.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.216.675.000,00 atau 18,13% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	707.623.000,00	-	-	707.623.000,00	-	707.623.000,00	100,00
2	Dinas Sosial	-	-	-	-	23.025.000,00	(23.025.000,00)	(100,00)
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189.000.000,00	-	-	189.000.000,00	201.100.000,00	(12.100.000,00)	(6,02)
4	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	413.180.000,00	-	-	413.180.000,00	451.575.000,00	(38.395.000,00)	(8,50)
5	Dinas Pertanian dan Perkebunan	78.100.000,00	-	-	78.100.000,00	83.700.000,00	(5.600.000,00)	(6,69)
6	Sekretariat Daerah	126.400.000,00	-	-	126.400.000,00	104.600.000,00	21.800.000,00	20,84
7	Sekretariat DPRD	325.450.000,00	-	-	325.450.000,00	372.300.000,00	(46.850.000,00)	(12,58)
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.354.650.000,00	-	-	5.354.650.000,00	4.870.798.000,00	483.852.000,00	9,93
9	Badan Penghubung	732.860.000,00	-	-	732.860.000,00	603.490.000,00	129.370.000,00	21,44
	Jumlah	**7.927.263.000,00**	**-**	**-**	**7.927.263.000,00**	**6.710.588.000,00**	**1.216.675.000,00**	**18,13**

5.4.1.1.2.2.6 Pendapatan Retribusi Kepelabuhan-LO Rp11.368.920.000,00

Pendapatan Retribusi Kepelabuhan terealisasi sebesar Rp11.368.920.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 10.434.792.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp934.128.000,00 atau 8,95% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	11.368.920.000,00	-	-	11.368.920.000,00	10.434.792.000,00	934.128.000,00	8,95
	Jumlah	**11.368.920.000,00**	**-**	**-**	**11.368.920.000,00**	**10.434.792.000,00**	**934.128.000,00**	**8,95**

5.4.1.1.2.2.7 Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO Rp2.266.141.000,00

Pendapatan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO terealisasi sebesar Rp2.266.141.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp820.729.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.445.411.500,00 atau 176,11% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	856.566.000,00	-	-	856.566.000,00	789.839.500,00	66.726.500,00	8,45
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.409.575.000,00	-	-	1.409.575.000,00	30.890.000,00	1.378.685.000,00	4.463,21
	Jumlah	**2.266.141.000,00**	**-**	**-**	**2.266.141.000,00**	**820.729.500,00**	**1.445.411.500,00**	**176,11**

5.4.1.1.2.2.8 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO Rp15.346.487.178,00

Pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah terealisasi sebesar Rp15.346.487.178,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp19.821.728.204,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.475.241.026,00) atau (22,58%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.740.000,00	-	-	7.740.000,00	-	7.740.000,00	100,00
2	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.238.831.600,00	-	-	2.238.831.600,00	2.059.210.200,00	179.621.400,00	8,72
3	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.944.791.687,00	-	-	4.944.791.687,00	6.839.531.599,00	(1.894.739.912,00)	(27,70)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	8.154.569.891,00	-	-	8.154.569.891,00	10.922.986.405,00	(2.768.416.514,00)	(25,34)
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	554.000,00			554.000,00	-	554.000,00	100,00
	Jumlah	**15.346.487.178,00**	**-**	**-**	**15.346.487.178,00**	**19.821.728.204,00**	**(4.475.241.026,00)**	**(22,58)**

5.4.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO Rp6.406.367.335,00

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu terealisasi sebesar Rp6.406.367.335,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.111.570.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.294.796.835,00 atau 55,81% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	-	-	-	-	355.525.000,00	(355.525.000,00)	(100,00)
2	Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO	-	-	-	-	3.756.045.500,00	(3.756.045.500,00)	(100,00)
3	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO	6.406.367.335,00	-	-	6.406.367.335,00	-	6.406.367.335,00	100,00
	Jumlah	**6.406.367.335,00**	**-**	**-**	**6.406.367.335,00**	**4.111.570.500,00**	**2.294.796.835,00**	**55,81**

5.4.1.1.2.3.1 Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp355.525.000,00, mengalami **penurunan** sebesar (Rp355.525.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perhubungan	-	-	-	-	355.525.000,00	(355.525.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**355.525.000,00**	**(355.525.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.2.3.2 Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan-LO Rp0,00

Pendapatan Retribusi Izin Usaha Perikanan terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.756.045.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.756.045.500,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	3.756.045.500,00	(3.756.045.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.756.045.500,00**	**(3.756.045.500,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.2.3.3 Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO Rp6.406.367.335,00

Pendapatan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)-LO terealisasi sebesar Rp6.406.367.335,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.406.367.335,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.406.367.335,00	-	-	6.406.367.335,00		6.406.367.335,00	100,00
	Jumlah	**6.406.367.335,00**	**-**	**-**	**6.406.367.335,00**	**-**	**6.406.367.335,00**	**100,00**

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Rp895.834.519.652,31

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan terealisasi sebesar Rp895.834.519.652,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.115.560.459.737,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp219.725.940.084,71) atau (19,70%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN - LO	1.839.800.755,00	-	-	1.839.800.755,00	4.257.880.271,00	(2.418.079.516,00)	(56,79)
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD - LO	685.973.365.446,00	208.021.353.451,31	-	893.994.718.897,31	1.111.302.579.466,02	(217.307.860.568,71)	(19,55)
	Jumlah	**687.813.166.201,00**	**208.021.353.451,31**	**-**	**895.834.519.652,31**	**1.115.560.459.737,02**	**(219.725.940.084,71)**	**(19,70)**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO sebesar Rp895.834.519.652,31, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**687.813.166.201,00**
Mutasi Tambah		
Penyesuaian Pengakuan Laba BUMN/BUMD	208.021.353.451,31	
Total Penambahan		**208.021.353.451,31**
Pendapatan-LO		**895.834.519.652,31**

5.4.1.1.3.1 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN-LO Rp1.839.800.755,00

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMN terealisasi sebesar Rp1.839.800.755,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.257.880.271,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.418.079.516,00) atau (56,79%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba PT Wijaya Kusuma (KIW) – LO	-	-	-	-	743.957.001,00	(743.957.001,00)	(100,00)
2	Bagian Laba PT. Asuransi Bangun Askrida - LO	1.839.800.755,00	-	-	1.839.800.755,00	3.513.923.270,00	(1.674.122.515,00)	(47,64)
	Jumlah	**1.839.800.755,00**	**-**	**-**	**1.839.800.755,00**	**4.257.880.271,00**	**(2.418.079.516,00)**	**(56,79)**

PT Asuransi Bangun Askrida tidak memberikan deviden pada Tahun 2024 dikarenakan kinerja PT Asuransi Bangun Askrida yang cenderung tidak sehat maka dari OJK melarang PT Asuransi Bangun Askrida untuk melakukan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis sesuai surat OJK Nomor S-362/PD.11/2024 tanggal 18 April 2024 hal larangan pembagian deviden dan pembentukan cadangan teknis yang mencukupi dan Surat OJK Nomor S-37/PD.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 hal Reminder terkait larangan pembagian deviden.

5.4.1.1.3.2 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD-LO Rp893.994.718.897,31

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan pada BUMD terealisasi sebesar Rp893.994.718.897,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.111.302.579.466,02 mengalami **penurunan** sebesar (Rp217.307.860.568,71) atau (19,55%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari (Perseroda)	1.668.816.220,00	4.532.137.928,62	-	6.200.954.148,62	3.034.211.301,00	3.166.742.847,62	104,37
2	Bagian Laba PT. Bank Jateng	550.244.937.092,00	104.495.576.603,73	-	654.740.513.695,73	831.521.258.527,65	(176.780.744.831,92)	(21,26)
3	Bagian Laba BPR-BKK Se-Jateng (Perseroda)	70.945.400.423,00	35.806.788.094,38	-	106.752.188.517,38	154.751.172.739,18	(47.998.984.221,80)	(31,02)
4	Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	7.444.261.200,00	11.370.235.296,95	-	18.814.496.496,95	-	18.814.496.496,95	100,00
5	Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	10.715.302.586,00	11.710.948.540,00	-	22.426.251.126,00	19.482.368.339,00	2.943.882.787,00	15,11

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
6	Deviden PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (Perseroda)	3.878.979.438,00	6.641.039.162,53	-	10.520.018.600,53	5.502.674.284,34	5.017.344.316,19	91,18
7	Deviden PT Jateng Petro Energi (Perseroda)	34.097.271.465,00	24.778.308.153,00	-	58.875.579.618,00	83.076.298.394,00	(24.200.718.776,00)	(29,13)
8	Deviden PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	6.978.397.022,00	8.686.319.672,10	-	15.664.716.694,10	13.934.595.880,85	1.730.120.813,25	12,42
	Jumlah	**685.973.365.446,00**	208.021.353.451,31	**-**	**893.994.718.897,31**	**1.111.302.579.466,02**	**(217.307.860.568,71)**	**(19,55)**

5.4.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO **Rp433.784.794.046,42**

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp433.784.794.046,42, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.118.442.695.980,11 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.684.657.901.933,69) atau (79,52%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	2.077.258.017,00	-	-	2.077.258.017,00	2.336.062.458,00	(258.804.441,00)	(11,08)
2	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	411.000,00	-	-	411.000,00	14.497.280,00	(14.086.280,00)	(97,16)
3	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO	2.531.327.437,00	370.051.669,00	370.051.669,00	2.531.327.437,00	2.064.905.450,00	466.421.987,00	22,59
4	Hasil Kerja Sama Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
5	Jasa Giro - LO	18.876.876.300,00	-	18.342.855,00	18.858.533.445,00	16.838.861.771,82	2.019.671.673,18	11,99
6	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir - LO	-	-	-	-	726.650,00	(726.650,00)	(100,00)
7	Pendapatan Bunga - LO	32.911.785.082,00	-	-	32.911.785.082,00	66.290.790.889,00	(33.379.005.807,00)	(50,35)
8	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah - LO	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	3.666.000,00	(1.866.000,00)	(50,90)
9	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain - LO	67.056.903.649,00	370.749.328,00	-	67.427.652.977,00	61.400.812.404,00	6.026.840.573,00	9,82
10	Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing - LO	-	-	-	-	-	-	-
11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	2.642.694.739,00	-	-	2.642.694.739,00	2.029.659.646,00	613.035.093,00	30,20
12	Pendapatan Denda Pajak Daerah - LO	241.621.801.355,00	-	-	241.621.801.355,00	131.192.364.953,00	110.429.436.402,00	84,17
13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah - LO	62.417.887,00	-	-	62.417.887,00	185.395.280,00	(122.977.393,00)	(66,33)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
14	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO	474.991.000,00	-	-	474.991.000,00	60.900.000,00	414.091.000,00	
15	Pendapatan dari Pengembalian - LO	2.979.350.614,00	-	-	2.979.350.614,00	1.173.105.480,00	1.806.245.134,00	153,97
16	Pendapatan BLUD - LO	62.793.535.998,00	30.577.773.304,90	31.206.084.675,48	62.165.224.627,42	1.834.850.947.718,29	(1.772.685.723.090,87)	(96,61)
17	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan - LO	2.545.866,00	-	-	2.545.866,00	-	2.545.866,00	100,00
18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) - LO	-	-	-	-	-	-	-
19	Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht) - LO	-	-	-	-	-	-	-
20	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir- LO	-	-	-	-	-	-	-
21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah - LO	-	-	-	-	-	-	-
22	Pendapatan Zakat - LO	-	-	-	-	-	-	-
23	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00	100,00
24	Pendapatan Konsesi Jasa	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**434.060.698.944,00**	**31.318.574.301,90**	**31.594.479.199,48**	**433.784.794.046,42**	**2.118.442.695.980,11**	**(1.684.657.901.933,69)**	**(62,97)**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp433.784.794.046,42, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**434.060.698.944,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	1.832.728.064,88	
Saldo Awal Pendapatan Diterima Dimuka	492.871.610,79	
Reklasifikasi Antar Akun	28.541.250.458,23	
Pengembalian Belanja Pegawai yang belum teridentifikasi di Tahun 2024	370.749.328,00	
Koreksi Kurang Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	80.974.840,00	
Total Penambahan		**31.318.574.301,90**
Mutasi Kurang		
Saldo Awal Piutang	31.181.471.848,70	
Saldo Akhir Pendapatan Diterima Dimuka	394.664.495,78	

Penyesuaian Kas yang dibatasi penggunaannya dari Bunga Deposito Dana Cadangan tahun sebelumnya	18.342.855,00
Total Pengurangan	**31.594.479.199,48**
Pendapatan-LO	**433.784.794.046,42**

5.4.1.1.4.1 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO Rp2.077.258.017,00

Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.077.258.017,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.336.062.458,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp258.804.441,00) atau (11,08%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	86.343.000,00	-	-	86.343.000,00	518.560.200,00	(432.217.200,00)	(83,35)
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	100,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	13.550.000,00	(13.550.000,00)	(100,00)
4	Sekretariat Badan Penganggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	600.000,00	(600.000,00)	(100,00)
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.988.915.017,00	-	-	1.988.915.017,00	1.803.352.258,00	185.562.759,00	10,29
	Jumlah	**2.077.258.017,00**	**-**	**-**	**2.077.258.017,00**	**2.336.062.458,00**	**(258.804.441,00)**	**(11,08)**

5.4.1.1.4.2 Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Rp411.000,00

Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan (LO) terealisasi sebesar Rp411.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp14.497.280,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.086.280,00) atau (97,16%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	411.000,00			411.000,00	14.497.280,00	(14.086.280,00)	(97,16)
	Jumlah	**411.000,00**	**-**	**-**	**411.000,00**	**14.497.280,00**	**(14.086.280,00)**	**(97,16)**

5.4.1.1.4.3 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Rp2.531.327.437,00

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan terealisasi sebesar Rp2.531.327.437,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.064.905.450,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp466.421.987,00 atau 22,59% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Koperasi dan UMKM	275.535.261,00	-	-	275.535.261,00	-	275.535.261,00	100,00
2	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	-	21.000.000,00	100,00
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.740.001.176,00	-	-	1.740.001.176,00	2.017.578.000,00	(277.576.824,00)	(13,76)
4	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	-	370.051.669,00	370.051.669,00	-	-	-	-
5	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	184.000.000,00	-	-	184.000.000,00	-	184.000.000,00	100,00
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	310.791.000,00	-	-	310.791.000,00	47.327.450,00	263.463.550,00	556,68
	Jumlah	**2.531.327.437,00**	**370.051.669,00**	**370.051.669,00**	**2.531.327.437,00**	**2.064.905.450,00**	**466.421.987,00**	**22,59**

5.4.1.1.4.4 Jasa Giro-LO Rp18.858.533.445,00

Jasa Giro terealisasi sebesar Rp18.858.533.445,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp16.838.861.771,82, mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.019.671.673,18 atau 11,99% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	18.876.876.300,00	-	18.342.855,00	18.858.533.445,00	16.838.861.771,82	2.019.671.673,18	11,99
	Jumlah	**18.876.876.300,00**	**-**	**18.342.855,00**	**18.858.533.445,00**	**16.838.861.771,82**	**2.019.671.673,18**	**11,99**

5.4.1.1.4.5 Hasil Pengelolaan Dana Bergulir – LO Rp0,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp726.650,00, mengalami **penurunan** sebesar (Rp726.650,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	726.650,00	(726.650,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**726.650,00**	**(726.650,00)**	**(100,00)**

5.4.1.1.4.6 Pendapatan Bunga-LO Rp32.911.785.082,00

Pendapatan Bunga terealisasi sebesar Rp32.911.785.082,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp66.290.790.889,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp33.379.005.807,00) atau (50,35%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	32.911.785.082,00	-	-	32.911.785.082,00	66.290.790.889,00	(33.379.005.807,00)	(50,35)
	Jumlah	**32.911.785.082,00**	**-**	**-**	**32.911.785.082,00**	**66.290.790.889,00**	**(33.379.005.807,00)**	**(50,35)**

5.4.1.1.4.7 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO Rp1.800.000,00

Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah terealisasi sebesar Rp1.800.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.666.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.866.000,00) atau (50,90%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	3.666.000,00	(1.866.000,00)	(50,90)
	Jumlah	**1.800.000,00**	**-**	**-**	**1.800.000,00**	**3.666.000,00**	**(1.866.000,00)**	**(50,90)**

5.4.1.1.4.8 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO Rp67.427.652.977,00

Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp67.427.652.977,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp61.400.812.404,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.026.840.573,00 atau 9,82% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.314.125,00	370.749.328,00		403.063.453,00	-	403.063.453,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	12.920.000,00	-	-	12.920.000,00	-	12.920.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina	2.154.650.700,00	-	-	2.154.650.700,00	-	2.154.650.700,00	100,00

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Marga dan Cipta Karya							
4	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	9.000,00	(9.000,00)	(100,00)
5	Dinas Ketahanan Pangan	57.712.962,00	-	-	57.712.962,00	-	57.712.962,00	100,00
6	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.970.750,00	-	-	17.970.750,00	-	17.970.750,00	100,00
7	Dinas Perhubungan	32.476.216.700,00	-	-	32.476.216.700,00	27.460.516.091,00	5.015.700.609,00	18,27
8	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	172.034.500,00	-	-	172.034.500,00	335.302.750,00	(163.268.250,00)	(48,69)
9	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.650.000,00	-	-	2.650.000,00	2.750.000,00	(100.000,00)	(3,64)
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	104.588.560,00	-	-	104.588.560,00	1.280.000,00	103.308.560,00	8.070,98
11	Dinas Pertanian dan Perkebunan	670.916.715,00	-	-	670.916.715,00	-	670.916.715,00	100,00
12	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.700.909.505,00	-	-	2.700.909.505,00	1.648.803.100,00	1.052.106.405,00	63,81
13	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	74.161.355,00	-	-	74.161.355,00	163.739,00	73.997.616,00	45.192,42
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.693.130.898,00	-		7.693.130.898,00	9.855.315.384,00	(2.162.184.486,00)	(21,94)
15	Badan Kepegawaian Daerah	888.950.000,00	-	-	888.950.000,00	942.200.000,00	(53.250.000,00)	(5,65)
16	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.997.776.879,00	-	-	19.997.776.879,00	21.154.472.340,00	(1.156.695.461,00)	(5,47)
	Jumlah	**67.056.903.649,00**	**370.749.328,00**	**-**	**67.427.652.977,00**	**61.400.812.404,00**	**6.026.840.573,00**	**9,82**

5.4.1.1.4.9 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO Rp2.642.694.739,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan terealisasi sebesar Rp2.642.694.739,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.029.659.646,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp613.035.093,00 atau 30,20% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.642.694.739,00	-	-	2.642.694.739,00	2.029.659.646,00	613.035.093,00	30,20
	Jumlah	**2.642.694.739,00**	**-**	**-**	**2.642.694.739,00**	**2.029.659.646,00**	**613.035.093,00**	**30,20**

5.4.1.1.4.10 Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO Rp241.621.801.355,00

Pendapatan Denda Pajak Daerah terealisasi sebesar Rp241.621.801.355,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp131.192.364.953,00 mengalami **kenaikan** sebesar 110.429.436.402,00 atau 84,17% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	241.621.801.355,00	-	-	241.621.801.355,00	131.192.364.953,00	110.429.436.402,00	84,17
	Jumlah	**241.621.801.355,00**	**-**	**-**	**241.621.801.355,00**	**131.192.364.953,00**	**110.429.436.402,00**	**84,17**

5.4.1.1.4.11 Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO Rp62.217.887,00

Pendapatan Denda Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp62.217.887,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp185.395.280,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp122.977.393,00) atau (66,33%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.155.325,00	-	-	2.155.325,00	-	2.155.325,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	25.000,00	-	-	25.000,00	-	25.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	452.837,00	-	-	452.837,00	-	452.837,00	100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	200.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	100,00
5	Dinas Perhubungan	12.291.580,00	-	-	12.291.580,00	76.072.850,00	(63.781.270,00)	(83,84)
6	Dinas Kelautan dan perikanan	45.373.245,00	-	-	45.373.245,00	108.800.030,00	(63.426.785,00)	(58,30)
7	Dinas Pertanian dan Perkebunan	6.000,00	-	-	6.000,00	-	6.000,00	100,00
8	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	900.000,00	-	-	900.000,00	-	900.000,00	100,00
9	Sekretariat DPRD	10.000,00	-	-	10.000,00	-	10.000,00	100,00
10	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.900,00	-	-	18.900,00	-	18.900,00	100,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	985.000,00	-	-	985.000,00	522.400,00	462.600,00	88,55
	Jumlah	**62.417.887,00**	**-**	**-**	**62.417.887,00**	**185.395.280,00**	**(122.977.393,00)**	**(66,33)**

5.4.1.1.4.12 Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO Rp474.991.000,00

Pendapatan dari Hasil Eksekusi atas Jaminan terealisasi sebesar Rp474.991.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.900.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp414.091.000,00 atau 679,95% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	474.991.000,00	-	-	474.991.000,00	60.900.000,00	414.091.000,00	679,95
	Jumlah	**474.991.000,00**	**-**	**-**	**474.991.000,00**	**60.900.000,00**	**414.091.000,00**	**679,95**

5.4.1.1.4.13 Pendapatan dari Pengembalian-LO Rp2.979.350.614,00

Pendapatan dari Pengembalian terealisasi sebesar Rp2.979.350.614,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.173.105.480,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.806.245.134,00 atau sebesar 153,97%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.979.350.614,00	-	-	2.979.350.614,00	1.173.105.480,00	1.806.245.134,00	153,97
	Jumlah	**2.979.350.614,00**	**-**	**-**	**2.979.350.614,00**	**1.173.105.480,00**	**1.806.245.134,00**	**153,97**

5.4.1.1.4.14 Pendapatan BLUD-LO Rp62.165.224.627,42

Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp62.165.224.627,42, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.834.850.947.718,29 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.772.685.723.090,87) atau sebesar (96,91%), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	25.111.658.406,00	8.552.772.575,68	8.822.474.146,39	24.841.956.835,29	935.154.873.380,08	(910.312.916.544,79)	(97,34)
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	18.384.128.455,00	10.882.096.486,76	10.500.491.600,29	18.765.733.341,47	547.905.924.376,03	(529.140.191.034,56)	(96,58)
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	5.922.622.780,00	7.270.145.506,63	7.242.669.926,60	5.950.098.360,03	171.821.349.209,97	(165.871.250.849,94)	(96,54)
4	RSUD dr. Rehatta	1.996.469.454,00	574.437.467,68	509.085.635,31	2.061.821.286,37	45.901.075.999,05	(43.839.254.712,68)	(95,51)
5	RSJD Dr. Amino	2.463.797.273,00	1.609.045.311,00	1.609.045.311,00	2.463.797.273,00	50.820.587.994,00	(48.356.790.721,00)	(95,15)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
6	Gondohutomo Semarang RSUD dr. Arif Zainuddin	4.756.827.856,00	1.325.582.793,00	2.154.515.302,79	3.927.895.346,21	40.631.294.374,79	(36.703.399.028,58)	(90,33)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	4.158.031.774,00	363.693.164,15	367.802.753,10	4.153.922.185,05	42.615.842.384,37	(38.461.920.199,32)	(90,25)
	Jumlah	**62.793.535.998,00**	**30.577.773.304,90**	**31.206.084.675,48**	**62.165.224.627,42**	**1.834.850.947.718,29**	**(1.772.685.723.090,87)**	**(96,61)**

5.4.1.1.4.15 Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan – LO Rp2.545.866,00

Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan sebesar Rp2.545.866,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.545.866,00 atau 100,00%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.545.866,00	-	-	2.545.866,00	-	2.545.866,00	100,00
	Jumlah	**2.545.866,00**	**-**	**-**	**2.545.866,00**	**-**	**2.545.866,00**	**100,00**

5.4.1.1.4.16 Pendapatan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/ Kontrak-LO Rp27.000.000,00

Pendapatan Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak terealisasi sebesar Rp27.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp27.000.000,00 atau 100,00%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.000.000,00	-	-	27.000.000,00	-	27.000.000,00	100,00
	Jumlah	**27.000.000,00**	**-**	**-**	**27.000.000,00**	**-**	**27.000.000,00**	**100,00**

5.4.1.2 PENDAPATAN TRANSFER-LO Rp8.598.918.995.795,00

Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp8.598.918.995.795,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.274.765.989.284,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp324.153.006.511,00 atau 3,92% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Transfer Pemrintah Pusat- LO	8.701.438.866.795,00	80.735.929.820,00	183.255.800.820,00	8.598.918.995.795,00	8.274.765.989.284,00	324.153.006.511,00	3,92
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**8.701.438.866.795,00**	**80.735.929.820,00**	**183.255.800.820,00**	**8.598.918.995.795,00**	**8.274.765.989.284,00**	**324.153.006.511,00**	**3,92**

Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp8.598.918.995.795,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**8.701.438.866.795,00**
Mutasi Tambah		
Saldo Akhir Piutang	53.079.604.000,00	
Saldo Awal Lebih Salur	5.729.024.508,00	
Koreksi atas Lebih Salur Tahun sebelumnya	21.927.301.312,00	
Total Penambahan		**80.735.929.820,00**
Mutasi Kurang		

Saldo Awal Piutang	4.254,00	
Saldo Akhir Lebih Salur	15.433.855.000,00	
Koreksi Kurang Lebih Salur	2.820,00	
Penyesuaian Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun sebelumnya	98.445.714.000,00	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	69.376.224.746,00	
Total Pengurangan		**183.255.800.820,00**
Pendapatan-LO		**8.598.918.995.795,00**

5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Rp8.598.918.995.795,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp8.598.918.995.795,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.274.765.989.284,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp324.153.006.511,00 atau 3,92% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Perimbangan-LO	8.663.441.298.795,00	80.735.929.820,00	183.255.800.820,00	8.560.921.427.795,00	8.187.568.044.284,00	373.353.383.511,00	4,56
2	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-	-	-	87.197.945.000,00	(87.197.945.000,00)	(100,00)
3	Insentif Fiskal-LO	37.997.568.000,00	-	-	37.997.568.000,00	-	37.997.568.000,00	100,00
	Jumlah	**8.701.438.866.795,00**	**80.735.929.820,00**	**183.255.800.820,00**	**8.598.918.995.795,00**	**8.274.765.989.284,00**	**324.153.006.511,00**	**3,92**

5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO Rp 8.560.921.427.795,00

Dana Perimbangan terealisasi sebesar Rp8.560.921.427.795,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.187.568.044.284,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp373.353.383.511,00 atau 4,56% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	896.232.568.000,00	80.735.929.820,00	183.255.800.820,00	793.712.697.000,00	928.949.425.851,00	(135.236.728.851,00)	(14,56)
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	3.819.010.791.028,00	-	-	3.819.010.791.028,00	3.558.428.755.500,00	260.582.035.528,00	7,32
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	473.940.472.839,00	-	-	473.940.472.839,00	404.100.292.842,00	69.840.179.997,00	17,28
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	3.474.257.466.928,00	-	-	3.474.257.466.928,00	3.296.089.570.091,00	178.167.896.837,00	5,41
	Jumlah	**8.663.441.298.795,00**	**80.735.929.820,00**	**183.255.800.820,00**	**8.560.921.427.795,00**	**8.187.568.044.284,00**	**373.353.383.511,00**	**4,56**

5.4.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO Rp 793.712.697.000,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi sebesar Rp793.712.697.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp928.949.425.851,00 mengalami **penurunan** sebesar Rp(135.236.728.851,00) atau (14,56%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan - LO	42.401.279.000,00	16.614.777.000,00	11.678.909.000,00	47.337.147.000,00	65.681.465.000,00	(18.344.318.000,00)	(27,93)
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi - LO	528.584.330.000,00	27.053.070.000,00	126.715.008.000,00	428.922.392.000,00	531.973.828.000,00	(103.051.436.000,00)	(19,37)
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	318.034.449.000,00	32.738.942.000,00	39.739.801.000,00	311.033.590.000,00	321.102.441.851,00	(10.068.851.851,00)	(3,14)
4	Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	3.875.740.000,00	1.422.536.000,00	1.422.538.000,00	3.875.738.000,00	5.878.039.321,00	(2.002.301.321,00)	(34,06)
5	Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	1.000.329.000,00	307.602.000,00	891.667.000,00	416.264.000,00	599.759.679,00	(183.495.679,00)	(30,59)
6	Bagi Hasil Dari Pertambangan Gas Bumi - LO	1.744.962.000,00	1.455.333.000,00	1.455.333.000,00	1.744.962.000,00	3.163.552.000,00	(1.418.590.000,00)	(44,84)
7	Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi - LO	459.912.000,00	952.035.119,00	1.112.507.119,00	299.440.000,00	444.351.000,00	(144.911.000,00)	(32,61)
8	Bagi Hasil Dari Minerba - LO	131.567.000,00	191.634.701,00	240.037.701,00	83.164.000,00	105.989.000,00	(22.825.000,00)	(21,54)
	Jumlah	**896.232.568.000,00**	**80.735.929.820,00**	**183.255.800.820,00**	**793.712.697.000,00**	**928.949.425.851,00**	**(135.236.728.851,00)**	**(14,56)**

5.4.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO Rp3.819.010.791.028,00

Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi sebesar Rp3.819.010.791.028,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.558.428.755.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp260.582.035.528,00 atau 7,32% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	DAU	3.550.426.222.000,00	-	-	3.550.426.222.000,00	3.280.103.939.100,00	270.322.282.900,00	8,24
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.181.181.028,00	-	-	62.181.181.028,00	-	62.181.181.028,00	100,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	187.324.934.000,00	-	-	187.324.934.000,00	-	187.324.934.000,00	100,00
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.078.454.000,00	-	-	19.078.454.000,00	278.324.816.400,00	(259.246.362.400,00)	(93,15)
	Jumlah	**3.819.010.791.028,00**	**-**	**-**	**3.819.010.791.028,00**	**3.558.428.755.500,00**	**260.582.035.528,00**	**7,32**

5.4.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO Rp473.940.472.839,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik terealisasi sebesar Rp473.940.472.839,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp404.100.292.842,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp69.840.179.997,00 atau 17,28% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	DAK Bidang Pendidikan – LO	264.965.344.449,00	-	-	264.965.344.449,00	227.044.630.857,00	37.920.713.592,00	16,70
2	DAK Bidang Kesehatan – LO	40.866.296.330,00	-	-	40.866.296.330,00	36.979.900.000,00	3.886.396.330,00	10,51
3	DAK Bidang Infrastruktur Jalan – LO	12.845.424.770,00	-	-	12.845.424.770,00	32.307.528.810,00	(19.462.104.040,00)	(60,24)
4	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi – LO	4.203.097.231,00	-	-	4.203.097.231,00	9.840.881.400,00	(5.637.784.169,00)	(57,29)
5	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan – LO	34.887.433.699,00	-	-	34.887.433.699,00	19.345.076.100,00	15.542.357.599,00	80,34
6	DAK Bidang Pertanian – LO	38.482.249.589,00	-	-	38.482.249.589,00	25.493.991.675,00	12.988.257.914,00	50,95
7	DAK Bidang Air Minum – LO	59.040.205.500,00	-	-	59.040.205.500,00	53.088.284.000,00	5.951.921.500,00	11,21
8	DAK Bidang Pariwisata	3.710.771.899,00	-	-	3.710.771.899,00	-	3.710.771.899,00	100,00
9	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	14.939.649.372,00	-	-	14.939.649.372,00	-	14.939.649.372,00	100,00
	Jumlah	**473.940.472.839,00**	**-**	**-**	**473.940.472.839,00**	**404.100.292.842,00**	**69.840.179.997,00**	**17,28**

5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO **Rp3.474.257.466.928,00**

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi sebesar Rp3.474.257.466.928,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.296.089.570.091,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp178.167.896.837,00 atau 5,41% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD-LO	1.322.069.021.439,00	-	-	1.322.069.021.439,00	1.195.612.125.258,00	126.456.896.181,00	10,58
2	Bantuan Operasional Sekolah -LO	2.099.515.123.235,00	-	-	2.099.515.123.235,00	2.046.849.723.061,00	52.665.400.174,00	2,57
3	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)-LO	33.834.592.742,00	-	-	33.834.592.742,00	41.660.176.240,00	(7.825.583.498,00)	(18,78)
4	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan-LO	10.343.179.000,00	-	-	10.343.179.000,00	7.049.646.404,00	3.293.532.596,00	46,72
5	Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM-LO	2.850.000.000,00	-	-	2.850.000.000,00	-	2.850.000.000,00	100,00
6	Bantuan Biaya Pengolahan Layanan Sampah-LO	1.367.855.300,00			1.367.855.300,00	721.513.040,00	646.342.260,00	89,58
7	Fasilitasi Penanananaman Modal-LO	-	-	-	-	246.480.192,00	(246.480.192,00)	(100,00)
8	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak-LO	340.234.100,00	-	-	340.234.100,00	3.949.905.896,00	(3.609.671.796,00)	(91,39)
9	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya-LO	3.937.461.112,00	-	-	3.937.461.112,00	-	3.937.461.112,00	100,00
	Jumlah	**3.474.257.466.928,00**	**-**	**-**	**3.474.257.466.928,00**	**3.296.089.570.091,00**	**178.167.896.837,00**	**5,41**

5.4.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)-LO Rp0,00

Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp87.197.945.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp87.197.945.000,00), atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dana Insentif Daerah (DID)- LO	-	-	-	-	87.197.945.000,00	(87.197.945.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**87.197.945.000,00**	**(87.197.945.000,00)**	**(100,00)**

5.4.1.2.1.3 Insentif Fiskal-LO Rp37.997.568.000,00

Insentif Fiskal terealisasi sebesar Rp37.997.568.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.997.568.000,00, atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Insentif Fiskal-LO	37.997.568.000,00	-	-	37.997.568.000,00	-	37.997.568.000,00	100,00
	Jumlah	**37.997.568.000,00**	**-**	**-**	**37.997.568.000,00**	**-**	**37.997.568.000,00**	**100,00**

5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO Rp1.395.921.294.178,41

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.395.921.294.178,41, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp820.075.016.580,59 mengalami **kenaikan** sebesar Rp575.846.277.597,82 atau 70,22% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah- LO	25.600.169.638,00	1.388.642.181.250,70	19.064.733.192,29	1.395.177.617.696,41	819.751.090.643,59	575.426.527.052,82	70,20
2	Dana Darurat-LO	-	-	-	-	-	-	-
3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	743.676.482,00	-	-	743.676.482,00	323.925.937,00	419.750.545,00	129,58
	Jumlah	**26.343.846.120,00**	**1.388.642.181.250,70**	**19.064.733.192,29**	**1.395.921.294.178,41**	**820.075.016.580,59**	**575.846.277.597,82**	**70,22**

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah terealisasi sebesar Rp1.395.921.294.178,41 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Pendapatan LRA		**26.343.846.120,00**
Mutasi Tambah		
Hibah Berupa Aset	680.147.835.366,00	
Hibah Berupa Bahan Habis Pakai	605.015.426.869,70	
Bantuan Pemerintah berupa uang yang digunakan untuk Belanja Barang dan Jasa	74.742.533.091,00	
Aset Hasil Usaha Mandiri	28.736.385.924,00	
Total Penambahan		**1.388.642.181.250,70**
Mutasi Kurang		
Penyusutan atas Hibah Berupa Aset	19.064.733.192,29	
Total Pengurangan		**19.064.733.192,29**
Pendapatan-LO		**1.395.921.294.178,41**

5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah-LO Rp1.395.177.617.696,41

Pendapatan Hibah terealisasi sebesar Rp1.395.177.617.696,41 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp819.751.090.643,59 mengalami **kenaikan** sebesar Rp575.426.527.052,82 atau 70,20% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO	-	1.231.813.759.026,14	2.894.962.458,50	1.228.918.796.567,64	685.600.630.440,03	543.318.166.127,61	79,25
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO	-	63.179.596.271,50	15.385.402.660,85	47.794.193.610,65	12.263.983.264,68	35.530.210.345,97	289,71
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri- LO	-	63.343.079.356,90	523.628.333,34	62.819.451.023,56	87.260.202.666,40	(24.440.751.642,84)	(28,01)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO	25.593.372.000,00	29.962.140.886,16	260.739.739,60	55.294.773.146,56	33.256.555.801,16	22.038.217.345,40	66,27
5	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO	6.797.638,00	343.605.710,00	-	350.403.348,00	1.369.718.471,32	(1.019.315.123,32)	(74,42)
	Jumlah	**25.600.169.638,00**	**1.388.642.181.250,70**	**19.064.733.192,29**	**1.395.177.617.696,41**	**819.751.090.643,59**	**575.426.527.052,82**	**70,20**

5.4.1.3.1.1 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat- LO Rp1.228.918.796.567,64

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp1.228.918.796.567,64, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp685.600.630.440,03 mengalami **kenaikan** sebesar Rp543.318.166.127,61 atau 79,25% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	136.080.155.857,00	28.203.895,78	136.051.951.961,22	104.324.907.022,26	31.727.044.938,96	30,41
2	Dinas Kesehatan	-	577.205.264.491,14	-	577.205.264.491,14	493.966.181.432,25	83.239.083.058,89	16,85
3	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	31.077.772,00		31.077.772,00	981.700.980,00	(950.623.208,00)	(96,83)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	2.225.493.800,00	1.131.183.375,00	1.094.310.425,00	-	1.094.310.425,00	100,00
5	Dinas PU Bina Marga dan Ciptakarya	-	496.390.905.306,00	609.652.000,00	495.781.253.306,00	-	495.781.253.306,00	100,00
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	1.075.621.474,00		1.075.621.474,00	7.830.890.000,00	(6.755.268.526,00)	(86,26)
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	8.619.889.950,00	-	8.619.889.950,00	2.651.898.596,99	5.967.991.353,01	225,05
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	1.058.169.898,00	-	1.058.169.898,00	-	1.058.169.898,00	100,00
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		-		-	39.550.000,00	(39.550.000,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	6.471.719.000,00	39.733.913,33	6.431.985.086,67	16.856.656.683,53	(10.424.671.596,86)	(61,84)
11	Dinas Ketahanan Pangan		-		-	500.248.717,00	(500.248.717,00)	(100,00)
12	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		-		-	540.210.700,00	(540.210.700,00)	(100,00)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
13	Dinas Kelauatan dan Perikanan		-	-	-	3.067.922.000,00	(3.067.922.000,00)	(100,00)
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		-		-	104.091.000,00	(104.091.000,00)	(100,00)
15	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	-		-	240.750.000,00	(240.750.000,00)	(100,00)
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	215.890.000,00	36.742.916,69	179.147.083,31	-	179.147.083,31	100,00
17	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-		-	54.495.623.308,00	(54.495.623.308,00)	(100,00)
18	Badan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	-	2.439.571.478,00	1.049.446.357,70	1.390.125.120,30	-	1.390.125.120,30	100,00
	Jumlah	**-**	**1.231.813.759.026,14**	**2.894.962.458,50**	**1.228.918.796.567,64**	**685.600.630.440,03**	**543.318.166.127,61**	**79,25**

5.4.1.3.1.2 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya- LO Rp47.794.193.610,65

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp47.794.193.610,65, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.263.983.264,68 mengalami **kenaikan** sebesar Rp35.530.210.345,97 atau 289,71% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**-**	8.068.785.516	**-**	8.068.785.516,00	6.300.223.291	1.768.562.225,00	28,07
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	3.618.103.719,80	-	3.618.103.719,80	2.995.889.483,60	622.214.236,20	20,77
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	1.570.088.508,80	-	1.570.088.508,80	1.922.471.441,08	(352.382.932,28)	(18,33)
4	RSUD dr. Rehatta	-	607.286.678,90	-	607.286.678,90	970.992.456,00	(363.705.777,10)	(37,46)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	659.077.497,00	-	659.077.497,00	-	659.077.497,00	100,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	-	-	-	5.406.593,00	(5.406.593,00)	(100,00)
7	Dinas Sosial	-	216.018.000,00	-	216.018.000,00	-	216.018.000,00	100,00
8	Dinas Kelauatan dan Perikanan	-	47.193.739.926,00	15.362.789.076,51	31.830.950.849,49	-	31.830.950.849,49	100,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	20.000.000,00	-	20.000.000,00	69.000.000,00	(49.000.000,00)	(71,01)
10	Sekretariat Daerah	-	1.226.496.425,00	22.613.584,34	1.203.882.840,66	-	1.203.882.840,66	100,00
	Jumlah	**-**	**63.179.596.271,50**	**15.385.402.660,85**	**47.794.193.610,65**	**12.263.983.264,68**	**35.530.210.345,97**	**289,71**

5.4.1.3.1.3 Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO Rp62.819.451.023,56

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri terealisasi sebesar Rp62.819.451.023,56, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp87.260.202.666,40 mengalami **penurunan** sebesar (Rp24.440.751.642,84) atau (28,01%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	**-**	55.752.266.652,00	523.628.333,34	55.228.638.318,66	61.701.474.330,99	(6.472.836.012,33)	(10,49)
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	6.307.386.310,00	-	6.307.386.310,00	22.970.213.897,00	(16.662.827.587,00)	(72,54)
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	786.179.294,90	-	786.179.294,90	1.191.311.105,00	(405.131.810,10)	(34,01)
4	Dinas Sosial	-	469.447.100,00	-	469.447.100,00	1.397.203.333,41	(927.756.233,41)	(66,40)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	27.800.000,00	-	27.800.000,00	-	27.800.000,00	100,00
	Jumlah	**-**	**63.343.079.356,90**	**523.628.333,34**	**62.819.451.023,56**	**87.260.202.666,40**	**(24.440.751.642,84)**	**(28,01)**

5.4.1.3.1.4 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri- LO Rp55.294.773.146,56

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri terealisasi sebesar, Rp55.294.773.146,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.256.555.801,16 mengalami **kenaikan** sebesar Rp22.038.217.345,40 atau 66,27% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		7.909.716.576,00	260.739.739,60	7.648.976.836,40	-	7.648.976.836,40	100,00
2	RSUD Dr Moewardi Surakarta	-	13.733.881.157,68	-	13.733.881.157,68	6.527.849.591,94	7.206.031.565,74	110,39
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	2.755.348.000,00	-	2.755.348.000,00	1.333.918.974,42	1.421.429.025,58	106,56
4	RSUD dr. Rehatta	-	193.140,00	-	193.140,00	913.087,80	(719.947,80)	(78,85)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	80.669.503,00	-	80.669.503,00	-	80.669.503,00	100,00
6	RSJD Dr. Arif Zainuddin	-	-	-	-	338.228.651,00	(338.228.651,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	43.952.509,48	-	43.952.509,48	268.290.200,00	(224.337.690,52)	(83,62)
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	30.000.000,00	-	30.000.000,00	521.796.296,00	(491.796.296,00)	(94,25)
9	Dinas Sosial	-	41.410.000,00	-	41.410.000,00	-	41.410.000,00	100,00
10	Dinas Perhubungan	-	40.000.000,00	-	40.000.000,00	172.059.000,00	(132.059.000,00)	(76,75)
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.593.372.000,00	845.470.000,00	-	26.438.842.000,00	24.093.500.000,00	2.345.342.000,00	9,73
12	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	4.481.500.000,00	-	4.481.500.000,00	-	4.481.500.000,00	100,00
	Jumlah	**25.593.372.000,00**	**29.962.140.886,16**	**260.739.739,60**	**55.294.773.146,56**	**33.256.555.801,16**	**22.038.217.345,40**	**66,27**

5.4.1.3.1.5 Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis- LO Rp350.403.348,00

Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis terealisasi sebesar Rp350.403.348,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.369.718.471,32 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.019.315.123,32) atau (74,42%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	**-**	295.043.710	-	295.043.710,00	1.329.059.171,32	(1.034.015.461,32)	(77,80)
2	RSJD Dr. Arif Zainuddin	**-**	48.562.000	-	48.562.000,00	40.659.300,00	7.902.700,00	19,44
3	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.797.638	-	-	6.797.638,00	-	6.797.638,00	100,00
	Jumlah	**6.797.638,00**	**343.605.710,00**	**-**	**350.403.348,00**	**1.369.718.471,32**	**(1.019.315.123,32)**	**(74,42)**

5.4.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO Rp743.676.482,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp743.676.482,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp323.925.937,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp419.750.545,00 atau 129,58% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	743.676.482,00	-	-	743.676.482,00	323.925.937,00	419.750.545,00	129,58
	Jumlah	**743.676.482,00**	**-**	**-**	**743.676.482,00**	**323.925.937,00**	**419.750.545,00**	**129,58**

5.4.2 BEBAN DAERAH Rp29.026.225.118.572,09

Beban Daerah terealisasi sebesar Rp29.026.225.118.572,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp26.420.502.250.936,04 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.605.722.867.636,05 atau 9,86% dengan rincian sebagai berikut :

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1 Beban Operasional	16.083.865.301.964,00	24.468.145.395.370,30	21.077.223.432.816,21	19.474.787.264.518,09	17.185.675.650.938,04	2.289.111.613.580,05	13,32
2 Beban Transfer	9.359.951.298.345,00	415.325.328.506,00	223.838.772.797,00	9.551.437.854.054,00	9.234.826.599.998,00	316.611.254.056,00	3,43
Jumlah	**25.443.816.600.309,00**	**24.883.470.723.876,30**	**21.301.062.205.613,21**	**29.026.225.118.572,09**	**26.420.502.250.936,04**	**2.605.722.867.636,05**	**9,86**

Realisasi Beban Daerah sebesar Rp29.026.225.118.572,09, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah	**Referensi**		
Belanja Daerah (APBD)		23.378.389.347.937,00	
Belanja Daerah (BLUD)		2.065.427.252.372,00	
Total Belanja Daerah			**25.443.816.600.309,00**
Penambahan			
Saldo Akhir Utang	CALK Neraca 5.3.2.1.3	507.157.043.738,00	
Koreksi Kurang Utang Tahun sebelumnya	CALK LPE 5.6.3.10	5.100.000,00	
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	KK Persediaan	754.569.137.301,86	
Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	KK Aset	1.800.000.000,00	
Aset Ekstrakomtabel	KK Aset	16.658.068.192,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	KK Persediaan	605.015.426.869,70	
Hibah Barang Berupa Aset	KK Aset[1]	1.132.157.550.486,00	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	CALK Neraca 5.3.1.1.10[2]	535.665.818.328,03	
Koreksi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Penyisihan Piutang[2]	13.120.445,17	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	CALK Neraca 5.3.1.1.2 Nota Piutang Pajak[2]	96.637.158.000,00	
Saldo Awal Persediaan	CALK Neraca 5.3.1.1.9	350.191.210.978,03	
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	CALK Neraca 5.3.1.1.11	5.799.321.938,48	
Beban dari Usaha Mandiri	KK Usman	27.179.284.849,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah berupa uang	KK Bantah	74.742.533.091,00	
Saldo Awal RFID	CALK Neraca 5.3.1.5.7	29.853.054,00	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	KK Penyusutan	20.020.704.316.513,60	
Mutasi Keluar	KK Penyusutan	10.317.598.440,74	
Reklas Ke Aset tetap	KK Penyusutan	27.224.405.510,71	

Reklas ke Aset Lainnya	KK Penyusutan	601.184.061.446,37	
Reklas ke Properti Investasi		20.667.892.554,79	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	KK Penyusutan	70.554.392,18	
Reklas Pemanfaatan	KK Penyusutan	129.930.000,00	
Penjualan	KK Penyusutan	52.050.874.403,12	
Ganti Rugi	KK Penyusutan	9.555.000,00	
Hibah dan Lain-Lain	KK Penyusutan	6.017.806.979,78	
Koreksi	KK Penyusutan	37.473.101.363,74	
Total Penambahan			**24.883.470.723.876,30**
Pengurangan			
Saldo Awal Utang	CALK Neraca 5.3.2.1.3[3]	380.824.899.827,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	KK Persediaan	754.569.137.301,86	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	KK Aset	71.152.149.779,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	KK Aset	1.978.739.610,00	
Beban Penyusutan Ektrakomtabel	KK Penyusutan	70.554.392,18	
Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	KK Penyusutan[1]	4.495.077.646,78	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	CALK Neraca 5.3.1.1.10[2]	490.030.226.683,68	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	KK Penyisihan Piutang[2]	647.483.766,28	
Saldo Akhir Persediaan	CALK Neraca 5.3.1.1.9	315.883.508.388,03	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	CALK Neraca 5.3.1.1.11	5.086.493.552,91	
Saldo Akhir RFID	CALK Neraca 5.3.1.5.7	60.568.458,00	
Hibah	KK Penyusutan	19.064.733.192,29	
Mutasi Masuk	KK Penyusutan	10.317.598.440,71	
Reklas Dari Aset Tetap	KK Penyusutan	626.931.206.973,72	
Reklas Dari Aset Lainnya	KK Penyusutan	21.878.486.427,80	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	KK Penyusutan	2.495.002,75	
Reklas Dari ATB	KK Penyusutan	324.981.400,00	
Koreksi	KK Penyusutan	81.929.139.786,02	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	KK Penyusutan	18.515.814.724.984,20	
Total Pengurangan			**21.301.062.205.613,21**
Beban Daerah			**29.026.225.118.572,09**

Keterangan :

1. Beban Hibah Barang Berupa Aset pada kolom pelepasan aset lainnya diluar Penghapusan Piutang pada Dinas Kesehatan, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, RSUD dr. Adhyatma MPH, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang dan Sekretariat DPRD.
2. Saldo Penyisihan Piutang, Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya dan Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa hanya untuk Penyisihan yang mengalami kenaikan untuk yang mengalami penurunan diakui sebagai surplus kegiatan non operasional lainnya.
3. Saldo Hutang yang mengurangi beban diluar Saldo Hutang Belanja Modal.

5.4.2.1 BEBAN OPERASIONAL **Rp19.474.787.264.518,09**

Beban Operasional terealisasi sebesar Rp19.474.787.264.518,09, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp17.185.675.650.938,04 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.289.111.613.580,05 atau 13,32% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Pegawai	7.023.084.524.845,00	-	-	7.023.084.524.845,00	6.357.455.854.930,00	665.628.669.915,00	10,47
2	Beban Barang dan Jasa	6.234.228.358.506,00	1.171.452.514.204,21	1.305.787.278.511,97	6.099.893.594.198,24	5.780.448.351.122,05	319.445.243.076,19	5,53
3	Beban Bunga	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi	1.399.999.100,00	-	-	1.399.999.100,00	5.350.753.069,00	(3.950.753.969,00)	(73,84)
5	Beban Hibah	2.780.143.423.054,00	1.888.526.687.787,86	4.495.077.646,78	4.664.175.033.195,08	3.450.607.655.549,72	1.213.567.377.645,36	35,17
6	Beban Bantuan Sosial	45.008.996.459,00	-	-	45.008.996.459,00	118.686.467.885,00	(73.677.471.426,00)	(62,08)
7	Beban Penyisihan Piutang	-	632.316.096.773,20	490.677.710.449,95	141.638.386.323,25	115.015.769.479,24	26.622.616.844,01	23,15
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	-	20.775.850.096.605,03	19.276.263.366.207,51	1.499.586.730.397,52	1.358.110.798.903,03	141.475.931.494,49	10,42
	Jumlah	**16.083.865.301.964,00**	**24.468.145.395.370,30**	**21.077.223.432.816,21**	**19.474.787.264.518,09**	**17.185.675.650.938,04**	**2.289.111.613.580,05**	**13,32**

Realisasi Beban Operasional sebesar Rp19.474.787.264.518,09 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	14.018.438.049.592,00	
Belanja Daerah (BLUD)	2.065.427.252.372,00	
Total Belanja Daerah		**16.083.865.301.964,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	91.831.715.232,00	
Koreksi Kurang Utang Tahun sebelumnya	5.100.000,00	
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	754.569.137.301,86	
Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	1.800.000.000,00	
Aset Ekstrakomtabel	16.658.068.192,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	605.015.426.869,70	
Hibah Barang Berupa Aset	1.132.157.550.486,00	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	535.665.818.328,03	
Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	13.120.445,17	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	96.637.158.000,00	

Saldo Awal Persediaan	350.191.210.978,03	
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.799.321.938,47	
Beban dari Usaha Mandiri	27.179.284.849,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	74.742.533.091,00	
Saldo Awal RFID	29.853.054,00	
Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan	20.020.704.316.513,60	
Mutasi Keluar	10.317.598.440,74	
Reklas Ke Aset tetap	27.224.405.510,71	
Reklas ke Aset Lainnya	601.184.061.446,37	
Reklas Ke Property Investasi	20.667.892.554,79	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	70.554.392,19	
Reklas Pemanfaatan	129.930.000,00	
Penjualan	52.050.874.403,12	
Ganti Rugi	9.555.000,00	
Hibah dan LainBelanja DaerahLain	6.017.806.979,78	
Koreksi	37.473.101.363,74	
Total Penambahan		**24.468.145.395.370,30**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	156.986.127.030,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	754.569.137.301,86	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	71.152.149.779,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	1.978.739.610,00	
Beban Penyusutan Ektrakomtabel	70.554.392,18	
Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	4.495.077.646,78	
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	490.030.226.683,68	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	647.483.766,28	
Saldo Akhir Persediaan	315.883.508.388,03	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.086.493.552,91	
Saldo Akhir RFID	60.568.458,00	
Hibah	19.064.733.192,29	
Mutasi Masuk	10.317.598.440,74	
Reklas Dari Aset Tetap	626.931.206.973,72	
Reklas Dari Aset Lainnya	21.878.486.427,80	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	2.495.002,75	
Reklas Dari ATB	324.981.400,00	
Koreksi	81.929.139.785,99	
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan	18.515.814.724.984,20	
Total Pengurangan		**21.077.223.432.816,21**
Beban Daerah		**19.474.787.264.518,09**

5.4.2.1.1 Beban Pegawai Rp7.023.084.524.845,00

Beban Pegawai terealisasi sebesar Rp7.023.084.524.845,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.357.455.854.930,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp665.628.669.915,00 atau 10,47% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	3.594.629.734.827,00	-	-	3.594.629.734.827,00	3.244.639.160.695,00	349.990.574.132,00	10,79
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	1.869.688.741.019,00	-	-	1.869.688.741.019,00	1.730.720.932.422,00	138.967.808.597,00	8,03
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.405.509.725.131,00	-	-	1.405.509.725.131,00	1.230.829.843.215,00	174.679.881.916,00	14,19
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	132.534.438.978,00	-	-	132.534.438.978,00	126.922.658.694,00	5.611.780.284,00	4,42
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	983.377.690,00	-	-	983.377.690,00	204.972.404,00	778.405.286,00	379,76
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	19.738.507.200,00	-	-	19.738.507.200,00	24.138.287.500,00	(4.399.780.300,00)	(18,23)
7	Beban Pegawai BOS	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**7.023.084.524.845,00**	**-**	**-**	**7.023.084.524.845,00**	**6.357.455.854.930,00**	**665.628.669.915,00**	**10,47**

Realisasi Beban Pegawai sebesar Rp7.023.084.524.845,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	6.914.078.652.888,00	
Belanja Daerah (BLUD)	109.005.871.957,00	
Total Belanja Daerah		**7.023.084.524.845,00**

5.4.2.1.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan ASN Rp3.594.629.734.827,00

Beban Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp3.594.629.734.827,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.244.639.160.695,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp349.990.574.132,00 atau 10,79 % dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.556.547.871.794,00	-	-	2.556.547.871.794,00	2.266.445.483.973,00	290.102.387.821,00	12,80
2	Dinas Kesehatan	42.753.215.313,00	-	-	42.753.215.313,00	40.083.837.542,00	2.669.377.771,00	6,66
3	RSUD Dr. Moewardi	138.585.525.289,00	-	-	138.585.525.289,00	127.681.737.771,00	10.903.787.518,00	8,54
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	117.210.641.761,00	-	-	117.210.641.761,00	102.361.964.426,00	14.848.677.335,00	14,51
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	77.004.542.156,00	-	-	77.004.542.156,00	72.335.432.001,00	4.669.110.155,00	6,45
6	RSUD dr. Rehatta	26.506.884.632,00	-	-	26.506.884.632,00	23.239.115.167,00	3.267.769.465,00	14,06
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	37.499.500.970,00	-	-	37.499.500.970,00	34.815.151.024,00	2.684.349.946,00	7,71
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	37.678.948.104,00	-	-	37.678.948.104,00	34.895.464.226,00	2.783.483.878,00	7,98
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.276.041.285,00	-	-	28.276.041.285,00	25.362.639.455,00	2.913.401.830,00	11,49
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	32.218.723.533,00	-	-	32.218.723.533,00	33.092.720.969,00	(873.997.436,00)	(2,64)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	33.627.082.557,00	-	-	33.627.082.557,00	32.351.216.467,00	1.275.866.090,00	3,94
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.648.705.720,00	-	-	5.648.705.720,00	5.428.588.793,00	220.116.927,00	4,05
13	Satuan Polisi Pamong Praja	5.043.207.021,00	-	-	5.043.207.021,00	4.798.560.070,00	244.646.951,00	5,10
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.835.717.481,00	-	-	2.835.717.481,00	2.702.638.212,00	133.079.269,00	4,92
15	Dinas Sosial	42.211.457.067,00	-	-	42.211.457.067,00	40.874.750.284,00	1.336.706.783,00	3,27
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.836.918.379,00	-	-	29.836.918.379,00	29.627.051.429,00	209.866.950,00	0,71
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.494.694.088,00	-	-	4.494.694.088,00	3.945.219.582,00	549.474.506,00	13,93
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.399.361.974,00	-	-	6.399.361.974,00	6.281.114.944,00	118.247.030,00	1,88
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.084.105.533,00	-	-	55.084.105.533,00	52.959.717.523,00	2.124.388.010,00	4,01
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	5.570.176.777,00	-	-	5.570.176.777,00	5.449.712.200,00	120.464.577,00	2,21
21	Dinas Perhubungan	19.712.377.249,00	-	-	19.712.377.249,00	19.004.726.240,00	707.651.009,00	3,72
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.449.747.822,00	-	-	8.449.747.822,00	7.558.992.700,00	890.755.122,00	11,78
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.611.823.824,00	-	-	6.611.823.824,00	6.459.396.826,00	152.426.998,00	2,36
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.651.007.112,00	-	-	5.651.007.112,00	5.509.634.523,00	141.372.589,00	2,57
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	10.843.716.091,00	-	-	10.843.716.091,00	11.026.199.212,00	(182.483.121,00)	(1,65)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12.260.435.558,00	-	-	12.260.435.558,00	12.289.742.954,00	(29.307.396,00)	(0,24)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	18.088.919.723,00	-	-	18.088.919.723,00	16.616.547.883,00	1.472.371.840,00	8,86
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	14.706.395.034,00	-	-	14.706.395.034,00	13.649.247.955,00	1.057.147.079,00	7,75
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	39.264.799.113,00	-	-	39.264.799.113,00	39.169.299.302,00	95.499.811,00	0,24
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.400.742.991,00	-	-	13.400.742.991,00	12.556.919.036,00	843.823.955,00	6,72
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.643.541.018,00	-	-	13.643.541.018,00	12.874.315.565,00	769.225.453,00	5,97
32	Sekretariat Daerah	37.173.574.950,00	-	-	37.173.574.950,00	35.724.187.717,00	1.449.387.233,00	4,06
33	Sekretariat DPRD	8.326.827.834,00	-	-	8.326.827.834,00	7.989.269.588,00	337.558.246,00	4,23
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.205.694.694,00	-	-	9.205.694.694,00	12.265.778.757,00	(3.060.084.063,00)	(24,95)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	39.898.301.334,00	-	-	39.898.301.334,00	39.359.002.053,00	539.299.281,00	1,37
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.638.749.520,00	-	-	8.638.749.520,00	8.681.099.146,00	(42.349.626,00)	(0,49)
37	Badan Kepegawaian Daerah	10.442.176.249,00	-	-	10.442.176.249,00	9.997.562.983,00	444.613.266,00	4,45
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.939.500.263,00	-	-	11.939.500.263,00	12.561.034.695,00	(621.534.432,00)	(4,95)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.997.667.153,00	-	-	3.997.667.153,00	-	3.997.667.153,00	100,00
40	Badan Penghubung	3.437.762.040,00	-	-	3.437.762.040,00	3.360.300.809,00	77.461.231,00	2,31
41	Inspektorat	9.993.104.631,00	-	-	9.993.104.631,00	9.543.293.457,00	449.811.174,00	4,71
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.909.549.190,00	-	-	3.909.549.190,00	3.710.493.236,00	199.055.954,00	5,36
	Jumlah	**3.594.629.734.827,00**	**-**	**-**	**3.594.629.734.827,00**	**3.244.639.160.695,00**	**349.990.574.132,00**	**10,79**

5.4.2.1.1.2 Beban Tambahan Penghasilan ASN **Rp1.869.688.741.019,00**

Beban Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp1.869.688.741.019,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.730.720.932.422,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp138.967.808.597,00 atau 8,03% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	855.798.983.033,00	-	-	855.798.983.033,00	732.328.589.962,00	123.470.393.071,00	16,86
2	Dinas Kesehatan	47.674.726.347,00	-	-	47.674.726.347,00	46.459.496.613,00	1.215.229.734,00	2,62
3	RSUD Dr. Moewardi	91.310.778.888,00	-	-	91.310.778.888,00	98.970.208.021,00	(7.659.429.133,00)	(7,74)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	56.317.776.389,00	-	-	56.317.776.389,00	60.521.871.798,00	(4.204.095.409,00)	(6,95)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	49.119.564.510,00	-	-	49.119.564.510,00	50.950.881.837,00	(1.831.317.327,00)	(3,59)
6	RSUD dr. Rehatta	22.047.866.409,00	-	-	22.047.866.409,00	21.494.733.529,00	553.132.880,00	2,57
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	39.135.506.727,00	-	-	39.135.506.727,00	36.506.040.787,00	2.629.465.940,00	7,20
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	37.006.833.210,00	-	-	37.006.833.210,00	35.557.612.089,00	1.449.221.121,00	4,08
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.717.769.762,00	-	-	28.717.769.762,00	24.756.921.022,00	3.960.848.740,00	16,00
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	37.109.272.445,00	-	-	37.109.272.445,00	37.745.757.471,00	(636.485.026,00)	(1,69)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	37.134.348.276,00	-	-	37.134.348.276,00	35.198.815.087,00	1.935.533.189,00	5,50
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	7.516.943.484,00	-	-	7.516.943.484,00	7.425.705.571,00	91.237.913,00	1,23
13	Satuan Polisi Pamong Praja	6.237.572.876,00	-	-	6.237.572.876,00	5.865.949.301,00	371.623.575,00	6,34
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.023.343.972,00	-	-	4.023.343.972,00	3.744.321.511,00	279.022.461,00	7,45
15	Dinas Sosial	51.759.484.219,00	-	-	51.759.484.219,00	52.264.489.529,00	(505.005.310,00)	(0,97)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	34.563.694.761,00	-	-	34.563.694.761,00	33.126.050.592,00	1.437.644.169,00	4,34
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.616.198.875,00	-	-	6.616.198.875,00	5.668.436.119,00	947.762.756,00	16,72
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.091.807.162,00	-	-	8.091.807.162,00	8.001.598.331,00	90.208.831,00	1,13
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	61.698.358.278,00	-	-	61.698.358.278,00	59.604.089.851,00	2.094.268.427,00	3,51
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	7.853.142.363,00	-	-	7.853.142.363,00	7.326.356.899,00	526.785.464,00	7,19
21	Dinas Perhubungan	23.337.876.407,00	-	-	23.337.876.407,00	22.164.609.920,00	1.173.266.487,00	5,29
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.109.657.706,00	-	-	10.109.657.706,00	9.433.517.876,00	676.139.830,00	7,17
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	8.391.858.169,00	-	-	8.391.858.169,00	8.202.510.413,00	189.347.756,00	2,31
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8.070.861.688,00	-	-	8.070.861.688,00	7.805.794.758,00	265.066.930,00	3,40
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	12.976.657.076,00	-	-	12.976.657.076,00	12.954.691.275,00	21.965.801,00	0,17
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.991.340.550,00	-	-	13.991.340.550,00	13.818.115.749,00	173.224.801,00	1,25
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	23.267.714.155,00	-	-	23.267.714.155,00	22.197.451.292,00	1.070.262.863,00	4,82
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.496.840.036,00	-	-	15.496.840.036,00	15.374.780.287,00	122.059.749,00	0,79
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.440.483.124,00	-	-	40.440.483.124,00	41.074.365.590,00	(633.882.466,00)	(1,54)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	18.882.858.312,00	-	-	18.882.858.312,00	17.773.146.484,00	1.109.711.828,00	6,24
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.697.354.239,00	-	-	16.697.354.239,00	16.144.412.339,00	552.941.900,00	3,42
32	Sekretariat Daerah	50.704.517.703,00	-	-	50.704.517.703,00	48.295.141.298,00	2.409.376.405,00	4,99
33	Sekretariat DPRD	9.649.423.521,00	-	-	9.649.423.521,00	9.290.263.164,00	359.160.357,00	3,87
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.606.981.882,00	-	-	11.606.981.882,00	14.834.811.675,00	(3.227.829.793,00)	(21,76)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	50.020.518.362,00	-	-	50.020.518.362,00	48.787.598.556,00	1.232.919.806,00	2,53
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	11.369.730.278,00	-	-	11.369.730.278,00	11.168.985.897,00	200.744.381,00	1,80
37	Badan Kepegawaian Daerah	13.578.541.145,00	-	-	13.578.541.145,00	12.743.715.229,00	834.825.916,00	6,55
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	13.566.705.258,00	-	-	13.566.705.258,00	13.896.507.729,00	(329.802.471,00)	(2,37)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.758.644.240,00			4.758.644.240,00		4.758.644.240,00	100,00
40	Badan Penghubung	5.245.500.342,00	-	-	5.245.500.342,00	4.866.071.430,00	379.428.912,00	7,80
41	Inspektorat	12.639.977.924,00	-	-	12.639.977.924,00	11.483.767.750,00	1.156.210.174,00	10,07
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.150.726.916,00	-	-	5.150.726.916,00	4.892.747.791,00	257.979.125,00	5,27
	Jumlah	**1.869.688.741.019,00**	**-**	**-**	**1.869.688.741.019,00**	**1.730.720.932.422,00**	**138.967.808.597,00**	**8,03**

5.4.2.1.1.3 Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Rp1.405.509.725.131,00

Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN terealisasi sebesar Rp1.405.509.725.131,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.230.829.843.215,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp174.679.881.916,00 atau 14,19% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.348.529.659.200,00	-	-	1.348.529.659.200,00	1.172.767.058.319,00	175.762.600.881,00	14,99
2	Dinas Kesehatan	9.393.249.569,00	-	-	9.393.249.569,00	9.697.652.130,00	(304.402.561,00)	(3,14)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.662.250.000,00	-	-	1.662.250.000,00	1.765.450.000,00	(103.200.000,00)	(5,85)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.270.550.000,00	-	-	1.270.550.000,00	1.277.025.000,00	(6.475.000,00)	(0,51)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	2.366.515.000,00	-	-	2.366.515.000,00	2.279.295.000,00	87.220.000,00	3,83
6	RSUD dr. Rehatta	285.450.000,00	-	-	285.450.000,00	2.278.150.000,00	(1.992.700.000,00)	(87,47)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.619.541.875,00	-	-	3.619.541.875,00	2.949.860.737,00	669.681.138,00	22,70
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	665.700.000,00	-	-	665.700.000,00	652.750.000,00	12.950.000,00	1,98
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.008.260.000,00	-	-	2.008.260.000,00	1.470.050.000,00	538.210.000,00	36,61
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.801.902.000,00	-	-	1.801.902.000,00	1.824.250.000,00	(22.348.000,00)	(1,23)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	841.910.000,00	-	-	841.910.000,00	831.510.000,00	10.400.000,00	1,25
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	437.760.000,00	-	-	437.760.000,00	442.160.000,00	(4.400.000,00)	(1,00)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	295.200.000,00	-	-	295.200.000,00	243.160.000,00	52.040.000,00	21,40
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	216.000.000,00	-	-	216.000.000,00	210.600.000,00	5.400.000,00	2,56
15	Dinas Sosial	986.980.000,00	-	-	986.980.000,00	1.044.690.000,00	(57.710.000,00)	(5,52)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	78.135.000,00	-	-	78.135.000,00	72.450.000,00	5.685.000,00	7,85
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	290.280.000,00	-	-	290.280.000,00	254.630.000,00	35.650.000,00	14,00
18	Dinas Ketahanan Pangan	325.410.000,00	-	-	325.410.000,00	322.860.000,00	2.550.000,00	0,79
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	656.200.000,00	-	-	656.200.000,00	672.482.000,00	(16.282.000,00)	(2,42)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	344.360.000,00	-	-	344.360.000,00	361.250.000,00	(16.890.000,00)	(4,68)
21	Dinas Perhubungan	676.550.000,00	-	-	676.550.000,00	660.100.000,00	16.450.000,00	2,49
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	362.600.000,00	-	-	362.600.000,00	516.390.000,00	(153.790.000,00)	(29,78)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	438.080.000,00	-	-	438.080.000,00	424.560.000,00	13.520.000,00	3,18
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	729.680.000,00	-	-	729.680.000,00	720.200.000,00	9.480.000,00	1,32
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	222.680.000,00	-	-	222.680.000,00	206.550.000,00	16.130.000,00	7,81
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	917.280.000,00	-	-	917.280.000,00	919.000.000,00	(1.720.000,00)	(0,19)
27	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	295.800.000,00	-	-	295.800.000,00	302.000.000,00	(6.200.000,00)	(2,05)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	708.800.000,00	-	-	708.800.000,00	395.600.000,00	313.200.000,00	79,17
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.203.915.000,00	-	-	1.203.915.000,00	1.078.220.000,00	125.695.000,00	11,66
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	980.870.000,00	-	-	980.870.000,00	1.059.430.000,00	(78.560.000,00)	(7,42)
31	Sekretariat Daerah	2.033.783.716,00	-	-	2.033.783.716,00	1.481.055.950,00	552.727.766,00	37,32
32	Sekretariat DPRD	744.490.000,00	-	-	744.490.000,00	804.420.000,00	(59.930.000,00)	(7,45)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	307.920.000,00	-	-	307.920.000,00	347.080.000,00	(39.160.000,00)	(11,28)
34	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	17.053.083.771,00	-	-	17.053.083.771,00	18.019.621.579,00	(966.537.808,00)	(5,36)
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.079.280.000,00	-	-	1.079.280.000,00	1.006.360.000,00	72.920.000,00	7,25
36	Badan Kepegawaian Daerah	537.520.000,00	-	-	537.520.000,00	547.440.000,00	(9.920.000,00)	(1,81)
37	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	430.480.000,00	-	-	430.480.000,00	444.922.500,00	(14.442.500,00)	(3,25)
38	Badan Riset dan Inovasi Daerah	218.860.000,00	-	-	218.860.000,00	-	218.860.000,00	100,00
39	Badan Penghubung	36.600.000,00	-	-	36.600.000,00	35.400.000,00	1.200.000,00	3,39

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
40	Inspektorat	238.780.000,00	-	-	238.780.000,00	236.760.000,00	2.020.000,00	0,85
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	217.360.000,00	-	-	217.360.000,00	207.400.000,00	9.960.000,00	4,80
	Jumlah	**1.405.509.725.131,00**	**-**	**-**	**1.405.509.725.131,00**	**1.230.829.843.215,00**	**174.679.881.916,00**	**14,19**

5.4.2.1.1.4 Beban Gaji dan Tunjangan DPRD Rp132.534.438.978,00

Beban Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp132.534.438.978,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp126.922.658.694,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.611.780.284,00 atau 4,42% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat DPRD	132.534.438.978,00	-	-	132.534.438.978,00	126.922.658.694,00	5.611.780.284,00	4,42
	Jumlah	**132.534.438.978,00**	**-**	**-**	**132.534.438.978,00**	**126.922.658.694,00**	**5.611.780.284,00**	**4,42**

5.4.2.1.1.5 Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH Rp983.377.690,00

Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp983.377.690,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp204.972.404,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp778.405.286,00 atau 379,76% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	983.377.690,00	-	-	983.377.690,00	204.972.404,00	778.405.286,00	379,76
	Jumlah	**983.377.690,00**	**-**	**-**	**983.377.690,00**	**204.972.404,00**	**778.405.286,00**	**379,76**

5.4.2.1.1.6 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD Serta KDH/WKDH Rp19.738.507.200,00

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp19.738.507.200,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.138.287.500,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp4.399.780.300,00) atau (18,23%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Sekretariat Daerah	19.127.707.200,00	-	-	19.127.707.200,00	23.497.487.500,00	(4.369.780.300,00)	(18,60)
2	Sekretariat DPRD	610.800.000,00	-	-	610.800.000,00	640.800.000,00	(30.000.000,00)	(4,68)
	Jumlah	**19.738.507.200,00**	**-**	**-**	**19.738.507.200,00**	**24.138.287.500,00**	**(4.399.780.300,00)**	**(18,23)**

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa Rp6.099.893.594.198,24

Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp6.099.893.594.198,24, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.780.448.351.122,05 mengalami **kenaikan** sebesar Rp319.445.243.076,19 atau 5,53% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Barang	1.699.579.670.373,00	1.083.224.248.563,35	1.198.231.082.243,71	1.584.572.836.692,64	1.416.119.470.034,47	168.453.366.658,17	11,90
2	Beban Jasa	2.649.312.112.478,00	51.311.159.922,48	10.079.956.590,91	2.690.543.315.809,57	2.497.124.835.255,16	193.418.480.554,41	7,75
3	Beban Pemeliharaan	395.387.035.525,00	6.339.200.376,00	68.308.811.841,00	333.417.424.060,00	408.863.513.214,30	(75.446.089.154,30)	(18,45)
4	Beban Perjalanan Dinas	477.719.678.960,00	7.794.283.062,00	10.700.110,00	485.503.261.912,00	527.537.654.425,00	(42.034.392.513,00)	(7,97)
5	Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/ Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	187.616.833.692,00	1.179.115.851,00	-	188.795.949.543,00	151.000.929.108,00	37.795.020.435,00	25,03
6	Beban Barang dan Jasa BOP	-	-	-	-	-	-	-
7	Beban Barang dan Jasa BOS	824.613.027.478,00	21.604.506.429,38	29.156.727.726,35	817.060.806.181,03	779.801.949.085,12	37.258.857.095,91	4,78

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
Jumlah	**6.234.228.358.506,00**	**1.171.452.514.204,21**	**1.305.787.278.511,97**	**6.099.893.594.198,24**	**5.780.448.351.122,05**	**319.445.243.076,19**	**5,53**

Realisasi Beban Barang dan Jasa sebesar Rp6.099.893.594.198,24 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	4.277.806.978.091,00	
Belanja Daerah (BLUD)	1.956.421.380.415,00	
Total Belanja Daerah		**6.234.228.358.506,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	91.831.715.232,00	
Koreksi Kurang Utang Tahun sebelumnya	5.100.000,00	
Aset Ekstrakomtabel	16.658.068.192,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	605.015.426.869,70	
Saldo Awal Persediaan	350.191.210.978,03	
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.799.321.938,47	
Beban dari Usaha Mandiri	27.179.284.849,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	74.742.533.091,00	
Saldo Awal RFID	29.853.054,00	
Total Penambahan		**1.171.452.514.204,20**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	156.986.127.030,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	754.569.137.301,86	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	71.152.149.779,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	1.978.739.610,00	
Beban Penyusutan Ektrakomtabel	70.554.392,17	
Saldo Akhir Persediaan	315.883.508.388,03	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.086.493.552,91	
Saldo Akhir RFID	60.568.458,00	
Total Pengurangan		**1.305.787.278.511,97**
Beban Daerah		**6.099.893.594.198,23**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang **Rp1.584.572.836.692,64**

Beban Barang terealisasi sebesar Rp1.584.572.836.692,64, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.416.119.470.034,47 mengalami **kenaikan** sebesar Rp168.453.366.658,17 atau 11,90% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	124.813.799.122,00	77.984.235.073,92	14.138.201.462,02	188.659.832.733,90	179.897.639.024,50	8.762.193.709,40	4,87
2	Dinas Kesehatan	55.906.538.450,00	729.878.494.269,11	761.663.590.373,79	24.121.442.345,32	43.603.114.284,31	(19.481.671.938,99)	(44,68)
3	RSUD Dr. Moewardi	546.033.503.898,00	140.079.225.165,72	196.881.255.094,45	489.231.473.969,27	433.592.783.319,21	55.638.690.650,06	12,83
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	311.227.109.622,00	42.966.157.360,82	82.159.878.772,51	272.033.388.210,31	245.175.592.780,37	26.857.795.429,94	10,95
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	75.203.174.580,00	14.003.352.473,24	13.053.908.185,44	76.152.618.867,80	68.359.328.582,29	7.793.290.285,51	11,40
6	RSUD dr. Rehatta	17.145.526.904,00	4.093.163.737,54	2.919.684.994,79	18.319.005.646,75	16.645.672.484,92	1.673.333.161,83	10,05

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	20.071.460.036,00	3.623.622.205,70	3.605.224.849,34	20.089.857.392,36	16.080.547.673,22	4.009.309.719,14	24,93
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	12.658.310.343,00	2.619.638.924,02	1.245.139.155,43	14.032.810.111,59	13.613.602.346,92	419.207.764,67	3,08
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	14.205.605.614,00	2.390.814.435,11	2.775.893.981,67	13.820.526.067,44	11.308.993.822,63	2.511.532.244,81	22,21
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	71.351.945.770,00	4.730.523.369,50	28.844.024.557,60	47.238.444.581,90	14.929.164.571,22	32.309.280.010,68	216,42
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	18.058.322.901,00	623.355.440,00	1.405.284.845,00	17.276.393.496,00	15.061.625.282,00	2.214.768.214,00	14,70
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	4.341.255.193,00	798.000,00	1.384.400,00	4.340.668.793,00	4.615.621.251,00	(274.952.458,00)	(5,96)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	1.544.292.800,00	164.708.500,00	57.339.000,00	1.651.662.300,00	1.145.468.110,00	506.194.190,00	44,19
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.156.352.639,00	11.764.872.374,40	12.844.032.324,40	2.077.192.689,00	1.634.676.007,00	442.516.682,00	27,07
15	Dinas Sosial	59.765.426.484,00	371.077.250,00	1.254.240.426,00	58.882.263.308,00	50.918.654.083,72	7.963.609.224,28	15,64
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	10.704.232.251,00	243.935.702,00	281.252.285,37	10.666.915.667,63	7.309.139.034,00	3.357.776.633,63	45,94
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.902.827.929,00	8.402.220,00	6.521.000,00	1.904.709.149,00	2.086.470.500,00	(181.761.351,00)	(8,71)
18	Dinas Ketahanan Pangan	8.890.171.057,00	5.581.486.315,80	10.086.056.067,00	4.385.601.305,80	3.331.213.525,26	1.054.387.780,54	31,65
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	23.032.682.351,00	2.780.401.353,10	11.789.795.693,17	14.023.288.010,93	16.298.061.457,63	(2.274.773.446,70)	(13,96)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.042.079.250,00	1.825.000,00	16.284.000,00	2.027.620.250,00	1.497.877.519,00	529.742.731,00	35,37
21	Dinas Perhubungan	4.487.993.244,00	831.459.174,00	429.050.264,00	4.890.402.154,00	16.861.772.468,38	(11.971.370.314,38)	(71,00)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.453.054.435,00	28.889.900,00	4.170.000,00	3.477.774.335,00	3.931.561.845,00	(453.787.510,00)	(11,54)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.823.643.148,00	31.277.625,00	65.353.551,00	5.789.567.222,00	5.077.028.685,68	712.538.536,32	14,03
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	997.719.341,00	36.292.878,00	75.290.466,00	958.721.753,00	779.911.045,00	178.810.708,00	22,93
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.029.283.170,00	827.454.020,00	387.526.250,00	25.469.210.940,00	15.387.250.622,60	10.081.960.317,40	65,52
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.828.914.829,00	45.919.500,00	8.519.459.375,00	1.355.374.954,00	1.159.033.159,00	196.341.795,00	16,94
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.730.175.427,00	1.533.045.402,50	1.220.305.480,35	6.042.915.349,15	5.512.794.330,63	530.121.018,52	9,62
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	16.353.536.190,00	25.422.551.328,86	18.153.626.294,00	23.622.461.224,86	14.546.338.540,14	9.076.122.684,72	62,39
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	71.599.249.106,00	2.382.069.515,51	19.952.133.275,89	54.029.185.345,62	12.963.963.760,99	41.065.221.584,63	316,76
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.374.786.635,00	11.288.550,00	13.251.742,00	13.372.823.443,00	4.849.522.273,00	8.523.301.170,00	175,76
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.575.625.160,00	648.507.792,00	380.121.771,00	7.844.011.181,00	39.817.587.705,00	(31.973.576.524,00)	(80,30)
32	Sekretariat Daerah	18.201.666.936,00	38.468.804,00	68.507.858,00	18.171.627.882,00	18.290.872.042,00	(119.244.160,00)	(0,65)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
33	Sekretariat DPRD	77.575.744.314,00	4.658.100,00	15.913.800,00	77.564.488.614,00	60.669.668.182,00	16.894.820.432,00	27,85
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.399.862.722,00	26.914.500,00	21.362.499,99	4.405.414.722,01	5.971.433.797,00	(1.566.019.074,99)	(26,23)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	26.731.197.309,00	6.907.552.008,50	3.370.863.377,50	30.267.885.940,00	32.192.393.870,50	(1.924.507.930,50)	(5,98)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.151.563.466,00	307.236.650,00	30.615.000,00	9.428.185.116,00	8.745.536.488,00	682.648.628,00	7,81
37	Badan Kepegawaian Daerah	3.251.750.489,00	39.911.625,00	30.460.947,00	3.261.201.167,00	4.088.346.974,35	(827.145.807,35)	(20,23)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.231.722.510,00	165.877.520,00	395.997.374,00	6.001.602.656,00	8.863.836.251,00	(2.862.233.595,00)	(32,29)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.623.104.400,00	-	2.607.000,00	1.620.497.400,00	-	1.620.497.400,00	100,00
40	Badan Penghubung	2.213.707.073,00	15.099.000,00	4.092.600,00	2.224.713.473,00	2.430.479.015,00	(205.765.542,00)	(8,47)
41	Inspektorat	1.207.985.675,00	1.000.000,00	12.914.850,00	1.196.070.825,00	951.476.275,00	244.594.550,00	25,71
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.682.767.600,00	8.685.500,00	48.467.000,00	2.642.986.100,00	5.923.417.045,00	(3.280.430.945,00)	(55,38)
	Jumlah	**1.699.579.670.373,00**	**1.083.224.248.563,35**	**1.198.231.082.243,71**	**1.584.572.836.692,64**	**1.416.119.470.034,47**	**168.453.366.658,17**	**11,90**

Realisasi Beban Barang sebesar Rp1.584.572.836.692,64 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	708.560.237.105,00	
Belanja Daerah (BLUD)	991.019.433.268,00	
Total Belanja Daerah		**1.699.579.670.373,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	84.606.853.191,00	
Aset Ekstrakomtabel	16.658.068.192,00	
Hibah Barang berupa Persediaan	605.015.426.869,70	
Saldo Awal Persediaan	328.586.704.548,65	
Beban dari Usaha Mandiri	21.301.217.308,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	27.026.125.400,00	
Saldo Awal RFID	29.853.054,00	
Total Penambahan		**1.083.224.248.563,35**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	153.012.538.397,00	
Reklasifikasi ke beban hibah	754.569.137.301,85	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	1.854.809.320,00	
Beban Penyusutan Ektrakomtabel	70.554.392,18	
Saldo Akhir Persediaan	288.663.474.374,68	
Saldo Akhir RFID	60.568.458,00	
Total Pengurangan		**1.198.231.082.243,71**
Beban Daerah		**1.584.572.836.692,64**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa **Rp2.690.543.315.809,57**

Beban Jasa terealisasi sebesar Rp2.690.543.315.809,57, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.497.124.835.255,16 mengalami **kenaikan** sebesar Rp193.418.480.554,41 atau 7,75% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	491.268.312.955,00	42.896.226.097,85	290.823.527,91	533.873.715.524,94	555.975.824.446,88	(22.102.108.921,94)	(3,98)
2	Dinas Kesehatan	382.577.431.266,00	215.065.547,15	86.437.923,90	382.706.058.889,25	409.711.860.056,98	(27.005.801.167,73)	(6,59)
3	RSUD Dr. Moewardi	449.845.114.583,00	2.526.872.458,10	2.667.119.560,48	449.704.867.480,62	377.098.724.184,31	72.606.143.296,31	19,25
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	243.931.231.655,00	1.404.028.245,87	1.416.078.693,04	243.919.181.207,83	134.037.156.510,95	109.882.024.696,88	81,98
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	77.487.045.876,00	97.860.780,51	211.768.369,88	77.373.138.286,63	68.258.739.142,09	9.114.399.144,54	13,35
6	RSUD dr. Rehatta	29.166.709.540,00	27.775.715,00	11.260.700,00	29.183.224.555,00	25.140.912.164,03	4.042.312.390,97	16,08
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	28.631.024.184,00	165.198.933,00	147.739.412,00	28.648.483.705,00	20.369.217.312,00	8.279.266.393,00	40,65
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	25.664.940.145,00	71.640.542,49	58.479.448,99	25.678.101.238,50	22.247.255.302,93	3.430.845.935,57	15,42
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	28.086.162.355,00	82.918.384,10	14.533.516,76	28.154.547.222,34	14.448.290.206,97	13.706.257.015,37	94,86
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	27.162.877.229,00	2.895.944,10	44.329.246,58	27.121.443.926,52	26.919.285.507,57	202.158.418,95	0,75
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	46.407.166.433,00	208.204.392,43	1.040.937.110,63	45.574.433.714,80	47.237.151.495,43	(1.662.717.780,63)	(3,52)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	6.425.238.501,00	96.144.031,73	163.541.719,46	6.357.840.813,27	8.972.274.220,22	(2.614.433.406,95)	(29,14)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	3.179.222.580,00	81.077.376,26	73.099.350,42	3.187.200.605,84	3.408.136.266,29	(220.935.660,45)	(6,48)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.845.658.058,00	86.457.473,91	83.010.937,38	3.849.104.594,53	4.235.076.952,54	(385.972.358,01)	(9,11)
15	Dinas Sosial	35.176.468.856,00	35.702.765,55	44.204.270,44	35.167.967.351,11	29.003.981.373,50	6.163.985.977,61	21,25
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.556.836.323,00	54.687.709,90	70.804.094,75	16.540.719.938,15	16.516.990.519,47	23.729.418,68	0,14
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.735.718.039,00	28.483.133,59	69.361.059,29	3.694.840.113,30	3.816.719.362,34	(121.879.249,04)	(3,19)
18	Dinas Ketahanan Pangan	6.563.019.607,00	80.777.576,76	6.572.344,89	6.637.224.838,87	7.023.929.765,63	(386.704.926,76)	(5,51)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.026.497.639,00	219.366.815,23	194.431.540,32	14.051.432.913,91	18.228.278.585,14	(4.176.845.671,23)	(22,91)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	3.531.940.104,00	71.764.232,10	74.542.265,11	3.529.162.070,99	4.032.239.631,50	(503.077.560,51)	(12,48)
21	Dinas Perhubungan	125.267.349.359,00	213.868.231,60	213.150.426,23	125.268.067.164,37	117.551.918.947,51	7.716.148.216,86	6,56
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	30.890.919.200,00	-	-	30.890.919.200,00	54.054.646.397,00	(23.163.727.197,00)	(42,85)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.801.671.247,00	91.280.843,94	-	21.892.952.090,94	24.359.292.126,60	(2.466.340.035,66)	(10,12)
24	Dinas Penanaman	4.679.827.928,00	-	148.884.300,00	4.530.943.628,00	4.664.353.890,00	(133.410.262,00)	(2,86)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	104.573.513.603,00	308.122.203,43	347.860.277,56	104.533.775.528,87	34.056.701.750,01	70.477.073.778,86	206,94
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.619.541.120,00	10.693.501,62	15.326.924,03	3.614.907.697,59	3.615.840.763,38	(933.065,79)	(0,03)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.940.428.811,00	93.346.525,68	94.289.411,00	17.939.485.925,68	20.913.935.498,72	(2.974.449.573,04)	(14,22)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.176.248.154,00	37.079.561,45	17.361.978,08	12.195.965.737,37	13.894.090.581,34	(1.698.124.843,97)	(12,22)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	20.016.922.544,00	60.458.965,68	252.343.089,52	19.825.038.420,16	23.259.605.155,35	(3.434.566.735,19)	(14,77)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	12.226.768.596,00	115.429.476,32	128.147.590,10	12.214.050.482,22	13.488.341.506,52	(1.274.291.024,30)	(9,45)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.160.314.506,00	134.769.255,22	132.061.600,13	25.163.022.161,09	23.076.626.144,14	2.086.396.016,95	9,04
32	Sekretariat Daerah	41.548.352.528,00	252.512.653,34	347.986.709,76	41.452.878.471,58	47.800.131.670,41	(6.347.253.198,83)	(13,28)
33	Sekretariat DPRD	126.690.148.366,00	448.041.775,98	440.432.084,41	126.697.758.057,57	130.953.149.476,55	(4.255.391.418,98)	(3,25)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.849.367.399,00	-	-	9.849.367.399,00	11.943.637.793,00	(2.094.270.394,00)	(17,53)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	100.606.527.808,00	662.538.034,53	608.153.074,74	100.660.912.767,79	102.223.576.945,81	(1.562.664.178,02)	(1,53)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	19.820.568.790,00	143.992.524,40	180.792.204,10	19.783.769.110,30	19.353.213.091,60	430.556.018,70	2,22
37	Badan Kepegawaian Daerah	8.604.043.861,00	-	-	8.604.043.861,00	7.585.345.944,00	1.018.697.917,00	13,43
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	16.793.471.444,00	10.860.009,02	12.589.671,70	16.791.741.781,32	21.526.604.102,54	(4.734.862.321,22)	(22,00)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	4.028.277.025,00	-	-	4.028.277.025,00	-	4.028.277.025,00	100,00
40	Badan Penghubung	7.758.656.644,00	135.438.360,88	161.463.038,20	7.732.631.966,68	8.383.924.088,57	(651.292.121,89)	(7,77)
41	Inspektorat	3.256.463.220,00	121.155.032,04	132.044.997,54	3.245.573.254,50	3.202.530.173,56	43.043.080,94	1,34
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.734.114.397,00	18.424.811,72	77.994.121,58	8.674.545.087,14	14.535.326.201,78	(5.860.781.114,64)	(40,32)
	Jumlah	**2.649.312.112.478,00**	**51.311.159.922,48**	**10.079.956.590,91**	**2.690.543.315.809,57**	**2.497.124.835.255,16**	**193.418.480.554,41**	**7,75**

Realisasi Beban Jasa sebesar Rp2.690.543.315.809,57 dapat dirinci dengan perhitungan sebagai berikut:

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	1.768.827.289.459,00	
Belanja Daerah (BLUD)	880.484.823.019,00	
Total Belanja Daerah		**2.649.312.112.478,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	2.835.020.169,00	
Saldo Awal Beban Dibayar Dimuka	5.799.321.938,48	
Beban dari Usaha Mandiri	3.805.938.808,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	38.870.879.007,00	
Total Penambahan		**51.311.159.922,48**
Pengurangan		

Saldo Awal Utang	2.988.214.528,00	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	206.477.100,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	1.798.771.410,00	
Saldo Akhir Beban Dibayar Dimuka	5.086.493.552,91	
Total Pengurangan		**10.079.956.590,91**
Beban Daerah		**2.690.543.315.809,57**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan Rp333.417.424.060,00

Beban Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp333.417.424.060,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp408.863.513.214,30 mengalami **penurunan** sebesar (Rp75.446.089.154,30) atau (18,45%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	122.285.285.950,00	1.954.158.504,00	56.039.566.536,00	68.199.877.918,00	54.139.382.237,00	14.060.495.681,00	25,97
2	Dinas Kesehatan	3.304.911.398,00	-	-	3.304.911.398,00	9.529.033.391,00	(6.224.121.993,00)	(65,32)
3	RSUD Dr. Moewardi	32.959.002.717,00	-	-	32.959.002.717,00	35.225.994.701,00	(2.266.991.984,00)	(6,44)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	28.595.769.862,00	4.377.316.872,00	937.899.745,00	32.035.186.989,00	21.373.425.543,00	10.661.761.446,00	49,88
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	7.672.437.827,00	-	739.700.000,00	6.932.737.827,00	10.878.775.694,00	(3.946.037.867,00)	(36,27)
6	RSUD dr. Rehatta	3.197.579.840,00	7.725.000,00	33.200.000,00	3.172.104.840,00	3.049.692.117,00	122.412.723,00	4,01
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.271.488.870,00	-	336.807.750,00	1.934.681.120,00	2.976.859.143,00	(1.042.178.023,00)	(35,01)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	1.802.738.044,00	-	3.574.250,00	1.799.163.794,00	1.874.142.888,00	(74.979.094,00)	(4,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.644.671.479,00	-	38.500.000,00	1.606.171.479,00	1.025.648.334,00	580.523.145,00	56,60
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	85.926.602.414,00	-	-	85.926.602.414,00	152.921.109.271,00	(66.994.506.857,00)	(43,81)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	25.819.812.716,00	-	1.711.338.300,00	24.108.474.416,00	19.959.508.468,00	4.148.965.948,00	20,79
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	686.716.971,00	-	-	686.716.971,00	664.250.000,00	22.466.971,00	3,38
13	Satuan Polisi Pamong Praja	460.360.971,00	-	-	460.360.971,00	1.803.072.843,00	(1.342.711.872,00)	(74,47)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	745.202.077,00	-	146.742.774,00	598.459.303,00	561.516.031,00	36.943.272,00	6,58
15	Dinas Sosial	6.783.155.054,00	-	3.197.272.516,00	3.585.882.538,00	3.496.950.251,56	88.932.286,44	2,54
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.436.001.814,00	-	922.989.517,00	1.513.012.297,00	2.627.867.843,00	(1.114.855.546,00)	(42,42)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	419.801.062,00	-	-	419.801.062,00	434.890.441,00	(15.089.379,00)	(3,47)
18	Dinas Ketahanan Pangan	679.763.280,00	-	91.021.000,00	588.742.280,00	918.972.310,00	(330.230.030,00)	(35,93)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.271.311.635,00	-	421.452.297,00	2.849.859.338,00	6.731.525.331,00	(3.881.665.993,00)	(57,66)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	519.369.128,00	-	29.298.450,00	490.070.678,00	461.449.719,00	28.620.959,00	6,20
21	Dinas Perhubungan	3.696.760.340,00	-	-	3.696.760.340,00	6.766.661.446,74	(3.069.901.106,74)	(45,37)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.142.275.413,00	-	-	2.142.275.413,00	3.189.429.946,00	(1.047.154.533,00)	(32,83)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.462.108.518,00	-	-	1.462.108.518,00	2.954.434.190,00	(1.492.325.672,00)	(50,51)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	528.509.281,00	-	-	528.509.281,00	244.891.855,00	283.617.426,00	115,81
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.802.985.746,00	-	-	1.802.985.746,00	2.151.487.687,00	(348.501.941,00)	(16,20)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	692.599.339,00	-	-	692.599.339,00	607.710.150,00	84.889.189,00	13,97
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.210.803.279,00	-	-	2.210.803.279,00	1.886.506.264,00	324.297.015,00	17,19
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	2.824.797.390,00	-	18.000.000,00	2.806.797.390,00	4.765.625.145,00	(1.958.827.755,00)	(41,10)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.355.130.582,00	-	2.226.312.400,00	1.128.818.182,00	1.655.785.345,00	(526.967.163,00)	(31,83)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.954.882.624,00	-	-	1.954.882.624,00	2.870.155.157,00	(915.272.533,00)	(31,89)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.880.592.052,00	-	207.143.719,00	3.673.448.333,00	4.572.786.496,00	(899.338.163,00)	(19,67)
32	Sekretariat Daerah	8.592.928.731,00	-	-	8.592.928.731,00	10.301.159.979,00	(1.708.231.248,00)	(16,58)
33	Sekretariat DPRD	5.888.340.366,00	-	-	5.888.340.366,00	7.241.744.717,00	(1.353.404.351,00)	(18,69)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.742.666.455,00	-	-	2.742.666.455,00	2.819.376.769,00	(76.710.314,00)	(2,72)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	10.444.143.894,00	-	-	10.444.143.894,00	14.663.368.292,00	(4.219.224.398,00)	(28,77)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.221.718.101,00	-	-	4.221.718.101,00	4.009.969.416,00	211.748.685,00	5,28
37	Badan Kepegawaian Daerah	760.860.393,00	-	-	760.860.393,00	1.168.492.270,00	(407.631.877,00)	(34,89)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	2.254.965.644,00	-	26.057.250,00	2.228.908.394,00	3.814.125.683,00	(1.585.217.289,00)	(41,56)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	1.020.164.301,00	-	319.143.300,00	701.021.001,00	-	701.021.001,00	100,00
40	Badan Penghubung	1.284.011.306,00	-	666.182.260,00	617.829.046,00	1.115.296.110,00	(497.467.064,00)	(44,60)
41	Inspektorat	1.368.859.356,00	-	-	1.368.859.356,00	802.181.329,00	566.678.027,00	70,64
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	774.949.305,00	-	196.609.777,00	578.339.528,00	608.258.411,00	(29.918.883,00)	(4,92)
	Jumlah	**395.387.035.525,00**	**6.339.200.376,00**	**68.308.811.841,00**	**333.417.424.060,00**	**408.863.513.214,30**	**(75.446.089.154,30)**	**(18,45)**

Realisasi Beban Pemeliharaan sebesar Rp333.417.424.060,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	317.243.346.886,00	
Belanja Daerah (BLUD)	78.143.688.639,00	
Total Belanja Daerah		**395.387.035.525,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	4.379.941.872,00	
Koreksi Kurang Utang Tahun sebelumnya	5.100.000,00	
Beban dari Usaha Mandiri	961.114.530,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	993.043.974,00	

Total Penambahan		**6.339.200.376,00**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	974.673.995,00	
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	67.154.169.646,00	
Beban yang Menambah Kapitalisasi ATB	179.968.200,00	
Total Pengurangan		**68.308.811.841,00**
Beban Daerah		**333.417.424.060,00**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas Rp485.503.261.912,00

Beban Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp485.503.261.912,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp527.537.654.425,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp42.034.392.513,00) atau (7,97%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.946.101.790,00	7.784.383.062,00	-	48.730.484.852,00	54.076.105.055,00	(5.345.620.203,00)	(9,89)
2	Dinas Kesehatan	8.326.322.524,00	-	-	8.326.322.524,00	20.334.925.983,00	(12.008.603.459,00)	(59,05)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.063.166.835,00	-	-	1.063.166.835,00	1.028.846.249,00	34.320.586,00	3,34
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.281.241.831,00	-	-	1.281.241.831,00	1.513.620.241,00	(232.378.410,00)	(15,35)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	701.975.852,00	-	-	701.975.852,00	663.870.422,00	38.105.430,00	5,74
6	RSUD dr. Rehatta	494.929.665,00	-	-	494.929.665,00	543.362.283,00	(48.432.618,00)	(8,91)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	897.724.277,00	-	-	897.724.277,00	746.634.581,00	151.089.696,00	20,24
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	1.571.151.560,00	9.900.000,00	10.700.110,00	1.570.351.450,00	1.093.182.060,00	477.169.390,00	43,65
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.016.473.469,00	-	-	1.016.473.469,00	991.580.734,00	24.892.735,00	2,51
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	9.526.321.743,00	-	-	9.526.321.743,00	10.685.241.861,00	(1.158.920.118,00)	(10,85)
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	12.965.438.861,00	-	-	12.965.438.861,00	15.357.674.758,00	(2.392.235.897,00)	(15,58)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5.721.158.906,00	-	-	5.721.158.906,00	7.701.697.941,00	(1.980.539.035,00)	(25,72)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	4.980.189.887,00	-	-	4.980.189.887,00	4.855.506.573,00	124.683.314,00	2,57
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.599.740.753,00	-	-	2.599.740.753,00	2.975.017.621,00	(375.276.868,00)	(12,61)
15	Dinas Sosial	8.460.112.106,00	-	-	8.460.112.106,00	7.002.593.360,00	1.457.518.746,00	20,81
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.654.204.935,00	-	-	11.654.204.935,00	11.169.903.792,00	484.301.143,00	4,34
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.216.481.450,00	-	-	3.216.481.450,00	4.762.082.686,00	(1.545.601.236,00)	(32,46)
18	Dinas Ketahanan Pangan	3.580.940.344,00	-	-	3.580.940.344,00	3.671.296.133,00	(90.355.789,00)	(2,46)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	12.912.015.338,00	-	-	12.912.015.338,00	17.577.185.982,00	(4.665.170.644,00)	(26,54)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	4.064.293.843,00	-	-	4.064.293.843,00	4.864.845.170,00	(800.551.327,00)	(16,46)
21	Dinas Perhubungan	4.817.944.951,00	-	-	4.817.944.951,00	6.910.626.070,00	(2.092.681.119,00)	(30,28)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.909.721.726,00	-	-	7.909.721.726,00	11.705.469.533,00	(3.795.747.807,00)	(32,43)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	15.900.181.734,00	-	-	15.900.181.734,00	19.790.395.881,00	(3.890.214.147,00)	(19,66)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.987.809.976,00	-	-	2.987.809.976,00	2.001.368.755,00	986.441.221,00	49,29
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.310.683.289,00	-	-	15.310.683.289,00	16.719.055.574,00	(1.408.372.285,00)	(8,42)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.605.303.982,00	-	-	1.605.303.982,00	1.155.019.770,00	450.284.212,00	38,98
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.761.806.971,00	-	-	5.761.806.971,00	6.455.186.371,00	(693.379.400,00)	(10,74)
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	4.557.003.550,00	-	-	4.557.003.550,00	7.170.676.535,00	(2.613.672.985,00)	(36,45)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	12.044.533.214,00	-	-	12.044.533.214,00	19.948.787.535,00	(7.904.254.321,00)	(39,62)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.783.901.958,00	-	-	10.783.901.958,00	12.626.370.516,00	(1.842.468.558,00)	(14,59)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.341.115.119,00	-	-	11.341.115.119,00	11.769.245.440,00	(428.130.321,00)	(3,64)
32	Sekretariat Daerah	27.362.320.081,00	-	-	27.362.320.081,00	29.325.433.762,00	(1.963.113.681,00)	(6,69)
33	Sekretariat DPRD	150.159.698.001,00	-	-	150.159.698.001,00	126.720.989.001,00	23.438.709.000,00	18,50
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.301.998.866,00	-	-	7.301.998.866,00	10.257.215.500,00	(2.955.216.634,00)	(28,81)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.341.235.204,00	-	-	15.341.235.204,00	22.281.419.105,00	(6.940.183.901,00)	(31,15)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.623.116.533,00	-	-	10.623.116.533,00	10.342.631.542,00	280.484.991,00	2,71
37	Badan Kepegawaian Daerah	6.443.730.260,00	-	-	6.443.730.260,00	8.639.736.511,00	(2.196.006.251,00)	(25,42)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.819.367.289,00	-	-	10.819.367.289,00	8.356.786.783,00	2.462.580.506,00	29,47
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	3.024.917.894,00	-	-	3.024.917.894,00	-	3.024.917.894,00	100,00
40	Badan Penghubung	1.093.819.856,00	-	-	1.093.819.856,00	1.405.088.573,00	(311.268.717,00)	(22,15)
41	Inspektorat	9.012.629.108,00	-	-	9.012.629.108,00	9.328.357.774,00	(315.728.666,00)	(3,38)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.536.853.429,00	-	-	7.536.853.429,00	13.012.620.409,00	(5.475.766.980,00)	(42,08)
	Jumlah	**477.719.678.960,00**	**7.794.283.062,00**	**10.700.110,00**	**485.503.261.912,00**	**527.537.654.425,00**	**(42.034.392.513,00)**	**(7,97)**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp485.503.261.912,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	470.946.243.471,00	
Belanja Daerah (BLUD)	6.773.435.489,00	
Total Belanja Daerah		**477.719.678.960,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	9.900.000,00	
Beban dari Usaha Mandiri	272.028.352,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	7.512.354.710,00	
Total Penambahan		**7.794.283.062,00**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	10.700.110,00	
Total Pengurangan		**10.700.110,00**
Beban Daerah		**485.503.261.912,00**

5.4.2.1.2.5 Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga Rp188.795.949.543,00

Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga terealisasi sebesar Rp188.795.949.543,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp151.000.929.108,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.795.020.435,00 atau 25,03% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	6.940.270.000,00	1.179.115.851,00		8.119.385.851,00	7.801.422.346,00	317.963.505,00	4,08
2	Dinas Kesehatan	275.700.000,00	-	-	275.700.000,00	381.230.000,00	(105.530.000,00)	(27,68)
3	RSUD Dr. Moewardi	38.000.000,00	-	-	38.000.000,00	-	38.000.000,00	100,00
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	-	-	-	9.550.000,00	(9.550.000,00)	(100,00)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-
6	RSUD dr. Arif Zainuddin	8.015.400,00	-	-	8.015.400,00	-	8.015.400,00	100,00
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	39.910.000,00	-	-	39.910.000,00	-	39.910.000,00	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	208.300.000,00	-	-	208.300.000,00	233.700.000,00	(25.400.000,00)	(10,87)
10	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	227.500.000,00	(209.500.000,00)	(92,09)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	28.000.000,00	-	-	28.000.000,00	36.480.000,00	(8.480.000,00)	(23,25)
12	Dinas Sosial	170.219.570.000,00	-	-	170.219.570.000,00	120.534.200.650,00	49.685.369.350,00	41,22
13	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.280.000,00	-	-	93.280.000,00	178.500.000,00	(85.220.000,00)	(47,74)
14	Dinas Ketahanan Pangan	130.125.000,00	-	-	130.125.000,00	1.462.275.000,00	(1.332.150.000,00)	(91,10)
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	756.174.292,00	-	-	756.174.292,00	558.252.360,00	197.921.932,00	35,45
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	280.300.000,00	-	-	280.300.000,00	196.850.000,00	83.450.000,00	42,39
17	Dinas Perhubungan	18.000.000,00	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	212.000.000,00	-	-	212.000.000,00	589.000.000,00	(377.000.000,00)	(64,01)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	55.440.000,00	-	-	55.440.000,00	-	55.440.000,00	100,00
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.508.550.000,00	-	-	6.508.550.000,00	16.628.695.000,00	(10.120.145.000,00)	(60,86)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	59.850.000,00	-	-	59.850.000,00	60.000.000,00	(150.000,00)	(0,25)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.500.000,00	-	-	13.500.000,00	3.750.000,00	9.750.000,00	260,00

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	531.400.000,00	-	-	531.400.000,00	262.150.000,00	269.250.000,00	102,71
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan	714.999.000,00	-	-	714.999.000,00	630.063.760,00	84.935.240,00	13,48
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00	-	10.000.000,00	100,00
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	215.200.000,00	-	-	215.200.000,00	500.259.992,00	(285.059.992,00)	(56,98)
27	Sekretariat Daerah	50.050.000,00	-	-	50.050.000,00	29.825.000,00	20.225.000,00	67,81
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	-	-	515.225.000,00	(515.225.000,00)	(100,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.500.000,00	-	-	4.500.000,00	-	4.500.000,00	100,00
30	Badan Riset dan Inovasi Daerah	136.700.000,00	-	-	136.700.000,00	-	136.700.000,00	100,00
31	Badan Penghubung	30.000.000,00	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-
32	Inspektorat	-	-	-	-	22.500.000,00	(22.500.000,00)	(100,00)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	70.500.000,00	(70.500.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**187.616.833.692,00**	**1.179.115.851,00**	**-**	**188.795.949.543,00**	**151.000.929.108,00**	**37.795.020.435,00**	**25,03**

Realisasi Beban Barang dan/atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga sebesar Rp188.795.949.543,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	187.616.833.692,00	
Total Belanja Daerah		**187.616.833.692,00**
Penambahan		
Beban dari Usaha Mandiri	838.985.851,00	
Beban dari Bantuan Pemerintah	340.130.000,00	
Total Penambahan		**1.179.115.851,00**
Beban Daerah		**188.795.949.543,00**

5.4.2.1.2.6 Beban Barang dan Jasa BOS **Rp817.060.806.181,03**

Beban Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp817.060.806.181,03, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp779.801.949.085,12 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.258.857.095,91 atau 4,78% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	824.613.027.478,00	21.604.506.429,38	29.156.727.726,35	817.060.806.181,03	779.801.949.085,12	37.258.857.095,91	4,78
	Jumlah	**824.613.027.478,00**	**21.604.506.429,38**	**29.156.727.726,35**	**817.060.806.181,03**	**779.801.949.085,12**	**37.258.857.095,91**	**4,78**

Realisasi Beban Barang dan Jasa BOS sebesar Rp817.060.806.181,03 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah

Belanja Daerah (APBD)	824.613.027.478,00

Total Belanja Daerah		**824.613.027.478,00**
Penambahan		
Saldo Awal Persediaan	21.604.506.429,38	
Total Penambahan		**21.604.506.429,38**
Pengurangan		
Beban yang menambah Kapitalisasi Aset Tetap	1.936.693.713,00	
Saldo Akhir Persediaan	27.220.034.013,35	
Total Pengurangan		**29.156.727.726,35**
Beban Daerah		**817.060.806.181,03**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi Rp1.399.999.100,00

Beban Subsidi terealisasi sebesar Rp1.399.999.100,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.350.753.069,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.950.753.969,00) atau (73,84%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-	1.472.800.000,00	(1.472.800.000,00)	(100,00)
2	Beban Subsidi kepada BUMD	1.399.999.100,00	-	-	1.399.999.100,00	3.661.986.750,00	(2.261.987.650,00)	(61,77)
3	Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Subsidi kepada Koperasi	-	-	-	-	215.966.319,00	(215.966.319,00)	(100,00)
	Jumlah	**1.399.999.100,00**	**-**	**-**	**1.399.999.100,00**	**5.350.753.069,00**	**(3.950.753.969,00)**	**(73,84)**

5.4.2.1.3.1 Beban Subsidi kepada BUMN Rp0,00

Beban Subsidi kepada BUMN terealisasi sebesar, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.472.800.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.472.800.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Ketahanan Pangan	-	-	-	-	1.472.800.000,00	(1.472.800.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.472.800.000,00**	**(1.472.800.000,00)**	**(100,00)**

5.4.2.1.3.2 Beban Subsidi kepada BUMD Rp1.399.999.100,00

Beban Subsidi kepada BUMD terealisasi sebesar Rp1.399.999.100,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.661.986.750,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.261.987.650,00) atau (61,77%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Ketahanan Pangan	1.399.999.100,00	-	-	1.399.999.100,00	3.661.986.750,00	(2.261.987.650,00)	(61,77)
	Jumlah	**1.399.999.100,00**	**-**	**-**	**1.399.999.100,00**	**3.661.986.750,00**	**(2.261.987.650,00)**	**(61,77)**

5.4.2.1.3.3 Beban Subsidi kepada Koperasi Rp0,00

Beban Subsidi kepada Koperasi terealisasi sebesar Rp0,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp215.966.319,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp215.966.319,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Koperasi dan UKM	-	-	-	-	215.966.319,00	(215.966.319,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**-**	**-**	**-**	**215.966.319,00**	**(215.966.319,00)**	**(100,00)**

5.4.2.1.4 Beban Hibah Rp4.664.175.033.195,08

Beban Hibah terealisasi sebesar Rp4.664.175.033.195,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.450.607.655.549,72 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.213.567.377.645,36 atau 35,17% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.017.439.472.000,00	1.119.857.663.019,00	1.448.096.362,33	2.135.849.038.656,67	724.935.214.500,00	1.410.913.824.156,67	194,63
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	695.124.574.652,75	2.828.077.584,45	692.296.497.068,30	821.173.038.859,72	(128.876.541.791,42)	(15,69)
3	Beban Hibah kepada BUMN	-	-	-	-	-	-	-
4	Beban Hibah kepada BUMD	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	690.622.077.108,00	73.544.450.116,11	218.903.700,00	763.947.623.524,11	860.477.866.276,00	(96.530.242.751,89)	(11,22)
6	Beban Hibah Dana BOS	1.036.753.274.946,00	-	-	1.036.753.274.946,00	1.010.071.727.914,00	26.681.547.032,00	2,64
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	35.328.599.000,00	-	-	35.328.599.000,00	33.949.808.000,00	1.378.791.000,00	4,06
	Jumlah	**2.780.143.423.054,00**	**1.888.526.687.787,86**	**4.495.077.646,78**	**4.664.175.033.195,08**	**3.450.607.655.549,72**	**1.213.567.377.645,36**	**35,17**

Realisasi Beban Hibah sebesar Rp4.664.175.033.195,08, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	2.780.143.423.054,00	
Total Belanja Daerah		**2.780.143.423.054,00**
Penambahan		
Reklasifikasi dari Beban Persediaan	754.569.137.301,86	
Beban dari Belanja Modal bukan kategori Aset Tetap	1.800.000.000,00	
Hibah Barang Berupa Aset	1.132.157.550.486,00	
Total Penambahan		**1.888.526.687.787,86**
Pengurangan		
Penyusutan Aset Tetap yang Dihibahkan	4.495.077.646,78	
Total Pengurangan		**4.495.077.646,78**
Beban Daerah		**4.664.175.033.195,08**

5.4.2.1.4.1 Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat Rp2.135.849.038.656,67

Beban Hibah Kepada Pemerintah Pusat terealisasi sebesar Rp2.135.849.038.656,67, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp724.935.214.500,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.410.847.494.156,67 atau 194,62% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	66.330.000,00	-	66.330.000,00	-	66.330.000,00	100,00
2	RSUD Dr. Moewardi	-	1.109.131.801,00	601.131.801,00	508.000.000,00	-	508.000.000,00	100,00
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	1.074.086.716.234,00	142.515.717,00	1.073.944.200.517,00	-	1.073.944.200.517,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	34.012.672.091,00	238.635.511,00	33.774.036.580,00	-	33.774.036.580,00	100,00
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	708.739.472.000,00	-	-	708.739.472.000,00	416.389.000.000,00	292.350.472.000,00	70,21
6	Dinas Komunikasi dan Informartika	4.250.000.000,00	-	-	4.250.000.000,00	4.000.000.000,00	250.000.000,00	6,25
7	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	10.062.812.893,00	32.480.000,00	10.030.332.893,00	-	10.030.332.893,00	100,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	76.064.500,00	(76.064.500,00)	(100,00)
9	Sekretariat Daerah	304.450.000.000,00	520.000.000,00	433.333.333,33	304.536.666.666,67	304.470.150.000,00	66.516.666,67	0,02
	Jumlah	**1.017.439.472.000,00**	**1.119.857.663.019,00**	**1.448.096.362,33**	**2.135.849.038.656,67**	**724.935.214.500,00**	**1.410.847.494.156,67**	**194,62**

5.4.2.1.4.2 Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya Rp692.296.497.068,30

Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya terealisasi sebesar Rp692.296.497.068,30, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp821.173.038.859,72 mengalami **penurunan** sebesar (Rp128.876.541.791,42) atau (15,69%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	-	681.442.044.989,75	-	681.442.044.989,75	564.604.419.455,39	116.837.625.534,36	20,69
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	96.600.000,00	-	96.600.000,00	195.504.985.555,00	(195.408.385.555,00)	(99,95)
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	1.438.701.696,00	-	1.438.701.696,00	3.728.963.854,00	(2.290.262.158,00)	(61,42)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	786.655.000,00	499.853.697,92	286.801.302,08	-	286.801.302,08	100,00
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	-	-	-	12.065.466.818,26	(12.065.466.818,26)	(100,00)
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	6.399.521.489,00	322.415.540,20	6.077.105.948,80	732.150.500,00	5.344.955.448,80	730,04
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	35.679.931.858,06	(35.679.931.858,06)	(100,00)
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	17.700.000,00	17.700.000,00	-	-	-	-
10	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	135.416.666,67	(135.416.666,67)	(100,00)
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	4.943.351.478,00	1.988.108.346,33	2.955.243.131,67	8.715.704.152,34	(5.760.461.020,67)	(66,09)

	LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
Jumlah	**-**	**695.124.574.652,75**	**2.828.077.584,45**	**692.296.497.068,30**	**821.173.038.859,72**	**(128.876.541.791,42)**	**(15,69)**

5.4.2.1.4.3 Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia Rp763.947.623.524,11

Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia terealisasi sebesar Rp763.947.623.524,11, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp860.477.866.276,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp96.530.242.751,89) atau (11,22%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	282.600.286.698,00	1.800.000.000,00	-	284.400.286.698,00	354.701.088.661,00	(70.300.801.963,00)	(19,82)
2	Dinas Kesehatan	300.000.000,00	-	-	300.000.000,00	1.400.000.000,00	(1.100.000.000,00)	(78,57)
3	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	218.989.500,00	218.903.700,00	85.800,00	-	85.800,00	100,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	-	26.513.775.885,00	-	26.513.775.885,00	9.536.248.000,00	16.977.527.885,00	178,03
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.449.833.634,00	-	-	1.449.833.634,00	1.065.802.140,00	384.031.494,00	36,03
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.817.555.000,00	-	-	84.817.555.000,00	116.100.000.000,00	(31.282.445.000,00)	(26,94)
7	Dinas Sosial	840.000.000,00	461.928.000,00	-	1.301.928.000,00	1.212.500.000,00	89.428.000,00	7,38
8	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	335.017.750,00	-	335.017.750,00	220.740.266,00	114.277.484,00	51,77
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	14.000.000,00	(14.000.000,00)	(100,00)
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.862.655.950,00	10.167.264.606,00	-	25.029.920.556,00	21.451.961.571,00	3.577.958.985,00	16,68
11	Dinas Ketahanan Pangan	-	7.503.806.375,00	-	7.503.806.375,00	23.293.855.750,00	(15.790.049.375,00)	(67,79)
12	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	138.633.255.000,00	20.000.000,00	-	138.653.255.000,00	110.325.000.000,00	28.328.255.000,00	25,68
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00	-	8.511.000.000,00	100,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	3.919.125.922,00	-	-	3.919.125.922,00	5.823.274.936,00	(1.904.149.014,00)	(32,70)
15	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	48.268.167.500,00	-	-	48.268.167.500,00	33.386.143.014,00	14.882.024.486,00	44,58
16	Dinas Pertanian dan Perkebunan	11.356.542.906,00	18.012.668.000,11	-	29.369.210.906,11	48.142.960.107,00	(18.773.749.200,89)	(39,00)
17	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.606.154.498,00	-	-	8.606.154.498,00	11.785.797.081,00	(3.179.642.583,00)	(26,98)
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	865.000.000,00	-	-	865.000.000,00	4.161.229.750,00	(3.296.229.750,00)	(79,21)
19	Sekretariat Daerah	94.103.500.000,00	-	-	94.103.500.000,00	117.757.265.000,00	(23.653.765.000,00)	(20,09)
20	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	100.000.000,00	(100.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**690.622.077.108,00**	**73.544.450.116,11**	**218.903.700,00**	**763.947.623.524,11**	**860.477.866.276,00**	**(96.530.242.751,89)**	**(11,22)**

5.4.2.1.4.4 Beban Hibah Dana BOS Rp1.036.753.274.946,00

Beban Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp1.036.753.274.946,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.010.071.727.914,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.681.547.032,00 atau 2,64% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.036.753.274.946,00	-	-	1.036.753.274.946,00	1.010.071.727.914,00	26.681.547.032,00	2,64
	Jumlah	**1.036.753.274.946,00**	**-**	**-**	**1.036.753.274.946,00**	**1.010.071.727.914,00**	**26.681.547.032,00**	**2,64**

5.4.2.1.4.5 Beban Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Rp35.328.599.000,00

Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp35.328.599.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp33.949.808.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.378.791.000,00 atau 4,06% rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	35.328.599.000,00	-	-	35.328.599.000,00	33.949.808.000,00	1.378.791.000,00	4,06
	Jumlah	**35.328.599.000,00**	**-**	**-**	**35.328.599.000,00**	**33.949.808.000,00**	**1.378.791.000,00**	**4,06**

5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial Rp45.008.996.459,00

Beban Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp45.008.996.459,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp118.686.467.885,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp73.677.471.426,00) atau (62,08%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu	44.433.400.750,00	-	-	44.433.400.750,00	116.686.467.885,00	(72.253.067.135,00)	(61,92)
2	Beban Bantuan Sosial kepada Keluarga	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	575.595.709,00	-	-	575.595.709,00	2.000.000.000,00	(1.424.404.291,00)	(71,22)
4	Beban Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**45.008.996.459,00**	**-**	**-**	**45.008.996.459,00**	**118.686.467.885,00**	**(73.677.471.426,00)**	**(62,08)**

5.4.2.1.5.1 Beban Bantuan Sosial kepada Individu Rp44.433.400.750,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Individu terealisasi sebesar Rp44.433.400.750,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp116.686.467.885,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp72.253.067.135,00) atau (61,92%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.430.000.000,00	-	-	14.430.000.000,00	14.950.000.000,00	(520.000.000,00)	(3,48)
2	Dinas Perumahan Rakyat dan	28.750.000.000,00	-	-	28.750.000.000,00	42.606.000.000,00	(13.856.000.000,00)	(32,52)

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
	Kawasan Permukiman							
3	Dinas Sosial	-	-	-	-	45.423.420.000,00	(45.423.420.000,00)	(100,00)
4	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.253.400.750,00	-	-	1.253.400.750,00	2.644.445.500,00	(1.391.044.750,00)	(52,60)
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	11.062.602.385,00	(11.062.602.385,00)	(100,00)
	Jumlah	**44.433.400.750,00**	**-**	**-**	**44.433.400.750,00**	**116.686.467.885,00**	**(72.253.067.135,00)**	**(61,92)**

5.4.2.1.5.2 Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Rp575.595.709,00

Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp575.595.709,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.000.000.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.424.404.291,00) atau (71,22%) dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Sosial	-	-	-	-	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(100,00)
2	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	575.595.709,00	-	-	575.595.709,00	-	575.595.709,00	100,00
	Jumlah	**575.595.709,00**	**-**	**-**	**575.595.709,00**	**2.000.000.000,00**	**(1.424.404.291,00)**	**(71,22)**

5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang Rp141.638.386.323,25

Beban Penyisihan Piutang terealisasi sebesar Rp141.638.386.323,25, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp115.015.769.479,24 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.622.616.844,00 atau 38,46% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	140.862.452.549,11	114.832.509.031,09	26.029.943.518,02	22,67
2	Beban Penyishan Piutang Retribusi Daerah	723.371.786,31	10.033,75	723.361.752,56	7.209.286,18
3	Beban Penyisihan Piutang hasil Pengelolaan Kekyaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
4	Beban Penyishan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	52.561.987,83	183.250.414,40	(130.688.426,57)	(71,32)
5	Beban Penyishan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-	-	-
6	Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	-	-	-	-
7	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-	-
	Jumlah	**141.638.386.323,25**	**115.015.769.479,24**	**26.622.616.844,01**	**38,46**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp141.638.386.323,25, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Berkenaan	535.665.818.328,03	
Koreksi Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	13.120.445,17	
Penghapusan Piutang Tidak Tertagih dan Kadaluarsa	96.637.158.000,00	
Total Penambahan		**632.316.096.773,20**
Pengurangan		
Saldo Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	490.030.226.683,68	
Koreksi Tambah Atas Pencatatan Piutang Tahun Sebelumnya	647.483.766,28	
Total Pengurangan		**490.677.710.449,95**
Beban Daerah		**141.638.386.323,25**

5.4.2.1.6.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah Rp140.862.452.549,11

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp140.862.452.549,11, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp114.832.509.031,09 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.029.943.518,02 atau 22,67% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	140.862.430.437,50	114.831.072.727,50	26.031.357.710,00	22,67
2	Beban Penyisihan Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	-	-
3	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	-	-	-	-
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Permukaan	22.111,61	1.436.303,59	(1.414.191,98)	(98,46)
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Rokok	-	-	-	-
	Jumlah	**140.862.452.549,11**	**114.832.509.031,09**	**26.029.943.518,02**	**22,67**

5.4.2.1.6.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah Rp723.371.786,31

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah terealisasi sebesar Rp723.371.786,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.033,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp723.361.752,56 atau 7.209.286,18% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	722.260.781,66	-	722.260.781,66	100,00
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	1.111.004,65	10.033,75	1.100.970,90	10.972,68
3	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
	Jumlah	**723.371.786,31**	**10.033,75**	**723.361.752,56**	**7.209.286,18**

5.4.2.1.6.2.1 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum Rp722.260.781,66

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum terealisasi sebesar Rp722.260.781,66, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp722.260.781,66 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Kesehatan	86.667,96		86.667,96	100,00
2	RSUD Dr. Moewardi	12.985.942,63	-	12.985.942,63	100,00
3	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	237.945.731,40	-	237.945.731,40	100,00
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	371.285.946,67	-	371.285.946,67	100,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	97.317.569,00	-	97.317.569,00	100,00
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	2.638.924,00	-	2.638.924,00	100,00
	Jumlah	**722.260.781,66**	**-**	**722.260.781,66**	**100,00**

5.4.2.1.6.2.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha Rp1.111.004,65

Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha terealisasi sebesar Rp1.111.004,65, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.033,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp135.670,90 atau 1.352,15% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Perindutrian dan Perdagangan	965.300,00	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	145.704,65	10.033,75	135.670,90	1.352,15
	Jumlah	**1.111.004,65**	**10.033,75**	**135.670,90**	**1.352,15**

5.4.2.1.6.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp52.561.987,83

Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terealisasi sebesar Rp52.561.987,83, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp183.250.414,40 mengalami **penurunan** sebesar (Rp130.688.426,57) atau (71,32%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	52.561.987,83	183.250.414,40	(130.688.426,57)	(71,32)
	Jumlah	**52.561.987,83**	**183.250.414,40**	**(130.688.426,57)**	**(71,32)**

5.4.2.1.6.3.1 Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD Rp52.561.987,83

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD terealisasi sebesar Rp52.561.987,83, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp183.250.414,40 mengalami **penurunan** sebesar (Rp130.688.426,57) atau (71,32%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi	-	517.737,56	(517.737,56)	-
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.804.767,78	43.119.612,77	(41.314.844,99)	(95,81)
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	38.050.895,00	81.490.921,00	(43.440.026,00)	(53,31)
4	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	-	54.799.505,00	(54.799.505,00)	(100,00)
5	RSUD dr. Rehatta	12.680.947,80	3.151.260,60	9.529.687,20	302,41
6	RSUD dr. Arif Zainuddin	25.377,25	134.445,97	(109.068,72)	(81,12)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	36.931,50	(36.931,50)	(100,00)
	Jumlah	**52.561.987,83**	**183.250.414,40**	**(130.688.426,57)**	**(71,32)**

5.4.2.1.7 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI Rp1.499.586.730.397,52

Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp1.499.586.730.397,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.358.110.798.903,03 mengalami **kenaikan** sebesar Rp141.475.931.494,49 atau 10,42% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Peralatan dan Mesin	701.869.869.856,91	663.177.104.214,45	38.692.765.642,46	5,83
2	Beban Gedung dan Bangunan	197.508.053.163,99	188.038.855.971,75	9.469.197.192,24	5,04
3	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan	590.509.132.937,36	499.040.114.318,00	91.469.018.619,36	18,33
4	Beban Aset Tetap Lainnya	282.597.775,74	561.287.466,62	(278.689.690,88)	(49,65)
5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	384.729.947,52	431.979.788,80	(47.249.841,28)	(10,94)
6	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	4.409.282.946,79	4.681.936.117,04	(272.653.170,25)	(5,82)
7	Beban Penyusutan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	4.584.766.346,68	2.179.521.026,37	2.405.245.320,31	110,36
8	Beban Penyusutan Properti Investasi	38.297.422,53	-	38.297.422,53	100,00
	Jumlah	**1.499.586.730.397,52**	**1.358.110.798.903,03**	**141.475.931.494,49**	**10,42**

Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp1.499.586.730.397,52 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**20.020.704.316.513,60**
Penambahan		
Mutasi Keluar	10.317.598.440,74	
Reklas Ke Aset tetap	27.224.405.510,71	
Reklas ke Aset Lainnya	601.184.061.446,37	
Reklas Ke Properti Investasi	20.667.892.554,79	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	70.554.392,18	
Reklas Pemanfaatan	129.930.000,00	
Penjualan	52.050.874.403,12	
Ganti Rugi	9.555.000,00	
Hibah dan LainBelanja DaerahLain	6.017.806.979,78	
Koreksi	37.473.101.363,74	
Total Penambahan		**755.145.780.091,43**
Pengurangan		
Hibah	19.064.733.192,29	

Mutasi Masuk	10.317.598.440,76	
Reklas Dari Aset Tetap	626.931.206.973,72	
Reklas Dari Aset Lainnya	21.878.486.427,80	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	2.495.002,75	
Reklas Dari ATB	324.981.400,00	
Koreksi	81.929.139.785,99	
Total Pengurangan		**760.448.641.223,31**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**18.515.814.724.984,20**
Beban Daerah		**1.499.586.730.397,52**

5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp701.869.869.856,91

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp701.869.869.856,91, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp663.177.104.214,45 mengalami **kenaikan** sebesar Rp38.692.765.642,46 atau 5,83% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Alat Besar	20.490.552.128,60	22.464.822.818,55	(1.974.270.689,95)	(8,79)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	37.703.155.676,88	38.425.453.679,65	(722.298.002,77)	(1,88)
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	27.051.056.484,06	30.344.209.156,99	(3.293.152.672,93)	(10,85)
4	Beban Penyusutan Alat Pertanian	5.109.218.891,31	3.830.212.489,69	1.279.006.401,62	33,39
5	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	173.967.956.741,33	153.472.873.248,78	20.495.083.492,55	13,35
6	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.781.027.353,54	22.701.914.719,18	79.112.634,36	0,35
7	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	187.657.564.776,37	171.691.707.890,47	15.965.856.885,90	9,30
8	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	59.860.418.408,17	52.340.998.515,00	7.519.419.893,17	14,37
9	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	231.176.434,87	314.691.387,37	(83.514.952,50)	(26,54)
10	Beban Penyusutan Komputer	137.613.392.787,56	141.216.560.084,29	(3.603.167.296,73)	(2,55)
11	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	38.773.268,86	47.480.518,87	(8.707.250,01)	(18,34)
12	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	16.269.929,80	15.751.729,80	518.200,00	3,29
13	Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	80.184.051,95	60.358.774,76	19.825.277,19	32,85
14	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
15	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	884.394.709,11	796.923.681,64	87.471.027,47	10,98
16	Beban Penyusutan Alat Peraga	15.198.896.578,39	12.564.361.805,27	2.634.534.773,12	20,97
17	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	564.469.750,10	428.901.758,38	135.567.991,72	31,61
18	Beban Penyusutan Rambu-rambu	1.825.044.950,65	1.480.017.573,77	345.027.376,88	23,31
19	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	10.794.198.935,36	10.977.746.381,99	(183.547.446,63)	(1,67)
	Jumlah	**701.869.869.856,91**	**663.177.104.214,45**	**38.692.765.642,46**	5,83

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp701.869.869.856,91 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**7.175.487.568.983,53**
Penambahan		
Mutasi Keluar	8.224.199.625,00	
Reklas Ke Aset tetap	4.952.209.752,90	
Reklas ke Aset Lainnya	576.052.996.811,49	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	15.293.174,84	
Koreksi	640.606.695,00	
Total Penambahan		**589.885.306.059,23**
Pengurangan		
Hibah	3.467.334.951,44	

Mutasi Masuk	8.224.199.625,00	
Reklas Dari Aset Tetap	4.885.392.888,32	
Reklas Dari Aset Lainnya	1.599.786.996,00	
Koreksi	51.584.465.742,14	
Total Pengurangan		**69.761.180.202,90**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**6.993.741.824.982,95**
Beban Daerah		**701.869.869.856,91**

5.4.2.1.7.1.1 Beban Penyusutan Alat Besar **Rp20.490.552.128,60**

Beban Penyusutan Alat Besar terealisasi sebesar Rp20.490.552.128,60, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.464.822.818,55 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.974.270.689,95) atau (8,79%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.736.758.202,69	1.890.082.192,32	(153.323.989,63)	(8,11)
2	Dinas Kesehatan	229.443.091,48	348.378.914,41	(118.935.822,93)	(34,14)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.501.511.056,67	1.741.906.478,03	(240.395.421,36)	(13,80)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	906.609.506,24	906.609.506,26	(0,02)	(0,00)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	580.412.712,50	541.511.150,00	38.901.562,50	7,18
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	454.431.737,50	449.072.362,50	5.359.375,00	1,19
7	RSUD dr. Arif Zainuddin	533.182.607,63	332.215.915,53	200.966.692,10	60,49
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	149.789.886,79	149.789.886,80	(0,01)	(0,00)
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.952.785.190,62	9.841.037.580,99	(1.888.252.390,37)	(19,19)
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.004.114.119,82	1.829.447.286,50	174.666.833,32	9,55
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	71.885.112,50	71.885.112,50	-	-
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	593.684.427,92	599.379.167,50	(5.694.739,58)	(0,95)
13	Dinas Sosial	32.673.662,25	33.725.745,59	(1.052.083,34)	(3,12)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.268.095,00	2.750.000,00	518.095,00	18,84
15	Dinas Ketahanan Pangan	49.864.937,50	10.906.604,17	38.958.333,33	357,20
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	17.093.721,00	28.258.721,00	(11.165.000,00)	(39,51)
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	20.833.333,33	-	20.833.333,33	100,00
18	Dinas Perhubungan	51.531.050,00	51.531.050,00	-	-
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	337.301.362,50	390.399.612,50	(53.098.250,00)	(13,60)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	95.383.750,00	118.896.250,00	(23.512.500,00)	(19,78)
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	77.730.281,25	77.730.281,25	-	-
22	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	62.744.120,67	95.525.683,17	(32.781.562,50)	(34,32)
23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-	-	-	-
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.030.561,47	315.346.212,50	(14.315.651,03)	(4,54)
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	392.288.954,15	291.122.357,50	101.166.596,65	34,75
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	57.537.120,83	52.743.787,50	4.793.333,33	9,09
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	148.017.437,50	143.070.302,08	4.947.135,42	3,46
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	96.642.244,58	91.074.536,25	5.567.708,33	6,11
29	Sekretariat Daerah	956.212.641,00	956.212.641,00	-	-
30	Sekretariat DPRD	444.185.077,50	345.420.058,12	98.765.019,38	28,59
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.067.787,50	22.050.600,00	6.017.187,50	27,29
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	325.074.581,62	325.074.581,63	(0,01)	(0,00)
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	111.737.937,50	214.164.380,21	(102.426.442,71)	(47,83)
34	Badan Kepegawaian Daerah	-	18.225.500,00	(18.225.500,00)	(100,00)
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	124.568.331,59	137.120.873,24	(12.552.541,65)	(9,15)
36	Badan Penghubung	37.249.987,50	37.249.987,50	-	-
37	Inspektorat	4.907.500,00	4.907.500,00	-	-
	Jumlah	**20.490.552.128,60**	**22.464.822.818,55**	**(1.974.270.689,95)**	(8,79)

5.4.2.1.7.1.2 Beban Penyusutan Alat Angkutan **Rp37.703.155.676,88**

Beban Penyusutan Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp37.703.155.676,88, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp38.425.453.679,65 mengalami **penurunan** sebesar (Rp722.298.002,77) atau (1,88%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.011.410.421,51	8.857.226.749,64	(845.816.328,13)	(9,55)
2	Dinas Kesehatan	3.110.624.539,46	3.287.642.356,12	(177.017.816,66)	(5,38)
3	RSUD Dr. Moewardi	854.842.228,98	764.052.337,88	90.789.891,10	11,88
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	639.171.200,00	625.471.803,14	13.699.396,86	2,19

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	334.976.850,00	247.187.287,50	87.789.562,50	35,52
6	RSUD dr. Rehatta	411.316.830,29	437.490.163,63	(26.173.333,34)	(5,98)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	323.781.790,00	234.577.727,50	89.204.062,50	38,03
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	447.428.710,75	447.428.710,75	-	-
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	376.325.000,00	461.812.108,74	(85.487.108,74)	(18,51)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.662.795.208,33	2.342.382.333,41	320.412.874,92	13,68
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.142.319.499,37	2.131.138.166,02	11.181.333,35	0,52
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	57.687.500,00	109.522.250,00	(51.834.750,00)	(47,33)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	181.366.312,50	181.366.312,50	-	-
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.055.990.224,90	1.128.233.330,11	(72.243.105,21)	(6,40)
15	Dinas Sosial	457.582.693,75	471.242.766,66	(13.660.072,91)	(2,90)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	768.577.341,67	915.066.360,00	(146.489.018,33)	(16,01)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.730.250,00	75.632.562,50	(70.902.312,50)	(93,75)
18	Dinas Ketahanan Pangan	104.130.000,00	49.239.375,00	54.890.625,00	111,48
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	235.875.213,61	314.409.286,46	(78.534.072,85)	(24,98)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	70.603.750,00	57.718.395,84	12.885.354,16	22,32
21	Dinas Perhubungan	235.235.693,75	269.784.027,08	(34.548.333,33)	(12,81)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	428.412.625,00	408.523.020,80	19.889.604,20	4,87
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	59.172.125,00	91.363.645,83	(32.191.520,83)	(35,23)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	112.503.593,75	164.338.343,75	(51.834.750,00)	(31,54)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	175.281.250,00	270.690.000,00	(95.408.750,00)	(35,25)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	135.573.687,50	148.033.437,50	(12.459.750,00)	(8,42)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.112.811.792,72	1.695.068.220,84	(582.256.428,12)	(34,35)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	688.625.234,21	734.587.462,85	(45.962.228,64)	(6,26)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	479.755.032,80	474.588.366,12	5.166.666,68	1,09
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	599.914.179,17	561.892.762,50	38.021.416,67	6,77
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	92.406.250,00	201.922.593,75	(109.516.343,75)	(54,24)
32	Sekretariat Daerah	3.263.391.627,30	3.163.884.168,93	99.507.458,37	3,15
33	Sekretariat DPRD	1.907.327.968,75	2.660.884.406,25	(753.556.437,50)	(28,32)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	408.776.500,00	408.676.979,15	99.520,85	0,02
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.336.528.260,43	2.355.498.468,73	981.029.791,70	41,65
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	680.349.625,00	554.632.145,85	125.717.479,15	22,67
37	Badan Kepegawaian Daerah	62.500.000,00	102.762.729,16	(40.262.729,16)	(39,18)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	121.486.041,67	75.640.625,00	45.845.416,67	60,61
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	253.506.500,00	-	253.506.500,00	100,00
40	Badan Penghubung	948.107.322,63	615.208.642,16	332.898.680,47	54,11
41	Inspektorat	277.826.364,58	212.246.250,00	65.580.114,58	30,90
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.128.437,50	116.387.000,00	(44.258.562,50)	(38,03)
	Jumlah	**37.703.155.676,88**	**38.425.453.679,65**	**(722.298.002,77)**	(1,88)

5.4.2.1.7.1.3 Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur **Rp27.051.056.484,06**

Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur terealisasi sebesar Rp27.051.056.484,06, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.344.209.156,99 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.293.152.672,93) atau (10,85%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	24.657.666.549,03	27.938.272.296,38	(3.280.605.747,35)	(11,74)
2	Dinas Kesehatan	561.194.300,00	462.183.996,63	99.010.303,37	21,42
3	RSUD Dr. Moewardi	111.971.158,33	133.383.825,00	(21.412.666,67)	(16,05)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	295.385.120,44	204.293.436,80	91.091.683,64	44,59
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	22.189.210,50	24.897.099,67	(2.707.889,17)	(10,88)
6	RSUD dr. Rehatta	8.214.632,50	19.445.595,00	(11.230.962,50)	(57,76)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.922.552,40	6.538.666,67	(616.114,27)	(9,42)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	10.553.010,00	109.127.078,00	(98.574.068,00)	(90,33)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	141.671.707,50	141.545.607,50	126.100,00	0,09
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	125.680.663,19	100.076.956,40	25.603.706,79	25,58
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	27.827.433,73	117.286.100,40	(89.458.666,67)	(76,27)
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	64.611.715,00	59.140.081,25	5.471.633,75	9,25
13	Dinas Sosial	3.610.000,00	15.029.291,69	(11.419.291,69)	(75,98)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	70.680.891,57	43.514.034,98	27.166.856,59	62,43
15	Dinas Ketahanan Pangan	10.955.500,00	10.955.500,00	-	-
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.228.216,68	18.062.800,00	165.416,68	0,92
17	Dinas Perhubungan	44.059.166,67	89.218.750,00	(45.159.583,33)	(50,62)
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	6.388.640,00	3.194.443,34	3.194.196,66	99,99
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10.805.706,50	10.805.706,50	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	15.930.000,00	20.082.500,00	(4.152.500,00)	(20,68)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	134.730.755,70	141.544.255,70	(6.813.500,00)	(4,81)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	48.503.408,32	60.447.143,33	(11.943.735,01)	(19,76)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	40.199.593,33	55.929.260,00	(15.729.666,67)	(28,12)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	66.613.563,33	73.264.229,98	(6.650.666,65)	(9,08)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	196.920.136,17	167.447.365,31	29.472.770,86	17,60
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	272.452.943,17	241.056.559,80	31.396.383,37	13,02
27	Sekretariat Daerah	5.102.200,00	4.478.866,66	623.333,34	13,92
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	395.160,00	395.160,00	-	-
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	70.265.000,00	70.265.000,00	-	-
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.832.550,00	1.832.550,00	-	-
31	Badan Penghubung	495.000,00	495.000,00	-	-
	Jumlah	**27.051.056.484,06**	**30.344.209.156,99**	**(3.293.152.672,93)**	(10,85)

5.4.2.1.7.1.4 Beban Penyusutan Alat Pertanian Rp5.109.218.891,31

Beban Penyusutan Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp5.109.218.891,31, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.830.212.489,69 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.279.006.401,62 atau 33,39% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.416.988.282,32	1.878.102.949,80	(461.114.667,48)	(24,55)
2	Dinas Kesehatan	2.900.000,00	2.900.000,00	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	1.443.750,00	1.793.000,00	(349.250,00)	(19,48)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	23.125.000,00	21.197.916,67	1.927.083,33	9,09
6	RSUD dr. Rehatta	-	178.750,00	(178.750,00)	(100,00)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.749.025,00	3.749.025,00	-	-
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	2.829.375,00	2.829.375,00	-	-
15	Dinas Sosial	3.112.500,00	2.959.375,00	153.125,00	5,17
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	21.355.833,32	13.378.125,00	7.977.708,32	59,63
18	Dinas Ketahanan Pangan	91.125.000,00	88.625.000,00	2.500.000,00	2,82
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	16.850.000,00	14.131.250,00	2.718.750,00	19,24
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	124.875,00	-	124.875,00	100,00
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	37.194.573,34	29.278.666,67	7.915.906,67	27,04
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.219.618.323,83	1.628.084.243,17	1.591.534.080,66	97,76
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	268.802.353,50	140.817.313,38	127.985.040,12	90,89
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	2.187.500,00	(2.187.500,00)	(100,00)
	Jumlah	**5.109.218.891,31**	**3.830.212.489,69**	**1.279.006.401,62**	**33,39**

5.4.2.1.7.1.5 Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga Rp173.967.956.741,33

Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp173.967.956.741,33, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp153.472.873.248,78 mengalami **kenaikan** sebesar Rp20.495.083.492,55 atau 13,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	125.064.549.210,52	103.071.771.512,49	21.992.777.698,03	21,34
2	Dinas Kesehatan	3.186.083.418,75	2.092.001.751,23	1.094.081.667,52	52,30
3	RSUD Dr. Moewardi	5.288.350.970,82	3.857.693.513,10	1.430.657.457,72	37,09
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	8.305.557.268,15	6.856.474.547,87	1.449.082.720,28	21,13
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	3.209.637.986,47	3.132.016.405,71	77.621.580,76	2,48
6	RSUD dr. Rehatta	733.929.528,68	648.300.163,62	85.629.365,06	13,21
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	996.349.351,71	896.839.880,51	99.509.471,20	11,10
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	1.714.624.261,61	3.080.079.843,62	(1.365.455.582,01)	(44,33)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	837.697.772,44	734.672.865,22	103.024.907,22	14,02
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	2.050.541.892,45	1.774.653.242,99	275.888.649,46	15,55
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	343.939.963,22	228.005.063,35	115.934.899,87	50,85
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	181.816.074,65	156.224.394,66	25.591.679,99	16,38
13	Satuan Polisi Pamong Praja	43.628.666,67	105.426.066,69	(61.797.400,02)	(58,62)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	379.175.566,68	440.083.131,12	(60.907.564,44)	(13,84)
15	Dinas Sosial	639.035.394,54	1.183.792.592,92	(544.757.198,38)	(46,02)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	829.685.888,54	510.638.060,99	319.047.827,55	62,48
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	93.111.145,66	106.334.845,73	(13.223.700,07)	(12,44)
18	Dinas Ketahanan Pangan	609.084.417,36	606.916.886,85	2.167.530,51	0,36
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	533.895.337,33	618.077.209,44	(84.181.872,11)	(13,62)
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	92.788.141,34	124.572.936,00	(31.784.794,66)	(25,52)
21	Dinas Perhubungan	574.267.779,14	606.152.598,14	(31.884.819,00)	(5,26)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.407.998.945,39	1.345.897.459,32	62.101.486,07	4,61

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	832.830.684,29	854.069.653,51	(21.238.969,22)	(2,49)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	60.139.246,69	130.095.883,35	(69.956.636,66)	(53,77)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	3.396.019.249,77	5.751.582.541,97	(2.355.563.292,20)	(40,96)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200.057.172,26	231.004.748,33	(30.947.576,07)	(13,40)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	369.799.046,95	621.593.835,86	(251.794.788,91)	(40,51)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	450.641.834,73	470.320.244,68	(19.678.409,95)	(4,18)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	676.465.871,59	844.328.199,56	(167.862.327,97)	(19,88)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	919.630.895,20	1.037.701.631,52	(118.070.736,32)	(11,38)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	496.851.436,32	454.455.343,44	42.396.092,88	9,33
32	Sekretariat Daerah	1.079.256.782,04	1.180.307.419,76	(101.050.637,72)	(8,56)
33	Sekretariat DPRD	4.513.731.617,65	4.708.658.816,61	(194.927.198,96)	(4,14)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.072.182,13	639.251.738,23	(239.179.556,10)	(37,42)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.323.675.669,56	2.318.603.974,76	(994.928.305,20)	(42,91)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	166.706.613,04	423.032.685,80	(256.326.072,76)	(60,59)
37	Badan Kepegawaian Daerah	260.349.173,77	343.016.039,86	(82.666.866,09)	(24,10)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	772.935.036,10	803.199.841,43	(30.264.805,33)	(3,77)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	162.515.233,32	-	162.515.233,32	100,00
41	Badan Penghubung	125.993.633,23	161.606.033,41	(35.612.400,18)	(22,04)
40	Inspektorat	496.718.256,11	225.309.087,12	271.409.168,99	120,46
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	147.818.124,46	98.110.558,01	49.707.566,45	50,66
	Jumlah	**173.967.956.741,33**	**153.472.873.248,78**	**20.495.083.492,55**	13,35

5.4.2.1.7.1.6 Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, & Pemancar Rp22.781.027.353,54

Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp22.781.027.353,54, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp22.701.914.719,18 mengalami **kenaikan** sebesar Rp79.112.634,36 atau 0,35% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.119.753.214,24	14.271.624.906,76	(151.871.692,52)	(1,06)
2	Dinas Kesehatan	372.109.829,94	463.920.394,91	(91.810.564,97)	(19,79)
3	RSUD Dr. Moewardi	217.303.800,03	211.167.866,67	6.135.933,36	2,91
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	589.790.353,85	978.543.367,20	(388.753.013,35)	(39,73)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	251.151.608,83	204.060.616,54	47.090.992,29	23,08
6	RSUD dr. Rehatta	19.153.380,00	21.485.910,00	(2.332.530,00)	(10,86)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	35.092.733,33	29.861.366,65	5.231.366,68	17,52
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	108.567.220,15	59.650.229,80	48.916.990,35	82,01
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	88.995.447,27	77.878.780,60	11.116.666,67	14,27
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	862.803.632,00	496.911.813,52	365.891.818,48	73,63
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	45.563.333,35	34.741.500,00	10.821.833,35	31,15
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	61.060.200,00	30.765.200,00	30.295.000,00	98,47
13	Satuan Polisi Pamong Praja	39.788.333,33	55.013.333,31	(15.224.999,98)	(27,68)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.411.310,00	31.538.425,81	(17.127.115,81)	(54,31)
15	Dinas Sosial	17.680.166,67	15.374.166,67	2.306.000,00	15,00
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	51.230.809,21	75.738.475,86	(24.507.666,65)	(32,36)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9.647.303,34	7.431.470,00	2.215.833,34	29,82
18	Dinas Ketahanan Pangan	34.219.307,59	37.340.807,60	(3.121.500,01)	(8,36)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	151.819.625,00	140.089.273,44	11.730.351,56	8,37
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	41.050.106,68	48.724.440,00	(7.674.333,32)	(15,75)
21	Dinas Perhubungan	65.195.710,00	89.404.826,67	(24.209.116,67)	(27,08)
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.809.633.930,70	1.788.947.615,51	20.686.315,19	1,16
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	190.269.183,35	161.342.016,69	28.927.166,66	17,93
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15.847.100,00	17.646.254,99	(1.799.154,99)	(10,20)
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	716.548.931,26	775.268.062,07	(58.719.130,81)	(7,57)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.225.200,01	29.232.980,00	(26.007.779,99)	(88,97)
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	42.476.071,14	45.695.879,46	(3.219.808,32)	(7,05)
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	62.262.371,33	96.431.304,67	(34.168.933,34)	(35,43)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	76.818.900,00	82.965.800,02	(6.146.900,02)	(7,41)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	124.990.901,47	145.417.036,88	(20.426.135,41)	(14,05)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	278.473.341,45	46.705.181,39	231.768.160,06	496,24
32	Sekretariat Daerah	1.441.974.727,42	1.323.894.748,94	118.079.978,48	8,92
33	Sekretariat DPRD	259.882.500,00	353.203.000,00	(93.320.500,00)	(26,42)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	21.094.043,33	11.164.844,15	9.929.199,18	88,93
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	54.196.920,00	145.741.320,00	(91.544.400,00)	(62,81)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	274.264.500,00	57.623.000,00	216.641.500,00	375,96
37	Badan Kepegawaian Daerah	20.370.980,00	19.305.246,66	1.065.733,34	5,52

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	106.396.904,89	111.840.136,68	(5.443.231,79)	(4,87)
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	10.188.000,00	-	10.188.000,00	100,00
41	Badan Penghubung	16.574.455,71	13.009.185,73	3.565.269,98	27,41
40	Inspektorat	21.018.833,33	26.203.333,33	(5.184.500,00)	(19,79)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38.132.133,34	69.010.600,00	(30.878.466,66)	(44,74)
	Jumlah	**22.781.027.353,54**	**22.701.914.719,18**	**79.112.634,36**	0,35

5.4.2.1.7.1.7 Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan Rp187.657.564.776,37

Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp187.657.564.776,37, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp171.691.707.890,47 mengalami **kenaikan** sebesar Rp15.965.856.885,90 atau 9,30% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.160.557.228,72	1.308.497.177,82	(147.939.949,10)	(11,31)
2	Dinas Kesehatan	13.101.956.949,78	8.001.037.564,05	5.100.919.385,73	63,75
3	RSUD Dr. Moewardi	100.302.099.635,28	92.136.357.370,53	8.165.742.264,75	8,86
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	37.928.017.580,39	35.165.558.139,91	2.762.459.440,48	7,86
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	20.026.619.497,37	17.800.207.648,54	2.226.411.848,83	12,51
6	RSUD dr. Rehatta	4.227.794.737,21	5.000.565.614,31	(772.770.877,10)	(15,45)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	5.675.259.272,73	5.921.077.622,14	(245.818.349,41)	(4,15)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	2.150.041.609,71	3.452.274.398,65	(1.302.232.788,94)	(37,72)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.764.861.971,67	2.500.600.508,77	264.261.462,90	10,57
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	870.206,40	870.206,40	-	-
11	Dinas Sosial	28.034.766,61	60.270.600,08	(32.235.833,47)	(53,49)
12	Dinas Perhubungan	1.630.000,00	1.630.000,00	-	-
13	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.992.000,00	1.494.000,00	498.000,00	33,33
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400.000,00	800.000,00	(400.000,00)	(50,00)
15	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	2.100.000,00	4.020.000,00	(1.920.000,00)	(47,76)
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.655.500,00	1.655.500,00	-	-
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	218.119.360,00	225.150.260,00	(7.030.900,00)	(3,12)
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	500.000,00	500.000,00	-	-
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.448.593,84	7.598.727,00	(1.150.133,16)	(15,14)
20	Sekretariat Daerah	23.975.000,00	23.975.000,00	-	-
21	Sekretariat DPRD	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	655.000,00	269.166,67	385.833,33	143,34
23	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	18.185.666,66	28.429.000,00	(10.243.333,34)	(36,03)
24	Badan Kepegawaian Daerah	-	33.239.185,60	(33.239.185,60)	(100,00)
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	12.030.200,00	12.030.200,00	-	-
26	Badan Riset dan Inovasi Daerah	160.000,00	-	160.000,00	100,00
	Jumlah	**187.657.564.776,37**	**171.691.707.890,47**	**15.965.856.885,90**	**9,30**

5.4.2.1.7.1.8 Beban Penyusutan Alat Laboratorium Rp59.860.418.408,17

Beban Penyusutan Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp59.860.418.408,17, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.340.998.515,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp7.519.419.893,17 atau 14,37% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	34.319.311.975,62	33.716.028.784,86	603.283.190,76	1,79
2	Dinas Kesehatan	4.748.571.228,55	4.139.263.731,85	609.307.496,70	14,72
3	RSUD Dr. Moewardi	7.066.908.810,58	2.478.048.049,17	4.588.860.761,41	185,18
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	5.043.615.160,68	2.264.526.556,47	2.779.088.604,21	122,72
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	942.434.632,56	1.649.482.809,99	(707.048.177,43)	(42,86)
6	RSUD dr. Rehatta	113.169.753,63	104.655.244,25	8.514.509,38	8,14
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	117.256.816,36	110.564.251,07	6.692.565,29	6,05
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	244.252.366,67	219.489.860,83	24.762.505,84	11,28
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	262.422.612,83	310.819.872,84	(48.397.260,01)	(15,57)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	950.924.418,79	926.957.927,11	23.966.491,68	2,59
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	201.635.293,61	168.884.684,03	32.750.609,58	19,39
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.022.864,58	14.386.337,50	(1.363.472,92)	(9,48)
13	Dinas Sosial	1.534.183,33	8.346.062,50	(6.811.879,17)	(81,62)
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	341.687.425,79	249.925.021,11	91.762.404,68	36,72
15	Dinas Ketahanan Pangan	200.775.951,48	155.881.215,05	44.894.736,43	28,80
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	371.350.495,17	961.858.847,39	(590.508.352,22)	(61,39)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	2.981.000,00	2.981.000,00	-	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	249.750,00	-	249.750,00	100,00
19	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	4.715.684,55	4.649.851,28	65.833,27	1,42
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	25.387.916,66	25.387.916,67	(0,01)	(0,00)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.333,33	-	13.333,33	100,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	145.025.500,26	236.268.081,85	(91.242.581,59)	(38,62)
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	294.285.329,13	47.900.432,35	246.384.896,78	514,37
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.648.780.903,49	1.666.592.578,92	(17.811.675,43)	(1,07)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	757.239.849,41	642.123.113,81	115.116.735,60	17,93
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.038.123.504,16	2.223.044.575,70	(184.921.071,54)	(8,32)
27	Sekretariat DPRD	386.944,44	-	386.944,44	100,00
28	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.029.166,61	1.583.333,40	(554.166,79)	(35,00)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	3.325.535,90	2.498.375,00	827.160,90	33,11
30	Inspektorat	-	8.850.000,00	(8.850.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**59.860.418.408,17**	**52.340.998.515,00**	**7.519.419.893,17**	**14,37**

5.4.2.1.7.1.9 Beban Penyusutan Alat Persenjataan Rp231.176.434,87

Beban Penyusutan Alat Persenjataan terealisasi sebesar Rp231.176.434,87, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp314.691.387,37 mengalami **penurunan** sebesar (Rp83.514.952,50) atau (26,54%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	189.781.231,49	285.232.387,37	(95.451.155,88)	(33,46)
2	Satuan Polisi Pamong Praja	8.260.000,00	8.260.000,00	-	-
3	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.450.000,00	18.699.000,00	(249.000,00)	(1,33)
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	204.425,00	-	204.425,00	100,00
5	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	20,00
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	11.480.778,38	-	11.480.778,38	100,00
	Jumlah	**231.176.434,87**	**314.691.387,37**	**(83.514.952,50)**	**(26,54)**

5.4.2.1.7.1.10 Beban Penyusutan Komputer Rp137.613.392.787,56

Beban Penyusutan Komputer terealisasi sebesar Rp137.613.392.787,56, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp141.216.560.084,29 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.603.167.296,73) atau (2,55%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	96.167.444.074,62	102.621.586.897,10	(6.454.142.822,48)	(6,29)
2	Dinas Kesehatan	1.567.596.734,82	1.421.834.216,50	145.762.518,32	10,25
3	RSUD Dr. Moewardi	4.423.812.433,44	3.618.943.211,47	804.869.221,97	22,24
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	6.463.823.818,99	5.883.702.973,37	580.120.845,62	9,86
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	1.821.316.156,54	1.221.393.084,35	599.923.072,19	49,12
6	RSUD dr. Rehatta	291.464.746,65	202.576.703,33	88.888.043,32	43,88
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	324.203.823,82	269.464.577,78	54.739.246,04	20,31
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	408.559.922,45	372.873.132,13	35.686.790,32	9,57
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	444.122.285,98	317.527.211,93	126.595.074,05	39,87
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	1.167.163.135,39	1.020.660.539,39	146.502.596,00	14,35
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	361.601.208,38	130.765.166,73	230.836.041,65	176,53
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	194.576.327,50	182.581.660,85	11.994.666,65	6,57
13	Satuan Polisi Pamong Praja	52.321.250,00	44.810.104,17	7.511.145,83	16,76
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.476.658,35	38.041.939,59	2.434.718,76	6,40
15	Dinas Sosial	344.765.493,97	304.343.659,68	40.421.834,29	13,28
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	649.935.500,08	398.893.999,92	251.041.500,16	62,93
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	92.772.391,62	57.568.766,69	35.203.624,93	61,15
18	Dinas Ketahanan Pangan	211.884.532,94	312.326.914,16	(100.442.381,22)	(32,16)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	459.752.402,76	438.061.392,33	21.691.010,43	4,95
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	21.313.500,00	70.458.250,02	(49.144.750,02)	(69,75)
21	Dinas Perhubungan	82.972.916,66	79.543.750,04	3.429.166,62	4,31
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	11.887.204.080,51	13.284.588.651,46	(1.397.384.570,95)	(10,52)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	294.319.750,00	257.359.333,26	36.960.416,74	14,36
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	154.525.860,00	132.249.407,07	22.276.452,93	16,84

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	132.758.518,16	70.261.643,17	62.496.874,99	88,95
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	129.867.092,48	82.885.530,00	46.981.562,48	56,68
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	258.759.144,70	197.583.394,78	61.175.749,92	30,96
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	127.031.895,83	201.367.687,51	(74.335.791,68)	(36,92)
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	470.774.501,67	488.799.188,84	(18.024.687,17)	(3,69)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	440.259.739,85	503.538.230,58	(63.278.490,73)	(12,57)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	558.621.665,61	318.394.998,93	240.226.666,68	75,45
32	Sekretariat Daerah	1.083.001.445,47	1.089.496.286,11	(6.494.840,64)	(0,60)
33	Sekretariat DPRD	1.190.631.958,32	1.205.515.750,00	(14.883.791,68)	(1,23)
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	679.542.843,50	500.072.874,63	179.469.968,87	35,89
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	3.047.719.708,18	2.355.447.624,79	692.272.083,39	29,39
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	265.332.258,32	314.211.004,19	(48.878.745,87)	(15,56)
37	Badan Kepegawaian Daerah	415.093.000,00	553.051.586,65	(137.958.586,65)	(24,94)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	381.432.339,17	328.872.599,99	52.559.739,18	15,98
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	244.829.250,00	-	244.829.250,00	100,00
41	Badan Penghubung	24.322.916,67	11.645.833,33	12.677.083,34	108,86
40	Inspektorat	84.218.750,00	163.555.407,47	(79.336.657,47)	(48,51)
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	151.266.754,16	149.704.900,00	1.561.854,16	1,04
	Jumlah	**137.613.392.787,56**	**141.216.560.084,29**	**(3.603.167.296,73)**	**(2,55)**

5.4.2.1.7.1.11 Beban Penyusutan Alat Eksplorasi Rp38.773.268,86

Beban Penyusutan Alat Eksplorasi terealisasi sebesar, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp47.480.518,87 mengalami **penurunan** sebesar (Rp8.707.250,01) atau (18,34%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	37.669.268,86	43.226.518,87	(5.557.250,01)	(12,86)
2	Dinas Kesehatan	180.000,00	180.000,00	-	-
3	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	924.000,00	4.074.000,00	(3.150.000,00)	(77,32)
	Jumlah	**38.773.268,86**	**47.480.518,87**	**(8.707.250,01)**	**(18,34)**

5.4.2.1.7.1.12 Beban Penyusutan Alat Pengeboran Rp16.269.929,80

Beban Penyusutan Alat Pengeboran terealisasi sebesar Rp16.269.929,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp15.751.729,80 mengalami **kenaikan** sebesar Rp518.200,00 atau 3,29% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.269.929,80	15.751.729,80	518.200,00	3,29
	Jumlah	**16.269.929,80**	**15.751.729,80**	**518.200,00**	**3,29**

5.4.2.1.7.1.13 Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian Rp80.184.051,95

Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian terealisasi sebesar Rp80.184.051,95, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp60.358.774,76 mengalami **kenaikan** sebesar Rp19.825.277,19 atau 32,85% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	72.346.731,95	52.521.454,76	19.825.277,19	37,75
2	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	7.837.320,00	7.837.320,00	-	-
	Jumlah	**80.184.051,95**	**60.358.774,76**	**19.825.277,19**	**32,85**

5.4.2.1.7.1.14 Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi Rp2.118.000,00

Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi terealisasi sebesar Rp2.118.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.118.000,00 sehingga **tidak mengalami kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.118.000,00	2.118.000,00	-	-
	Jumlah	**2.118.000,00**	**2.118.000,00**	**-**	**-**

5.4.2.1.7.1.15 Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja Rp884.394.709,11

Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp884.394.709,11, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp796.923.681,64 mengalami **kenaikan** sebesar Rp87.471.027,47 atau 10,98% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	738.726.891,68	602.324.009,22	136.402.882,46	22,65
2	Dinas Kesehatan	12.885.416,67	16.714.583,33	(3.829.166,66)	(22,91)
3	RSUD dr. Arif Zainuddin	1.375.000,00	10.517.283,33	(9.142.283,33)	(86,93)
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	7.380.000,00	3.690.000,00	3.690.000,00	100,00
5	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	37.125.000,00	(37.125.000,00)	(100,00)
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.014.400,00	3.139.400,00	875.000,00	27,87
7	Dinas Ketahanan Pangan	33.333,33	4.913.333,32	(4.879.999,99)	(99,32)
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.806.500,00	2.394.000,00	412.500,00	17,23
9	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	39.066.589,10	39.066.589,10	-	-
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.487.500,00	2.820.833,34	666.666,66	23,63
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	74.619.078,33	40.301.983,33	34.317.095,00	85,15
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	9.166.666,67	(9.166.666,67)	(100,00)
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	24.750.000,00	(24.750.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**884.394.709,11**	**796.923.681,64**	**87.471.027,47**	**10,98**

5.4.2.1.7.1.16 Beban Penyusutan Alat Peraga Rp15.198.896.578,39

Beban Penyusutan Alat Peraga terealisasi sebesar Rp15.198.896.578,39, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12.564.361.805,27 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.634.534.773,12 atau 20,97% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.997.862.900,99	12.382.999.286,21	2.614.863.614,78	21,12
2	Dinas Kesehatan	5.953.430,00	4.347.155,00	1.606.275,00	36,95
3	RSUD Dr. Moewardi	133.587.769,20	133.587.769,20	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	33.556.588,20	28.030.588,20	5.526.000,00	19,71
5	RSUD dr. Rehatta	101.250,00	-	101.250,00	100,00
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	2.666.400,00	2.666.400,00	-	-
7	RSUD dr. Arif Zainuddin	4.120.000,00	343.333,33	3.776.666,67	1.100,00
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	9.982.500,00	9.982.500,00	-	-
9	Dinas Sosial	1.460.000,00	1.103.416,67	356.583,33	32,32
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.605.740,00	1.301.356,66	8.304.383,34	638,13
	Jumlah	**15.198.896.578,39**	**12.564.361.805,27**	**2.634.534.773,12**	**20,97**

5.4.2.1.7.1.17 Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi Rp564.469.750,10

Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp564.469.750,10, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp428.901.758,38 mengalami **kenaikan** sebesar Rp135.567.991,72 atau 31,61% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	432.402.812,61	371.421.758,38	60.981.054,23	16,42
2	Dinas Kesehatan	2.812.500,00	2.812.500,00	-	-
3	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	11.875.000,00	11.875.000,00	-	-
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	8.226.750,00	8.226.750,00	-	-
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	11.625.000,00	11.625.000,00	-	-
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.865.062,49	-	71.865.062,49	100,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.975.375,00	2.253.500,00	721.875,00	32,03
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.743.500,00	5.618.500,00	125.000,00	2,22
9	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	16.943.750,00	15.068.750,00	1.875.000,00	12,44
	Jumlah	**564.469.750,10**	**428.901.758,38**	**135.567.991,72**	**31,61**

5.4.2.1.7.1.18 Beban Penyusutan Rambu-Rambu **Rp1.825.044.950,65**

Beban Penyusutan Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp1.825.044.950,65, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.480.017.573,77 mengalami **kenaikan** sebesar Rp345.027.376,88 atau 23.31% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	33.289.161,25	32.405.131,05	884.030,20	2,73
2	RSUD dr. Rehatta	2.585.287,50	2.369.846,85	215.440,65	9,09
3	RSUD dr. Arif Zainuddin	296.875,00	-	296.875,00	-
4	Dinas Perhubungan	1.760.191.762,90	1.430.423.220,87	329.768.542,03	23,05
5	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.192.125,00	8.192.125,00	-	-
6	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.074.989,00	-	13.074.989,00	100,00
7	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.375.000,00	1.375.000,00	-	-
8	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	838.500,00	838.500,00	-	-
9	Sekretariat DPRD	787.500,00	-	787.500,00	100,00
10	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.413.750,00	4.413.750,00	-	-
	Jumlah	**1.825.044.950,65**	**1.480.017.573,77**	**345.027.376,88**	**23,31**

5.4.2.1.7.1.19 Beban Penyusutan Peralatan Olahraga **Rp10.794.198.935,36**

Beban Penyusutan Alat Olahraga terealisasi sebesar Rp10.794.198.935,36, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp10.977.746.381,99 mengalami **penurunan** sebesar (Rp183.547.446,63) atau (1,67%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.078.214.277,94	1.391.413.492,70	(313.199.214,76)	(22,51)
2	Dinas Kesehatan	3.750.000,00	479.166,66	3.270.833,34	682,61
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	2.712.500,00	452.083,33	2.260.416,67	500,00
4	RSUD dr. Rehatta	1.158.732,50	965.610,42	193.122,08	20,00
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	-	21.725.000,00	(21.725.000,00)	(100,00)
6	RSUD dr. Arif Zainuddin	6.673.750,00	715.416,67	5.958.333,33	832,85
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	5.150.520,83	5.775.000,00	(624.479,17)	(10,81)
8	Dinas Sosial	1.868.750,00	1.287.500,00	581.250,00	45,15
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.250.000,00	1.250.000,00	-	-
10	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11.412.500,00	9.875.000,00	1.537.500,00	15,57
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	9.669.474.570,75	9.537.954.987,21	131.519.583,54	1,38
12	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.987.500,00	331.250,00	1.656.250,00	500,00
13	Sekretariat Daerah	7.795.833,34	2.771.875,00	5.023.958,34	181,25
14	Sekretariat DPRD	2.750.000,00	2.750.000,00	-	-
	Jumlah	**10.794.198.935,36**	**10.977.746.381,99**	**(183.547.446,63)**	**(1,67)**

5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan **Rp197.508.053.163,99**

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp197.508.053.163,99, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp188.038.855.971,75 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.469.197.192,24 atau 5,04% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	193.649.341.723,95	184.250.976.943,18	9.398.364.780,77	5,10
2	Beban Penyusutan Monumen	794.504.073,76	798.208.501,29	(3.704.427,53)	(0,46)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	94.950.153,48	105.227.843,11	(10.277.689,63)	(9,77)
4	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.969.257.212,80	2.884.442.684,17	84.814.528,63	2,94
	Jumlah	**197.508.053.163,99**	**188.038.855.971,75**	9.469.197.192,24	5,04

Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp197.508.053.163,99 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**2.651.567.872.774,62**
Penambahan		
Mutasi Keluar	2.000.730.021,83	
Reklas Ke Aset tetap	458.089.852,24	

Reklas ke Aset Lainnya	11.246.698.427,09	
Reklas Ke Properti Investasi	20.664.200.848,96	
Reklas Ke Aset Ekstrakomptabel	55.261.217,34	
Koreksi	23.384.594.184,46	
Total Penambahan		**57.809.574.551,92**
Pengurangan		
Hibah	5.073.380.496,14	
Mutasi Masuk	2.000.730.021,83	
Reklas Dari Aset Tetap	495.650.360,91	
Reklas Dari Aset Lainnya	20.145.077.725,97	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	2.495.002,75	
Koreksi	23.330.113.542,79	
Total Pengurangan		**51.047.447.150,39**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**2.460.821.947.012,16**
Beban Daerah		**197.508.053.163,99**

5.4.2.1.7.2.1 Beban Penyusutan Bangunan Gedung **Rp193.649.341.723,95**

Beban Penyusutan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp193.649.341.723,95, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp184.250.976.943,18 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.398.364.780,77 atau 5,10% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100.604.889.779,88	97.431.337.903,07	3.173.551.876,81	3,26
2	Dinas Kesehatan	2.548.641.946,31	2.167.317.692,44	381.324.253,87	17,59
3	RSUD Dr. Moewardi	11.852.300.201,84	10.354.230.870,72	1.498.069.331,12	14,47
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	7.391.205.728,36	6.411.904.290,82	979.301.437,54	15,27
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	3.367.794.575,28	3.282.737.671,27	85.056.904,01	2,59
6	RSUD dr. Rehatta	1.811.398.105,14	1.801.469.882,80	9.928.222,34	0,55
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	1.917.593.043,09	1.682.039.506,58	235.553.536,51	14,00
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	2.029.724.405,55	1.037.311.225,90	992.413.179,65	95,67
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	1.358.149.320,14	1.285.373.095,57	72.776.224,57	5,66
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.680.478.171,58	1.805.281.109,25	1.875.197.062,33	103,87
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	597.044.672,78	480.532.857,40	116.511.815,38	24,25
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	211.829.916,38	211.829.916,37	0,01	0,00
13	Satuan Polisi Pamong Praja	379.202.928,21	372.089.301,77	7.113.626,44	1,91
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	177.924.895,57	174.178.166,91	3.746.728,66	2,15
15	Dinas Sosial	3.656.064.742,28	3.823.728.227,58	(167.663.485,30)	(4,38)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.166.788.833,58	1.207.841.022,66	(41.052.189,08)	(3,40)
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	401.466.570,56	397.719.001,19	3.747.569,37	0,94
18	Dinas Ketahanan Pangan	288.562.621,19	263.512.629,29	25.049.991,90	9,51
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2.274.749.991,94	1.880.570.001,34	394.179.990,60	20,96
20	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	214.146.187,63	212.772.033,78	1.374.153,85	0,65
21	Dinas Perhubungan	3.103.721.756,18	2.891.656.903,98	212.064.852,20	7,33
22	Dinas Komunikasi dan Informatika	378.264.223,09	423.642.598,22	(45.378.375,13)	(10,71)
23	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	251.097.899,93	1.958.876.468,63	(1.707.778.568,70)	(87,18)
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	209.203.093,85	209.203.093,84	0,01	0,00
25	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	14.882.804.728,68	15.210.285.612,60	(327.480.883,92)	(2,15)
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	520.145.527,66	473.305.295,58	46.840.232,08	9,90
27	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.474.698.779,56	2.222.416.851,95	252.281.927,61	11,35
28	Dinas Pertanian dan Perkebunan	3.307.265.465,32	2.888.546.919,52	418.718.545,80	14,50
29	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.909.151.975,58	1.990.930.228,37	(81.778.252,79)	(4,11)
30	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	924.554.445,53	936.438.825,02	(11.884.379,49)	(1,27)
31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.851.891.073,83	1.721.480.328,40	130.410.745,43	7,58
32	Sekretariat Daerah	2.143.995.511,85	2.143.995.511,81	0,04	0,00
33	Sekretariat DPRD	2.777.661.384,70	2.253.288.591,26	524.372.793,44	23,27
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	465.550.752,68	653.274.294,78	(187.723.542,10)	(28,74)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	4.941.308.592,55	4.921.007.727,59	20.300.864,96	0,41
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.215.687.552,94	4.979.252.746,48	236.434.806,46	4,75

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
37	Badan Kepegawaian Daerah	187.222.304,32	187.222.304,33	(0,01)	(0,00)
38	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.091.975.659,50	1.046.597.284,36	45.378.375,14	4,34
39	Badan Riset dan Inovasi Daerah	202.373.006,52	-	202.373.006,52	100,00
40	Badan Penghubung	399.227.529,59	376.244.770,99	22.982.758,60	6,11
41	Inspektorat	347.780.199,08	347.780.199,07	0,01	0,00
42	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	133.803.623,72	131.753.979,69	2.049.644,03	1,56
	Jumlah	**193.649.341.723,95**	**184.250.976.943,18**	**9.398.364.780,77**	**5,10**

5.4.2.1.7.2.2 Beban Penyusutan Monumen Rp794.504.073,76

Beban Penyusutan Monumen terealisasi sebesar Rp794.504.073,76, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp798.208.501,29 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.704.427,53) atau (0,46%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.215.588,40	270.440.313,13	(2.224.724,73)	(0,82)
2	Dinas Kesehatan	2.883.240,00	2.883.240,00	-	-
3	RSUD dr. Rehatta	5.318.220,00	5.318.220,00	-	-
4	RSUD dr. Arif Zainuddin	16.281.052,00	16.281.052,00	-	-
5	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	30.000,00	30.000,00	-	-
6	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.720.180,00	5.720.180,00	-	-
7	Dinas Sosial	652.380,00	652.380,00	-	-
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.800.000,00	4.279.702,80	(1.479.702,80)	(34,57)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.464.324,32	6.464.324,32	-	-
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	76.982.516,40	76.982.516,40	-	-
11	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	156.000,00	156.000,00	-	-
12	Sekretariat DPRD	350.946.719,84	350.946.719,84	-	-
13	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.938.700,00	16.938.700,00	-	-
14	Badan Penghubung	41.115.152,80	41.115.152,80	-	-
	Jumlah	**794.504.073,76**	**798.208.501,29**	**(3.704.427,53)**	**(0,46)**

5.4.2.1.7.2.3 Beban Penyusutan Bangunan Menara Rp94.950.153,48

Beban Penyusutan Bangunan Menara terealisasi sebesar Rp94.950.153,48, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp105.227.843,11 mengalami **penurunan** sebesar (Rp10.277.689,63) atau (9,77%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	18.295.025,00	18.295.025,00	-	-
2	Dinas Perhubungan	7.731.636,30	10.459.196,30	(2.727.560,00)	(26,08)
3	Dinas Kelautan dan Perikanan	5.141.670,00	6.022.606,30	(880.936,30)	(14,63)
4	Dinas Pertanian dan Perkebunan	63.068.422,18	69.737.615,51	(6.669.193,33)	(9,56)
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	690.000,00	690.000,00	-	-
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.400,00	23.400,00	-	-
	Jumlah	**94.950.153,48**	**105.227.843,11**	**(10.277.689,63)**	**(9,77)**

5.4.2.1.7.2.4 Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp2.969.257.212,80

Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp2.969.257.212,80, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.884.442.684,17 mengalami **kenaikan** sebesar Rp84.814.528,63 atau 2,94% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.443.400.112,31	1.396.367.885,47	47.032.226,84	3,37
2	Dinas Kesehatan	98.663.334,80	98.663.334,80	-	-
3	RSUD Dr. Moewardi	8.843.180,00	12.860.510,00	(4.017.330,00)	(31,24)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	10.164.000,00	10.164.000,00	-	-
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	25.144.686,84	11.349.153,11	13.795.533,73	121,56
6	RSUD dr. Rehatta	88.221.918,00	88.221.918,00	-	-
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.517.160,00	3.517.160,00	-	-
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	2.455.350,00	-	2.455.350,00	100,00

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	32.043.836,96	30.102.737,74	1.941.099,22	6,45
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	14.625.673,34	10.108.652,50	4.517.020,84	44,68
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.790.160,00	2.790.160,00	-	-
12	Dinas Sosial	64.043.119,21	59.528.060,25	4.515.058,96	7,58
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.201.675,33	13.583.897,00	2.617.778,33	19,27
14	Dinas Ketahanan Pangan	9.293.200,00	7.503.866,67	1.789.333,33	23,85
15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	40.136.520,00	40.136.520,00	-	-
16	Dinas Perhubungan	27.640.452,51	24.450.945,25	3.189.507,26	13,04
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	15.869.891,44	15.869.891,44	-	-
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	2.794.656,00	2.755.766,00	38.890,00	1,41
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.200.400,00	2.200.400,00	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	185.646.766,50	181.148.183,60	4.498.582,90	2,48
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.131.735,66	7.131.735,66	-	-
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	118.926.945,31	114.760.447,81	4.166.497,50	3,63
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	257.430.127,32	252.745.295,43	4.684.831,89	1,85
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	89.495.191,00	92.569.301,23	(3.074.110,23)	(3,32)
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	9.772.410,00	9.772.410,00	-	-
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.130.450,00	188.408,33	942.041,67	500,00
27	Sekretariat DPRD	7.604.149,33	7.455.696,00	148.453,33	1,99
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.884.400,00	1.884.400,00	-	-
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	35.814.650,64	35.814.650,64	-	-
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	306.713.649,30	311.139.886,24	(4.426.236,94)	(1,42)
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	36.738.211,00	36.738.211,00	-	-
32	Inspektorat	286.200,00	286.200,00	-	-
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.633.000,00	2.633.000,00	-	-
	Jumlah	**2.969.257.212,80**	**2.884.442.684,17**	**84.814.528,63**	**2,94**

5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp590.509.132.937,36

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan terealisasi sebesar Rp590.509.132.937,36, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp499.040.114.318,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp91.469.018.619,36 atau 18,33% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Jalan dan Jembatan	528.702.524.691,82	437.535.569.306,49	91.166.955.385,33	20,84
2	Bangunan Air	49.392.195.544,20	49.875.089.810,07	(482.894.265,87)	(0,97)
3	Instalasi	4.524.232.025,42	5.533.020.382,19	(1.008.788.356,77)	(18,23)
4	Jaringan	7.890.180.675,92	6.096.434.819,25	1.793.745.856,67	29,42
	Jumlah	**590.509.132.937,36**	**499.040.114.318,00**	**91.469.018.619,36**	18,33

Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan, sebesar Rp590.509.132.937,36, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**9.110.161.814.096,64**
Penambahan		
Mutasi Keluar	68.108.793,91	
Reklas Ke Aset tetap	65.549.477,77	
Reklas ke Aset Lainnya	13.464.333.707,79	
Koreksi	5.559.796.976,68	
Total Penambahan		**19.157.788.956,15**
Pengurangan		
Hibah	10.524.017.744,71	
Mutasi Masuk	68.108.793,91	
Reklas Dari Aset Tetap	9.191.123,33	
Koreksi	5.108.297.982,66	
Total Pengurangan		**15.709.615.644,61**

Saldo Awal Akumulasi Penyusutan **8.523.100.854.470,81**
Beban Daerah **590.509.132.937,37**

5.4.2.1.7.3.1 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan Rp528.702.524.691,82

Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan terealisasi sebesar Rp528.702.524.691,82, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp437.535.569.306,49 mengalami **kenaikan** sebesar Rp91.166.955.385,33 atau 20,84% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.037.546.206,43	1.168.032.413,46	(130.486.207,03)	(11,17)
2	RSUD Dr. Moewardi	19.049.020,00	19.049.020,00	-	-
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	1.320.332,90	(1.320.332,90)	(100,00)
4	RSUD dr. Rehatta	245.137.075,00	286.842.627,08	(41.705.552,08)	(14,54)
5	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	6.788.500,00	91.415.600,00	(84.627.100,00)	(92,57)
6	RSUD dr. Arif Zainuddin	617.274.397,20	312.843.140,59	304.431.256,61	97,31
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	2.226.600,00	371.100,00	1.855.500,00	500,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	519.098.056.839,53	428.559.204.346,29	90.538.852.493,24	21,13
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1.676.604.401,84	1.672.598.071,83	4.006.330,01	0,24
10	Dinas Perhubungan	2.185.286.186,16	1.903.318.331,94	281.967.854,22	14,81
11	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.771.037.950,86	1.698.881.327,32	72.156.623,54	4,25
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.243.717.216,54	1.037.070.071,61	206.647.144,93	19,93
13	Dinas Pertanian dan Perkebunan	442.193.108,12	392.342.100,00	49.851.008,12	12,71
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	357.607.190,14	368.143.473,47	(10.536.283,33)	(2,86)
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	24.137.350,00	(24.137.350,00)	(100,00)
	Jumlah	**528.702.524.691,82**	**437.535.569.306,49**	**91.166.955.385,33**	**20,84**

5.4.2.1.7.3.2 Beban Penyusutan Bangunan Air Rp49.392.195.544,20

Beban Penyusutan Bangunan Air terealisasi sebesar Rp49.392.195.544,20, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp49.875.089.810,07 mengalami **penurunan** sebesar (Rp482.894.265,87) atau (0,97%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	496.846.594,29	524.166.490,27	(27.319.895,98)	(5,21)
2	Dinas Kesehatan	23.622.633,34	18.563.721,39	5.058.911,95	27,25
3	RSUD Dr. Moewardi	61.842.264,94	61.842.264,93	0,01	0,00
4	RSUD dr. Adyatma, MPH	30.497.400,03	37.578.945,86	(7.081.545,83)	(18,84)
5	RSUD dr. Rehatta	93.292.748,32	106.545.229,61	(13.252.481,29)	(12,44)
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	3.284.300,00	3.284.300,00	-	-
7	RSUD dr. Arif Zainuddin	3.190.525,00	3.190.525,00	-	-
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	35.451.020,83	35.436.329,17	14.691,66	0,04
9	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.100.193.903,24	3.089.980.374,31	10.213.528,93	0,33
10	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	38.213.510.947,71	39.553.829.400,43	(1.340.318.452,72)	(3,39)
11	Satuan Polisi Pamong Praja	5.306.666,67	5.306.666,66	0,01	0,00
12	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.225.000,00	2.225.000,00	-	-
13	Dinas Sosial	77.371.526,72	75.967.916,89	1.403.609,83	1,85
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.254.250,00	104.520,83	1.149.729,17	1.100,00
15	Dinas Ketahanan Pangan	647.500,00	2.020.666,66	(1.373.166,66)	(67,96)
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	237.357.024,82	263.173.466,48	(25.816.441,66)	(9,81)
17	Dinas Perhubungan	216.016.686,72	368.306.668,92	(152.289.982,20)	(41,35)
18	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	5.397.005,00	6.048.482,50	(651.477,50)	(10,77)
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.859.800,00	2.859.800,00	-	-
20	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	415.551.727,23	417.091.444,35	(1.539.717,12)	(0,37)
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.831.451,62	5.831.451,61	0,01	0,00
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	4.991.297.850,51	3.947.563.402,85	1.043.734.447,66	26,44
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	460.037.442,05	427.169.814,66	32.867.627,39	7,69
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	112.055.236,77	109.002.667,80	3.052.568,97	2,80
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	747.965.040,01	747.819.526,07	145.513,94	0,02
26	Sekretariat Daerah	172.622,79	-	172.622,79	100,00
27	Sekretariat DPRD	23.161.758,35	50.501.058,32	(27.339.299,97)	(54,14)
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.884.738,94	156.575,62	4.728.163,32	3.019,73
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.141.666,67	6.141.666,66	0,01	0,00
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14.928.211,63	1.244.017,64	13.684.193,99	1.100,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	2.137.414,58	(2.137.414,58)	(100,00)
	Jumlah	**49.392.195.544,20**	**49.875.089.810,07**	**(482.894.265,87)**	**(0,97)**

5.4.2.1.7.3.3 Beban Penyusutan Instalasi Rp4.524.232.025,42

Beban Penyusutan Instalasi terealisasi sebesar Rp4.524.232.025,42, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp5.533.020.382,19 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.008.788.356,77) atau (18,23%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	426.163.900,86	500.861.454,89	(74.697.554,03)	(14,91)
2	Dinas Kesehatan	118.031.514,73	124.508.362,97	(6.476.848,24)	(5,20)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.430.090.543,19	1.496.445.151,52	(66.354.608,33)	(4,43)
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	12.199.613,75	351.628.769,26	(339.429.155,51)	(96,53)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	538.221.002,89	646.724.698,31	(108.503.695,42)	(16,78)
6	RSUD dr. Rehatta	128.401.189,07	142.994.473,36	(14.593.284,29)	(10,21)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	32.137.933,35	403.282.333,32	(371.144.399,97)	(92,03)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	211.535.230,36	210.603.224,77	932.005,59	0,44
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	177.712.551,94	150.738.422,13	26.974.129,81	17,89
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	34.181.291,92	28.917.863,00	5.263.428,92	18,20
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	16.169.245,83	16.888.745,81	(719.499,98)	(4,26)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	81.546,67	-	81.546,67	100,00
13	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.285.825,00	2.285.825,00	-	-
14	Dinas Sosial	-	305.555,55	(305.555,55)	(100,00)
15	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.593.411,64	22.878.828,34	714.583,30	3,12
16	Dinas Ketahanan Pangan	362.500,00	821.597,22	(459.097,22)	(55,88)
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	49.732.690,32	49.732.690,32	-	-
18	Dinas Perhubungan	285.575.166,95	411.686.782,32	(126.111.615,37)	(30,63)
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.947.104,16	45.947.104,18	(0,02)	(0,00)
20	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	841.645,25	841.645,25	-	-
21	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	6.990.502,80	7.515.148,50	(524.645,70)	(6,98)
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	74.756.894,05	66.567.168,61	8.189.725,44	12,30
23	Dinas Pertanian dan Perkebunan	33.835.791,42	11.129.484,68	22.706.306,74	204,02
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	84.124.775,21	84.027.071,45	97.703,76	0,12
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	725.555.620,95	689.395.354,98	36.160.265,97	5,25
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.847.692,50	1.847.692,50	-	-
27	Sekretariat DPRD	24.376.233,75	24.376.233,75	-	-
28	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	2.296.442,50	(2.296.442,50)	(100,00)
29	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.398.339,86	6.398.339,87	(0,01)	(0,00)
30	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	10.916.411,58	10.916.411,57	0,01	0,00
31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	22.165.855,42	19.315.969,31	2.849.886,11	14,75
32	Badan Penghubung	-	1.141.536,95	(1.141.536,95)	(100,00)
	Jumlah	**4.524.232.025,42**	**5.533.020.382,19**	**(1.008.788.356,77)**	**(18,23)**

5.4.2.1.7.3.4 Beban Penyusutan Jaringan Rp7.890.180.675,92

Beban Penyusutan Jaringan terealisasi sebesar Rp7.890.180.675,92, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.096.434.819,25 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.793.745.856,67 atau 29,42% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	577.474.702,09	583.377.427,19	(5.902.725,10)	(1,01)
2	Dinas Kesehatan	23.179.564,27	29.294.344,64	(6.114.780,37)	(20,87)
3	RSUD Dr. Moewardi	13.322.081,02	13.322.081,02	-	-
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	137.350.932,50	125.629.090,51	11.721.841,99	9,33
5	RSUD dr. Rehatta	62.119.856,32	57.455.091,88	4.664.764,44	8,12
6	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	45.037.275,50	45.037.275,50	-	-
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	533.693,75	-	533.693,75	100,00
8	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	5.554.575.543,83	3.575.522.650,42	1.979.052.893,41	55,35
9	Dinas Sosial	16.666,67	16.666,67	-	-
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	580.920,00	2.828.475,55	(2.247.555,55)	(79,46)
11	Dinas Ketahanan Pangan	2.390.293,35	2.468.906,66	(78.613,31)	(3,18)
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	46.655.160,84	46.655.160,82	0,02	0,00
13	Dinas Perhubungan	518.186.093,72	699.938.993,38	(181.752.899,66)	(25,97)
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.849.585,00	2.849.585,00	-	-
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	143.621,82	143.621,83	(0,01)	(0,00)
16	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	699.231,80	14.131.993,30	(13.432.761,50)	(95,05)
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	417.500,00	417.500,00	-	-
18	Dinas Kelautan dan Perikanan	19.699.784,95	21.933.974,55	(2.234.189,60)	(10,19)
19	Dinas Pertanian dan Perkebunan	31.167.708,30	31.167.708,34	(0,04)	(0,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	26.712.763,29	26.644.409,99	68.353,30	0,26
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	762.507.773,75	762.507.779,59	(5,84)	(0,00)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	6.901.417,50	6.901.417,51	(0,01)	(0,00)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
23	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	36.779.643,75	36.779.643,75	-	-
24	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	15.858.186,90	6.390.346,15	9.467.840,75	148,16
25	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	5.020.675,00	5.020.675,00	-	-
	Jumlah	**7.890.180.675,92**	**6.096.434.819,25**	**1.793.745.856,67**	**29,42**

5.4.2.1.7.4 Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp282.597.775,74

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp282.597.775,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp561.287.466,62 mengalami **penurunan** sebesar (Rp278.689.690,88) atau (49,65%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	282.597.775,74	561.287.466,62	(278.689.690,88)	(49,65)
2	Beban Penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi	-	-	-	-
	Jumlah	**282.597.775,74**	**561.287.466,62**	**(278.689.690,88)**	(49,65)

Realisasi Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar Rp282.597.775,74 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**3.294.389.711,32**
Penambahan		
Reklas ke Aset Lainnya	95.051.100,00	
Total Penambahan		**95.051.100,00**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**3.106.843.035,58**
Beban Daerah		**282.597.775,74**

5.4.2.1.7.4.1 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga Rp282.597.775,74

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga terealisasi sebesar Rp282.597.775,74, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp561.287.466,62 mengalami **penurunan** sebesar (Rp278.689.690,88) atau (49,65%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	256.664.975,74	436.210.766,62	(179.545.790,88)	(41,16)
2	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	3.600.000,00	3.600.000,00	-	-
3	Satuan Polisi Pamong Praja	-	100.043.900,00	(100.043.900,00)	(100,00)
4	Dinas Sosial	1.800.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00
5	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	15.432.800,00	15.432.800,00	-	-
6	Dinas Pertanian dan Perkebunan	5.100.000,00	5.100.000,00	-	-
	Jumlah	**282.597.775,74**	**561.287.466,62**	**(278.689.690,88)**	**(49,65)**

5.4.2.1.7.5 Beban Penyusutan Aset Lainnya Rp384.729.947,52

Beban Penyusutan Aset Lainnya terealisasi sebesar Rp384.729.947,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp431.979.788,80 mengalami **penurunan** sebesar (Rp47.249.841,28) atau (10,94%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa	384.729.947,52	431.979.788,80	(47.249.841,28)	(10,94)
2	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan	-	-	-	-

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
3	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)	-	-	-	-
4	Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur	-	-	-	-
5	Beban Penyusutan Pinjam Pakai	-	-	-	-
	Jumlah	**384.729.947,52**	**431.979.788,80**	**(47.249.841,28)**	(10,94)

Realisasi Beban Penyusutan Aset lainnya sebesar Rp384.729.947,52 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**28.320.000,00**
Penambahan		
Reklas Ke Aset tetap	19.481.214.666,65	
Total Penambahan		**19.481.214.666,65**
Pengurangan		
Reklas Dari Aset Lainnya	129.930.000,00	
Reklas Dari Properti Investasi	-	
Reklas Dari Aset Ekstrakomptabel	-	
Reklas Dari ATB	-	
Koreksi	-	
Total Pengurangan		**129.930.000,00**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**18.994.874.719,13**
Beban Daerah		**384.729.947,52**

5.4.2.1.7.5.1 Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa Rp384.729.947,52

Beban Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa terealisasi sebesar Rp384.729.947,52, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp431.979.788,80 mengalami **penurunan** sebesar (Rp47.249.841,28) atau (10,94%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.920.000,00	1.280.000,00	640.000,00	50,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	337.500,00	(337.500,00)	(100,00)
3	Dinas Sosial	297.000,00	324.000,00	(27.000,00)	(8,33)
4	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	234.911.727,27	243.244.991,11	(8.333.263,84)	(3,43)
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.931.067,58	4.288.437,36	(357.369,78)	(8,33)
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.775.000,00	-	1.775.000,00	100,00
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	141.895.152,67	182.504.860,33	(40.609.707,66)	(22,25)
	Jumlah	**384.729.947,52**	**431.979.788,80**	**(47.249.841,28)**	**(10,94)**

5.4.2.1.7.6 Beban Amortisasi Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud Rp4.409.282.946,79

Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Tidak Berwujud terealisasi sebesar Rp4.409.282.946,79, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.681.936.117,04 mengalami **penurunan** sebesar (Rp272.653.170,25) atau (5,82%) dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Frenchise	63.936.000,00	63.936.000,00	-	-
2	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Cipta	-	-	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Hak Paten	-	-	-	-
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	3.679.637.899,79	4.083.984.045,04	(404.346.145,25)	(9,90)
5	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian	617.166.922,00	534.016.072,00	83.150.850,00	15,57
6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Aset Tak Berwujud Lainnya	48.542.125,00	-	48.542.125,00	100,00

	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
Jumlah	**4.409.282.946,79**	**4.681.936.117,04**	**(272.653.170,25)**	**(5,82)**

Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp4.409.282.946,79 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**36.070.409.125,26**
Penambahan		
Mutasi Keluar	24.560.000,00	
Reklas ke Aset Lainnya	324.981.400,00	
Total Penambahan		**349.541.400,00**
Pengurangan		
Mutasi Masuk	24.560.000,00	
Reklas Dari Aset Tetap	14.000.000,00	
Koreksi	1.906.262.518,40	
Total Pengurangan		**1.944.822.518,40**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**30.065.845.060,07**
Beban Daerah		**4.409.282.946,79**

5.4.2.1.7.6.1 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise Rp63.936.000,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise terealisasi sebesar Rp63.936.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp63.936.000,00 sehingga **tidak mengalami kenaikan/penurunan** dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	RSUD dr. Adyatma, MPH	63.936.000,00	63.936.000,00	-	-
	Jumlah	**63.936.000,00**	**63.936.000,00**	**-**	**-**

5.4.2.1.7.6.2 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Sofware Rp3.679.637.899,79

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software terealisasi sebesar Rp3.679.637.899,79, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp4.083.984.045,04 mengalami **kekurangan** sebesar (Rp404.346.145,25) atau (9,90%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	285.082.960,87	295.039.227,53	(9.956.266,66)	(3,37)
2	Dinas Kesehatan	433.856.620,49	330.119.244,88	103.737.375,61	31,42
3	RSUD Dr. Moewardi	297.788.688,89	281.416.188,89	16.372.500,00	5,82
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	12.976.548,00	90.056.548,00	(77.080.000,00)	(85,59)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	4.000.000,00	4.000.000,00	-	-
6	RSUD dr. Rehatta	330.543.760,00	224.775.843,33	105.767.916,67	47,05
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	45.577.125,00	83.900.000,00	(38.322.875,00)	(45,68)
8	RSUD dr. Arif Zainuddin	-	479.538.081,80	(479.538.081,80)	(100,00)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	7.700.000,00	(7.700.000,00)	(100,00)
10	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	97.301.970,00	93.083.520,00	4.218.450,00	4,53
11	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	64.023.975,00	18.305.150,00	45.718.825,00	249,76
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	191.825.074,19	176.658.616,78	15.166.457,41	8,59
13	Satuan Polisi Pamong Praja	-	37.900.000,00	(37.900.000,00)	(100,00)
14	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.551.282,05	1.596.153,85	4.955.128,20	310,44
15	Dinas Sosial	11.666.666,67	30.000.000,00	(18.333.333,33)	(61,11)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	177.386.706,54	138.458.813,94	38.927.892,60	28,12
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	39.279.629,89	79.612.229,11	(40.332.599,22)	(50,66)
18	Dinas Ketahanan Pangan	76.439.000,00	76.439.000,00	-	-

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	90.361.187,50	89.396.766,67	964.420,83	1,08
20	Dinas Perhubungan	12.194.926,53	32.126.062,50	(19.931.135,97)	(62,04)
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	42.367.040,00	108.841.370,00	(66.474.330,00)	(61,07)
22	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	26.975.630,13	41.319.953,84	(14.344.323,71)	(34,72)
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	32.048.226,26	89.239.204,66	(57.190.978,40)	(64,09)
24	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	241.222.807,74	238.123.349,94	3.099.457,80	1,30
25	Dinas Pertanian dan Perkebunan	18.750.000,00	16.000.000,00	2.750.000,00	17,19
26	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.707.142,86	69.961.322,85	(30.254.179,99)	(43,24)
27	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	-	49.996.600,00	(49.996.600,00)	(100,00)
28	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	38.098.176,95	18.180.629,66	19.917.547,29	109,55
29	Sekretariat Daerah	18.260.408,48	-	18.260.408,48	100,00
30	Sekretariat DPRD	42.838.125,49	71.258.125,49	(28.420.000,00)	(39,88)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.000.000,00	8.250.000,00	750.000,00	9,09
32	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	44.364.744,58	-	44.364.744,58	100,00
33	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	198.460.000,00	310.733.000,00	(112.273.000,00)	(36,13)
34	Badan Kepegawaian Daerah	578.233.190,08	305.411.272,09	272.821.917,99	89,33
35	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	6.514.312,50	67.035.833,33	(60.521.520,83)	(90,28)
36	Badan Riset dan Inovasi Daerah	6.658.833,33	-	6.658.833,33	100,00
37	Badan Penghubung	34.040.960,45	8.000.000,00	26.040.960,45	325,51
38	Inspektorat	65.444.675,00	60.254.500,00	5.190.175,00	8,61
39	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	59.797.504,32	51.257.435,90	8.540.068,42	16,66
	Jumlah	**3.679.637.899,79**	**4.083.984.045,04**	**(404.346.145,25)**	**(9,90)**

5.4.2.1.7.6.3 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Kajian Rp617.166.922,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian terealisasi sebesar Rp617.166.922,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp534.016.072,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp83.150.850,00 atau 15,57 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	579.293.722,00	496.142.872,00	83.150.850,00	16,76
2	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	37.873.200,00	37.873.200,00	-	-
	Jumlah	**617.166.922,00**	**534.016.072,00**	**83.150.850,00**	**15,57**

5.4.2.1.7.6.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp48.542.125,00

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud lainnya terealisasi sebesar Rp48.542.125,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp48.542.125,00 atau 100 % dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3.490.000,00	-	3.490.000,00	100,00
2	Dinas Perhubungan	45.052.125,00	-	45.052.125,00	100,00
	Jumlah	**48.542.125,00**	**-**	**48.542.125,00**	**100,00**

5.4.2.1.7.7 Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain Rp4.584.766.346,68

Beban Penyusutan Aset Lainnya – Aset Lain-Lain terealisasi sebesar Rp4.584.766.346,68, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.179.521.026,37 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.405.245.320,31 atau 110,36% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	-	-	-	-
2	Beban Penyusutan Aset Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	4.584.766.346,68	2.179.521.026,37	2.405.245.320,31	110,36
	Jumlah	**4.584.766.346,68**	**2.179.521.026,37**	**2.405.245.320,31**	110,36

Realisasi Beban Penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp4.584.766.346,68 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**1.023.387.751.844,89**
Penambahan		
Reklas Ke Aset tetap	2.267.341.761,15	
Reklas Pemanfaatan	129.930.000,00	
Penjualan	52.050.874.403,12	
Ganti Rugi	9.555.000,00	
Hibah dan Lain-Lain	6.017.806.979,78	
Koreksi	7.888.103.507,60	
Total Penambahan		**68.363.611.651,65**
Pengurangan		
Reklas Dari Aset Tetap	600.859.080.046,37	
Reklas Dari ATB	324.981.400,00	
Total Pengurangan		**601.184.061.446,37**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**485.982.535.703,49**
Beban Daerah		**4.584.766.346,68**

5.4.2.1.7.7.1 Beban Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah — Rp4.584.766.346,68

Beban Penyusutan Aset yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah terealisasi sebesar Rp4.584.766.346,68, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.179.521.026,37 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.405.245.320,31 atau 110,36% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.350.317,32	11.641.286,99	14.709.030,33	126,35
2	Dinas Kesehatan	1.035.093.054,35	995.808.508,87	39.284.545,48	3,94
3	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	3.201.342.308,73	876.151.800,12	2.325.190.508,61	265,39
4	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	11.999.560,00	11.662.060,00	337.500,00	2,89
5	Dinas Ketahanan Pangan	849.785,02	849.785,02	-	-
6	Dinas Perhubungan	4.970.978,67	-	4.970.978,67	100,00
7	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	13.231.295,82	14.066.346,76	(835.050,94)	(5,94)
8	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.571.667,60	8.571.667,60	-	-
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.384.588,46	8.697.405,12	1.687.183,34	19,40
10	Sekretariat Daerah	53.437.500,00	-	53.437.500,00	100,00
11	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.065.000,00	-	1.065.000,00	100,00
12	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	215.901.540,71	250.503.415,89	(34.601.875,18)	(13,81)
13	Badan Penghubung	1.568.750,00	1.568.750,00	-	-
	Jumlah	**4.584.766.346,68**	**2.179.521.026,37**	**2.405.245.320,31**	**110,36**

5.4.2.1.7.8 Beban Penyusutan Properti Investasi — Rp38.297.422,53

Beban Penyusutan Properti Investasi terealisasi sebesar Rp38.297.422,53, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp38.297.422,53 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan	37.955.096,69	-	37.955.096,69	100,00
2	Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti	342.325,84	-	342.325,84	100,00
	Jumlah	**38.297.422,53**	**-**	**38.297.422,53**	**100,00**

Realisasi Beban Penyusutan Properti Investasi sebesar Rp38.297.422,53 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Saldo Akhir Akumulasi Penyusutan		**20.706.189.977,32**
Pengurangan		
Reklas Dari Aset Tetap	20.667.892.554,79	
Total Pengurangan		**20.667.892.554,79**
Saldo Awal Akumulasi Penyusutan		**-**
Beban Daerah		**38.297.422,53**

5.4.2.1.7.8.1 Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan Rp37.955.096,69

Beban Penyusutan Properti Investasi Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp37.955.096,69, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp37.955.096,69 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Sosial	27.000,00	-	27.000,00	100,00
2	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	21.013.285,72	-	21.013.285,72	100,00
3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	357.369,78	-	357.369,78	100,00
4	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	355.000,00	-	355.000,00	100,00
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	16.202.441,19	-	16.202.441,19	100,00
	Jumlah	**37.955.096,69**	**-**	**37.955.096,69**	**100,00**

5.4.2.1.7.8.2 Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp342.325,84

Beban Penyusutan Properti Investasi Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp342.325,84, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp342.325,84 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	342.325,84	-	342.325,84	100,00
	Jumlah	**342.325,84**	**-**	**342.325,84**	**100,00**

5.4.2.2 BEBAN TRANSFER Rp9.551.437.854.054,00

Beban Transfer terealisasi sebesar Rp9.551.437.854.054,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp9.234.826.599.998,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp316.611.254.056,00 atau 3,43% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil	6.334.544.870.221,00	415.325.328.506,00	223.838.772.797,00	6.526.031.425.930,00	6.381.914.409.945,00	144.117.015.985,00	2,26
2	Beban Bantuan Keuangan	3.025.406.428.124,00	-	-	3.025.406.428.124,00	2.852.912.190.053,00	172.494.238.071,00	6,05
	Jumlah	**9.359.951.298.345,00**	**415.325.328.506,00**	**223.838.772.797,00**	**9.551.437.854.054,00**	**9.234.826.599.998,00**	**316.611.254.056,00**	**3,43**

Realisasi Beban Transfer sebesar Rp9.551.437.854.054,00 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	9.359.951.298.345,00	
Total Belanja Daerah		**9.359.951.298.345,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	415.325.328.506,00	
Total Penambahan		**415.325.328.506,00**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	223.838.772.797,00	

Total Pengurangan **223.838.772.797,00**

Beban Daerah **9.551.437.854.054,00**

5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil Rp6.526.031.425.930,00

Beban Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp6.526.031.425.930,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.381.914.409.945,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp144.117.015.985,00 atau 2,26% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	6.334.544.870.221,00	415.325.328.506,00	223.838.772.797,00	6.526.031.425.930,00	6.381.914.409.945,00	144.117.015.985,00	2,26
	Jumlah	**6.334.544.870.221,00**	**415.325.328.506,00**	**223.838.772.797,00**	**6.526.031.425.930,00**	**6.381.914.409.945,00**	**144.117.015.985,00**	**2,26**

5.4.2.2.1.1 Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa Rp6.526.031.425.930,00

Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa terealisasi sebesar Rp6.526.031.425.930,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp6.381.914.409.945,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp144.117.015.985,00 atau 2,26% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	205.824.764.480,00	13.284.383.848,00	8.345.175.411,00	210.763.972.917,00	209.046.039.681,00	1.717.933.236,00	0,82
2	Kabupaten Kendal	182.743.499.170,00	13.118.005.707,00	6.566.611.452,00	189.294.893.425,00	184.975.882.483,00	4.319.010.942,00	2,33
3	Kabupaten Demak	204.204.249.782,00	13.356.404.423,00	7.675.519.958,00	209.885.134.247,00	204.129.625.828,00	5.755.508.419,00	2,82
4	Kabupaten Grobogan	209.011.181.807,00	12.880.399.943,00	6.590.735.859,00	215.300.845.891,00	208.991.672.336,00	6.309.173.555,00	3,02
5	Kabupaten Pati	233.915.365.918,00	16.451.751.196,00	8.463.774.144,00	241.903.342.970,00	236.562.789.963,00	5.340.553.007,00	2,26
6	Kabupaten Kudus	177.332.887.514,00	12.667.990.191,00	6.074.247.024,00	183.926.630.681,00	179.068.058.680,00	4.858.572.001,00	2,71
7	Kabupaten Jepara	200.149.530.398,00	14.163.777.208,00	6.708.877.571,00	207.604.430.035,00	199.191.327.768,00	8.413.102.267,00	4,22
8	Kabupaten Rembang	126.552.960.032,00	8.613.841.673,00	4.964.880.044,00	130.201.921.661,00	122.914.373.054,00	7.287.548.607,00	5,93
9	Kabupaten Blora	136.360.848.209,00	8.394.489.424,00	4.662.891.138,00	140.092.446.495,00	136.808.859.353,00	3.283.587.142,00	2,40
10	Kabupaten Pekalongan	145.056.178.359,00	8.433.061.835,00	4.617.283.136,00	148.871.957.058,00	143.168.250.316,00	5.703.706.742,00	3,98
11	Kabupaten Batang	139.810.287.894,00	9.277.853.350,00	5.200.725.429,00	143.887.415.815,00	140.577.891.257,00	3.309.524.558,00	2,35
12	Kabupaten Pemalang	191.738.404.378,00	11.807.936.241,00	5.533.815.075,00	198.012.525.544,00	189.909.077.039,00	8.103.448.505,00	4,27
13	Kabupaten Tegal	226.314.945.686,00	14.798.408.069,00	7.649.257.280,00	233.464.096.475,00	225.233.767.744,00	8.230.328.731,00	3,65
14	Kabupaten Brebes	247.112.559.819,00	16.125.644.657,00	7.312.338.169,00	255.925.866.307,00	246.348.244.669,00	9.577.621.638,00	3,89
15	Kabupaten Banyumas	268.279.615.582,00	16.886.079.712,00	10.131.207.243,00	275.034.488.051,00	266.104.173.689,00	8.930.314.362,00	3,36
16	Kabupaten Cilacap	274.488.276.998,00	17.909.368.547,00	9.668.602.444,00	282.729.043.101,00	276.262.430.261,00	6.466.612.840,00	2,34
17	Kabupaten Purbalingga	137.555.419.492,00	7.751.364.405,00	4.111.697.072,00	141.195.086.825,00	135.852.391.649,00	5.342.695.176,00	3,93
18	Kabupaten Banjarnegara	143.349.394.057,00	8.396.532.072,00	4.796.533.331,00	146.949.392.798,00	143.478.171.380,00	3.471.221.418,00	2,42
19	Kabupaten Magelang	198.413.893.632,00	11.453.643.762,00	6.829.784.343,00	203.037.753.051,00	201.980.771.716,00	1.056.981.335,00	0,52
20	Kabupaten Temanggung	125.426.694.912,00	6.862.854.722,00	4.055.574.029,00	128.233.975.605,00	126.285.467.184,00	1.948.508.421,00	1,54
21	Kabupaten Wonosobo	124.196.881.222,00	6.167.940.036,00	3.026.342.507,00	127.338.478.751,00	125.292.084.902,00	2.046.393.849,00	1,63
22	Kabupaten Purworejo	123.330.794.714,00	7.767.172.625,00	3.531.403.303,00	127.566.564.036,00	124.693.963.929,00	2.872.600.107,00	2,30
23	Kabupaten Kebumen	181.816.080.313,00	10.733.320.624,00	6.047.212.575,00	186.502.188.362,00	176.853.178.521,00	9.649.009.841,00	5,46
24	Kabupaten Klaten	222.910.299.938,00	13.969.379.755,00	8.602.274.223,00	228.277.405.470,00	228.444.340.273,00	(166.934.803,00)	(0,07)
25	Kabupaten Boyolali	177.670.667.066,00	11.008.705.337,00	5.974.118.272,00	182.705.254.131,00	178.530.642.116,00	4.174.612.015,00	2,34
26	Kabupaten Sragen	191.330.567.896,00	9.805.958.239,00	6.842.955.429,00	194.293.570.706,00	192.003.765.465,00	2.289.805.241,00	1,19

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
27	Kabupaten Sukoharjo	194.613.756.219,00	14.000.104.048,00	7.492.013.459,00	201.121.846.808,00	196.278.423.014,00	4.843.423.794,00	2,47
28	Kabupaten Karanganyar	186.729.872.109,00	12.265.068.549,00	7.261.739.588,00	191.733.201.070,00	188.274.755.353,00	3.458.445.717,00	1,84
29	Kabupaten Wonogiri	154.333.901.275,00	7.867.799.025,00	5.442.385.543,00	156.759.314.757,00	157.807.702.534,00	(1.048.387.777,00)	(0,66)
30	Kota Semarang	570.096.274.220,00	51.353.262.468,00	25.057.759.540,00	596.391.777.148,00	591.343.271.517,00	5.048.505.631,00	0,85
31	Kota Pekalongan	74.727.559.186,00	4.402.647.632,00	2.575.573.920,00	76.554.632.898,00	74.282.394.044,00	2.272.238.854,00	3,06
32	Kota Surakarta	168.446.634.112,00	12.504.500.963,00	6.772.925.022,00	174.178.210.053,00	175.231.377.428,00	(1.053.167.375,00)	(0,60)
33	Kota Salatiga	68.637.111.128,00	4.416.374.330,00	2.269.455.175,00	70.784.030.283,00	69.218.968.376,00	1.565.061.907,00	2,26
34	Kota Tegal	71.660.821.321,00	4.348.816.029,00	2.411.047.166,00	73.598.590.184,00	71.521.680.830,00	2.076.909.354,00	2,90
35	Kota Magelang	50.402.691.383,00	2.080.487.861,00	572.036.923,00	51.911.142.321,00	55.248.595.593,00	(3.337.453.272,00)	(6,04)
	Jumlah	**6.334.544.870.221,00**	**415.325.328.506,00**	**223.838.772.797,00**	**6.526.031.425.930,00**	**6.381.914.409.945,00**	**144.117.015.985,00**	**2,26**

Realisasi Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp6.526.031.425.930,00 didalamnya terdapat Utang Belanja Bagi Hasil senilai Rp415.325.328.506,00 merupakan kurang salur Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/ Kota pada tahun 2024 yang akan dibayarkan pada tanggal 16 Mei 2025 dengan Nomor SP2D 33600029, dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Belanja Daerah		
Belanja Daerah (APBD)	6.334.544.870.221,00	
Total Belanja Daerah		**6.334.544.870.221,00**
Penambahan		
Saldo Akhir Utang	415.325.328.506,00	
Total Penambahan		**415.325.328.506,00**
Pengurangan		
Saldo Awal Utang	223.838.772.797,00	
Total Pengurangan		**223.838.772.797,00**
Beban Daerah		**6.526.031.425.930,00**

5.4.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Rp3.025.406.428.124,00

Beban Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp3.025.406.428.124,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.852.912.190.053,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp172.494.238.071,00 atau 6,05% dengan rincian sebagai berikut :

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	-	-
3	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	1.045.686.246.124,00	-	-	1.045.686.246.124,00	653.134.590.053,00	392.551.656.071,00	60,10
4	Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	-	-
5	Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	1.979.720.182.000,00	-	-	1.979.720.182.000,00	2.199.777.600.000,00	(220.057.418.000,00)	(10,00)
	Jumlah	**3.025.406.428.124,00**	**-**	**-**	**3.025.406.428.124,00**	**2.852.912.190.053,00**	**172.494.238.071,00**	**6,05**

5.4.2.2.2.1 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota Rp1.045.686.246.124,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp1.045.686.246.124,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp653.134.590.053,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp392.551.656.071,00 atau 60,10% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	38.569.432.136,00	-	-	38.569.432.136,00	31.956.785.860,00	6.612.646.276,00	20,69
2	Kabupaten Kendal	20.498.405.846,00	-	-	20.498.405.846,00	10.940.858.551,00	9.557.547.295,00	87,36
3	Kabupaten Demak	46.206.818.600,00	-	-	46.206.818.600,00	53.390.621.000,00	(7.183.802.400,00)	(13,46)
4	Kabupaten Grobogan	24.234.190.000,00	-	-	24.234.190.000,00	42.487.767.192,00	(18.253.577.192,00)	(42,96)
5	Kabupaten Pati	28.670.690.373,00	-	-	28.670.690.373,00	11.236.450.229,00	17.434.240.144,00	155,16
6	Kabupaten Kudus	15.539.244.500,00	-	-	15.539.244.500,00	12.173.821.000,00	3.365.423.500,00	27,64
7	Kabupaten Jepara	45.392.524.634,00	-	-	45.392.524.634,00	9.582.952.000,00	35.809.572.634,00	373,68
8	Kabupaten Rembang	44.248.149.500,00	-	-	44.248.149.500,00	10.676.632.000,00	33.571.517.500,00	314,44
9	Kabupaten Blora	57.697.584.762,00	-	-	57.697.584.762,00	29.624.480.000,00	28.073.104.762,00	94,76
10	Kabupaten Pekalongan	38.476.758.851,00	-	-	38.476.758.851,00	21.751.909.002,00	16.724.849.849,00	76,89
11	Kabupaten Batang	6.096.409.000,00	-	-	6.096.409.000,00	11.067.414.500,00	(4.971.005.500,00)	(44,92)
12	Kabupaten Pemalang	19.042.046.340,00	-	-	19.042.046.340,00	9.158.319.783,00	9.883.726.557,00	107,92
13	Kabupaten Tegal	23.182.098.500,00	-	-	23.182.098.500,00	10.421.353.100,00	12.760.745.400,00	122,45
14	Kabupaten Brebes	55.449.287.170,00	-	-	55.449.287.170,00	16.348.003.046,00	39.101.284.124,00	239,18
15	Kabupaten Banyumas	21.590.289.925,00	-	-	21.590.289.925,00	29.442.448.395,00	(7.852.158.470,00)	(26,67)
16	Kabupaten Cilacap	17.658.621.000,00	-	-	17.658.621.000,00	10.692.257.939,00	6.966.363.061,00	65,15
17	Kabupaten Purbalingga	7.112.788.000,00	-	-	7.112.788.000,00	13.301.826.000,00	(6.189.038.000,00)	(46,53)
18	Kabupaten Banjarnegara	53.085.735.000,00	-	-	53.085.735.000,00	10.599.236.349,00	42.486.498.651,00	400,84
19	Kabupaten Magelang	37.894.514.652,00	-	-	37.894.514.652,00	13.629.261.000,00	24.265.253.652,00	178,04
20	Kabupaten Temanggung	59.521.364.000,00	-	-	59.521.364.000,00	12.674.107.503,00	46.847.256.497,00	369,63
21	Kabupaten Wonosobo	57.545.230.500,00	-	-	57.545.230.500,00	22.101.445.223,00	35.443.785.277,00	160,37
22	Kabupaten Purworejo	22.978.010.200,00	-	-	22.978.010.200,00	19.898.471.000,00	3.079.539.200,00	15,48
23	Kabupaten Kebumen	86.528.970.500,00	-	-	86.528.970.500,00	10.639.281.000,00	75.889.689.500,00	713,30
24	Kabupaten Klaten	31.710.767.500,00	-	-	31.710.767.500,00	10.927.428.243,00	20.783.339.257,00	190,19
25	Kabupaten Boyolali	6.370.723.500,00	-	-	6.370.723.500,00	21.412.280.930,00	(15.041.557.430,00)	(70,25)
26	Kabupaten Sragen	18.197.132.500,00	-	-	18.197.132.500,00	14.622.189.000,00	3.574.943.500,00	24,45
27	Kabupaten Sukoharjo	17.983.398.000,00	-	-	17.983.398.000,00	8.210.140.200,00	9.773.257.800,00	119,04
28	Kabupaten Karanganyar	64.728.188.000,00	-	-	64.728.188.000,00	11.561.720.000,00	53.166.468.000,00	459,85
29	Kabupaten Wonogiri	26.695.463.000,00	-	-	26.695.463.000,00	57.810.503.000,00	(31.115.040.000,00)	(53,82)
30	Kota Semarang	8.966.172.320,00	-	-	8.966.172.320,00	31.188.960.908,00	(22.222.788.588,00)	(71,25)
31	Kota Pekalongan	20.387.693.500,00	-	-	20.387.693.500,00	22.461.424.600,00	(2.073.731.100,00)	(9,23)
32	Kota Surakarta	3.432.607.500,00	-	-	3.432.607.500,00	31.461.311.000,00	(28.028.703.500,00)	(89,09)
33	Kota Salatiga	9.659.516.350,00	-	-	9.659.516.350,00	6.494.279.000,00	3.165.237.350,00	48,74
34	Kota Tegal	6.730.666.465,00	-	-	6.730.666.465,00	6.595.608.700,00	135.057.765,00	2,05
35	Kota Magelang	3.604.753.500,00	-	-	3.604.753.500,00	6.593.042.800,00	(2.988.289.300,00)	(45,32)
	Jumlah	**1.045.686.246.124,00**	**-**	**-**	**1.045.686.246.124,00**	**653.134.590.053,00**	**392.551.656.071,00**	**60,10**

5.4.2.2.2.2 Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa Rp1.979.720.182.000,00

Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa terealisasi sebesar Rp1.979.720.182.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.199.777.600.000,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp220.057.418.000,00) atau (10,00%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Kabupaten Semarang	37.180.000.000,00	-	-	37.180.000.000,00	111.785.000.000,00	(74.605.000.000,00)	(66,74)
2	Kabupaten Kendal	73.720.000.000,00	-	-	73.720.000.000,00	81.970.000.000,00	(8.250.000.000,00)	(10,06)
3	Kabupaten Demak	55.058.750.000,00	-	-	55.058.750.000,00	45.028.000.000,00	10.030.750.000,00	22,28
4	Kabupaten Grobogan	140.331.378.000,00	-	-	140.331.378.000,00	149.675.000.000,00	(9.343.622.000,00)	(6,24)
5	Kabupaten Pati	180.349.330.000,00	-	-	180.349.330.000,00	189.900.000.000,00	(9.550.670.000,00)	(5,03)
6	Kabupaten Kudus	15.980.000.000,00	-	-	15.980.000.000,00	28.540.000.000,00	(12.560.000.000,00)	(44,01)
7	Kabupaten Jepara	62.825.000.000,00	-	-	62.825.000.000,00	127.905.000.000,00	(65.080.000.000,00)	(50,88)
8	Kabupaten Rembang	27.327.500.000,00	-	-	27.327.500.000,00	37.580.000.000,00	(10.252.500.000,00)	(27,28)
9	Kabupaten Blora	82.083.000.000,00	-	-	82.083.000.000,00	84.169.000.000,00	(2.086.000.000,00)	(2,48)
10	Kabupaten Pekalongan	40.882.300.000,00	-	-	40.882.300.000,00	39.837.000.000,00	1.045.300.000,00	2,62
11	Kabupaten Batang	46.335.000.000,00	-	-	46.335.000.000,00	61.448.000.000,00	(15.113.000.000,00)	(24,59)
12	Kabupaten Pemalang	83.867.250.000,00	-	-	83.867.250.000,00	66.418.000.000,00	17.449.250.000,00	26,27
13	Kabupaten Tegal	51.105.000.000,00	-	-	51.105.000.000,00	57.000.000.000,00	(5.895.000.000,00)	(10,34)
14	Kabupaten Brebes	106.057.500.000,00	-	-	106.057.500.000,00	111.415.000.000,00	(5.357.500.000,00)	(4,81)
15	Kabupaten Banyumas	74.082.500.000,00	-	-	74.082.500.000,00	87.505.000.000,00	(13.422.500.000,00)	(15,34)
16	Kabupaten Cilacap	48.992.500.000,00	-	-	48.992.500.000,00	51.590.000.000,00	(2.597.500.000,00)	(5,03)
17	Kabupaten Purbalingga	52.868.750.000,00	-	-	52.868.750.000,00	53.485.000.000,00	(616.250.000,00)	(1,15)
18	Kabupaten Banjarnegara	55.307.000.000,00	-	-	55.307.000.000,00	61.185.000.000,00	(5.878.000.000,00)	(9,61)
19	Kabupaten Magelang	95.985.345.000,00	-	-	95.985.345.000,00	83.904.100.000,00	12.081.245.000,00	14,40
20	Kabupaten Temanggung	52.180.000.000,00	-	-	52.180.000.000,00	70.827.500.000,00	(18.647.500.000,00)	(26,33)
21	Kabupaten Wonosobo	94.566.250.000,00	-	-	94.566.250.000,00	83.800.000.000,00	10.766.250.000,00	12,85
22	Kabupaten Purworejo	35.935.751.000,00	-	-	35.935.751.000,00	49.931.000.000,00	(13.995.249.000,00)	(28,03)
23	Kabupaten Kebumen	47.327.500.000,00	-	-	47.327.500.000,00	48.330.000.000,00	(1.002.500.000,00)	(2,07)
24	Kabupaten Klaten	104.925.000.000,00	-	-	104.925.000.000,00	79.145.000.000,00	25.780.000.000,00	32,57
25	Kabupaten Boyolali	20.855.000.000,00	-	-	20.855.000.000,00	63.840.000.000,00	(42.985.000.000,00)	(67,33)
26	Kabupaten Sragen	51.103.750.000,00	-	-	51.103.750.000,00	64.330.000.000,00	(13.226.250.000,00)	(20,56)
27	Kabupaten Sukoharjo	69.680.000.000,00	-	-	69.680.000.000,00	54.695.000.000,00	14.985.000.000,00	27,40
28	Kabupaten Karanganyar	127.715.578.000,00	-	-	127.715.578.000,00	105.090.000.000,00	22.625.578.000,00	21,53
29	Kabupaten Wonogiri	45.093.250.000,00	-	-	45.093.250.000,00	49.450.000.000,00	(4.356.750.000,00)	(8,81)
	Jumlah	**1.979.720.182.000,00**	**-**	**-**	**1.979.720.182.000,00**	**2.199.777.600.000,00**	**(220.057.418.000,00)**	**(10,00)**

5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (Rp64.047.771.553,77)

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terealisasi defisit sebesar (Rp64.047.771.553,77) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp77.731.498.723,65) mengalami **penurunan** sebesar Rp13.683.727.169,88 atau (17,60%) dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Non Operasional	149.081.468.027,08	3.757.382.892,07	145.324.085.135,01	3.867,69
2	Defisit Non Operasional	213.129.239.580,85	81.488.881.615,72	131.640.357.965,13	161,54
	Jumlah	**(64.047.771.553,77)**	**(77.731.498.723,65)**	**13.683.727.169,88**	**(17,60)**

Realisasi Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional sebesar (Rp64.047.771.553,77) dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan	**Referensi**		
Penyisihan Piutang Awal	CALK Neraca 5.3.1.1.10	27.679.374.113,93	
Penjualan Aset Lainnya	KK Aset	(54.411.398.374,00)	
Surplus Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	KK Penyertaan Modal	146.735.702.796,21	
Defisit Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	KK Penyertaan Modal	(208.021.353.451,31)	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	KK Penyusutan	(24.200.383,33)	
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	KK Penyusutan	5.474.010.858,24	
Aset Dihapuskan	KK Aset	(4.247.729.333,00)	
TGR	KK Aset	(9.555.000,00)	
Total Penambahan			**(86.825.148.773,26)**
Pengurangan			
Penyisihan Piutang Akhir	CALK Neraca 5.3.1.1.10	24.493.877.960,07	
Koreksi Penyisihan Piutang	KK Piutang	265.829.792,00	
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	CALK Neraca 5.3.1.1.2 Nota Piutang Pajak	667.878.000,00	
Penyusutan Penjualan Aset Lainnya	KK Penyusutan	(52.050.874.403,12)	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	KK Penyusutan	5.380.033.989,23	
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	KK Penyusutan	(1.838.224,67)	
Penyusutan Aset Tetap Dihapuskan	KK Penyusutan	(1.522.729.333,00)	
Penyusutan TGR	KK Penyusutan	(9.555.000,00)	
Total Pengurangan			**(22.777.377.219,49)**
Beban Daerah			**(64.047.771.553,77)**

5.4.3.1 SURPLUS NON OPERASIONAL LAINNYA **Rp149.081.468.027,08**

Surplus Non Operasional terealisasi sebesar Rp149.081.468.027,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.757.382.892,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp145.324.085.135,01 atau 3.867,69% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	-	-	-	-
2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	149.081.468.027,08	3.757.382.892,07	145.324.085.135,01	3.867,69
	Jumlah	**149.081.468.027,08**	**3.757.382.892,07**	**145.324.085.135,01**	**3.867,69**

Realisasi Surplus Non Operasional Lainnya sebesar Rp149.081.468.027,08 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Penyisihan Piutang Awal	27.679.374.113,93	
Surplus Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	146.735.702.796,21	
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	5.474.010.858,24	
Total Penambahan		**179.889.087.768,38**
Pengurangan		
Penyisihan Piutang Akhir	24.493.877.960,07	
Koreksi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	265.829.792,00	
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	667.878.000,00	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	5.380.033.989,23	
Penyusutan TGR	-	
Total Pengurangan		**30.807.619.741,30**
Beban Daerah		**149.081.468.027,08**

5.4.3.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp149.081.468.027,08

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp149.081.468.027,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.757.382.892,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp145.324.085.135,01 atau 3.867,69% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Surplus dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	149.081.468.027,08	3.757.382.892,07	145.324.085.135,01	3.867,69
	Jumlah	**149.081.468.027,08**	**3.757.382.892,07**	**145.324.085.135,01**	**3.867,69**

Realisasi Surplus dari kegiatan Non Operasional lainnya-LO sebesar Rp149.081.468.027,08 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Penyisihan Piutang Awal	27.679.374.113,93	
Surplus Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	146.735.702.796,21	
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	5.474.010.858,24	
Total Penambahan		**179.889.087.768,38**
Pengurangan		
Penyisihan Piutang Akhir	24.493.877.960,07	
Koreksi Kurang Penyisihan Piutang Tahun Sebelumnya	265.829.792,00	
Penyisihan Piutang yang dihapuskan dan kadaluarsa	667.878.000,00	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	5.380.033.989,23	
Total Pengurangan		**30.807.619.741,30**
Beban Daerah		**149.081.468.027,08**

5.4.3.1.1.1 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Rp149.081.468.027,08

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp149.081.468.027,08, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.757.382.892,07 mengalami **kenaikan** sebesar Rp145.324.085.135,01 atau 3.867,69% dengan rincian sebagai berikut:

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	93.976.869,01	121.868.424,20	(27.891.555,19)	(22,89)
2	Dinas Kesehatan	-	659.292,18	(659.292,18)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	1.810.484,01	208.647.124,97	(206.836.640,96)	(99,13)

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
4	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	-	614.830,41	(614.830,41)	(100,00)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	77.397.544,09	(77.397.544,09)	(100,00)
6	RSUD dr. Rehatta	1.188.479,39	2.502.572,32	(1.314.092,93)	(52,51)
7	RSUD dr. Arif Zainuddin	936.403.884,26	145.793.892,68	790.609.991,58	542,28
8	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	20.547,95	35.161.130,22	(35.140.582,27)	(99,94)
9	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	10.033,75	248.124,09	(238.090,34)	(95,96)
10	Dinas Sosial	-	68.011.656,89	(68.011.656,89)	(100,00)
11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	8.744.909,72	(8.744.909,72)	(100,00)
12	Dinas Ketahanan Pangan	-	96.859.885,97	(96.859.885,97)	(100,00)
13	Dinas Perhubungan	-	515.702.465,96	(515.702.465,96)	(100,00)
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	10.594.950,62	(10.594.950,62)	(100,00)
15	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	1.247.627.232,50	2.271.727.948,75	(1.024.100.716,25)	(45,08)
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	146.800.430.496,21	192.848.139,00	146.607.582.357,21	76.022,30
	Jumlah	**149.081.468.027,08**	**3.757.382.892,07**	**145.324.085.135,01**	**3.867,69**

5.4.3.2 DEFISIT NON OPERASIONAL LAINNYA Rp213.129.239.580,85

Defisit Non Operasional terealisasi sebesar Rp213.129.239.580,85, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp81.488.881.615,72 mengalami **kenaikan** sebesar Rp131.640.357.965,13 atau 161,54% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 Rp	2023 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp	Tren %
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	5.085.523.970,88	1.684.958.561,87	3.400.565.409,01	201,82
2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	-	-	-	-
3	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya – LO	208.043.715.609,97	79.803.923.053,85	128.239.792.556,12	160,69
	Jumlah	**213.129.239.580,85**	**81.488.881.615,72**	**131.640.357.965,13**	**161,54**

Defisit Non Operasional Lainnya sebesar Rp213.129.239.580,85 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Penjualan Aset Lainnya	54.411.398.374,00	
Defisit Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	208.021.353.451,31	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	24.200.383,33	
Aset Dihapuskan	4.247.729.333,00	
TGR	9.555.000,00	
Total Penambahan		**266.714.236.541,64**
Pengurangan		
Penyusutan Penjualan Aset Lainnya	52.050.874.403,12	
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	1.838.224,67	
Penyusutan Aset Tetap Dihapuskan	1.522.729.333,00	
Penyusutan TGR	9.555.000,00	
Total Pengurangan		**53.584.996.960,79**
Beban Daerah		**213.129.239.580,85**

5.4.3.2.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO Rp5.085.523.970,88

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO terealisasi sebesar Rp5.085.523.970,88, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.684.958.561,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.400.565.409,01 atau 201,82% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.360.523.970,88	1.632.521.861,87	728.002.109,01	44,59
2	Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	2.725.000.000,00	52.436.700,00	2.672.563.300,00	5.096,74
	Jumlah	**5.085.523.970,88**	**1.684.958.561,87**	**3.400.565.409,01**	**201,82**

5.4.3.2.1.1 Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO Rp2.360.523.970,88

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO terealisasi sebesar Rp2.360.523.970,88, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.632.521.861,87 mengalami **kenaikan** sebesar Rp728.002.109,01 atau 44,59% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	470.054.749,74	31.082.486,67	438.972.263,07	1.412,28
2	RSUD Dr. Moewardi	194.892.078,33	57.176.990,00	137.715.088,33	240,86
3	RSUD dr. Adyatma, MPH	268.718.992,67	-	268.718.992,67	100,00
4	RSUD dr. Rehatta	24.744.250,00	-	24.744.250,00	100,00
5	RSUD dr. Arif Zainuddin	-	510.000,00	(510.000,00)	(100,00)
6	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	4.222.356,79	-	4.222.356,79	100,00
7	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	4.019.166,67	-	4.019.166,67	100,00
8	Dinas Perhubungan	452.296.882,97	-	452.296.882,97	100,00
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	577.552.140,00	1.309.301.450,00	(731.749.310,00)	(55,89)
10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	3.576.152,71		3.576.152,71	100,00
11	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	126.315.708,33	(126.315.708,33)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	329.531.250,00	559.300,00	328.971.950,00	58.818,51
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	73.655.000,00	(73.655.000,00)	(100,00)
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	33.920.926,87	(33.920.926,87)	(100,00)
15	Badan Perhubungan	30.915.951,00	-	30.915.951,00	100,00
	Jumlah	**2.360.523.970,88**	**1.632.521.861,87**	**728.002.109,01**	**44,59**

Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp2.360.523.970,88 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Penjualan Aset Lainnya	54.411.398.374,00	
Total Penambahan		**54.411.398.374,00**
Pengurangan		
Penyusutan Penjualan Aset Lainnya	52.050.874.403,12	
Total Pengurangan		**52.050.874.403,12**
Beban Daerah		**2.360.523.970,88**

5.4.3.2.1.2 Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan - LO Rp2.725.000.000,00

Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO terealisasi sebesar Rp2.725.000.000,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp52.436.700,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.672.563.300,00 atau 5.096,74% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	2.725.000.000	-	2.725.000.000,00	100,00
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	1.050.000,00	(1.050.000,00)	(100,00)
3	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	-	39.512.500,00	(39.512.500,00)	(100,00)
4	Badan Penghubung	-	11.874.200,00	(11.874.200,00)	(100,00)
	Jumlah	**2.725.000.000,00**	**52.436.700,00**	**2.672.563.300,00**	**5.096,74**

Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO sebesar Rp2.725.000.000,00 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
TGR	4.247.729.333,00	
Total Penambahan		**4.247.729.333,00**

Pengurangan		
Penyusutan Aset Tetap Dihapuskan	1.522.729.333,00	
Total Pengurangan		**1.522.729.333,00**
Beban Daerah		**2.725.000.000,00**

5.4.3.2.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Rp208.043.715.609,97

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp208.043.715.609,97, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.803.923.053,85 mengalami **kenaikan** sebesar Rp128.239.792.556,12 atau 160,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasi Lainnya - LO	208.043.715.609,97	79.803.923.053,85	128.239.792.556,12	160,69
	Jumlah	**208.043.715.609,97**	**79.803.923.053,85**	**128.239.792.556,12**	**160,69**

5.4.3.2.2.1 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp208.043.715.609,97

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO terealisasi sebesar Rp208.043.715.609,97, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp79.803.923.053,85 mengalami **kenaikan** sebesar Rp128.239.792.556,12 atau 160,69% dengan rincian sebagai berikut :

		2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	14.000.000,00	-	14.000.000,00	100,00
2	Dinas Kesehatan	-	131.043.388,23	(131.043.388,23)	(100,00)
3	RSUD Dr. Moewardi	-	7.725.000,00	(7.725.000,00)	(100,00)
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	280.078.893,42	(280.078.893,42)	(100,00)
5	RSUD dr. Adyatma, MPH	-	4.109.796.220,74	(4.109.796.220,74)	(100,00)
6	RSUD dr. Rehatta	-	442.411.058,10	(442.411.058,10)	(100,00)
7	RSJD Dr. RM Soedjarwadi	-	21.212.881,66	(21.212.881,66)	(100,00)
8	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	-	10.931.250,00	(10.931.250,00)	(100,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	7.352.898,66	-	7.352.898,66	100,00
10	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	1.009.260,00	-	1.009.260,00	100,00
11	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	208.021.353.451,31	74.787.072.231,84	133.234.281.219,47	178,15
12	Badan Kepegawaian Daerah	-	4.390.000,00	(4.390.000,00)	(100,00)
13	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	-	9.262.129,86	(9.262.129,86)	(100,00)
		208.043.715.609,97	**79.803.923.053,85**	**128.239.792.556,12**	**160,69**

Realisasi Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp208.043.715.609,97 dapat dijelaskan dengan perhitungan sebagai berikut :

Penambahan		
Defisit Akibat Penyesuaian Perlakuan Investasi	208.021.353.451,31	
Reklas Penyusutan Dari Aset Tetap	24.200.383,33	
TGR	9.555.000,00	
Total Penambahan		**208.055.108.834,64**
Pengurangan		
Reklas Penyusutan Ke Aset Tetap	1.838.224,67	
Penyusutan TGR	9.555.000,00	
Total Pengurangan		**11.393.224,67**
Beban Daerah		**208.043.715.609,97**

5.4.4 POS LUAR BIASA (Rp10.225.800.500,00)

Pos Luar Biasa terealisasi sebesar (Rp10.225.800.500,00), apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp740.000.000,00) mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.485.800.500,00 atau (1.281,86%) dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Pendapatan Luar Biasa	-	-	-	-	-	-	-
2	Beban Luar Biasa	10.225.800.500,00	-	-	10.225.800.500,00	740.000.000,00	9.485.800.500,00	1.281,86
	Jumlah	**(10.225.800.500,00)**	**-**	**-**	**(10.225.800.500,00)**	**(740.000.000,00)**	**9.485.800.500,00**	**(1.281,86)**

5.4.4.1 BEBAN LUAR BIASA **Rp10.225.800.500,00**

Beban Luar Biasa bersumber dari Belanja Tidak Terduga terealisasi sebesar Rp10.225.800.500,00, apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp740.000.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.485.800.500,00 atau 1.281,86% dengan rincian sebagai berikut:

		LRA 2024 (Rp)	MUTASI TAMBAH (Rp)	MUTASI KURANG (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	Tren %
1	Beban Tak Terduga	10.225.800.500,00	-		10.225.800.500,00	740.000.000,00	9.485.800.500,00	1.281,86
	Jumlah	**10.225.800.500,00**	**-**	**-**	**10.225.800.500,00**	**740.000.000,00**	**9.485.800.500,00**	**1.281,86**

5.5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah serta saldo kas pada awal maupun akhir periode anggaran. Arus Kas dalam Laporan Arus Kas diklasifikasikan berdasarkan Arus Kas dari Aktivitas Operasi, Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan, Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dan Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun Anggaran 2024 dan saldo kas pada tanggal 31 Desember 2024.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi **Rp922.599.967.593,00**

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp922.599.967.593,00, merupakan indikator yang menunjukan kemampuan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Arus Masuk Kas	26.376.642.368.402,00	25.367.397.494.217,00
2.	Arus Keluar Kas	25.454.042.400.809,00	24.005.478.429.484,00
	Jumlah	**922.599.967.593,00**	**1.361.919.064.733,00**

5.5.1.1. Arus Masuk Kas **Rp26.376.642.368.402,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp26.376.642.368.402,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp25.367.397.494.217,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	14.210.241.533.541,00	13.976.642.716.351,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.318.821.514.818,00	139.377.038.536,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	687.813.166.201,00	638.482.406.528,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	431.983.440.927,00	2.255.671.197.133,00
5	Dana Bagi Hasil Pajak	889.020.058.000,00	923.636.245.991,00
6	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	7.212.510.000,00	9.475.277.000,00
7	Dana Alokasi Umum	3.819.010.791.028,00	3.558.428.755.500,00
8	Dana Alokasi Khusus	3.948.197.939.767,00	3.700.189.862.933,00
9	Dana Insentif Daerah	-	87.197.945.000,00
10	Insentif Fiskal	37.997.568.000,00	-
11	Pendapatan Hibah	25.600.169.638,00	77.972.123.308,00
12	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	743.676.482,00	323.925.937,00
	Jumlah	**26.376.642.368.402,00**	**25.367.397.494.217,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tahun 2024 sebesar Rp26.376.642.368.402,00 sedangkan total pada LRA tahun 2024 (5.1.1) sebesar Rp26.378.719.626.419,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp2.077.258.017,00. Perbedaan tersebut terjadi karena pada total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tidak termasuk pendapatan yang termasuk dalam arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp2.077.258.017,00 (5.5.2.1).

5.5.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah Rp14.210.241.533.541,00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Pajak Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp14.210.241.533.541,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp13.976.642.716.351,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.474.932.909.600,00	5.509.907.492.075,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.068.323.586.500,00	2.963.924.066.000,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.693.880.376.743,00	2.667.596.623.023,00
4	Pajak Air Permukaan	18.993.373.282,00	17.054.441.424,00
5	Pajak Rokok	2.954.059.323.916,00	2.818.160.093.829,00
6	Pajak Alat Berat (PAB)	51.963.500,00	-
	Jumlah	**14.210.241.533.541,00**	**13.976.642.716.351,00**

5.5.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah Rp2.318.821.514.818,00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Retribusi Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.318.821.514.818,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp139.377.038.536,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	2.217.602.631.575,00	27.421.308.380,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	2.051.144.000,00	-
3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	-	334.284.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pendidikan	-	459.900.000,00
5	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.284.681.535,00	64.823.782.552,00
6	Retribusi Tempat Pelelangan	92.042.000,00	224.497.700,00
7	Retribusi Terminal	315.420.000,00	4.213.857.700,00
8	Retribusi Tempat Khusus Parkir	5.160.417.195,00	-
9	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	7.927.263.000,00	6.710.588.000,00
10	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	11.368.920.000,00	10.434.792.000,00
11	Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga	2.266.141.000,00	820.729.500,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	15.346.487.178,00	19.821.728.204,00
13	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	-	355.525.000,00
14	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	-	3.756.045.500,00
15	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	6.406.367.335,00	-
	Jumlah	**2.318.821.514.818,00**	**139.377.038.536,00**

5.5.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan Rp687.813.166.201,00

Arus Masuk Kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp687.813.166.201,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2023 sebesar Rp638.482.406.528,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagian Laba PT Jateng Agro Berdikari	1.668.816.220,00	5.760.346.077,00
2	Bagian Laba PT BPD Jateng	550.244.937.092,00	503.559.988.019,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	Bagian Laba PT BPR BKK (PERSERODA) Se-Jawa Tengah	70.945.400.423,00	75.310.384.182,00
4	Bagian Laba PT BPR BKK Jateng (Perseroda)	7.444.261.200,00	-
5	Bagian Laba PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda)	10.715.302.586,00	8.814.162.508,00
6	Bagian Laba PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma	1.839.800.755,00	743.957.001,00
7	Bagian Laba PT Asuransi Bangun Askrida	-	3.513.923.270,00
8	Bagian Laba PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah	3.878.979.438,00	2.386.529.141,00
9	Bagian Laba PT Jamkrida	6.978.397.022,00	5.568.231.413,00
10	Bagian Laba PT Jateng Petro Energi	34.097.271.465,00	32.824.884.917,00
	Jumlah	**687.813.166.201,00**	**638.482.406.528,00**

5.5.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah — Rp431.983.440.927,00

Arus Masuk Kas dari Lain-Lain PAD yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp431.983.440.927,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2023 sebesar Rp2.255.671.197.133,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	411.000,00	14.497.280,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.531.327.437,00	2.064.905.450,00
3	Penerimaan Jasa Giro	18.876.876.300,00	16.845.617.920,00
4	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	726.650,00
5	Penerimaan Bunga	32.911.785.082,00	75.671.391.502,00
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.800.000,00	3.666.000,00
7	Penerimaan Komisi, Potongan, Atau Bentuk Lain	67.056.903.649,00	61.400.812.404,00
8	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.642.694.739,00	2.029.659.646,00
9	Pendapatan Denda Pajak	241.621.801.355,00	131.192.364.953,00
10	Pendapatan Denda Retribusi	62.417.887,00	185.395.280,00
11	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	474.991.000,00	60.900.000,00
12	Pendapatan dari Pengembalian	2.979.350.614,00	1.173.105.480,00
13	Pendapatan BLUD	62.793.535.998,00	1.965.028.154.568,00
14	Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	2.545.866,00	-
15	Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/kontrak	27.000.000,00	-
	Jumlah	**431.983.440.927,00**	**2.255.671.197.133,00**

5.5.1.1.5. Dana Bagi Hasil Pajak — Rp889.020.058.000,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp889.020.058.000,00 dan untuk periode yang sama pada Tahun 2023 sebesar Rp923.636.245.991,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	42.401.279.000,00	36.474.750.000,00
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25 & 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21	528.584.330.000,00	565.211.540.991,00
3	Bagi Hasil dari Cukai Tembakau	318.034.449.000,00	321.949.955.000,00
	Jumlah	**889.020.058.000,00**	**923.636.245.991,00**

5.5.1.1.6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Rp7.212.510.000,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.212.510.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp9.475.277.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	3.875.740.000,00	5.930.332.000,00
2	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land Rent)	131.523.000,00	61.311.000,00
3	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (Royalti)	44.000,00	-
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	1.000.329.000,00	516.127.000,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	1.744.962.000,00	2.730.093.000,00
6	Bagi Hasil dari Panas Bumi	459.912.000,00	237.414.000,00
	Jumlah	**7.212.510.000,00**	**9.475.277.000,00**

5.5.1.1.7. Dana Alokasi Umum Rp3.819.010.791.028,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Umum periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.819.010.791.028,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp3.558.428.755.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dana Alokasi Umum	3.550.426.222.000,00	3.279.779.737.500,00
2	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	62.181.181.028,00	278.649.018.000,00
3	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	187.324.934.000,00	-
4	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	19.078.454.000,00	-
	Jumlah	**3.819.010.791.028,00**	**3.558.428.755.500,00**

5.5.1.1.8. Dana Alokasi Khusus Rp3.948.197.939.767,00

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Alokasi Khusus periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.948.197.939.767,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp3.700.189.862.933,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	**Dana Alokasi Khusus Fisik**	**473.940.472.839,00**	**404.100.292.842,00**
-	DAK Bidang Pendidikan	264.965.344.449,00	227.044.630.857,00
-	DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah	14.939.649.372,00	-
-	DAK Bidang Pertanian	38.482.249.589,00	-
-	DAK Bidang Pariwisata	3.710.771.899,00	-
-	DAK Bidang Kesehatan	40.866.296.330,00	36.979.900.000,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	12.845.424.770,00	25.897.582.090,00
-	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi	4.203.097.231,00	9.840.881.400,00
-	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	34.887.433.699,00	25.755.022.820,00
-	DAK Bidang Industri Pertanian	-	25.493.991.675,00
-	DAK Bidang Air Minum	59.040.205.500,00	53.088.284.000,00
2	**Dana Alokasi Khusus Fisik Non Fisik**	**3.474.257.466.928,00**	**3.296.089.570.091,00**

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
-	Tambahan Penghasilan Guru	11.793.826.000,00	13.738.407.499,00
-	Bantuan Operasional Sekolah	2.099.515.123.235,00	2.046.849.723.061,00
-	Tunjangan Profesi Guru - PNSD	1.310.275.195.439,00	1.181.873.717.759,00
-	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB (BOK dan BOKB)	33.834.592.742,00	41.660.176.240,00
-	Peningkatan Kapasitas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan	10.343.179.000,00	7.049.646.404,00
-	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.850.000.000,00	-
-	Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum Dan Taman Budaya	3.937.461.112,00	3.949.905.896,00
-	Fasilitasi Penanaman Modal	1.367.855.300,00	721.513.040,00
-	Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	340.234.100,00	246.480.192,00
	Jumlah	**3.948.197.939.767,00**	**3.700.189.862.933,00**

5.5.1.1.9. Dana Insentif Daerah **Rp0,00**

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp87.197.945.000,00

5.5.1.1.10. Insentif Fiskal **Rp37.997.568.000,00**

Arus Masuk Kas dari Transfer Dana Pemerintah berupa Dana Insentif Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp37.997.568.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp0,00

5.5.1.1.11. Pendapatan Hibah **Rp25.600.169.638,00**

Arus Masuk Kas berupa Pendapatan Hibah dari Pihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.600.169.638,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp77.972.123.308,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Hibah dari Pemerintah Pusat	-	54.495.623.308,00
2	Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	25.593.372.000,00	23.476.500.000,00
3	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.797.638,00	-
	Jumlah	**25.600.169.638,00**	**77.972.123.308,00**

5.5.1.1.12. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan **Rp743.676.482,00**

Arus Masuk Kas berupa Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp743.676.482,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp323.925.937,00

5.5.1.2. Arus Keluar Kas **Rp25.454.042.400.809,00**

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp25.454.042.400.809,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp24.005.478.429.484,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Belanja Pegawai	7.023.084.524.845,00	6.362.326.855.074,00
2	Belanja Barang dan Jasa	6.234.228.358.506,00	5.791.112.760.975,00
3	Belanja Subsidi	1.399.999.100,00	5.350.753.069,00
4	Belanja Hibah	2.780.143.423.054,00	2.610.303.175.760,00
5	Belanja Bantuan Sosial	45.008.996.459,00	118.686.467.885,00
6	Belanja Tidak Terduga	10.225.800.500,00	740.000.000,00
7	Belanja Bagi Hasil Pajak kepada Kabupaten/Kota	6.334.544.870.221,00	6.264.046.226.668,00
8	Belanja Bantuan Keuangan	3.025.406.428.124,00	2.852.912.190.053,00
	Jumlah	**25.454.042.400.809,00**	**24.005.478.429.484,00**

5.5.1.2.1. Belanja Pegawai **Rp7.023.084.524.845,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp7.023.084.524.845,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp6.362.326.855.074,00.

5.5.1.2.2. Belanja Barang dan Jasa **Rp6.234.228.358.506,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.234.228.358.506,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp5.791.112.760.975,00.

5.5.1.2.3. Belanja Subsidi **Rp1.399.999.100,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Subsidi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.399.999.100,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp5.350.753.069,00.

5.5.1.2.4. Belanja Hibah **Rp2.780.143.423.054,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.780.143.423.054,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp2.610.303.175.760,00.

5.5.1.2.5. Belanja Bantuan Sosial **Rp45.008.996.459,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp45.008.996.459,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp118.686.467.885,00.

5.5.1.2.6. Belanja Tidak Terduga **Rp10.225.800.500,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tidak Terduga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp10.225.800.500,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp740.000.000,00.

5.5.1.2.7. Belanja Bagi Hasil **Rp6.334.544.870.221,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bagi Hasil periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp6.334.544.870.221,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp6.264.046.226.668,00.

5.5.1.2.8. Belanja Bantuan Keuangan **Rp3.025.406.428.124,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.025.406.428.124,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp2.852.912.190.053,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten /Kota	1.045.686.246.124,00	653.134.590.053,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa	1.979.720.182.000,00	2.199.777.600.000,00
	Jumlah	**3.025.406.428.124,00**	**2.852.912.190.053,00**

5.5.2. Arus Kas dari Investasi Aset Non Keuangan **(Rp1.731.006.838.977,00)**

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp1.731.006.838.977,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar (Rp1.792.526.715.840,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	2.077.258.017,00	2.336.062.458,00
2	Arus Keluar Kas	1.733.084.096.994,00	1.794.862.778.298,00
	Jumlah	**(1.731.006.838.977,00)**	**(1.792.526.715.840,00)**

5.5.2.1. Arus Masuk Kas **Rp2.077.258.017,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.077.258.017,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp2.336.062.458,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.032.980.021,00	605.812.488,00
2	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	406.282.000,00	368.423.159,00
3	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	500.834.700,00	698.900.980,00
4	Pendapatan Penjualan atas Aset Lainnya	137.161.296,00	662.925.831,00
	Jumlah	**2.077.258.017,00**	**2.336.062.458,00**

5.5.2.1.1. Penjualan Peralatan dan Mesin **Rp1.032.980.021,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.032.980.021,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp605.812.488,00.

5.5.2.1.2. Penjualan Gedung dan Bangunan **Rp406.282.000,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp406.282.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp368.423.159,00.

5.5.2.1.3. Penjualan Aset Tetap Lainnya **Rp500.834.700,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp500.834.700,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp698.900.980,00.

5.5.2.1.4. Penjualan Aset Lainnya **Rp137.161.296,00**

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp137.161.296,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp662.925.831,00.

5.5.2.2. Arus Keluar Kas **Rp1.733.084.096.994,00**

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp1.733.084.096.994,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp1.794.862.778.298,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Belanja Tanah	12.221.207.440,00	67.791.905.622,00
2.	Belanja Peralatan dan Mesin	855.982.713.753,00	751.571.586.676,00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan	411.044.257.004,00	526.682.150.860,00
4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	366.478.924.044,00	351.052.937.280,00
5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	86.434.858.953,00	97.389.078.450,00
6	Belanja Aset Lainnya	922.135.800,00	375.119.410,00
	Jumlah	**1.733.084.096.994,00**	**1.794.862.778.298,00**

5.5.2.2.1. Belanja Tanah **Rp12.221.207.440,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Tanah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp12.221.207.440,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp67.791.905.622,00.

5.5.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin **Rp855.982.713.753,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp855.982.713.753,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp751.571.586.676,00.

5.5.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan **Rp411.044.257.004,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Gedung dan Bangunan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp411.044.257.004,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp526.682.150.860,00.

5.5.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan **Rp366.478.924.044,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp366.478.924.044,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp351.052.937.280,00.

5.5.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya **Rp86.434.858.953,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp86.434.858.953,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp97.389.078.450,00.

5.5.2.2.6. Belanja Aset Lainnya **Rp922.135.800,00**

Arus Keluar Kas untuk Belanja Aset Lainnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp922.135.800,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp375.119.410,00.

5.5.3. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan **Rp485.234.127.700,00**

Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp485.234.127.700,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp94.323.448.139,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	505.934.127.700,00	94.323.448.139,00
2	Arus Keluar Kas	20.700.000.000,00	-
	Jumlah	**485.234.127.700,00**	**94.323.448.139,00**

5.5.3.1. Arus Masuk Kas **Rp505.934.127.700,00**

Total Arus Masuk dari aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp505.934.127.700,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp94.323.448.139,00 terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pencairan Dana Cadangan	505.869.400.000,00	94.130.600.000,00
2	Penerimaan Kembali Pokok Piutang	64.727.700,00	192.848.139,00
	Jumlah	**505.934.127.700,00**	**94.323.448.139,00**

5.5.3.1.1. Pencairan Dana Cadangan **Rp505.869.400.000,00**

Arus Masuk Kas dari Pencairan dana cadangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 adalah Rp505.869.400.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 adalah Rp94.130.600.000,00.

5.5.3.1.2. Penerimaan Kembali Pokok Piutang **Rp64.727.700,00**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Pinjaman Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp64.727.700,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp192.848.139,00 yang merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Koperasi dan UKM)	6.950.000,00	23.366.667,00
2	Penerimaan Dana Bergulir Ternak Kereman (Dinas Peternakan)	500.000,00	34.129.000,00

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
3	Penerimaan Dana Bergulir UKM dan IKM (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	57.277.700,00	135.352.472,00
	Jumlah	**64.727.700,00**	**192.848.139,00**

5.5.3.2. Arus Keluar Kas **Rp20.700.000.000,00**

Total Arus Keluar untuk aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.700.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	20.700.000.000,00	-
	Jumlah	**20.700.000.000,00**	**-**

5.5.3.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah **Rp20.700.000.000,00**

Arus Keluar Kas untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp20.700.000.000,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	PT. BPR BKK JATENG (PERSERODA)	20.700.000.000,00	-
	Jumlah	**20.700.000.000,00**	**-**

5.5.4. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran **Rp147.526.130,00**

Arus kas dari aktivitas Non Anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas bersih dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp147.526.130,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar (Rp172.198.585,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	837.302.066.409,00	703.012.249.543,00
2	Arus Keluar Kas	837.154.540.279,00	703.184.448.128,00
	Jumlah	**147.526.130,00**	**(172.198.585,00)**

5.5.4.1. Arus Masuk Kas **Rp837.302.066.409,00**

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp837.302.066.409,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp703.012.249.543,00 terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	836.950.837.427,00	702.833.219.146,00
2	Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Sebelumnya	348.056.200,00	177.410.000,00
3	Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Sebelumnya	3.172.782,00	-
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	-	1.620.397,00
	Jumlah	**837.302.066.409,00**	**703.012.249.543,00**

5.5.4.1.1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga **Rp836.950.837.427,00**

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp836.950.837.427,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp702.833.219.146,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak-pajak	479.185.649.791,00	426.414.886.087,00
2	IWP	159.500.116.108,00	159.079.042.861,00
3	BPJS	198.265.071.528,00	117.339.290.198,00
	Jumlah	**836.950.837.427,00**	**702.833.219.146,00**

5.5.4.1.2. Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp348.056.200,00**

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp348.056.200,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp177.410.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.846.000,00	-
2	Dinas Perhubungan	307.695.800,00	132.419.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	21.650.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	18.159.000,00	3.468.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.135.900,00	-
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	6.219.500,00	19.873.000,00
	Jumlah	**348.056.200,00**	**177.410.000,00**

5.5.4.1.3. Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya **Rp3.172.782,00**

Arus Masuk Kas dari Setoran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran Sebelumnya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp3.172.782,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	3.172.782,00	-
	Jumlah	**3.172.782,00**	**-**

5.5.4.1.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah **Rp0,00**

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.620.397,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2022 pada kas Bendahara Sekolah.

5.5.4.2. Arus Keluar Kas **Rp837.154.540.279,00**

Total Arus Keluar dari Aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp837.154.540.279,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp703.184.448.128,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	836.950.837.427,00	702.833.219.146,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan	141.221.000,00	348.056.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun Berjalan	-	3.172.782,00
4	Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah	62.481.852,00	-
	Jumlah	**837.154.540.279,00**	**703.184.448.128,00**

5.5.4.2.1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Rp836.950.837.427,00

Arus Keluar Kas untuk Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp836.950.837.427,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar Rp702.833.219.146,00 yang terdiri dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pajak-pajak	479.185.649.791,00	426.414.886.087,00
2	IWP	159.500.116.108,00	159.079.042.861,00
3	BPJS	198.265.071.528,00	117.339.290.198,00
	Jumlah	**836.950.837.427,00**	**702.833.219.146,00**

5.5.4.2.2. Kas di Bendahara Penerimaan-Tahun Berjalan Rp141.221.000,00

Arus Keluar Kas berupa kas di Bendahara Penerimaan - Tahun Berjalan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp141.221.000,00 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp348.056.200,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4.093.500,00	-
2	Dinas Kesehatan	-	3.846.000,00
3	Dinas Perhubungan	106.366.000,00	307.695.800,00
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	14.983.000,00	18.159.000,00
5	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	-	12.135.900,00
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	15.778.500,00	6.219.500,00
	Jumlah	**141.221.000,00**	**348.056.200,00**

5.5.4.2.3. Kas di Bendahara Pengeluaran-Tahun Berjalan Rp0,00

Arus Keluar Kas berupa kas di Bendahara Pengeluaran - Tahun Berjalan yang sampai dengan 31 Desember 2024 belum dipertanggungjawabkan dan disetor ke Rekening Kas Daerah sebesar Rp0,00 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp3.172.782,00, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	3.172.782,00
	Jumlah	**-**	**3.172.782,00**

5.5.4.2.4. Koreksi Saldo Kas di Bendahara Sekolah Rp62.481.852,00

Koreksi saldo kas di Bendahara Sekolah pada tahun 2024 sebesar Rp62.481.852,00, merupakan koreksi atas SiLPA tahun 2023 pada kas Bendahara Sekolah dan untuk tahun 2023 sebesar Rp0,00

5.5.5. Kenaikan/Penurunan Setara Kas (Rp323.025.217.554,00)

Kenaikan kas selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar (Rp323.025.217.554,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2023 sebesar (Rp336.456.401.553,00) yang berasal dari:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Arus kas bersih dari aktivitas operasi	922.599.967.593,00	1.361.919.064.733,00
2.	Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan	(1.731.006.838.977,00)	(1.792.526.715.840,00)
3.	Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan	485.234.127.700,00	94.323.448.139,00
4.	Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran	147.526.130,00	(172.198.585,00)
	Jumlah	**(323.025.217.554,00)**	**(336.456.401.553,00)**

5.5.6. Saldo Akhir Kas Rp576.809.973.428,00

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp576.809.973.428,00 sedangkan untuk tahun 2023 sebesar Rp899.835.190.982,00 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2024 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2024 dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1.	Saldo Awal Kas BUD	275.800.966.203,00	412.202.942.305,00
2.	Saldo Awal Kas BLUD	610.166.143.275,00	802.709.511.890,00
3.	Saldo Awal Kas di Bendahara Sekolah	13.868.081.504,00	21.379.138.340,00
4.	Kenaikan/Penurunan Kas	(323.025.217.554,00)	(336.456.401.553,00)
	Jumlah	**576.809.973.428,00**	**899.835.190.982,00**

5.5.7. Saldo Akhir Kas Rp587.530.474.411,09

Saldo Akhir Kas merupakan gabungan Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara BLUD, Kas di Bendahara Sekolah dan Kas Lainnya pada posisi per 31 Desember 2024 sebesar Rp587.530.474.411,09 dan untuk tahun 2023 sebesar Rp907.267.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Kas Di Kas Daerah	130.694.126.408,00	275.800.966.203,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	141.221.000,00	348.056.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	585.782.732,00	3.172.782,00
4	Kas di BLUD	438.815.860.716,09	611.273.442.523,00
5	Kas Dana BOS	3.218.476.872,00	6.078.084.193,00
6	Kas Lainnya	14.075.006.683,00	13.763.478.099,00
	Jumlah	**587.530.474.411,09**	**907.267.200.000,00**

Dari saldo akhir kas sebesar Rp587.530.474.411,09 tersebut, berupa SiLPA Tahun 2024 sebesar Rp577.013.676.280,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp10.516.798.131,09. Selisih tersebut terdiri uang muka pasien di Rumah Sakit Rp3.373.079.179,09, Kas Lainnya sebesar Rp26.390.000,00 merupakan sisa kas Bantuan Pemerintah tahun 2024 serta sisa saldo Usaha Mandiri tahun 2024 sebesar Rp6.594.028.072,00, Utang PPh sebesar Rp1.920.064,00, Pengembalian Belanja Pegawai yang belum teridentifikasi sebesar Rp583.862.668,00 serta koreksi kurang atas Saldo Kas BOS dan BOP sebesar Rp62.481.852,00.

5.6. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	2	3	4	5	6=(5/4)
1	Ekuitas Awal	40.503.023.207.483,67	39.937.638.803.342,55	565.384.404.141,12	1,42
2	Surplus/Defisit-LO	(909.509.506.457,97)	142.093.416.334,67	(1.051.602.922.792,64)	(740,08)
3	RK-PPKD	-	-	-	-
4	Koreksi Kesalahan/Penyesuaian	110.991.866.045,89	423.290.987.806,45	(312.299.121.760,56)	(73,78)
	Ekuitas Akhir	**39.704.505.567.071,59**	**40.503.023.207.483,67**	**(798.517.640.412,08)**	**(1,97)**

5.6.1 Ekuitas Awal **Rp40.503.023.207.483,67**

Saldo ekuitas awal tahun 2024 sebesar Rp40.503.023.207.483,67 merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.116.593.372.397,70	8.024.122.570.801,57	92.470.801.596,13	1,15
2	Dinas Kesehatan	452.184.726.785,90	427.479.121.622,05	24.705.605.163,85	5,78
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	1.332.529.691.782,52	1.212.162.539.300,60	120.367.152.481,92	9,93
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	844.874.301.449,65	796.959.164.018,09	47.915.137.431,56	6,01
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	376.215.826.730,58	390.793.880.984,31	(14.578.054.253,73)	(3,73)
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	763.527.772.215,71	774.802.030.754,70	(11.274.258.538,99)	(1,46)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	209.594.486.770,44	214.482.603.251,88	(4.888.116.481,44)	(2,28)
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	180.351.980.804,77	171.603.667.139,81	8.748.313.664,96	5,10
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	96.232.170.800,31	93.051.647.824,99	3.180.522.975,32	3,42
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	5.798.774.709.282,03	5.807.382.960.582,51	(8.608.251.300,48)	(0,15)
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	5.917.373.783.752,05	6.080.772.639.692,80	(163.398.855.940,75)	(2,69)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	27.447.242.807,87	27.435.909.070,25	11.333.737,62	0,04
13	Satuan Polisi Pamong Praja	17.577.293.427,55	18.059.689.925,94	(482.396.498,39)	(2,67)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.993.894.995,80	17.281.713.958,68	(287.818.962,88)	(1,67)
15	Dinas Sosial	243.023.880.407,56	246.458.231.139,89	(3.434.350.732,33)	(1,39)
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	17.809.296.736,50	19.474.037.434,37	(1.664.740.697,87)	(8,55)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	133.716.134.959,62	135.697.591.518,21	(1.981.456.558,59)	(1,46)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	11.487.228.286,90	11.826.505.128,26	(339.276.841,36)	(2,87)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	184.333.819.091,16	141.155.896.661,56	43.177.922.429,60	30,59
20	Dinas Ketahanan Pangan	22.244.674.211,56	17.507.418.810,15	4.737.255.401,41	27,06
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Capil	16.082.006.480,45	15.953.049.942,26	128.956.538,19	0,81

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
22	Dinas Perhubungan	356.959.772.910,19	358.116.902.551,25	(1.157.129.641,06)	(0,32)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	73.627.310.522,81	73.391.722.311,47	235.588.211,34	0,32
24	Dinas Koperasi dan UMKM	59.015.569.203,92	57.075.359.349,64	1.940.209.854,28	3,40
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.607.628.838,41	13.702.400.831,15	(94.771.992,74)	(0,69)
26	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	915.818.176.349,29	931.390.701.446,01	(15.572.525.096,72)	(1,67)
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	31.465.541.676,11	31.227.826.485,87	237.715.190,24	0,76
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	418.327.066.521,41	391.301.734.628,40	27.025.331.893,01	6,91
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	976.817.793.089,05	958.663.129.363,26	18.154.663.725,79	1,89
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	481.892.675.547,73	508.259.442.997,69	(26.366.767.449,96)	(5,19)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.364.795.468,51	111.085.372.573,70	279.422.894,81	0,25
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90.143.754.122,33	93.018.875.108,30	(2.875.120.985,97)	(3,09)
33	Sekretariat Daerah	237.713.715.555,09	228.783.022.078,72	8.930.693.476,37	3,90
34	Sekretariat DPRD	162.945.834.581,61	65.048.985.748,06	97.896.848.833,55	150,50
35	Inspektorat	9.582.101.555,62	8.493.832.244,17	1.088.269.311,45	12,81
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	128.162.790.050,90	133.191.219.906,72	(5.028.429.855,82)	(3,78)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	8.754.169.502,03	-	8.754.169.502,03	-
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	2.399.496.502.333,03	2.128.987.829.241,75	270.508.673.091,28	12,71
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	9.053.768.304.600,50	9.014.365.409.704,59	39.402.894.895,91	0,44
40	Badan Kepegawaian Daerah	13.956.146.664,49	14.021.485.798,19	(65.339.133,70)	(0,47)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	155.524.413.375,19	153.658.346.312,47	1.866.067.062,72	1,21
42	Badan Penghubung	25.110.850.838,82	19.392.335.098,26	5.718.515.740,56	29,49
	Jumlah	**40.503.023.207.483,67**	**39.937.638.803.342,55**	**565.384.404.141,12**	**1,42**

5.6.2 Surplus/Defisit – LO (Rp909.509.506.457,97)

Surplus/Defisit – LO sebesar (Rp909.509.506.457,97) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(7.977.629.684.731,34)	(7.417.986.835.270,87)	(559.642.849.460,47)	7,54
2	Dinas Kesehatan	(624.114.986.413,88)	(644.970.115.956,16)	20.855.129.542,28	-3,23
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(301.543.344.488,08)	(226.900.185.507,22)	(74.643.158.980,86)	32,90
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	10.497.150.006,91	(72.934.709.587,54)	83.431.859.594,45	(114,39)
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(141.144.789.523,86)	(131.812.910.173,73)	(9.331.879.350,13)	7,08
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	(51.031.975.829,70)	(51.930.271.710,95)	898.295.881,25	(1,73)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(80.359.524.141,15)	(77.123.236.948,44)	(3.236.287.192,71)	4,20
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	(81.160.544.218,95)	(78.925.988.968,05)	(2.234.555.250,90)	2,83
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(54.328.702.859,02)	(42.686.041.607,18)	(11.642.661.251,84)	27,28
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(1.381.083.095.140,43)	(731.034.600.634,89)	(650.048.494.505,54)	88,92

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(247.133.708.858,50)	(394.775.494.590,76)	147.641.785.732,26	(37,40)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(61.908.372.573,16)	(80.099.049.567,38)	18.190.676.994,22	(22,71)
13	Satuan Polisi Pamong Praja	(22.182.689.178,22)	(22.548.436.588,39)	365.747.410,17	(1,62)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(858.201.565.827,64)	(610.019.478.567,38)	(248.182.087.260,26)	40,68
15	Dinas Sosial	(376.963.019.001,78)	(358.205.820.225,88)	(18.757.198.775,90)	5,24
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(11.664.398.058,58)	(19.386.767.120,19)	7.722.369.061,61	(39,83)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(101.149.544.506,62)	(101.184.082.192,59)	34.537.685,97	(0,03)
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(21.374.092.028,37)	(21.855.977.268,36)	481.885.239,99	(2,20)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(184.130.802.247,46)	(177.683.356.292,40)	(6.447.445.955,06)	3,63
20	Dinas Ketahanan Pangan	(40.605.233.297,43)	(60.475.515.993,59)	19.870.282.696,16	(32,86)
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	(24.713.203.188,47)	(24.797.204.960,81)	84.001.772,34	(0,34)
22	Dinas Perhubungan	(155.122.806.956,20)	(165.999.914.093,06)	10.877.107.136,86	(6,55)
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	(84.175.500.379,79)	(112.805.901.773,77)	28.630.401.393,98	(25,38)
24	Dinas Koperasi dan UMKM	(61.843.891.855,77)	(70.605.020.590,68)	8.761.128.734,91	(12,41)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(23.417.894.661,62)	(21.799.461.116,74)	(1.618.433.544,88)	7,42
26	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(346.445.886.294,07)	(259.872.757.935,00)	(86.573.128.359,07)	33,31
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(43.388.097.036,81)	(33.417.665.279,76)	(9.970.431.757,05)	29,84
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	(45.725.741.123,96)	(67.599.413.480,32)	21.873.672.356,36	(32,36)
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(207.334.283.693,15)	(182.229.315.968,21)	(25.104.967.724,94)	13,78
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(123.779.909.774,89)	(140.693.807.707,96)	16.913.897.933,07	(12,02)
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(84.094.650.502,27)	(91.412.603.860,19)	7.317.953.357,92	(8,01)
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(81.238.850.699,46)	(113.624.164.923,25)	32.385.314.223,79	(28,50)
33	Sekretariat Daerah	(612.599.017.800,28)	(646.375.834.807,29)	33.776.817.007,01	(5,23)
34	Sekretariat DPRD	(522.848.077.309,69)	(482.345.921.278,19)	(40.502.156.031,50)	8,40
35	Inspektorat	(38.993.195.876,60)	(36.620.259.235,55)	(2.372.936.641,05)	6,48
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(47.271.629.523,89)	(61.177.888.456,13)	13.906.258.932,24	(22,73)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(19.366.815.536,17)	(107.468.707,76)	(19.259.346.828,41)	17.920,89
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	14.426.947.088.575,24	13.906.858.780.284,28	520.088.308.290,96	3,74
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(100.832.768.973,29)	184.711.650.713,47	(285.544.419.686,76)	(154,59)
40	Badan Kepegawaian Daerah	(44.250.891.723,17)	(45.383.063.775,70)	1.132.172.052,53	(2,49)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	(40.484.750.823,14)	(47.823.042.822,32)	7.338.291.999,18	(15,34)
42	Badan Penghubung	(21.315.808.383,26)	(22.247.429.118,44)	931.620.735,18	(4,19)
	Jumlah	**(909.509.506.457,97)**	**142.093.416.334,67**	**(1.051.602.922.792,64)**	**(740,08)**

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar — Rp110.991.866.045,89

Dampak kumulatif karena perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar sebesar Rp110.991.866.045,89 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Koreksi/Penyesuaian Kas	150.631.529,00	1.620.397,00	149.011.132,00	9195,96
2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	174.033.862.795,00	370.400.392.381,00	(196.366.529.586,00)	(53,01)
3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	(368.533.529,11)	(90.696.154.806,36)	90.327.621.277,25	(99,59)
4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	-	7.214.253.650,71	(7.214.253.650,71)	(100,00)
5	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(6.497.922.576,00)	170.699.828.232,00	(177.197.750.808,00)	(103,81)
6	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	(50.440.374.414,20)	(34.760.791.601,38)	(15.679.582.812,82)	45,11
7	Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya	(11.872.738.748,00)	249.184.020,00	(12.121.922.768,00)	(4.864,65)
8	Koreksi/Penyesuaian Amortisasi	(1.906.262.518,40)	(68.501.417,33)	(1.837.761.101,07)	2.682,81
9	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya	7.888.103.507,60	248.055.273,50	7.640.048.234,10	3.079,98
10	Koreksi/Penyesuaian Pendapatan Diterima Dimuka	5.100.000,00	3.101.677,31	1.998.322,69	64,43
	Jumlah	**110.991.866.045,89**	**423.290.987.806,45**	**(312.299.121.760,56)**	**(73,78)**

5.6.3.1 Koreksi/Penyesuaian Kas — Rp150.631.529,00

Koreksi/Penyesuaian Kas sebesar Rp150.631.529,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	150.631.529,00	1.620.397,00	149.011.132,00	9195,96
	Jumlah	**150.631.529,00**	**1.620.397,00**	**149.011.132,00**	**9195,96**

Koreksi/Penyesuaian Kas merupakan Koreksi/Penyesuaian Kas pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh koreksi atas kesalahan pengakuan saldo kas di Bendahara Sekolah atas dana BOS, BOP, dan Usaha Mandiri Tahun 2023 sebesar (Rp62.481.811,00) dan pengembalian belanja pegawai yang belum teridentifikasi sebelum Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp213.113.340,00 dengan rincian sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
SMKN 1 Karangawen	500,00		Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2023 adalah Rp0,00 tidak sesuai dengan saldo pada rekening koran Bendahara BOP yakni Rp500, sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 Brebes		22,00	Silpa BOP 2023 pada LK Audited TA 2023 adalah Rp87.493.044, tetapi pada rekening koran per 31 Desember 2023 tercatat saldo senilai Rp87.493.022, oleh karena itu perlu dilakukan koreksi.
SMKN 3 Purwokerto		20.846.750,00	Terdapat lebih salur dana BOP di Tahun 2022 dan sudah disetor ke RKUD pada 11 Oktober 2023, namun masih tercatat sebagai sisa kas di akhir tahun 2023 sehingga perlu dikoreksi.

NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
SMK Negeri Tembarak		18.232.500,00	Terdapat lebih salur dana BOP di tahun 2023 dan sudah disetor ke RKUD pada 12 Januari 2024, namun masih tercatat sebagai sisa kas di akhir tahun 2023 sehingga perlu dikoreksi.
SMAN 3 Magelang		400,00	Terdapat kurang salur dana BOP di tahun 2023 senilai Rp400, namun di akhir tahun 2023 atas Rp400 tersebut tercatat sebagai sisa kas sehingga perlu dikoreksi.
SMAN 5 Magelang		866,00	Sisa kas yang tercatat pada akhir tahun 2023 tidak sesuai dengan saldo pada rekening koran Bendahara BOP, sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMKN 1 Magelang		200,00	Terdapat lebih salur dana BOP di Triwulan IV Tahun 2023 senilai Rp200 dan sudah disetor ke RKUD pada 8 Januari 2024, namun masih tercatat sebagai sisa kas per 31 Desember 2024 sehingga perlu dilakukan koreksi.
SMAN 1 Kaliwungu	36.200,00		Terdapat error pada aplikasi ARKAS yang mengakibatkan sekolah masih memiliki sisa kas BOS pada 31 Desember 2023 senilai Rp36.200 meskipun kenyataannya sudah tidak ada sisa kas BOS. Data pada aplikasi ARKAS adalah data yang digunakan untuk menghitung penyaluran BOS di tahun 2024, oleh karena itu sisa kas BOS harus berpedoman pada sisa kas yang tertera pada aplikasi ARKAS. Dengan demikian, perlu dilakukan koreksi sesuai dengan angka pada aplikasi.
SMAN 2 Mranggen	49.336,00		Dashboard aplikasi ARKAS menunjukkan sisa kas BOS pada 31 Desember 2023 senilai Rp49.337 walaupun sisa kas yang riil adalah Rp1. Data pada aplikasi ARKAS adalah data yang digunakan untuk menghitung penyaluran BOS di tahun 2024, oleh karena itu sisa kas BOS harus berpedoman pada sisa kas yang tertera pada aplikasi ARKAS. Dengan demikian, perlu dilakukan koreksi sesuai dengan angka pada aplikasi.
SMK Negeri 1 Wonosobo	16.512.850,00		Terdapat kelalaian bendahara BOS di SMKN 1 Wonosobo karena tidak menginputkan Silpa BOS 2023 di aplikasi Siperkasa, sehingga belum tercatat sebagai sisa kas di akhir Tahun 2023. Oleh karena itu, perlu dilakukan koreksi.
SMKN 4 Purworejo		40.000.000,00	Terdapat lebih salur BOS Kinerja Tahun 2023 senilai Rp40.000.000 dan akan disetorkan kembali ke RKUN.
SMKN 1 Adiwerna		100	Pembulatan saldo kas tunai usaha mandiri
SMKN 1 Temanggung	70		Pembulatan saldo kas tunai usaha mandiri
SMKN 1 Trucuk Klaten	71		Pembulatan saldo kas tunai usaha mandiri

NAMA SEKOLAH	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		213.113.340,00	Pengembalian Belanja Pegawai yang belum teridentifikasi sebelum Tahun 2024 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

5.6.3.2 Koreksi/Penyesuaian Piutang **Rp174.033.862.795,00**

Koreksi/Penyesuaian Piutang sebesar Rp174.033.862.795,00dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	127.134.667.096,00	102.191.316.321,00	24.943.350.775,00	24,41
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	(277.665.962,00)	-	(277.665.962,00)	-
3	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(6.127.901,00)	(407.689.689,00)	401.561.788,00	(98,50)
4	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	(80.974.840,00)	1.138.355.750,00	(1.219.330.590,00)	(107,11)
5	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	(106.900,00)	26.277.839,00	(26.384.739,00)	(100,41)
6	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	276.979.643.500,00	(276.979.643.500,00)	(100,00)
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	47.264.071.302,00	(9.527.511.340,00)	56.791.582.642,00	(596,08)
	Jumlah	**174.033.862.795,00**	**370.400.392.381,00**	**(196.366.529.586,00)**	**(53,01)**

Penyebab Koreksi/Penyesuaian Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar Rp127.134.667.096,00 disebabkan oleh koreksi tambah piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp128.376.128.805,00 dan koreksi kurang piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar (Rp1.241.461.709,00) dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Umum-Pasien TB-MDR	30.339.797,00	(16.943.400,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Koreksi verifikasi dari TB MDR serta biaya transfer
Pasien Umum-Pasien Pernyataan Utang	164.186.823,00	(194.470.423,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Piutang sudah dibayar di Tahun 2023
Pasien Jaminan-BPJS	127.006.999.094,00	(41.622.983,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Nominal yang dimasukkan adalah nilai pengajuan, seharusnya nilai PFK
Pasien Jaminan-JAMKESDA KAB	68.499.789,00	-	Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang
Pasien Jaminan-Inhealth	38.829.839,00	-	Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang
Pasien Jaminan-Jaminan Perusahaan	435.155.873,00	(50.767.476,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Piutang sudah dibayar di Tahun 2023 serta biaya transfer

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Jaminan-Jasa Raharja	632.117.590,00	(937.657.427,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Piutang sudah dibayar di Tahun 2023, Terdapat double klaim serta Koreksi plafon maksimal

2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar (Rp277.665.962,00) karena adanya koreksi tambah piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp13.575.862,00 dan koreksi kurang atas piutang yang sama sebesar (Rp291.241.824,00) dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Umum	7.961.352,00	(40.531.000,00)	1. Koreksi Tambah : Piutang atas transaksi di Tahun 2022 serta 2023 dan belum tercatat piutang 2. Koreksi Kurang : Piutang sudah dibayar di Tahun 2021 dan 2023
Dinkes TBMDR & TCM	-	(325.000,00)	Piutang sudah dibayar di Tahun 2023
Jampersal	3.549.200,00	-	Piutang atas transaksi di Tahun 2022 dan belum tercatat piutang
Penjamin Lain (BPJS Ketenagakerjaan)	2.065.310,00	-	Piutang atas transaksi di Tahun 2023 dan belum tercatat piutang
Penjamin Lain (Jasa Raharja)	-	(250.385.824,00)	Piutang sudah dibayar di Tahun 2023

3. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang sebesar (Rp6.127.901,00) karena adanya koreksi tambah piutang pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebesar Rp8,00 dan koreksi kurang atas piutang yang sama sebesar (Rp6.127.909,00) dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Pasien Umum	-	(9,00)	Selisih kurang pembulatan saat pelunasan
KNVC Dinas Kesehatan Provinsi/Global Fund	-	(25.000,00)	RJ Bulan Agustus 2023 double pemeriksaan
Global Fund (VCT)	-	(6.100.000,00)	Piutang sudah dibayar di Tahun 2023
BPJS Kesehatan	-	(2.900,00)	Koreksi Biaya Administrasi Bank
BPJS Ketenagakerjaan	8,00	-	Selisih tambah pembulatan saat pelunasan

4. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta sebesar (Rp80.974.840,00) merupakan koreksi atas biaya biad dan administrasi atas pembayaran piutang PT. Pilar Cadas Putra melalui KPKNL.
5. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi sebesar (Rp106.900,00) merupakan koreksi kurang atas piutang pasien dan JAMKESDA dengan rincian sebagai berikut :

DEBITUR	Koreksi		PENJELASAN KOREKSI
	Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
Klaim BPJS Obat	-	(2.900,00)	Koreksi atas Biaya Transfer
Klaim IPWL Rawat Inap	-	(104.000,00)	Koreksi atas Biaya Transfer

6. Koreksi tambah ekuitas di BPKAD selaku SKPKD sebesar Rp47.264.071.302,00 karena:
   - Koreksi tambah ekuitas atas pengakuan kurang lebih salur atas Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024 sebesar Rp69.376.224.746,00.

- Koreksi kurang ekuitas atas pengakuan kurang lebih salur atas Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024 dan koreksi Piutang Dana Talangan kepada Kabupaten Cilacap atas pembayaran di Tahun 2019 dan 2021 serta koreksi Piutang Dana Bergulir atas pembayaran di Tahun 2022 sebesar (Rp22.112.153.444,00).

5.6.3.3 Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang (Rp368.533.529,11)

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang sebesar (Rp368.533.529,11) merupakan koreksi penghitungan Penyisihan Piutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(635.679.097,48)	(602.155.474,86)	(33.523.622,62)	5,57
2	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	1.315.241,87	-	1.315.241,87	-
3	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	80.974.840,00	(1.138.355.750,00)	1.219.330.590,00	(107,11)
4	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	534,50	(3.069.431,50)	3.069.966,00	(100,02)
5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	-	(88.952.574.150,00)	88.952.574.150,00	(100,00)
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	184.854.952,00	-	184.854.952,00	-
	Jumlah	**(368.533.529,11)**	**(90.696.154.806,36)**	**90.327.621.277,25**	**(99,59)**

Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang disebabkan oleh:

1. Koreksi tambah ekuitas di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebesar (Rp635.679.097,48) karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
2. Koreksi kurang ekuitas di RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto sebesar Rp1.315.241,87 karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan
3. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta sebesar Rp80.974.840,00 karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD atas pembayaran piutang PT. Pilar Cadas Putra melalui KPKNL.
4. Koreksi kurang ekuitas di RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten sebesar Rp534,50 karena penyesuaian pengakuan Piutang Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan.
5. Koreksi kurang ekuitas di BPKAD sebesar Rp184.854.952,00 merupakan koreksi penyesuaian atas pengakuan kurang lebih salur atas Dana Transfer Pusat-Dana Perimbangan tahun 2023 berdasarkan PMK Nomor 89 Tahun 2024.

5.6.3.4 Koreksi/Penyesuaian Persediaan Rp0,00

Koreksi/Penyesuaian Persediaan sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	7.194.090.650,71	(7.194.090.650,71)	(100,00)
2	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	20.163.000,00	(20.163.000,00)	(100,00)
	Jumlah	**-**	**7.214.253.650,71**	**(7.214.253.650,71)**	**(200,00)**

5.6.3.5 Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap (Rp6.497.922.576,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap sebesar (Rp6.497.922.576,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11.660.531.309,00	15.968.014.269,00	(4.307.482.960,00)	(26,98)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
2	Dinas Kesehatan	1.642.340.081,00	3.679.490.771,00	(2.037.150.690,00)	(55,37)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(473.589.265,00)	-	(473.589.265,00)	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	1.847.896.731,00	(1.847.896.731,00)	(100,00)
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	(469.616.104,00)	(795.579.113,00)	325.963.009,00	(40,97)
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	295.000.000,00	(3.141.559.530,00)	3.436.559.530,00	(109,39)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	174.616.104,00	(553.571.500,00)	728.187.604,00	(131,54)
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	(526.143.153,00)	(527.560.990,00)	1.417.837,00	(0,27)
9	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	2.547.623.920,00	(2.472.152.937,00)	5.019.776.857,00	(203,05)
10	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(29.745.487.020,00)	10.261.686.250,00	(40.007.173.270,00)	(389,87)
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	(393.792.937,00)	(165.100.000,00)	(228.692.937,00)	138,52
12	Satuan Polisi Pamong Praja	(444.650.000,00)	-	(444.650.000,00)	-
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(55.726.900,00)	(48.035.000,00)	(7.691.900,00)	16,01
14	Dinas Sosial	19.045.573.900,00	2.485.335.683,00	16.560.238.217,00	666,32
15	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.076.900,00	856.979.894,00	(778.902.994,00)	(90,89)
16	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(14.383.588.999,00)	(19.308.492,00)	(14.364.280.507,00)	74.393,59
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	16.000.000,00	(307.437.023,00)	323.437.023,00	(105,20)
18	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	318.010.928,00	(143.578.375,00)	461.589.303,00	(321,49)
19	Dinas Ketahanan Pangan	2.378.014.000,00	-	2.378.014.000,00	-
20	Dinas Perhubungan	2.512.504.880,00	211.269.950,00	2.301.234.930,00	1.089,24
21	Dinas Komunikasi dan Informatika	(2.240.981.830,00)	(1.725.133.598,00)	(515.848.232,00)	29,90
22	Dinas Koperasi dan UMKM	(210.289.649,00)	2.350.743.000,00	(2.561.032.649,00)	(108,95)
23	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(24.000.000,00)	(457.341.083,00)	433.341.083,00	(94,75)
24	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	98.000.000,00	691.801.000,00	(593.801.000,00)	(85,83)
25	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	976.747.000,00	-	976.747.000,00	-
26	Dinas Kelautan dan Perikanan	(91.900.000,00)	(87.500.000,00)	(4.400.000,00)	5,03
27	Dinas Pertanian dan Perkebunan	(2.589.689.969,00)	(446.679.400,00)	(2.143.010.569,00)	479,76
28	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(203.971.000,00)	172.654.980,00	(376.625.980,00)	(218,14)
29	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(90.487.460,00)	-	(90.487.460,00)	-
30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(40.275.000,00)	2.132.575.265,00	(2.172.850.265,00)	(101,89)
31	Sekretariat Daerah	(254.905.500,00)	1.566.471.417,00	(1.821.376.917,00)	(116,27)
32	Sekretariat DPRD	-	109.342.538.194,00	(109.342.538.194,00)	(100,00)
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(539.271.800,00)	(18.883.747.986,00)	18.344.476.186,00	(97,14)
34	Badan Riset dan Inovasi Daerah	52.454.000,00	19.000.725.832,00	(18.948.271.832,00)	(99,72)
35	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(456.867.756,00)	(1.603.103.268,00)	1.146.235.512,00	(71,50)
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.913.536.914,00	31.984.734.193,00	(27.071.197.279,00)	(84,64)
37	Badan Kepegawaian Daerah	-	(457.500.000,00)	457.500.000,00	(100,00)

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
38	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	2.484.730.098,00	(2.484.730.098,00)	(100,00)
39	Badan Penghubung	28.281.830,00	(2.502.931.000,00)	2.531.212.830,00	(101,13)
	Jumlah	**(6.497.922.576,00)**	**170.699.828.232,00**	**(177.197.750.808,00)**	**(103,81)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

SKPD	Koreksi Tambah (Rp)	KETERANGAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.641.858.736,00	1. Kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi BMD 2. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah 3. Adanya beberapa BMD terpisah yang seharusnya dicatat sebagai satu BMD 4. Kapitalisasi belanja barang dan jasa 5. Reklasifikasi dari aset ekstrakomptabel 6. Reklasifikasi jenis aset karena Alih fungsi BMD 7. Adanya penerimaan BMD melalui hibah yang belum tercatat 8. Koreksi jumlah/volume BMD 9. Salah pencatatan kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap baru yang berdiri sendiri 10. Terdapat KDP yang sudah difungsikan per tahun 2024 11. Kesalahan pencatatan harga perolehan BMD 12. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Kesehatan	3.207.736.301,00	1. Adanya beberapa BMD terpisah yang seharusnya dicatat sebagai satu BMD 2. Terdapat KDP yang sudah difungsikan per tahun 2024
RSUD dr. Arif Zainuddin	2.779.118.785,00	Adanya satu KIB Bangunan yang masih tercatat dalam 1 (satu) KIB, seharusnya dicatat menjadi 2 (dua) KIB
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	197.201.184.851,00	1. Salah pencatatan kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap baru yang berdiri sendiri 2. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan serta peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	76.263.111.738,00	Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	16.040.000,00	Teridentifikasinya BMD berupa peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.350.000,00	Adanya penerimaan BMD melalui hibah yang belum tercatat
Dinas Sosial	1.313.677.000,00	Kesalahan pencatatan harga perolehan BMD
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.547.000.187,00	1. Teridentifikasinya BMD gedung dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset 2. Terdapat BMD Peralatan dan Mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.907.843.611,00	1. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset 2. Adanya permintaan koreksi pencatatan berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Dinas Ketahanan Pangan	1.368.069.318,00	1. Teridentifikasinya BMD berupa peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset 2. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah

SKPD	Koreksi Tambah (Rp)	KETERANGAN
Dinas Perhubungan	3.171.975.237,00	1. Teridentifikasinya BMD berupa Tanah, Peralatan dan Mesin yang belum tercatat dalam SIMaset 2. Kapitalisasi nilai KDP pada Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	557.182.209.057,00	1. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah 2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa
Dinas Kelautan dan Perikanan	39.327.568.994,00	1. Terdapat KDP yang sudah difungsikan per tahun 2024 2. Adanya penerimaan BMD melalui hibah yang belum tercatat
Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.227.202.169,00	1. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan serta peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset 2. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	306.150.000,00	Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.108.430.188,00	Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	25.717.000,00	Teridentifikasinya BMD berupa peralatan studio komunikasi pada BIKDK yang belum tercatat dalam SIMAset
Sekretariat Daerah	31.842.000,00	Teridentifikasinya BMD berupa peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.349.100.145,00	Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan serta peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
TOTAL	**965.998.185.317,00**	

SKPD	Koreksi Kurang (Rp)	KETERANGAN
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.718.439.290,00	1. Salah pencatatan penambahan ruang sebagai penambahan gedung 2. Reklasifikasi jenis aset karena Alih fungsi BMD 3. Salah pencatatan kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap baru yang berdiri sendiri 4. Terdapat double catat penerimaan aset tetap 5. Ada aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat pada SIMAset 6. Kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi BMD 7. Adanya permintaan koreksi pencatatan berdasarkan LHP BPK-RI 8. Adanya beberapa BMD terpisah yang seharusnya dicatat sebagai satu BMD 9. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah 10. Koreksi jumlah/volume BMD 11. Kesalahan pencatatan harga perolehan BMD 12. Penarikan unit kendaraan untuk diganti dengan unit baru
Dinas Kesehatan	837.999.220,00	1. Koreksi jumlah/volume BMD 2. Adanya beberapa BMD terpisah yang seharusnya dicatat sebagai satu BMD

SKPD	Koreksi Kurang (Rp)	KETERANGAN
RSUD dr. Arif Zainuddin	2.779.118.785,00	Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah (Adanya satu KIB Bangunan yang masih tercatat dalam 1 (satu) KIB, seharusnya dicatat menjadi 2 (dua) KIB)
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	194.657.284.851,00	1. Salah pencatatan kapitalisasi belanja barang dan jasa menjadi aset tetap baru yang berdiri sendiri 2. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan serta peralatan dan mesin yang belum tercatat dalam SIMAset
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	105.597.007.338,00	1. Ada aset tetap yang bukan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang tercatat pada SIMAset 2. Koreksi jumlah/volume BMD
Dinas Sosial	148.869.000,00	Kesalahan pencatatan harga perolehan BMD
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	832.824.000,00	Adanya 2 BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah (Terdapat sejumlah 2 unit gedung bangunan yang seharusnya dicatat terpisah menjadi 7 unit gedung bangunan (di BLK Cilacap)
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	26.875.118.683,00	1. Teridentifikasinya BMD berupa tanah, gedung, dan bangunan yang belum tercatat dalam SIMAset 2. Adanya permintaan koreksi pencatatan berdasarkan LHP Inspektorat Provinsi Jawa Tengah
Dinas Ketahanan Pangan	1.367.069.318,00	KDP sudah selesai fisiknya dan telah difungsikan sehingga dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan
Dinas Perhubungan	659.470.357,00	KDP sudah selesai fisiknya dan telah difungsikan sehingga dikapitalisasi ke Gedung dan Bangunan serta Jalan, Irigasi dan Jaringan
Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	557.084.209.057,00	1. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah 2. Kapitalisasi belanja barang dan jasa
Dinas Kelautan dan Perikanan	39.327.568.994,00	1. Terdapat KDP yang sudah difungsikan per tahun 2024 2. Adanya penerimaan BMD melalui hibah yang belum tercatat
Dinas Pertanian dan Perkebunan	10.205.008.000,00	Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	397.221.000,00	1. Adanya satu BMD yang seharusnya dicatat sebagai beberapa BMD terpisah 2. Terdapat double catat penerimaan aset tetap
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	8.900.000,00	Terdapat double catat penerimaan aset tetap
TOTAL	**972.496.107.893,00**	

SKPD	Mutasi Masuk Aset dari SKPD Lain	Mutasi Keluar Aset ke SKPD Lain	ASAL DAN TUJUAN MUTASI ASET
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.737.111.863,00	-	526.143.153 dari RS Arif Zainudin 409.832.937 dari Dinas Perakim 444.650.000 dari Satpol PP 467.500.000 dari Dinas Sosial 156.500.000 dari Dinas LHK 1.592.343.500 dari Dinas Kominfo 107.000.000 dari Dinas Kelautan 234.870.138 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan 112.900.000 dari Dinas Peternakan 2.469.655.648 dari Dinas ESDM 65.992.000 dari Dinas Perindag 66.296.000 dari BRIDA 456.867.756 dari Bapenda 104.000.000 dari BPKAD (SKPD) 114.693.231 dari BPKAD (SKPKD) 407.867.500 dari Dinas Pusdataru
Dinas Kesehatan		727.397.000,00	727.397.000 ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
RSUD Dr. Moewardi Surakarta		473.589.265,00	224.239.265 ke Dinas Sosial 249.350.000 ke Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang		469.616.104,00	295.000.000 ke RSUD dr. Rehatta 174.616.104 ke RSJD Dr. Amino
RSUD dr. Rehatta	295.000.000,00	-	295.000.000 dari RS Adhyatma
RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	174.616.104,00	-	174.616.104 dari RS Adhyatma
RSUD dr. Arif Zainuddin		526.143.153,00	526.143.153 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	3.723.920,00	-	3.723.920 dari Dinas Pusdataru
Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang		411.591.420,00	407.867.500 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 3.723.920 ke Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya
Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman		409.832.937,00	409.832.937 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Satuan Polisi Pamong Praja		444.650.000,00	444.650.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		78.076.900,00	78.076.900 ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Dinas Sosial	18.348.265.900,00	467.500.000,00	224.239.265 dari RS Moewardi 17.097.765.186 dari Dinas Tenaga Kerja 187.012.500 dari Dinas Kominfo 210.289.649 dari Dinas Koperasi 104.437.500 dari Sekretariat Daerah 104.000.000 dari BPKAD (SKPD) 420.521.800 dari Bapeda 467.500.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	78.076.900,00	-	78.076.900 dari Badan Kesbangpol
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		17.097.765.186,00	17.097.765.186 ke Dinas Sosial
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	16.000.000,00	-	16.000.000 dari DPMPTSP
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	441.786.000,00	156.500.000,00	388.276.000 dari BPKAD (SKPKD) 53.510.000 dari Sekretariat Daerah

SKPD	Mutasi Masuk Aset dari SKPD Lain	Mutasi Keluar Aset ke SKPD Lain	ASAL DAN TUJUAN MUTASI ASET
			156.500.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Ketahanan Pangan	2.377.014.000,00	-	2.377.014.000 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan
Dinas Komunikasi dan Informatika		2.240.981.830,00	1.592.343.500 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 187.012.500 ke Dinas Sosial 433.344.000 ke BPKAD (SKPD) 28.281.830 ke Badan Penghubung
Dinas Koperasi dan UKM		210.289.649,00	210.289.649 ke Dinas Sosial
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		24.000.000,00	8.000.000 ke Dinas Kelautan dan Perikanan 16.000.000 ke DP3AP2KB
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	976.747.000,00	-	727.397.000 dari Dinas Kesehatan 249.350.000 dari RS Moewardi
Dinas Kelautan dan Perikanan	15.100.000,00	107.000.000,00	8.000.000 dari DPMPTSP 7.100.000 dari BPKAD (SKPKD) 107.000.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pertanian dan Perkebunan		2.611.884.138,00	234.870.138 ke Dinas Pertanian dan Perkebunan 2.377.014.000 ke Dinas Ketahanan Pangan
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		112.900.000,00	112.900.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.279.638.000,00	2.469.655.648,00	1.279.638.000 dari BPKAD (SKPKD) 2.469.655.648 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan		65.992.000,00	65.992.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretariat Daerah		286.747.500,00	104.437.500 ke Dinas Sosial 128.800.000 ke BPKAD (SKPD) 53.510.000 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		539.271.800,00	420.521.800 ke Dinas Sosial 118.750.000 ke BRIDA
Badan Riset dan Inovasi Daerah	118.750.000,00	66.296.000,00	118.750.000 dari Bapeda 66.296.000 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pengelola Pendapatan Daerah		456.867.756,00	456.867.756 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3.430.373.100,00	4.865.936.331,00	2.868.229.100 dari BPKAD (SKPKD) 128.800.000 dari Sekretariat Daerah 433.344.000 dari Dinas Kominfo 218.693.231 ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 104.000.000 ke Dinas Sosial 388.276.000 ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 7.100.000 ke Dinas Kelautan dan Perikanan 1.279.638.000 ke Dinas ESDM 2.868.229.100 ke BPKAD (SKPD)
Badan Penghubung	28.281.830,00		28.281.830 dari Dinas Kominfo
TOTAL	**35.320.484.617,00**	**35.320.484.617,00**	

5.6.3.6 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan (Rp50.440.374.414,20)

Koreksi/Penyesuaian Penyusutan sebesar (Rp50.440.374.414,20) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tetap dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	692.528.288,81	(10.472.782.624,71)	11.165.310.913,52	(106,61)
2	Dinas Kesehatan	518.924.644,61	(76.158.183,99)	595.082.828,60	(781,38)
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	473.589.265,00	-	473.589.265,00	-
4	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	3.555.134.516,09	(3.555.134.516,09)	(100,00)
5	RSUD Dr. Adhyatma, MPH Semarang	469.616.104,00	795.579.113,00	(325.963.009,00)	(40,97)
6	RSUD Dr. Rehatta Jepara	(295.000.000,00)	254.227.151,67	(549.227.151,67)	(216,04)
7	RSJD Dr. Amino Gondohutomo Semarang	(174.616.104,00)	553.571.500,00	(728.187.604,00)	(131,54)
8	RSJD Dr. Arif Zainudin Surakarta	9.845.911,06	2.568.791.234,01	(2.558.945.322,95)	(99,62)
9	RSJD Dr. RM Soedjarwadi Klaten	-	640.457.300,00	(640.457.300,00)	(100,00)
10	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(1.711.980,08)	(14.692.925.590,59)	14.691.213.610,51	(99,99)
11	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	407.867.500,00	(120.000.000,00)	527.867.500,00	(439,89)
12	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	407.923.436,97	165.100.000,00	242.823.436,97	147,08
13	Satuan Polisi Pamong Praja	444.650.000,00	-	444.650.000,00	-
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	75.748.775,00	63.424.687,50	12.324.087,50	19,43
15	Dinas Sosial	(2.849.505.610,66)	(1.886.204.163,44)	(963.301.447,22)	51,07
16	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(78.076.900,00)	(333.948.703,35)	255.871.803,35	(76,62)
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	357.407.257,87	19.308.492,00	338.098.765,87	1.751,04
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	(16.000.000,00)	307.437.023,00	(323.437.023,00)	(105,20)
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(94.668.020,00)	135.578.375,00	(230.246.395,00)	(169,83)
20	Dinas Ketahanan Pangan	(328.820.270,00)	-	(328.820.270,00)	-
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Capil	-	40.600.000,00	(40.600.000,00)	(100,00)
22	Dinas Perhubungan	(1.527.204.811,00)	-	(1.527.204.811,00)	-
23	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.879.861.830,00	572.780.861,11	1.307.080.968,89	228,20
24	Dinas Koperasi dan UMKM	210.289.649,00	(107.927.833,04)	318.217.482,04	(294,84)
25	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	24.000.000,00	457.341.083,00	(433.341.083,00)	(94,75)
26	Dinas Kepemudaan, OlahRaga dan Pariwisata	(51.516.905.734,37)	(478.439.010,72)	(51.038.466.723,65)	10.667,71
27	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(976.747.000,00)	-	(976.747.000,00)	-
28	Dinas Kelautan dan Perikanan	99.000.000,00	89.623.333,33	9.376.666,67	10,46
29	Dinas Pertanian dan Perkebunan	258.511.997,67	256.343.525,00	2.168.472,67	0,85
30	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	203.971.000,00	-	203.971.000,00	-
31	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	193.651.238,92	-	193.651.238,92	-

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
32	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	40.275.000,00	(3.354.319.371,72)	3.394.594.371,72	(101,20)
33	Sekretariat Daerah	252.765.500,00	(1.586.404.750,34)	1.839.170.250,34	(115,93)
34	Sekretariat DPRD	-	(4.512.081.633,26)	4.512.081.633,26	(100,00)
35	Inspektorat	-	-	-	-
36	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	539.271.800,00	10.123.219.907,31	(9.583.948.107,31)	(94,67)
37	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(52.454.000,00)	(10.139.087.622,21)	10.086.633.622,21	(99,48)
38	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	456.867.756,00	1.603.103.268,00	(1.146.235.512,00)	(71,50)
39	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(516.949.109,00)	(12.111.151.602,07)	11.594.202.493,07	(95,73)
40	Badan Kepegawaian Daerah	-	457.500.000,00	(457.500.000,00)	(100,00)
41	Badan Pengembangan SDM Daerah	-	(51.412.881,96)	51.412.881,96	(100,00)
42	Badan Penghubung	(28.281.830,00)	2.502.931.000,00	(2.531.212.830,00)	(101,13)
	Jumlah	**(50.440.374.414,20)**	**(34.760.791.601,38)**	**(15.679.582.812,82)**	**45,11**

5.6.3.7 Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya (Rp11.872.738.748,00)

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya sebesar (Rp11.872.738.748,00) dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(932.593.380,00)	(237.950.000,00)	(694.643.380,00)	291,93
2	Dinas Kesehatan	(1.915.643.888,00)	-	(1.915.643.888,00)	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	(427.643.000,00)	-	(427.643.000,00)	-
4	RSUD Dr. Rehatta Jepara	-	197.450.000,00	(197.450.000,00)	(100,00)
5	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(3.028.108.000,00)	-	(3.028.108.000,00)	-
6	Dinas PU Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	(378.255.000,00)		(378.255.000,00)	-
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	150.385.020,00	(150.385.020,00)	(100,00)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	45.000.000,00	(45.000.000,00)	(100,00)
9	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(159.770.000,00)	-	(159.770.000,00)	-
11	Dinas Koperasi dan UMKM	-	(3.000.000,00)	3.000.000,00	(100,00)
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	(501.030.560,00)	-	(501.030.560,00)	-
13	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(1.108.440.000,00)	-	(1.108.440.000,00)	-
14	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(3.222.582.275,00)	-	(3.222.582.275,00)	-
15	Sekretariat Daerah	1.649.530.535,00		1.649.530.535,00	-
16	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(24.560.000,00)	-	(24.560.000,00)	-
17	Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.560.000,00	-	24.560.000,00	-
18	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.395.000,00	-	49.395.000,00	-
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(2.425.000.000,00)	-	(2.425.000.000,00)	-
20	Badan Kepegawaian Daerah	517.401.820,00	87.299.000,00	430.102.820,00	492,68
	Jumlah	**(11.872.738.748,00)**	**249.184.020,00**	**(12.121.922.768,00)**	**(4.864,65)**

Koreksi/Penyesuaian Aset Lainnya ini dikarenakan beberapa alasan dengan rincian sebagai berikut:

No.	SKPD	Koreksi		Keterangan
		Tambah (Rp)	Kurang (Rp)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	(932.593.380,00)	Terdapat barang rusak berat di SMKN 1 Karanganyar Kebumen yang sudah keluar SK Penghapusan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen sejak Tahun 2016, namun belum dihapuskan hingga tahun 2024
2	Dinas Kesehatan	-	(1.915.643.888,00)	Terdapat barang rusak berat yang sudah keluar SK Penghapusan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah sejak Tahun 2019, namun belum dihapuskan hingga tahun 2024
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	-	(427.643.000,00)	Barang inventaris dan barang lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa Bongkaran Bangunan Gedung yang seharusnya dihapus dari Daftar Barang Inventaris pada tahun 2019, namun baru dihapuskan pada Tahun 2024
4	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Ciptakarya	48.675.000,00	(3.076.783.000,00)	1. Koreksi tambah berupa ATB yang belum tercatat pada KIB 2. Koreksi kurang berupa pencatatan ganda tanah yang akan diserahkan dalam proses P3D (sudah sertifikat dan belum sertifikat)
5	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Tata Ruang	-	(378.255.000,00)	Mutasi antar SKPD
6	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.000.000,00	-	Terdapat kesalahan input ATB pada tahun 2023 yang berakibat pada ketidaksesuaian rincian pada SIMAset dengan dokumen pendukung yang diupload
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	-	(159.770.000,00)	Terdapat pencatatan ganda atas pengadaan barang di TA 2018 yang seharusnya di catat di KIB B saja namun dicatat di KIB C juga. Sehingga kemudian dimasukkan sebagai koreksi kurang aset lainnya di TA 2024
8	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	-	(501.030.560,00)	Terdapat DED Gapura Telaga Merdada dan DED lahan parkir Aswatama yang dibangun tahun 2018 dan sudah dihibahkan ke Kab. Banjarnegara pada tahun 2022 namun belum dihapuskan hingga tahun 2024
9	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	(1.108.440.000,00)	Koreksi kurang ternak mati, dijual,afkir dan penghapusan
10	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	261.901.725,00	(3.484.484.000,00)	1. Koreksi tambah teridentifikasinya ATB berupa aplikasi/software yang belum tercatat pada KIB 2. Koreksi kurang peralatan dan mesin berupa peralatan produksi animasi yang telah diserahkan kepada IKITAS pada tahun 2017
11	Sekretariat Daerah	1.649.530.535,00	-	Teridentifikasinya BMD berupa ATB Aplikasi/Software yang belum tercatat dalam SIMAset
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	(24.560.000,00)	Mutasi antar SKPD
13	Badan Riset dan Inovasi Daerah	24.560.000,00	-	Mutasi antar SKPD
14	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	49.395.000,00	-	Hasil inventarisasi terdapat 1 aplikasi yang belum tercatat sebagai aset dan baru dilakukan pencatatan di tahun 2024
15	Badan Kepegawaian Daerah	517.401.820,00	-	Hasil inventarisasi terdapat 12 (dua belas) aplikasi yang belum tercatat sebagai aset dan adanya kapitalisasi aplikasi
16	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	-	(2.425.000.000,00)	Hibah Bangunan ke BNN pada tahun 2019, namun baru dihapuskan pada tahun 2024
Jumlah		**2.561.464.080,00**	**(14.434.202.828,00)**	

5.6.3.8 Koreksi/Penyesuaian Amortisasi (Rp1.906.262.518,40)

Koreksi/Penyesuaian Amortisasi sebesar (Rp1.906.262.518,40) merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset tak berwujud dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya	(48.675.000,00)	-	(48.675.000,00)	-
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-	(5.012.834,00)	5.012.834,00	(100,00)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	(2.250.000,00)	2.250.000,00	(100,00)
4	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(2.333.333,33)	(5.333.333,33)	3.000.000,00	(56,25)
5	Dinas Koperasi dan UMKM	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	(100,00)
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(195.469.193,33)	-	(195.469.193,33)	-
7	Sekretariat Daerah	(1.294.906.818,41)	-	(1.294.906.818,41)	-
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	24.560.000,00	-	24.560.000,00	-
9	Badan Riset dan Inovasi Daerah	(24.560.000,00)	-	(24.560.000,00)	-
10	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	(15.641.750,00)	-	(15.641.750,00)	-
11	Badan Kepegawaian Daerah	(349.236.423,33)	(58.905.250,00)	(290.331.173,33)	492,88
	Jumlah	**(1.906.262.518,40)**	**(68.501.417,33)**	**(1.837.761.101,07)**	**2.682,81**

5.6.3.9 Koreksi/Penyesuaian Penyusutan Aset Lainnya Rp7.888.103.507,60

Koreksi/Penyesuaian penyusutan aset lainnya sebesar Rp7.888.103.507,60 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian aset lainnya dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	932.593.380,00	237.950.000,00	694.643.380,00	291,93
2	Dinas Kesehatan	1.915.643.888,00	-	1.915.643.888,00	-
3	RSUD Dr. Moewardi Surakarta	34.211.440,00		34.211.440,00	-
4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	20.770.100,00	-	20.770.100,00	-
5	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	59.288.616,26	-	59.288.616,26	-
6	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.442.304.416,67	-	3.442.304.416,67	-
7	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.483.291.666,67	10.105.273,50	1.473.186.393,17	14.578,39
	Jumlah	**7.888.103.507,60**	**248.055.273,50**	**7.640.048.234,10**	**3.079,98**

5.6.3.10 Koreksi/Penyesuaian Hutang Rp5.100.000,00

Koreksi/Penyesuaian Hutang sebesar Rp5.100.000,00 merupakan dampak dari adanya koreksi/penyesuaian Hutang dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	2024	2023	Kenaikan/Penurunan	Tren %
1	RSUD Dr. Margono Soekarjo Purwokerto	-	0,01	(0,01)	(100,00)
2	RSUD Dr. Rehatta Jepara	5.100.000,00	3.101.677,30	1.998.322,70	64,43
	Jumlah	**5.100.000,00**	**3.101.677,31**	**1.998.322,69**	**64,43**

Koreksi/Penyesuaian Hutang merupakan Koreksi/Penyesuaian Hutang pada RSUD Dr. Rehatta Jepara disebabkan oleh perubahan cara perhitungan pendapatan diterima dimuka yang menjadi pendapatan di

tahun berjalan. Dari yang semula menggunakan basis bulanan di TA 2023 menjadi basis harian di TA 2024 sehingga dilakukan penyesuaian saldo akhir 2023 sebesar selisih perhitungan antara basis bulanan dan harian sebesar Rp5.100.000,00.

5.6.4 Ekuitas Akhir **Rp39.704.505.567.071,59**

Ekuitas akhir sebesar Rp39.704.505.567.071,59 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	Tren %
1	Ekuitas Akhir	39.704.505.567.071,59	40.503.023.207.483,67	(798.517.640.412,08)	(1,97)
	Jumlah	**39.704.505.567.071,59**	**40.503.023.207.483,67**	**(798.517.640.412,08)**	**(1,97)**

BAB 6
PENJELASAN ATAS
INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 GAMBARAN UMUM

Luas dan batas wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,68 km2 atau sebesar25,34 persen dari luas pulau Jawa atau 1,17 persen dari luas wilayah Indonesia.secara administrasi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota yang meliputi 29 kabupaten dan 6 kota, serta terdiri dari 576 kecamatan, 7.809 desa, dan 753 kelurahan. Provinsi Jawa Tengah juga dibagi atas 8 wilayah pengembangan yang terdiri dari Wilayah Pengembangan (WP) Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong, dan Bregasmalang. Secara administrasi wilayah Provinsi JawaTengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur pada bagian timur, Provinsi DIY pada bagian selatan, Provinsi Jawa Barat pada bagian barat, Laut Jawa pada bagian utara, dan Samudera Hindia pada bagian Selatan. Wilayah Provinsi Jawa Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat dengan perbatasan Jawa Barat), serta Kepulauan Karimunjawa di Laut Jawa.

Letak dan kondisi geografis Jawa Tengah merupakan provinsi yang terletak di tengah Pulau Jawa yang secara geografis berada di 5°40' – 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' – 111°30' Bujur Timur. Panjang garis pantai Jawa Tengah terbentang sejauh 791,76 km yang terdiri dari pantai utara sepanjang 502,69 km dan pantai selatan sepanjang 289,07 km. Wilayah Provinsi Jawa Tengah secara topografi sekitar 53 persen berada pada ketinggian 0-99 m dpl yaitu dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah, serta dataran tinggi dan pegunungan yang membujur di wilayah tengah. Kemiringan lereng di wilayah Jawa Tengah beragam meliputi lahan dengan kemiringan 0-2 persen sebesar 38 persen; lahan dengan kemiringan 2-15 persen sebesar 31 persen; lahan dengan kemiringan 15-40 persen sebesar 19 persen; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40 persen sebesar 12 persen dari total wilayah.

Kondisi geologis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi fisiografis yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 5 (lima) gunung api aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), dan Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal). Gunung api di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat ancaman bahaya vulkanik tinggi sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol yang tersebar di seluruh wilayah, jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi. Potensi sumber daya mineral yang tersebar di Jawa Tengah meliputi 32 jenis mineral non logam (Phospat, Asbes, Talk, Mika, Leusite, Oker, Granit, Dasit, Diorit, Batu Setengah Permata, Pasir Kuarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonite, Batuapung, Trass, Diatome,

Marmer, Batu gamping, Dolomit, Basal, Andesit, Tanah Liat, Pasir, Tanah urug, Kalsit, Zeolit, Sirtu, Batu Sabak, *Toseki*), serta 7 jenis mineral logam (Pasir Besi, Mangaan, Emas, Barit, Belerang, Pirit, dan Galena).

Kondisi hidrologi Jawa Tengah memiliki Daerah Aliran Sungai (DAS) yang cukup banyak dengan 18 DAS diantaranya menjadi DAS prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono. Demikian juga sungai yang melintasi wilayah Jawa Tengah juga cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain.

Suhu udara di Jawa Tengah tahun 2024 berkisar antara 22,0°C sampai dengan 35,2°C. Kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 74,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Curah hujan tertinggi tercatat di Stasiun Meteorologi Cilacap yaitu sebesar 4.661 mm^3 dan hari hujan terbanyak tercatat di Stasiun Meteorologi Banjarnegara sebanyak 249 hari.

Data BPS dalam Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2024 menyebutkan bahwa jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan proyeksi interim data hasil Sensus Penduduk dari Badan Pusat Statistik sebanyak 37.540.962 jiwa, terdiri dari pria sebanyak 18.866.423 jiwa dan wanita sebanyak 18.674.539 jiwa, dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 0,81 persen. Penduduk terbanyak berada di Kabupaten Brebes sebanyak 2.026.457 jiwa. Sedangkan wilayah dengan jumlah penduduk terendah di Jawa Tengah adalah Kota Magelang sebanyak 122.150 jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 101,02

Sementara itu kepadatan penduduk di Provinsi Jawa Tengah menurut data BPS tercatat sebanyak 1.138 jiwa/km^2. Wilayah terpadat penduduknya adalah Kota Surakarta dengan kepadatan penduduk sebanyak 11.878 jiwa/km^2, diikuti dengan Kota Tegal sebanyak 7.996 jiwa/km2. Wilayah dengan kepadatan penduduk paling rendah yaitu Kabupaten Blora dengan kepadatan penduduk sebanyak 495 jiwa/km^2. Melihat kondisi tersebut dapat menggambarkan bahwa wilayah kota lebih padat dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Selain itu sebaran penduduk di Jawa Tengah umumnya terkonsentrasi di wilayah kota, perkotaan, dan pusat-pusat kota baik kabupaten ataupun kota. Hal tersebut dilihat juga dari sebaran kawasan permukiman dimana kawasan permukiman yang cukup padat berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), Salatiga Raya (termasuk wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran, Suruh), Solo Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

Selanjutnya berdasarkan data BPS komposisi penduduk berdasarkan kelompok usia di tahun 2023 maka diketahui bahwa penduduk Jawa Tengah masih berada pada fase bonus demografi dimana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 25,62 juta orang dan non produktif (0-14 tahun dan 64 tahun ke atas) sebanyak 8,44 juta orang. Hal tersebut menggambarkan kondisi angka beban ketergantungan sebesar 32,94 persen yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 32 penduduk usia non produktif.

6.2 SEJARAH PERKEMBANGAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sudah dikenal sejak jaman sebelum merdeka didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku pada saat itu.

1) Jaman Penjajahan Belanda

Berdasarkan *Wet houdende decentralisatie van het Bestuur in Nederland - Indie* (*Decentralisatie Wet* 1903), maka pemerintahan di Jawa dan Madura terbagi atas *Gewes*t (Karesidenan), *Afdeeling/Regentschap* (Kabupaten), *District* / *Standgeemente* (Kota praja), dan *Oderdistrict* (Kecamatan).

2) Jaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukannya, Jepang mengadakan perubahan Tata Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1942 (Tahun Jepang 2062) yang menetapkan bahwa seluruh *Jawa kecuali Vorstenkendeh* (Kerajaan-kerajaan) terbagi dalam wilayah *Syuu* (Karesidenan), *Si* (Kotapraja), *Ken* (Kabupaten), *Gun* (Distrik), *Son Conder Distrik dan Ku* (Kelurahan).

3) Setelah Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945

Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945, diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 yang menetapkan Pembentukan Provinsi Jawa Tengah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, dinyatakan berlaku pada tanggal 15 Agustus 1950. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2004 ditetapkan Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1950.

6.3 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH

Provinsi Jawa Tengah sejak merdeka sampai dengan sekarang telah dipimpin oleh Kepala Pemerintahan sebanyak 16 (enam belas) kali yaitu :

1. R. Pandji Soeroso, pada Tahun 1945;
2. KRT Mr Wongsonegoro, Tahun 1945 s/d 1949;
3. R. Boedijono, Tahun 1949 s/d 1954;
4. RMT. Mangunnegoro, Tahun 1954 s/d 1958;
5. R. Soekardji Mangoen Koesoemo, Tahun 1958 s/d 1960;
6. Mochtar, Tahun 1960 s/d 1966;
7. Moenadi, Tahun 1966 s/d 1974;
8. Soepardjo Rustam, Tahun 1974 s/d 1983;
9. H.M. Ismail, Tahun 1983 s/d 1993;
10. H. Soewardi, Tahun 1993 s/d 1998;
11. H. Mardiyanto, Tahun 1998 s/d Agustus 2007;
12. H. Ali Mufiz, Agustus 2007 s/d 22 Agustus 2008;
13. H. Bibit Waluyo, Agustus 2008 s/d Agustus 2013;
14. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2013 s/d 2018;
15. H. Ganjar Pranowo, Agustus 2018 s/d 2023;
16. Komjen Pol (Purn) Drs. Nana Sudjana A.S., M.M September 2023 s/d Februari 2025; dan
17. Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K Februari 2025 s/d sekarang

DPRD Provinsi Jawa Tengah mulai Tahun 1955 sampai sekarang dipimpin 11 (sebelas) orang, yaitu:

1. H. Imam Sofwan, Tahun 1955 s/d 1971;
2. Parwoto, Tahun 1971 s/d 1977;
3. H. Widarto, Tahun 1977 s/d 1982;
4. Ir. H. Soekorahardjo, Tahun 1982 s/d 1992;
5. Drs. H. Soeparto Tjitrodihardjo, Tahun 1992 s/d 1997;
6. Alip Pandoyo, Tahun 1997 s/d 1999;
7. Mardijo, Tahun 1999 s/d 2004;
8. H. Murdoko SH, Tahun 2004 s/d 2012;
9. Drs. Rukma Setya Budi MM, Tahun 2012 s/d 2019;
10. H. Bambang Kusriyanto. B.Sc, Tahun 2019 s/d 2023;
11. H. SUMANTO, SH Tahun 2023 s/d 2024; dan
12. H. SUMANTO, SH Tahun 2024 s/d sekarang.

6.4 VISI, MISI & PROGRAM UNGGULAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026

Logframe kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah untuk tahun 2024-2026
Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera dan Lestari

Tujuan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Meningkatnya perekonomian tangguh yang berdaya saing dan berkelanjutan
2. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter dan adaptif
3. Meningkatnya ketahanan sumber daya alam dan lingkungan hidup
4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang dinamis

6.5 KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI LANDASAN KEGIATAN OPERASIONALNYA

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan daerah mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Pertaturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024;
16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024
17. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024;
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

BAB 7
PENUTUP

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mewajibkan pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Selanjutnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut disampaikan Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ini dapat berguna bagi pihak-pihak pengguna laporan keuangan serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GUBERNUR JAWA TENGAH

AHMAD LUTHFI